# RKPD KABUPATEN KERINCI 2027

"Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera"



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);*

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 518);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Perencaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2025).

Memperhatikan : Surat Kepala Bappeda Provinsi Jambi Nomor 'S-2288/Bappeda-2.1/VI/2026' perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelanggaraan pemerintah daerah.
3. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia.
4. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Kerinci dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2027, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027, yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Tujuan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Sasaran adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatanan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Tahun 2027 digunakan sebagai:
   a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
   b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
   c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
   d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Pasal 3

(1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perencanaan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2027 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 JUNI 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 JUNI 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 11

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 menjadi salah satu dokumen awal dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi bagian integral upaya pencapaian tujuan jangka panjang sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045.

Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 difokuskan pada Bersinergi Membangun Ekonomi yang Inklusif, SDM Unggul dan Infrastruktur Andal demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan melalui tahapan yang partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan sinkronisasi, integrasi, serta keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab berbagai tantangan Pembangunan serta mendorong akselerasi pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kerinci.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan daerah yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

BUPATI KERINCI

MONADI

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... xvi
BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... 6
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... 11
1.4. Maksud dan Tujuan ..... 12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... 12
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 19
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... 19
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... 19
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 55
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... 77
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... 138
2.1.5. Identifikasi Risiko Pembangunan ..... 164
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... 165
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan ..... 165
2.2.2. Evaluasi Realisasi RPJMD ..... 712
2.2.3. Evaluasi Capaian Program Unggulan ..... 728
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... 733
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 734
2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ..... 745
2.4. Capaian SPM ..... 751
2.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... 759
2.6. Inovasi Daerah ..... 870
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... 901
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 901
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional ..... 901

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi ..... 903
3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kerinci ..... 905
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ..... 919
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 921
3.2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah ..... 921
3.2.2. Disiplin Anggaran ..... 922
3.2.3. Keadilan Anggaran ..... 922
3.2.4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran ..... 922
3.2.5. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 922
3.2.6. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... 925
3.2.7. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah ..... 929
3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..... 939
3.3.1. Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan ..... 939
3.3.2. Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan ..... 941
3.3.3. Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera ..... 942
3.3.4. Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas ..... 942
3.3.5. Tujuan V: Kesetaraan Gender ..... 943
3.3.6. Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak ..... 944
3.3.7. Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau ..... 945
3.3.8. Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ..... 945
3.3.9. Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur ..... 947
3.3.10. Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan ..... 948
3.3.11. Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan ..... 949
3.3.12. Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. ..... 950
3.3.13. Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim ..... 951
3.3.14. Tujuan XIV: Ekosistem Daratan ..... 951

3.3.15. Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh ..... 952
3.3.16. Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ..... 953
3.3.17. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2027 ..... 954
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027 ..... 956
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 956
4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... 964
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... 964
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027 ..... 964
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2027 ..... 964
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 990
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 995
6.1. Indikator Kinerja Utama ..... 995
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah ..... 997
BAB 7 PENUTUP ..... 1029
7.1. Kaidah Pelaksanaan ..... 1029
7.2. Kesimpulan ..... 1033

# DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Daftar Dokumen yang Memiliki Hubungan dengan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 ..... 11

Tabel II. 1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 20

Tabel II. 2 Data Klimatologi Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 25

Tabel II. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci ..... 25

Tabel II. 4 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 27

Tabel II. 5 Luas Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 29

Tabel II. 6 Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (Ton) Tahun 2025 ..... 31

Tabel II. 7 Populasi Ternak di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 33

Tabel II. 8 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 35

Tabel II. 9 Potensi Pertambangan di Kabupaten Kerinci ..... 37

Tabel II. 10 Objek Wisata di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 38

Tabel II. 11 Kawasan Potensi Energi Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 40

Tabel II. 12 Jumlah Industri Pengolahan Besar Sedang dan Tenaga Kerja, Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 42

Tabel II. 13 Jumlah Perusahaan Konstruksi Skala Menengah Besar Menurut Klasifikasi Industri dan Kecamatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 42

Tabel II. 14 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kerinci (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025 ..... 56

Tabel II. 15 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan target RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 58

Tabel II. 16 Data Wisata Budaya Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 74

Tabel II. 17 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 76

Tabel II. 18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 81

Tabel II. 19 Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 81

Tabel II. 20 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 83

Tabel II. 21 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 83

Tabel II. 22 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Kerinci ..... 84

Tabel II. 23 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 89

Tabel II. 24 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 89

Tabel II. 25 Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 90

Tabel II. 26 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 .....91

Tabel II. 27 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 .....92

Tabel II. 28 Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 .....93

Tabel II. 29 Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 .....93

Tabel II. 30 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....94

Tabel II. 31 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 .....95

Tabel II. 32 Jumlah Kasus Penemuan dan Pengobatan TBC Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....97

Tabel II. 33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 .....97

Tabel II. 34 Jumlah Kasus Penyakit DBD Per 100.000 Penduduk Tahun 2021-2024 .....98

Tabel II. 35 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....99

Tabel II. 36 Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....103

Tabel II. 37 Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....103

Tabel II. 38 Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....104

Tabel II. 39 Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....105

Tabel II. 40 Jumlah bencana Alam di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....106

Tabel II. 41 Jumlah PPKS Yang Menerima Bantuan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....107

Tabel II. 42 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15 tahun keatas di Kabupaten Kerinci Tahun 2025.....108

Tabel II. 43 Ketersedian Pangan Utama Kabupaten Kerinci (Ton).....111

Tabel II. 44 Produksi Pangan Utama Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....111

Tabel II. 45 Pola Pangan Harapan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....112

Tabel II. 46 Penanganan Sampah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....113

Tabel II. 47 Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....115

Tabel II. 48 TPS 3R Kabupaten Kerinci.....115

Tabel II. 49 Penataan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....116

Tabel II. 50 Jumlah BUMDes di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....117

Tabel II. 51 Perkembangan Sektor Koperasi di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....121

Tabel II. 52 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2021-2025.....122

Tabel II. 53 Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2021-2025.....122

Tabel II. 54 Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....123

Tabel II. 55 Prestasi bidang Olah Raga Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....124

Tabel II. 56 Jumlah Berita Sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....126

Tabel II. 57 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....127

Tabel II. 58 Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....127

Tabel II. 59 Kondisi Kearsipan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....129

Tabel II. 60 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....129

Tabel II. 61 Objek Wisata dan Jenisnya di Kabupaten Kerinci Tahun 2025.....130

Tabel II. 62 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (ha), 2021–2025.....132

Tabel II. 63 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (kuintal), 2021–2025.....133

Tabel II. 64 Populasi Ternak Besar (Ekor) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....135

Tabel II. 65 Populasi Ternak Kecil (Ekor) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....136

Tabel II. 66 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....136

Tabel II. 67 Produksi Daging Ternak (kg) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....137

Tabel II. 68 Produksi Telur (kg) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....137

Tabel II. 69 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.....138

Tabel II. 70 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Kerinci (Rupiah) Tahun 2024-2025 ..... 139

Tabel II. 71 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Kerinci (Rupiah) Tahun 2024-2025 ..... 140

Tabel II. 72 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 142

Tabel II. 73 Rincian dan Rata-rata Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2021 -2025 ..... 143

Tabel II. 74 Rencana Pola Ruang di Kabupaten Kerinci ..... 144

Tabel II. 75 Jumlah Bank Umum per Kecamatan dibandingkan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 145

Tabel II. 76 Jumlah Rumah Makan/Restoran pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Kerinci ..... 146

Tabel II. 77 Daftar Penginapan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 148

Tabel II. 78 Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 151

Tabel II. 79 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2025 ..... 153

Tabel II. 80 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 153

Tabel II. 81 Jenis Perizinan dan Lama Proses Perizinan Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 154

Tabel II. 82 Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 159

Tabel II. 83 Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 160

Tabel II. 84 Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Triwulan IV ..... 166

Tabel II. 85 Realisasi Program atau Kegiatan Yang Memenuhi, Tidak Memenuhi dan Melebihi Target Kinerja Hasil atau Keluaran yang Direncanakan Triwulan IV Evaluasi RKPD Tahun 2025 ..... 174

Tabel II. 86 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 712

Tabel II. 87 Capaian Program Unggulan Kabupetan Kerinci Tahun 2025 ..... 729

Tabel II. 88 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 734

Tabel II. 89 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kerinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 ..... 736

Tabel II. 90 Angka Kematian Ibu Tahun 2021-2025 ..... 738

Tabel II. 91 Angka Kematian Bayi Tahun 2021-2025 ..... 739

Tabel II. 92 Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ..... 742

Tabel II. 93 Persentase Jaringan Jalan Kondisi Mantap Tahun 2021-2025 ..... 743

Tabel II. 94 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2025 ..... 746

Tabel II. 95 Realisasi SPM Bidang Pendidikan ..... 753

Tabel II. 96 Realisasi SPM Bidang Kesehatan .....754

Tabel II. 97 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum .....755

Tabel II. 98 SPM Bidang Perumahan Rakyat .....756

Tabel II. 99 Realisasi SPM SATPOL PP .....757

Tabel II. 100 Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD) .....757

Tabel II. 101 Target Pencapaian SPM Damkar .....758

Tabel II. 102 Realisasi SPM Bidang Sosial .....759

Tabel II. 103 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 .....760

Tabel II. 104 Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Ekonomi Pertanian Tahun 2027 .....837

Tabel II. 105 Pokok-Pokok Pikihran DPRD yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Tahun 2027 .....851

Tabel II. 106 Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan Tahun 2027 .....855

Tabel II. 107 Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 .....871

Tabel III. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2021-2025 .....907

Tabel III. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 .....910

Tabel III. 3 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Menurut Lapangan

Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2025 ..... 912

Tabel III. 4 PDRB Kabupaten Kerinci Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah) Tahun 2021-2025 ..... 913

Tabel III. 5 Realisasi APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 925

Tabel III. 6 Realisasi APBD Kabupaten Kerinci Tahun2025 ..... 928

Tabel III. 7 Realisasi APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ..... 930

Tabel III. 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025 ..... 932

Tabel III. 9 Indikator TPB Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan ..... 940

Tabel III. 10 Indikator TPB Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan ..... 941

Tabel III. 11 Indikator TPB Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera ..... 942

Tabel III. 12 Indikator TPB Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan Berkualitas ..... 943

Tabel III. 13 Indikator TPB Tujuan V: Kesetaraan Gender ..... 943

Tabel III. 14 Indikator TPB Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak ..... 944

Tabel III. 15 Indikator TPB Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau ..... 945

Tabel III. 16 Indikator TPB Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ..... 946

Tabel III. 17 Indikator TPB Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur ..... 947

Tabel III. 18 Indikator TPB Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan ..... 948

Tabel III. 19 Indikator TPB Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan ..... 949

Tabel III. 20 Indikator TPB Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab ..... 950

Tabel III. 21 Indikator TPB Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim ..... 951

Tabel III. 22 Indikator TPB Tujuan XIV: Ekosistem Daratan ..... 952

Tabel III. 23 Indikator TPB Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh ..... 953

Tabel III. 24 Indikator TPB Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ..... 954

Tabel III. 25 Capaian Makro Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dan Target Tahun 2027 ..... 955

Tabel IV. 1 Konsistensi Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 ..... 959

Tabel IV. 2 Program Unggulan Kabupaten Kerinci ..... 966

Tabel IV. 3 Tabel Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kerinci ..... 971

Tabel IV. 4 Intervensi Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kerinci Tahun 2027 ..... 984

Tabel V. 1 Rekapitulasi Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah ..... 990

Tabel V. 2 Risiko Fiskal dan Strategi Mitigasi Pendanaan Pembangunan Daerah ..... 992

Tabel VI. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 .....995

Tabel VI. 2 Indikator Program Prioritas pada Setiap Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah .....998

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah ....3

Gambar II. 1 Peta Kabupaten Kerinci ....20

Gambar II. 2 Peta Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Kerinci ....26

Gambar II. 3 Peta Rawan Banjir di Kabupaten Kerinci....44

Gambar II. 4 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kerinci....45

Gambar II. 5 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kerinci....46

Gambar II. 6 Peta Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Kerinci....48

Gambar II. 7 Peta Rawan Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Kerinci....49

Gambar II. 8 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....49

Gambar II. 9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....50

Gambar II. 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....51

Gambar II. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....52

Gambar II. 12 Rasio Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....52

Gambar II. 13 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....53

Gambar II. 14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2026-2030....54

Gambar II. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025....57

Gambar II. 16 Tingkat Inflasi Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 60

Gambar II. 17 PDRB Per Kapita atas harga berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025 ..... 61

Gambar II. 18 Indeks Gini Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 62

Gambar II. 19 Capaian Indeks Gini Kabupaten Kerinci, Provinsi, dan Nasional Tahun 2025 ..... 62

Gambar II. 20 Rasio Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 63

Gambar II. 21 Rasio Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Tahun 2021-2025 ..... 64

Gambar II. 22 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 66

Gambar II. 23 Garis Kemiskinan Kabupaten Kerinci (dalam rupiah) Tahun 2021-2025 ..... 67

Gambar II. 24 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... 68

Gambar II. 25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci (ribu jiwa) Tahun 2021-2025 ..... 69

Gambar II. 26 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 70

Gambar II. 27 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 71

Gambar II. 28 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 72

Gambar II. 29 Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 (%) ..... 77

Gambar II. 30 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 78

Gambar II. 31 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 80

Gambar II. 32 Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 87

Gambar II. 33 Indeks Literasi Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 88

Gambar II. 34 Prevalensi Stunting Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 96

Gambar II. 35 Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 99

Gambar II. 36 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 101

Gambar II. 37 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 102

Gambar II. 38 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 109

Gambar II. 39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 114

Gambar II. 40 Jumlah Website Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 118

Gambar II. 41 Indeks SPBE Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 119

Gambar II. 42 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 120

Gambar II. 43 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 128

Gambar II. 44 Indeks Literasi Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 128

Gambar II. 45 Persentase Akses Air Bersih Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 152

Gambar II. 46 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 161

Gambar II. 47 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 162

Gambar II. 48 Skor PPH Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 163

Gambar III. 1 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2021-2025 ..... 904

Gambar III. 2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... 906

Gambar III. 3 PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 909

Gambar III. 4 Laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 911

Gambar III. 5 Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi Per Triwulan Tahun 2025 ..... 915

Gambar III. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 917

Gambar III. 7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... 918

Gambar III. 8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 ..... 940

Gambar III. 9 Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... 946

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Tahapan Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah).

RKPD menjabarkan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan dan berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 berfokus pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, tema RKPD Provinsi Jambi difokuskan pada Akselerasi Produktivitas, Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing.

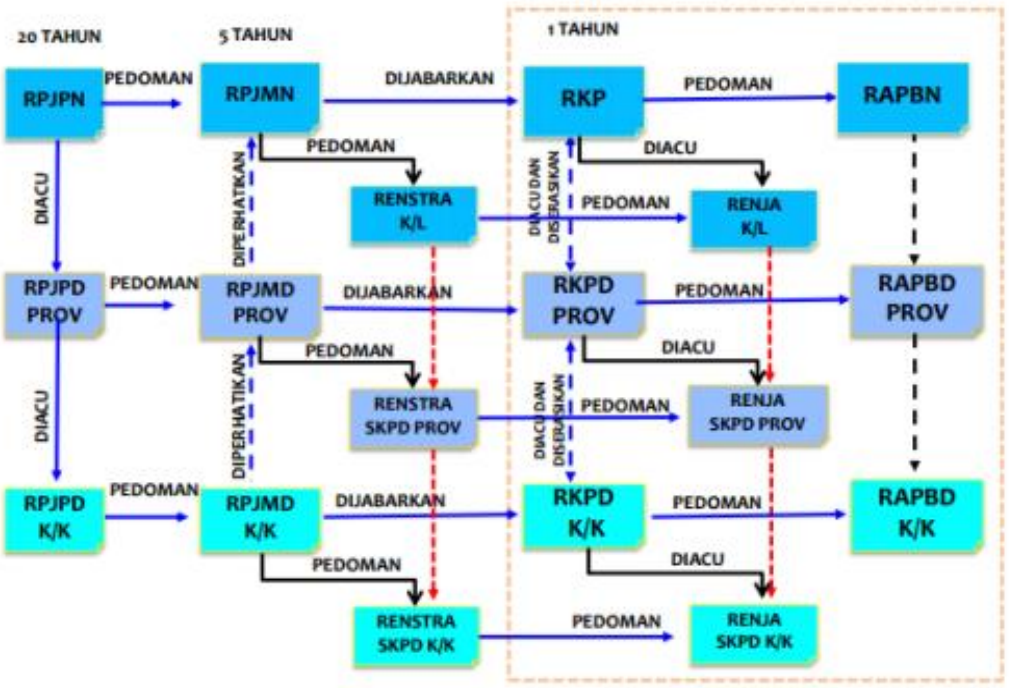
Pemerintah Kabupaten Kerinci wajib menyusun tema RKPD Tahun 2027 dengan mengacu pada tema RKPD Provinsi Jambi dan RKP guna memastikan pencapaian tema nasional. Sehingga Kabupaten Kerinci mengangkat tema yaitu Bersinergi Membangun Ekonomi yang Inklusif, SDM Unggul dan Infrastruktur Andal demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program *(money follow program)* melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 ini wajib memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen tata ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci khususnya bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Kerinci akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027. Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.

**Gambar I. 1**
**Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah**




Berdasarkan Gambar di atas, RPJMN dan RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027 merupakan tahun ketiga implementasi dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan memastikan kesinambungan pencapaian visi daerah selama dua puluh tahun. RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2027 menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD

Tahapan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD, meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD-RI.

2. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

a. Pendahuluan
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
g. Penutup

Rancangan awal dikonsultasi publikkan untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD

berdasarkan hasil verifikasi renja perangkat daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja perangkat daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kerinci dan penyelarasan dengan prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

   Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, Forum OPD dan musrenbang Kabupaten.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD

   RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Daerah Provinsi Jambi ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041. Lembaran Lepas Sekretariat Negara);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Lemabaran Lepas Sekretariat Negara);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Dearah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
27. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2027;
31. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1).

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 memiliki hubungan yang terkait dengan dokumen-dokumen lain baik dengan dokumen antar tingkat pemerintahan, maupun dengan dokumen antar periode. Hubungan tersebut ada karena Dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 perlu memedomani dan memperhatikan dokumen-dokumen lain untuk memastikan terwujudnya perencanaan Pembangunan yang selaras dan berkesinambungan. Adapun daftar dokumen dan sifat hubungannya dijelaskan pada Tabel berikut.

**Tabel I. 1**
**Daftar Dokumen yang Memiliki Hubungan dengan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027**

| No | Dokumen | Hubungan |
|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 | Penyusunan RKPD berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional |
| 2 | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 | Penyusunan serta penetapan lokasi Program dan Kegiatan pada RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan pada RTRW. |
| 3 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027 | Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Jambi, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci. |
| 3 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 | RKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan/atau fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. |
| 4 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 | RKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJPD yang berfungsi menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan/atau fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. |
| 5 | Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah | RKPD Kabupaten Kerinci menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah. |

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2027 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2027 adalah untuk:

1. Agar tercapainya sasaran, visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang efektif dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 antara DPRD Kabupaten Kerinci dengan Bupati Kerinci yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027;
3. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi:

# BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

Pada bab penutup berisi Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan dari beberapa poin penting yang tercantum pada RKPD.

# BAB 2
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

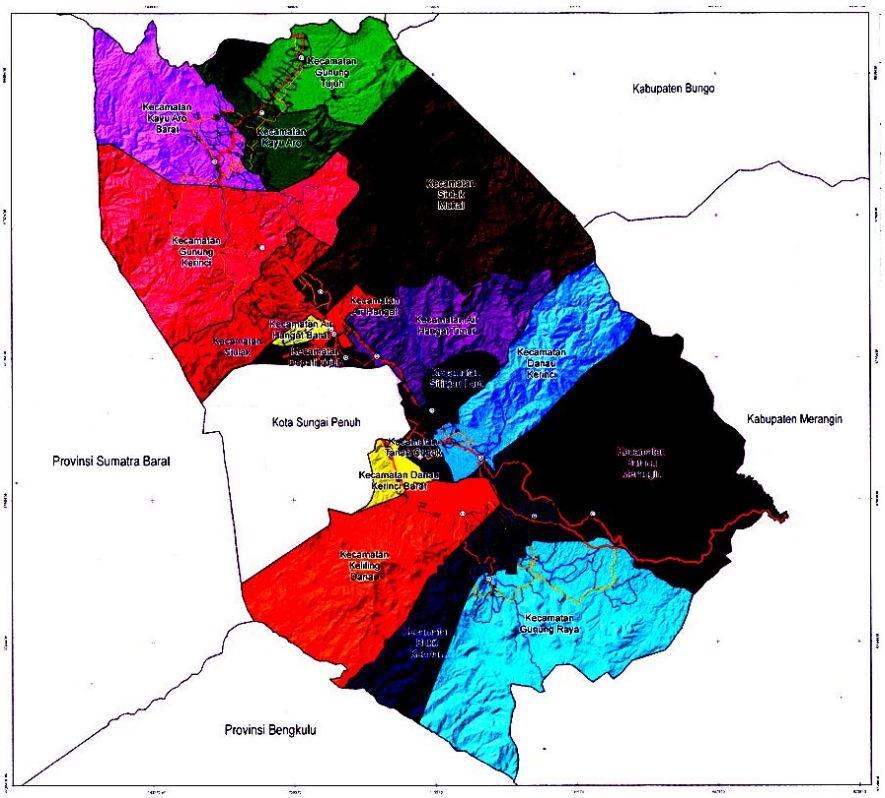
**a. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah**

Kabupaten Kerinci berdasarkan karakteristik wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga kawasan utama, yaitu kawasan pegunungan di sekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. Kawasan kedua yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci. Sedangkan kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang mengelilingi wilayah Kota Sungai Penuh.

Wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana Gambar II.1, memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Merangin Provinsi Jambi
4. Sebelah Barat : Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar II. 1**
**Peta Kabupaten Kerinci**




Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

## b. Luas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi setelah pemekaran dengan luas wilayah 344.518 ha. Memiliki 18 wilayah kecamatan, dengan luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Batang Merangin (14,65%), Kecamatan Siulak Mukai (14,15%), dan Kecamatan Gunung Raya (11,88%). Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel II.1.

**Tabel II. 1**
**Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| No | Kecamatan | Luas ($km^2$) | Persentase Terhadap Luas Kab. Kerinci (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Raya | 408,95 | 11,9 |
| 2 | Bukit Kerman | 195,56 | 5,7 |
| 3 | Batang Merangin | 504,73 | 14,7 |
| 4 | Keliling Danau | 328,79 | 9,5 |

| No | Kecamatan | Luas ($km^2$) | Persentase Terhadap Luas Kab. Kerinci (%) |
|---|---|---|---|
| 5 | Danau Kerinci Barat | 30,69 | 0,9 |
| 6 | Danau Kerinci | 215,82 | 6,3 |
| 7 | Tanah Cogok | 20,3 | 0,6 |
| 8 | Sitinjau Laut | 53,4 | 1,5 |
| 9 | Air Hangat | 21,62 | 0,6 |
| 10 | Air Hangat Timur | 179,89 | 5,2 |
| 11 | Depati VII | 25,57 | 0,7 |
| 12 | Air Hangat Barat | 12,57 | 0,4 |
| 13 | Gunung Kerinci | 345,65 | 10,0 |
| 14 | Siulak | 124,52 | 3,6 |
| 15 | Siulak Mukai | 487,54 | 14,2 |
| 16 | Kayu Aro | 125,42 | 3,6 |
| 17 | Gunung Tujuh | 153,82 | 4,5 |
| 18 | Kayu Aro Barat | 210,37 | 6,1 |
| **Kerinci** | | **3.445,20** | **100,00** |

Sumber data: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Secara administratif, wilayah Kabupaten Kerinci terbagi dalam 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, yang memiliki keberagaman karakteristik seperti jumlah desa/kelurahan, luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, dan kondisi geografis, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Adanya keberagaman berbagai karakteristik wilayah antar kecamatan di Kabupaten Kerinci menyebabkan antar wilayah kecamatan dalam Kabupaten Kerinci masih menghadapi persoalan kesenjangan *(disparity)* dalam pembangunannya. Dalam kegiatan pembangunan jangka menengah lima tahunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci bertekad untuk mengurangi kesenjangan *(disparity)* pembangunan antar wilayah, menuju Kabupaten Kerinci yang lebih baik dan berkeadilan dengan memperhatikan keberimbangan pembangunan.

**c. Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi, di mana secara astronomis berada diperlintasan transportasi darat utama yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi

Sumatera Barat. Sementara itu, dari aspek geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara 01°40’ Lintang Selatan sampai dengan 02°26’ Lintang Selatan dan diantara 101°08’ Bujur Timur sampai dengan 101°50’ Bujur Timur.

Selain itu, secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan bergelombang sedang dan pegunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuannya terlihat ke arah utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan bergelombang sampai pegunungan, yang diikuti dengan variasi dan berbagai jenis batuan. Sedangkan ke arah selatan dijumpai morfologi dataran rendah dengan jenis batuan yang relatif sejenis.

**d. Topografi**

Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 1.000-1.500 mdpl dengan luas 152.757 Ha. Membentang dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya, dan berada pada ketinggian 500-3.805 mdpl. Sebagian wilayah Kabupaten Kerinci (81,22%) berada pada ketinggian di atas 1.000 mdpl, dan sisanya (18,78%) berada di dataran rendah 500-1.000 mdpl.

Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki 5 klasifikasi lereng, di mana sekitar 35,53 persen atau hampir separuh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan 15-25 persen. Sedangkan untuk wilayah datar dan relatif datar hanya mencapai 26,55 persen sampai dengan 24,75 persen terdiri dari kemiringan lebih kecil dari 8 persen dan 8-15 persen.

**e. Geologi**

Secara geologi, struktur dan karakteristik Kabupaten Kerinci berada dalam sistem patahan (sesar) Sumatera yaitu sesar semangko yang membelah pulau Sumatera menjadi dua bagian mulai dari Lampung sampai Aceh. Sebagian besar (98,44 persen) wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan yang membentang dari Gunung Kerinci

sampai Gunung Raya. Selain itu Kabupaten Kerinci terletak di daerah dataran rendah 500-1.000 mdpl seluas 72.246 Ha (17,20 persen) berketinggian antara 500-1.000 mdpl, dengan rata-rata curah hujan pertahun yang cukup tinggi. Wilayah Kabupaten Kerinci banyak dijumpai kawasan-kawasan perbukitan atau pegunungan yang merupakan bagian dari kawasan bukit barisan.

**f. Hidrologi**

Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah tangkapan air (*water catchment area*) bagi beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jambi dan Bengkulu. Beberapa DAS yang berhulu di wilayah Kerinci adalah DAS Batanghari, DAS Indrapura, DAS Silaut, serta DAS Majunto Selagan. Selain Daerah Aliran Sungai (DAS), kondisi hidrologi wilayah Kerinci memiliki mata air yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan, dan air tanah yang dipengaruhi oleh curah hujan. Pada dasarnya kondisi hidrologi Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah:

1. Air Permukaan (Sungai)

Wilayah Kerinci merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang Pantai barat Sumatera. Titik tertinggi adalah puncak Gunung Kerinci. Terdapatnya banyak dataran sepanjang Lembah Bukit Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada di sebelah barat dan timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kabupaten ini sehingga semua sungai yang mengalir kearah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci. Sungai yang terdapat di Kabupaten ini antara lain adalah : Sungai Sikai, Sungai Rumpun, Sungai Tanduk, Sungai Cubadak, Sungai Dadap, Sungai Simpang Tutup, Sungai Siulak Deras, Sungai Koto Rendah, Sungai Bukit Sembahyang, Sungai Dusun Baru, Sungai Pendung Mudik, Sungai Air Patah, Sungai Terung, Sungai Semurup, Sungai Tutung, Sungai Hiang, Sungai Batang Sangkir, Sungai Betung Kuning, Sungai Cupak, Sungai Raja Seleman, Sungai Talang Kemulung, Sungai Lubuk Pagar, Sungai Tapan, Sungai Air Jernih,

Sungai Air Terjun, Sungai Air Lintah, Sungai Talang Kemuning, Sungai Rawa Air Lingkat, Sungai Lumpur dan Sungai Renah Sako. Berdasarkan identifikasi peta Topografi untuk wilayah Kabupaten Kerinci terdapat sebanyak 88 sungai dan anak sungai, beberapa diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi, pembangkit Listrik, pemandian umum dan mencuci pakaian oleh masyarakat.

2. Mata Air

Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki mata air yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya. Keberadaan mata air ini dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih dan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan oleh pemerintah dan pihak swasta, selain itu potensi mata air ini juga dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk penyediaan kebutuhan air minum.

3. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah di Kabupaten Kerinci umumnya relatif dalam, sekitar >100 cm, hal ini berdasarkan peta land unit, LREP 1 tahun 1990, diketahui bahwa kedalaman tanah di Kabupaten Kerinci sebagian besar berada pada kedalaman 101-150 cm dengan luasan mencapai 76,99% dari luas wilayah.

**g. Klimatologi**

Kondisi klimatologis di Kabupaten Kerinci dilihat dari suhu rata-rata, kelembaban, tekanan udara, kecapatan angin, dan intensitas hujan. Selama periode tahun 2021-2025, curah hujan tahunan di Kabupaten Kerinci relatif sedang hingga tinggi. Hal ini yang menyebabkan rata-rata suhu 23,01$^0$C dengan kelembaban rata-rata 81,14%, serta tekanan udara berada pada kisaran 923,64 mb. Berdasarkan klasifikasi Iklim Schmidt-Ferguson, diketahui bahwa Tipe iklim di wilayah Kabupaten Kerinci dari tahun 2021-2025 diklasifikasikan ke dalam iklim Sangat Basah-Agak Basah

dengan nilai Q dalam rentang nilai 1 sampai 40. Data klimatologi Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 2**
**Data Klimatologi Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Uraian | Rata-Rata | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Suhu Rata-rata (°C) | 23 | 22,4 | 23,25 | 23,29 | 23,11 |
| Kelembaban Relatif (%) | 83 | 79,1 | 80 | 82,64 | 80,94 |
| Tekanan Udara (mb) | 923,5 | 922,1 | 923,63 | 925,73 | 923,23 |
| Kecepatan Angin (knot) | 4,5 | 4 | 3,32 | 1,77 | 4,15 |
| Curah Hujan ($mm^3$) | 313.1 | 76,6 | 154,53 | 191,46 | 104,48 |
| Jumlah Hari Hujan (hari) | 10,41 | 17 | 20 | 27,75 | 16,50 |

Sumber Data: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2026.

### 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan merupakan proses berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan. Pemanfaatan lahan adalah cara menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai cara, seperti pertanian, perumahan, rekreasi, komersial, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan Rencana Pola Ruang dalam RTRW kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044, diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Kerinci didominasi oleh Hutan (65,39%) dan Semak balukar/Padang Rumput 43,46%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.3.

**Tabel II. 3**
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci**

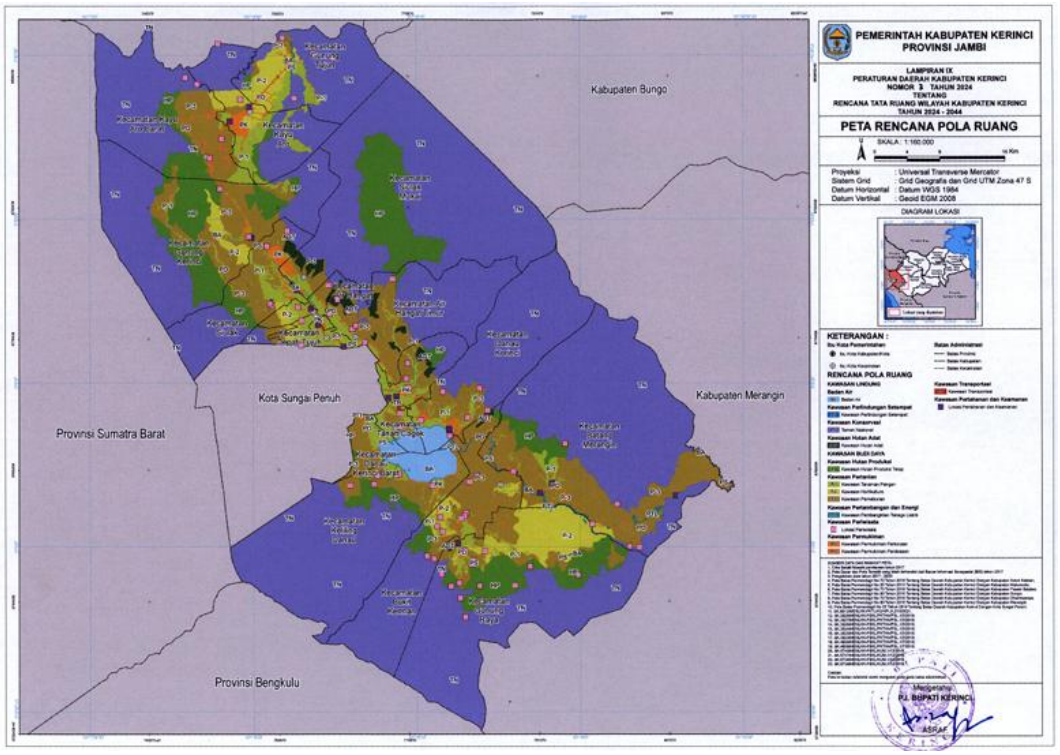
| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **1.** | Air Danau / Situ | 5.523 | 1,6 |
| **2.** | Air Empang | 28 | 0,01 |
| **3.** | Air Rawa | 285 | 0,08 |
| **4.** | Air Tawar Sungai | 355 | 0,1 |
| **5.** | Bandara | 21 | 0,01 |
| **6.** | Hutan | 225282 | 65,39 |
| **7.** | Pasir / Bukit Pasir Darat | 43 | 0,01 |

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **8.** | Perkebunan | 10.161 | 2,95 |
| **9.** | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 2.343 | 0,68 |
| **10.** | Sawah | 13.679 | 3,97 |
| **11.** | Semak belukar/padang rumput | 43.457 | 12,61 |
| **12.** | Tanah Kosong / Gundul | 84 | 0,02 |
| **13.** | Tegalan / Ladang | 43.259 | 12,56 |
| **Total** | | **344.520** | **100** |

Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

Sesuai Tabel di atas, diketahui bahwa masih terapat lahan kosong (84 Ha), Semak belukar/padang rumput (43.457 Ha) yang dapat dioptimalkan pemanfaatanya untuk pembangunan dimasa mendatang. Adapun Jenis Penggunaan Lahan di wilayah Kabupaten Kerinci disajikan pada Gambar II.2.

**Gambar II. 2**
**Peta Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Kerinci**




Potensi sumber daya alam di Kabupaten Kerinci dapat digolongkan ke dalam golongan bahan galian industri dan bahan galian golongan A meliputi 22 jenis bahan galian di mana keberadaan sumber daya yang ada

masih pada tahap sumber daya hipotetik, yaitu perkiraan sumber daya alam yang berpotensi ada di suatu daerah seperti mineral yang belum terkonfirmasi sepenuhnya dan masih tahap survei.

### a. Pertanian

Pertanian di Kabupaten Kerinci termasuk dalam sektor unggulan selain di bidang perikanan. Ketersediaan lahan yang luas dan sarana air yang memadai. Inilah yang menjadikan Kabupaten Kerinci memproritaskan pertanian sebagai leading sektor unggulan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Kerinci. Pertumbuhan sektor pertanian didukung oleh kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan pada dasarnya didominasi oleh sub sektor industri pengolahan makanan atau industri pengolahan hasil pertanian.

**Tabel II. 4**
**Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| No | Kecamatan | Jumlah Lahan Sawah | Tegalan / Ladang | Hutan | Perkebunan | Semak belukar/padang rumput | Lainnya | Lahan Bukan Pertanian | Total Luas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Hangat | 591,70 | 540,13 | 673,33 | - | 249,96 | - | 108,55 | 2.163,67 |
| 2 | Air Hangat Barat | 331,08 | 29,73 | - | - | 831,94 | - | 84,97 | 1.277,73 |
| 3 | Air Hangat Timur | 1.014,13 | 1.616,54 | 14.866,03 | 5,57 | 317,48 | - | 188,90 | 18.008,65 |
| 4 | Batang Merangin | 477,57 | 6.179,20 | 34.290,81 | 39,92 | 9.296,61 | - | 260,20 | 50.544,30 |
| 5 | Bukitkerman | 695,68 | 4.341,68 | 10.534,54 | 1.038,63 | 2.662,67 | - | 304,91 | 19.578,11 |
| 6 | Danau Kerinci | 914,51 | 465,33 | 18.423,90 | 295,57 | 429,72 | - | 1.079,46 | 21.608,48 |
| 7 | Danau Kerinci Barat | 742,40 | 196,62 | 344,43 | 31,91 | 1.188,19 | - | 568,52 | 3.072,08 |
| 8 | Depati Tujuh | 819,38 | 213,11 | 300,34 | - | 1.068,47 | - | 153,45 | 2.554,75 |
| 9 | Gunung Kerinci | 856,48 | 3.065,48 | 24.164,03 | - | 6.390,41 | - | 114,17 | 34.590,58 |
| 10 | Gunung Raya | 570,41 | 3.984,31 | 25.811,76 | 4.622,06 | 5.794,45 | - | 163,88 | 40.946,87 |
| 11 | Gunung Tujuh | 1.148,70 | 5.279,90 | 6.764,93 | 0,55 | 990,53 | - | 1.411,96 | 15.596,57 |
| 12 | Kayu Aro | 1.252,45 | 2.798,68 | 5.460,70 | 646,60 | 1.929,55 | - | 564,55 | 12.652,52 |
| 13 | Kayu Aro Barat | 66,36 | 4.897,59 | 12.567,87 | 2.272,19 | 924,34 | - | 323,22 | 21.051,56 |
| 14 | Keliling Danau | 706,29 | 1.190,71 | 24.777,51 | 1.097,84 | 2.623,35 | - | 2.725,01 | 33.120,73 |
| 15 | Sitinjau Laut | 1.280,95 | 43,48 | 3.707,92 | 120,83 | 55,36 | - | 137,83 | 5.346,37 |
| 16 | Siulak | 734,88 | 1.738,99 | 6.023,49 | - | 3.803,57 | - | 160,81 | 12.461,73 |

| No | Kecamatan | Jumlah Lahan Sawah | Tegalan / Ladang | Hutan | Perkebunan | Semak belukar/padang rumput | Lainnya | Lahan Bukan Pertanian | Total Luas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Siulak Mukai | 771,24 | 6.722,46 | 36.740,26 | - | 4.469,07 | - | 104,49 | 48.807,51 |
| 18 | Tanah Cogok | 775,89 | - | - | - | 489,73 | - | 766,15 | 2.031,77 |
| **Total Luas** | | **13.750,11** | **43.303,93** | **225.451,84** | **10.171,66** | **43.515,41** | **-** | **9.221,03** | **345.413,99** |

Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

Luas lahan pertanian di Kabupaten Kerinci memiliki luas 345.413,99 hektar termasuk didalamnya lahan bukan pertanian 9.221,03 hektar. Kecamatan yang memiliki luas lahan sawah terbesar yaitu kecamatan sitinjau laut, kecamatan kayu aro, dan kecamatan gunung tujuh. Luas lahan ladang terbesar berada pada Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Batang Merangin, dan Kecamatan Gunung Tujuh. Selanjutnya luas lahan hutan terbesar berada pada Kecamatan Siulak Mukai dan Batang Merangin. Untuk Perkebunan kecamatan yang memiliki luas lahan terbesar yaitu Kecamatan Gunung Raya dan Kayu Aro Barat. Secara keseluruhan luas lahan pertanian terbesar berada pada Kecamatan Batang Merangin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya alam yang besar di bidang pertanian untuk dapat dikelola dan dikembangkan.

Tanaman pangan yang terdiri dari padi termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci di mana sebagian besar wilayah di Kabupaten Kerinci membudidayakannya. Selain padi, tanaman pangan yang dominan ditanam di Kabupaten Kerinci adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kedelai. Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur- sayuran. Tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudidayakan adalah jeruk, manggis, durian, dan alpukat. Sedangkan untuk tanaman sayur-sayuran didominasi oleh kentang, kol, cabe, dan tomat. Pada umumnya, tanaman hortikultura terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Batang Merangin, dan Kecamatan Bukit Kerman.

**b. Sosial Kependudukan**

Tanaman holtikultura terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Tanaman buah-buahan yang berpotensi di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudidayakan adalah: cabai, kentang dan bawang. Tanaman holtikultura pada umumnya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja seperti di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, dan Gunung Tujuh, serta dikecamatan Gunung Raya, Batang Merangi dan Bukit Kerman.

Berdasarkan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa potensi dan Lokasi budidaya tanaman holtikultura ini ditentukanoleh daya dukung dan kesesuaian lahannya. Untuk itu pengembangan pertanian untuk tanaman holtikultura perlu mempertimbanhkan zona agroklimat, kesesuaian lahan dan keinginan Masyarakat setempat, sehingga dapat diwujudkan keunggulan atau spesialisasi untuk masing-masing wilayah Kecamatan. Sebagian besar hasil pertanian ini dijual kepasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kabupaten Kerinci pada khususnya dan Masyarakat Kota Sungai penuh dan Kabupaten/Kota lain seperti seperti, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Muara Bungo Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.

**a) Sayur dan Buah-Buahan**

Untuk jenis sayuran, beberapa komoditas yang memiliki luas lahan terbesar di Kabupaten Kerinci yakni kentang, cabai keriting, kubis, bawang merah dan sawi yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II. 5**
**Luas Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| No | Sayuran dan Buah-Buahan | Luas Tanah (Hektar) |
|---|---|---|
| 1 | Bawang Daun | 702,45 |
| 2 | Bawang Merah | 2.009,50 |
| 3 | Bawang Putih | 1,00 |
| 4 | Bayam | 22,50 |
| 5 | Buncis | 325,50 |

| No | Sayuran dan Buah-Buahan | Luas Tanah (Hektar) |
|---|---|---|
| 6 | Cabai Keriting | 3.678 |
| 7 | Cabai Rawit | 510,1 |
| 8 | Jamur Tiram | 467 |
| 9 | Kacang Panjang | 143,5 |
| 10 | Kangkung | 18,1 |
| 11 | Kembang Kol | 622 |
| 12 | Kentang | 6.887 |
| 13 | Kubis | 3.445 |
| 14 | Labu Siam | 165,25 |
| 15 | Mentimun | 87,25 |
| 16 | Petsai/Sawi | 1.509 |
| 17 | Semangka | 3 |
| 18 | Terung | 432,25 |
| 19 | Tomat | 964,6 |
| 20 | Wortel | 1.163 |

*Sumber:* DTPH Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### c. Perkebunan

Selain komoditi pertanian, Kabupaten Kerinci juga memiliki sektor unggulan lainnya yaitu berupa Perkebunan. Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kerinci meliputi: karet, cengkeh, kopi arabika, kopi robusta, casiavera, cacao dan tembakau. Tanaman Perkebunan masih didominasi oleh tanaman kayu manis jumlah luas tanam 41.177 Ha. Melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa tanaman kayu manis masih merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci. Akan tetapi tanaman kayu manis hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Kerinci, seperti Kecamatan Gunung Raya, Batang Merangin dan Bukit Kerman.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanam dan produksi tanaman Perkebunan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

## Tabel II. 6
## Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (Ton) Tahun 2025

| NO | KECAMATAN | KARET | | CENGKEH | | KOPI ARABIKA | | KOPI ROBUSTA | | CASIAVERA | | CACAO | | TEMBAKAU | | TEBU | | KEMIRI | | PINANG | | KELAPA SAWIT | | KELAPA DALAM | | AREN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P |
| 1 | GUNUNG TUJUH | - | - | - | - | 804 | - | - | - | 2.204 | 2.098 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| 2 | KAYU ARO | - | - | - | - | 704 | - | - | - | 2.738 | 1.045 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | KAYU ARO BARAT | - | - | - | - | 399 | - | - | - | 861 | 407 | - | - | 4 | 3 | 1.454 | 8.724 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 4 | GUNUNG KERINCI | - | - | 8 | 4 | 291 | - | 117 | 38 | 2.891 | 3.219 | 6 | 2 | 70 | 25 | - | - | 12 | 8 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | SIULAK | - | - | 5 | 2 | 196 | - | 83 | 47 | 1.082 | 282 | 7 | 4 | 100 | 35 | 285 | 1.115 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 8 | 4 | 13 | 2 |
| 6 | SIULAK MUKAI | - | - | - | - | 5 | - | 47 | 23 | 459 | 78 | - | 1 | - | - | - | ;- | - | ;- | 2 | ;- | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 7 | AIR HANGAT | 9 | 3 | 23 | 3 | 94 | - | 199 | 47 | 856 | 394 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | 6 | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | 13 | 2 |
| 8 | AIR HANGAT TIMUR | 178 | 45 | 18 | 6 | 196 | - | 415 | 262 | 1.108 | 170 | 12 | 5 | 55 | 30 | - | ;- | 81 | 25 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 9 | AIR HANGAT BARAT | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 97 | 35 | 618 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | DEPATI TUJUH | - | - | 14 | 4 | 27 | - | 61 | 21 | 352 | 138 | 3 | 1 | - | - | - | ;- | 26 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| 11 | SITINJAU LAUT | 181 | 47 | 11 | 2 | - | - | 154 | 77 | 84 | 34 | - | - | - | - | - | - | 58 | 32 | 20 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | KELILING DANAU | 120 | 70 | 9 | 1 | 22 | - | 496 | 295 | 4.108 | 1.482 | 2 | 1 | - | - | - | ;- | 71 | 24 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 4 |
| 13 | DANAU KERINCI | 180 | 72 | 6 | 2 | - | - | 275 | 139 | 805 | 782 | 3 | 1 | - | - | - | - | 27 | 17 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 14 | DANAU KERINCI BARAT | 16 | 5 | - | 1 | - | - | 10 | - | 593 | 170 | - | - | - | - | - | ;- | - | ;- | 4 | ;- | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | TANAH COGOK | 90 | 47 | - | - | - | - | 15 | - | 419 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 16 | BUKIT KERMAN | 368 | 138 | 6 | 2 | - | - | 1.565 | 1.320 | 7.271 | 6.582 | 78 | 14 | 15 | 2 | - | ;- | 46 | 22 | 8 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 17 | GUNUNG RAYA | 64 | 21 | 11 | 3 | 187 | - | 2.165 | 1.718 | 6.909 | 3.818 | 22 | 8 | 20 | 7 | - | - | 19 | 15 | 7 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 18 | BATANG MERANGIN | 394 | 97 | 2 | 1 | - | - | 1.069 | 560 | 7.819 | 7.438 | 85 | 15 | 10 | 3 | - | ;- | 42 | 22 | 5 | 3 | 84 | 32 | - | - | 1 | 1 |

| NO | KECAMATAN | KARET | | CENGKEH | | KOPI ARABIKA | | KOPI ROBUSTA | | CASIAVERA | | CACAO | | TEMBAKAU | | TEBU | | KEMIRI | | PINANG | | KELAPA SAWIT | | KELAPA DALAM | | AREN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P | LT | P |
| KAB. KERINCI | | 1605 | 546 | 113 | 31 | 2928 | 0 | 6768 | 4582 | 41177 | 28506 | 220 | 53 | 286 | 114 | 1739 | 9839 | 407 | 190 | 85 | 52 | 84 | 32 | 26 | 12 | 74 | 27 |

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### d. Peternakan

Beberapa jenis ternak yang banyak diusahakan di Kabupaten Kerinci yaitu sapi, kambing, dan kerbau. Sebagian besar hasil peternakan ini di jual ke pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci pada khususnya Masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten/Kota lain seperti Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Muara Bungo, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Berikut terkait data populasi ternak di Kabupaten Kerinci Tahun 2025:

**Tabel II. 7**
**Populasi Ternak di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| No | Jenis Ternak (Ekor)* | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sapi Perah | - |
| 2 | Sapi Potong | 4.911 |
| 3 | Kerbau | 3.158 |
| 4 | Kuda | 61 |
| 5 | Kambing | 6.952 |
| 6 | Domba | 108 |
| 7 | Ayam Kampung | 81.572 |
| 8 | Ayam Potong | 1.456.863 |
| 9 | Ayam Ras Petelur | 79.113 |
| 10 | Itik | 28.648 |
| 11 | Itik Manila | 2.998 |
| **Jumlah** | | **1.664.384** |

Catatan:*) Berdasarkan angka sementara
Sumber: Disan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### e. Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Kerinci terdiri dari perairan umum dengan perkiraan luas sekitar 4.255 Ha yang terdiri dari danau dan daerah aliran sungai dan rawa. Selain itu, budidaya perikanan terdiri dari budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di keramba jaring apung, keramba jaring tancap, budidaya ikan di keramba arus deras di sungai dan budidaya ikan dalam sawah (manipadi) dengan jumlah rumah tangga produksi pembudidayaan ikan 1.244 dan RTP nelayan 1.173. Bila dilihat dari data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat bahwa di Kabupaten Kerinci terdapat

perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jelasnya mengenai produksi ikan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

## Tabel II. 8
## Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Kerinci
## Tahun 2021-2025

| No | Perikanan Tangkap | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DANAU | SUNGAI | TOTAL | DANAU | SUNGAI | TOTAL | DANAU | SUNGAI | TOTAL | DANAU | SUNGAI | TOTAL | DANAU | SUNGAI | TOTAL |
| 1 | Betok (Anabas testudineus) | 5.853 | 33.365 | 39.218 | 5.892 | 16.694 | 22.586 | 6.470 | 17.016 | 23.486 | 8.641 | 24.273 | 32.914 | 8.863 | 24.899 | 33.762 |
| 2 | Beunteur (Puntius binotatus) | | 340 | 340 | | 340 | 340 | | | - | | | - | | | - |
| 3 | Gabus (Channa striata) | 11.939 | 116.572 | 128.511 | 16.707 | 72.259 | 88.966 | 7.639 | | 7.639 | 8.912 | | 8.912 | 9.142 | | 9.142 |
| 4 | Hampala (Hampala macrolepidota) | 702.139 | 52.086 | 754.225 | 598.185 | 47.791 | 645.976 | 201.775 | 16.310 | 218.085 | 236.153 | 23.243 | 259.396 | 242.246 | 23.843 | 266.089 |
| 5 | Lele (Clarias batrachus) | 2.058 | 46.411 | 48.469 | 2.851 | 46.931 | 49.782 | 1.561 | 2.354 | 3.915 | 1.912 | 2.187 | 4.099 | 1.961 | 2.243 | 4.204 |
| 6 | Lobster Air Tawar; Cherax (Cherax quadricarinatus) | 1.203 | | 1.203 | 1.727 | | 1.727 | 515 | | 515 | 680 | | 680 | 698 | | 698 |
| 7 | Mas (Cyprinus carpio) | 408 | 1.395 | 1.803 | 1.649 | 3.212 | 4.861 | 17 | 384 | 401 | | 490 | 490 | | 503 | 503 |
| 8 | Mujair (Oreochromis mossambicus) | 10.032 | 12.524 | 22.556 | 25.662 | 12.524 | 38.186 | 5.923 | 4.201 | 10.124 | 7.806 | 4.767 | 12.573 | 8.007 | 4.890 | 12.897 |
| 9 | Nila (Oreochromis niloticus) | 779.577 | 26.183 | 805.760 | 603.637 | 30.712 | 634.349 | 345.424 | 33.403 | 378.827 | 398.491 | 41.785 | 440.276 | 408.772 | 42.863 | 451.635 |
| 10 | Nilem (Osteochilus vittatus) | 25.495 | 11.275 | 36.770 | 104.477 | 11.275 | 115.752 | 2.195 | 119 | 2.314 | 2.664 | 168 | 2.832 | 2.733 | 172 | 2.905 |
| 11 | Paray (Rasbora argyrotaenia) | 38.126 | 87.977 | 126.103 | 126.138 | 80.172 | 206.310 | 138.813 | 41.738 | 180.551 | 164.145 | 48.911 | 213.056 | 168.380 | 50.173 | 218.553 |
| 12 | Semah (Tor douronensis) | 3.708 | 20.676 | 24.384 | 4.538 | 18.284 | 22.822 | 1.941 | 2.413 | 4.354 | 2.073 | 2.457 | 4.530 | 2.126 | 2.520 | 4.646 |
| 13 | Tawes (Barbodes gonionotus) | | 4.213 | 4.213 | 743 | 4.285 | 5.028 | 506 | 1.148 | 1.654 | 627 | 1.287 | 1.914 | 643 | 1.320 | 1.963 |
| **14** | **Grand Total** | **1.580.538** | **413.017** | **1.993.555** | **1.492.206** | **344.479** | **1.836.685** | **712.779** | **119.086** | **831.865** | **832.104** | **149.568** | **981.672** | **853.571** | **153.426** | **1.006.997** |

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Masyarakat Kabupaten Kerinci pada umumnya membudidayakan perikanan air tawar, dan sebagian besar terkosentrasi di Danau Kerinci. Jenis ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Kerinci sebanyak 13 jenis yaitu: ikan betok, ikan beunteur, ikan gabus, ikan hampala, ikan lele, lobster air tawar, ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila, nilem, paray, ikan semah dan tawes. Hasil budidaya perikanan ini kebanyakan untuk dikonsumsi sendiri oleh masyarakat dan sebagian lagi dijual di pasar-pasar tradisional di dalam wilayah Kabupaten Kerinci dan di Kota Sungai Penuh.

Selain itu, Kabupaten Kerinci memiliki satu jenis ikan yang merupakan komoditas spesifik daerah yaitu ikan semah. Untuk meningkatkan produktifitas ikan semah ini, pemerintah telah mengupayakan kegiatan pemijahan dan penyebaran benih ikan sema ke Danau Kerinci dalam rangka menambah populasi ikan semah, sehingga dapat diprioritaskan sebagai komoditas keunggulan spesifik daerah yang dapat dikosumsi dan banyak diekspor keluar daerah Kabupaten Kerinci.

**f. Kehutanan**

Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 32.271 hektare berada di:

1. Kecamatan Air Hangat Barat;
2. Kecamatan Air hangat Timur;
3. Kecamatan Batang Merangin;
4. Kecamatan Bukitkerman;
5. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
6. Kecamatan Depati Tujuh;
7. Kecamatan Gunung Kerinci;
8. Kecamatan Gunung Raya;
9. Kecamatan Gunung Tujuh;
10. Kecamatan Kayu Aro barat;
11. Kecamatan Kayu Aro;
12. Kecamatan Keliling Danau;

13. Kecamatan Sitinjau Laut;
14. Kecamatan Siulak Mukai; dan
15. Kecamatan Siulak.

Kawasan hutan produksi terdapat Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi, Hutan Adat Biang Sari, dan Hutan Adat Bukit Kayu Sigi.

### g. Pertambangan dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah, dimana beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki dan sampai saat ini belum termanfaatkan secara maksimal diantaranya adalah potensi energi panas bumi (*geothermal*), dan mineral bahan galian serta beberapa mata air panas.

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Kerinci dapat digolongkan ke dalam golongan bahan galian industri dan bahan galian golongan A meliputi 22 jenis bahan galian dimana keberadaan sumber daya yang ada masih pada tahap sumber daya hipotetik sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel II. 9**
**Potensi Pertambangan di Kabupaten Kerinci**

| Bahan Galian | Jumlah | Lokasi |
|---|---|---|
| Granit | 604 juta ton | Siulak Deras, Batu Hampar |
| | | Lempur Tengah |
| Marmer | 389 juta ton | Muara Imat,Tebing Tinggi |
| Obsidian | 497 | Bukit Cermin |
| Batu Gamping | 680 juta ton | Siulak Deras,Koto Baru Hiang,Gua Kasah |
| Emas | - | Siulak Tenang, Kec.Kayu Aro |
| | | Kec. Siulak |
| Batu Bara | - | Pungut |
| Tembaga | - | Siulak Tenang, Kec.Kayu Aro |
| | | Kec.Siulak |

*Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci, 2024-2044*

### h. Pariwisata

Potensi wisata merupakan salah satu sektor ekonomi andalan Kabupaten Kerinci selain sektor pertanian. Jumlah objek wisata alam di

Kabupaten Kerinci sebanyak 76 objek, sebagian besar merupakan objek wisata alam dan lainnya adalah objek wisata sejarah dan religius yang tersebar di setiap wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Dari sekian banyak objek wisata di Kabupaten Kerinci, terdapat 7 (tujuh) objek wisata alam yang cukup besar dan diminati oleh wisatawan, yaitu Pemandian Air Panas Sungai Medang, Air Terjun Telun Berasap, Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Aroma Pecco, Danau Kerinci, dan Air Panas Semurup. Kawasan Kabupaten Kerinci memiliki objek wisata yang sangat banyak, diantaranya ada beberapa jenis objek wisata seperti wisata alam, wisata buatan dan minat khusus.

**Tabel II. 10**
**Objek Wisata di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| No. | Nama Obyek Wisata | Kecamatan |
|---|---|---|
| 1 | Air Panas Semurup | Kecamatan Air Hangat Semurup |
| 2 | Air Panas Sungai Abu | Kecamatan Air Hangat Timur |
| 3 | Air Terjun 12 Tingkat Talang Kemulun | Kecamatan Batang merangin |
| 4 | Air Terjun 13 Tingkat Sungai Medang | Kecamatan Air Hangat Timur |
| 5 | Air Terjun Koto Lebuh Tinggi | Kecamatan Siulak |
| 6 | Air Terjun Ksen | Kecamatan Gunung Raya |
| 7 | Air Terjun Mata Kucing Masgo | Kecamatan Gunung Raya |
| 8 | Air Terjun Muara Air Duo | Kecamatan Sitinjau Laut |
| 9 | Air Terjun Pancuran Gading Pulau Tengah | Kecamatan Keliling Danau |
| 10 | Air Terun Pancuran Tujuh | Kecamatan Siulak |
| 11 | Air Terjun Pauh Tinggi | Kecamatan Gunung Tujuh |
| 12 | Air Terjun Pendung Semurup | Kecamatan Air Hangat |
| 13 | Air Terjun Pungut | Kecamatan Air Hangat Timur |
| 14 | Air Terjun Puti Mayang | Kecamatan Air Hangat Timur |
| 15 | Air Terjun Siiluang Bersisik Emas | Kecamatan Gunung Raya |
| 16 | Air Terjun Siulak Kecil | Kecamatan Siulak |
| 17 | Air Terjun Telun Berasap | Kecamatan Gunung Tujuh |
| 18 | Air Terjun Telun Lempur | Kecamatan Gunung Raya |
| 19 | Aroma Pecco | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| 20 | Batu Bersurat | Kecamatan Bukitkerman |
| 21 | Batu Bersurat Lempur Mudik | Kecamatan Gunung Raya |
| 22 | Batu Biduk Pulau Sangkar | Kecamatan Bukitkerman |
| 23 | Batu Gong Lolo Gedang | Kecamatan Bukitkerman |
| 24 | Batu Gong Pondok | Kecamatan Keliling Danau |
| 25 | Batu Jung Kemantan Kebalai | Kecamatan Air Hangat Timur |

| No. | Nama Obyek Wisata | Kecamatan |
|---|---|---|
| 26 | Batu Kursi Lempur Mudik | Kecamatan Gunung Raya |
| 27 | Batu Lumang Muara Semerah Semurup | Kecamatan Air Hangat |
| 28 | Batu Megalitik Muak | Kecamatan Bukitkerman |
| 29 | Batu Meriam Talang Kemuning | Kecamatan Bukitkerman |
| 30 | Batu Patah dan Batu Bergambar Muak | Kecamatan Bukitkerman |
| 31 | Batu Raja Pulau Tengah | Kecamatan Keliling Danau |
| 32 | Batu Selindrik | Kecamatan Bukitkerman |
| 33 | Benteng Depati Parbo | Kecamatan Gunung Raya |
| 34 | Bukit Kutingga/Anjung Banio Penawar | Kecamatan Sintinjau Laut |
| 35 | Bukit Sembahyang | Kecamatan Siulak |
| 36 | Danau Lingkat | Kecamatan Gunung Raya |
| 37 | Danau Alkab Tamiai | Kecamatan Batang Merangin |
| 38 | Danau Belibis | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| 39 | Danau Gunung Tujuh | Kecamatan Gunung Tujuh |
| 40 | Danau Kaco | Kecamatan Gunung Raya |
| 41 | Danau Kecik Lempur | Kecamatan Gunung Raya |
| 42 | Danau Kerinci | Kecamatan Danau Kerinci |
| 43 | Dedeng Batokok Siulak Deras | Kecamatan Gunung Kerinci |
| 44 | Gerao Nguak Lempur Tengah | Kecamatan Gunung Raya |
| 45 | Gerao Rasau | Kecamatan Keliling Danau |
| 46 | Gerao Silai Talang Kemuning | Kecamatan Bukitkerman |
| 47 | Goa Kapeh | Kecamatan Gunung Kerinci |
| 48 | Goa Batu Tanjung Tanah | Kecamatan Danau Kerinci |
| 49 | Goa Belang Sanggarang Agung | Kecamatan Danau Kerinci |
| 50 | Goa dan Air Terjun Pacah Sago Batang Merangin | Kecamatan Batang Merangin |
| 51 | Goa Kasah | Kecamatan Kayu Aro |
| 52 | Goa Kelelawar Talang Kemulun | Kecamatan Danau Kerinci |
| 53 | Gunung Batuah Lempur | Kecamatan Gunung Raya |
| 54 | Gunung Kaca | Kecamatan Air Hangat Timur |
| 55 | Gunung Kerinci | Kecamatan Kayu Aro |
| 56 | Kecamatan Gunung Raya Talang Kemuning | Kecamatan Bukitkerman |
| 57 | Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur | Kecamatan Bukitkerman |
| 58 | Hutan Adat Temedak Keluru | Kecamatan Danau Kerinci |
| 59 | Hutan Salk Talang Kemuning | Kecamatan Bukitkerman |
| 60 | Kebun Nanas Koto Tengah | Kecamatan Tanah Cogok |
| 61 | Lembah Merangin | Kecamatan Batang Merangin |
| 62 | Masjid Keramat | Kecamatan Keliling Danau |
| 63 | Monumen Gempa Koto Iman | Kecamatan Tanah Cogok |
| 64 | Panorama Bukit Tapan Sekungkung | Kecamatan Depati VII |
| 65 | Panorama Bukit Villa Kemantan | Kecamatan Air Hangat Timur |

| No. | Nama Obyek Wisata | Kecamatan |
|---|---|---|
| 66 | Pemandian Air Panas Sungai Medang | Kecamatan Air Hangat Timur |
| 67 | Perkebunan Jeruk Pulau Tengah | Kecamatan Gunung Raya |
| 68 | Perkebunan Manggis Semerap | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| 69 | Perkebunan The | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| 70 | Rawa Bento | Kecamata Gunung Tujuh |
| 71 | Rawa Ladeh Panjang | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| 72 | Serujang Angin Hiang Karya | Kecamatan Sitinjau Laut |
| 73 | Sungai Batang Merangin | Kecamatan Gunung Raya |
| 74 | Taman Bunga Puri Asri | Kecamatan Kayu Aro |
| 75 | Taman Dewa Talang Kemuning | Kecamatan Bukitkerman |
| 76 | Tanjung Pelita Pidung | Kecamatan Batang Merangin |

*Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci, 2024-2044*

### i. Energi

Potensi energi yang cukup dominan di Kabupaten Kerinci saat ini adalah potensi air dan potensi panas bumi. Potensi *gheothermal* (panas bumi) ini berada di Kecamatan Gunung Raya dan Kecamatan Air Hangat. Kapasitas energi listrik yang dihasilkan di Kecamatan Gunung Raya diperkirakan mencapai lebih kurang 200 Mega Watt. Potensi energi panas bumi ini belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat dua pertiga dari seluruh potensi yang ada lokasinya berada dalam kawasan hutan dan hanya sekitar sepertiganya yang berada diluar kawasan hutan.

Potensi air yang dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Batang Merangin, yaitu PLTA Kerinci dengan kapasitas 2 x 175 Mega Watt. Selain itu, ada beberapa potensi air lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di Kabupaten Kerinci yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 11**
**Kawasan Potensi Energi Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| No | Uraian | Kapasitas Energi (Mega Watt) | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Terjun Telun Berasap | 6 | Kec. Gunung Tujuh |
| 2. | Air Terjun Pancuran Tujuh | 4,5 – 6 | Kec. Siulak |

| No | Uraian | Kapasitas Energi (Mega Watt) | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Terjun Telun Berasap | 6 | Kec. Gunung Tujuh |
| 3. | Air Terjun Sungai Medang | 2 – 3 | Kec. Air Hangat Timur |
| 4. | Air Terjun Pancuran Rayo | 2 – 3,2 | Kec. Keliling Danau |
| 5. | Air Terjun Bedeng IV | 1,5 – 2 | Kec. Batang Merangin |
| 6. | Air Terjun Batu Namura | 5 – 6,2 | Kec. Batang Merangin |

Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

**j. Sumber Daya Air**

Potensi sumber daya air di Kabupaten Kerinci sangat melimpah, karena letaknya yang berlokasi di dataran tinggi dengan kondisi topografi pergunungan dan hutan lebat, disertai beberapa alur sungai dan anak sungai. Sebagian aliran sungai dan anak sungai bermuara ke Danau Kerinci, kemudian mengalir melalui Sungai Batang Merangin sampai ke pantai timur Jambi. Selain bermuara di Danau Kerinci, sebagian dari sungai ini mengalir ke Sumatera Barat seperti Sungai Air Terjun ke Kabupaten Solok Selatan dan Sungai Batang Sako ke Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai gerbang utama arus ke luar deposit air dari Danau Kerinci, Sungai Batang Merangin merupakan sungai terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang memiliki peran penting di Kabupaten Kerinci diantaranya adalah *Sungai Sikai, Sungai Rumpun, Sungai Tanduk, Sungai CIbudak, Sungai Dadap, Sungai Simpang Tutup, Sungai Siulak Desar, Sungai Koto Rendah, Sungai Bukit Sembahyang, Sungai Dusun Baru, Sungai Pendung Mudik, Sungai Air Patah, Sungai Terung, Sungai Semurup, Sungai Tutung, Sungai Hiang, Sungai Batang Sangir, Sungai Betung Kuning, Sungai Cupak Raja Seleman, Sungai Talang Kemulun, Sungai Lubuk Pagar, Sungai Tapan, Sungai Air Jernih, Sungai Air Terjun, Sungai Air Lintah, Sungai Talang Kemuning, Sungai Rawa Air Lingkat, Sungai Rumpun dan Sungai Renah Sako*.

Potensi sumber daya air di Kabupaten Kerinci saat ini dimanfaatkan untuk pengembangan Daerah Irigasi untuk mengairi areal persawahan, selain itu sebagian potensi ini juga digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik (PLTA dan PLTMH).

**k. Industri**

Untuk kegiatan industri yang ada di Kabupaten Kerinci bila dilakukan klasifikasi maka terdiri dari industri makanan, industri minuman, industri pengolahan, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri kulit, industri kayu, industri kertas, industri percetakan, industri produk dari batu bara dan pengilangan, industri kimia dan barang dari bahan kimia serta industri lainnya.

**Tabel II. 12**
**Jumlah Industri Pengolahan Besar Sedang dan Tenaga Kerja, Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| Klasifikasi Industri | Perusahaan | Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| Makanan | - | - |
| Minuman | - | - |
| **Kerinci** | **-** | **-** |

Sumber: DPMPTSPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**Tabel II. 13**
**Jumlah Perusahaan Konstruksi Skala Menengah Besar Menurut Klasifikasi Industri dan Kecamatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| No | Kecamatam | Klasifikasi | |
|---|---|---|---|
| | | Konstruksi Gedung | Konstruksi Sipil |
| 1 | Gunung Raya | - | - |
| 2 | Bukit Kerman | 5 | 3 |
| 3 | Batang Merangin | 8 | 3 |
| 4 | Keliling Danau | 1 | - |
| 5 | Danau Kerinci Barat | 2 | 4 |
| 6 | Danau Kerinci | - | - |
| 7 | Tanah Cogok | - | - |
| 8 | Sitinjau Laut | - | - |
| 9 | Air Hangat | 10 | 6 |
| 10 | Air Hangat Timur | 1 | - |
| 11 | Depati Tujuh | 5 | 1 |
| 12 | Air Hangat Barat | 3 | 2 |

| No | Kecamatam | Klasifikasi | |
|---|---|---|---|
| | | Konstruksi Gedung | Konstruksi Sipil |
| 13 | Gunung Kerinci | 4 | 2 |
| 14 | Siulak | 48 | 18 |
| 15 | Siulak Mukai | 21 | 10 |
| 16 | Kayu Aro | 4 | - |
| 17 | Gunung Tujuh | 4 | - |
| 18 | Kayu Aro Barat | - | - |

Sumber: DPMPTSPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Industri pengolahan di Kabupaten Kerinci didominasi oleh industri pengolahan makanan atau industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan/atau skala rumah tangga. Jenis-jenis industri yang beroperasi di Kabupaten Kerinci diantaranya adalah industri pengolahan gula tebu, gula merah aren, telur asin, keripik ubi dan talas, anyaman, tembakau iris, dodol kentang, sirup kayu manis dan tempe. Industri-industri kecil ini tersebar dibeberapa wilayah kecamatan yang merupakan sentra industri kecil.

### 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kabupaten Kerinci adalah salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang merupakan daerah rawan bencana. Mengingat wilayah Kabupaten Kerinci berada dekat dengan lokasi pertemuan lempeng aktif Sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia *(ring of fire)*. Berdasarkan kondisi ini, wilayah Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api.

Selain tiga jenis bencana ini, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, angin puting beliung, epidemi dan wabah penyakit. Namun dalam rencana pola ruang ini, kawasan bencana alam yang di bahas adalah kategori bencana yang berdampak langsung terhadap keruangan di Kabupaten Kerinci, di antaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api, dengan penjelasan sebagai berikut:

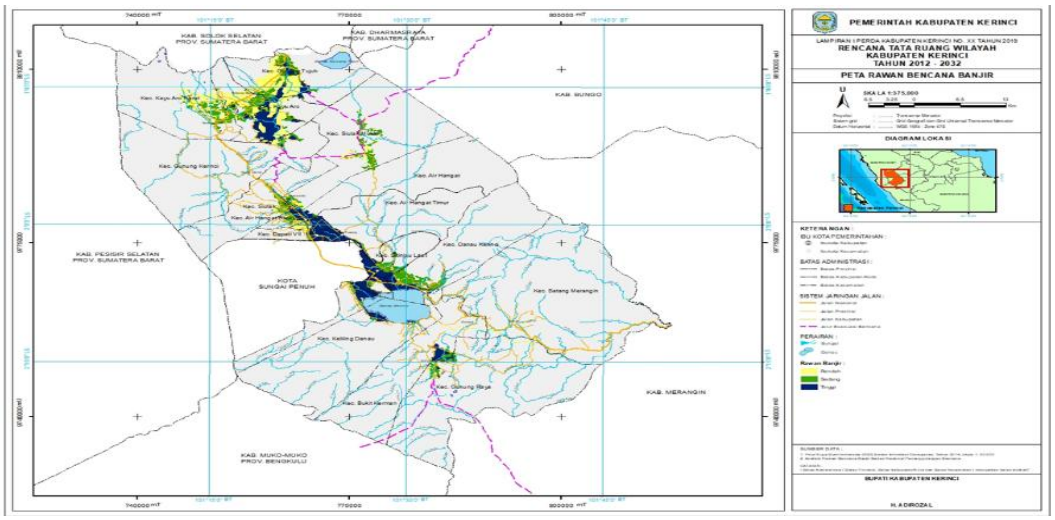
**a. Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Berdasarkan kajian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diketahui bahwa ancaman banjir di Kabupaten Kerinci memiliki

indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar Sedang, yang berarti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman banjir Sedang.

Adapun wilayah Kabupaten Kerinci yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir dengan klasifikasi kerawanan Tinggi di antaranya adalah Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Keliling Danau, dan Kecamatan Bukit Kerman.

**Gambar II. 3**
**Peta Rawan Banjir di Kabupaten Kerinci**

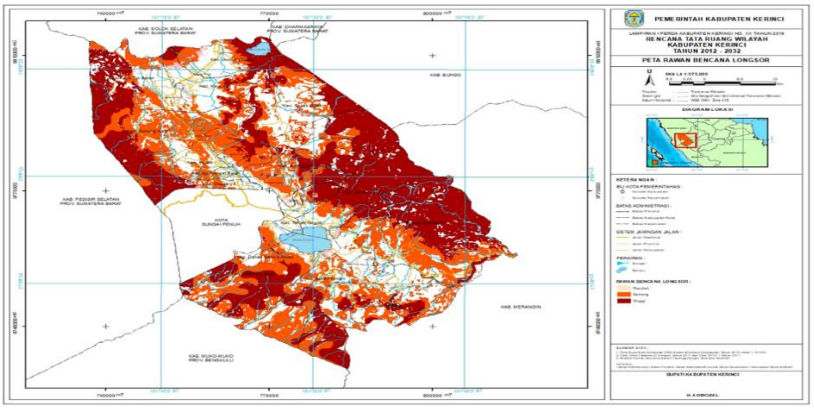



Sumber Data: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

**b. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**

Ancaman tanah longsor di Kabupaten Kerinci memiliki indeks ancaman dan indeks terpapar Sedang. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman tanah longsor Sedang (BNPB). Wilayah yang masuk dalam kawasan ini tersebar di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Adapun gambaran klasifikasi kerawanan bencana ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 4**
**Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kerinci**




Sumber Data: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024

### c. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Kerinci berupa kawasan rawan bencana dengan skala intensitas gempa V-VIII MMI, dan merupakan kawasan dengan kategori kerawanan Sedang-Tinggi, yang terdapat di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dan berdasarkan hasil kajian BNPN, diketahui bahwa ancaman gempa bumi di Kabupaten Kerinci memiliki indeks ancaman dan indeks penduduk Sedang, yang berarti bahwa wilayah Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman gempa bumi Sedang.

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Kerinci terbagi atas 3 (tiga) tipologi kawasan yaitu:

1. Tipe A

   Kawasan ini berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Kawasan ini dicirikan dengan adanya kombinasi saling melemahkan dari faktor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila intensitas gempa tinggi (Modified Mercalli Intensity/MMI- VIII) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat.

2. Tipe B

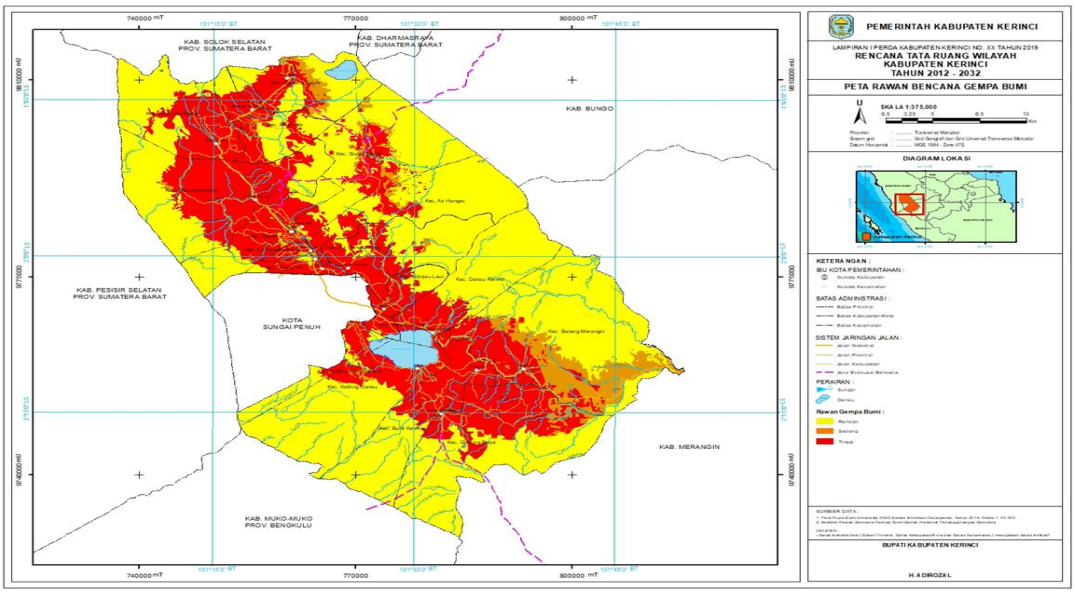
Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana. Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe ini tidak disebabkan oleh satu faktor dominan, tetapi disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi, yaitu intensitas gempa tinggi (MMI-VIII) dan sifat fisik batuan menengah.

3. Tipe C

Kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar. Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi pada kawasan ini. Kombinasi yang ada antara lain adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah, atau kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak.

Gambaran klasifikasi kerawanan bencana ini disajikan pada Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagai berikut.

**Gambar II. 5**
**Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kerinci**




Sumber Data: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

**d. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api**

Kabupaten Kerinci memiliki gunung api aktif yaitu gunung kerinci dengan tinggi 3.805 m dari permukaan laut. Gunung kerinci sering juga disebut "*peak of indrapura*", atau gunung gadang, atau berapi kurintji, yang bertipe stratovolcano. Gunung kerinci secara geografis terletak pada 1°41,5' Lintang Selatan-101°16' Bujur Timur, dan secara administratif termasuk dalam administrasi kabupaten kerinci, provinsi jambi dan kabupaten solok selatan, provinsi sumbar.

Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi, bahwa gunung kerinci termasuk ke dalam 18 gunung berapi aktif yang berstatus waspada di Indonesia. Kawasan rawan letusan gunung api Kerinci terdapat di kawasan sekitar Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat dan Kecamatan Gunung Tujuh. Berdasarkan informasi geologi dan tingkat resiko letusannya, maka kawasan rawan letusan gunung api Kerinci dibagi menjadi 3 (tiga) tipologi, yaitu:

1. Tipe A

   Kawasan ini merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, dimana daerah berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dilanda perluasan awan panas dan aliran lava. Bila erupsi membesar, daerah ini mungkin akan dilanda hujan abu lebat dan lontaran baru pijar.

2. Tipe B

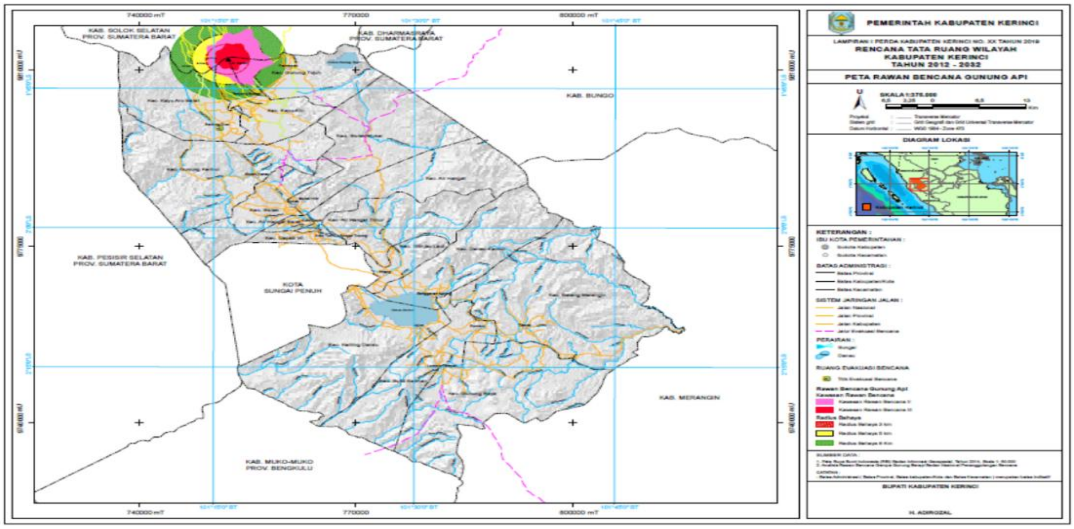
   Kawasan ini merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, yang merupakan kawasan berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu pijar, aliran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas (lahar) dan gas beracun.

3. Tipe C

   Kawasan ini adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, material lontaran dan guguran batu pijar. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya dan beberapa lembah sungai yang berasal dari daerah puncak gunung, dengan radius 5 km dari kawah.

Peta rawan bencana letusan gunung api yang ada di Kabupaten Kerinci bisa dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 6**
**Peta Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Kerinci**

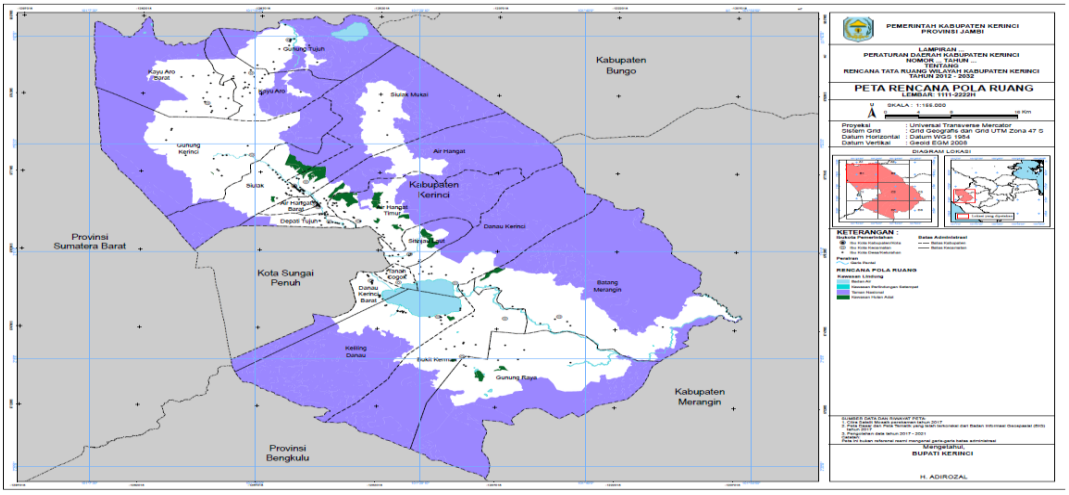



Sumber Data: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

### e. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung merupakan jenis bencana yang bersifat kontinu atau dapat terjadi di mana saja. Kawasan rawan bencana angin putting beliung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sudah pernah terkena bencana angin puting beliung ini, di antaranya Kecamatan Siulak, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Tanah Cogok. Berdasarkan hasil analisis peta rawan bencana, dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan dalam Kabupaten Kerinci memiliki kategori kerawanan Rendah-Tinggi untuk bencana angin puting beliung ini. Peta rawan bencana angin puting beliung yang ada di Kabupaten Kerinci bisa dilihat pada Gambar berikut.

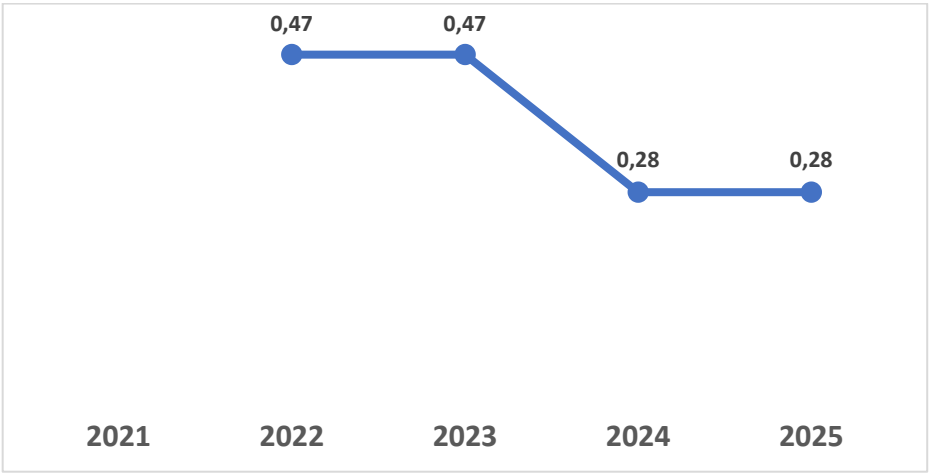
**Gambar II. 7**
**Peta Rawan Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Kerinci**




Sumber Data: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan suatu ukuran dalam mengukur penanggulangan bencana di kabupaten/kota dan provinsi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa penanggulangan bencana menjadi urusan yang wajib dilakukan oleh daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 8**
**Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

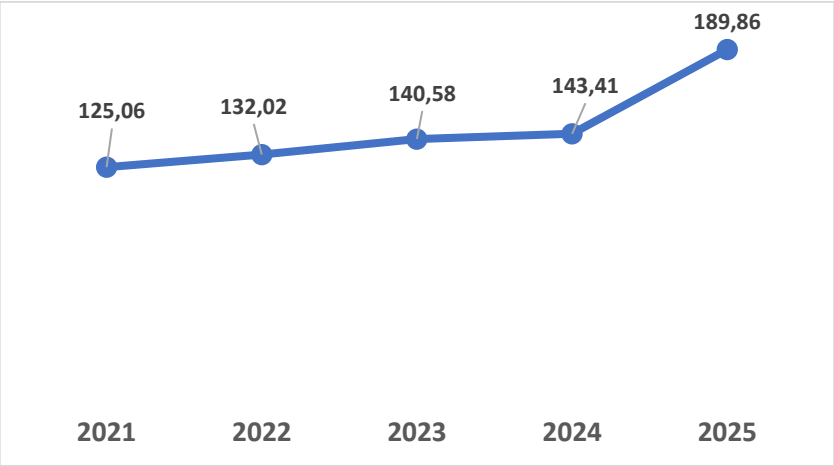



Sumber: BPBD Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kerinci tahun 2022 dan 2023 konstan sebesar angka 0,47. Namun, pada tahun 2024 hingga 2025

mengalami penurunan menjadi 0,28. Ini bisa menjadi indikasi bahwa kapasitas penanggulangan bencana di Kabupadaten Kerinci mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana rendah.

**Gambar II. 9**
**Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**



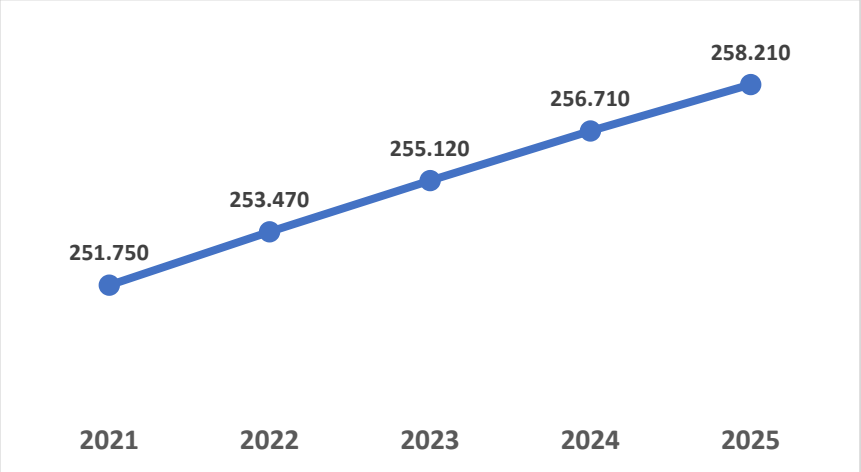

Sumber: BNPB Tahun 2026

Indeks risiko bencana Kabupaten Kerinci pada tahu 2021 berada pada angka 125,06 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi 189,86. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci semakin rentan terhadap dampak bencana, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak bencana. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengurangan risiko bencana secara terintegrasi. Hal ini perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas mitigasi, penguatan sistem peringatan dini, penyempurnaan kawasan rawan bencana, peningkatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respons bencana, serta penguatan BPBD dan perengkat daerah guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif.

### 2.1.1.4. Aspek Demografi

Jumlah penduduk dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 terus mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang relatif stabil. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 251.750 jiwa, kemudian meningkat menjadi 258.210 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya rata-rata pertumbuhan sekitar 0,38 persen, yang menggambarkan perkembangan demografi yang terkendali tanpa lonjakan besar.

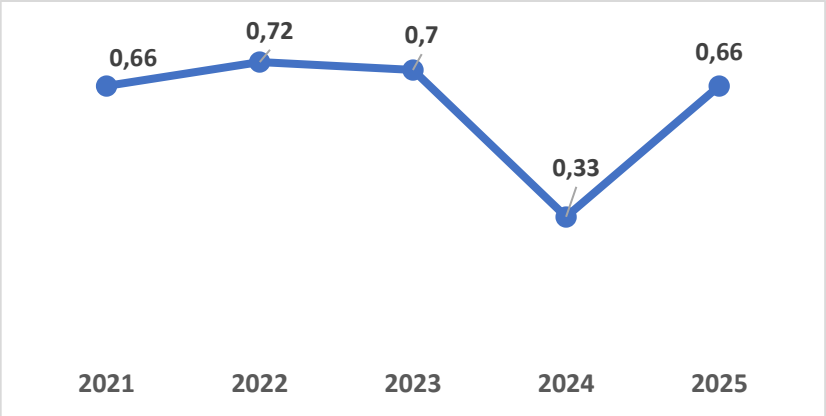
**Gambar II. 10**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2025 yang sebelumnya sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Angka tersebut cenderung stabil pada kisaran 0,33 hingga 0,66 persen pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini menandakan adanya percepatan pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan tren transisi demografi, di mana angka pertumbuhan cenderung lebih terkendali karena pengaruh faktor sosial-ekonomi, kesehatan, dan pola migrasi.

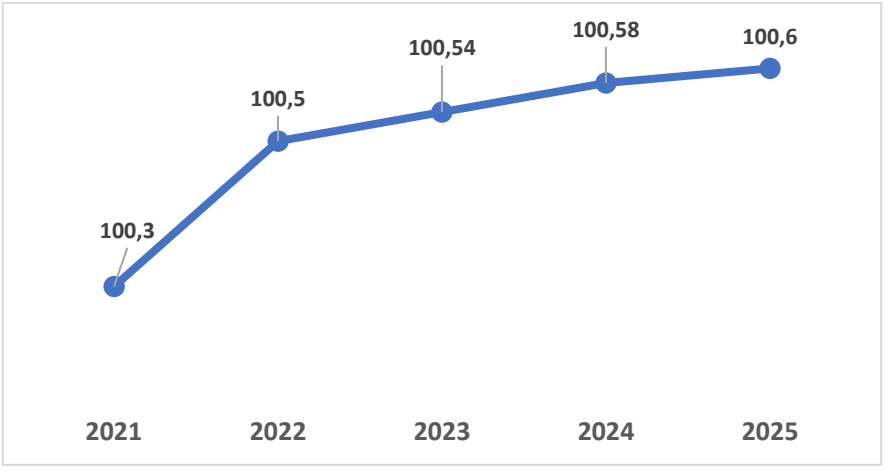
**Gambar II. 11**
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan keseimbangan yang relatif baik. Selama periode 2021–2025, angka rasio berada sedikit di atas 100, yakni antara 100,3 hingga 100,6. Artinya, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan, tetapi selisihnya tidak signifikan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan gender yang besar dalam komposisi penduduk.

**Gambar II. 12**
**Rasio Penduduk Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

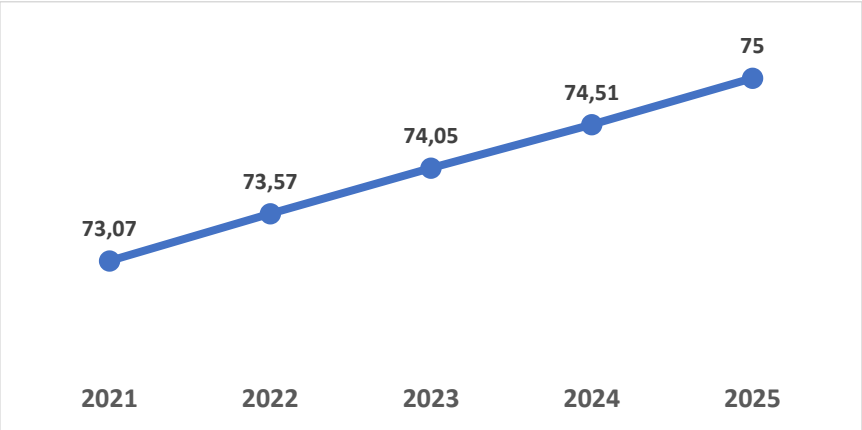



Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Sementara itu, kepadatan penduduk mengalami kenaikan moderat dari 73,07 jiwa per kilometer persegi pada 2020 menjadi 75 jiwa per

kilometer persegi pada 2025. Peningkatan kepadatan ini masih dalam kategori terkendali, sehingga tekanan terhadap ruang wilayah belum terlalu tinggi, meskipun tetap perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah tata ruang di masa mendatang.

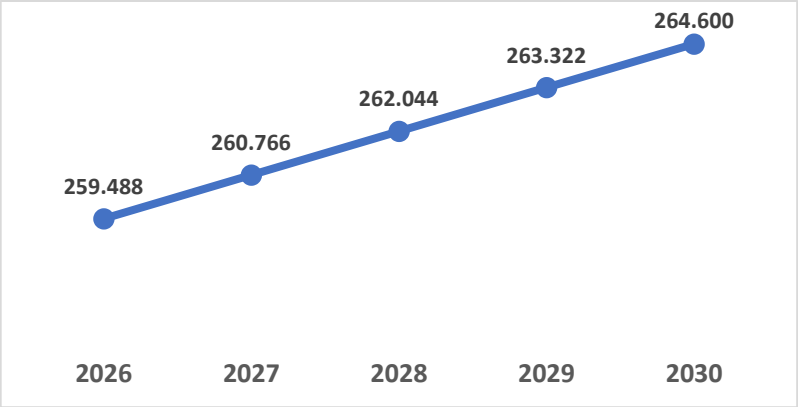
**Gambar II. 13**
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Di sisi lain, keberadaan masyarakat adat tetap menjadi bagian penting dalam karakteristik demografi wilayah. Dengan pertumbuhan penduduk yang cenderung melambat dan kepadatan yang masih moderat, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, tanah ulayat, serta tradisi sosial-budaya lokal. Namun, dinamika pembangunan dan modernisasi dapat memengaruhi pola kehidupan mereka, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian kearifan lokal dan upaya peningkatan kesejahteraan.

**Gambar II. 14**
**Proyeksi Penduduk Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2026-2030**




Sumber: BPS Kabupaten Kerinci (diolah), 2025

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk selama periode 2026 hingga 2030, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 259.488 jiwa. Angka ini terus mengalami kenaikan secara konsisten, dengan jumlah penduduk pada tahun 2027 diperkirakan menjadi 260.766 jiwa, meningkat sebesar 1.278 jiwa dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan alami yang disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian serta adanya kemungkinan migrasi masuk.

Pada tahun 2028, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 262.044 jiwa, yang mencerminkan pertumbuhan berkelanjutan dengan tren kenaikan yang relatif terkendali. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2029 dengan jumlah penduduk sebesar 263.322 jiwa. Pada akhir periode proyeksi, yaitu tahun 2030, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 264.600 jiwa. Proyeksi penduduk tahun 2026–2030 menunjukkan arah pertumbuhan yang berkesinambungan. Hal ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, serta lapangan pekerjaan guna menjaga keseimbangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kondisi demografi periode 2020–2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat secara stabil, laju pertumbuhan terkendali, rasio penduduk seimbang, dan kepadatan relatif moderat. Karakteristik ini mencerminkan fondasi demografi yang cukup baik untuk mendukung pembangunan, dengan catatan tetap memperhatikan keberlanjutan ruang wilayah serta perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga di rasakan lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kerinci.

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir (2021-2025) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini berarti adanya nilai tambah bagi perekonomian di suatu daerah yang diproduksi atau dihasilkan, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun meningkat. Meningkatnya PDRB ini, bisa berasal dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, dan perdagangan besar. Untuk lebih jelasnya PDRB Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 14**
**PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kerinci (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025**

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.240,24 | 3.346,63 | 3.468,60 | 3.566,19 | 3.885,79 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 121,15 | 128,57 | 129,1 | 142,12 | 146,45 |
| C. | Industri Pengolahan | 186,59 | 193,33 | 204,22 | 210,03 | 223,02 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,96 | 3,21 | 3,59 | 3,77 | 3,88 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 22,67 | 22,44 | 22,39 | 22,69 | 22,84 |
| F. | Konstruksi | 824,76 | 918,69 | 1.083,83 | 1.138,91 | 1.014,61 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 606,58 | 630,63 | 657,79 | 691,4 | 742,29 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 168,56 | 181,8 | 190,32 | 202,28 | 230,91 |
| I. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 55,2 | 57,84 | 61,15 | 65,3 | 68,33 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 526,86 | 568,74 | 617,55 | 640,81 | 690,31 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 71,29 | 73,25 | 74,32 | 77,19 | 82,09 |
| L. | Real Estate | 111,26 | 112,64 | 117,81 | 122,53 | 128,33 |
| M.N. | Jasa Perusahaan | 2,57 | 2,73 | 3,11 | 3,3 | 3,56 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 345,01 | 347,29 | 355,53 | 400,75 | 389,84 |
| P. | Jasa Pendidikan | 290,87 | 296,51 | 297,18 | 318,97 | 328,81 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 120,79 | 128,66 | 131,68 | 147,92 | 153,05 |

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.S.T.U. | Jasa lainnya | 107,4 | 112,03 | 115,16 | 123,12 | 127,13 |
| **PDRB** | | **6822,79** | **7125,01** | **7.533,32** | **7.877,28** | **8.241,23** |

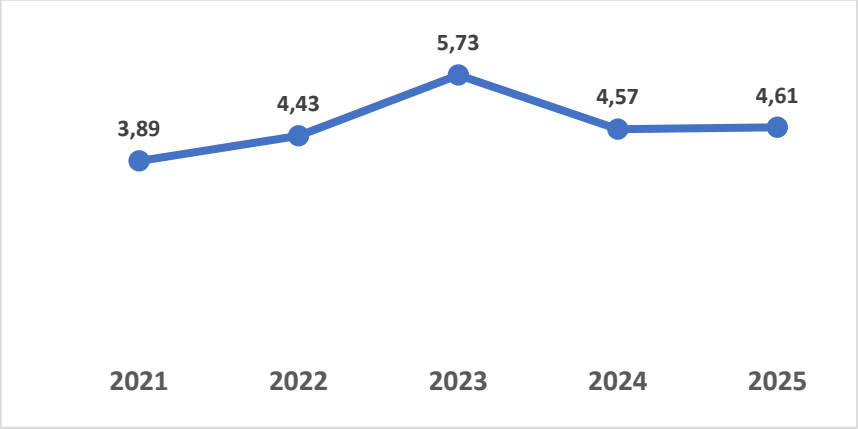
Sumber Data: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

**b. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat persentase kenaikan nilai ekonomi suatu negara atau daerah selama periode tertentu, seperti tahun atau kuartal. Ini adalah ukuran kinerja ekonomi dalam hal pertumbuhan dan produktivitas. Laju pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Tujuan utama pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, standar hidup, dan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang lebih baik.

Laju pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa cepat suatu daerah atau wilayah mengalami peningkatan dalam produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 15**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci pada periode 2021 s/d 2025 berfluktuatif cenderung meningkat dimana pada tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 3,89 persen dan tumbuh di tahun 2023 menjadi 5,73 persen, hal ini sejalan dengan penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,03 di tahun 2023, ditahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci cenderung melambat sebesar 4,57 persen namun tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci di Tahun 2024. Akan tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 4,61 persen. Kenaikan ini murni desebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Terdapat 15 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Tujuh diantaranya mengalami pertumbuhan lebih dari lima persen, sedangkan delapan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positih namun kurang dari lima persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih tersebut antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,12 persen; Industri pengolahan sebesar 5,77 persen; Perdagangan Besar dan Enceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,82; Transportasi dan Pegudangan sebesar 12,54 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,72 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,24 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 6,53 persen.

**Tabel II. 15**
**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan target RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| No | Sasaran Makro Pembangunan | Capaian Tahun 2025 | | | Target RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indonesia | Jambi | Kerinci | |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,11 | 4,93 | 4,61 | 5,79 |

Sumber: BPS Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, capaian tersebut masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masih tumbuh, tetapi

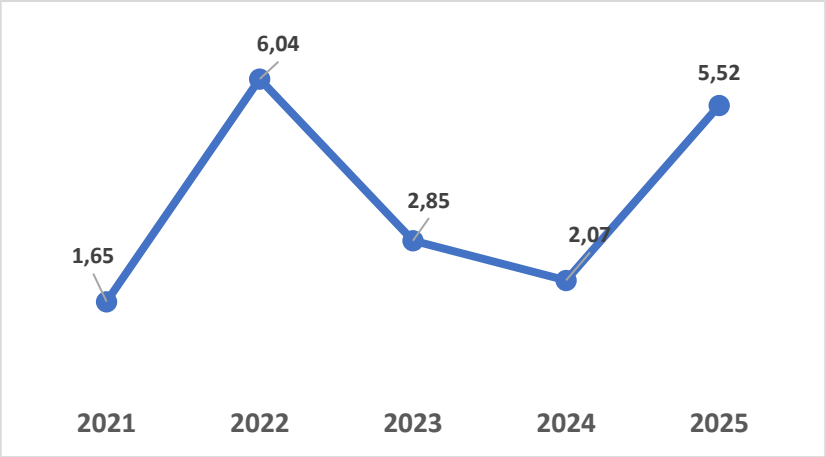
dengan kecepatan yang belum mampu menyamai pertumbuhan di Provinsi Jambi dan Nasional. Perbedaan laju pertubuhan ini mengindikasikan bahwa kapasitas perekonomian daerah perlu diperkuat.

**c. Tingkat Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Dengan kata lain, daya beli uang menurun karena perlu membayar lebih banyak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sama, Inflasi tidak hanya terjadi pada satu atau dua barang, melainkan terjadi pada berbagai jenis barang dan jasa secara luas, kenaikan harga tidak hanya terjadi sekali, melainkan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, tentunya akan menyebabkan nilai uang kita berkurang, sehingga kita membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan biaya produksi, peningkatan permintaan, atau peningkatan jumlah zuang yang beredar.

Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan mengurangi investasi, Dengan inflasi yang terkendali, masyarakat dapat memiliki daya beli yang lebih baik dan dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk melihat tingkat inflasi di Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar II. 16**
**Tingkat Inflasi Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2026

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar diatas bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Kerinci adalah sebesar 1,65 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan inflasi yang signifikan menjadi 6,04 persen. Pada tahun 2023 tingkat inflasi di Kabupaten Kerinci berada pada posisi 2,85 persen, dan selanjutnya pada tahun 2024 Kabupaten Kerinci telah menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan Tingkat inflasi sebasar 2,07 persen. Namun pada tahun 2025 kembali terjadi kenaikan signifikan menjadi 5,52 persen. Secara umum Tingkat inflasi Kabupaten Kerinci dikategorikan sebagai inflasi rendah yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kerinci tidak mengalami lonjakan harga yang drastis.

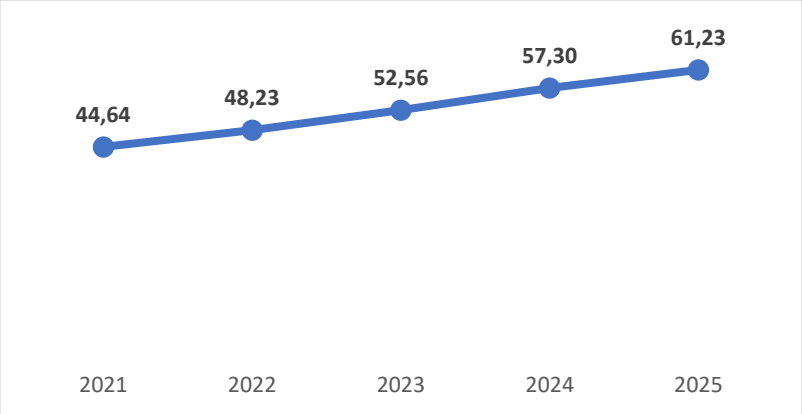
### d. PDRB per Kapita

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara dan daerah.

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah di mana jika semakin besar PDRB

perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin menurun tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB Per Kapita dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 17**
**PDRB Per Kapita atas harga berlaku (Juta Rupiah)**
**Tahun 2021-2025**



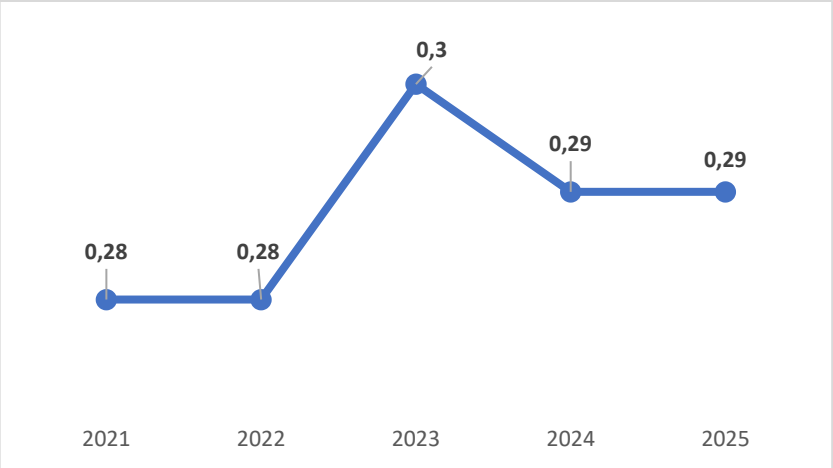

Sumber Data: BPS Priovinsi Jambi Tahun 2026

Berdasarkan data PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci tahun 2021 hingga tahun 2025 terjadi peningkatan PDRB Per Kapita secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Kerinci. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, atau peningkatan jumlah lapangan kerja.

**e. Indeks Gini**

Koefisien gini *(Gini Ratio)* adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan indeks gini. Secara rinci indeks gini Kabupaten Kerinci periode tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar II. 18**
**Indeks Gini Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data: BPS Kabupaten Kerinci 2026

**Gambar II. 19**
**Capaian Indeks Gini Kabupaten Kerinci, Provinsi, dan Nasional**
**Tahun 2025**

| No | Indikator | Capaian Tahun 2025 | | | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indonesia | Jambi | Kerinci | |
| **1.** | Indeks Gini | 0,363 | 0,291 | 0,293 | 0,28 |

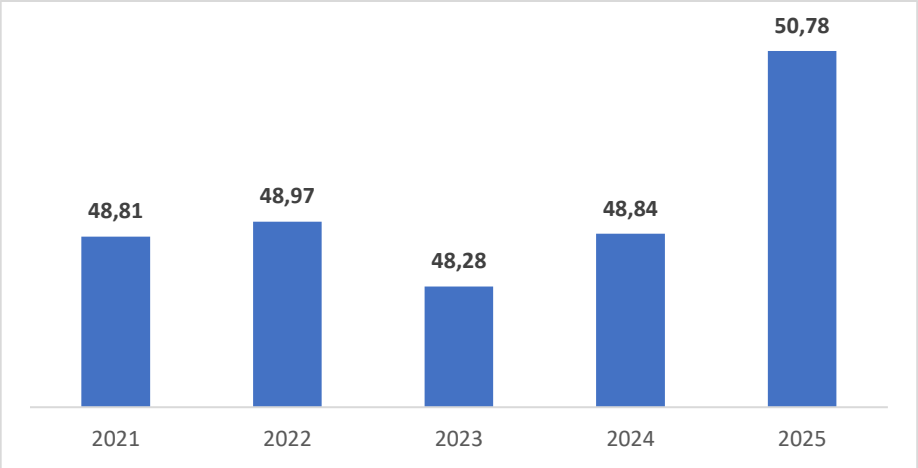
Sumber: BPS Tahun 2026

Indeks gini Kabupaten Kerinci secara grafik seperti pada gambar untuk tahun 2021 sampai 2022 mengalami kemerataan sempurna, namun mulai mengalami peningkatan grafik pada tahun 2023. Kemudian menurun kembali di tahun 2024 dengan nilai yang sama hingga tahun 2025. Menurunnya indeks gini tahun 2024 dan 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah semakin merata, yang artinya menjauhi ketimpangan sempurna dan mendekati kemerataan sempurna.

**f. Kontribusi Sektor Pertanian**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian adalah hasil produksi yang dihasilkan di suatu wilayah di bidang pertanian. Adapun sub-sektor pertanian di antaranya pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan holtikultura.

**Gambar II. 20**
**Rasio Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

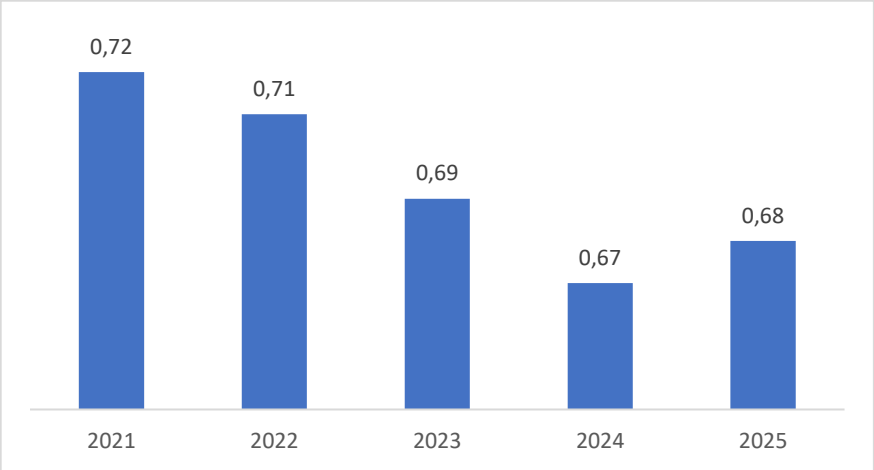
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian sebesar 48,81 persen yang mencerminkan ketahanan sektor pertanian dalam menopang aktivitas ekonomi. Memasuki tahun 2021, kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan menjadi 48,97 persen. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 48,28 persen yang mengindikasikan mulai tumbuhnya sektor-sektor lain atau adanya tekanan terhadap produktivitas pertanian. Pada tahun 2023 hingga 2025, kontribusi sektor pertanian kembali meningkat menjadi 50,78 persen yang menunjukkan adanya pemulihan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produksi, stabilitas harga komoditas maupun dukungan kebijakan pemerintah.

Kontribusi sektor pertanian terhdap PDRB Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2025 ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor pertanian yang menandakan bahwa sektor pertanian masih memiliki daya saing dan potensi besar untuk terus dikembangkan. Walupun demikian, diperlukan kebijakan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan penguatan ketahanan sektor pertanian agar kontribusinya terhadap PDRB dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dimasa mendatang.

### g. Kontribusi Sektor Pariwisata

Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan untuk rekreasi. Sektor pariwisata ini menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sub-sektor pariwisata di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum.

**Gambar II. 21**
**Rasio Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Tahun 2021-2025**




Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Dilihat pada Gambar di atas, rasio kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB tahun 2021-2024 terus mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2024 berada di angka 0,67 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Kerinci mengalami penurunan yang di setiap tahunnya. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 0,68 persen. Hal ini menandakan adanya pemulihan dan penguatan kembali kinerja sektor pariwisata. Secara keseluruhan, penurunan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan perannya terhadap PDRB. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, promosi yang lebih efektif, pengembangan pariwisata, pengenalan makanan khas daerah serta

integrasi dengan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB secara berkelanjutan di masa mendatang.

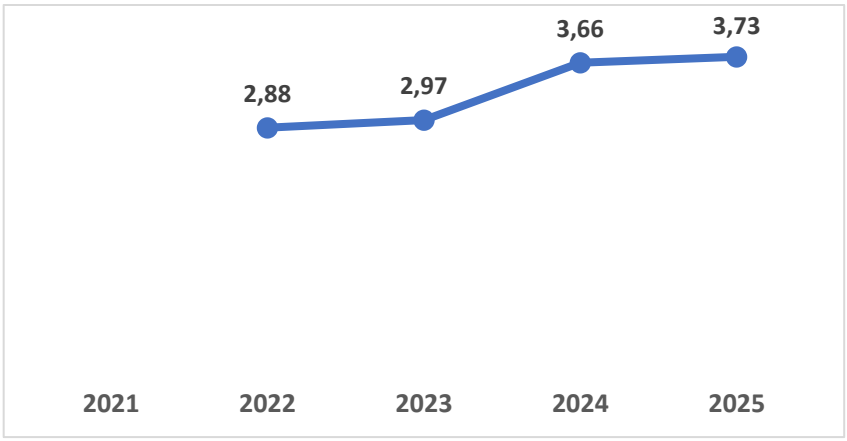
**h. Indeks Daya Saing Daerah**

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar kawasan merupakan elemen penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini berarti membangun kekuatan pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, serta diplomasi yang kuat untuk memajukan kepentingan nasional di tingkat global.

Hal ini sangat penting untuk Memastikan stabilitas dan keamanan nasional sebagai landasan pembangunan ekonomi dan sosial, Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional, Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pembangunan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan diukur salah satunya melalui Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. IDSD merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Berikut disajikan data Indeks Daya Saing Daerah:

**Gambar II. 22**
**Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2026

Berdasarkan Gambar diatas, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 s/d 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2022 s/d 2025 dimana pada tahun 2022 IDSD Kabupaten Kerinci sebesar 2,88 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,97 yang selanjutnya hingga tahun 2025 IDSD Kabupaten Kerinci semakin meningkat mencapai 3,73. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci semakin mampu megoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

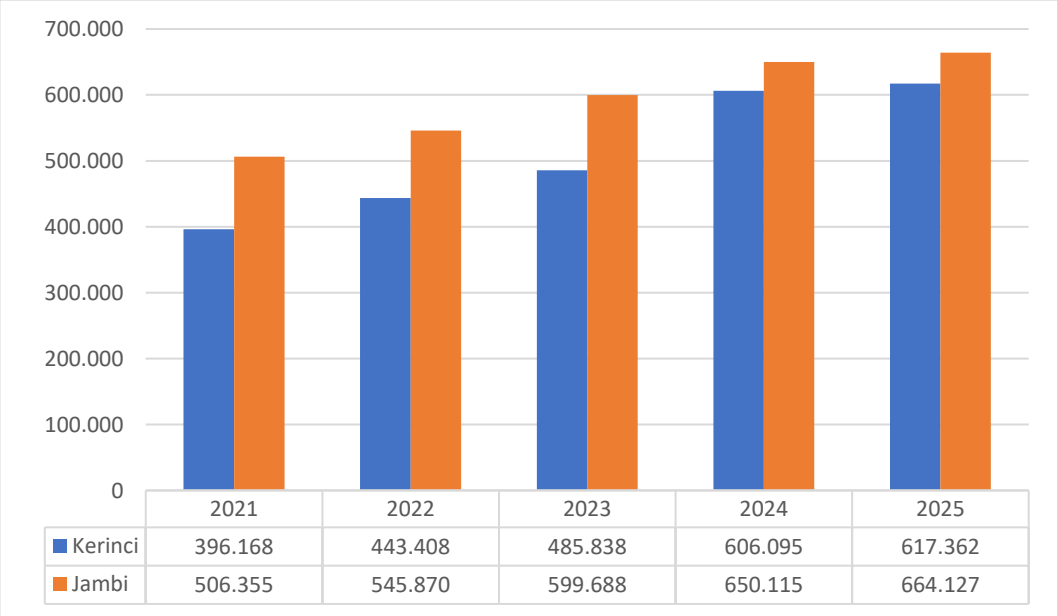
#### a. Garis Kemiskinan

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan

kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Gambar II. 23**
**Garis Kemiskinan Kabupaten Kerinci (dalam rupiah)**
**Tahun 2021-2025**




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 396.168 | 443.408 | 485.838 | 606.095 | 617.362 |
| Jambi | 506.355 | 545.870 | 599.688 | 650.115 | 664.127 |

Sumber Data: BPS Provinsi Jambi Tahun 2025

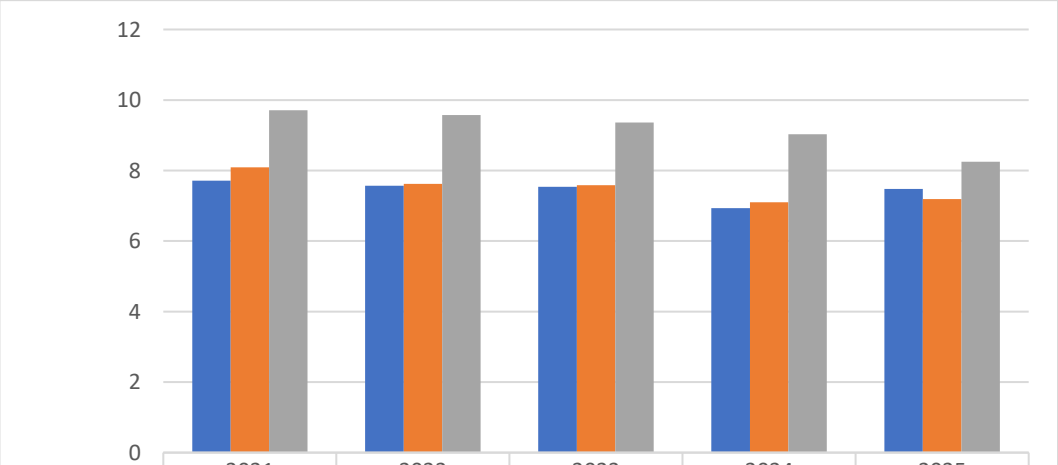
Berdasarkan data di atas, bahwa angka garis kemiskinan Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Garis kemiskinan ini apabila tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Untuk itu diperlukan kegiatan yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dibandingkan dengan angka garis kemiskinan Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci masih berada di bawahnya.

**b. Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Tingginya angka persentase penduduk miskin pada tahun 2021 dipicu pandemi *covid-19* yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 6,93. Kabupaten Kerinci memiliki sektor unggulan dan didukung program pemerintah telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Akan tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 7,48 persen.

**Gambar II. 24**
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2021-2025**



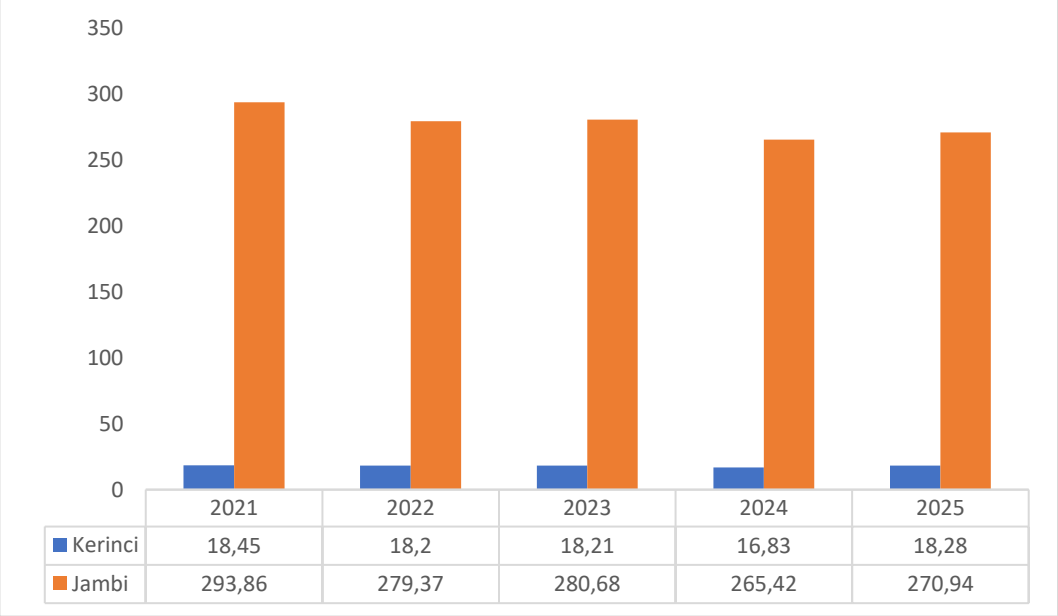

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 7,71 | 7,57 | 7,54 | 6,93 | 7,48 |
| Jambi | 8,09 | 7,62 | 7,58 | 7,1 | 7,19 |
| Nasional | 9,71 | 9,57 | 9,36 | 9,03 | 8,25 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,62 persen, Kabupaten Kerinci masih berada pada angka yang

lebih tinggi. Aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, oleh karena itu informasi mengenai profil dan karakteristik kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan (*stakeholder*). Upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kerinci dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta adanya dukungan dari pemerintah, *stakeholder* dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.

**Gambar II. 25**
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci (ribu jiwa)**
**Tahun 2021-2025**




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 18,45 | 18,2 | 18,21 | 16,83 | 18,28 |
| Jambi | 293,86 | 279,37 | 280,68 | 265,42 | 270,94 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2025

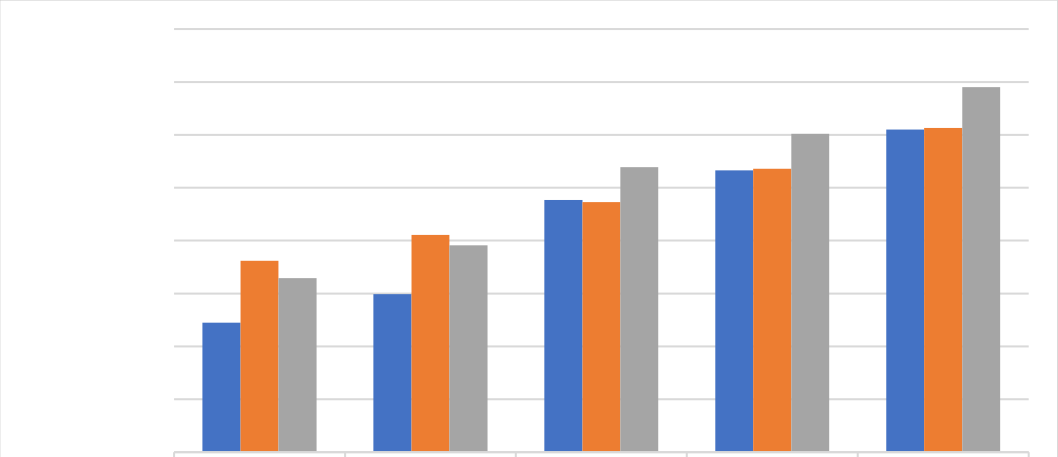
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sempat menurun pada tahun 2024 menjadi 16,28 ribu jiwa, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 18,28 ribu jiwa. Penurunan di tahun 2024 dan peningkatan kembali pada tahun 2025 sejalan dengan tingkat inflasi yang juga mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya membaik.

### c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar II. 26**
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 71,45 | 71,99 | 73,77 | 74,33 | 75,10 |
| Jambi | 72,62 | 73,11 | 73,73 | 74,36 | 75,13 |
| Indonesia | 72,29 | 72,91 | 74,39 | 75,02 | 75,9 |

Sumber Data: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada gambar, IPM Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 sebesar 71,45 dan pada tahun 2024 mencapai angka 75,10, angka ini mengalami peningkatan. Artinya

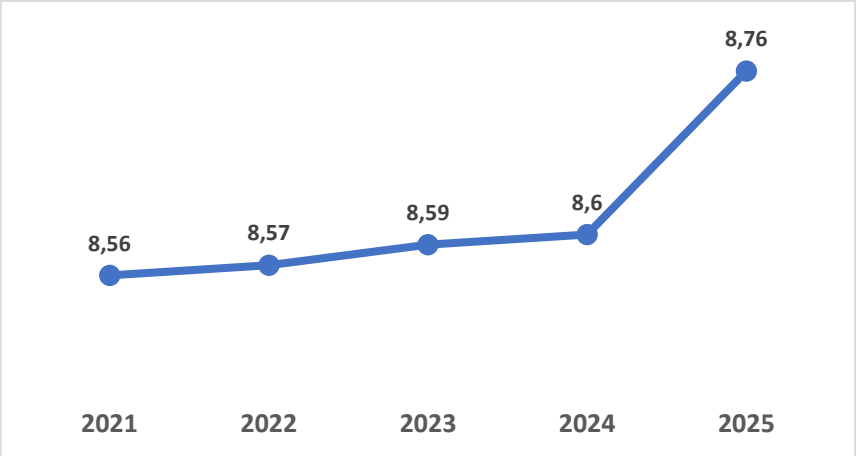
Kabupaten Kerinci mengalami keberhasilan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

**d. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menjalani pendidikan formal. Dengan kata lain, RLS menggambarkan lamanya masa sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk dalam sistem pendidikan formal.

Rata-rata lama sekolah (RLS) penting karena menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi RLS, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang ditempuh, dan ini berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. RLS juga menjadi indikator kualitas pendidikan dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan pendidikan yang lebih efektif:

**Gambar II. 27**
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data: BPS Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi Tahun 2025

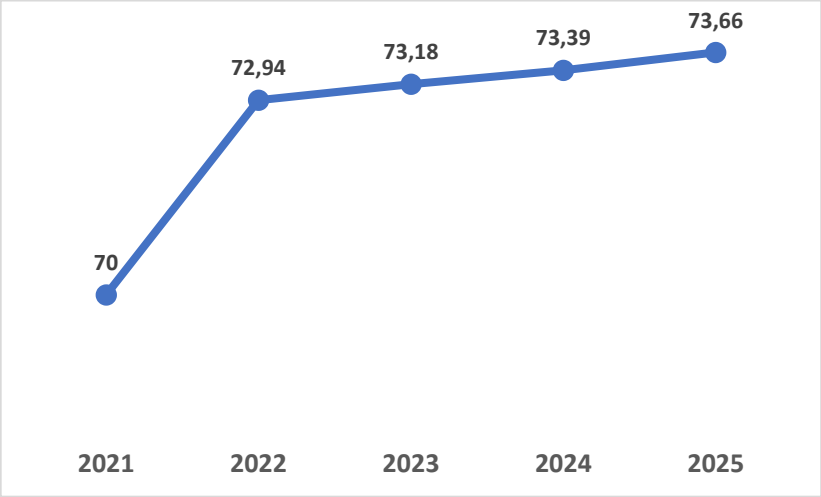
Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 s/d 2025 mengalami peningkatan diketahui pada tahun 2021 angka RLS Kabupaten Kerinci sebesar 8,56 tahun dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2025 menjadi 8,76 tahun, dapat dirata-ratakan RLS Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir sebesar 8,62 tahun, namun angka ini masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten

Kerinci untuk lebih menitik beratkan arah Pembangunan kedepan pada sektor pendidikan, yang merupakan modal dasar dalam pembangunan manusia berkelanjutan.

**e. Usia Harapan Hidup**

Usia harapan hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan data kesehatan dan kematian di suatu wilayah. UHH merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. UHH mengukur rata-rata berapa lama seseorang diperkirakan akan hidup setelah lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut. Berikut dapat disajikan angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci tahun 2021 s/d 2025:

**Gambar II. 28**
**Usia Harapan Hidup Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2024

Berdasarkan Gambar diatas Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci pada periode 2021 s/d 2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 70 tahun UHH Kabupaten Kerinci pada tahun 2021, meningkat menjadi 72,94 tahun, di tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 2,94 persen. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,18 tahun atau meningkat sebesar 0,24 persen, dan hal sama juga terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 73,39 tahun atau sebesar 0,21 persen, selanjutnya pada tahun

2025 UHH Kabupaten Kerinci meningkat menjadi 73,66 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat secara rata-rata angka UHH Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir sebesar 72,63 tahun, hal ini menunjukan perbaikan kualitas kesehatan di Kabupaten Kerinci, dan dapat diartikan bahwa UHH Kabupaten Kerinci sebesar 73,66 tahun dari berapa lama Masyarakat Kabupaten Kerinci diperkirakan akan hidup setelah lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut.

#### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

**a. Kebudayaan**

Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial seperti bahasa dapat dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kebudayaan masyarakat itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri seperti *Kenduri Sko, Kenduri Peresmian Pernikahan Tari Tale Keberangkatan Haji, Tari Tupai, Tari Upacara Asyiek, Tari Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar, Pesta Perndan* lain-lain.

Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial. Penampilan seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya. Semakin banyak seni dan budaya hasil kreatifitas pelaku seni budaya yang

dipertunjukan melalui penyelenggaraan event menunjukan bahwa semakin beragam kebudayaan daerah tersebut.

**Tabel II. 16**
**Data Wisata Budaya Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Event/ Wisata Budaya | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Festival Kerinci | 2021 | |
| 2. | Festival Tradisi Tingkat Provinsi Jambi | 2021 | |
| 3. | Festival Sko Desa Tebat Ijuk Kecamatan Air Hangat Timur | 2021 | |
| 4. | Kenduri Sko Desa Jujun Kecamatan Danau Kerinci Barat | 2021 | |
| 5. | Kenduri Sko Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat | 2021 | |
| 6. | Festival Kerinci | 2022 | |
| 7. | Festival Tradisi Tingkat PRovinsi Jambi | 2022 | |
| 8. | Kenduri Sko Lempur | 2022 | |
| 9. | Kenduri Sko Jujun | 2022 | |
| 10. | Kenduri Sko Tanjung Tanah | 2022 | |
| 11. | Kenduri Sko Semerap | 2022 | |
| 12. | Kenduri Sko Kemantan | 2022 | |
| 13. | Kenduri Sko Belui | 2022 | |
| 14. | Kenduri Sko Penawar | 2022 | |
| 15. | Kenduri Sko Siulak Mukai | 2022 | |
| 16. | Festival Kerinci | 2023 | |
| 17. | Kenduri Sko Lempur | 2023 | |
| 18. | Swarnabhumi di Kayu Aro | 2023 | |
| 19. | Kayu Aro Culture Festival | 2023 | |
| 20. | Kenduri Sko Semerap | 2023 | |
| 21. | Kenduri Sko Mukai Tengah | 2023 | |
| 22. | Kenduri Sko Lolo | 2023 | |
| 23 | Swarnabhumi Siulak | 2024 | |
| 24 | Pekan kebudayaan | 2024 | |
| 25 | Kenduri Sko Lolo | 2025 | |
| 26 | Kenduri Sko Kubang | 2025 | |
| 27 | Kenduri Sko Pendung | 2025 | |
| 28 | Festival Gunung Tujuh | 2025 | |
| 29 | Festival Budaya kerinci | 2025 | |

Sumber: Disparbud Kab.Kerinci Tahun 2026

**b. Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan. Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlit.

Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kabupaten Kerinci sebagai sebuah Kabupaten yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat. Pengelolaan gelanggang olahraga itu sendiri pada saat ini masih terkendala anggaran untuk memenuhi kapasitas sarana prasarana penunjang untuk pelatihan olahraga atlet, Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pendanaan dan dukungan prasarana dan sarana olahraga dianggap belum kuat dan itu sering dituding menjadi salah satu sebab terpuruknya prestasi olah raga, begitu juga dengan kepedulian masyarakat dan *stakeholders* terkait dirasa belum memadai.

**c. Kepariwisataan**

Kabupaten Kerinci dengan keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Objek wisata Kabupaten Kerinci terdiri dari wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Jumlah wisatawan Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 765.803. Peningkatan ini didominasi oleh wisatawan domestik. Sementara itu, kunjungan wiatawan mancanegara berjumlah 775 pada tahun 2025.

**Tabel II. 17**
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | Wisatawan Mancanegara | Wisatawan Domestik | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | 252.324 | 252.324 |
| 2022 | 229 | 327.234 | 327.463 |
| 2023 | 303 | 411.090 | 411.393 |
| 2024 | 680 | 570.543 | 571.223 |
| 2025 | 775 | 765.028 | 765.803 |

Sumber: Disparbud Kab. Kerinci Tahun 2026

Dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Bappeda Litbang melakukan Kajian Pengembangan Pariwisata dan Strategi Peningkatan PAD bekerjasama dengan Universitas Andalas (UNAND) dan Universitas Negeri Padang (UNP), dimana hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengambil kebijakan dalam memajukan sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

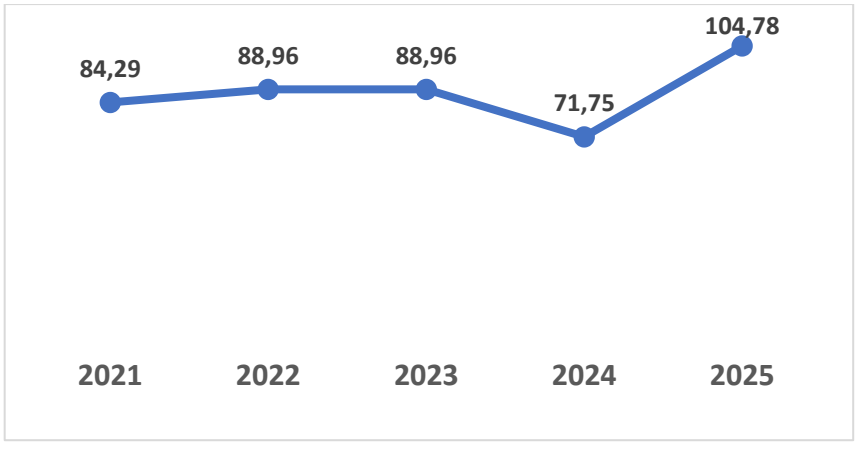
**a. Pendidikan**

Urusan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan fokus urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Kerinci mempunyai kewenangan salah satunya adalah menangani pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Berikut adalah beberapa indikator penentu dalam urusan pendidikan.

**a) Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang diberikan sebelum anak masuk ke jenjang pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diupayakan untuk membina anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berikut adalah tren partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kerinci.

**Gambar II. 29**
**Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 (%)**




Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Tahun 2026

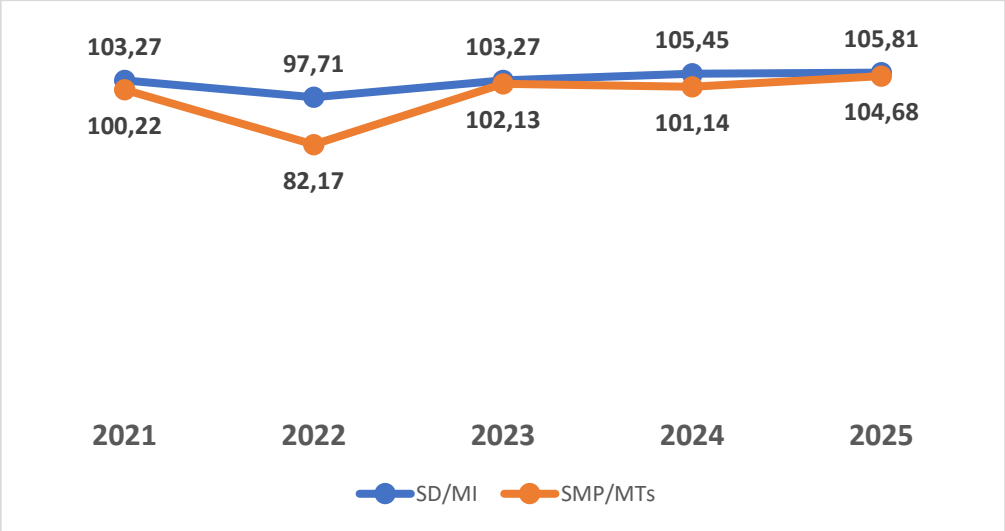
Dari Gambar diatas, dijelaskan bahwa tingkat angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kerinci menunjukkan pola

fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci berhasil memberikan hak dasar pendidikan bagi anak-anak usia dini sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan dasar yang lebih baik.

**b) Angka Partisipasi Kasar**

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persen. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pendidikan dasar dan menengah pertama. Data mengenai tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan SD dan SMP disajikan dalam grafik berikut.

**Gambar II. 30**
**Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Tahun 2026

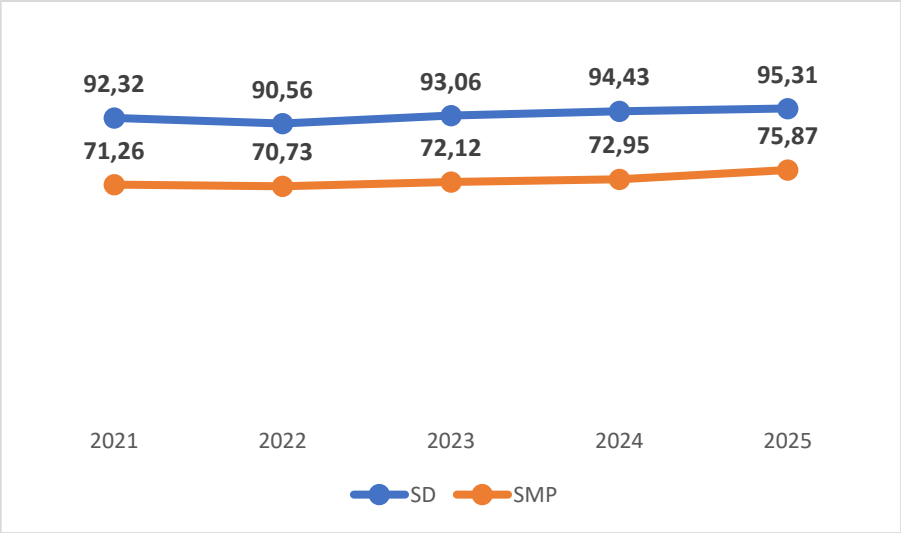
Angka Partisipasi Kasar (APK) selama kurun waktu lima tahun di Kabupaten Kerinci berfluktuatif cenderung meningkat. Dari data yang ada menunjukkan Kerinci mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari

target yang sesungguhnya pada tahun 2021. Skor APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Namun pada tahun 2022 mengalamai penurunan untuk tingkat SD/MI menjadi 97,71 persen dan tingkat SMP/MTs menjadi 82,17 persen. Di tahun 2023–2025 pada tingkatan SD/MI maupun pada tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kerinci kembali memenuhi target diatas 100%.

**c) Angka Partisipasi Murni (APM)**

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan dan jumlah masyarakat yang bersekolah harus terus diupayakan. Untuk menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD atau SMP yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolaaph tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Bila seluruh anak usia sekolah setara SD atau dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM Kabupaten Kerinci dari tahun 2021-2025 disajikan pada Gambar berikut.

**Gambar II. 31**
**Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Tahun 2026

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka partisipasi murni SD relatif stabil dari tahun ke tahun, dan mendekati 100 persen. Sedangkan angka partisipasi murni SMP masih jauh dari 100 persen, namun tiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka partisipasi murni SMP jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi murni SD. Ini berarti penduduk usia setara SMP masih banyak yang tidak mengikuti pendidikan tepat waktu. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengambil langkah strategis kedepannya dalam menjamin hal pendidikan bagi seluruh anak.

**d) Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Patisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 18**
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Usia | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Usia 5-6 Tahun (%) | - | 45,43 | 88,96 | 71,75 | 77,12 |
| Usia 7-12 Tahun (%) | 97,75 | 99,40 | 97,42 | 99,26 | 99,96 |
| Usia 13-15 Tahun (%) | 93,71 | 97,83 | 64,17 | 95,31 | 94,79 |

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Tahun 2026

Jika dijumlahkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kerinci dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Angka partisipasi sekolah di semua usia pada tahun 2025 sebesar 77,12 persen (usia 5-6 tahun), 99,96 persen (usia 7-12 tahun), dan 94,79 persen (usia 13-15 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penduduk usia sekolah di Kabupaten Kerinci yang mengeyam pendidikan. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah kedepannya.

**e) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTS**

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar mutu pengajaran tercapai. Jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SPM/MTS yang dihitung adalah baik guru PNS maupun swasta (non-PNS). Formula untuk menghitung rasio guru/murid adalah jumlah murid dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 19**
**Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (100%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SD/MI | | | | | | |
| 1.1 | JUMLAH GURU | 2.471 | 2.454 | 2.822 | 2.478 | 3.416 | 10,22 |
| 1.2 | JUMLAH MURID | 22.983 | 22.983 | 21.984 | 21.888 | 21.132 | -1,53 |

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (100%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | **RASIO** | **9,3** | **9,4** | **7,8** | **8,8** | **6,2** | **8,30** |
| 2 | SMP/MTS | | | | | | |
| 2.1 | JUMLAH GURU | 1.569 | 1.558 | 1.532 | 1.574 | 1.640 | 3,14 |
| 2.2 | JUMLAH MURID | 8.696 | 8.015 | 7.378 | 7.348 | 7.332 | 0,31 |
| 2.3 | **RASIO** | **5,5** | **5,1** | **4,8** | **4,7** | **4,5** | **4,93** |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2026

Data pada Tabel, rasio guru/murid SD/MI di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung mengalami penurunan dengen penurunan yang tidak begitu signifikan. Namun, meningkat kembali pada tahun 2024. Akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2025 menjadi 6,2. Pertumbuhan rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2021-2025 berada di angka 8, berarti bahwa satu orang guru mengajar 8 murid. Pertumbuhan rata-rata rasio guru/murid SMP/MTs mendekati 5 yang berarti satu guru mengajar 5 murid. Berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2 ayat (2) poin 5 “setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik”. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ketersediaan guru untuk mengajar sekelompok murid di Kabupaten Kerinci sudah cukup. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.

**f) Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis. Data perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 20**
**Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Putus Sekolah,Sekolah Dasar (SD)/MI (%) | 0,04 | 0,5 | 0,04 | 0,01 | 0 |
| 2 | Angka Putus Sekolah,Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS (%) | 0.271 | 0,4 | 1,02 | 0,33 | 0,003 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2026

Berdasarkan Tabel di atas, angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten kerinci dalam kurun waktu 2021-2025 menurun. Pada tahun 2021, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,04 persen dan terus mengalami penurunan hingga nol persen pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi siswa yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP/MTS juga menunjukkan angka putus sekolah yang mengalami penurunan, dimana 0,271 pada tahun 2021 menjadi 0,003 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan sinyal positif bagi kondisi pendidikan di Kabupaten Kerinci.

**g) Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS**

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan nilai Ujian Nasional, akan tetapi ditentukan oleh proses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing. Data perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 21**
**Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar (SD)/MI (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS (%) | 94,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,89 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2026

Berdasarkan data pada Tabel, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2021-2025 cenderung mengalami kenaikan. Angka kelulusan tingkat SD/MI selama beberapa tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Kondisi ini harus dipertahankan agar angka kelulusan tidak turun dan tetap pada kondisi siswa lulus seluruhnya. Kecenderungan yang meningkat untuk kelulusan semua tingkat pendidikan ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan angka kelulusan tersebut. Indikator kinerja urusan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 22**
**Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Kerinci**

| No | Indikator Kinerja Urusan | Satuan Indikator Kinerja Urusan | Kerinci | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2027 | 2027 |
| | | | Capaian | Target Daerah | Target Nasional |
| 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,76 | 8,61 | N/A |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,18 | 13,93 | N/A |
| 3 | Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SD | Nilai | 58,92 | 61,43 | 60,86 |
| 4. | Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SMP | Nilai | 65,46 | 66,57 | 71,86 |
| 5. | Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD | Nilai | 53,89 | 56,8 | 53,41 |
| 6. | Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SMP | Nilai | 59,04 | 60,55 | 64,99 |
| 7. | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun | Persen | 77,12 | 80,16 | 90,36 |
| 8. | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun | Persen | 98,16 | 98,72 | 98,32 |
| 9. | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan | Persen | 30,57 | 34,61 | 34,11 |
| 10 | Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | Persen | 28,94 | 31,16 | 67,46 |

| No | Indikator Kinerja Urusan | Satuan Indikator Kinerja Urusan | Kerinci | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2027 | 2027 |
| | | | Capaian | Target Daerah | Target Nasional |
| 11 | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 | Persen | 76,28 | 76,37 | 84,23 |
| 12 | Iklim Keamanan SD | Nilai | 75,6 | 76,51 | 75,04 |
| 13 | Iklim Keamanan SMP | Nilai | 68,37 | 69,87 | 72,17 |
| 14 | Iklim Kebinekaan SD | Nilai | 69,42 | 70,42 | 67,72 |
| 15 | Iklim Kebinekaan SMP | Nilai | 68,93 | 69,94 | 68,37 |
| 16 | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | 58,57 | 61,08 | 60,72 |
| 17 | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | 56,02 | 58,42 | 62,41 |
| 18 | Angka Partisipasi Kasar SD | Persen | 105,81 | 102,6 | N/A |
| 19 | Angka Partisipasi Kasar SMP | Persen | 104,68 | 86,28 | N/A |
| 20 | Angka Partisipasi Murni SD | Persen | 95,31 | 93,28 | N/A |
| 21 | Angka Partisipasi Murni SMP | Persen | 75,87 | 75,68 | N/A |
| 22 | Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan Kualifikasi S1/D4 | Persen | 85,25 | 92,96 | N/A |
| 23 | Proporsi Guru Pendidikan Dasar Memiliki Sertifikat Pendidik | Persen | 31,94 | 33,28 | N/A |
| 24 | Satuan Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) | Persen | 87,67 | 88,78 | N/A |
| 25 | Satuan Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) | Persen | 89,23 | 90,32 | N/A |

Sumber: Outcome Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci 2027

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebesar 77,12 persen ini menunjukkan bahwa Proporsi anak sekolah pada usia 5-6 tahun di Kabupaten Kerinci 77,12 persen dalam kelompok jenjang pendidikan usia usia 5-6 tahun. Untuk Tahun 2027 target APS Kabupaten Kerinci 80,16 persen. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebesar 98,16 persen ini menunjukkan bahwa Proporsi anak sekolah pada usia 7-15 tahun di Kabupaten Kerinci 98,16 persen dalam kelompok jenjang pendidikan usia usia 7-15 tahun. Untuk Tahun 2027 target APS Kabupaten Kerinci 98,72 persen.

Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM kemampuan literasi membaca dan kemapuan numerasi.

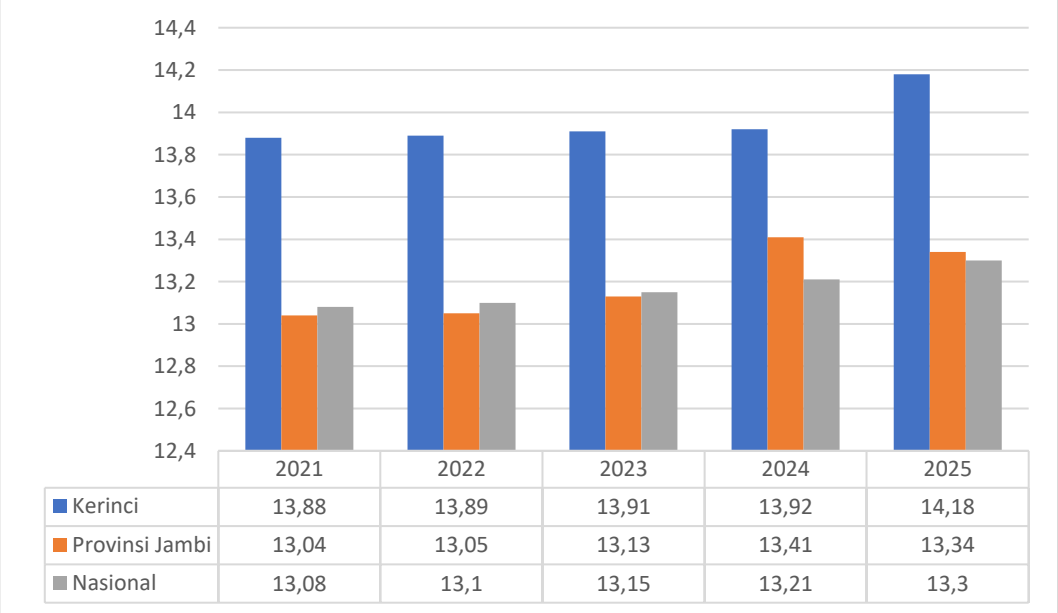
Kemampuan Literasi adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksikan dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga dia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat. Kemampuan Numerasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tabel di atas rata-rata kemapuan literasi SD di Kabupaten Kerinci sebesar 58,92 degan target 2025 sebesar 61,43, sedangkan kemapuan numerasi 53,89, target 2025 56,80. Pada tingkat SMP di Kabupaten Kerinci rata-rata literasi sebesar 65,46, dengan target 2025 sebesar 66,57, sedangkan kemampuan numerasi SMP 59,04 dengan target 2025 sebesar 60,55.

Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B pada tahun 2025 sebesar 28,94 dengan target tahun 2025 sebesar 31,16. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan

kualifikasi S1 / D IV pada tahun 2025 sebesar 76,28 dengan target tahun 2025 sebesar 76,37.

**Gambar II. 32**
**Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**



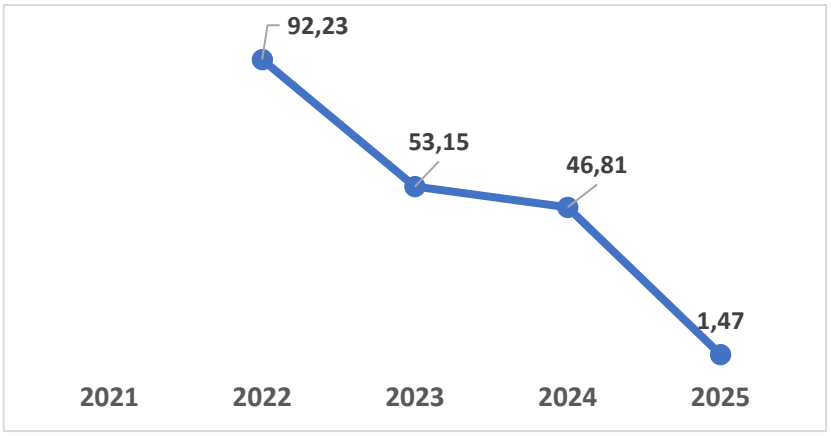

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 13,88 | 13,89 | 13,91 | 13,92 | 14,18 |
| Provinsi Jambi | 13,04 | 13,05 | 13,13 | 13,41 | 13,34 |
| Nasional | 13,08 | 13,1 | 13,15 | 13,21 | 13,3 |

Sumber: BPS Tahun 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan harapan lama sekolah anak pada umur tertentu untuk memberikan peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Ketetapan HLS pada suatu wilayah adalah 12 tahun, artinya secara rata-rata anak-anak diperkirakan mengenyam pendidikan di suatu wilayah selama 12 tahun. Pada data di atas, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun 2021-2025 mengalami peningkatan, meskipun angkanya tidak meningkat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,88 tahun atau setara dengan Diploma I.

Peningkatan harapan lama sekolah menandakan bahwa secara kuantitatif akses pendidikan semakin terbuka. Namun, indek literasi mengalami penurunan. Hal ini mengidikasikan bahwa waktu belajar tersebut belum dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan mengelola informasi. Indeks literasi dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 33**
**Indeks Literasi Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2026

Indeks literasi Kabupaten Kerinci berfluktuatif dengan angka terbesar dicatatkan pada tahun 2022 sebesar 92,23 poin dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 menjadi 1,47 poin. Sementara pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci belum menjadi dinas dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia belum menilai Indeks Literasi masyarakat.

**b. Kesehatan**

**a) Rasio Posyandu per Satuan Balita**

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu dan balita Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel II. 23**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Posyandu | 304 | 199 | 199 | 199 | 292 | 3,05 |
| 2 | Jumlah Balita | 17.987 | 30.853 | 17.364 | 15.967 | 15.229 | 9,36 |
| **3** | **Rasio per 1000 Balita** | **16,9** | **6,4** | **11,5** | **12,5** | **19,2** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 sebesar 16,9, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 16 posyandu dengan rata-rata 62 balita dilayani 1 unit posyandu. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah balita sebanyak 12.866 balita yang sebaliknya terjadi penurunan jumlah posyandu menjadi 199 unit posyandu. Namun hingga tahun 2025 jumlah posyandu meningkat menjadi 292 unit posyandu dengan rasio per 1000 balita menjadi 19,2. Rasio ideal yaitu 1 posyandu untuk 100 balita artinya hingga tahun 2025 jumlah posyandu di Kabupaten Kerinci dapat melayani jumlah balita yang ada.

**b) Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk**

Puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 10.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio Puskesmas di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 24**
**Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Puskesmas | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 | 0,62 |
| **3** | Rasio per 10.000 penduduk | 0.83 | 0,82 | 0.82 | 0,81 | 0,8 | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

Dalam kurun waktu 2021-2025, jumlah puskesmas tetap sebanyak 21 unit. Rasio dari tahun 2021 hingga 2025 tidak menunjukkan perubahan

signifikan dan hanya berkutat di angka 0,8 poin. Buku pedoman kerja Puskesmas (1992) menyebutkan bahwa sasaran penduduk yang dilayani untuk sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk. Hal ini bisa diartikan bahwa pendirian sebuah Puskesmas idealnya ditempatkan pada suatu wilayah yang jumlah penduduknya 30.000 jiwa, prioritas utama ditujukan untuk kecamatan yang penduduknnya 10.000 jiwa untuk kecamatan diluar Pulau Jawa, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk 1:16.000 jiwa sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kerinci telah memenuhi standar nasional tersebut.

**c) Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk**

Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesehatan yang diberikan pada unit pelayanan dan tuntutan dari masyarakat atas pelayanan yang cepat dan terjangkau sudah menjadi kebutuhan mendesak sehingga berdiri Puskesmas Pembantu yang tersebar disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Rasio puskesmas pembantu terhadap penduduk idealnya sebesar 1:1.500 jiwa. Data pada tabel menjelaskan bahwa pertambahan jumlah pustu pada tahun 2021-2025 sebanyak 2 unit menjadi 48 unit pada tahun 2025. Dari rasio dapat dijelaskan 1 unit Puskesmas Pembantu di Kabupaten Kerinci dapat melayani 5300-5700 jiwa angka tersebut masih jauh dari rasio ideal. Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 25**
**Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Puskesmas Pembantu | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 0,87 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 | 0,62 |
| **3** | **Rasio per 10.000 penduduk** | **1,83** | **1,81** | **1,8** | **1,78** | **1,9** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

**d) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kerinci bertambah pada tahun 2025, dengan jumlah penduduk yang juga terus bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 0,62 persen. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum, tingkat pelayanan rumah sakit dalam cakupan wilayah kabupaten/kota adalah satu unit rumah sakit melayani 240.000 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021-2024 ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Kerinci masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Karena jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Kerinci tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2025, terjadi penambahan rumah sakit di Kabupaten Kerinci menjadi 2 rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci sudah mulai membaik dan mampu dari segi ketersediaan layanan kesehatannya. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 26**
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Rumah Sakit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20,00 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 | 0,62 |
| **3** | **Rasio** | **3,97** | **3,94** | **3,92** | **3,9** | **0,1** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

**e) Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio ideal dokter dengan penduduk yaitu 1:2.500. Untuk itu Kabupaten Kerinci masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan khususnya dokter karena dari data dapat disimpulkan bahwa

jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya tidak diimbangi penambahan banyaknya jumlah dokter. Rasio dokter dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 27**
**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Dokter | 33 | 51 | 51 | 58 | 75 | 16,0 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 | 0,6 |
| **3** | **Rasio** | **1,31** | **2,01** | **2,00** | **2,26** | **2,9** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

**f) Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk**

Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (2006) merupakan seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio ideal per satuan penduduk adalah 1 : 1.000. Jumlah bidan mencatat kenaikan di tahun di tahun 2021 namun terus turun hingga tahun 2023 dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Akibatnya kualitas dari pelayanan bidan terhadap masyarakat akan semakin sulit dikarenakan perbandingan jumlah bidan dan jumlah penduduk yang tidak selaras dan berbanding terbalik. Namun, meningkat kembali hingga 2025 menjadi 523 bidan dengan jumlah bidan terbanyak selama lima tahun terakhir. Rasio ideal yaitu 1 bidan untuk 1000 penduduk artinya hingga tahun 2025 jumlah bidan di Kabupaten Kerinci dapat melayani jumlah penduduk yang ada.

Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 28**
**Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Bidan | 493 | 479 | 468 | 470 | 523 | 1,8 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 | 0,6 |
| **3** | **Rasio** | **19,57** | **18,87** | **18,35** | **18,29** | **20,3** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### g) Rasio Perawat per Satuan Penduduk

Perawat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Rasio perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga perawat berbanding jumlah penduduk. Data pada tabel menjelaskan bahwa jumlah perawat tahun 2025 menurun sebanyak 271 orang atau 41% dari tahun 2021 sementara rasio ideal Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah 1 : 855. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir berada pada rasio ideal Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Rasio perawat dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 29**
**Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Perawat | 661 | 444 | 440 | 434 | 390 | -8,7 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 | 0,6 |
| **3** | **Rasio** | **26,2** | **17,5** | **17,3** | **16,9** | **15,1** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

### h) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi

secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan yang >80% jumlah bayinya sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Angka cakupan kelurahan UCI Kabupaten Kerinci belum sesuai dengan target nasional. Menurut SPM nasional cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya. Untuk mencapai target nasional pendekatan terhadap pemangku desa seperti camat, lurah untuk mensosialisasikan jadwal imunisasi dapat dilakukan guna peningkatan cakupan UCI. Penggerakan kader sebagai pendekatan masyarakat seperti belum lengkapnya pemberian imunisasi pada beberapa bayi, kemudian dilakukan *sweeping* dan penyuluhan turut membantu peningkatan cakupan UCI dan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 30**
**Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelurahan UCI | 270 | 270 | 237 | 203 | 151 | -10,4 |
| 2 | Jumlah Kelurahan | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0,0 |
| **3** | **Cakupan Kelurahan UCI** | **94,21** | **94,21** | **82,6** | **70,7** | **52,6** | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2026

**i) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan kelompok yang banyak menderita gizi buruk. Banyak faktor yang menyebabkan anak kurang gizi, mulai dari kurang asupan gizi, ada penyakit infeksi, pengasuhan kurang memadai, kurang tersedia pangan di tingkat rumah tangga, dan kebersihan sanitasi kurang baik. Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Balita gizi buruk (sangat kurus) yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun sarana kesehatan. Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci sudah mampu mencapainya dari tahun 2021-2025 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan selalu pada angka 100 persen dan dapat dilihat pada Tabel berikut.

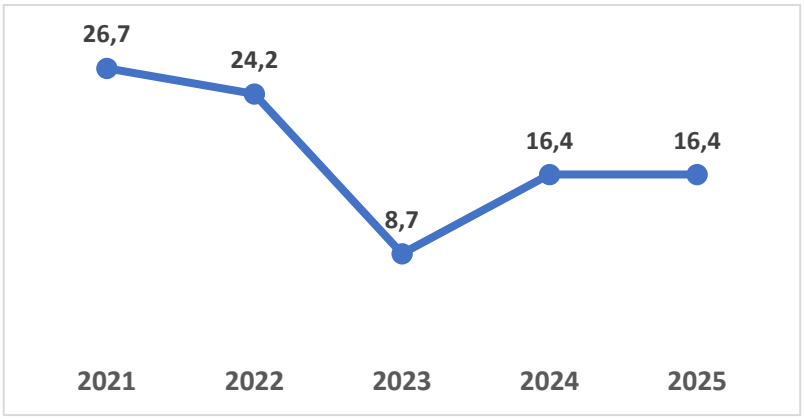
**Tabel II. 31**
**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| **3** | **Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, Stunting adalah gangguan pada pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi yang menyebabkan tinggi badannya berada di bawah tinggi badan anak pada normalnya. Prevalensi stunting adalah gambaran mengenai kasus stunting yang ada di suatu daerah. Jumlah kasus stunting hingga tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti penanganan kasus stunting di Kabupaten Kerinci sudah baik, seperti pemberian nutrisi dan gizi yang cukup kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

**Gambar II. 34**
**Prevalensi Stunting Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan Gambar diatas Persentase Pravelensi Stunting di Kabupaten Kerinci membaik hingga tahun 2023, dimana pada tahun 2020 angka Pravelensi Stunting Kabupaten Kerinci sebesar 33 persen mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 26,7 persen, begitupun di tahun 2022 angka Pravelensi Stunting Kabupaten Kerinci mengalami penurunan menjadi 24,2 persen, pada tahun 2023 berada pada angka 8,7 persen. Artinya adanya perbaikan nyata pada kualiatas tumbuh kembang anak. Kondisi ini menandakan bahwa semakin sedikit anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta pola asuh dan lingkungan yang kurang sehat. Dengan kata lain, kebutuhan dasar anak seperti asupan gizi yang cukup, layanan Kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi yang layak mulai terpenuhi dengan baik. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 16,4 persen.

**j) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, bahwa setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga

TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 32**
**Jumlah Kasus Penemuan dan Pengobatan TBC Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah kasus – Angka Penemuan TBC | 111 | 126 | 201 | 322 | 534 |
| 2. | Jumlah kasus – Angka Keberhasilan Pengobatan TBC | 125 | 195 | 232 | 431 | 408 |
| 3. | Cakupan penemuan dan Pengobatan TBC | 89,60% | 88,32% | 93,99% | 96,32% | 61,45% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Angka penemuan TBC dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalmai peningkatan secara terus-menerus. Artinya jumlah penderita TBC di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan tiap tahunnya. Angka penemuan jumlah kasus TBC dibarengi dengan angka keberhasilan pengobatan TBC yang juga meningkat hingga tahun 2024. Namun tahun 2024 ke tahun 2025 angka keberhasilan pengobatan mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2024 ke tahun 2025 angka penemuan jumlah kasus meningkat. Hal ini tidak sinkron antara penemuan kasus dengan pengobatan kasus. Penurunan keberhasilan pengobatan ini bisa terjadi karena masalah pengobatan atau kualitas dari obat itu sendiri dan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 33**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati | 111 | 126 | 201 | 322 | 534 | 35,1 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA | 846 | 948 | 786 | 870 | 869 | 1,1 |

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 13,12% | 13,50% | 25,57% | 37,00% | 61,45% | 35,9% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**k) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dikenal di Indonesia sebagai penyakit yang

endemis terutama bagi anak-anak. Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk *Aides Aegypti*. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat baik secara lingkungan, biologis maupun secara kimiawi. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur *larvasida*, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk *Aedes Aegypti* berkembang biak. Jumlah kasus dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 34**
**Jumlah Kasus Penyakit DBD Per 100.000 Penduduk**
**Tahun 2021-2024**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk** | 2,5 | 12,61 | 9,8 | 107,13 | 49 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Angka penemuan kasus DBD Per 100.000 Penduduk mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka penemuan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2024 sebanyak 107,13. Hal ini dikarenakan pencegahan nyamuk *Aedes Aegypti* yang belum optimal. Cakupan penemuan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 35**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penderita baru penyakit DBD yang ditemukan dan diobati | 43 | 32 | 29 | 48 | 104 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita baru penyakit DBD | - | - | - | 132 | - |
| **3** | **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD** | **-** | **-** | **-** | **100** | **-** |

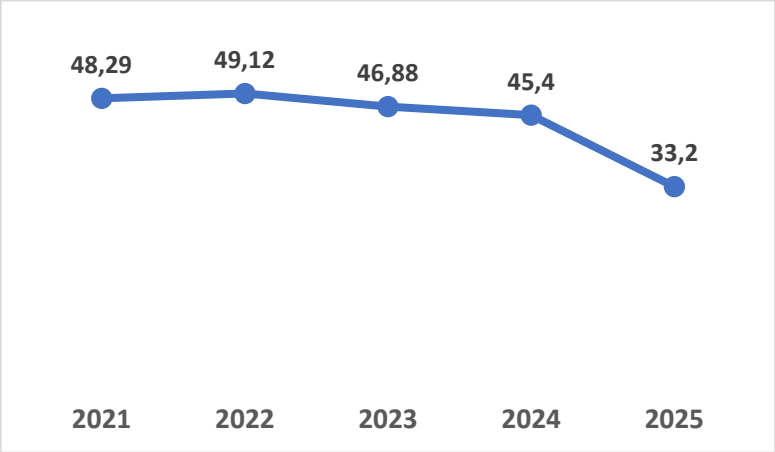
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

### a) Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap

Jalan merupakan salah satu elemen perhubungan yang dominan digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk. Keberadaan jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah di mana fungsinya sebagai penghubung dan memberikan akses dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Jalan mantap adalah jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

**Gambar II. 35**
**Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kerinci 2026

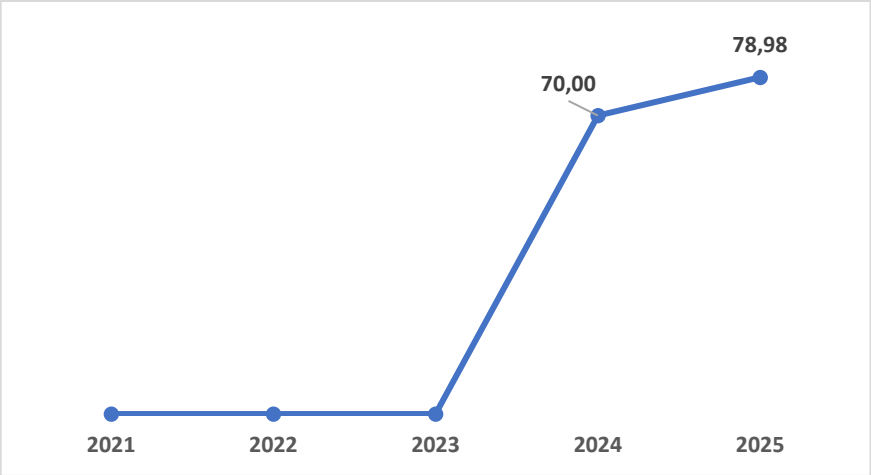
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan provinsi/ kabupaten/ kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60%. Idealnya kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota. Dari data Kabupaten Kerinci, persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami pertumbuhan rata-rata 44,58 %. Artinya jalan di Kabupaten Kerinci belum berada dalam kondisi mantap.

Target standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dicapai melalui memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/Roughometer), membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat serta melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala pada jalan dan jembatan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai International Roughness Index (IRI).

**b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman**

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan rumah tangga yang menggunakan fasilitasi sanitasi yang tidak hanya layak, tetapi juga mampu mengelola tinja secara aman sehingga tidak mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 36**
**Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman**
**Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**



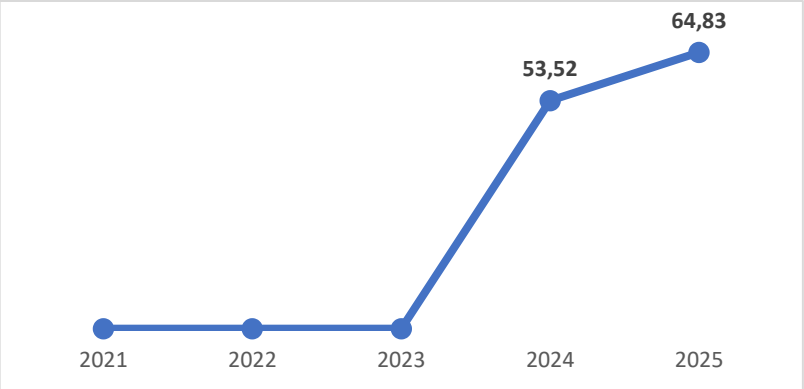

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2025 rumah tangga dengan akses sanitasi aman tercatat sebesar 70,00% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi 78,98%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan penyediaan layanan sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang memenuhi standar. Kondisi ini mencerminkan semakin banyak rumah tangga yang tidak hanya memiliki fasilitasi sanitasi layak, tetapi juga didukung oleh sistem pengelolaan limbah yang aman sehingga mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Selanjutnya, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperluas cakupan layanan sanitasi aman, miningkatkan kualitas pengelolaan limbah domestik, dan memastikan akses yang merata, terutama di wilayah yang tingkat pelayanannya masih rendah.

### c) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan merupakan rumah tangga yang memperoleh air minum melalui sistem distribusi perpipaan. Air disalurkan melalui jaringan pipa langsung ke rumah atau titik pelayanan yang memenuhi ketentuan, sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap sumber air yang lebih mudah dan memiliki kualitas yang lebih terjamin.

**Gambar II. 37**
**Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan**
**Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 53,52% dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 64,83%. Hal ini menunjukkan semakin luasnya cakupan masyarakat yang telah terlayani melalui sistem jaringan perpipaan. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum yang layak, aman dan berkelanjutan.

**d. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

**a) Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel II. 36**
**Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polisi Pamong Praja** | 207 | 205 | 204 | 200 | 222 |
| **Jumlah Penduduk (ribu)** | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 |
| **Rasio Satpol PP per 10.000 Penduduk** | **8.21** | **8,07** | **7,99** | **7,78** | **8,6** |

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Rasio Satpol PP per 10.000 Penduduk di Kabupaten Kerinci dari tahun 2021-2025 berfluktuatif namun tidak mengalami perubahan signifikan. Rata- rata rasio Satpol PP per 10.000 penduduk sebesar 8,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 8 personal Satpol PP yang harus menangani sebanyak 10.000 penduduk Kabupaten Kerinci.

**b) Rasio Linmas per 10.000 penduduk**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel II. 37**
**Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Jumlah Polisi Pamong Praja | 207 | 205 | 204 | 200 | 222 |
| **2** | Jumlah Pos Siskamling | 287 | 287 | 287 | 287 | 256 |
| **3** | Jumlah Linmas | 570 | 570 | 966 | 966 | 966 |
| **4** | Jumlah Penduduk (ribu) | 251,9 | 253,9 | 255,1 | 257 | 258,2 |
| **5** | Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk | 22,63 | 22,45 | 37,87 | 37,59 | 37,41 |

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, Rasio Linmas Per 10.000 penduduk mengalami peningkatan. Rata-rata rasio linmas per 10.000 penduduk 5 tahun terakhir sebesar 31,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 31 anggota linmas melayani 10.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa jumlah anggota linmas sudah berada dalam kisaran yang secara teknis dianggap seimbang. Dengan kata lain Linmas umumnya mampu menjalankan fungsi dasarnya dengan baik.

**c) Rasio Siskamling**

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan merupakan perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Rasio jumlah pos siskamling tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 38**
**Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Siskamling** | 287 | 287 | 287 | 287 | 256 |
| **Jumlah Desa** | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| **Rasio Siskamling** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0,8** |

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan Tabel di atas disajikan data rasio jumlah Siskamling di Kabupaten Kerinci di mana dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Rasio Siskamling sebanyak 1 Siskamling per satu desa di 18 Kecamatan di Kabupaten Kerinci. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa hanya memiliki satu Siskamling aktif. Dengan satu Siskamling untuk satu desa, jangkauan pengamanan lingkungan masih sangat terbatas, terutama pada desa dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar. Dengan kondisi tersebut, satu Siskamling tidak cukup untuk menjangkau seluruh lingkungan secara efektif. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2025 Rasio Siskamling

menurun menjadi 0,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa unit aktif Siskamling lebih sedikit daripada jumlah wilayah administratif (desa) yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah desa dan daerah perlu mendorong pembentukan Siskamling tambahan sesuai kebutuhan wilayah serta memastikan pembinaan dan partisipasi masyarakat agar keamanan lingkungan dapat berjalan lebih optimal.

**d) Pelayanan Bencana Kebakaran**

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah. Data pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 39**
**Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Petugas Damkar | 207 | 205 | 204 | 200 | 299 |
| 2 | Armada damkar | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Pos Damkar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | - Aktif | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| | - Belum Aktif | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Kerinci didukung jumlah petugas kebakaran dengan jumlah petugas damkar terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Namun meningkat Kembali pada tahun 2025 menjadi 299 jumlah petugas damkar. Selain itu, terdapat 11 unit armada pemadan kebakaran yang memiliki jumlah yang sama setiap tahunnya. Terdapat juga 14 pos damkar hingga tahun 2025 dengan 10 pos aktif hingga tahun 2023, namun pada tahun 2024-2025 hanya 9 pos damkar berstatus aktif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah petugas, armada damkar, dan pos damkar aktif belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini berpotensi mengurangi kesiapsiagaan apabila terjadi kebakaran. Hal ini dapat menjadi perhatian

bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bencana kebakaran. Dengan peningkatan tersebut, diharapkan pelayanan kebakaran dapat menjadi lebih cepat, tanggap, merata, sehingga risiko dan dampak kebakaran terhadap masyarakat dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

**e) Jumlah Bencana Alam Kabupaten Kerinci**

Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki karakteristik geografis yang menyebabkan kerentanan terhadap beberapa jenis bencana terutama banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan data selama lima tahun terakhir, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi. Berikut adalah data jumlah bencana alam di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025.

**Tabel II. 40**
**Jumlah bencana Alam di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Jumlah Bencana Alam Banjir | 14 | - | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Jumlah Bencana Tanah Longsor | 6 | - | 1 | - | - |
| 3 | Jumlah Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 4 | Jumlah Bencana Alam Cuaca Ekstrem | 8 | - | - | - | 2 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2026

Bencana yang paling dominan terjadi adalah banjir, dengan jumlah kejadian sebanyak 14 kejadian pada tahun 2021, kemudian menurun manjadi 2 kejadian pada tahun 2023, 1 kejadian pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 2 kejadian pada tahun 2025. Tingginya kejadian banjir ini mengindikasikan bahwa wilayah masih memiliki kerentanan terhadap jumlah hujan tinggi. Meskipun jumlah kejadian bencana cenderung tidak meningkat pada tahun-tahun berikutnya, tren Indeks Risiko Bencana (IRB) yang meningkat menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di daerah masih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kerentanan, ancaman, atau belum optimalnya kapasitas penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya mitigasi,

peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta intergarsi pengurungan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

**e. Sosial**

**a) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan**

Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Berbagai permasalahan sosial yang terjadi antara lain: anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila, keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin.

Jumlah PPKS Kabupaten Kerinci dihitung dengan jumlah individu penyandang PPKS dan keluarga penyandang PPKS. Jumlah PPKS yang paling banyak yaitu: keluarga fakir miskin, anak terlantar, dan penyandang cacat. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kerinci yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 41**
**Jumlah PPKS Yang Menerima Bantuan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPKS yang diberikan bantuan social | 810 | 819 | 1442 | 1220 | 25.007 |
| 2 | Jumlah PPKS yang ditargetkan menerima bantuan | 1873 | 1700 | 1600 | 1300 | 25.007 |
| 3 | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial | 43 | 48 | 90 | 94 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2026

Dari Tabel di atas terlihat bahwa PPKS yang diberikan bantuan sosial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami pergerakan yang dinamis dengan angka tertinggi di tahun 2025 sebesar 25.007 orang dengan bantuan yang telah disalurkan kepada 25.007 orang atau sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh

sasaran PPKS yang telah terdata telah menerima bantuan sosial atau layanan yang direncanakan.

### 2.1.3.2. Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**a. Ketenagakerjaan**

**a) Penduduk Usia Kerja**

*International Labour Organization (ILO)* mengelompokkan penduduk usia kerja sebagai penduduk yang telah siap untuk melakukan aktivitas/kegiatan perekonomian yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas. Batasan konsep dari usia kerja di setiap negara berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan faktor kondisi sosial demografi di setiap negara. Di Indonesia, batasan usia kerja adalah usia 15 tahun ke atas. Secara empiris, penggunaan usia di atas 15 tahun untuk penggolongan penduduk usia kerja telah banyak digunakan dalam publikasi-publikasi lain termasuk dalam pengambilan kebijakan mengenai aspek ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel, diketahui jumlah penduduk paling banyak di rentang usia 45-49 tahun, dan paling sedikit di rentang usia 75 tahun ke atas. Berikut jumlah penduduk menurut kelompok umur 15 tahun keatas di Kabupaten Kerinci tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel II. 42**
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15 tahun keatas di Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| Kelompok Umur | Jumlah |
|---|---|
| **15-19** | 20.876 |
| **20-24** | 20.824 |
| **25-29** | 20.968 |
| **30-34** | 18.494 |
| **35-39** | 18.312 |
| **40-44** | 20.525 |
| **45-49** | 22.926 |
| **50-54** | 19.029 |
| **55-59** | 14.742 |
| **60-64** | 12.469 |
| **65-69** | 10.842 |
| **70-74** | 7.247 |

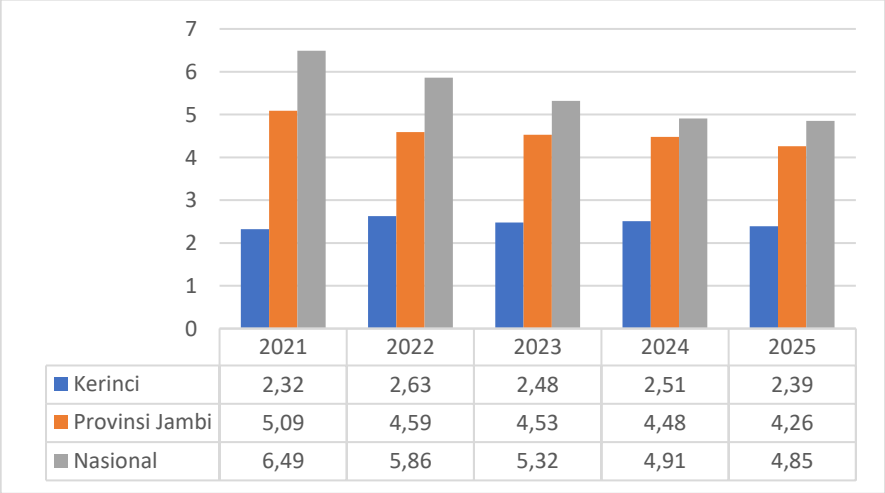
| Kelompok Umur | Jumlah |
|---|---|
| **75+** | 6.912 |
| **Jumlah** | **214.166** |

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

**b) Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT)**

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Kerinci berfluktuatif dari tahun ke tahun. TPT tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 2.39, hal ini dikarenakan jumlah pengangguran yang semakin berkurang. Tapi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jambi dan TPT Nasional, angka TPT Kabupaten Kerinci masih lebih aman. Selain itu, TPT Kabupaten Kerinci juga lebih baik dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,45 persen pada tahun 2025.

**Gambar II. 38**
**Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 2,32 | 2,63 | 2,48 | 2,51 | 2,39 |
| Provinsi Jambi | 5,09 | 4,59 | 4,53 | 4,48 | 4,26 |
| Nasional | 6,49 | 5,86 | 5,32 | 4,91 | 4,85 |

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kerinci memiliki nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,63 persen. Terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,48 persen. Akan tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 2,51, hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Ketika populasi meningkat, penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Jika permintaan tenaga kerja tidak

mampu menyerap banyaknya penawaran tenaga kerja maka pengangguran akan meningkat. Hingga pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kerinci mengalami penurunan kembali menjadi 2,39 persen.

Tantangan kedepan untuk menurunkan angka TPT di Kabupaten Kerinci adalah:

a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri ekonomi kreatif dan dunia usaha khususnya disektor pariwisata dan jasa (produk batik dan barista);
b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan;
c. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana balai latihan kerja (BLK);
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

**b. Pangan**

**a) Ketersedian Pangan Utama**

Pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 dirumuskan sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Kondisi ketahanan pangan dilihat dari 3 aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kerinci, telah dikeluarkan peraturan (regulasi) ketahanan pangan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2013 tentang pengelolaan cadangan

pangan pemerintah. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Produksi pangan utama tahun 2025 berhasil mencapai 135.171 ton. Hasil pangan ini di antaranya dari beras, jagung, kedele, ikan, telur, daging, ubi, dan kacang tanah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini produksi beras terbesar terjadi di tahun 2025 yaitu dengan jumlah produksi sebesar 94.127 ton dan jumlah produksi paling rendah di tahun 2023 sebesar 29.097 ton. Lebih lanjut ketersedian pangan utama Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 43**
**Ketersedian Pangan Utama Kabupaten Kerinci (Ton)**

| Indikator | Capaian 2025 | Target 2026 | Target 2027 |
|---|---|---|---|
| **Ketersediaan Pangan Utama** | 55.863 | 61.450 | 67.595 |

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kerinci Tahun 2026

**Tabel II. 44**
**Produksi Pangan Utama Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Beras | 30.698 | 32.180 | 29.097 | 37.588 | 94.127 |
| **2** | Jagung | 9.322 | 10.091 | 107 | 42 | 3.164 |
| **3** | Kedele | - | - | 1.211 | 1.253 | 60 |
| **4** | Kacang Tanah | 1.047 | 1.344 | 33 | 33 | 657 |
| **5** | Ubi Kayu | 2.318 | 3.114 | 9 | 22.864 | 10.229 |
| **6** | Ubi Jalar | 1.436 | 2.524 | 37 | 7.368 | 17.778 |
| **7** | Daging Ruminansia | 8.011 | 637 | 2.909 | 527 | 531,8 |
| **8** | Daging Non Ruminansia | 10.403 | 1.000 | 4.415 | 3.432 | 2.135,5 |
| **9** | Ikan | 5.814 | 1.502 | 6.262 | 4.109 | 5.024 |
| **10** | Telur | 1.823 | 78.621 | 5.421 | 2.380 | 1.464,6 |
| **Jumlah** | | **70.872** | **131.013** | **49.051** | **79.596** | **135.171** |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, produksi pangan utama Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa beras tetap menjadi komoditas utama dengan total produksi mencapai 171.510 ton, diikuti oleh telur sebesar 89.902 ton, dan ubi kayu sebanyak 30.536 ton dalam 5 (lima) tahun

terakhir. Produksi ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat. Namun, produksi pangan utama berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk membentuk langkah strategis untuk memaksimalkan peningkatan produksi kedepannya.

**b) Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100. Data PPH Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 45**
**Pola Pangan Harapan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Pangan Harapan (PPH) | 77,9 | 93,2 | 93,3 | 91,6 | 92,9 | 2,3 |

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ada 9 kelompok pangan dalam pencapaian skor PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh dan kopi). Pada periode 2021-2025 skor pola pangan harapan Kabupaten Kerinci menunjukkan angka yang cukup baik dengan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kosumsi pangan masyarakat Kabupaten Kerinci semakin beragam, bergizi, dan seimbang.

**c. Lingkungan Hidup**

**a) Persentase Penanganan Sampah**

Penanganan sampah yang dilakukan menangani pasar kecamatan. Semua timbunan sampah yang ada di pasar-pasar di kecamatan setiap harinya sudah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan timbunan sampah di wilayah permukiman terutama wilayah pedesaan belum semuanya terangkut, sebagian masyarakat penangannya masih membakar sampah atau menimbun sampahnya di belakang rumah dengan cara membuat lubang di tanah. Karena dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air tanah dan mengganggu kesehatan manusia, maka dilakukan pembinaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Produksi sampah dihitung dengan jumlah penduduk dikalikan produksi perkapita (sebesar 800 gr/hari perkapita) dikalikan jumlah hari setahun. Sedangkan penanganan sampah dihitung jumlah truk pengangkut sampah dikalikan jumlah pengangkutan *(trip)* dikalikan jumlah hari sebulan pengangkutan (25 hari) dikalikan jumlah bulan setahun (12 bulan).

Untuk menghindari terjadinya timbunan sampah di tempat umum, dilakukan dengan menghilangkan TPS dan penanganan sampah oleh komunitas. Pengelolaan sampah oleh komunitas menggunakan prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle)* berbasis masyarakat yang mampu mengurangi timbunan dan volume yang harus diangkut ke TPST. Volume sampah yang timbul dan volume penanganan sampah berjalan beriringan. Maksudnya adalah semakin meningkat volume sampah per tahunnya, semakin meningkat pula volume penanganannya. Penanganan sampah sudah dilakukan dengan baik. Meskipun volume sampah setiap tahunnya selalu meningkat. Data penanganan sampah dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 46**
**Penanganan Sampah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

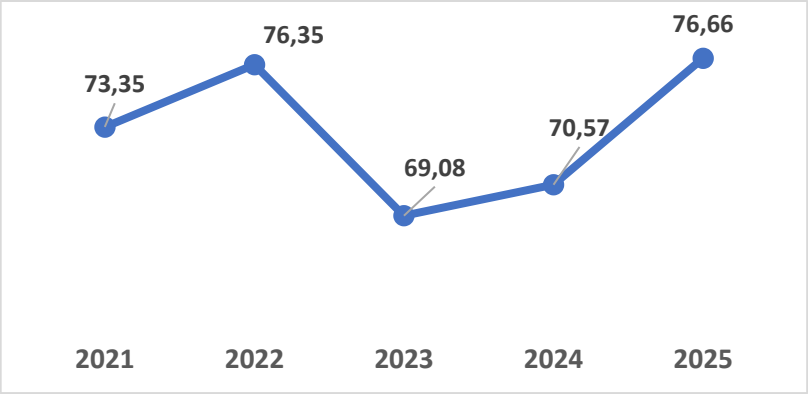
| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume Timbunan Sampah (Ton) | 45.974 | 46.337 | 46.556 | 46.848 | 44.283 |

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume Sampah yg ditangani (Ton) | 29.653 | 30.351 | 31.467 | 31.856 | 39.494 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

Data IKLH dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini disebabkan oleh penguatan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah. Tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kembalinya aktivitas industri dan transportasi paska pandemi, yang menyebabkan polusi udara dan air. Namun tahun 2024 hingga 2025 kembali mengalami kenaikan dimana setelah sebelumnya menurun drastis. Tahun 2025 merupakan upaya perbaikan IKLH seperti adanya penguatan kembali aspek lingkungan.

**Gambar II. 39**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

**b) Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk**

Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan jumlah TPS dengan jumlah penduduk. Rasio ini dihitung per satuan 1.000 penduduk. Jumlah TPS di Kabupaten Kerinci sebanyak 80 unit dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan volume sampah semakin

bertambah. Artinya, Kabupaten Kerinci masih kurang dalam menangani fasilitas ketersediaan tempat sampah.

**Tabel II. 47**
**Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung TPS (m3) | 297,5 | 290,5 | 245 | 227,5 | |
| Jumlah Mobil sampah | 15 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 18 Unit |
| Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%) | 64,5 | 65,5 | 67,59 | 68 | 75 |
| Jumlah TPS | 85 | 83 | 70 | 65 | 80 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 251.750 | 253.470 | 255.120 | 256.710 | 258.210 |
| Rasio TPS terhadap jumlah penduduk | 0,337 | 0,327 | 0,273 | 0,253 | 0,310 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan penyediaan TPS 3R. TPS 3R merupakan tempat pengelolaan sampah dengan prinsip *Resude, Rouse, Recycle* untuk mengumpulkan, memilah dan mengolah sampah dalam skala kawasan atau warga sebelum sisa ampasnya dikirim ke tempat pemprosesan akhir (TPA).

**Tabel II. 48**
**TPS 3R Kabupaten Kerinci**

| No. | Nama TPS 3R | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | TPS 3R Bumi Jaya | Gunung Tujuh |
| 2 | TPS 3R Batang Sangir | Kayu Aro |
| 3 | TPS 3R Giri Mulyo | Kayu Aro Barat |
| 4 | TPS 3R Siulak Mukai | Siulak Mukai |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

### d. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan suatu wujud pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Adapun data penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel II. 49**
**Penataan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | KEGIATAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH PENDUDUK | 254.241 | 261.970 | 267.169 | 268.951 | 272.832 |
| 2 | JUMLAH KK | 93.198 | 96.118 | 98.282 | 96.610 | 98.352 |
| 3 | JUMLAH KEPEMILIKAN KK | 91.874 | 96.007 | 97.868 | 95.023 | 96.459 |
| 4 | JUMLAH WAJIB KTP | 188.129 | 198.203 | 203.478 | 200.545 | 205.503 |
| 5 | JUMLAH PEREKAMAN KTP-el | 186.380 | 191.378 | 197.407 | 199.959 | 202.484 |
| 6 | JUMLAH YANG MEMILIKI KTPEL | 186.140 | 191.151 | 196.500 | 199.385 | 201.985 |
| 7 | JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 KURANG SEHARI | 66.131 | 63.776 | 65.829 | 68.438 | 67.340 |
| 8 | JUMLAH CETAK KIARI | 18.707 | 30.278 | 34.760 | 37.648 | 39.925 |
| 9 | JUMLAH MUTASI PENDUDUK | | | | | |
| | - PINDAH | 2.350 | 1.723 | 1.870 | 1.683 | 1.798 |
| | - DATANG | 3.670 | 1.604 | 1.667 | 1.205 | 1.105 |
| 10 | JUMLAH ANAK USIA 0 - 18 TAHUN | 70.926 | 67.879 | 68.508 | 72.091 | 71.800 |
| 11 | PENERBITAN DOKUMEN AKTA CAPIL | | | | | |
| | - AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 - 18 TAHUN | 68.446 | 67.562 | 67.543 | 70.959 | 68.624 |
| | - AKTA KELAHIRAN SEMUA UMUR | 239.994 | 240.675 | 245.751 | 251.414 | 256.624 |
| | - AKTA PERKAWINAN | 116 | 119 | 123 | 126 | 127 |
| | - AKTA KEMATIAN | 1.164 | 1.545 | 2.245 | 3.086 | 4.183 |
| | - AKTA PERCERAIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | - PENGANGKATAN ANAK | - | - | - | - | - |
| | - AKTA PENGESAHAN ANAK | - | - | - | - | - |
| | - AKTA PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN | - | - | - | - | - |

| NO | KEGIATAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - SURAT KETERANGAN LAHIR LUAR NEGERI | - | - | - | - | - |
| **12** | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL | - | 151 | 4.047 | 5.658 | 6.677 |
| **13** | INFORMASI KEPENDUDUKAN YG DIMANFAATKAN (PKS) | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **14** | PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, di mana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Jumlah BUMDes di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 50**
**Jumlah BUMDes di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Desa** | 285 | 285 | 285 | 284 | 285 |
| **BUMDES** | 178 | 180 | 185 | 190 | 220 |

Sumber: Dinas Pemdes Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Jumlah BUMDes lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa. Artinya tidak semua desa memiliki BUMDes. Adanya BUMDes membantu dalam meningkatkan ekonomi desa dengan cara mengembangkan usaha ekonomi desa, serta membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

**f. Perhubungan**

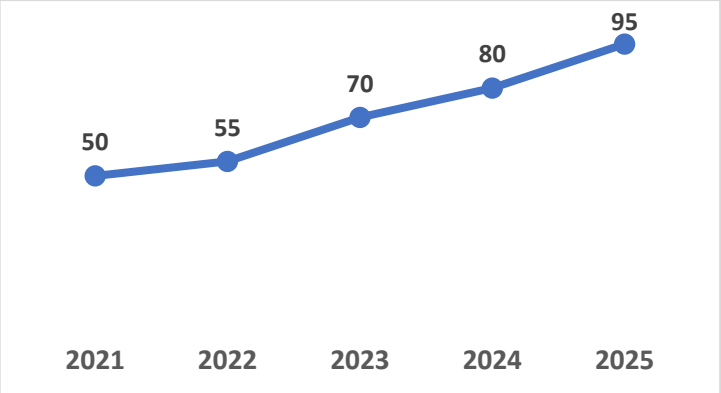
Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu,

Pemerintah Kabupaten Kerinci terus membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis moda transportasi baik transportasi di perkotaan maupun diperdesaan dalam usaha mendorong lancarnya arus transportasi orang/barang/jasa yang lebih efektif dan efisien.

**g. Komunikasi dan Informatika**

Kabupaten Kerinci memiliki website yang dapat diakses melalui https://kerincikab.go.id/. Website tersebut memperbarui (*update*) berita dan foto hampir setiap hari. Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (*running text*). Jumlah website milik pemerintah Kabupaten Kerinci dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 40**
**Jumlah Website Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**



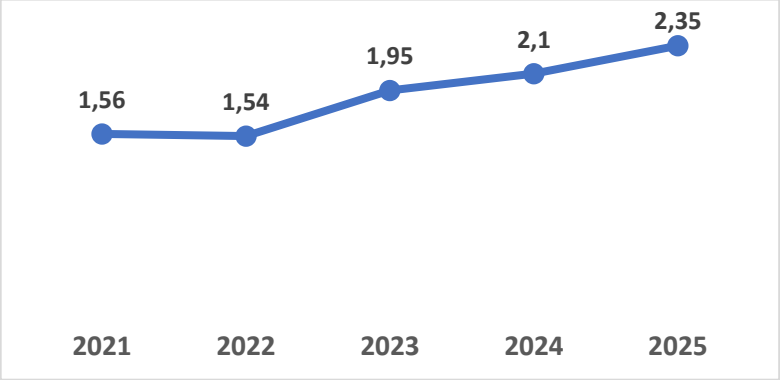

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Jumlah website semakin bertambah hingga mencapai 95 website di tahun 2025. Meningkatnya jumlah website ini mengindikasikan bahwa tingkat melek teknologi dan pengadopsian teknologi di suatu daerah semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak website yang aktif maka semakin besar peluang pemerintah dalam meningkatkan nilai indeks SPBE. Hal ini diikuti dengan kenaikan indeks SPBE Kabupaten Kerinci.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dan memberikan gambaran efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas pelayanan publik. SPBE merupakan indikator penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE, yang pada akhirnya akan

berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang lebih baik. Berikut Indeks SPBE Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025:

**Gambar II. 41**
**Indeks SPBE Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

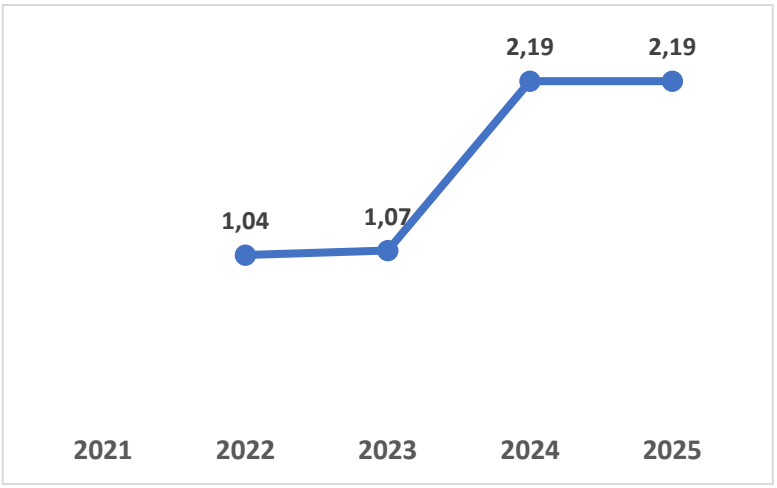



Sumber: Diskominfo Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, indeks SPBE cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2021 indeks SPBE berada pada angka 1,56 yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 1,54. Namun mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2025 menjadi 2,35. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan mengalami peningkatan. Ini berarti penerapan SPBE di instansi pemerintah daerah semakin baik dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningingkatan indeks SPBE mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Sistem informasi yang terintegrasi dan pemanfaatan aplikasi digital dalam SPBE mempermudah pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data statistik. Hal ini membantu instansi pemerintah dalam memenuhi standar statistik dan meningkatkan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Berikut data indeks Pembangunan statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025:

**Gambar II. 42**
**Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Diskominfo Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, Indeks Pembangunan Statistik mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan nyata dalam tata kelola data statistik di Kabupaten Kerinci. Ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci semakin baik dalam mengelola data sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, kenaikan Indeks Pembangunan Statistik mencerminkan kesiapan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi serta menjadi fondasi penting bagi transformasi digital pemerintah ke depannya.

**h. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan anggotanya digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha, dengan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Kegiatan koperasi dan UMKM yang dilakukan dapat berbentuk modal kerja, pelatihan dan dalam bentuk pengembangan lainnya. Pada di bawah ini dapat dilihat perkembangan koperasi di Kabupaten Kerinci.

**Tabel II. 51**
**Perkembangan Sektor Koperasi di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| NO | INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koperasi Aktif | 155 | 160 | 165 | 170 | 549 | 46,7 |
| 2 | Jumlah Keseluruhan Koperasi | 236 | 238 | 242 | 245 | 549 | 25,6 |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif | 65,68 | 67,23 | 68,18 | 69,39 | 100,00 | 10,2 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat persentase koperasi aktif selalu meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 46,7 persen. Pemberdayaan koperasi ini merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan dan memperkuat pondasi perekonomian di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan meningkatnya produktivitas ekonomi dan peningkatan tenaga kerja.

**i. Penanaman Modal**

**a) Jumlah Investor**

Investasi mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan karena menggambarkan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik.

Pada dasarnya kegiatan investasi dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) menggunakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modalnya.

Realisasi total terhadap target investasi berfluktuatif tiap tahunnya. Tahun 2025 realisasi total terhadap target investasi mencapai 199,85 persen. Dilihat pada tabel bahwa PMDN tahun 2025 hanya terdapat 1

PMDN, angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti terjadi perlambatan atau penurunan investasi yang dilakukan. Selain itu, Kabupaten Kerinci hanya menggunakan modal dalam negeri guna mendorong pembangunan ekonomi.

**Tabel II. 52**
**Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMA | - | - | - | - | - |
| PMDN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Realisasi total terhadap target investasi | 66,01% | 146,20% | 90,31% | 185,56% | 199,85% |

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2026

**b) Nilai Investasi Berskala Nasional**

Nilai investasi di Kabupaten Kerinci cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2021 nilai investasi di Kabupaten Kerinci sebesar Rp131.838.829.052 dengan realisasi sebesar Rp1.433.384,90. Nilai Investasi terbesar terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp12.922.727.309.378 dengan realisasi Rp 3.174.537,04. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 53**
**Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2021-2025**

| Tahun | Persetujuan | | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah (Proyek) | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah (Proyek) | Nilai Investasi (Rp) |
| **2021** | 389 | 131.838.829.052 | 84 | 1.433.384,90 |
| **2022** | 2164 | 12.922.727.309.378 | 60 | 3.174.537,04 |
| **2023** | 3720 | 319.556.806.922 | 44 | 2.417.037,65 |
| **2024** | 3785 | 220.012.776.216 | 63 | 4.277.404,78 |
| **2025** | 3353 | 275.134.544.720 | 169 | 2.874.686,26 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2026

### j. Kepemudaan

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan penyelenggara usaha kesejahteran sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai. Adapun organisasi kepemudaan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 54**
**Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Organisasi Pemuda** | Pemuda Muhammadiyah | Pemuda Muhammadiyah | Pemuda Muhammadiyah | Pemuda Muhammadiyah | Pemuda Muhammadiyah |
| | Pemuda Pancasila | Pemuda Pancasila | Pemuda Pancasila | Pemuda Pancasila | Pemuda Pancasila |
| | KNPI | KNPI | KNPI | KNPI | KNPI |
| | Organisasi Kepramukaan | Organisasi Kepramukaan | Organisasi Kepramukaan | Organisasi Kepramukaan | Organisasi Kepramukaan |
| | Karang Taruna Kabupaten | Karang Taruna Kabupaten | | | |

Sumber: Dispora Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### k. Olahraga

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, disamping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi,

ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain.

Semua ini merupakan nilai-nilai universal olahraga yang dapat dikembangkan di dalam diri insan pembelajar olahraga agar manusia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang bertanggung jawab sehingga hidupnya bermakna bagi dirinya dan orang lain. Ikut terlibat dalam berolahraga, berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan agar dapat menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Mengingat nilai-nilai universal olahraga memiliki implikasi positif terhadap pembentukan kehidupan masyarakat yang maju dan berbudaya, maka sudah selayaknya olahraga ditempatkan sebagai salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan. Prestasi di bidang olah raga yang diraih Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 55**
**Prestasi bidang Olah Raga Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Cabor | Tingkat Kejuaraan | Medali yang diperoleh | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Emas | Perak | Perunggu |
| 1 | Pencak silat | POPDA Provinsi 2022 dan 2024 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Bulu Tangkis | POPDA Provinsi 2022 dan 2024 | N/A | N/A | 1 |
| 3 | Tenis Meja | | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Lari 200 M/PA/PI | | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Lari 100 M PA | | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Tolak Peluru | | N/A | N/A | N/A |

Sumber: Dispora Kabupaten Kerinci Tahun 2026

## I. Statistik

Untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan sebagai dasar analisa capaian-capaian pembangunan daerah diperlukan ketersediaan data statistik sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah. Analisis data statistik yang harus ada meliputi Buku Daerah

Dalam Angka dan PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.

**a) Buku Kerinci Dalam Angka**

Kabupaten Kerinci sudah memiliki Buku Kerinci Daerah Dalam Angka yang berisi gambaran umum secara series lima tahun tentang kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, sosial, pertanian, industri, energi, konstruksi, perdagangan, perhubungan, keuangan, dan harga. Selain itu juga tersedia buku "Kecamatan dalam Angka" untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kerinci.

**b) Buku PDRB Kabupaten Kerinci**

Kabupaten Kerinci sudah memiliki buku "PDRB Kabupaten" yang berisi perhitungan PDRB kabupaten, sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian daerah.

**m. Persandian**

Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sandi, baik pusat maupun daerah.

Peran SDM sandi saat ini sudah dipercaya untuk memberi jaminan keamanan informasi di beberapa kegiatan di Kabupaten Kerinci, di antaranya kegiatan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pengaman DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), e-Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan lainnya.

Dalam rangka meningkatan keamanan daerah dibidang telekomunikasi Kabupaten Kerinci telah menjalankan kegiatan persandian dan berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan jumlah berita sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 56**
**Jumlah Berita Sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Via | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Email Sanapati** | 504 | 528 | 516 | 564 | 708 |

Sumber: Diskominfo Kbaupaten Kerinci Tahun 2026

**n. Kebudayaan**

Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial, seperti bahasa, dapat dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kebudayaan masyarakat, itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya.

Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri seperti Tari, Tale, dan Kuliner antara lain: *Tale Keberangkatan Haji, Tari Tupai, Tari Upacara Asyiek, Tari Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar,* dan lain-lain.

**o. Perpustakaan dan Arsip**

Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri.

Tetapi dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, tapevideo dan DVD. Selain itu,

perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel. Total jumlah perpustakaan di Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi 401.

**Tabel II. 57**
**Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda (Sekolah Swasta)** | - | - | - | 10 | 19 |
| **Jumlah Perpustakaan Milik OPD** | - | 69 | 73 | 85 | 98 |
| **Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri** | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| **Total Jumlah Perpustakaan** | **284** | **353** | **357** | **379** | **401** |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan hingga tahun 2025 yaitu mencapai 15.990 jumlah buku.

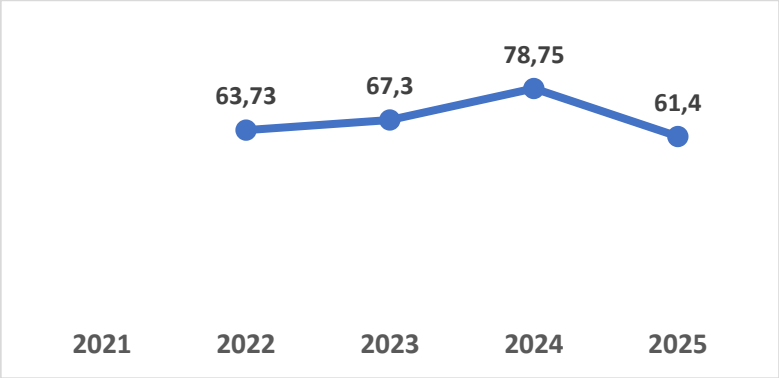
**Tabel II. 58**
**Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah** | 7.501 | 7.501 | 8.432 | 8.436 | 8.436 |

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan** | 15.051 | 15.800 | 15.972 | 15.972 | 15.990 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsip Kabupaten Kerinci Tahun 2026

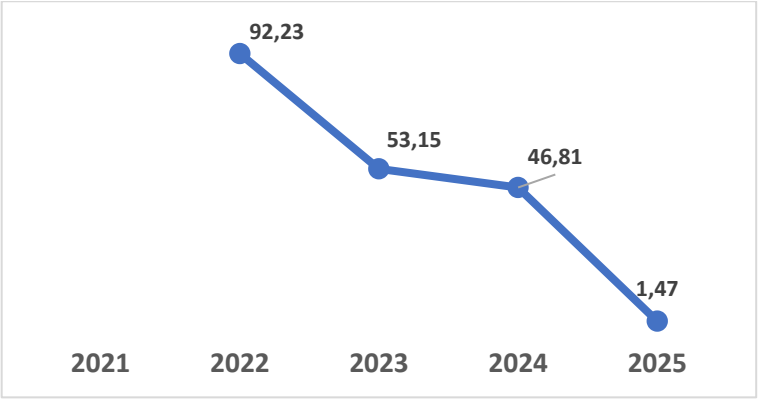
**Gambar II. 43**
**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Dilihat pada Gambar di atas, nilai tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Kerinci meningkat di tahun 2024 mencapai angka 78,75. Namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 61,4. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pada perilaku, kebiasaan, dan minat masyarakat dalam mencari pengetahuan dan informasi melalui berbagai media bacaan. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kegemaran membaca kedepannya.

**Gambar II. 44**
**Indeks Literasi Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Dilihat pada gambar di atas, indeks literasi Kabupaten Kerinci menurun signifikan yaitu mencapai angka 1,47 di tahun 2025. Indeks literasi mengukur kemampuan membaca, menulis, memahami suatu informasi. Meskipun tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Kerinci meningkat, namun kemampuan dalam memahami dan menginterpretasikan informasi masih tidak setinggi kegemaran membacanya. Angka literasi yang rendah ini dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak literasi digital, literasi budaya, literasi keuangan, dan literasi bacaan.

**Tabel II. 59**
**Kondisi Kearsipan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tingkat Ketersediaan Arsip** | - | - | - | 60,1 | 87,5 |
| **Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip** | - | - | - | 14,2 | 16,9 |
| **Tingkat Digitalisasi Arsip** | - | - | 8,16 | 43,7 | 87,3 |
| **Indeks Pengawasan Kearsipan** | - | D | D | C | BB |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Tingkat digitalisasi arsip tahun pada tahun 2022 tidak terdapat nilai karena belum adanya tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan SPBE. Kemudian pada tahun 2025 Tingkat Digitalisasi Arsip mencapai angka 87,3 sehingga indeks pengawasan kearsipannya memperoleh grade BB, meningkat dari tahun sebelumnya grade C.

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### a. Perikanan

Potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan dibagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut adalah produksi ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025:

**Tabel II. 60**
**Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perikanan Tangkap** | 1.993 | 1.995 | 815 | 981 | 1.006 |
| **Perikanan Budaya** | 4.034 | 4.046 | 3.600 | 3.960 | 4.018 |

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 6.027 | 6.041 | 4.415 | 4.941 | 5.024 |

Sumber: DPKP Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah produksi ikan mengalami penurunan pada tahun 2023. Penurunan produksi ikan dikarenakan faktor alam ataupun faktor manusia. Faktor alam di antaranya perubahan kondisi iklim, dan pencemaran air. Faktor manusia di antaranya adalah *overfishing*, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan. Namun hingga tahun 2025 jumlah produksi ikan kembali mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan terjadinya pemulihan yang berarti kembali membaiknya kondisi produksi ikan yang sebelumnya sempat mengalami penurunan.

**b. Pariwisata**

Keindahan alam dan keanekaraman kekayaan hayati yang terdapat di bumi sakti Kabupaten Kerinci menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 18 kecamatan, dengan lebih kurang 76 objek wisata. Di antaranya wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Data dan informasi tentang sebaran obyek pariwisata di Kabupaten Kerinci dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel II. 61**
**Objek Wisata dan Jenisnya di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| No. | Nama Objek Wisata | Jenis Objek Wisata |
|---|---|---|
| 1 | Air Panas Semurup | Wisata Alam |
| 2 | Air Panas Sungai Abu | Wisata Alam |
| 3 | Air Terjun 12 Tingkat Talang Kemulun | Wisata Alam |
| 4 | Air Terjun 13 Tingkat Sungai Medang | Wisata Alam |
| 5 | Air Terjun Koto Lebuh Tinggi | Wisata Alam |
| 6 | Air Terjun Ksen | Wisata Alam |
| 7 | Air Terjun Mata Kucing Masgo | Wisata Alam |
| 8 | Air Terjun Muara Air Duo | Wisata Alam |
| 9 | Air Terjun Pancuran Gading Pulau Tengah | Wisata Alam |
| 10 | Air Terun Pancuran Tujuh | Wisata Alam |
| 11 | Air Terjun Pauh Tinggi | Wisata Alam |
| 12 | Air Terjun Pendung Semurup | Wisata Alam |

| No. | Nama Objek Wisata | Jenis Objek Wisata |
|---|---|---|
| 13 | Air Terjun Pungut | Wisata Alam |
| 14 | Air Terjun Puti Mayang | Wisata Alam |
| 15 | Air Terjun Siiluang Bersisik Emas | Wisata Alam |
| 16 | Air Terjun Siulak Kecil | Wisata Alam |
| 17 | Air Terjun Telun Berasap | Wisata Alam |
| 18 | Air Terjun Telun Lempur | Wisata Alam |
| 19 | Aroma Pecco | Wisata Alam |
| 20 | Batu Bersurat | Wisata Sejarah |
| 21 | Batu Bersurat Lempur Mudik | Wisata Alam |
| 22 | Batu Biduk Pulau Sangkar | Wisata Alam |
| 23 | Batu Gong Lolo Gedang | Wisata Sejarah |
| 24 | Batu Gong Pondok | Wisata Sejarah |
| 25 | Batu Jung Kemantan Kebalai | Wisata Alam |
| 26 | Batu Kursi Lempur Mudik | Wisata Alam |
| 27 | Batu Lumang Muara Semerah Semurup | Wisata Alam |
| 28 | Batu Megalitik Muak | Wisata Alam |
| 29 | Batu Meriam Talang Kemuning | Wisata Alam |
| 30 | Batu Patah dan Batu Bergambar Muak | Wisata Sejarah |
| 31 | Batu Raja Pulau Tengah | Wisata Alam |
| 32 | Batu Selindrik | Wisata Sejarah |
| 33 | Benteng Depati Parbo | Wisata Sejarah |
| 34 | Bukit Kutingga/Anjung Banio Penawar | Wisata Alam |
| 35 | Bukit Sembahyang | Wisata Alam |
| 36 | Danau Lingkat | Wisata Alam |
| 37 | Danau Alkab Tamiai | Wisata Alam |
| 38 | Danau Belibis | Wisata Alam |
| 39 | Danau Gunung Tujuh | Wisata Alam |
| 40 | Danau Kaco | Wisata Alam |
| 41 | Danau Kecik Lempur | Wisata Alam |
| 42 | Danau Kerinci | Wisata Alam |
| 43 | Dedeng Batokok Siulak Deras | Wisata Kuliner |
| 44 | Gerao Nguak Lempur Tengah | Wisata Alam |
| 45 | Gerao Rasau | Wisata Alam |
| 46 | Gerao Silai Talang Kemuning | Wisata Alam |
| 47 | Goa Kapeh | Wisata Alam |
| 48 | Goa Batu Tanjung Tanah | Wisata Alam |
| 49 | Goa Belang Sanggarang Agung | Wisata Alam |
| 50 | Goa dan Air Terjun Pacah Sago Batang Merangin | Wisata Alam |
| 51 | Goa Kasah | Wisata Alam |
| 52 | Goa Kelelawar Talang Kemulun | Wisata Alam |
| 53 | Gunung Batuah Lempur | Wisata Alam |
| 54 | Gunung Kaca | Wisata Alam |
| 55 | Gunung Kerinci | Wisata Alam |

| No. | Nama Objek Wisata | Jenis Objek Wisata |
|---|---|---|
| 56 | Gunung Raya Talang Kemuning | Wisata Alam |
| 57 | Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur | Wisata Alam |
| 58 | Hutan Adat Temedak Keluru | Wisata Alam |
| 59 | Hutan Salak Talang Kemuning | Wisata Agro |
| 60 | Kebun Nanas Koto Tengah | Wisata Agro |
| 61 | Lembah Merangin | Wisata Alam |
| 62 | Masjid Keramat | Wisata Religius |
| 63 | Monumen Gempa Koto Iman | Wisata Sejarah |
| 64 | Panorama Bukit Tapan Sekungkung | Wisata Alam |
| 65 | Panorama Bukit Villa Kemantan | Wisata Alam |
| 66 | Pemandian Air Panas Sungai Medang | Wisata Alam |
| 67 | Perkebunan Jeruk Pulau Tengah | Wisata Agro |
| 68 | Perkebunan Manggis Semerap | Wisata Agro |
| 69 | Perkebunan The | Wisata Agro |
| 70 | Rawa Bento | Wisata Alam |
| 71 | Rawa Ladeh Panjang | Wisata Alam |
| 72 | Serujang Angin Hiang Karya | Wisata Alam |
| 73 | Sungai Batang Merangin | Wisata Alam |
| 74 | Taman Bunga Puri Asri | Wisata Agro |
| 75 | Taman Dewa Talang Kemuning | Wisata Alam |
| 76 | Tanjung Pelita Pidung | Wisata Alam |

Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044

### c. Pertanian

Kabupaten Kerinci merupakan sentra pertanian di Provinsi, baik itu untuk komoditi tanaman pangan maupun komoditi hortikutura. Luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 62**
**Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (ha), 2021–2025**

| Jenis Tanaman | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Daun/ *Scallion* | 440 | 535,2 | 728,95 | 628,1 | 688,75 |
| Bawang Merah/ *Shallots* | 1.644,95 | 2.000,10 | 1.986,65 | 1.403,25 | 213.324 |
| Bawang Putih/ *Garlic* | 42 | 6 | 58 | 39 | 0 |
| Bayam/ *Spinach* | 86,5 | 101,25 | 53,35 | 44,25 | 1.115,75 |
| Buncis/ *String Bean* | 313 | 313 | 475,95 | 347 | 362,25 |
| Cabai Rawit/ Chili/ *Cayenne Pepper* | 640,25 | 766,3 | 816,15 | 69,15 | 649,6 |

| Jenis Tanaman | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamur Tiram/ *Oyster Mushrooms* | 150,5 | 150,5 | 310 | 485 | 100 |
| Jamur Merang/ *Straw Mushrooms* | - | - | - | - | - |
| Jamur Lainnya/ *Other Mushrooms* | 1 | 1 | - | - | - |
| Kacang Panjang/ *Long Beans* | 308 | 324,25 | 293 | 172 | 155,25 |
| Kangkung/ *Water Spinach* | 39 | 48,25 | 26 | 26,25 | 20,6 |
| Kembang Kol/ *Cauliflower* | 214 | 302 | 275 | 263 | 607 |
| Kentang/ *Potato* | 6.799 | 9.050 | 9.407 | 8.076,50 | 7.212,00 |
| Ketimun/ *Cucumber* | 104,5 | 109,5 | 88,75 | 98 | 92,25 |
| Kubis/ *Cabbage* | 2.237 | 3.230 | 3.235 | 2.764 | 3.593 |
| Labu Siam/ *Chayote* | 128,25 | 107,5 | 16,25 | 85,45 | 106 |
| Petsai/ *Chinese Cabbage*/ *Mustard Green* | 583 | 1.052 | 1.196 | 1.220 | 1.566 |
| Terung/ *Eggplant* | 476,65 | 518,8 | 651,5 | 528 | 533 |
| Tomat/ *Tomato* | 696,45 | 979,95 | 1.150 | 842,5 | 1.055 |
| Wortel/ *Carrot* | 378 | 593 | 787 | 591 | 1.080 |

Sumber: DTPH Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**Tabel II. 63**
**Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (kuintal), 2021–2025**

| No | Jenis Tanaman | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Daun/ *Scallion* | 39.119 | 47.444,80 | 84.759,10 | 100.042,40 | 118.296,50 |
| 2 | Bawang Merah/ *Shallots* | 122.042,70 | 151.909,95 | 172.601,65 | 109.869,60 | 213.324,00 |
| 3 | Bawang Putih/ *Garlic* | 996 | 130 | 5.270 | 2.260 | 0 |
| 4 | Bayam/ *Spinach* | 6.753 | 5.296,50 | 4.286,35 | 4.085,05 | 1.115,75 |
| 5 | Buncis/ *String Bean* | 41.125 | 53.323,60 | 60.049,75 | 50.080,50 | 61.897,00 |
| 6 | Cabai Rawit/ Chili/ *Cayenne Pepper* | 75.588,20 | 84.285,50 | 115.536 | 391.382,70 | 379.888,00 |
| 7 | Jamur Tiram/ *Oyster Mushrooms* | 92,5 | 280 | 278 | 368,54 | 218 |
| 8 | Jamur Merang/ *Straw Mushrooms* | - | - | - | - | - |
| 9 | Jamur Lainnya/ *Other Mushrooms* | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Kacang Panjang/ *Long Beans* | 33.153 | 36.711,25 | 33.752 | 37.317,50 | 22.951,00 |

| No | Jenis Tanaman | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kangkung/ *Water Spinach* | 3.676 | 4.029,25 | 3.664 | 3.176,50 | 2.262,00 |
| 12 | Kembang Kol/ *Cauliflower* | 17.155 | 43.960 | 29.103 | 51.455 | 114.009 |
| 13 | Kentang/ *Potato* | 1.221.826 | 1.798.422 | 181.226 | 1.352.870 | 1.313.872 |
| 14 | Ketimun/ *Cucumber* | 19.915 | 17.424,75 | 13.702 | 19.818,50 | 22.575,50 |
| 15 | Kubis/ *Cabbage* | 505.481 | 832.860 | 872.247 | 748.470 | 873.750 |
| 16 | Labu Siam/ *Chayote* | 112.148 | 131.402,50 | 110.236 | 67.139 | 79.534 |
| 17 | Petsai/ *Chinese Cabbage*/ *Mustard Green* | 110.354 | 236.254 | 199.226 | 289.883 | 339.293 |
| 18 | Terung/ *Eggplant* | 113.860 | 128.796,20 | 179.883,75 | 316.608,25 | 298.900,75 |
| 19 | Tomat/ *Tomato* | 22.500 | 471.259,25 | 393.108,25 | 550.454,25 | 997.318,25 |
| 20 | Wortel/ *Carrot* | 7.536 | 109.242 | 151.628 | 105.425 | 170.665 |

Sumber: : DTPH Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Dari Tabel di atas produksi tanaman sayuran dan buah-buahan tertinggi adalah kentang diikuti dengan kubis dan tomat. Produksi kentang tertinggi dicatatkan pada tahun 2022 dengan angka 1.798.422 kuintal dan terendah pada tahun 2023 dengan sebanyak 181.226 kuintal. Untuk kubis angka produksi terbesar terjadi pada tahun 2025 sebanyak 873.750 kuintal dan terendah pada tahun 2021 sebanyak 505.481 kuintal. Untuk produksi tomat tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebanyak 997.318,25 kuintal dan terendah terjadi di tahun 2021 sebanyak 22.500 kuintal.

**d. Perindustrian**

Industri yang dominan di Kabupaten Kerinci adalah jenis industri kecil dan menengah dengan pengembangan dan pemasaran berbagai produk unggulan seperti Dodol Kentang, aneka makanan di Kecamatan Siulak, Anyaman Rotan di Kecamatan Air Hangat Timur, Anyaman Bambu dan aneka kerajinan di Kecamatan Sitinjau Laut. Serta pengembangan dan pemasaran Kerajinan Batik Kerinci dan Bordir yang memiliki khas tersendiri yaitu corak-coraknya yang khas yang tidak dijumpai pada batik daerah lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas bagi pelaku usaha maka Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai pelatihan dan diklat baik dalam maupun luar daerah, di antaranya Pelatihan GKM di Air Panas Semurup, Praktek Kerja Lapangan di Kota Pariaman, Diklat bordir di Balai Diklat Industri Padang. Selanjutnya, perkembangan peran Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada sub sektor UMKM, tercatat jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kerinci sebesar 30.431 pelaku usaha mikro. Usaha ini dirinci menurut jenis, di antaranya Usaha Mikro Perdagangan sebesar 6.726, Jasa 5.052, Peternakan 4.905, Pertanian 7.004, Nelayan 1.096 dan Industri 5.068.

**e. Peternakan**

Peternakan yang berkembang dan dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Kerinci meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak besar meliputi ternak sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil meliputi ternak kambing dan domba. Ternak unggas meliputi ternak ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Populasi ternak besar di Kabupaten Kerinci terbesar adalah Sapi dengan jumlah 4.911 pada tahun 2025. Secara rinci jumlah populasi ternak besar dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 64**
**Populasi Ternak Besar (Ekor) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Jenis Ternak | Populasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| 1 | Sapi | 14.108 | 10.976 | 5.123 | 5.339 | 4.911 |
| 2 | Kerbau | 5.306 | 3.81 | 1.533 | 1.571 | 1.587 |
| 3 | Kuda | 120 | 105 | - | 6 | 58 |
| **Jumlah** | | **19.534** | **14.892** | **6.656** | **6.916** | **6.556** |

Catatan: *) berdasarkan data sementara
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2026

Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2021 populasi ternak kecil sebesar 17.194 ekor sedangkan pada tahun 2022 populasi sebesar 10.811 ekor dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 37 persen. Populasi terbesar dari ternak kecil di Kabupaten Kerinci adalah kambing. Pada tahun 2021 populasi kambing di Kabupaten Kerinci sebesar 15.910 ekor sebelum mengalami penurunan hingga tahun 2025 menjadi 3.502. Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II. 65**
**Populasi Ternak Kecil (Ekor) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Jenis Ternak | Populasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| 1 | Kambing | 15.910 | 9.747 | 3388 | 3.467 | 3.502 |
| 2 | Domba | 1284 | 1.064 | 49 | 49 | 58 |
| **Jumlah** | | **17.194** | **10.811** | **3.437** | **3.516** | **3.560** |

Catatan: *) berdasarkan data sementara
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2026

Populasi unggas di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 populasi ternak unggas sebesar 1.027.691 ekor sebelum mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 376.899 ekor. Sedangkan pada tahun 2025 populasi unggas kembali meningkat menjadi 1.649.194 ekor. Lebih rinci jumlah populasi ternak unggas di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel II. 66**
**Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Jenis Ternak | Populasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| 1 | Ayam Kampung *(Buras)* | 269.036 | 224.716 | 78.717 | 80.764 | 81.572 |
| 2 | Ayam Potong *(Broiler)* | 365.474 | 411.225 | 176.114 | 179.636 | 1.456.863 |
| 3 | Ayam Ras Petelur *(Layer)* | 69.395 | 66.450 | 86.407 | 88.135 | 79.113 |
| 4 | Itik | 375.171 | 115.719 | 27.545 | 28.364 | 28.648 |
| 5 | Itik Manila | - | - | - | - | 2.998 |
| **Jumlah** | | **1.079.076** | **815.110** | **368.783** | **376.899** | **1.649.194** |

Catatan: *) berdasarkan data sementara
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2026

Produksi daging ternak di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan kembali pada 2023 hingga 2024. Pada tahun 2021 produksi daging sebesar 1.563.534 kg naik menjadi 2.243.835 kg di tahun 2022, namun mengalami penurunan kembali

hingga tahun 2024 menjadi 1.254.340 kg. Secara rata-rata produksi daging terbesar di Kabupaten Kerinci dihasilkan dari daging ayam potong sebesar 972.452 kg dengan produksi tertinggi di tahun 2025 dengan 1.775.005 kg. Produksi daging ternak (kg) di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 67**
**Produksi Daging Ternak (kg) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Jenis Ternak | Produksi Daging | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
| **Sapi** | 364.883 | 471.202 | 594.698 | 600.465 | 496.629 |
| **Kerbau** | 66.624 | 12.216 | 15.691 | 15.772 | 15.972 |
| **Kuda** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Kambing** | 218.738 | 26.615 | 14.202 | 14.373 | 14.472 |
| **Domba** | 18.900 | 2.754 | 4.648 | 4.675 | 4.739 |
| **Ayam Kampung** | 106.478 | 99.842 | 45.852 | 46.011 | 140.723 |
| **Ayam Potong** | 728.217 | 1.601.018 | 377.781 | 380.239 | 1.775.005 |
| **Ayam Petelur** | 12.106 | 19.674 | 67.100 | 67.771 | 203.598 |
| **Itik** | 47.587 | 10.514 | 123.309 | 125.034 | 16.126 |
| **Itik Manila** | - | - | - | - | 1.345 |
| **Jumlah** | **1.563.534** | **2.243.835** | **1.243.281** | **1.254.340** | **2.668.609** |

Catatan: *) berdasarkan data sementara
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2026

Produksi telur Ayam Ras di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana pada tahun 2021 produksi telur sebesar 524.662 kg menjadi 894.516 kg pada tahun 2022 dengan produksi telur terbesar dihasilkan di tahun 2025 sebesar 922.834 kg. Produksi telur (kg) di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 68**
**Produksi Telur (kg) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Jenis Ternak | Produksi Telur | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Ayam Ras | 524.622 | 894.516 | 907.934 | 917.013 | 922.834 |
| **Jumlah** | | **524.622** | **894.516** | **907.934** | **917.013** | **922.834** |

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2026

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

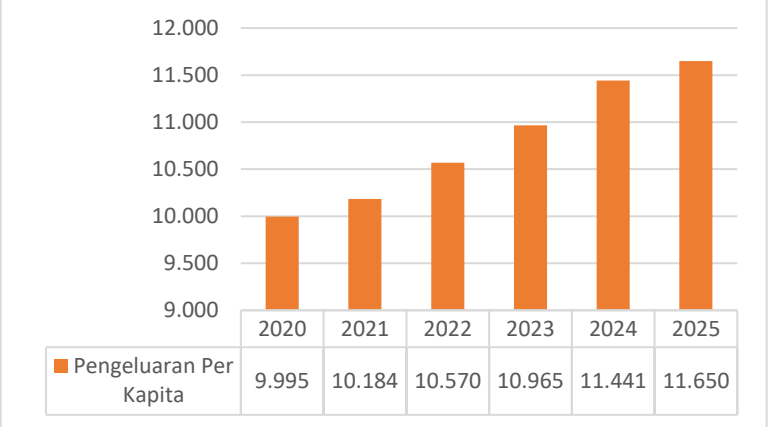
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

**a. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Pengeluaran kosumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran kosumsi perkapita juga dapat mengindikasikan Tingkat kesejahteraan Masyarakat. Berikut adalah data pengeluaran per kapita Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025:

**Tabel II. 69**
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Per Kapita | 9.995 | 10.184 | 10.570 | 10.965 | 11.441 | 11.650 |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hingga tahun 2025, pengeluaran per kapita berada pada angka 11.650. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat yang lebih baik. Secara ekonomi, kenaikan ini mencerminkan roda perekonomian daerah yang bergerak positif. Namun, pemerintah Kabupaten Kerinci tetap harus waspada jika kenaikan ini disebabkan oleh inflasi harga barang, serta diperlukan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

**b. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**a) Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan Perkapita**

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan pada tahun 2025 adalah sebesar 754.213. Pengeluaran terbanyak oleh kelompok makanan dan minuman jadi sebanyak 187.024. Artinya masyarakat di Kabupaten Kerinci masih banyak yang mengonsumsi makanan dan minuman jadi daripada kelompok daging, sayur-sayuran, buah-buahan, telur dan susu. Data pengeluaran per kapita sebulan kelompok makanan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 70**
**Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Kerinci (Rupiah) Tahun 2024-2025**

| Kelompok Komoditas/Commodity Group | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| **Makanan/Food** | | |
| Padi-padian/Cereals | 104.675 | 95.592 |
| Umbi-umbian/Tubers | 13.075 | 15.645 |
| Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 66.861 | 80.439 |

| Kelompok Komoditas/Commodity Group | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Daging/Meat | 31.515 | 34.342 |
| Telur dan susu/Eggs and mik | 26.991 | 29.500 |
| Sayur-sayuran/Vegetables | 78.021 | 75.917 |
| Kacang-kacangan/Legumes | 10.380 | 10.140 |
| Buah-buahan/Fruits | 46.194 | 39.830 |
| Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 31.342 | 36.945 |
| Bahan minuman/Beverage stuffs | 17.163 | 20.223 |
| Bumbu-bumbuan/Spices | 8.679 | 8.490 |
| Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 8.180 | 8.740 |
| Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 207.792 | 187.024 |
| Rokok dan Tembakau/Cigarettes and Tobacco | 119.851 | 111.385 |
| **Jumlah makanan/Total *food*** | **770.720** | **754.213** |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci tahun 2026

**b) Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan Perkapita**

Rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 adalah 641.458. Kelompok pengeluaran bukan makanan paling banyak adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga. Kelompok pengeluaran paling sedikit adalah kelompok keperluan pesta dan upacara. Data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan kelompok bukan makanan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 71**
**Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Kerinci (Rupiah)**
**Tahun 2024-2025**

| Kelompok Komoditas/Commodity Group | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| **Bukan makanan/Non-food** | | |
| Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household faciities | 300.698 | 274.489 |
| Aneka barang dan jasa/Goods and services | 140.887 | 146.400 |
| Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 78.702 | 62.741 |
| Barang tahan lama/Durable goods | 66.838 | 70.656 |
| Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 52.163 | 48.878 |
| Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 48.202 | 38.293 |

| Kelompok Komoditas/Commodity Group | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2025 |
| Jumlah bukan makanan/Total non-food | 687.491 | 641.458 |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci tahun 2026

#### 2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan *(availability)* fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

**a. Transportasi**

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat dan kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

**Tabel II. 72**
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Jenis Kendaraan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Roda Dua | 14.845 | 67.302 | 73.794 | 76.087 | 78.325 |
| 2 | Roda Empat | 2.563 | 8.234 | 10.802 | 11.310 | 12.155 |
| **Jumlah Kendaraan** | | **17.408** | **75.536** | **84.596** | **87.397** | **90.480** |
| 1 | Panjang Jalan | 933,12 | 933,12 | 933,12 | 933,12 | 933.12 |
| **Rasio** | | **0,05** | **0,01** | **0,01** | **0,009** | **0,009** |

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2026

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 mencapai 1:0,05 artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km mampu diakses oleh 5 kendaraan. Sedangkan ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km mampu diakses oleh 1 kendaraan. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah kendaraan (roda dua ataupun roda empat) di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan, sedangkan panjang jalan tetap. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Kerinci semakin bertambah.

**b. Transportasi Umum**

Ketersediaan jumlah angkutan umum guna memenuhi mobilitas orang dan barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung menurun. Pada tahun 2021 berjumlah 1.135 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1.105. Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan menurun kembali hingga tahun 2025 menjadi 1.035. Hal ini seiring dengan menurunnya jumlah angkutan umum di mana jumlah angkutan umum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 sebanyak 227 unit hingga pada tahun 2025 mengalami penurunan di mana jumlah angkutan umum sebanyak 207 unit. Hal ini disebabkan beralihnya alat transportasi dari angkutan umum menjadi angkutan pribadi, terutama sepeda motor.

**Tabel II. 73**
**Rincian dan Rata-rata Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2021 -2025**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | 1.135 | 1.105 | 1.085 | 1.055 | 1.035 |
| 2 | Jumlah Angkutan Umum | 227 | 221 | 217 | 211 | 207 |
| 3 | Jumlah Terminal Bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah Bandara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2026

### c. Penataan Ruang Wilayah

Penataan wilayah merupakan salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kabupaten Kerinci memiliki kawasan lindung terbesar dan sekaligus juga merupakan kawasan rawan bencana, di mana lebih kurang 58,3 persen wilayah Kabupaten Kerinci Adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sehingga konsekuensinya daya tampung wilayah menjadi terbatas untuk dijadikan kawasan budidaya. Untuk itu pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci diupayakan secara efektif, efesien dan ramah lingkungan melalui intensifikasi lahan. Selain itu orientasi aktifitas ekonomi masyarakat perlu di dorong kearah kegiatan jasa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan dengan tetap mengandalkan komoditas unggulan wilayahnya.

Karakteristik wilayah Kabupaten Kerinci secara umum dapat dikelompokan menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. Kawasan kedua yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau

Kerinci, di mana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. Sedangkan kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat.

Rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci terbagi ke dalam 2 (dua) Kawasan, yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi: badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan hutan adat. Kawasan budidaya meliputi: Kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan. Rencana pola ruang Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 74**
**Rencana Pola Ruang di Kabupaten Kerinci**

| RENCANA POLA RUANG WILAYAH | | | Luas (Ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Kawasan Lindung** | | | |
| | 1 | Badan Air | 4.725 | 16 Kecamatan |
| | 2 | Kawasan Perlindungan Setempat | 620 | 16 Kecamatan |
| | 3 | Kawasan Konservasi | 215.235 | 16 Kecamatan |
| | 4 | Kawasan Hutan Adat | 2.326 | 12 Hutan Adat |
| **II** | **Kawasan Budidaya** | | | |
| | 1 | Kawasan Hutan Produksi | 32.271 | 15 Kecamatan |
| | 2 | Kawasan Pertanian | 96.173 | |
| | | a. Kawasan Tanaman Pangan & Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 17.657<br>12.655 | Seluruh Kecamatan |
| | | b. Kawasan Hortikultura | 13.114 | 12 Kecamatan |
| | | c. Kawasan Perkebunan | 52.747 | Seluruh Kecamatan |
| | 3 | Kawasan Pertambangan dan Energi | 441 | |
| | | a. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara | - | Seluruh Kecamatan |
| | | b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | 441 | 3 Kecamatan |
| | 4 | Kawasan Pariwisata | - | 17 Kecamatan |
| | 5 | Kawasan Permukiman | 5.326 | |
| | | a. Kawasan Permukiman Perkotaan | 2.065 | 11 Kecamatan |
| | | b. Kawasan Permukiman Perdesaan | 3.261 | Seluruh Kecamatan |
| | 6 | Kawasan Transportasi | 58 | Di sekitar Bandar Udara Depati Parbo |

| RENCANA POLA RUANG WILAYAH | | | Luas (Ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | - | 7 Koramil & 7 Polsek & 2 Pos Polisi |

Sumber: RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2024 - 2044

### d. Fasilitas Bank

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut.

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi, bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

Jumlah Bank Umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci pada setiap kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel II. 75**
**Jumlah Bank Umum per Kecamatan dibandingkan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2025**

| No | Kecamatan | Bank Umum Pemerintahan / *Government Bank* | Bank Umum Swasta / *Private Bank* | Bank Perkreditan Rakyar / *Rural Bank* | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Gunung Raya | 1 | - | - | 9,11 |
| **2** | Bukit Kerman | - | - | - | 14,61 |
| **3** | Batang Merangin | 1 | - | - | 13,30 |
| **4** | Keliling Danau | 2 | - | - | 13,54 |
| **5** | Danau Kerinci Barat | - | - | - | 12,44 |
| **6** | Danau Kerinci | - | - | 1 | 14,31 |

| No | Kecamatan | Bank Umum Pemerintahan / *Government Bank* | Bank Umum Swasta / *Private Bank* | Bank Perkreditan Rakyar / *Rural Bank* | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Tanah Cogok | - | - | - | 9,50 |
| **8** | Sitinjau Laut | 1 | - | - | 10,49 |
| **9** | Air Hangat | 1 | - | - | 11,07 |
| **10** | Air Hangat Timur | - | - | - | 20,89 |
| **11** | Depati VII | - | - | - | 17,34 |
| **12** | Air Hangat Barat | - | - | - | 11,11 |
| **13** | Gunung Kerinci | 1 | - | - | 13,66 |
| **14** | Siulak | 3 | - | - | 24,17 |
| **15** | Siulak Mukai | - | - | - | 12,16 |
| **16** | Kayu Aro | 3 | - | 1 | 21,99 |
| **17** | Gunung Tujuh | 1 | - | - | 16,63 |
| **18** | Kayu Aro Barat | 1 | - | - | 22,65 |
| **Kabupaten Kerinci** | | **15** | - | **2** | **268,95** |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Bank umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci belum tersedia layanan pada setiap Kecamatan. Hal yang menjadi catatan dari tabel di atas adalah tidak semua kecamatan sudah mendapatkan layanan keuangan dari bank umum.

**e. Fasilitas Rumah Makan dan Restoran**

Ketersediaan rumah makan dan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah rumah makan/restoran pada setiap kecamatan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 76**
**Jumlah Rumah Makan/Restoran pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Kerinci**

| Kecamatan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gunung Raya** | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| **Bukit Kerman** | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Batang Merangin** | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| **Keliling Danau** | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **Danau Kerinci Barat** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Danau Kerinci** | 14 | 19 | 19 | 20 | 18 |

| Kecamatan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanah Cogok** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Sitinjau Laut** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Air Hangat** | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Air Hangat Timur** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Depati VII** | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| **Air Hangat Barat** | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| **Gunung Kerinci** | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| **Siulak** | 12 | 21 | 21 | 24 | 23 |
| **Siulak Mukai** | - | - | - | 1 | 1 |
| **Kayu Aro** | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 |
| **Gunung Tujuh** | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Kayu Aro Barat** | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| **Kabupaten Kerinci** | 145 | 174 | 178 | 193 | 189 |

Sumber: Kerinci dalam Angka 2026

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 193 rumah makan/restoran. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 189 rumah makan/restoran. Hal ini menunjukkan sinyal negatif bahwa industri makan dan minum di Kabupaten Kerinci sedang melemah. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan potensi usaha bidang makanan dan minuman kedepannya.

### f. Fasilitas Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembang investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Data lebih lanjut dapat disimak pada Tabel berikut:

## Tabel II. 77
## Daftar Penginapan di Kabupaten Kerinci
## Tahun 2025

| NO | NAMA USAHA | KATEGORI AKOMODASI SETARA | | | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | FASILITAS | | JML TENAGA KERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOTEL | WISMA | HOMESTAY | | | JUMLAH KAMAR | JUMLAH TEMPAT TIDUR/ BED | LK | PR |
| 1 | Home Stay Family | | | √ | Lindung Jaya/M10 | 2003 | 20 Kamar | 20 Bed | 2 Org | 3 org |
| 2 | Home Stay Tiga Putri | | | √ | Kersik Tua | 2018 | 6 Kamar | 6 Bed | 2 org | 1 Org |
| 3 | Home Stay B.Darmin | | | √ | Kersik Tua | 2004 | 5 Kamar | 10 Bed Twin | 1 Org | 2 Org |
| 4 | Home Stay Timan B. | | | √ | Mekar Jaya | 1995 | 6 Kamar | 12 Bed Twin | 1 Org | 1 Org |
| 5 | Home Stay Family Paiman | | | √ | Kersik Tua | 1995 | 13 Kamar | 13 Bed | 2 Org | 2 Org |
| 6 | Home Stay Subandi | | | √ | Kersik Tua | 1992 | 6 Kamar | 12 Bed Twin | 2 Org | 2 Org |
| 7 | Pelangi Guest House | | | √ | Giri Mulyo | 2018 | 3 Kamar | 5 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 8 | Penginapan Gunung Tujuh | | √ | √ | Pelompek | 2002 | 16 Kamar | 24 Bed | 2 Org | 1 Org |
| 9 | Kerinci View Home Stay | | √ | √ | Pelompek | 2016 | 9 Kamar | 19 Bed | 4 Org | 2 Org |
| 10 | Home Stay Gng .Tujuh | | √ | √ | Ulu Jernih | 2015 | 4 Kamar | 8 Bed | 2 Org | 1 Org |
| 11 | Homestay Rawa Bento | | √ | √ | Jernih Jaya | 2016 | 2 Kamar | 2 Bed | 1 Org | -- |
| 12 | Swarga Loudge&Homestay | | √ | √ | Lindung Jaya | 2017 | 8 Loudge | 22 Bed | 3 Org | 2 Org |
| 13 | Homestay Mas Een | | √ | √ | Kersik Tua | 2018 | 5 Kamar | 7 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 14 | Homestay Labora | | √ | √ | Batang Sangir | 2020 | 15 Kamar | 22 Bed(Capsul) | 2 Org | 1 Org |
| 15 | Home Stay Firsa Family | | √ | √ | Siulak Deras Mudik | 2017 | 2 Kamar | 3 Bed | 2 Org | 1 Org |
| 16 | Bilique Lamo | | √ | √ | Sei.Batu Gantih | 2015 | 2 Kamar | 4 Bed | 2 Org | 1 Org |
| 17 | Home Stay Minang Raya | | √ | | Tutung Bungkuk | 2021 | 4 Kamar | 8 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 18 | Home Stay Buk Tin | | | √ | Lempur | 2015 | 5 Kamar | 5 Bed | 1 Org | 1 Org |

| NO | NAMA USAHA | KATEGORI AKOMODASI SETARA | | | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | FASILITAS | | JML TENAGA KERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOTEL | WISMA | HOMESTAY | | | JUMLAH KAMAR | JUMLAH TEMPAT TIDUR/ BED | LK | PR |
| 19 | Home Stay Nino | | | √ | Lempur | 2015 | 5 Kamar | 5 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 20 | Home Stay Alif | | | √ | Lempur Tengah | 2018 | 5 Kamar | 5 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 21 | Cinnamon Guesthouse | | | √ | Lempur Tengah | 2018 | 3 Kamar | 10 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 22 | Home Stay Nara | | | √ | Lempur Tengah | 2016 | 3 Kamar | 3 Bed | 1 Org | 1 Org |
| 23 | Home Stay Puti | | | √ | Lempur Tengah | 2016 | 3 Kamar | 3 Bed | 1 Org | -- |
| 24 | Home Stay Tenbi | | | √ | Lempur | 2017 | 2 Kamar | 2 Bed | 1 Org | -- |
| 25 | Basecamp Forester | | √ | | Pelompek | 2015 | 1 Kamar | 5 Bed | 1 org | -- |
| 26 | Basecamp | | √ | | Lubuk Pauh | 2015 | 1 Kamar | 5 Bed | 1 org | -- |
| 27 | Hotel Zah'za | √ | | | Sungai Sikai | 2015 | 14 Kamar | 28 Bed | 5 org | 1 org |
| 28 | Hotel Bintang Kerinci | √ | | | Mekar Jaya | 2018 | 22 Kamar | 44 Bed | 5 org | 1 org |
| 29 | Mess Pemda | | √ | | Kayu Aro | | 6 Kamar | 14 Bed | 1 org | -- |
| 30 | Mess Pemda | | √ | | Sanggaran Agung | | 21 Kamar | 42 Bed | 1 org | -- |
| 31 | Keyna Homestay | | | √ | Kersik Tua | 2020 | 3 Kamar | 8 Bed | 1 org | 1 org |
| 32 | Danau Kerinci Arafah Resort | | | √ | Ds. Pulau Pandan | 2019 | 12 Kamar | 24 Bed | 22 org | 4 org |
| 33 | Homestay Marindau '88 | √ | | | Hamparan Pugu AHB | 2018 | 13 Kamar | 26 Bed | 4 org | 2 org |
| 34 | Guest House Berkah Atrama | √ | | | Air Panas Baru AHB | 2020 | 10 Kamar | 20 Bed | 2 org | 2 org |
| 35 | Homestay Telago Paradise | | | √ | Telago Pulau Tengah | 2018 | 5 Kamar | 10 Bed | 1 org | 1 org |
| 36 | Villa Weloza | | | √ | Mukai Tinggi | 2020 | 7 Kamar | 14 Bed | 2 org | -- |
| 37 | MT. Syariah Home Stay | | | √ | Sungai Sikai | 2021 | 13 Kamar | 26 Bed | 1 org | 1 org |
| 38 | Home Stay Ratu | | | √ | Pasar Minggu | 2020 | 6 Kamar | 12 Bed | 3 org | 3 org |
| 39 | Home Stay Nayla | | | √ | Mekar Jaya | 2021 | 16 Kamar | 32 Bed | 3 org | 1 org |

| NO | NAMA USAHA | KATEGORI AKOMODASI SETARA | | | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | FASILITAS | | JML TENAGA KERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOTEL | WISMA | HOMESTAY | | | JUMLAH KAMAR | JUMLAH TEMPAT TIDUR/ BED | LK | PR |
| 40 | Villa Ardilia | | | √ | Desa Keluru | 2020 | 3 Loudge | 12 Bed | 4 org | 2 org |
| 41 | Vlla Bukit Tirai Embun | | | √ | Ds. Danau Tinggi | 2021 | 8 Lumbung | 32 Bed | 2 org | 2 org |
| 42 | Home Stay Arroyan | | | √ | Siulak Deras Mudik | 2021 | 5 Kamar | 10 Bed | 3 org | 2 org |
| 43 | Penginapan Azzahra | | | √ | Air Panas Baru | 2019 | 5 Kamar | 10 Bed | 2 org | 1 org |
| 44 | Homestay Murtini | | | √ | Desa Batang Sangir | 2022 | 8 Kamar | 16 Bed | 1 org | 1 org |
| 45 | Ilha Homestay | | | √ | Giri Mulyo/ R10 | 2020 | 14 Kamar | 28 Bed | 2 org | 1 org |
| 46 | Penginapan Royal Nusantara | | √ | | Bedeng VIII | 2021 | 6 Kamar | 12 Bed | 2 org | 1 org |
| 47 | Penginapan Telaga Zam zam | | | √ | Tutung Bungkuk | 2022 | 4 Kamar | 8 Bed | 2 org | 2 org |
| 48 | The Hils Kerinci Resort | | | √ | Desa Mekar Sari | 2023 | 4 Kamar | 8 Bed | 1 org | 1 org |
| 49 | Swarna Bumi Kerinci Homestay | | | √ | Desa Sungai Jernih | 2023 | 4 Kamar | 8 Bed | 1 org | 1 org |
| 50 | Penginapan Umah Kito | | | √ | Ds. Koto Kapeh Siulak | 2023 | 10 Kamar | 20 Bed | 2 org | 1 org |
| 51 | Green Selasih Resort | | | √ | Bukit Selasih Belui Tinggi | 2023 | 3 Lodge | 10 Bed | 1 org | 1 org |
| | Jumlah | | | | | | 376 Kamar | 714 Bed | 114 org | 60 org |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

### g. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih *(clean water)* adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan air minum *(drinking water)* adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih terdiri dari: 1) Air Hujan; 2) Air Sungai dan Danau; 3) Mata Air; 4) Air Sumur Dangkal; dan 6) Air Sumur Dalam.

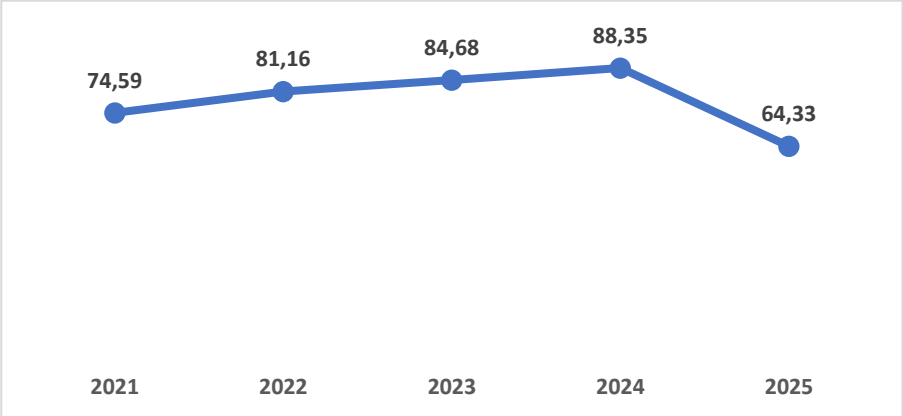
Produksi Air Bersih di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah distribusi air bersih pertahun. Penurunan produksi dan distribusi air bersih pertahun dengan jumlah penduduk yang terus meningkat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan dan penyediaan air bersih agar kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dapat terpenuhi.

**Tabel II. 78**
**Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| Uraian | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kapasitas Produksi Per Detik (Liter) | 421 | 421 | 421 | 376 | 376 |
| Produksi Air Pertahun ($M^3$) | 9.573.120 | 8.935.869 | 8.946.399 | 8.875.444 | 8.726.749 |
| Distribusi Air Pertahun ($M^3$) | 9.072.055 | 8.477.735 | 8.477.735 | 8.409.969 | 8.265.640 |
| Hydran Air (Unit) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**Gambar II. 45**
**Persentase Akses Air Bersih Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Persentase Akses Air Bersih menunjukkan terjadi penurunan persentase air bersih pada tahun 2025 menjadi 64,33 yang sebelumnya mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan aman.

### h. Fasilitas Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Sebagian besar kebutuhan energi listrik untuk saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan listrik menurun dari 58.163 pelanggan pada tahun 2023 menjadi 40.331 pelanggan pada tahun 2024. Hal ini berarti konsumen yang menggunakan layanan listrik berkurang. Pengurangan jumlah pelanggan listrik bisa diakibatkan oleh beralihnya ke sumber daya lain dan perubahan demografis. Ketersediaan daya listrik di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 79**
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2024-2025**

| Tahun | Pelanggan | Daya Terpasang (kWh) | Rasio Ketersediaan Daya Listrik (kWh) |
|---|---|---|---|
| **2024** | 40.331 | NA | NA |
| **2025** | N/A | NA | NA |

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

**i. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik**

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Tenaga listrik yang terpasang pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dapat lebih berkembang. Pembangkit listrik PLN telah meluaskan jaringan dan pelayanannya sampai ke desa, yang diharapkan pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dapat digunakan sebagai suatu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti setiap rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik sebagai pelanggan listrik, tetapi masih ada beberapa rumah tangga yang menggunakan listrik atas nama satu pelanggan. Kondisi seperti ini terjadi terutama di daerah pegunungan karena jarak jaringan listrik dengan rumah penduduk terlalu jauh sehingga satu unit meteran listrik dipakai oleh beberapa rumah.

**Tabel II. 80**
**Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persentase Menggunakan Listrik (%)** | 98,96 | 95,22 | 95,86 | 96,49 | 100,00 |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya rumah tangga yang sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, jika dihitung dengan persentase sudah mencapai 100%. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik hingga tahun 2025 sudah mencapai 100%, artinya di semua daerah sudah menggunakan listrik untuk penerangan.

### 2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

#### a. Kemudahan Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Data yang terkait perizinan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 81**
**Jenis Perizinan dan Lama Proses Perizinan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| NO | JENIS PERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| 1 | NIB | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 2 | TDG | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 3 | STDI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 4 | SIUI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 5 | DEPOT ISI ULANG | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 6 | HULLER-PENYONGSONG BERAS | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |

| NO | JENIS PERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| 7 | IUKS | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 8 | IUKU | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 9 | AMDAL | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 10 | PBG | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 11 | SIUJK | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 12 | HOME STAY | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 13 | RESTORAN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 14 | PUSAT SENI DAN HIBURAN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 15 | PANGGUNGTERBUKA | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 16 | TAMAN REKREASI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 17 | PENTAS PERTUNJUKAN SATWA | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 18 | DUNIA FANTASI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 19 | PADANG GOLF | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 20 | KOLAM PANCING | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 21 | GELANGGANG RENANG | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 22 | GELANGGANG PERMAINAN KECUALI VIDEO | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |

| NO | JENIS PERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| 23 | GELANGGANG BOWLING | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 24 | GELANGGANG BILLIARD | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 25 | SALON KECANTIKAN | Maksimal 6 hari kerja setelah berkas persyaratan dinayatan lengkap |
| 26 | PANTI MANDI UAP | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 27 | IZIN KARAOKE | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 28 | IZIN BIOSKOP | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 29 | FITNES CENTER | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 30 | PEMASANGAN REKLAME | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 31 | PENYELESAIAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 32 | SOP PELAYANAN IZIN MENARA | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 33 | WARUNG INTERNET | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 34 | IZIN PENDIRIAN ANGKUTAN UMUM | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 35 | IZIN TRAYEK | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 36 | USAHA ANGKUTAN BARANG, PENUMPANG | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 37 | KARTU PENGAWAS MENGANGKUT PENUMPANG | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 38 | PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |

| NO | JENIS PERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| 39 | IZIN PENDIRIAN CUCIAN KENDARAAN BERMOTOR | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 40 | PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA SETARA RUMAH SAKIT KELAS C DAN D | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 41 | POLIKLINIK, KLINIK SWASTA DAN KLINIK BERSAMA | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 42 | KLINIK BERSALIN, RUMAH BERSALIN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 43 | LABORATORIUM KESEHATAN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 44 | PRAKTEK DOKTER GIGI | 14 Hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| 45 | PRAKTEK DOKTER SPESIALIS | 14 Hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| 46 | PRAKTEK APOTEKER | 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| 47 | PRAKTEK AHLI GIGI | 14 Hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| 48 | PRAKTEK KEPERAWATAN | 14 Hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| 49 | PRAKTEK BIDAN | 14 Hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| 50 | IZIN APOTIK | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 51 | SURAT IZIN OPTIKAL | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 52 | SURAT IZIN TOKO OBAT | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 53 | PRAKTEK FISIOTERAPI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 54 | OKUPASI TERAPI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| 55 | RADIOLOGI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |

| NO | JENIS PERIZINAN | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|
| **56** | PENGOBATAN TRADISIONAL | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **57** | PRAKTEK TUKANG GIGI | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **58** | IZIN PENELITIAN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **59** | PAUD | 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap |
| **60** | BALAI LATIHAN KERJA | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **61** | KURSUS | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **62** | USAHA PETERNAKAN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **63** | PERKEBUNAN BUDIDAYA | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |
| **64** | PERKEBUNAN PENGOLAHAN | Melalui aplikasi oss.go.id (waktu penyelesaian ditentukan oleh resiko usaha) |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kerinci Tahun 2026

**b. Pengenaan Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Data Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 82**
**Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No. | Uraian | 2021 (Milyar Rp) | 2022 (Milyar Rp) | 2023 (Milyar Rp) | 2024 (Milyar Rp) | 2025 (Milyar Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.185,94** | **1.153,68** | **1.255,74** | **1.202,74** | **1.182,27** | **-0,25** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **66,89** | **44,37** | **66,83** | **37,11** | **46,50** | **-4,06** |
| **1.1.1** | Pajak daerah | 13,13 | 15,5 | 17,42 | 13,92 | 26,31 | **22,30** |
| **1.1.2** | Retribusi daerah | 2,98 | 3,12 | 3,27 | 2,86 | 2,73 | **-1,45** |
| **1.1.3** | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 9,32 | 10,13 | 9,93 | 10,3 | 10,04 | **2,39** |
| **1.1.4** | Lain-lain PAD yang sah | 41,46 | 15,62 | 36,21 | 10,03 | 7,42 | **-11,47** |

Sumber : BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2026 *(unaudited)*

### 2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

#### a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut mutu sumber daya manusia, kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non fisik. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan berketerampilan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan non fisik tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Jumlah ASN yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari tahun 2021 - 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 83**
**Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**

| No | Uraian | Sumber Dana | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Profesi | Mandiri | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Tugas Belajar |
| 2. | S1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tugas Belajar |
| 3. | S2 | APBN Kementerian Kesehatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tugas Belajar |
| | | Pemerintah Kabupaten Kerinci | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| | | Mandiri | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | S3 | Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tugas Belajar |
| 5. | DIV | APBN Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tugas Belajar |
| 6 | Dokter Spesialis | APBN Kementerian Kesehatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tugas Belajar |
| | | Mandiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Dokter SubSpesialis | Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tugas Belajar |
| 8 | Profesi | Mandiri | 8 | 10 | 24 | 35 | 50 | 127 | Izin Belajar |
| 9 | S1 | Mandiri | 17 | 31 | 48 | 36 | 25 | 157 | Izin Belajar |
| 10 | S2 | Mandiri | 39 | 23 | 27 | 38 | 33 | 160 | Izin Belajar |
| 11 | S3 | Mandiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Izin Belajar |
| 12 | DIV | Mandiri | 0 | 2 | 19 | 27 | 0 | 48 | Izin Belajar |
| **Total** | | | **67** | **67** | **123** | **142** | **110** | **509** | |

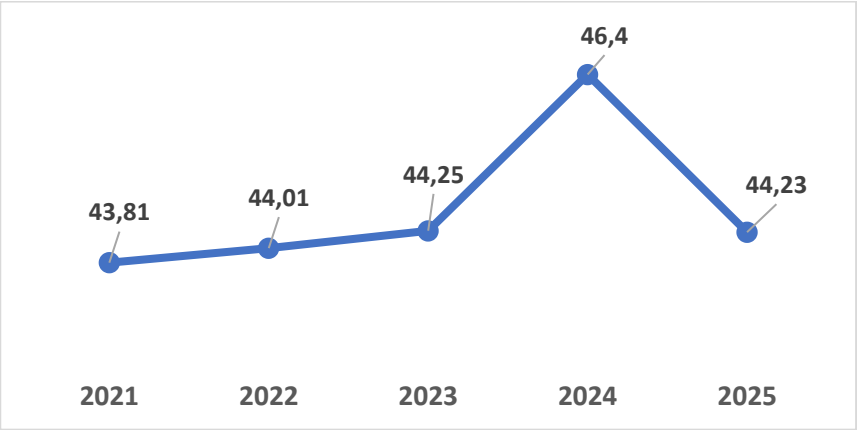
Sumber : BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tahun 2026

## b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan yang tinggi dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyaknya ketergantungan kepada penduduk yang produktif untuk membiayai. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan jadi tinggi.

**Gambar II. 46**
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**



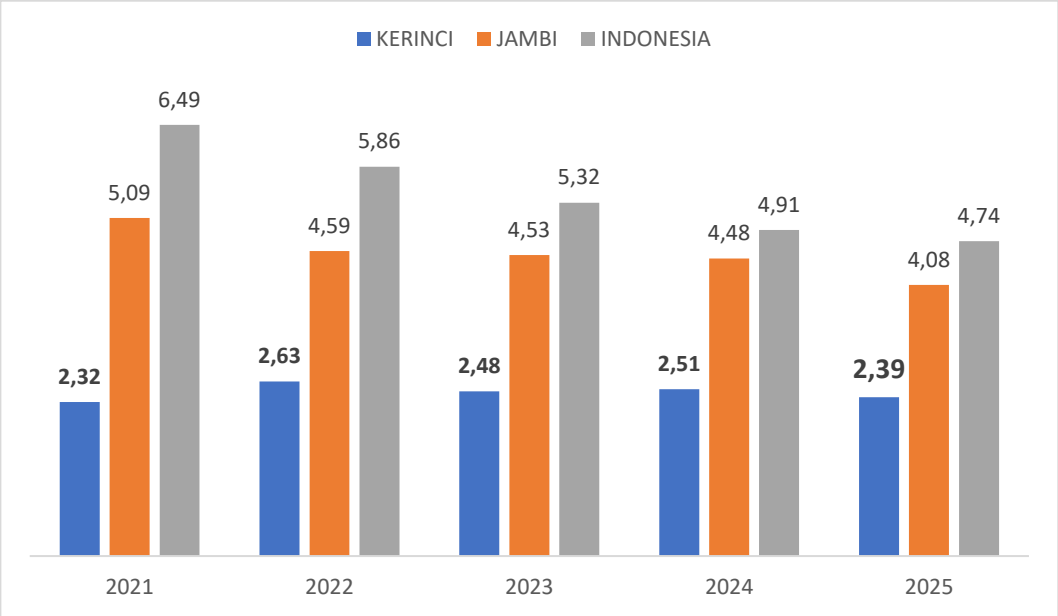

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Rasio ketergantungan Kabupaten Kerinci pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 46,4 persen yang sebelumnya meningkat berada pada angka 46,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya ketergantungan kepada penduduk yang produktif. Hal ini sejalan dengan terjadinya penigkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran pada tahun yang sama.

### c. Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misalnya TPT sebesar 6 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar II. 47**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data : BPS Kabupaten Kerinci dan Provinsi Tahun 2026

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun berfluktuatif. TPT tahun 2024 mencapai angka 2,39, menurun daripada tahun sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jambi dan TPT Nasional, angka TPT Kabupaten Kerinci masih lebih aman. Selain itu, TPT Kabupaten Kerinci juga lebih baik dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,45 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja, sehingga pengangguran menurun.

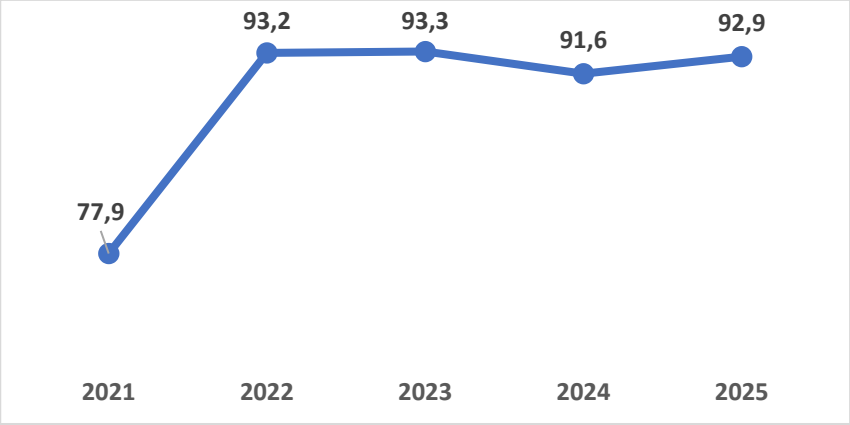
**f. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Maka PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pola pangan harapan (PPH) ini ditunjukkan melalui skor dengan skor maksimal 100.

Oleh karena itu semakin beragam dan proporsional konsumsi pangan masyarakat maka skor PPH-nya makin tinggi.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi Indikator Kinerja Pemerintah untuk menilai kualitas konsumsi masyarakat Kerinci. Skor PPH ini juga menjadi dasar perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di wilayah Kabupaten Kerinci. Untuk meningkatkan skor PPH, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan Peraturan Menteri Pertanian No.43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai acuan yang lebih operasional dalam implementasinya. Skor PPH Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

**Gambar II. 48**
**Skor PPH Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber Data: Dinas Perikana dan Ketahanan Pangan Kab. Kerinci Tahun 2026

Dari Gambar di atas, Skor PPH Kabupaten Kerinci berfluktuatif di mana hanya terjadi dua kali penurunan pada tahun 2024 menjadi 91,6 poin dan kembali meningkat menjadi pada tahun 2025 menjadi 92,9 poin. Kecukupan pangan merupakan fondasi penting demi mensukseskan pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendukung program pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat menetapkan

beberapa langkah untuk memaksimalkan kinerja seperti edukasi dan sosialisasi gizi seimbang, diversifikasi konsumsi pangan, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, intervensi khusus pada kelompok rentan dan sinergi lintas sektor.

### 2.1.5. Identifikasi Risiko Pembangunan

Analisis kondisi daerah tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan, potensi, dan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian target pembangunan. Risiko pembangunan merupakan faktor ketidakpastian yang dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian indikator kinerja, pelaksanaan program prioritas, serta keberlanjutan pembangunan daerah apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah risiko perubahan iklim yang akan berdampak berbagai sektor pembangunan, khususnya ketahanan pangan, ketersediaan sumber daya air, kesehatan masyarakat, serta infrastruktur. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu dan kejadian cuaca ekstrem berpotensi menurunkan produktivitas sektor-sektor strategis serta meningkatkan kebutuhan pembiayaan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selanjutnya terjadinya risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dapat menghambat pencapaian target pembangunan. Dampak bencana mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Selain itu, adanya ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian daerah. Perubahan ekonomi internasional, kebijakan perdangangan global, dan perubahan permintaan pasar dapat berdampak pada sektor-sektor unggulan daerah, investasi dan perdagangan.

Kemudian fluktuatif harga komoditas unggulan. Perubahan harga komoditas di tingkat global dan nasional dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, keberlanjutan usaha, daya saing produk daerah, serta berpengaruh pada penerimaan daerah. Pada aspek pengelolaan keuangan daerah, risiko fiskal daerah mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah

dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan. Risiko ini muncul akibat keterbatasan kapasitas pendapatan daerah, perubahan kebijakan transfer pusat, maupun tekanan terhadap ruang fiskal daerah. Selain itu risiko investasi dapat mempengaruhi percepatan pembangunan daerah. Faktor seperti ketidakpastian regulasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan daya tarik investasi daerah dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci selama Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah, kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, serta efektivitas pemanfaatan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, secara umum pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan capaian yang cukup baik. Sebagian besar perangkat daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

# Tabel II. 84
# Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci
# Tahun 2025 Triwulan IV

| No. | Kode | Uraian Bidang Urusan | Pagu RKPD | Rata-rata Capaian Kinerja | | Realisasi Keuangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ind Prog | Ind Sub Keg | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 349.166.034.156,00 | 100 | 63,96 | 338.312.498.596,00 | 96,89 |
| 2 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan | 117.109.236.127,00 | 93,33 | 75,91 | 113.283.357.461,00 | 96,73 |
| 3 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | PUSKESMAS PELOMPEK | 1.486.900.510,00 | 86,87 | 100 | 1.486.990.510,00 | 100,01 |
| 4 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSKESMAS KERSIK TUO | 2.497.226.511,00 | 100 | 76,15 | 2.425.357.085,00 | 97,12 |
| 5 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSKESMAS GUNUNG LABU | 1.483.235.500,00 | 100 | 77,78 | 1.645.537.305,00 | 110,94 |
| 6 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS SIULAK DERAS | 1.325.477.200,00 | 96,71 | 86,3 | 1.189.907.764,00 | 89,77 |
| 7 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP | 708.850.000,00 | 94,76 | 94,71 | 699.567.572,00 | 98,69 |
| 8 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG | 2.655.220.500,00 | 100 | 88,82 | 2.616.452.389,00 | 98,54 |
| 9 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI | 1.482.177.000,00 | 100 | 84,21 | 1.412.255.786,00 | 95,28 |
| 10 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | Puskesmas Sungai Tutung | 1.207.223.000,00 | 87,59 | 70,07 | 1.181.331.468,00 | 97,86 |
| 11 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | Puskesmas Kemantan | 1.278.283.001,00 | 72,14 | 72,22 | 1.242.132.936,00 | 97,17 |
| 12 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH | 1.604.562.431,00 | 100 | 92,31 | 1.604.562.431,00 | 100 |
| 13 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | Puskesmas Semurup | 1.571.467.517,00 | 87,81 | 68,42 | 1.466.366.513,00 | 93,31 |
| 14 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | PUSKESMAS HIANG | 1.684.823.160,00 | 68,39 | 77,31 | 1.462.706.356,00 | 86,82 |
| 15 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG | 1.606.006.700,00 | 83,21 | 65,62 | 1.513.438.951,00 | 94,24 |
| 16 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | PUSKESMAS SEMERAP | 1.455.613.901,00 | 100 | 42,86 | 1.329.579.702,00 | 91,34 |
| 17 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | PUSKESMAS JUJUN | 1.747.053.000,00 | 100 | 91,75 | 1.681.446.994,00 | 96,24 |
| 18 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | Puskesmas Tamiai | 1.230.115.915,00 | 71,4 | 72,22 | 1.202.837.265,00 | 97,78 |

| No. | Kode | Uraian Bidang Urusan | Pagu RKPD | Rata-rata Capaian Kinerja | | Realisasi Keuangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ind Prog | Ind Sub Keg | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | PUSKESMAS LOLO | 1.032.351.650,00 | 96,26 | 83,55 | 953.226.989,00 | 92,34 |
| 20 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN | 859.303.500,00 | 100 | 90,77 | 836.286.280,00 | 97,32 |
| 21 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | PUSKESMAS TARUTUNG | 838.643.476,00 | 71,4 | 76,47 | 805.189.698,00 | 96,01 |
| 22 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | PUSKESMAS LEMPUR | 1.565.663.818,00 | 100 | 97,96 | 1.438.156.873,00 | 91,86 |
| 23 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 | PUSKESMAS MUARA HEMAT | 697.126.100,00 | 0 | 90 | 505.644.901,00 | 72,53 |
| 24 | 1.02.0.00.0.00.01.0023 | LABKESDA | 272.046.810,00 | 100 | 100 | 267.461.565,00 | 98,31 |
| 25 | 1.02.0.00.0.00.01.0024 | GUDANG FARMASI | 275.506.300,00 | 80,94 | 100 | 275.364.700,00 | 99,95 |
| 26 | 1.02.0.00.0.00.01.0025 | RUMAH SAKIT KELAS D PRTAMA BUKIT KERMAN | 0 | 0 | 0 | 3.910.330.083,00 | 0 |
| 27 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 113.189.816.280,00 | 0 | 57,22 | 92.188.624.351,00 | 81,45 |
| 28 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran | 10.975.680.500,00 | 100 | 44,73 | 10.561.995.474,00 | 96,23 |
| 29 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10.763.790.279,00 | 58,31 | 57,72 | 10.008.412.224,00 | 92,98 |
| 30 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial | 4.824.226.450,00 | 0 | 55,83 | 10.535.947.897,00 | 218,4 |
| 31 | 2.07.2.17.2.17.01.0000 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja | 4.267.675.119,00 | 0 | 52,63 | 4.248.996.606,00 | 99,56 |
| 32 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.762.074.495,00 | 22,22 | 64,1 | 11.646.985.187,00 | 99,02 |
| 33 | 2.09.3.25.0.00.01.0000 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | 4.087.329.430,00 | 0 | 98,83 | 3.618.806.468,00 | 88,54 |
| 34 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 11.703.447.616,00 | 100 | 66,22 | 11.065.346.517,00 | 94,55 |
| 35 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.464.474.160,00 | 100 | 100 | 4.140.943.740,00 | 92,75 |
| 36 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5.266.718.600,00 | 0 | 73,04 | 4.867.379.152,00 | 92,42 |

| No. | Kode | Uraian Bidang Urusan | Pagu RKPD | Rata-rata Capaian Kinerja | | Realisasi Keuangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ind Prog | Ind Sub Keg | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 7.858.031.713,00 | 100 | 77,59 | 6.724.759.647,00 | 85,58 |
| 38 | 2.16.2.21.2.20.25.0000 | Komunikasi dan Informatika | 5.645.695.502,00 | 33,33 | 45,45 | 4.084.681.628,00 | 72,35 |
| 39 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.110.025.660,00 | 97,33 | 100 | 2.761.337.248,00 | 88,79 |
| 40 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 4.352.123.963,00 | 0 | 54,11 | 3.510.966.507,00 | 80,67 |
| 41 | 2.22.3.26.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7.022.375.260,00 | 27,98 | 78,4 | 4.809.605.821,00 | 68,49 |
| 42 | 2.23.2.24.0.00.26.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3.349.469.106,00 | 0 | 76,78 | 3.018.325.086,00 | 90,11 |
| 43 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | 19.992.161.513,00 | 0 | 29,69 | 17.540.551.179,00 | 87,74 |
| 44 | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8.132.368.021,00 | 0 | 46,48 | 7.201.077.588,00 | 88,55 |
| 45 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 5.090.131.200,00 | 13,57 | 69,77 | 4.841.927.510,00 | 95,12 |
| 46 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 37.106.787.312,00 | 0 | 100 | 34.669.523.566,00 | 93,43 |
| 47 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD | 29.413.538.188,00 | 0 | 100 | 28.531.312.571,00 | 97 |
| 48 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8.398.601.710,00 | 98,84 | 80,85 | 7.785.478.249,00 | 92,7 |
| 49 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 346.556.261.130,00 | 52,47 | 77,46 | 346.454.011.469,00 | 99,97 |
| 50 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 8.809.496.815,00 | 100 | 100 | 7.851.130.073,00 | 89,12 |
| 51 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat | 10.233.279.422,00 | 24,38 | 90,89 | 10.135.898.922,00 | 99,05 |
| 52 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Gunung Tujuh | 2.956.883.250,00 | 100 | 94,03 | 2.539.786.479,00 | 85,89 |
| 53 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | Kecamatan Kayu Aro | 2.102.331.300,00 | 0 | 40,65 | 2.082.093.854,00 | 99,04 |
| 54 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | Kecamatan Kayu Aro Barat | 2.419.443.876,00 | 0 | 74,3 | 1.940.299.173,00 | 80,2 |
| 55 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | Kecamatan Gunung Kerinci | 3.351.505.268,00 | 0 | 69,23 | 2.827.862.459,00 | 84,38 |

| No. | Kode | Uraian Bidang Urusan | Pagu RKPD | Rata-rata Capaian Kinerja | | Realisasi Keuangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ind Prog | Ind Sub Keg | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | Kecamatan Siulak | 2.908.477.535,00 | 0 | 71,28 | 2.598.677.602,00 | 89,35 |
| 57 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | Kecamatan Siulak Mukai | 2.303.638.700,00 | 0 | 89,79 | 1.952.041.835,00 | 84,74 |
| 58 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | Kecamatan Air Hangat | 3.288.471.400,00 | 0 | 69,53 | 2.509.543.264,00 | 76,31 |
| 59 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | Kecamatan Air Hangat Timur | 2.935.559.100,00 | 0 | 100 | 2.620.476.159,00 | 89,27 |
| 60 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | Kecamatan Air Hangat Barat | 2.152.983.950,00 | 80,23 | 97,13 | 2.499.565.026,00 | 116,1 |
| 61 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | Kecamatan Depati Tujuh | 2.557.723.200,00 | 0 | 73,95 | 2.272.935.945,00 | 88,87 |
| 62 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 | Kecamatan Sitinjau Laut | 3.379.916.600,00 | 0 | 91,97 | 2.825.233.134,00 | 83,59 |
| 63 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | Kecamatan Danau Kerinci | 3.029.586.245,00 | 0 | 51,15 | 2.311.698.007,00 | 76,3 |
| 64 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | Kecamatan Keliling Danau | 2.725.700.850,00 | 0 | 52,7 | 2.436.094.263,00 | 89,37 |
| 65 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | Kecamatan Gunung Raya | 4.139.609.869,00 | 0 | 71,79 | 3.292.163.366,00 | 79,53 |
| 66 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 | Kecamatan Bukit Kerman | 2.374.955.450,00 | 0 | 63,22 | 2.278.680.702,00 | 95,95 |
| 67 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 | Kecamatan Batang Merangin | 2.397.230.600,00 | 0 | 72,42 | 2.068.996.433,00 | 86,31 |
| 68 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 | Kecamatan Tanah Cogok | 2.596.721.300,00 | 50 | 63,16 | 2.400.919.460,00 | 92,46 |
| 69 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 | Kecamatan Danau Kerinci Barat | 3.503.418.405,00 | 30 | 82,35 | 3.197.659.880,00 | 91,27 |
| 70 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.082.878.781,00 | 0 | 78,04 | 4.573.269.939,00 | 89,97 |
| **Jumlah** | | | **1.239.422.762.906,00** | **48,28** | **74,91** | **1.186.780.009.833,00** | **95,75** |

Berdasarkan tabel rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Triwulan IV, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah menunjukkan capaian yang cukup baik. Total realisasi keuangan daerah mencapai 95,75 persen dari total pagu RKPD sebesar Rp1.239.422.762.906,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.186.780.009.832,00.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025. Tingginya realisasi keuangan tersebut mencerminkan adanya komitmen perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV secara umum telah berjalan cukup baik dan menunjukkan perkembangan yang positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target pembangunan daerah pada beberapa sektor dan perangkat daerah. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan RKPD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pembangunan daerah karena menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan, penyempurnaan perencanaan pembangunan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Triwulan IV, beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Capaian Indikator Program

   Meskipun realisasi keuangan daerah secara umum menunjukkan capaian yang tinggi, namun masih terdapat beberapa indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi pencapaian outcome pembangunan daerah. Belum optimalnya capaian indikator program dipengaruhi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara target program dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, perubahan prioritas pembangunan selama tahun berjalan, serta belum optimalnya sinkronisasi antara program, kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah.

2. Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan

   Beberapa program dan kegiatan pembangunan daerah masih mengalami keterlambatan pelaksanaan, khususnya pada kegiatan fisik dan pembangunan infrastruktur daerah. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh proses administrasi pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, kondisi cuaca, serta faktor geografis wilayah Kabupaten Kerinci yang cukup luas dan memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda antar wilayah. Kondisi tersebut berdampak terhadap keterlambatan penyelesaian beberapa kegiatan pembangunan dan mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan.

3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Kapasitas sumber daya manusia pada beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pelaksanaan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam penyusunan laporan kinerja, pengelolaan data pembangunan, serta pemahaman terhadap indikator kinerja program dan kegiatan.

4. Belum Optimalnya Sinkronisasi dan Validitas Data

   Dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih ditemukan adanya perbedaan data capaian program dan kegiatan antar perangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data pembangunan daerah masih perlu diperkuat agar data yang digunakan dalam proses evaluasi pembangunan lebih akurat, konsisten, dan terintegrasi. Belum optimalnya validitas data juga mempengaruhi kualitas pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan pelaksanaan monitoring pembangunan secara menyeluruh.

Selain itu, pada tahun 2025 juga terjadi penyesuaian anggaran daerah yang mempengaruhi pelaksanaan beberapa program dan kegiatan perangkat daerah. Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah, dinamika kebijakan nasional, serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah yang berkembang selama tahun berjalan. Penyesuaian anggaran tersebut berdampak terhadap perubahan target kegiatan, penjadwalan ulang pelaksanaan program, efisiensi belanja daerah, serta penyesuaian pelaksanaan beberapa kegiatan pembangunan pada perangkat daerah. Kondisi ini turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada beberapa sektor.

Hasil evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Triwulan IV ini selanjutnya menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan penyempurnaan pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, berkualitas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah, maka disajikan Tabel TC.19

tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV. Tabel tersebut memuat informasi mengenai pagu anggaran, capaian indikator program dan sub kegiatan, realisasi keuangan, serta persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Penyajian tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Melalui data evaluasi tersebut dapat diketahui perangkat daerah yang telah menunjukkan capaian kinerja optimal maupun perangkat daerah yang masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, hasil evaluasi ini juga menjadi dasar dalam memperkuat pengendalian pembangunan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Kerinci.

Hasil evaluasi kinerja pada triwulan IV tahun 2025 dimana capaian kinerja dan anggaran RKPD pada masing-masing unit kerja tergambar pada Tabel berikut ini:

# Tabel II. 85
## Realisasi Program atau Kegiatan Yang Memenuhi, Tidak Memenuhi dan Melebihi Target Kinerja Hasil atau Keluaran yang Direncanakan Triwulan IV Evaluasi RKPD Tahun 2025

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **349.166.034.156** | | **338.312.498.596** | **63,96** | **96,89** | |
| **1.** | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **296.595.442.110** | | **286.058.860.693** | **49,96** | **96,45** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks) | 86 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | | 4,5 | | 0 | 0 | |
| | | | Hasil Evaluasi SAKIP () | 86 | | | | 0 | 0 | |
| 2. | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 87.752.690 | | 87.071.390 | 66,67 | 99,22 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3. | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 37.445.500 | | 36.764.200 | 100 | 98,18 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 4. | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 17.450.890 | | 17.450.890 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 5. | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6. | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 16.697.600 | | 16.697.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 7. | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 8. | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 16.158.700 | | 16.158.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 9. | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 291.788.320.000 | | 281.533.456.438 | 50,41 | 96,49 | |
| | | Tersedianya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 10. | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 291.398.117.000 | | 281.145.775.038 | 102,49 | 96,48 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2814 | | 2.884 | | 102,49 | 0 | |
| 11. | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 367.080.000 | | 367.080.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 12. | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 13. | 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 14. | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 23.123.000 | | 20.601.400 | 100 | 89,09 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 15. | 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 16. | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 27.712.000 | | 24.086.695 | 50 | 86,92 | |
| | | Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 17. | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 18. | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 27.712.000 | | 24.086.695 | 100 | 86,92 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 19. | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 67.651.000 | | 63.493.898 | 35,71 | 93,86 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 20. | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 21. | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 22. | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 21.775.000 | | 18.702.700 | 100 | 85,89 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 23. | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | 44.791.198 | 42,86 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 7 | | 3 | | 42,86 | 0 | |
| 24. | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 45.876.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 25. | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 316.217.610 | | 302.913.468 | 75,36 | 95,79 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat | | | | | | 0 | 0 | |
| 26. | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 6.493.500 | | 4.989.600 | 100 | 76,84 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 27. | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 32.200.100 | | 31.799.300 | 100 | 98,76 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 28. | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 29. | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 11.421.300 | | 8.881.300 | 100 | 77,76 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 30. | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 26.345.490 | | 20.693.965 | 100 | 78,55 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 31. | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 96.606.000 | | 95.804.118 | 102,86 | 99,17 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 35 | | 36 | | 102,86 | 0 | |
| 32. | 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 33. | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 143.151.220 | | 140.745.185 | 100 | 98,32 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 34. | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 405.364.700 | | 405.308.568 | 33,33 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 35. | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 36. | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 37. | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 59.234.200 | | 59.178.540 | 100 | 99,91 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 38. | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 39. | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 40. | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 346.130.500 | | 346.130.028 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 41. | 1.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 42. | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.825.256.110 | | 3.565.702.132 | 50 | 93,21 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 43. | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 44. | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 119.521.500 | | 96.717.632 | 100 | 80,92 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 45. | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 46. | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.705.734.610 | | 3.468.984.500 | 100 | 93,61 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 47. | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 77.168.000 | | 76.828.104 | 28,57 | 99,56 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 48. | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 42.740.000 | | 42.400.104 | 100 | 99,2 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 49. | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 50. | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 51. | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 52. | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 53. | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 54. | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 34.428.000 | | 34.428.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **55.** | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **52.412.323.278** | | **52.115.060.315** | **69,41** | **99,43** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%) | | | 77,12 | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) | | | 98,16 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (%) | | | 30,57 | | 0 | 0 | |
| | | | rata-rata lama sekolah (Tahun) | 8,61 | | 8,61 | | 100 | 0 | |
| | | | harapan lama sekolah (Tahun) | 13,93 | | 14,18 | | 101,79 | 0 | |
| 56. | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 28.368.634.635 | | 28.257.477.551 | 65,74 | 99,61 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar | | | | | | 0 | 0 | |
| 57. | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 58. | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 7.003.376.000 | | 6.945.801.374 | 109,3 | 99,18 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 43 | | 47 | | 109,3 | 0 | |
| 59. | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 60. | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 902.590.400 | | 902.380.067 | 100 | 99,98 | |
| | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 61. | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 62. | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 138.834.400 | | 138.514.600 | 100 | 99,77 | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 425 | | 425 | | 100 | 0 | |
| 63. | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 64. | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 95.464.960 | | 88.998.210 | 100 | 93,23 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 65. | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 25.613.301 | | 22.563.250 | 100 | 88,09 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 66. | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 19.381.880.000 | | 19.381.680.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 67. | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 43.628.734 | | 39.700.650 | 100 | 91 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 68. | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 30.659.768 | | 28.359.700 | 100 | 92,5 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 69. | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 32.940.468 | | 30.354.400 | 100 | 92,15 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 70. | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 24.054.268 | | 21.004.200 | 100 | 87,32 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 71. | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 29.723.500 | | 20.802.500 | 100 | 69,99 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 72. | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 73. | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 35.506.500 | | 25.641.700 | 100 | 72,22 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 74. | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 324.236.000 | | 322.515.700 | 100 | 99,47 | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 75. | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 32.725.000 | | 29.690.000 | 100 | 90,73 | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 76. | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | 82.680.000 | | 81.600.000 | 100 | 98,69 | |
| | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 77. | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 78. | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 79. | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 40 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 80. | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 30.081.268 | | 27.363.700 | 100 | 90,97 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 81. | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | 154.640.068 | | 150.507.500 | 100 | 97,33 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 229 | | 229 | | 100 | 0 | |
| 82. | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 83. | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 641 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 84. | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 85. | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 13.959.019.068 | | 13.912.019.252 | 69,96 | 99,66 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Pendidikan Menengah Pertama | | | | | | 0 | 0 | |
| 86. | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 87. | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 3.441.008.650 | | 3.427.142.650 | 125 | 99,6 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 20 | | 25 | | 125 | 0 | |
| 88. | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 89. | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 16 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 90. | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 1.087.908.400 | | 1.086.267.360 | 100 | 99,85 | |
| | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 91. | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 92. | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 648 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 93. | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 248.734.700 | | 248.734.700 | 93,89 | 100 | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 540 | | 507 | | 93,89 | 0 | |
| 94. | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 95. | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 38.808.730 | | 32.953.500 | 100 | 84,91 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| 96. | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 19.783.915 | | 19.783.915 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 54 | | 54 | | 100 | 0 | |
| 97. | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 8.651.600.000 | | 8.651.519.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 54 | | 54 | | 100 | 0 | |
| 98. | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 24.770.073 | | 21.970.073 | 100 | 88,7 | |
| | | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 54 | | 54 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 99. | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 15.361.800 | | 12.511.800 | 100 | 81,45 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 54 | | 54 | | 100 | 0 | |
| 100. | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 14.218.400 | | 12.868.400 | 100 | 90,51 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 101. | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 18.366.200 | | 17.366.200 | 100 | 94,56 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 102. | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 24.733.100 | | 23.533.100 | 100 | 95,15 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 103. | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 104. | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 24.698.200 | | 23.316.200 | 100 | 94,4 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 105. | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 40.605.700 | | 38.563.014 | 100 | 94,97 | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 106. | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 56.302.000 | | 52.664.000 | 100 | 93,54 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 54 | | 54 | | 100 | 0 | |
| 107. | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Baru Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 108. | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 35.999.200 | | 34.339.200 | 100 | 95,39 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 54 | | 54 | | 100 | 0 | |
| 109. | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | 45.120.000 | | 44.980.000 | 100 | 99,69 | |
| | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 110. | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 111. | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 57.000.000 | | 56.924.240 | 100 | 99,87 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 112. | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 114.000.000 | | 106.581.900 | 100 | 93,49 | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 113. | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 8.318.998.235 | | 8.205.423.802 | 66,81 | 98,63 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | 0 | 0 | |
| 114. | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | 1.207.268.700 | | 1.200.565.842 | 100 | 99,44 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 115. | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | 163.376.400 | | 162.626.241 | 100 | 99,54 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 116. | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | 728.126.000 | | 677.903.200 | 100 | 93,1 | |
| | | Perlengkapan PAUD yang Tersedia | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 117. | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 118. | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 119. | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | 47.171.325 | | 44.260.325 | 100 | 93,83 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 120. | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | 40.214.500 | | 39.764.500 | 100 | 98,88 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 327 | | 327 | | 100 | 0 | |
| 121. | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 5.930.425.000 | | 5.894.305.400 | 100 | 99,39 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 327 | | 327 | | 100 | 0 | |
| 122. | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 20.810.100 | | 18.128.100 | 100 | 87,11 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 327 | | 327 | | 100 | 0 | |
| 123. | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 20.422.000 | | 19.773.234 | 100 | 96,82 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 124. | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 23.701.300 | | 21.868.300 | 100 | 92,27 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 35 | | 35 | | 100 | 0 | |
| 125. | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 23.192.600 | | 16.788.600 | 100 | 72,39 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 126. | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 127. | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 20.091.400 | | 17.990.600 | 100 | 89,54 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 128. | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 129. | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 64.704.000 | | 62.926.550 | 100 | 97,25 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 327 | | 327 | | 100 | 0 | |
| 130. | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 131. | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 132. | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 133. | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 134. | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 135. | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | 29.494.910 | | 28.522.910 | 2,5 | 96,7 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 13105 | | 327 | | 2,5 | 0 | |
| 136. | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 137. | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.765.671.340 | | 1.740.139.710 | 78,57 | 98,55 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 0 | 0 | |
| 138. | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 139. | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 140. | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 114.570.000 | | 106.355.792 | 100 | 92,83 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 141. | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 1.444.300.000 | | 1.444.241.448 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 142. | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 25.154.800 | | 23.515.800 | 100 | 93,48 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 143. | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 18.565.900 | | 17.565.900 | 100 | 94,61 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 144. | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 21.047.300 | | 20.192.543 | 100 | 95,94 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 145. | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 17.032.200 | | 16.132.200 | 100 | 94,72 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 146. | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 21.837.600 | | 20.392.600 | 100 | 93,38 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 147. | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 148. | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 30.407.640 | | 28.852.527 | 100 | 94,89 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 149. | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 12.968.900 | | 12.253.900 | 100 | 94,49 | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 150. | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 151. | 1.01.02.2.04.0037 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 152. | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 153. | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 154. | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 17.537.700 | | 16.337.700 | 100 | 93,16 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 155. | 1.01.02.2.04.0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 156. | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 42.249.300 | | 34.299.300 | 100 | 81,18 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 1664 | | 1.664 | | 100 | 0 | |
| 157. | 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 158. | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 159. | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 160. | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **161.** | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | **32.162.168** | | **29.712.100** | **100** | **92,38** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Kemampuan Literasi Siswa SMP (%) | 66,57 | | 65,46 | | 98,33 | 0 | |
| | | | Kemampuan numerasi SMP (%) | 60,55 | | 59,04 | | 97,51 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Kemampuan Literasi Siswa SD (%) | 61,43 | | 58,92 | | 95,91 | 0 | |
| | | | Kemampuan Numerasi Siswa SD (%) | 58,80 | | 53,89 | | 91,65 | 0 | |
| 162. | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 32.162.168 | | 29.712.100 | 100 | 92,38 | |
| | | Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 0 | 0 | |
| 163. | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 32.162.168 | | 29.712.100 | 100 | 92,38 | |
| | | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 284 | | 284 | | 100 | 0 | |
| **164.** | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | **114.562.700** | | **100.096.588** | **100** | **87,37** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%) | 33,28 | | 31,94 | | 95,97 | 0 | |
| | | | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%) | 76,37 | | 305,12 | | 399,53 | 0 | |
| | | | Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 (%) | 92,96 | | 85,25 | | 91,71 | 0 | |
| | | | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | | | 31,94 | | 0 | 0 | |
| 165. | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 114.562.700 | | 100.096.588 | 100 | 87,37 | |
| | | Tersedianya Dokumen dan Laporan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 0 | 0 | |
| 166. | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 87.984.700 | | 82.078.588 | 100 | 93,29 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 167. | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 26.578.000 | | 18.018.000 | 100 | 67,79 | |
| | | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **168.** | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | **11.543.900** | | **8.768.900** | **100** | **75,96** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkatnya distribusi institusi pendidikan | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (Persen) | 98,72 | | 98,16 | | 99,43 | 0 | |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (%) | 80,16 | | 77,12 | | 96,21 | 0 | |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (Persen) | 34,61 | | 30,57 | | 88,33 | 0 | |
| 169. | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 11.543.900 | | 8.768.900 | 100 | 75,96 | |
| | | Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 170. | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 11.543.900 | | 8.768.900 | 100 | 75,96 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **171.** | **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pendidikan |
| | | Terlestarikannya bahasa dan sastra Daerah | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 172. | 1.01.06.2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 173. | 1.01.06.2.01.0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 174. | 1.01.06.2.01.0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 175. | 1.01.06.2.01.0008 | Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **147.674.113.627** | | **146.435.489.577** | **79,4** | **99,16** | |
| **176.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **67.805.260.243** | | **65.017.258.421** | **77,78** | **95,89** | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan (Persen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dibayarkan Pajak Serta Perizinannya dan Tersediannya anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. (Persen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Terlaksananya Program dan Perencanaan Renstra, Renja, Renja P, RKA, RKA P, DPA-SKPD dan Tapkin Serta Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 177. | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 197.245.000 | | 194.548.694 | 100 | 98,63 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 178. | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 83.289.500 | | 81.329.498 | 100 | 97,65 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 179. | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 67.748.900 | | 67.344.496 | 100 | 99,4 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 180. | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 181. | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 46.206.600 | | 45.874.700 | 100 | 99,28 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 182. | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 67.097.410.543 | | 64.321.701.782 | 75 | 95,86 | |
| | | Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 183. | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 65.866.173.543 | | 63.091.385.532 | 100 | 95,79 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 930 | | 930 | | 100 | 0 | |
| 184. | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 1.177.460.000 | | 1.177.460.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 28 | | 28 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 185. | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 186. | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 53.777.000 | | 52.856.250 | 100 | 98,29 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 187. | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 33.847.900 | | 33.779.700 | 100 | 99,8 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 188. | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 33.847.900 | | 33.779.700 | 100 | 99,8 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 189. | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 43.654.500 | | 42.986.000 | 33,33 | 98,47 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 190. | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 900 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 191. | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 192. | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 43.654.500 | | 42.986.000 | 100 | 98,47 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 193. | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 213.213.600 | | 210.652.053 | 100 | 98,8 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 194. | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 26.102.600 | | 25.299.000 | 100 | 96,92 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 195. | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 46.300.000 | | 46.125.000 | 100 | 99,62 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 196. | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 140.811.000 | | 139.228.053 | 100 | 98,88 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 197. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 121.408.700 | | 115.624.566 | 100 | 95,24 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 198. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 70.038.000 | | 64.375.366 | 100 | 91,91 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 199. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 51.370.700 | | 51.249.200 | 100 | 99,76 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 200. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 98.480.000 | | 97.965.626 | 50 | 99,48 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 201. | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 98.480.000 | | 97.965.626 | 100 | 99,48 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 202. | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **203.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **48.376.283.161** | | **47.486.548.143** | **73,14** | **98,16** | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Puskesmas) | 21 | | 21 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19,3 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kerinci (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 4,4 | | 0 | 0 | |
| 204. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.703.889.540 | | 25.445.835.593 | 43,81 | 99 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 205. | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | 899.956.650 | | 856.888.445 | 100 | 95,21 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 206. | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 207. | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 208. | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 209. | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 17.352.194.000 | | 17.161.808.025 | 100 | 98,9 | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 210. | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 1.786.546.745 | | 1.769.806.533 | 6,67 | 99,06 | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 15 | | 1 | | 6,67 | 0 | |
| 211. | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit) | 23 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 212. | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 213. | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 5.665.192.145 | | 5.657.332.590 | 100 | 99,86 | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 214. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 22.499.674.321 | | 21.888.555.750 | 81,47 | 97,28 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 215. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 530.295.770 | | 474.214.165 | 100 | 89,42 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 216. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 123.400.000 | | 82.420.000 | 100 | 66,79 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 487 | | 487 | | 100 | 0 | |
| 217. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 28.038.600 | | 27.990.611 | 100 | 99,83 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 500 | | 500 | | 100 | 0 | |
| 218. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 21.639.000 | | 21.638.850 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1300 | | 1.300 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 219. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 21 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 220. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 26.069.200 | | 25.884.200 | 100 | 99,29 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 250 | | 250 | | 100 | 0 | |
| 221. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 6.488.800 | | 6.407.800 | 100 | 98,75 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 222. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 70319 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 223. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2802 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 224. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 225. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 29.582.100 | | 29.541.600 | 99,6 | 99,86 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 5020 | | 5.000 | | 99,6 | 0 | |
| 226. | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 227. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 360.805.000 | | 189.350.746 | 100 | 52,48 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 228. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 42.405.000 | | 40.130.500 | 100 | 94,64 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 229. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 177.838.600 | | 176.092.700 | 100 | 99,02 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 230. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 202.630.800 | | 201.264.000 | 100 | 99,33 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 231. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 164.754.300 | | 153.944.852 | 100 | 93,44 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 232. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 28.507.500 | | 26.969.505 | 100 | 94,6 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 233. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 44.938.000 | | 40.127.100 | 100 | 89,29 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 234. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 144.953.300 | | 143.820.350 | 100 | 99,22 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 235. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 17.105.320.340 | | 16.986.520.400 | 100 | 99,31 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 236. | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | 40.619.300 | | 40.127.100 | 100 | 98,79 | |
| | | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 237. | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | 2.837.781.911 | | 2.644.017.774 | 100 | 93,17 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 238. | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 21 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 239. | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 217.590.000 | | 217.267.500 | 100 | 99,85 | |
| | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 240. | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | 281.010.500 | | 276.142.897 | 100 | 98,27 | |
| | | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 21 | | 21 | | 100 | 0 | |
| 241. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 45.550.500 | | 45.459.600 | 100 | 99,8 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 870 | | 870 | | 100 | 0 | |
| 242. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 243. | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | 39.455.800 | | 39.223.500 | 100 | 99,41 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 244. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | 34.335.000 | | 29.721.000 | 100 | 86,56 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 245. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | 34.335.000 | | 29.721.000 | 100 | 86,56 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 246. | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 138.384.300 | | 122.435.800 | 50 | 88,48 | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 247. | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 248. | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | 138.384.300 | | 122.435.800 | 100 | 88,48 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 22 | | 22 | | 100 | 0 | |
| **249.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | **163.052.700** | | **85.331.400** | **66,67** | **52,33** | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Terpenuhinya Sember Daya Manusia Kesehatan yang Memadai dan Berkualitas (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Tercapainya Pembinaan Dan Pengendalian Praktik Tenaga Kesehatan (Persen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 250. | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 26.124.500 | | 25.688.800 | 100 | 98,33 | |
| | | Terelaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 251. | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 26.124.500 | | 25.688.800 | 100 | 98,33 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 70 | | 70 | | 100 | 0 | |
| 252. | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 61.956.000 | | 59.642.600 | 100 | 96,27 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 253. | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 61.956.000 | | 59.642.600 | 100 | 96,27 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 254. | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 74.972.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 255. | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 74.972.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 540 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **256.** | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | **417.646.523** | | **370.361.697** | **100** | **88,68** | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 257. | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 88.320.700 | | 86.368.000 | 100 | 97,79 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 0 | 0 | |
| 258. | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 88.320.700 | | 86.368.000 | 100 | 97,79 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| 259. | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 329.325.823 | | 283.993.697 | 100 | 86,23 | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | 0 | 0 | |
| 260. | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 329.325.823 | | 283.993.697 | 100 | 86,23 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 60 | | 60 | | 100 | 0 | |
| **261.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **346.993.500** | | **323.857.800** | **100** | **93,33** | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 262. | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 29.838.600 | | 29.320.300 | 100 | 98,26 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 263. | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | 29.838.600 | | 29.320.300 | 100 | 98,26 | |
| | | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 21 | | 21 | | 100 | 0 | |
| 264. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 317.154.900 | | 294.537.500 | 100 | 92,87 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 265. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 317.154.900 | | 294.537.500 | 100 | 92,87 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| **266.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.486.900.510** | | **1.486.990.510** | **100** | **100,01** | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 15,2 | | 121,24 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 59,11 | | 0 | 0 | |
| 267. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.486.900.510 | | 1.486.990.510 | 100 | 100,01 | |
| | | terlaksanannya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 268. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 91.000.000 | | 91.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 65 | | 65 | | 100 | 0 | |
| 269. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 500.000 | | 500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 65 | | 65 | | 100 | 0 | |
| 270. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 90.800.000 | | 90.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| 271. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 13.014.310 | | 13.014.310 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 89 | | 89 | | 100 | 0 | |
| 272. | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 15.200.000 | | 15.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 250 | | 250 | | 100 | 0 | |
| 273. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 324.400.000 | | 324.400.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1300 | | 1.300 | | 100 | 0 | |
| 274. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 21.600.000 | | 21.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 323 | | 323 | | 100 | 0 | |
| 275. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 241.114.700 | | 241.114.700 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 110 | | 110 | | 100 | 0 | |
| 276. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 29.200.000 | | 29.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 277. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 172.340.000 | | 172.430.000 | 100 | 100,05 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 320 | | 320 | | 100 | 0 | |
| 278. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 407.731.500 | | 407.731.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 279. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| 280. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **281.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.497.226.511** | | **2.425.357.085** | **76,15** | **97,12** | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19,3 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 200 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| 282. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.497.226.511 | | 2.425.357.085 | 76,15 | 97,12 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Ïɛ ouput | | | | | | 0 | 0 | |
| 283. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 187.440.000 | | 187.440.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 334 | | 334 | | 100 | 0 | |
| 284. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 300.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 320 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 285. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 2.600.000 | | 1.800.000 | 68,89 | 69,23 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 270 | | 186 | | 68,89 | 0 | |
| 286. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 7.400.000 | | 6.100.000 | 81,95 | 82,43 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1878 | | 1.539 | | 81,95 | 0 | |
| 287. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 142.000.000 | | 142.000.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3033 | | 3.033 | | 100 | 0 | |
| 288. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 186.963.200 | | 186.963.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 120 | | 120 | | 100 | 0 | |
| 289. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 45.160.000 | | 36.060.000 | 79,17 | 79,85 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 240 | | 190 | | 79,17 | 0 | |
| 290. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 120 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 291. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 158.200.000 | | 158.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 260 | | 260 | | 100 | 0 | |
| 292. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 1.384.965.261 | | 1.342.073.271 | 91,67 | 96,9 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 11 | | 91,67 | 0 | |
| 293. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 252.215.350 | | 235.763.096 | 92,92 | 93,48 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 240 | | 223 | | 92,92 | 0 | |
| 294. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 129.982.700 | | 128.957.518 | 99,17 | 99,21 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 120 | | 119 | | 99,17 | 0 | |
| **295.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.476.485.500** | | **1.639.162.305** | **76,47** | **111,02** | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 2 | | 198,96 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 279,15 | | 392,34 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 15,2 | | 121,24 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 2,88 | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 340 | | 400 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| 296. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.476.485.500 | | 1.639.162.305 | 81,25 | 111,02 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 297. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 66.080.000 | | 66.080.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 204 | | 204 | | 100 | 0 | |
| 298. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 34.000.000 | | 34.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 88 | | 88 | | 100 | 0 | |
| 299. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 169.400.000 | | 169.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 696 | | 696 | | 100 | 0 | |
| 300. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 11.800.000 | | 11.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 75 | | 75 | | 100 | 0 | |
| 301. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 302. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 148.640.000 | | 148.632.000 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 303. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 22.800.000 | | 22.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 304. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 305. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 130.100.000 | | 130.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 306. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 337.390.700 | | 336.829.453 | 100 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 307. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 246.194.800 | | 220.763.452 | 100 | 89,67 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 308. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 298.987.400 | 0 | 373,73 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 0 | | 12 | | 0 | 0 | |
| 309. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | | | | | | | |
| 310. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 311. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 312. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 11.600.000 | | 11.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 313. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 209.680.000 | | 179.370.000 | 100 | 85,54 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 314. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 315. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **316.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **6.750.000** | | **6.375.000** | **100** | **94,44** | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 380 | | 400 | 0 | |
| | | | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 317. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 6.750.000 | | 6.375.000 | 100 | 94,44 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 318. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 6.750.000 | | 6.375.000 | 100 | 94,44 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **319.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.313.812.200** | | **1.178.242.764** | **85,7** | **89,68** | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 1 | | 193,1 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 72 | | 101,19 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 95 | | 111,76 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 5 | | 174,09 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 1 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 320. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 321. | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Regional/Regional Maintainance Center | | | | | | | | |
| 322. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.313.812.200 | | 1.178.242.764 | 89,6 | 89,68 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 323. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 48.300.000 | | 45.400.000 | 100 | 94 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 138 | | 138 | | 100 | 0 | |
| 324. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 600.000 | | - | 75,36 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 138 | | 104 | | 75,36 | 0 | |
| 325. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | - | | - | 81,88 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 138 | | 113 | | 81,88 | 0 | |
| 326. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 13,9 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 734 | | 102 | | 13,9 | 0 | |
| 327. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 59.700.000 | | 53.200.000 | 100 | 89,11 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1582 | | 1.582 | | 100 | 0 | |
| 328. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 17.400.000 | | 17.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1582 | | 1.582 | | 100 | 0 | |
| 329. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 33.600.000 | | 33.100.000 | 100 | 98,51 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 935 | | 935 | | 100 | 0 | |
| 330. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 44.400.000 | | 44.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 21 | | 21 | | 100 | 0 | |
| 331. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 10.200.000 | | 10.100.000 | 100 | 99,02 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 332. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 333. | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 334. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 153.070.000 | | 101.578.000 | 100 | 66,36 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 335. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 4.400.000 | | 3.000.000 | 100 | 68,18 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 336. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 13.800.000 | | 13.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 337. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 338. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 18.200.000 | | 18.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 339. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 28 | | 28 | | 100 | 0 | |
| 340. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 77.250.000 | | 74.650.000 | 100 | 96,63 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 341. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 577.202.200 | | 515.307.009 | 100 | 89,28 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 342. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 177.290.000 | | 171.852.958 | 100 | 96,93 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 343. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 77.000.000 | | 74.854.797 | 100 | 97,21 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 344. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 345. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **346.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **11.665.000** | | **11.665.000** | **100** | **100** | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 84 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 92 | | 96,84 | 0 | |
| 347. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.665.000 | | 11.665.000 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 348. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 11.665.000 | | 11.665.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| **349.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **699.130.000** | | **689.847.572** | **94,36** | **98,67** | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 32 | | 165,8 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 2,88 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 276,15 | | 388,12 | 0 | |
| 350. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 699.130.000 | | 689.847.572 | 94,36 | 98,67 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 351. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 48.600.000 | | 46.490.000 | 91,43 | 95,66 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 35 | | 32 | | 91,43 | 0 | |
| 352. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 11.100.000 | | 10.800.000 | 100 | 97,3 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 23 | | 23 | | 100 | 0 | |
| 353. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 59.300.000 | | 58.700.000 | 90,57 | 98,99 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 689 | | 624 | | 90,57 | 0 | |
| 354. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 355. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 10.800.000 | | 10.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 356. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 357. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 87.650.000 | | 87.450.000 | 100 | 99,77 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 358. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 18.600.000 | | 18.600.000 | 83,33 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 10 | | 83,33 | 0 | |
| 359. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 360. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 361. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 362. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 175.080.000 | | 172.682.621 | 100 | 98,63 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 363. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 77.924.951 | 100 | 97,41 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 364. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 365. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 1.200.000 | | - | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 366. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 16.200.000 | | 16.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 367. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 43.600.000 | | 43.200.000 | 100 | 99,08 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **368.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **9.720.000** | | **9.720.000** | **100** | **100** | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 94 | | 98,95 | 0 | |
| | | | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 369. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.720.000 | | 9.720.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 370. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 9.720.000 | | 9.720.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **371.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.647.620.500** | | **2.608.852.389** | **87,33** | **98,54** | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 70,15 | | 98,59 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 15,2 | | 121,24 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 2 | | 198,96 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| 372. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 373. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 374. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.647.620.500 | | 2.608.852.389 | 91,7 | 98,54 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 375. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 114.000.000 | | 114.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| 376. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 12.526.000 | | 12.526.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 500 | | 500 | | 100 | 0 | |
| 377. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 209.608.000 | | 209.608.000 | 20 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5000 | | 1.000 | | 20 | 0 | |
| 378. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.200.000 | | 5.200.000 | 92,5 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 185 | | 92,5 | 0 | |
| 379. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | - | | 32.000.000 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 160 | | 0 | 0 | |
| 380. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 20.800.000 | | 20.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 381. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 80 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 8 | | 80 | 0 | |
| 382. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 407.312.000 | | 407.312.000 | 4 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 300 | | 12 | | 4 | 0 | |
| 383. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 384. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 52.800.000 | | 52.800.000 | 40 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 30 | | 12 | | 40 | 0 | |
| 385. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 386. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 36.800.000 | | 36.800.000 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 5 | | 3 | | 60 | 0 | |
| 387. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 41.600.000 | | 41.600.000 | 97,5 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 40 | | 39 | | 97,5 | 0 | |
| 388. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 389. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 212.080.000 | | 212.080.000 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 20 | | 12 | | 60 | 0 | |
| 390. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 1.106.692.500 | | 1.036.078.689 | 30 | 93,62 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 40 | | 12 | | 30 | 0 | |
| 391. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 292.702.000 | | 292.702.000 | 40 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 30 | | 12 | | 40 | 0 | |
| 392. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 130.000.000 | | 129.845.700 | 60 | 99,88 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 20 | | 12 | | 60 | 0 | |
| 393. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 350 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan | 10 | | 35 | | 350 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | | | | | | | |
| 394. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 400 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 20 | | 80 | | 400 | 0 | |
| 395. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 396. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 397. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **398.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **7.600.000** | | **7.600.000** | **120** | **100** | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 95 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 399. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.600.000 | | 7.600.000 | 120 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 400. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 7.600.000 | | 7.600.000 | 120 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 10 | | 12 | | 120 | 0 | |
| **401.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.482.177.000** | | **1.412.255.786** | **84,21** | **95,28** | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 60,8 | | 315,03 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 340 | | 400 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 2,88 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 2 | | 13,16 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | | | 0 | 0 | |
| 402. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 403. | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 404. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.482.177.000 | | 1.412.255.786 | 88,89 | 95,28 | |
| | | terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 405. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 45.600.000 | | 45.000.000 | 100 | 98,68 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 406. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 407. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 74.200.000 | | 73.000.000 | 100 | 98,38 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 408. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 40.960.000 | | 40.960.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 530 | | 530 | | 100 | 0 | |
| 409. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 8.377.000 | | 8.377.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3067 | | 3.067 | | 100 | 0 | |
| 410. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 411. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 270.380.000 | | 270.070.000 | 100 | 99,89 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 412. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 413. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 414. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 23.000.000 | | 23.000.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 415. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 8.800.000 | | 8.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 416. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 42.818.000 | | 42.818.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 417. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 126 | | 126 | | 100 | 0 | |
| 418. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 553.600.000 | | 487.945.707 | 100 | 88,14 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 419. | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 420. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 183.440.000 | | 183.320.000 | 100 | 99,93 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 421. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 78.563.079 | 100 | 98,2 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 422. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 58.502.000 | | 57.902.000 | 100 | 98,97 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 11 | | 11 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 423. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 6.600.000 | | 6.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 424. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **425.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 95 | | 0 | 0 | |
| 426. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | terlaksananya program kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 427. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **428.** | | **1.02 -** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Puskesmas Sungai Tutung |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 429. | | 1.02 - | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 430. | | 1.02 - | | 90 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 431. | | 1.02 - | | | - | | - | 0 | 0 | |
| **432.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.207.223.000** | | **1.181.331.468** | **77,45** | **97,86** | Puskesmas Sungai Tutung |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 75 | | 88,24 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 2,88 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 32 | | 165,8 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 2,88 | | 180,14 | 0 | |
| 433. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 434. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 435. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.207.223.000 | | 1.181.331.468 | 81,75 | 97,86 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 436. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 89.440.000 | | 87.440.000 | 100 | 97,76 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 290 | | 290 | | 100 | 0 | |
| 437. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 29,55 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 846 | | 250 | | 29,55 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 438. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 20.400.000 | | 20.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1556 | | 1.556 | | 100 | 0 | |
| 439. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | - | | - | 41,92 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4890 | | 2.050 | | 41,92 | 0 | |
| 440. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 44.000.000 | | 44.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1822 | | 1.822 | | 100 | 0 | |
| 441. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 442. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 20.800.000 | | 20.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 237 | | 237 | | 100 | 0 | |
| 443. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 444. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 126.580.000 | | 125.895.000 | 100 | 99,46 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 445. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.600.000 | | 5.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 446. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 24.800.000 | | 24.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 447. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 448. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 17.000.000 | | 17.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 449. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 26.800.000 | | 26.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 41 | | 41 | | 100 | 0 | |
| 450. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 600 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 451. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 108.450.000 | | 108.450.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 452. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 417.473.000 | | 398.118.951 | 100 | 95,36 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 453. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 225.880.000 | | 223.027.517 | 100 | 98,74 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 454. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 79.000.000 | 100 | 98,75 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 455. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 17 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **456.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Puskesmas Sungai Tutung |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 75 | | 78,95 | 0 | |
| 457. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 458. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **459.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.264.558.001** | | **1.228.407.936** | **70,59** | **97,14** | Puskesmas Kemantan |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 1 | | 6,58 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 4 | | 0 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 20 | | 103,63 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 460. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.264.558.001 | | 1.228.407.936 | 75 | 97,14 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 461. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 49.560.000 | | 49.560.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 96 | | 96 | | 100 | 0 | |
| 462. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 27.600.000 | | 27.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 96 | | 96 | | 100 | 0 | |
| 463. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 600 | | 600 | | 100 | 0 | |
| 464. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 22.800.000 | | 22.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 465. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 13 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 466. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 201.200.000 | | 186.069.000 | 100 | 92,48 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 467. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 20.400.000 | | 20.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 468. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 469. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 88.624.000 | | 88.520.000 | 0 | 99,88 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 470. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 448.499.756 | | 432.856.860 | 100 | 96,51 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 471. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 225.580.000 | | 221.366.749 | 100 | 98,13 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 472. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 78.949.945 | | 78.315.327 | 100 | 99,2 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 473. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 474. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 475. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 476. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 3.744.300 | | 3.720.000 | 100 | 99,35 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 477. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 29.400.000 | | 29.000.000 | 100 | 98,64 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 478. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 479. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **480.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **13.725.000** | | **13.725.000** | **100** | **100** | Puskesmas Kemantan |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 90 | | 94,74 | 0 | |
| 481. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 13.725.000 | | 13.725.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 482. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 13.725.000 | | 13.725.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **483.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.604.562.431** | | **1.604.562.431** | **92,31** | **100** | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 1 | | 193,42 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 2,88 | | 0 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 32 | | 165,8 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 2,88 | | 180,14 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 75 | | 88,24 | 0 | |
| 484. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.604.562.431 | | 1.604.562.431 | 92,31 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 485. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 275 | | 275 | | 100 | 0 | |
| 486. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 264 | | 264 | | 100 | 0 | |
| 487. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1629 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 488. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 25.200.000 | | 25.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1608 | | 1.608 | | 100 | 0 | |
| 489. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2888 | | 2.888 | | 100 | 0 | |
| 490. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 423 | | 423 | | 100 | 0 | |
| 491. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 492. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 493. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 188.565.000 | | 188.565.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 494. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 495. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 71.000.000 | | 71.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 496. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 4.918.000 | | 4.918.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 497. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 498. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 224.900.000 | | 224.900.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 499. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 751.676.431 | | 751.676.431 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 500. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 218.003.000 | | 218.003.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 501. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 502. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 503. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 504. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **505.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 506. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 507. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **508.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.571.467.517** | | **1.466.366.513** | **72,22** | **93,31** | Puskesmas Semurup |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 4,8 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 13,5 | | 106,9 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 21 | | 108,81 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 509. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 510. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 511. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.571.467.517 | | 1.466.366.513 | 76,47 | 93,31 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 512. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 10.600.000 | | 10.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 276 | | 276 | | 100 | 0 | |
| 513. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 972 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 514. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 73.700.000 | | 73.700.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1040 | | 1.040 | | 100 | 0 | |
| 515. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 23.900.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 265 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 516. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 57.200.000 | | 57.100.000 | 100 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1444 | | 1.444 | | 100 | 0 | |
| 517. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 53.200.000 | | 52.300.000 | 100 | 98,31 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 37 | | 37 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 518. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 25.700.000 | | 25.700.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 33 | | 33 | | 100 | 0 | |
| 519. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 259.740.000 | | 256.100.000 | 100 | 98,6 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 520. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 9.600.000 | | 9.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 521. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 24.200.000 | | 24.100.000 | 100 | 99,59 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 522. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 523. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 524. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 37 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 525. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 170.840.000 | | 168.740.000 | 100 | 98,77 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 526. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 605.900.027 | | 535.662.724 | 100 | 88,41 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 527. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 181.647.250 | | 177.527.249 | 100 | 97,73 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 528. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 71.840.240 | | 71.836.540 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 529. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 800.000 | | 800.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 530. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **531.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Puskesmas Semurup |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 189 | | 198,95 | 0 | |
| 532. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 533. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **534.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.679.423.160** | | **1.457.306.356** | **75,98** | **86,77** | PUSKESMAS HIANG |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,5 | | 100,49 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 80 | | 94,12 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 2 | | 13,16 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 33 | | 170,98 | 0 | |
| 535. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.679.423.160 | | 1.457.306.356 | 75,98 | 86,77 | |
| | | Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten / Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 536. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 240 | | 240 | | 100 | 0 | |
| 537. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 538. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 92.000.000 | | 92.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| 539. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 540. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 541. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 269.018.500 | | 183.705.500 | 100 | 68,29 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1237 | | 1.237 | | 100 | 0 | |
| 542. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 543. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 544. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 123.000.000 | | 123.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 545. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 750.004.900 | | 624.361.119 | 91,67 | 83,25 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 11 | | 91,67 | 0 | |
| 546. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 195.599.800 | | 188.574.037 | 100 | 96,41 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 547. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 79.999.960 | | 76.465.700 | 100 | 95,58 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 548. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | | | | | | | |
| 549. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 250 | | 250 | | 100 | 0 | |
| 550. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 551. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 552. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 83.800.000 | | 83.200.000 | 100 | 99,28 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **553.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **5.400.000** | | **5.400.000** | **100** | **100** | PUSKESMAS HIANG |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 95 | | 100 | 0 | |
| 554. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 555. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **556.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.601.581.700** | | **1.509.013.951** | **63,47** | **94,22** | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 61 | | 85,73 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 3 | | 184,46 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 66 | | 77,65 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 2 | | 186,21 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 557. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.601.581.700 | | 1.509.013.951 | 63,47 | 94,22 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat derah kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 558. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 79.800.000 | | 79.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 216 | | 216 | | 100 | 0 | |
| 559. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 216 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 560. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 561. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 91.000.000 | | 91.000.000 | 115,46 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1656 | | 1.912 | | 115,46 | 0 | |
| 562. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 563. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 564. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 15.200.000 | | 15.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 565. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 252 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 566. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 207.768.400 | | 194.347.000 | 100 | 93,54 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 567. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 17.200.000 | | 17.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 568. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 13.600.000 | | 13.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 569. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 195.280.000 | | 194.680.000 | 100 | 99,69 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 570. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 705.465.800 | | 658.439.451 | 100 | 93,33 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 571. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 164.867.500 | | 164.747.500 | 100 | 99,93 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 572. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 573. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 574. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 575. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 30.400.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 576. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 1.000.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **577.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **4.425.000** | | **4.425.000** | **100** | **100** | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 46 | | 48,42 | 0 | |
| 578. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.425.000 | | 4.425.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 579. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 4.425.000 | | 4.425.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **580.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.443.213.901** | | **1.317.179.702** | **45** | **91,27** | PUSKESMAS SEMERAP |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 200 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19,3 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| 581. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 582. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 17 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 583. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.443.213.901 | | 1.317.179.702 | 47,37 | 91,27 | |
| | | .02.02.2.02 Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 584. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 86.200.000 | | 96.600.000 | 100 | 112,06 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 191 | | 191 | | 100 | 0 | |
| 585. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 491 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 586. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 40.100.000 | | 40.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1449 | | 1.449 | | 100 | 0 | |
| 587. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 11.200.000 | | 24.400.000 | 100 | 217,86 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2145 | | 2.145 | | 100 | 0 | |
| 588. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 11.200.000 | | 14.400.000 | 100 | 128,57 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1025 | | 1.025 | | 100 | 0 | |
| 589. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 75 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 590. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 250 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 591. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 306.400.001 | | 306.400.001 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 592. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 593. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 16 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 594. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 16 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 595. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 35.800.000 | | 35.800.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 596. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 72 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 597. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 166.400.000 | | 166.400.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 598. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 459.234.000 | | 306.400.001 | 100 | 66,72 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 599. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 216.679.700 | | 216.679.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 600. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.200 | | 80.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 601. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 602. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 14 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **603.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **12.400.000** | | **12.400.000** | **0** | **100** | PUSKESMAS SEMERAP |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 95 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 604. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 12.400.000 | | 12.400.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 605. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 12.400.000 | | 12.400.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **606.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.738.103.000** | | **1.672.496.994** | **91,11** | **96,23** | PUSKESMAS JUJUN |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 200 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19,3 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| 607. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.738.103.000 | | 1.672.496.994 | 91,11 | 96,23 | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 608. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 100.900.000 | | 100.900.000 | 98,45 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 193 | | 190 | | 98,45 | 0 | |
| 609. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 65.100.000 | | 65.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 60 | | 60 | | 100 | 0 | |
| 610. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 96 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 500 | | 480 | | 96 | 0 | |
| 611. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 31.370.000 | | 31.350.000 | 95 | 99,94 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 400 | | 380 | | 95 | 0 | |
| 612. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 67.200.000 | | 67.200.000 | 95 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 20 | | 19 | | 95 | 0 | |
| 613. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 111.415.000 | | 104.980.000 | 100 | 94,22 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 8 | | 8 | | 100 | 0 | |
| 614. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 29.400.000 | | 29.100.000 | 100 | 98,98 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 615. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 616. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 82.500.000 | | 82.400.000 | 100 | 99,88 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 617. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 914.688.900 | | 884.325.334 | 100 | 96,68 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 618. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 170.929.100 | | 145.190.954 | 100 | 84,94 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 619. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 130.000.000 | | 129.350.706 | 100 | 99,5 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 620. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 2.000.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **621.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **8.950.000** | | **8.950.000** | **100** | **100** | PUSKESMAS JUJUN |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 95 | | 100 | 0 | |
| 622. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 8.950.000 | | 8.950.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 623. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 8.950.000 | | 8.950.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| **624.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.220.911.415** | | **1.193.632.765** | **70,59** | **97,77** | Puskesmas Tamiai |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19 | | 98,45 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 1 | | 6,58 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 4 | | 0 | 0 | |
| 625. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.220.911.415 | | 1.193.632.765 | 75 | 97,77 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 626. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 105 | | 105 | | 100 | 0 | |
| 627. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 9.600.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 105 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 628. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 70.900.000 | | 70.710.100 | 100 | 99,73 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 517 | | 517 | | 100 | 0 | |
| 629. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 630. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 11.200.000 | | 11.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 45 | | 45 | | 100 | 0 | |
| 631. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 632. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 195.683.500 | | 195.650.500 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 633. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 634. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 635. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.200.000 | | 5.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 636. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 637. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 78.859.600 | | 78.759.500 | 100 | 99,87 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 638. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 461.157.300 | | 446.332.307 | 100 | 96,79 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 639. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 178.831.400 | | 176.746.473 | 100 | 98,83 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 640. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 129.999.615 | | 129.553.885 | 100 | 99,66 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 641. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 642. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 643. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 6.180.000 | | 6.180.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 644. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 645. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 646. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 647. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **648.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **9.204.500** | | **9.204.500** | **100** | **100** | Puskesmas Tamiai |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 90 | | 94,74 | 0 | |
| 649. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.204.500 | | 9.204.500 | 100 | 100 | |
| | | terlaksananya peningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 650. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 9.204.500 | | 9.204.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **651.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.032.351.650** | | **953.226.989** | **83,55** | **92,34** | PUSKESMAS LOLO |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 2 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 12,5 | | 82,24 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,5 | | 100,49 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19 | | 98,45 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 185 | | 96,35 | 0 | |
| 652. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.032.351.650 | | 953.226.989 | 83,55 | 92,34 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 653. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 32.400.000 | | 32.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 654. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 2.100.000 | | 2.000.000 | 125 | 95,24 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20 | | 25 | | 125 | 0 | |
| 655. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 33.250.000 | | 33.250.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| 656. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| 657. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 8.600.000 | | 8.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 658. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 14.000.000 | | 14.000.000 | 93 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 186 | | 93 | 0 | |
| 659. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 12.600.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 660. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 115.811.700 | | 98.789.000 | 85 | 85,3 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 17 | | 85 | 0 | |
| 661. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 662. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 60.400.000 | | 54.600.000 | 100 | 90,4 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 663. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 120.800.000 | | 120.000.000 | 100 | 99,34 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 664. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 364.444.900 | | 331.129.528 | 100 | 90,86 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 665. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 169.895.000 | | 161.183.932 | 100 | 94,87 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 666. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 78.050.050 | | 77.274.529 | 66,67 | 99,01 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 30 | | 20 | | 66,67 | 0 | |
| 667. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **668.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **859.303.500** | | **836.286.280** | **90,77** | **97,32** | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 200 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19,3 | | 100 | 0 | |
| 669. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 859.303.500 | | 836.286.280 | 90,77 | 97,32 | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 670. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 102.100.000 | | 96.600.000 | 100 | 94,61 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 59 | | 59 | | 100 | 0 | |
| 671. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 67.000.000 | | 65.800.000 | 100 | 98,21 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 336 | | 336 | | 100 | 0 | |
| 672. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 420 | | 420 | | 100 | 0 | |
| 673. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 24.400.000 | | 24.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 508 | | 508 | | 100 | 0 | |
| 674. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 14.400.000 | | 14.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 547 | | 547 | | 100 | 0 | |
| 675. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 13.200.000 | | 13.200.000 | 80 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 8 | | 80 | 0 | |
| 676. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 110.100.000 | | 110.070.000 | 100 | 99,97 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 677. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 21.660.000 | | 21.660.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 678. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 1.200.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 679. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 74.580.000 | | 69.180.000 | 100 | 92,76 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 680. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 167.113.500 | | 163.790.322 | 100 | 98,01 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 681. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 163.550.000 | | 157.185.958 | 100 | 96,11 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 682. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **683.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **826.755.476** | | **793.331.698** | **75** | **95,96** | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 1 | | 6,58 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 4 | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19 | | 98,45 | 0 | |
| 684. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 826.755.476 | | 793.331.698 | 80 | 95,96 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 685. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 49.200.000 | | 49.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 93 | | 93 | | 100 | 0 | |
| 686. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 77 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 687. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 16.800.000 | | 16.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 937 | | 937 | | 100 | 0 | |
| 688. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 8.400.000 | | 8.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 65 | | 65 | | 100 | 0 | |
| 689. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 690. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 131.990.000 | | 127.823.500 | 100 | 96,84 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 691. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 12.400.000 | | 12.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 692. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 6.200.000 | | 5.800.000 | 100 | 93,55 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 693. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 100.573.500 | | 100.155.000 | 100 | 99,58 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 694. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 260.113.976 | | 245.383.241 | 100 | 94,34 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 695. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 153.312.000 | | 140.242.684 | 100 | 91,48 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 696. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.000 | | 79.761.273 | 100 | 99,7 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 697. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | | | | | | | |
| 698. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 6.966.000 | | 6.966.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 699. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 800.000 | | 400.000 | 100 | 50 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 700. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 701. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **702.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **11.888.000** | | **11.858.000** | **100** | **99,75** | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 90 | | 94,74 | 0 | |
| | | | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 703. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.888.000 | | 11.858.000 | 100 | 99,75 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 704. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 11.888.000 | | 11.858.000 | 100 | 99,75 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **705.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **1.553.208.818** | | **1.425.701.873** | **82,42** | **91,79** | PUSKESMAS LEMPUR |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 71,15 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15,2 | | 100 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 19,3 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 200 | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 85 | | 100 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 14,5 | | 100 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| 706. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.553.208.818 | | 1.425.701.873 | 82,42 | 91,79 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 707. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 61.050.000 | | 61.050.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 95 | | 95 | | 100 | 0 | |
| 708. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 709. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 55.200.000 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 536 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 710. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 2.880.000 | | 2.880.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3785 | | 3.785 | | 100 | 0 | |
| 711. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 9.200.000 | | 9.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| 712. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 194.002.000 | | 184.981.000 | 80 | 95,35 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 15 | | 12 | | 80 | 0 | |
| 713. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 7.600.000 | | 7.600.000 | 171,43 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 7 | | 12 | | 171,43 | 0 | |
| 714. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 11.600.000 | | 11.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 715. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 89.740.000 | | 89.740.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 716. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 820.556.820 | | 758.841.269 | 100 | 92,48 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 717. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 173.180.000 | | 173.054.992 | 100 | 99,93 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 718. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 126.999.998 | | 126.754.612 | 120 | 99,81 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 10 | | 12 | | 120 | 0 | |
| 719. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 720. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 1.200.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 29 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **721.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **12.455.000** | | **12.455.000** | **300** | **100** | PUSKESMAS LEMPUR |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Persen) | 95 | | 95 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 722. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 12.455.000 | | 12.455.000 | 300 | 100 | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 723. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 12.455.000 | | 12.455.000 | 300 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 4 | | 12 | | 300 | 0 | |
| **724.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **697.126.100** | | **505.644.901** | **94,74** | **72,53** | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | | | 0 | 0 | |
| 725. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 697.126.100 | | 505.644.901 | 100 | 72,53 | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 726. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 66.960.000 | | 41.640.000 | 100 | 62,19 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 70 | | 70 | | 100 | 0 | |
| 727. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 70 | | 70 | | 100 | 0 | |
| 728. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 196 | | 196 | | 100 | 0 | |
| 729. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 40.500.000 | | 40.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 730. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 14.400.000 | | 14.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 731. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 14.400.000 | | 14.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 732. | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 733. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 159.485.000 | | 93.790.000 | 100 | 58,81 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 734. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 18.800.000 | | 18.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 735. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 6.160.000 | | 1.600.000 | 100 | 25,97 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 120 | | 120 | | 100 | 0 | |
| 736. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 20.600.000 | | 19.600.000 | 100 | 95,15 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 737. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 80 | | 80 | | 100 | 0 | |
| 738. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 65.368.000 | | 63.820.000 | 100 | 97,63 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 739. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 52.241.000 | | 26.864.619 | 100 | 51,42 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 740. | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 741. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 157.312.000 | | 101.696.532 | 100 | 64,65 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| 742. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 80.000.100 | | 68.533.750 | 100 | 85,67 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 743. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 900.000 | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 744. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 745. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **746.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 747. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 748. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **749.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **272.046.810** | | **267.461.565** | **100** | **98,31** | LABKESDA |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 200 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 14,11 | | 0 | 0 | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 750. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 272.046.810 | | 267.461.565 | 100 | 98,31 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 751. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 272.046.810 | | 267.461.565 | 100 | 98,31 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 22 | | 22 | | 100 | 0 | |
| **752.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **275.506.300** | | **275.364.700** | **100** | **99,95** | GUDANG FARMASI |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Orang) | 192 | | 192 | | 100 | 0 | |
| | | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 71,15 | | 16 | | 22,49 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Orang) | 15,20 | | 15 | | 98,68 | 0 | |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (Parsen) | 85,00 | | 84 | | 98,82 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (Orang) | 19,30 | | 16 | | 82,9 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk (Indeks) | 14,50 | | 12 | | 82,76 | 0 | |
| 753. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 126.458.500 | | 126.316.900 | 100 | 99,89 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 754. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 126.458.500 | | 126.316.900 | 100 | 99,89 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 755. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 149.047.800 | | 149.047.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlasananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 756. | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | 149.047.800 | | 149.047.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **757.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | - | | - | **0** | **0** | GUDANG FARMASI |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 758. | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 759. | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 0 | | 100 | | 0 | 0 | |
| **760.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **-** | | **3.910.330.083** | **0** | **0** | RUMAH SAKIT KELAS D PRTAMA BUKIT KERMAN |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | | 109 | | 0 | 0 | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | | 4,7 | | 0 | 0 | |
| 761. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | 3.910.330.083 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 762. | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | - | | 3.910.330.083 | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 0 | | 12 | | 0 | 0 | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **110.194.629.280** | | **89.360.283.228** | **60,9** | **81,09** | |
| **763.** | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.779.766.088** | | **10.077.096.826** | **82,35** | **93,48** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 764. | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 191.949.800 | | 191.203.462 | 83,33 | 99,61 | |
| | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 765. | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 21.374.800 | | 21.374.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 766. | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 35.864.900 | | 35.864.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 767. | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 768. | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 26.879.900 | | 26.804.900 | 100 | 99,72 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 769. | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 50.224.700 | | 49.579.362 | 100 | 98,72 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 770. | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 57.605.500 | | 57.579.500 | 100 | 99,95 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 771. | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 9.318.179.468 | | 8.608.657.736 | 39,7 | 92,39 | |
| | | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 772. | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 8.673.484.668 | | 7.977.303.836 | 117,57 | 91,97 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 74 | | 87 | | 117,57 | 0 | |
| 773. | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 609.720.000 | | 596.380.000 | 50 | 97,81 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 774. | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 775. | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 776. | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 8.303.600 | | 8.302.700 | 50 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 777. | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 778. | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 26.671.200 | | 26.671.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 779. | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 780. | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 17.326.800 | | 17.326.800 | 50 | 100 | |
| | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 781. | 1.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 782. | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 17.326.800 | | 17.326.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 783. | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 74.945.000 | | 60.040.000 | 50 | 80,11 | |
| | | Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 784. | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 74 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 785. | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 74.945.000 | | 60.040.000 | 100 | 80,11 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 74 | | 74 | | 100 | 0 | |
| 786. | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 510.650.600 | | 505.088.800 | 70 | 98,91 | |
| | | Persentase Layanan administrasi perangkat daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 787. | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 8.712.500 | | 8.712.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 788. | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 12.840.000 | | 12.839.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 789. | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 260.175.000 | | 255.308.268 | 100 | 98,13 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 790. | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 791. | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 228.923.100 | | 228.228.332 | 50 | 99,7 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 10 | | 50 | 0 | |
| 792. | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 39.530.200 | | 79.060.400 | 187,5 | 200 | |
| | | Persentase pengadaan BMD Pada Perangkat Daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 793. | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 794. | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 795. | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | 39.530.200 | 750 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 15 | | 750 | 0 | |
| 796. | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 39.530.200 | | 39.530.200 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 797. | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 214.414.520 | | 206.373.617 | 100 | 96,25 | |
| | | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Kantor (%) | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 798. | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 82.998.620 | | 74.958.217 | 100 | 90,31 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 799. | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 131.415.900 | | 131.415.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 800. | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 412.769.700 | | 409.346.011 | 100 | 99,17 | |
| | | Persentase terpeliharanya mobil dinas, operasional, lapangan dan alat berat (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 801. | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 144.600.000 | | 144.557.725 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 802. | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | 102.166.100 | | 100.634.902 | 100 | 98,5 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 803. | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 69.936.600 | | 68.107.210 | 100 | 97,38 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 804. | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 96.067.000 | | 96.046.174 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **805.** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | **10.488.266.641** | | **10.468.342.209** | **41,67** | **99,81** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase) | | | 48,67 | | 0 | 0 | |
| 806. | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.943.232.497 | | 5.936.864.881 | 50 | 99,89 | |
| | | Rasio Bangunan Pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 807. | 1.03.02.2.01.0078 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 70.318.300 | | 66.567.700 | 100 | 94,67 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 808. | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 809. | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | 3.436.946.726 | | 3.435.793.700 | 100 | 99,97 | |
| | | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 810. | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 811. | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | 2.210.502.471 | | 2.210.502.471 | 0 | 100 | |
| | | Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM) | 1.5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 812. | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM) | 1.3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 813. | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 814. | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | 225.465.000 | | 224.001.010 | 100 | 99,35 | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 815. | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 816. | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.545.034.144 | | 4.531.477.328 | 33,33 | 99,7 | |
| | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 817. | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 2.569.904.144 | | 2.568.435.500 | 100 | 99,94 | |
| | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 818. | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 819. | 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 820. | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 1.698.365.000 | | 1.686.276.828 | 100 | 99,29 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 821. | 1.03.02.2.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 822. | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | 276.765.000 | | 276.765.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 823. | 1.03.02.2.02.0048 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 824. | 1.03.02.2.02.0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 825. | 1.03.02.2.02.0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 826. | 1.03.02.2.02.0054 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **827.** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | **3.450.049.773** | | **3.342.765.109** | **100** | **96,89** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelyanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 828. | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.450.049.773 | | 3.342.765.109 | 100 | 96,89 | |
| | | Persentase Penduduk berakses air minum jaringan perpipaan(%) | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 829. | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | 706.159.000 | | 702.044.625 | 100 | 99,42 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 830. | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 831. | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 2.743.890.773 | | 2.640.720.484 | 0 | 96,24 | |
| | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 0 | | 1 | | 0 | 0 | |
| 832. | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **833.** | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 834. | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersususnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA Kewenangan Kabupaten yang Disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 835. | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 836. | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **837.** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 838. | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten | | | | | | 0 | 0 | |
| 839. | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 840. | 1.03.05.2.01.0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **841.** | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | **1.530.885.988** | | **1.528.631.719** | **50** | **99,85** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | | | 37,6 | | 0 | 0 | |
| 842. | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.530.885.988 | | 1.528.631.719 | 50 | 99,85 | |
| | | Panjang Drainase yang terbangun terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 843. | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | 1.530.885.988 | | 1.528.631.719 | 100 | 99,85 | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) | 500 | | 500 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 844. | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 845. | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **846.** | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 847. | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik | | | | | | 0 | 0 | |
| 848. | 1.03.07.2.01.0015 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **849.** | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | **20.669.421.630** | | **20.660.798.651** | **50** | **99,96** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | | | 84,61 | | 0 | 0 | |
| 850. | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | 20.669.421.630 | | 20.660.798.651 | 50 | 99,96 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 851. | 1.03.08.2.01.0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 852. | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.669.421.630 | | 20.660.798.651 | 100 | 99,96 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 853. | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **854.** | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | **21.089.427.430** | | **21.089.427.430** | **0** | **100** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 855. | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | 21.089.427.430 | | 21.089.427.430 | 0 | 100 | |
| | | Jumlah Pengawasan, Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | 0 | 0 | |
| 856. | 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | 21.089.427.430 | | 21.089.427.430 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen) | 100 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 857. | 1.03.09.2.01.0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **858.** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | **40.445.630.830** | | **20.584.940.300** | **24,4** | **50,9** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) | | | 33,2 | | 0 | 0 | |
| 859. | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 40.445.630.830 | | 20.584.940.300 | 24,4 | 50,9 | |
| | | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 860. | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | 624.247.500 | | 619.588.000 | 95,24 | 99,25 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) | 21 | | 20 | | 95,24 | 0 | |
| 861. | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | 12.912.445.169 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun (KM) | 7 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 862. | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | 4.309.146.800 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terekonstruksinya Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 863. | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | 293.750.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 19 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 864. | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | 2.340.388.761 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan) | 9 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 865. | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | 495.728.300 | | 495.428.300 | 100 | 99,94 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) | 250 | | 250 | | 100 | 0 | |
| 866. | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | 16.354.189.000 | | 16.354.189.000 | 0 | 100 | |
| | | Terehabilitasinya Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 867. | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | 3.115.735.000 | | 3.115.735.000 | 0 | 100 | |
| | | Terpeliharanya Jalan Secara Rutin | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 250 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 868. | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 869. | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 870. | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 871. | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 872. | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 873. | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **874.** | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | **331.493.200** | | **304.231.098** | **33,33** | **91,78** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) | | | 80,1 | | 0 | 0 | |
| 875. | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | 280.153.400 | | 279.609.700 | 100 | 99,81 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatannya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi | | | | | | 0 | 0 | |
| 876. | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 877. | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 878. | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 879. | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | 280.153.400 | | 279.609.700 | 100 | 99,81 | |
| | | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 880. | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.281.600 | | 24.621.398 | 33,33 | 93,68 | |
| | | Ketersediaan Informasi Jasa Kontruksi Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 881. | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 882. | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | 26.281.600 | | 24.621.398 | 100 | 93,68 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 883. | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 884. | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | 25.058.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 885. | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 886. | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 887. | 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | 25.058.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **888.** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | **1.409.687.700** | | **1.304.049.886** | **70** | **92,51** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%) | | | 97,7 | | 0 | 0 | |
| 889. | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | 1.137.153.200 | | 1.056.894.085 | 50 | 92,94 | |
| | | Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 890. | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 891. | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 892. | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat | Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 893. | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | 999.915.500 | | 939.899.842 | 100 | 94 | |
| | | Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 894. | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | 137.237.700 | | 116.994.243 | 50 | 85,25 | |
| | | Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 895. | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 896. | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 897. | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 150.639.200 | | 126.639.200 | 100 | 84,07 | |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 898. | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | 150.639.200 | | 126.639.200 | 100 | 84,07 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 899. | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 121.895.300 | | 120.516.601 | 100 | 98,87 | |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 900. | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 901. | 1.03.12.2.04.0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Audit Tata Ruang | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 902. | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | 121.895.300 | | 120.516.601 | 100 | 98,87 | |
| | | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **502.016.000** | | **392.451.620** | **28,57** | **78,18** | |
| **903.** | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | **393.410.000** | | **392.451.620** | **40** | **99,76** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 904. | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 196.570.000 | | 196.156.620 | 33,33 | 99,79 | |
| | | Persentase data penerima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten | | | | | | 0 | 0 | |
| 905. | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 906. | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | 196.570.000 | | 196.156.620 | 100 | 99,79 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 907. | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 908. | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 909. | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 196.840.000 | | 196.295.000 | 50 | 99,72 | |
| | | Meningkatnya pembangunan/rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten | | | | | | 0 | 0 | |
| 910. | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | 196.840.000 | | 196.295.000 | 100 | 99,72 | |
| | | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| 911. | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 912. | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **913.** | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **108.606.000** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) | | | 3,04 | | 0 | 0 | |
| 914. | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 108.606.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 0 | 0 | |
| 915. | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 916. | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | 108.606.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 917. | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Kawasan Permukiman Kumuhdibawah 10 Ha yang ditangani | | | | | | 0 | 0 | |
| 918. | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 919. | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **920.** | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 921. | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | | | | | | 0 | 0 | |
| 922. | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **923.** | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 924. | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase penyelenggaraan PSU permukiman | | | | | | 0 | 0 | |
| 925. | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 926. | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 927. | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **21.739.470.779** | | **20.570.407.698** | **51,58** | **94,62** | |
| **928.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.264.685.000** | | **5.972.755.116** | **64,18** | **95,34** | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 60 | | 0 | 0 | |
| 929. | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 13.181.100 | | 12.876.800 | 100 | 97,69 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 930. | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 931. | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 932. | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 9.737.500 | | 9.433.200 | 100 | 96,87 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 933. | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 934. | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 935. | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 3.443.600 | | 3.443.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 936. | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 937. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.970.489.000 | | 5.705.995.641 | 104,72 | 95,57 | |
| | | tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 938. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 5.808.969.000 | | 5.544.475.641 | 109,43 | 95,45 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 53 | | 58 | | 109,43 | 0 | |
| 939. | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 161.520.000 | | 161.520.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 940. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 941. | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 942. | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 943. | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 944. | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 945. | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 16.000.000 | | 16.000.000 | 4 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 946. | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 16.000.000 | | 16.000.000 | 8 | 100 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | | 4 | | 8 | 0 | |
| 947. | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 948. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 105.816.000 | | 95.328.800 | 113,57 | 90,09 | |
| | | tersedianya Perlengkapan Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 949. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.028.500 | | 1.028.500 | 42,86 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | | 3 | | 42,86 | 0 | |
| 950. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 951. | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 9.858.400 | | 9.858.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 952. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 7.105.000 | | 7.105.000 | 400 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 4 | | 400 | 0 | |
| 953. | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 954. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 87.824.100 | | 77.336.900 | 25 | 88,06 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | | 25 | | 25 | 0 | |
| 955. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | tersedianya Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kasus | | | | | | 0 | 0 | |
| 956. | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 957. | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 958. | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 959. | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 960. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 73.158.900 | | 59.328.375 | 25 | 81,1 | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 961. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 19.527.000 | | 8.246.475 | 25 | 42,23 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 25 | 0 | |
| 962. | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 963. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 53.631.900 | | 51.081.900 | 25 | 95,25 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 25 | 0 | |
| 964. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 86.040.000 | | 83.225.500 | 40 | 96,73 | |
| | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 965. | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 76.980.000 | | 74.165.500 | 20 | 96,34 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 20 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 966. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 967. | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 968. | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 9.060.000 | | 9.060.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 969. | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **970.** | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **1.915.496.700** | | **1.855.140.750** | **23,37** | **96,85** | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | 3.51 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | | | 96,85 | | 0 | 0 | |
| 971. | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.878.950.300 | | 1.821.315.350 | 12,95 | 96,93 | |
| | | Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 972. | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 973. | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 18.700.800 | | 16.150.800 | 4 | 86,36 | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 25 | | 1 | | 4 | 0 | |
| 974. | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 204 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 975. | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 35 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 976. | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 977. | 1.05.02.2.01.0013 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 978. | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 979. | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | 1.790.306.500 | | 1.765.327.500 | 46,67 | 98,6 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 75 | | 35 | | 46,67 | 0 | |
| 980. | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | 69.943.000 | | 39.837.050 | 40 | 56,96 | |
| | | Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 15 | | 6 | | 40 | 0 | |
| 981. | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 982. | 1.05.02.2.01.0025 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 983. | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 36.546.400 | | 33.825.400 | 55,48 | 92,55 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 984. | 1.05.02.2.02.0004 | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 985. | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 986. | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 987. | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 988. | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 110 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 989. | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | 23.732.400 | | 21.911.400 | 120 | 92,33 | |
| | | Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 5 | | 6 | | 120 | 0 | |
| 990. | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 12.814.000 | | 11.914.000 | 46,43 | 92,98 | |
| | | TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap | 28 | | 13 | | 46,43 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | | | | | | | |
| 991. | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 992. | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 993. | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **994.** | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 995. | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 996. | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 35 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **997.** | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | **2.795.498.800** | | **2.734.099.608** | **30,67** | **97,8** | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | | | 97,8 | | 0 | 0 | |
| 998. | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.795.498.800 | | 2.734.099.608 | 51,11 | 97,8 | |
| | | MENINGKATNYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | 0 | 0 | |
| 999. | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1000. | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.743.061.500 | | 2.683.662.308 | 100 | 97,83 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1001. | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | 23.120.300 | | 21.120.300 | 53,33 | 91,35 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 15 | | 8 | | 53,33 | 0 | |
| 1002. | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | 29.317.000 | | 29.317.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 114 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1003. | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | | | 91,35 | | 0 | 0 | |
| 1004. | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | | | 0 | 0 | |
| 1005. | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1006. | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya SDM Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | 0 | 0 | |
| 1007. | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 110 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1008.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.429.013.025** | | **3.731.896.266** | **67,67** | **84,26** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 1009. | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 86.820.672 | | 86.498.672 | 100 | 99,63 | |
| | | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1010. | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 32.373.600 | | 32.373.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1011. | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 22.809.072 | | 22.494.072 | 100 | 98,62 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1012. | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1013. | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1014. | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1015. | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 31.638.000 | | 31.631.000 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1016. | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1017. | 1.05.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1018. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.393.005.463 | | 2.841.642.995 | 83,33 | 83,75 | |
| | | Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1019. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.134.701.463 | | 2.585.046.995 | 100 | 82,47 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 44 | | 44 | | 100 | 0 | |
| 1020. | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 224.760.000 | | 223.070.000 | 100 | 99,25 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1021. | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 14.744.100 | | 14.744.100 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1022. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1023. | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1024. | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 18.799.900 | | 18.781.900 | 33,33 | 99,9 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 5 | | 33,33 | 0 | |
| 1025. | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1026. | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 16.000.000 | | 15.600.000 | 100 | 97,5 | |
| | | administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1027. | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1028. | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1029. | 1.05.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1030. | 1.05.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1031. | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1032. | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 16.000.000 | | 15.600.000 | 100 | 97,5 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1033. | 1.05.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1034. | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 20.480.000 | | 20.480.000 | 50 | 100 | |
| | | administrasi kepegawaian daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1035. | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 22 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1036. | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 20.480.000 | | 20.480.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 1037. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 182.355.270 | | 39.566.600 | 50 | 21,7 | |
| | | administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1038. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 4.968.800 | | 4.968.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1039. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1040. | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1041. | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 9.336.000 | | 9.301.300 | 0 | 99,63 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1042. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 25.310.470 | | 25.296.500 | 100 | 99,94 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1043. | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1044. | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1045. | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1046. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 142.740.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1047. | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1048. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 384.795.000 | | 384.590.646 | 50 | 99,95 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1049. | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1050. | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1051. | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1052. | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1053. | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1054. | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 384.795.000 | | 384.590.646 | 100 | 99,95 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1055. | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1056. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 121.952.620 | | 120.598.210 | 100 | 98,89 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1057. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 37.406.220 | | 37.025.810 | 100 | 98,98 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1058. | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1059. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 84.546.400 | | 83.572.400 | 100 | 98,85 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1060. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 223.604.000 | | 222.919.143 | 10 | 99,69 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1061. | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1062. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 210.920.000 | | 210.919.143 | 20 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | | 1 | | 20 | 0 | |
| 1063. | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1064. | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1065. | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | 12.000.000 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 1 | | 0 | 0 | |
| 1066. | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 12.684.000 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1067. | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1068.** | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **6.334.777.254** | | **6.276.515.958** | **47,26** | **99,08** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | | | 50 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Resiko Kebencanaan (Persen) | 134 | | 189,86 | | 58,31 | 0 | |
| 1069. | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 257.823.100 | | 173.014.365 | 26,67 | 67,11 | |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1070. | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | 84.223.500 | | 84.223.500 | 53,33 | 100 | |
| | | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | 150 | | 80 | | 53,33 | 0 | |
| 1071. | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | 173.599.600 | | 88.790.865 | 0 | 51,15 | |
| | | Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1072. | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 292.581.479 | | 345.626.987 | 36,67 | 118,13 | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | 0 | 0 | |
| 1073. | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan) | 18 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1074. | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1075. | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 81.479.888 | | 95.372.800 | 100 | 117,05 | |
| | | Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 1200 | | 1.200 | | 100 | 0 | |
| 1076. | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1077. | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1078. | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | 73.259.735 | | 73.259.735 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 1079. | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1080. | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1081. | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | 42.327.292 | | 81.479.888 | 100 | 192,5 | |
| | | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1082. | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1083. | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | 95.514.564 | | 95.514.564 | 66,67 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1084. | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.889.546.675 | | 1.889.105.675 | 57,78 | 99,98 | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | 0 | 0 | |
| 1085. | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1086. | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1087. | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 331.604.300 | | 331.576.300 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 1088. | 1.05.03.2.03.0007 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1089. | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) | | | | | | | |
| 1090. | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.557.942.375 | | 1.557.529.375 | 73,33 | 99,97 | |
| | | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 150 | | 110 | | 73,33 | 0 | |
| 1091. | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1092. | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1093. | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 3.894.826.000 | | 3.868.768.931 | 76,14 | 99,33 | |
| | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | 0 | 0 | |
| 1094. | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 30.824.000 | | 23.481.000 | 100 | 76,18 | |
| | | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1095. | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1096. | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1097. | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1098. | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1099. | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1100. | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | 3.864.002.000 | | 3.845.287.931 | 204,55 | 99,52 | |
| | | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) | 22 | | 45 | | 204,55 | 0 | |
| 1101. | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1102. | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1103. | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1104. | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 18 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1105. | 1.05.03.2.04.0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **4.824.226.450** | | **10.535.947.897** | **55,83** | **218,4** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1106.** | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.501.172.460** | | **8.178.123.753** | **118,24** | **233,58** | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 1107. | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 24.408.346 | | 60.232.085 | 300 | 246,77 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1108. | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 7.056.400 | | 17.640.233 | 400 | 249,99 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 28 | | 400 | 0 | |
| 1109. | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1110. | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 7.700.960 | | 18.805.820 | 100 | 244,2 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1111. | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 9.650.986 | | 23.786.032 | 400 | 246,46 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 16 | | 400 | 0 | |
| 1112. | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.200.188.010 | | 7.462.965.961 | 500 | 233,2 | |
| | | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1113. | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.059.508.010 | | 7.131.165.961 | 100 | 233,08 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1114. | 1.06.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 140.680.000 | | 331.800.000 | 900 | 235,85 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | | 36 | | 900 | 0 | |
| 1115. | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 1116. | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1117. | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 50 | 0 | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1118. | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1119. | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1120. | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 107.643.450 | | 351.353.700 | 2,5 | 326,41 | |
| | | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1121. | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.579.600 | | 4.217.700 | 10 | 267,01 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 40 | | 4 | | 10 | 0 | |
| 1122. | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 5.531.850 | | 15.068.400 | 0 | 272,39 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 408 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1123. | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 12.850.000 | | 120.800.000 | 0 | 940,08 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1124. | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 87.682.000 | | 211.267.600 | 0 | 240,95 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 26 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1125. | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Penyediaan Pengadaan Sesuai Kebutuhan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1126. | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1127. | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1128. | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1129. | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1130. | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 70.452.654 | | 121.406.044 | 0 | 172,32 | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1131. | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 29.315.454 | | 36.130.544 | 0 | 123,25 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1132. | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 41.137.200 | | 85.275.500 | 0 | 207,3 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1133. | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 98.480.000 | | 182.165.963 | 0 | 184,98 | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1134. | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 98.480.000 | | 182.165.963 | 0 | 184,98 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1135. | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1136.** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | **381.305.230** | | **249.619.860** | **0** | **65,46** | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (Persentase) | | | 99,98 | | 0 | 0 | |
| 1137. | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 381.305.230 | | 249.619.860 | 0 | 65,46 | |
| | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. | | | | | | 0 | 0 | |
| 1138. | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 76.976.670 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 18000 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1139. | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 109.153.990 | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 18 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1140. | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1141. | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 121.639.000 | | 249.619.860 | 0 | 205,21 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 75 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1142. | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | 73.535.570 | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat) | 45 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1143. | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1144.** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | **428.225.250** | | **1.088.320.926** | **0** | **254,15** | Dinas Sosial |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) | | | 95,32 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1145. | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 349.665.650 | | 1.088.320.926 | 0 | 311,25 | |
| | | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1146. | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | 164.949.800 | | 452.919.700 | 0 | 274,58 | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1147. | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 113.422.900 | | 385.055.600 | 0 | 339,49 | |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 180 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1148. | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | - | | 78.524.600 | 0 | 0 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1149. | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 28.935.100 | | 62.303.416 | 0 | 215,32 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1150. | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | 30.197.950 | | 73.074.655 | 0 | 241,99 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 35 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1151. | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | 12.159.900 | | 36.442.955 | 0 | 299,7 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1152. | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | 78.559.600 | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1153. | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | 78.559.600 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 95 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1154.** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | **50.790.700** | | **27.438.000** | **0** | **54,02** | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga) | | | 99,7 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1155. | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.790.700 | | 27.438.000 | 0 | 54,02 | |
| | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | | | | | | 0 | 0 | |
| 1156. | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 13.719.000 | | 27.438.000 | 0 | 200 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 18930 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1157. | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 37.071.700 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga) | 12376 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1158. | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1159.** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | **375.810.400** | | **835.522.948** | **0** | **222,33** | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) | | | 99,16 | | 0 | 0 | |
| 1160. | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 238.938.100 | | 561.976.776 | 0 | 235,2 | |
| | | Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1161. | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | 97.687.500 | | 195.372.876 | 0 | 200 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 4430 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1162. | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 44.005.000 | | 194.356.700 | 0 | 441,67 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 4430 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1163. | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | 72.438.600 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1164. | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | 24.807.000 | | 27.370.000 | 0 | 110,33 | |
| | | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1165. | 1.06.06.2.01.0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | - | | 144.877.200 | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1166. | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 136.872.300 | | 273.546.172 | 0 | 199,86 | |
| | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | 0 | 0 | |
| 1167. | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | 31.753.100 | | 63.506.200 | 0 | 200 | |
| | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1168. | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | 105.119.200 | | 210.039.972 | 0 | 199,81 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 76 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1169.** | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | **86.922.410** | | **156.922.410** | **0** | **180,53** | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1170. | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 86.922.410 | | 156.922.410 | 0 | 180,53 | |
| | | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1171. | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 86.922.410 | | 156.922.410 | 0 | 180,53 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **4.097.091.754** | | **4.128.834.670** | **58,33** | **100,77** | |
| **1172.** | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.865.033.183** | | **3.916.110.599** | **67,5** | **101,32** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 1173. | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 59.015.900 | | 57.833.039 | 100 | 98 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1174. | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 26.298.300 | | 25.901.780 | 100 | 98,49 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 1175. | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 9.676.100 | | 9.622.100 | 100 | 99,44 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1176. | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 23.041.500 | | 22.309.159 | 100 | 96,82 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1177. | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.430.791.383 | | 3.586.786.960 | 83,33 | 104,55 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1178. | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.326.334.783 | | 3.482.336.300 | 100 | 104,69 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1179. | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 98.700.000 | | 98.700.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1180. | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.756.600 | | 5.750.660 | 50 | 99,9 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 6 | | 3 | | 50 | 0 | |
| 1181. | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 18.132.200 | | 18.132.200 | 0 | 100 | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 1182. | 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 18.132.200 | | 18.132.200 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1183. | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1184. | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1185. | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 96.367.300 | | 94.897.300 | 100 | 98,47 | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1186. | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 3.191.700 | | 3.191.700 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1187. | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 10.811.000 | | 10.791.000 | 100 | 99,82 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1188. | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 8.550.000 | 100 | 85,5 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1189. | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 72.364.600 | | 72.364.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 55 | | 55 | | 100 | 0 | |
| 1190. | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 22.160.400 | | 20.106.400 | 25 | 90,73 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1191. | 2.07.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1192. | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1193. | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 22.160.400 | | 20.106.400 | 100 | 90,73 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1194. | 2.07.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1195. | 2.07.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1196. | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 77.566.000 | | 77.354.700 | 100 | 99,73 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1197. | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 27.166.000 | | 26.954.700 | 100 | 99,22 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1198. | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 50.400.000 | | 50.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1199. | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 161.000.000 | | 61.000.000 | 50 | 37,89 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1200. | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 61.000.000 | | 61.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1201. | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1202. | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1203.** | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1204. | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1205. | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1206.** | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | **154.732.771** | | **154.425.171** | **50** | **99,8** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 1207. | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | 107.542.720 | | 107.530.120 | 50 | 99,99 | |
| | | Jumlah Pencari Kerja Yang Terlatih Berdasarkan Kompetensi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1208. | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | 107.542.720 | | 107.530.120 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 32 | | 32 | | 100 | 0 | |
| 1209. | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1210. | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina | | | | | | 0 | 0 | |
| 1211. | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1212. | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | 47.190.051 | | 46.895.051 | 100 | 99,37 | |
| | | Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan/konsultasi produktivitas | | | | | | 0 | 0 | |
| 1213. | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | 47.190.051 | | 46.895.051 | 100 | 99,37 | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| **1214.** | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | **43.162.300** | | **24.139.000** | **25** | **55,93** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1215. | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 19.023.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1216. | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1217. | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | 19.023.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang) | 1500 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1218. | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 24.139.000 | | 24.139.000 | 50 | 100 | |
| | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1219. | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | 24.139.000 | | 24.139.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) | 30 | | 15 | | 50 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1220.** | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | **34.163.500** | | **34.159.900** | **50** | **99,99** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) | | | | | 0 | 0 | |
| 1221. | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 34.163.500 | | 34.159.900 | 50 | 99,99 | |
| | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | | | 0 | 0 | |
| 1222. | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1223. | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 15.026.200 | | 15.026.200 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | 10 | | 5 | | 50 | 0 | |
| | | Jumlah Asosiasi Pengusaha danSerikat Pekerja yang Diverifikasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1224. | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | 19.137.300 | | 19.133.700 | 100 | 99,98 | |
| | | Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **660.468.795** | | **605.926.663** | **45,45** | **91,74** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1225.** | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1226. | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1227. | 2.08.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1228. | 2.08.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1229. | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1230. | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1231.** | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | **593.970.670** | | **546.678.238** | **100** | **92,04** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi (Indeks) | 74 | | 74 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | | | 0,86 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Pengharusutamaan Gender (Indeks) | 74 | | | | 0 | 0 | |
| 1232. | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 25.723.400 | | 25.723.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1233. | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | 25.723.400 | | 25.723.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang) | 46 | | 46 | | 100 | 0 | |
| 1234. | 2.08.02.2.01.0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1235. | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 367.889.000 | | 320.596.568 | 100 | 87,14 | |
| | | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,hukum,sosial,dan ekonomi kewenangan kab/ kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1236. | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | 367.889.000 | | 320.596.568 | 100 | 87,14 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | |
| 1237. | 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1238. | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 200.358.270 | | 200.358.270 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1239. | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 200.358.270 | | 200.358.270 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| 1240. | 2.08.02.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1241.** | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | **26.096.125** | | **18.846.425** | **100** | **72,22** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (kasus) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 1242. | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.096.125 | | 18.846.425 | 100 | 72,22 | |
| | | Teratasi Pencegahan Kekerasan Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1243. | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.096.125 | | 18.846.425 | 100 | 72,22 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1244. | 2.08.03.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1245.** | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1246. | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1247. | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1248.** | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1249. | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1250. | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1251.** | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | **40.402.000** | | **40.402.000** | **50** | **100** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Nilai IKM (Baik) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | | | 79 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1252. | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 40.402.000 | | 40.402.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1253. | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 40.402.000 | | 40.402.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 1254. | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1255. | 2.08.06.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1256.** | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak ekkerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | | | 79 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1257. | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1258. | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **253.905.580** | | **252.584.697** | **125** | **99,48** | |
| **1259.** | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | **94.963.720** | | **94.928.720** | **116,67** | **99,96** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat (Persen) | 100 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | | | | | 0 | 0 | |
| 1260. | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | 19.448.420 | | 19.413.420 | 150 | 99,82 | |
| | | Tersedianya penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1261. | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1262. | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1263. | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | 19.448.420 | | 19.413.420 | 150 | 99,82 | |
| | | Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |
| 1264. | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | 75.515.300 | | 75.515.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya penyusunan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1265. | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | 13.969.100 | | 13.969.100 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1266. | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 61.546.200 | | 61.546.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1267.** | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | **132.384.760** | | **132.674.477** | **150** | **100,22** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Penurunan Daerah Rawan Pangan (Persen) | 100 | | | | 0 | 0 | |
| 1268. | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | 9.014.860 | | 9.316.160 | 100 | 103,34 | |
| | | Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1269. | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | 9.014.860 | | 9.316.160 | 100 | 103,34 | |
| | | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1270. | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 123.369.900 | | 123.358.317 | 200 | 99,99 | |
| | | Tertanganinya daerah rawan pangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1271. | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 123.369.900 | | 123.358.317 | 200 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 1272. | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1273.** | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | **26.557.100** | | **24.981.500** | **100** | **94,07** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | meingkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan (Persen) | 100 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1274. | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.557.100 | | 24.981.500 | 100 | 94,07 | |
| | | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar | | | | | | 0 | 0 | |
| 1275. | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.557.100 | | 24.981.500 | 100 | 94,07 | |
| | | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **2.493.171.000** | | **2.435.889.503** | **100** | **97,7** | |
| **1276.** | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | **2.493.171.000** | | **2.435.889.503** | **100** | **97,7** | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1277. | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.493.171.000 | | 2.435.889.503 | 100 | 97,7 | |
| | | Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1278. | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.493.171.000 | | 2.435.889.503 | 100 | 97,7 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **11.703.447.616** | | **11.065.346.517** | **66,22** | **94,55** | |
| **1279.** | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.517.973.516** | | **4.030.395.917** | **52** | **89,21** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | 70 | | 1994,3 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 1280. | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 86.679.800 | | 86.579.094 | 60 | 99,88 | |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 1281. | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 24.999.900 | | 24.905.900 | 100 | 99,62 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 1282. | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 34.999.600 | | 34.992.894 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1283. | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 1284. | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 26.680.300 | | 26.680.300 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1285. | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1286. | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.035.955.516 | | 3.554.799.204 | 75 | 88,08 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 0 | 0 | |
| 1287. | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.811.655.716 | | 3.334.989.404 | 100 | 87,49 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1288. | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 194.370.000 | | 190.030.000 | 100 | 97,77 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1289. | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1290. | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 29.929.800 | | 29.779.800 | 100 | 99,5 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1291. | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir | | | | | | 0 | 0 | |
| 1292. | 2.11.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1293. | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1294. | 2.11.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1295. | 2.11.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1296. | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 20.683.000 | | 20.683.000 | 30 | 100 | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai serta evaluasi penilaian kinerja pegawai | | | | | | 0 | 0 | |
| 1297. | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1298. | 2.11.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1299. | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 20.683.000 | | 20.683.000 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 3 | | 60 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1300. | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 191.476.800 | | 190.831.146 | 100 | 99,66 | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya tata usaha dan laporan administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1301. | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 5.629.500 | | 5.617.900 | 100 | 99,79 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 1302. | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 58.492.200 | | 58.492.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1303. | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 17.742.600 | | 17.728.300 | 100 | 99,92 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 1304. | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.596.500 | | 6.595.000 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1305. | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 103.016.000 | | 102.397.746 | 100 | 99,4 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1306. | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah unit barang yang disediakan dalam mendukung kegiatan operasional | | | | | | 0 | 0 | |
| 1307. | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1308. | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1309. | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1310. | 2.11.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1311. | 2.11.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1312. | 2.11.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1313. | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 53.598.400 | | 47.923.473 | 50 | 89,41 | |
| | | Jumlah kegiatan jasa yang mendukung operasional | | | | | | 0 | 0 | |
| 1314. | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1315. | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 13.430.000 | | 7.755.073 | 100 | 57,74 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1316. | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1317. | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 40.168.400 | | 40.168.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1318. | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 129.580.000 | | 129.580.000 | 33,33 | 100 | |
| | | Jumlah Unit aset daerah yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1319. | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 114.480.000 | | 114.480.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1320. | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1321. | 2.11.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1322. | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1323. | 2.11.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1324. | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 15.100.000 | | 15.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1325.** | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **70.000.000** | | **70.000.000** | **50** | **100** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1326. | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 1327. | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | RPPLH kabupaten/kota yang disusun | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1328. | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 1329. | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **1330.** | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **363.915.100** | | **362.559.500** | **100** | **99,63** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (Indeks) | | | 40 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | | | 93,54 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kualitas Lahan (Indeks) | | | 80,59 | | 0 | 0 | |
| 1331. | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 286.000.700 | | 284.954.500 | 100 | 99,63 | |
| | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1332. | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | 118.967.200 | | 118.145.800 | 100 | 99,31 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1333. | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | 25.266.000 | | 25.223.200 | 100 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1334. | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | 35.617.700 | | 35.587.700 | 100 | 99,92 | |
| | | Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1335. | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | 48.233.500 | | 48.173.500 | 100 | 99,88 | |
| | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 1336. | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | 57.916.300 | | 57.824.300 | 100 | 99,84 | |
| | | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1337. | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 77.914.400 | | 77.605.000 | 100 | 99,6 | |
| | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1338. | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | 77.914.400 | | 77.605.000 | 100 | 99,6 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| **1339.** | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | **366.575.400** | | **365.447.000** | **150** | **99,69** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%)) | | | 87,5 | | 0 | 0 | |
| 1340. | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | 366.575.400 | | 365.447.000 | 150 | 99,69 | |
| | | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | 0 | 0 | |
| 1341. | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | 349.691.200 | | 348.562.800 | 200 | 99,68 | |
| | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 10 | | 20 | | 200 | 0 | |
| 1342. | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | 16.884.200 | | 16.884.200 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1343. | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1344.** | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1345. | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan dari usaha yang izin lingkungan dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1346. | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1347. | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1348.** | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | **51.123.600** | | **50.913.600** | **100** | **99,59** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) | | | 60 | | 0 | 0 | |
| 1349. | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 51.123.600 | | 50.913.600 | 100 | 99,59 | |
| | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1350. | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | 27.076.800 | | 27.076.800 | 100 | 100 | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1351. | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 24.046.800 | | 23.836.800 | 100 | 99,13 | |
| | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| **1352.** | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | **24.702.800** | | **24.430.800** | **100** | **98,9** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 1353. | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | 24.702.800 | | 24.430.800 | 100 | 98,9 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | 0 | 0 | |
| 1354. | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | 24.702.800 | | 24.430.800 | 100 | 98,9 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1355. | 2.11.07.2.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | | | | | | | | |
| 1356. | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1357.** | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **26.670.000** | | **26.407.200** | **100** | **99,01** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalm perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1358. | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.670.000 | | 26.407.200 | 100 | 99,01 | |
| | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | | | | 0 | 0 | |
| 1359. | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 26.670.000 | | 26.407.200 | 100 | 99,01 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| **1360.** | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **17.012.300** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | | | 60 | | 0 | 0 | |
| 1361. | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | 17.012.300 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | | | | | | 0 | 0 | |
| 1362. | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | 17.012.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1363. | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1364.** | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | **6.265.474.900** | | **6.135.192.500** | **72,83** | **97,92** | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%) | | | 72,36 | | 0 | 0 | |
| 1365. | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | 6.265.474.900 | | 6.135.192.500 | 72,83 | 97,92 | |
| | | Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | 0 | 0 | |
| 1366. | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | 34.922.200 | | 34.922.200 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1367. | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | 1.872.125.400 | | 1.742.655.800 | 100 | 93,08 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | | | | | | | |
| 1368. | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | 4.358.427.300 | | 4.357.614.500 | 18,5 | 99,98 | |
| | | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton) | 300 | | 55,51 | | 18,5 | 0 | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **4.464.474.160** | | **4.140.943.740** | **217,47** | **92,75** | |
| **1369.** | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.060.174.110** | | **3.753.656.937** | **335,6** | **92,45** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Persentase penyerapan anggaran (%) | 98,5 | | 92,75 | | 94,16 | 0 | |
| | | | Persentase penyerapan Anggaran (%) | 98 | | 92,75 | | 94,64 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Huruf) | 80 | | 80 | | 100 | 0 | |
| | | | Indeks kepuasan masyarakat (Huruf) | 3.51 | | 81.33 | | 2317,09 | 0 | |
| | | | Persentase Penyerapan Anggaran (%) | 98,5 | | 92,75 | | 94,16 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks) | | | 81,33 | | 0 | 0 | |
| 1370. | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 61.978.780 | | 61.815.780 | 100 | 99,74 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1371. | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 34.015.700 | | 33.857.700 | 100 | 99,54 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 1372. | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.294.400 | | 10.294.400 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1373. | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 9.692.280 | | 9.687.280 | 100 | 99,95 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1374. | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 7.976.400 | | 7.976.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1375. | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.624.747.830 | | 3.321.282.227 | 98,81 | 91,63 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1376. | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.501.517.930 | | 3.198.052.327 | 96,43 | 91,33 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 28 | | 27 | | 96,43 | 0 | |
| 1377. | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 114.720.000 | | 114.720.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1378. | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | | 44 | | 0 | 0 | |
| 1379. | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 8.509.900 | | 8.509.900 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1380. | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 11.271.200 | | 11.270.500 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1381. | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 11.271.200 | | 11.270.500 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1382. | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1383. | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1384. | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1385. | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 127.536.100 | | 127.152.840 | 120 | 99,7 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1386. | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 3.499.000 | | 3.498.100 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1387. | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 10.490.900 | | 10.486.700 | 100 | 99,96 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1388. | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 15.556.200 | | 15.556.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1389. | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 97.990.000 | | 97.612.040 | 180 | 99,61 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 45 | | 180 | 0 | |
| 1390. | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 19.350.000 | | 19.200.000 | 2350 | 99,22 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1391. | 2.12.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1392. | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 19.350.000 | | 19.200.000 | 4700 | 99,22 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 47 | | 4700 | 0 | |
| 1393. | 2.12.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1394. | 2.12.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1395. | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 70.700.200 | | 68.360.590 | 100 | 96,69 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1396. | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 24.409.700 | | 22.270.090 | 100 | 91,23 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1397. | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 46.290.500 | | 46.090.500 | 100 | 99,57 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1398. | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 144.590.000 | | 144.575.000 | 66,67 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1399. | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 135.960.000 | | 135.945.000 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1400. | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 5.570.000 | | 5.570.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | | 8 | | 100 | 0 | |
| 1401. | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | 3.060.000 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 1 | | 0 | 0 | |
| 1402. | 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 3.060.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1403.** | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | **299.449.750** | | **283.178.703** | **42,86** | **94,57** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase penerbitan Identitas Kependudukan Digital (%) | 20 | | 6,96 | | 34,8 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase cakupan penerbitan KK (%) | 98,5 | | 98,37 | | 99,87 | 0 | |
| | | | Persentase IKD (%) | 30 | | 6,96 | | 23,2 | 0 | |
| | | | Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik (%) | 99 | | 98,35 | | 99,34 | 0 | |
| | | | Persentase Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (%) | 20 | | 6,96 | | 34,8 | 0 | |
| | | | Persentase cakupan penerbitan KIA (%) | 60 | | 61,25 | | 102,08 | 0 | |
| | | | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | | | 6,96 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) | | | 61,25 | | 0 | 0 | |
| | | | Perekaman KTP elektronik (%) | | | 98,6 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Penerbitan KK (%) | | | 98,37 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Penerbitan KTP Elektronik (%) | | | 98,35 | | 0 | 0 | |
| 1404. | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 277.167.250 | | 261.741.653 | 50 | 94,43 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 0 | 0 | |
| 1405. | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) | 1000 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1406. | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | 213.098.400 | | 199.689.981 | 100 | 93,71 | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | 26000 | | 26.000 | | 100 | 0 | |
| 1407. | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 64.068.850 | | 62.051.672 | 100 | 96,85 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1408. | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen) | 1000 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1409. | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | 22.282.500 | | 21.437.050 | 100 | 96,21 | |
| | | Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 0 | 0 | |
| 1410. | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | 22.282.500 | | 21.437.050 | 100 | 96,21 | |
| | | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1411. | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 0 | 0 | |
| 1412. | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1413. | 2.12.02.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1414.** | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | **53.467.200** | | **53.139.300** | **66,67** | **99,39** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran (%) | 95 | | 94,85 | | 99,84 | 0 | |
| | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun (%) | | | 70,63 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase cakupan penerbitan akta kematian (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1415. | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 53.467.200 | | 53.139.300 | 100 | 99,39 | |
| | | Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil | | | | | | 0 | 0 | |
| 1416. | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | 18.406.200 | | 18.392.300 | 100 | 99,92 | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) | 14000 | | 14.000 | | 100 | 0 | |
| 1417. | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 35.061.000 | | 34.747.000 | 100 | 99,1 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1418. | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1419. | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersosialisasinya Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1420.** | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | **51.383.100** | | **50.968.800** | **75** | **99,19** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Perjanjian kerjasama (kerja sama) | 16 | | 7 | | 43,75 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (%) | 90 | | 100 | | 111,11 | 0 | |
| | | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%) | | | 7 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Perjanjian kerjasaama (%) | 5,5 | | 7 | | 127,27 | 0 | |
| 1421. | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | 21.547.400 | | 21.260.600 | 100 | 98,67 | |
| | | Terlaksananya kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1422. | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | 15.156.700 | | 14.870.100 | 100 | 98,11 | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1423. | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | 6.390.700 | | 6.390.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1424. | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 29.835.700 | | 29.708.200 | 50 | 99,57 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1425. | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 29.835.700 | | 29.708.200 | 100 | 99,57 | |
| | | Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1426. | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1427.** | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1428. | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1429. | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1430. | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | **5.266.718.600** | | **4.867.379.152** | **73,04** | **92,42** | |
| **1431.** | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.850.965.400** | | **3.458.180.742** | **79,76** | **89,8** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 1432. | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 33.360.982 | | 33.333.982 | 100 | 99,92 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1433. | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 10.574.000 | | 10.547.000 | 100 | 99,74 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 1434. | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 6.194.875 | | 6.194.875 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1435. | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 6.194.875 | | 6.194.875 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1436. | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 10.397.232 | | 10.397.232 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 1437. | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.580.102.053 | | 3.226.945.195 | 100 | 90,14 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1438. | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.449.662.053 | | 3.096.505.195 | 100 | 89,76 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 1439. | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 130.440.000 | | 130.440.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1440. | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.380.600 | | 5.380.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya panataan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1441. | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.380.600 | | 5.380.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1442. | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1443. | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 24 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1444. | 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1445. | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 116.145.400 | | 116.145.400 | 113,99 | 100 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1446. | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.343.400 | | 2.343.400 | 166,67 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 5 | | 166,67 | 0 | |
| 1447. | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 28.027.500 | | 28.027.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 1448. | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 9.800.000 | | 9.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1449. | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 75.974.500 | | 75.974.500 | 89,29 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 28 | | 25 | | 89,29 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1450. | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1451. | 2.13.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1452. | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 72.976.365 | | 33.425.565 | 100 | 45,8 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 1453. | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 5.371.065 | | 5.398.065 | 100 | 100,5 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1454. | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 67.605.300 | | 28.027.500 | 100 | 41,46 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1455. | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 43.000.000 | | 42.950.000 | 0 | 99,88 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1456. | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 43.000.000 | | 42.950.000 | 0 | 99,88 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1457. | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1458.** | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pemberdayaan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | | | | | | | | Masyarakat dan Desa |
| | | Meningkatnya kualitas penataan desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1459. | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 1460. | 2.13.02.2.01.0005 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1461. | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1462.** | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | **17.575.800** | | **17.575.800** | **100** | **100** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | | | 11,87 | | 0 | 0 | |
| 1463. | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | | | 17.575.800 | | 17.575.800 | 100 | 100 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 1464. | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | 17.575.800 | | 17.575.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1465.** | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | **665.508.900** | | **659.004.110** | **77,84** | **99,02** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | | | 20 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | | | 45 | | 0 | 0 | |
| 1466. | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | 665.508.900 | | 659.004.110 | 77,84 | 99,02 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 1467. | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | 34.322.900 | | 33.372.900 | 100 | 97,23 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1468. | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1469. | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | 412.525.600 | | 409.375.420 | 100 | 99,24 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1470. | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | 34.607.900 | | 34.302.400 | 0,54 | 99,12 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | 185 | | 1 | | 0,54 | 0 | |
| 1471. | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | 20.295.000 | | 20.295.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1472. | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | 31.500.200 | | 31.480.200 | 100 | 99,94 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1473. | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) | | | | | | | |
| 1474. | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | 36.503.300 | | 35.606.300 | 100 | 97,54 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1475. | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | 23.867.900 | | 23.867.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1476. | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1477. | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | 71.886.100 | | 70.703.990 | 100 | 98,36 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1478.** | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | **732.668.500** | | **732.618.500** | **66,67** | **99,99** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1479. | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 732.668.500 | | 732.618.500 | 66,67 | 99,99 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 1480. | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 76.489.600 | | 76.440.200 | 100 | 99,94 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1481. | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | 19.685.800 | | 19.685.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1482. | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1483. | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1484. | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | 12.759.600 | | 12.759.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1485. | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | 623.733.500 | | 623.733.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **11.101.605.700** | | **11.041.058.524** | **71,43** | **99,45** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1486.** | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.748.181.268** | | **3.721.192.427** | **76,47** | **99,28** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabilitas dan efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai IKM (Baik) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Pengharusutamaan Gender (Baik) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 1487. | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 44.636.100 | | 41.324.500 | 100 | 92,58 | |
| | | Tersusunya Perencana, pengangaran,evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1488. | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 18.133.100 | | 17.183.100 | 100 | 94,76 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 1489. | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1490. | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 26.503.000 | | 24.141.400 | 100 | 91,09 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1491. | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | |
| 1492. | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.351.990.568 | | 3.347.645.568 | 100 | 99,87 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1493. | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.233.453.568 | | 3.233.453.568 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1494. | 2.14.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 103.840.000 | | 103.840.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 8 | | 8 | | 100 | 0 | |
| 1495. | 2.14.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 14.697.000 | | 10.352.000 | 100 | 70,44 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1496. | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 8.253.600 | | 7.791.600 | 100 | 94,4 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1497. | 2.14.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1498. | 2.14.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 8.253.600 | | 7.791.600 | 100 | 94,4 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1499. | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 54.320.000 | | 46.446.000 | 50 | 85,5 | |
| | | Terlaksananya Pendataandan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 1500. | 2.14.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1501. | 2.14.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 54.320.000 | | 46.446.000 | 100 | 85,5 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 1502. | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 138.945.500 | | 137.856.897 | 60 | 99,22 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1503. | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 4.580.600 | | 4.579.700 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1504. | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1505. | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 6.240.000 | | 6.157.900 | 100 | 98,68 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1506. | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 28.584.000 | | 28.584.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1507. | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 99.540.900 | | 98.535.297 | 100 | 98,99 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 96 | | 96 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1508. | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1509. | 2.14.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1510. | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 51.555.500 | | 41.743.960 | 100 | 80,97 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1511. | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 25.098.000 | | 17.743.960 | 100 | 70,7 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1512. | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 26.457.500 | | 24.000.000 | 100 | 90,71 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1513. | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 98.480.000 | | 98.383.902 | 50 | 99,9 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1514. | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 98.480.000 | | 98.383.902 | 100 | 99,9 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 1515. | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1516.** | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | **102.518.200** | | **93.398.997** | **40** | **91,1** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | | | 465.5 | | 0 | 0 | |
| | | | Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) | 0,72 | | | | 0 | 0 | |
| | | | TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa) | | | 2,32 | | 0 | 0 | |
| 1517. | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | 102.518.200 | | 93.398.997 | 100 | 91,1 | |
| | | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | 0 | 0 | |
| 1518. | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | 82.568.000 | | 81.094.297 | 100 | 98,22 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1519. | 2.14.02.2.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1520. | 2.14.02.2.01.0019 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | | | 19.950.200 | | 12.304.700 | 100 | 61,68 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Kegiatan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1521. | 2.14.02.2.01.0025 | Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1522. | 2.14.02.2.01.0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1523. | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1524. | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1525. | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1526. | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | 1000 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1527.** | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | **111.336.900** | | **91.829.000** | **75** | **82,48** | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rasio Akseptor KB (Indeks) | 75 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | | | 86,65 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | | | 3,32 | | 0 | 0 | |
| 1528. | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 0 | 0 | |
| 1529. | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1530. | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 17 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1531. | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1532. | 2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1533. | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | 54.335.600 | | 40.049.200 | 100 | 73,71 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1534. | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | 54.335.600 | | 40.049.200 | 100 | 73,71 | |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 4000 | | 4.000 | | 100 | 0 | |
| 1535. | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | 57.001.300 | | 51.779.800 | 100 | 90,84 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1536. | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | 33.354.600 | | 28.795.600 | 100 | 86,33 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1537. | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | 23.646.700 | | 22.984.200 | 100 | 97,2 | |
| | | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, | 278 | | 278 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas | Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | | | | | | | |
| 1538. | 2.14.04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | 7.139.569.332 | | 7.134.638.100 | 100 | 99,93 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | akupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (Persen) | 75 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | | | 40,09 | | 0 | 0 | |
| 1539. | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 74.137.700 | | 73.537.700 | 100 | 99,19 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 0 | 0 | |
| 1540. | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | 74.137.700 | | 73.537.700 | 100 | 99,19 | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 1541. | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) | | | | | | | |
| 1542. | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1543. | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 7.065.431.632 | | 7.061.100.400 | 100 | 99,94 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1544. | 2.14.04.2.02.0001 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | 6.804.500.000 | | 6.804.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 1545. | 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | 260.931.632 | | 256.600.400 | 0 | 98,34 | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (0) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **7.858.031.713** | | **6.724.759.647** | **77,59** | **85,58** | |
| **1546.** | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.956.180.653** | | **2.435.087.238** | **107,24** | **82,37** | Dinas Perhubungan |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi, sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar (%) | 75 | | 75 | | 100 | 0 | |
| 1547. | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 83.243.300 | | 77.065.632 | 100 | 92,58 | |
| | | tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1548. | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 11.330.900 | | 11.071.950 | 100 | 97,71 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1549. | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 11.786.600 | | 11.471.600 | 100 | 97,33 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1550. | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 10.986.600 | | 10.871.600 | 100 | 98,95 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1551. | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1552. | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1553. | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 17.718.000 | | 14.949.282 | 100 | 84,37 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1554. | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 20.421.200 | | 17.701.200 | 100 | 86,68 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1555. | 2.15.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1556. | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.479.449.877 | | 1.977.812.528 | 156,41 | 79,77 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1557. | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.293.871.700 | | 1.793.861.151 | 25,63 | 78,2 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 238 | | 61 | | 25,63 | 0 | |
| 1558. | 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 127.410.000 | | 127.103.000 | 100 | 99,76 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1559. | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 25.390.377 | | 25.297.577 | 100 | 99,63 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1560. | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 32.777.800 | | 31.550.800 | 400 | 96,26 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 4 | | 400 | 0 | |
| 1561. | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1562. | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 12.542.800 | | 12.217.800 | 100 | 97,41 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1563. | 2.15.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1564. | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1565. | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 12.542.800 | | 12.217.800 | 100 | 97,41 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1566. | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 29.735.000 | | 22.046.200 | 50 | 74,14 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1567. | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 13.155.000 | | 13.155.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1568. | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | 8.891.200 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 3 | | 0 | 0 | |
| 1569. | 2.15.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 16.580.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1570. | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 182.042.176 | | 180.140.384 | 108,33 | 98,96 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1571. | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.999.600 | | 2.999.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1572. | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 19.327.300 | | 19.327.099 | 150 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |
| 1573. | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 28.637.300 | | 28.619.300 | 100 | 99,94 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1574. | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 27.908.276 | | 27.900.000 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1575. | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 2.675.000 | | 2.675.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1576. | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 100.494.700 | | 98.619.385 | 100 | 98,13 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1577. | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 44.587.500 | | 41.281.250 | 150 | 92,58 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 1578. | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 19.387.500 | | 16.081.250 | 100 | 82,95 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1579. | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 25.200.000 | | 25.200.000 | 200 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 1580. | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 124.580.000 | | 124.523.444 | 76,35 | 99,95 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1581. | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 50.980.000 | | 50.934.844 | 100 | 99,91 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1582. | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 40.310.000 | | 40.298.600 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1583. | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 10.410.000 | | 10.410.000 | 5,41 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 37 | | 2 | | 5,41 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1584. | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 22.880.000 | | 22.880.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1585.** | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | **4.901.851.060** | | **4.289.672.409** | **35,71** | **87,51** | Dinas Perhubungan |
| | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Konektivitas Darat (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 75 | | 75 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | | | 24,47 | | 0 | 0 | |
| 1586. | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 75.659.000 | | 74.216.696 | 100 | 98,09 | |
| | | Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 1587. | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 75.659.000 | | 74.216.696 | 100 | 98,09 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1588. | 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1589. | 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1590. | 2.15.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1591. | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 3.888.292.700 | | 3.643.382.494 | 66,67 | 93,7 | |
| | | TERSEDIANYA PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN KERINCI | | | | | | 0 | 0 | |
| 1592. | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1593. | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 162.896.500 | | 150.396.500 | 100 | 92,33 | |
| | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 367 | | 367 | | 100 | 0 | |
| 1594. | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | 3.725.396.200 | | 3.492.985.994 | 100 | 93,76 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 1000 | | 1.000 | | 100 | 0 | |
| 1595. | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Terminal Tipe C | | | | | | 0 | 0 | |
| 1596. | 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1597. | 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1598. | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | 393.605.450 | | 224.987.317 | 100 | 57,16 | |
| | | Tersedianya ijin penyelenggaraan parkir dan pembangunan faslitas parkir di Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 1599. | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 393.605.450 | | 224.987.317 | 100 | 57,16 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1600. | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 19.468.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya data pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 1601. | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1602. | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1603. | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1604. | 2.15.02.2.05.0006 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | 19.468.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1605. | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 437.442.060 | | 347.085.902 | 25 | 79,34 | |
| | | Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas di jalan Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 1606. | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | 358.221.000 | | 347.085.902 | 100 | 96,89 | |
| | | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1607. | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1608. | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 20.858.060 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1609. | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1610. | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 58.363.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | TERLAKSANANYA MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS | | | | | | 0 | 0 | |
| 1611. | 2.15.02.2.06.0010 | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS) | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1612. | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya audit dan inspeksi keselamatan jalan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1613. | 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1614. | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 66.043.750 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas dalam kegiatan masyarakat Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 1615. | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 66.043.750 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1616. | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1617. | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 1618. | 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1619. | 2.15.02.2.12 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 21.339.800 | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1620. | 2.15.02.2.12.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 21.339.800 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1621.** | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1622. | 2.15.03.2.11 | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1623. | 2.15.03.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1624. | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1625. | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **5.601.535.202** | | **4.040.521.328** | **50** | **72,13** | |
| **1626.** | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.548.137.565** | | **2.250.531.341** | **55** | **88,32** | Komunikasi dan Informatika |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (baik) | 80 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks SPBE (Indeks) | 2,1 | | | | 0 | 0 | |
| 1627. | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 76.221.800 | | 114.413.900 | 60 | 150,11 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1628. | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.986.200 | | 12.986.200 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1629. | 2.16.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | 44.154.200 | | 44.154.200 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA dan RKA-P | | | | | | 0 | 0 | |
| 1630. | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 8.594.000 | | 8.594.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 1631. | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 1632. | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 10.487.400 | | 48.679.500 | 100 | 464,17 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1633. | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.193.853.020 | | 1.863.657.623 | 66,67 | 84,95 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1634. | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.071.223.020 | | 1.741.027.623 | 100 | 84,06 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1635. | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 0 | 0 | |
| 1636. | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 122.630.000 | | 122.630.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 1637. | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.155.300 | | 1.155.300 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1638. | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.155.300 | | 1.155.300 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1639. | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN | | | | | | 0 | 0 | |
| 1640. | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1641. | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1642. | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 118.163.515 | | 111.271.300 | 66,67 | 94,17 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1643. | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 1644. | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 1645. | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 16.808.015 | | 11.666.400 | 100 | 69,41 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 1646. | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 101.355.500 | | 99.604.900 | 100 | 98,27 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1647. | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.720.000 | | 2.720.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1648. | 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1649. | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 2.720.000 | | 2.720.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1650. | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 92.531.930 | | 92.531.930 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0 | 0 | |
| 1651. | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 38.739.610 | | 38.739.610 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 1652. | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 53.792.320 | | 53.792.320 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0 | 0 | |
| 1653. | 2.16.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1654. | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 54.492.000 | | 55.781.288 | 50 | 102,37 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1655. | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 54.492.000 | | 55.781.288 | 100 | 102,37 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 1656. | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Abngunan lainnya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1657. | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1658.** | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | **1.227.779.037** | | **1.393.570.587** | **40** | **113,5** | Komunikasi dan Informatika |
| | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 1659. | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.227.779.037 | | 1.393.570.587 | 40 | 113,5 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | | | | | | 0 | 0 | |
| 1660. | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1661. | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | 778.351.050 | | 778.350.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1662. | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1663. | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1664. | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | 449.427.987 | | 615.219.687 | 100 | 136,89 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 62 | | 62 | | 100 | 0 | |
| **1665.** | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | **1.825.618.600** | | **396.419.400** | **40** | **21,71** | Komunikasi dan Informatika |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks SPBE (Indeks) | 2,1 | | 2,1 | | 100 | 0 | |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| 1666. | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 99.729.500 | | 99.729.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 1667. | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | 99.729.500 | | 99.729.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1668. | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.725.889.100 | | 296.689.900 | 25 | 17,19 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1669. | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1670. | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | 1.555.832.200 | | 126.633.000 | 100 | 8,14 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 1671. | 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | 170.056.900 | | 170.056.900 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas (0) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1672. | 2.16.03.2.02.0029 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan (Aplikasi) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Master Plan Kabupaten atau kota Cerdas | | | | | | 0 | 0 | |
| 1673. | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **170.583.365** | | **120.161.936** | **50** | **70,44** | |
| **1674.** | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 1675. | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1676. | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1677. | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1678. | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1679. | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 0 | 0 | |
| 1680. | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1681. | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1682. | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1683. | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1684. | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1685. | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 1686. | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1687. | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 1688. | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1689. | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1690. | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1691. | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1692. | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1693. | 2.17.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1694. | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1695. | 2.17.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1696. | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1697. | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1698. | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1699. | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1700. | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1701. | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1702.** | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1703. | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | | | | | | 0 | 0 | |
| 1704. | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1705.** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | **20.573.000** | | **20.568.387** | **100** | **99,98** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1706. | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 20.573.000 | | 20.568.387 | 100 | 99,98 | |
| | | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1707. | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.573.000 | | 20.568.387 | 100 | 99,98 | |
| | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 236 | | 236 | | 100 | 0 | |
| **1708.** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | **11.259.100** | | **11.259.100** | **100** | **100** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1709. | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.259.100 | | 11.259.100 | 100 | 100 | |
| | | PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI | | | | | | 0 | 0 | |
| 1710. | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 11.259.100 | | 11.259.100 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| **1711.** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | - | | - | **0** | **0** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1712. | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | | | 0 | 0 | |
| 1713. | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1714.** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | **50.300.000** | | - | **0** | **0** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1715. | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.300.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1716. | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | 50.300.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat) | 287 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1717. | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | jumlah Koperasi yang Di fasilitasi Pelaporannya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1718. | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1719. | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 200 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1720.** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | **39.176.855** | | **39.175.768** | **100** | **100** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Jumlah Unit Usaha yang telah melakukan pembinaan dan pendampingan (Unit) | | | | | 0 | 0 | |
| 1721. | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 39.176.855 | | 39.175.768 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya data potensi UMKM dan SHAT UMKM | | | | | | 0 | 0 | |
| 1722. | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | | | | 0 | 0 | |
| 1723. | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | 39.176.855 | | 39.175.768 | 100 | 100 | |
| | | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1724. | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1725.** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | **49.274.410** | | **49.158.681** | **100** | **99,77** | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1726. | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 49.274.410 | | 49.158.681 | 100 | 99,77 | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1727. | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Jumlah yang Difasilitasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1728. | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan | Jumlah yang Difasilitasi (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1729. | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | 49.274.410 | | 49.158.681 | 100 | 99,77 | |
| | | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain danTeknologi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1730. | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **3.110.025.660** | | **2.761.337.248** | **110,38** | **88,79** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1731.** | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.826.010.160** | | **2.479.045.308** | **133,89** | **87,72** | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Katagori) | 100 | | 80 | | 80 | 0 | |
| 1732. | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 51.233.400 | | 51.015.400 | 48,57 | 99,57 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1733. | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 30.308.800 | | 30.295.800 | 140 | 99,96 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 7 | | 140 | 0 | |
| 1734. | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 9.900.600 | | 9.900.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1735. | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1736. | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1737. | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1738. | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 11.024.000 | | 10.819.000 | 100 | 98,14 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1739. | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1740. | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.511.646.900 | | 2.166.605.088 | 75 | 86,26 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1741. | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.397.257.100 | | 2.052.215.288 | 100 | 85,61 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 1742. | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 105.340.000 | | 105.340.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1743. | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 9.049.800 | | 9.049.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1744. | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1745. | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1746. | 2.18.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1747. | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1748. | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1749. | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1750. | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 115.658.100 | | 115.658.100 | 80 | 100 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1751. | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.157.800 | | 2.157.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1752. | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1753. | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 11.478.200 | | 11.478.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1754. | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 26.333.100 | | 26.333.100 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1755. | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 75.689.000 | | 75.689.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1756. | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 20.212.500 | | 20.212.500 | 20 | 100 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1757. | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1758. | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1759. | 2.18.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1760. | 2.18.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1761. | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 20.212.500 | | 20.212.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1762. | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 44.409.260 | | 42.722.620 | 87,5 | 96,2 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1763. | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 12.496.960 | | 10.810.920 | 75 | 86,51 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 3 | | 75 | 0 | |
| 1764. | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 31.912.300 | | 31.911.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1765. | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 82.850.000 | | 82.831.600 | 1150 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1766. | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 61.000.000 | | 60.981.600 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1767. | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 21.850.000 | | 21.850.000 | 2200 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 22 | | 2200 | 0 | |
| **1768.** | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | **12.271.000** | | **12.144.000** | **33,33** | **98,97** | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Meningkatnya kemudahan berinventasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase ketersediaan dokumen regulasi dan Peta Potensi dibidang PM (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 1769. | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | 0 | 0 | |
| 1770. | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1771. | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 12.271.000 | | 12.144.000 | 50 | 98,97 | |
| | | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1772. | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1773. | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 12.271.000 | | 12.144.000 | 100 | 98,97 | |
| | | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1774.** | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | **126.226.000** | | **126.218.040** | **100** | **99,99** | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Penyusunan strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1775. | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 126.226.000 | | 126.218.040 | 100 | 99,99 | |
| | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal | | | | | | 0 | 0 | |
| 1776. | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 108.030.200 | | 108.022.240 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1777. | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 18.195.800 | | 18.195.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1778. | 2.18.04 | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | 100.664.700 | | 99.155.100 | 75 | 98,5 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko | IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) (%) | 86,70 | | 90,14 | | 103,97 | 0 | |
| | | | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 1779. | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 100.664.700 | | 99.155.100 | 75 | 98,5 | |
| | | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1780. | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1781. | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | 65.855.900 | | 65.705.700 | 100 | 99,77 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 500 | | 500 | | 100 | 0 | |
| 1782. | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | 12.153.700 | | 11.413.300 | 100 | 93,91 | |
| | | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 40 | | 40 | | 100 | 0 | |
| 1783. | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | 22.655.100 | | 22.036.100 | 100 | 97,27 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| **1784.** | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | **17.812.100** | | **17.737.100** | **33,33** | **99,58** | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 1785. | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 17.812.100 | | 17.737.100 | 33,33 | 99,58 | |
| | | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1786. | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) | 9 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1787. | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 261 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1788. | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | 17.812.100 | | 17.737.100 | 100 | 99,58 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| **1789.** | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | **27.041.700** | | **27.037.700** | **100** | **99,99** | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis OSS (%) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 1790. | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 27.041.700 | | 27.037.700 | 100 | 99,99 | |
| | | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1791. | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | 27.041.700 | | 27.037.700 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **4.352.123.963** | | **3.510.966.507** | **54,11** | **80,67** | |
| **1792.** | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.533.047.787** | | **2.045.560.851** | **69,75** | **80,75** | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| 1793. | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 52.496.900 | | 49.166.000 | 96,43 | 93,66 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1794. | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 24.784.800 | | 23.395.800 | 85,71 | 94,4 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 6 | | 85,71 | 0 | |
| 1795. | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 11.105.200 | | 9.614.100 | 100 | 86,57 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1796. | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 12.270.100 | | 11.820.100 | 100 | 96,33 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1797. | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 4.336.800 | | 4.336.000 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | | 8 | | 100 | 0 | |
| 1798. | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.299.220.217 | | 1.828.462.693 | 100 | 79,53 | |
| | | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1799. | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.176.850.217 | | 1.706.092.693 | 100 | 78,37 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1800. | 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 122.370.000 | | 122.370.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1801. | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1802. | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1803. | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1804. | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1805. | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1806. | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1807. | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 83.607.500 | | 76.571.886 | 75 | 91,58 | |
| | | Persentase Layanan administrasi perangkat daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1808. | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1809. | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 9.605.600 | | 9.605.600 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 19 | | 19 | | 100 | 0 | |
| 1810. | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 17.827.900 | | 10.977.900 | 100 | 61,58 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 1811. | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 56.174.000 | | 55.988.386 | 100 | 99,67 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 1812. | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase pengadaan BMD Pada Perangkat Daerah (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1813. | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1814. | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1815. | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1816. | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 54.723.170 | | 48.667.600 | 100 | 88,93 | |
| | | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Kantor (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1817. | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 7.582.170 | | 1.526.600 | 100 | 20,13 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1818. | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1819. | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 47.141.000 | | 47.141.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1820. | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 43.000.000 | | 42.692.672 | 50 | 99,29 | |
| | | Persentase terpeliharanya mobil dinas, operasional, lapangan (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 1821. | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 43.000.000 | | 42.692.672 | 100 | 99,29 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1822. | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1823. | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1824.** | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **134.323.836** | | **86.836.796** | **75** | **64,65** | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | | | 0,9 | | 0 | 0 | |
| 1825. | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | 134.323.836 | | 86.836.796 | 75 | 64,65 | |
| | | Persentase pemuda yang berprestasi dan beperan aktif dalam pembanguan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1826. | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1827. | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | 37.668.900 | | 6.099.260 | 100 | 16,19 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1828. | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | 36.214.400 | | 35.985.500 | 100 | 99,37 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 1829. | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | 60.440.536 | | 44.752.036 | 100 | 74,04 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota | Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1830.** | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **1.627.982.340** | | **1.321.798.960** | **18,18** | **81,19** | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1831. | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.205.571.900 | | 905.039.520 | 50 | 75,07 | |
| | | Persentase pemuda yang berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1832. | 2.19.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1833. | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | 1.205.571.900 | | 905.039.520 | 100 | 75,07 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1834. | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1835. | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 298.575.700 | | 298.575.700 | 0 | 100 | |
| | | Persentase Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1836. | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1837. | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | | | 298.575.700 | | 298.575.700 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan) | 150 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1838. | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1839. | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 0 | 0 | |
| 1840. | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1841. | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1842. | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1843. | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | 0 | 0 | |
| 1844. | 2.19.03.2.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1845. | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 123.834.740 | | 118.183.740 | 33,33 | 95,44 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1846. | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1847. | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1848. | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | 123.834.740 | | 118.183.740 | 100 | 95,44 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| **1849.** | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | **56.770.000** | | **56.769.900** | **100** | **100** | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) | | | 2 | | 0 | 0 | |
| 1850. | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | 56.770.000 | | 56.769.900 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1851. | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 56.770.000 | | 56.769.900 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | |
| **1852.** | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Komunikasi dan Informatika |
| | | Tercapainya Kalaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | | | | | 0 | 0 | |
| 1853. | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1854. | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase) | 100 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1855. | 2.20.02.2.01.0022 | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **44.160.300** | | **44.160.300** | **0** | **100** | |
| **1856.** | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | **44.160.300** | | **44.160.300** | **0** | **100** | Komunikasi dan Informatika |
| | | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) | | | | | 0 | 0 | |
| 1857. | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 44.160.300 | | 44.160.300 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | 0 | 0 | |
| 1858. | 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1859. | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | 44.160.300 | | 44.160.300 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1860. | 2.21.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **965.379.600** | | **390.946.300** | **45,33** | **40,5** | |
| **1861.** | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **76.785.900** | | **76.785.900** | **0** | **100** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1862. | 2.22.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 76.785.900 | | 76.785.900 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1863. | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 76.785.900 | | 76.785.900 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1864.** | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | **249.369.500** | | **249.369.500** | **63,33** | **100** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | | | 65 | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang di bina (sanggar) | 14 | | 8 | | 57,14 | 0 | |
| 1865. | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 182.424.300 | | 182.424.300 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananaya Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1866. | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | 182.424.300 | | 182.424.300 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 5 | | 3 | | 60 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1867. | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1868. | 2.22.02.2.01.0003 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1869. | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 66.945.200 | | 66.945.200 | 66,67 | 100 | |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian Kesenian tradisional dalam daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1870. | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | 46.934.400 | | 46.934.400 | 66,67 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| 1871. | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | 20.010.800 | | 20.010.800 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat) | 0 | | 10 | | 0 | 0 | |
| 1872. | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah lembaga adat yang tersedia datanya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1873. | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1874.** | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1875. | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kesenian Tradisional Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1876. | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1877.** | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1878. | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Akses Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1879. | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1880.** | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | **568.722.000** | | **2.550.000** | **0** | **0,45** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah Cagar Budaya Yang Terkelola (BCB) | 18 | | 12 | | 66,67 | 0 | |
| | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 1881. | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ditetapkannya cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1882. | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1883. | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 568.722.000 | | 2.550.000 | 0 | 0,45 | |
| | | Terlaksananaya Pengelolaan Cagar budaya Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1884. | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | 568.722.000 | | 2.550.000 | 0 | 0,45 | |
| | | Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1885.** | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | **70.502.200** | | **62.240.900** | **100** | **88,28** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya tata kelola museum | Jumlah Museum yang terkelola (Museum) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) | | | 2 | | 0 | 0 | |
| 1886. | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | 70.502.200 | | 62.240.900 | 100 | 88,28 | |
| | | Terkelolanya Museum Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1887. | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | 70.502.200 | | 62.240.900 | 100 | 88,28 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **3.132.411.556** | | **2.802.547.159** | **77,24** | **89,47** | |
| **1888.** | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.944.375.460** | | **2.639.799.253** | **78,57** | **89,66** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| 1889. | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | | 73.439.800 | 87,5 | 97,92 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1890. | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | | 24.815.200 | 100 | 99,26 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1891. | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 15.000.000 | | 14.076.000 | 50 | 93,84 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 1892. | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 15.000.000 | | 14.774.000 | 100 | 98,49 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1893. | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 20.000.000 | | 19.774.600 | 100 | 98,87 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1894. | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.432.833.225 | | 2.227.086.139 | 100 | 91,54 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1895. | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.323.245.425 | | 2.118.218.539 | 100 | 91,17 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1896. | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 84.587.800 | | 84.587.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1897. | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 25.000.000 | | 24.279.800 | 100 | 97,12 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 1898. | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 11.100.000 | | 9.300.000 | 100 | 83,78 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1899. | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 11.100.000 | | 9.300.000 | 100 | 83,78 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1900. | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 45.000.000 | | 41.328.400 | 50 | 91,84 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1901. | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1902. | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 45.000.000 | | 41.328.400 | 100 | 91,84 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 1903. | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 173.303.700 | | 170.031.436 | 100 | 98,11 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1904. | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 73.800.700 | | 73.783.916 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1905. | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 11.875.000 | | 10.375.000 | 100 | 87,37 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1906. | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 10.500.000 | | 10.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1907. | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 77.128.000 | | 75.372.520 | 100 | 97,72 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 1908. | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 72.623.750 | | - | 0 | 0 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1909. | 2.23.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1910. | 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1911. | 2.23.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 72.623.750 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1912. | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 57.534.785 | | 41.857.600 | 100 | 72,75 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1913. | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 19.999.285 | | 8.674.600 | 100 | 43,37 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | | 36 | | 100 | 0 | |
| 1914. | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 37.535.500 | | 33.183.000 | 100 | 88,4 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 1915. | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 76.980.000 | | 76.755.878 | 66,67 | 99,71 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 0 | 0 | |
| 1916. | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 39.500.000 | | 39.353.300 | 100 | 99,63 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1917. | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 37.480.000 | | 37.402.578 | 100 | 99,79 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1918. | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1919.** | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | **174.161.956** | | **151.124.006** | **80,56** | **86,77** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Meningkatnya Layanan Perpustakan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | | | | | 0 | 0 | |
| 1920. | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 85.109.040 | | 74.895.540 | 68,89 | 88 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1921. | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | 24.416.220 | | 23.752.120 | 44,44 | 97,28 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | 18 | | 8 | | 44,44 | 0 | |
| 1922. | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1923. | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.062.950 | | 23.669.450 | 100 | 94,44 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 1924. | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | 6.763.000 | | 6.763.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 250 | | 250 | | 100 | 0 | |
| 1925. | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | 28.866.870 | | 20.710.970 | 100 | 71,75 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1926. | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 89.052.916 | | 76.228.466 | 100 | 85,6 | |
| | | Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1927. | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | 33.063.940 | | 32.643.290 | 100 | 98,73 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1928. | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | 24.879.276 | | 21.619.276 | 100 | 86,9 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) | 9 | | 9 | | 100 | 0 | |
| 1929. | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | 31.109.700 | | 21.965.900 | 100 | 70,61 | |
| | | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| **1930.** | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | **13.874.140** | | **11.623.900** | **50** | **83,78** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1931. | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | 13.874.140 | | 11.623.900 | 50 | 83,78 | |
| | | Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1932. | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1933. | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | 13.874.140 | | 11.623.900 | 100 | 83,78 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar) | 17 | | 17 | | 100 | 0 | |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **217.057.550** | | **215.777.927** | **75** | **99,41** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1934.** | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | **217.057.550** | | **215.777.927** | **100** | **99,41** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 1935. | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | 100.799.400 | | 99.998.000 | 100 | 99,2 | |
| | | Terlaksananya Pegelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1936. | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | 47.845.200 | | 47.845.200 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1937. | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | 17.539.400 | | 17.335.600 | 100 | 98,84 | |
| | | Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1938. | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 35.414.800 | | 34.817.200 | 100 | 98,31 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1939. | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | 47.673.780 | | 47.493.805 | 100 | 99,62 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1940. | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | 47.673.780 | | 47.493.805 | 100 | 99,62 | |
| | | Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1941. | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | 68.584.370 | | 68.286.122 | 100 | 99,57 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1942. | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | 40.877.070 | | 40.578.822 | 100 | 99,27 | |
| | | Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1943. | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | 27.707.300 | | 27.707.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **1944.** | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1945. | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1946. | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1947. | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **3.833.423.850** | | **3.366.221.771** | **90,57** | **87,81** | |
| **1948.** | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.071.164.100** | | **2.606.001.233** | **83,65** | **84,85** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 1949. | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 21.800.600 | | 21.769.302 | 93,75 | 99,86 | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1950. | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.920.600 | | 12.920.600 | 87,5 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | | 7 | | 87,5 | 0 | |
| 1951. | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 8.880.000 | | 8.848.702 | 100 | 99,65 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 1952. | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.795.986.600 | | 2.331.753.052 | 100 | 83,4 | |
| | | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1953. | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.641.773.700 | | 2.182.340.152 | 100 | 82,61 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | | 23 | | 100 | 0 | |
| 1954. | 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 147.240.000 | | 142.440.000 | 100 | 96,74 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1955. | 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 6.972.900 | | 6.972.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1956. | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1957. | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1958. | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1959. | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 121.864.600 | | 121.554.051 | 100 | 99,75 | |
| | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1960. | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1961. | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 12.431.600 | | 12.431.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1962. | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 10.350.000 | | 10.350.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1963. | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 99.083.000 | | 98.772.451 | 100 | 99,69 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 1964. | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 1965. | 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1966. | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 33.032.300 | | 32.638.300 | 100 | 98,81 | |
| | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1967. | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.312.000 | | 1.918.000 | 100 | 82,96 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 1968. | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 30.720.300 | | 30.720.300 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1969. | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 98.480.000 | | 98.286.528 | 100 | 99,8 | |
| | | Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1970. | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 98.480.000 | | 98.286.528 | 100 | 99,8 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1971. | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1972.** | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | **130.107.400** | | **130.107.400** | **100** | **100** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Produksi perikanan tangkap diperairan umum, daratan, sungai, danau dan rawa (Ton) | 2,2 | | | | 0 | 0 | |
| 1973. | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | 130.107.400 | | 130.107.400 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sungai, danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya | | | | | | 0 | 0 | |
| 1974. | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | 2.463.600 | | 2.463.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 1975. | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | 127.643.800 | | 127.643.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 1976. | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1977. | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1978.** | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | **605.914.250** | | **604.502.200** | **111,11** | **99,77** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Produksi perikanan budidaya (Ton) | 3,9 | | | | 0 | 0 | |
| 1979. | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 161.162.000 | | 160.929.950 | 133,33 | 99,86 | |
| | | Terlaksananya pembudidaya ikan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1980. | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 161.162.000 | | 160.929.950 | 133,33 | 99,86 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | 30 | | 40 | | 133,33 | 0 | |
| 1981. | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1982. | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | 444.752.250 | | 443.572.250 | 100 | 99,73 | |
| | | Terkelolanya pelaksanaan pembudidayaan ikan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1983. | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1984. | 3.25.04.2.04.0008 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1985. | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 298.839.750 | | 298.471.750 | 100 | 99,88 | |
| | | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| 1986. | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1987. | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 145.912.500 | | 145.100.500 | 100 | 99,44 | |
| | | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **1988.** | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | **26.238.100** | | **25.610.938** | **100** | **97,61** | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Persentase unit usaha yang memproduksi produk perikanan bernilai tambah (Persen) | 100 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | | | | | 0 | 0 | |
| 1989. | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | 26.238.100 | | 25.610.938 | 100 | 97,61 | |
| | | Tersedianya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 1990. | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1991. | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.238.100 | | 25.610.938 | 100 | 97,61 | |
| | | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **6.056.995.660** | | **4.418.659.521** | **87,1** | **72,95** | |
| **1992.** | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.821.722.425** | | **3.608.976.900** | **124,4** | **94,43** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 1993. | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 34.255.225 | | 34.204.944 | 100 | 99,85 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 1994. | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 19.858.050 | | 19.851.644 | 100 | 99,97 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 1995. | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 7.463.475 | | 7.419.600 | 100 | 99,41 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 1996. | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 6.933.700 | | 6.933.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 23 | | 23 | | 100 | 0 | |
| 1997. | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.495.030.000 | | 3.219.233.756 | 100 | 92,11 | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 1998. | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.322.070.000 | | 3.046.273.756 | 100 | 91,7 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 34 | | 34 | | 100 | 0 | |
| 1999. | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 172.960.000 | | 172.960.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2000. | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2001. | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2002. | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2003. | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2004. | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 138.543.100 | | 131.592.994 | 80,95 | 94,98 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Administrasi umum Perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2005. | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2006. | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 10.085.100 | | 10.063.100 | 100 | 99,78 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 33 | | 33 | | 100 | 0 | |
| 2007. | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 24.200.000 | | 17.449.900 | 100 | 72,11 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2008. | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 104.258.000 | | 104.079.994 | 42,86 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 56 | | 24 | | 42,86 | 0 | |
| 2009. | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Barang Milik daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2010. | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2011. | 3.26.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2012. | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 153.894.100 | | 147.410.292 | 375 | 95,79 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daeerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2013. | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 103.839.600 | | 97.369.292 | 650 | 93,77 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 78 | | 650 | 0 | |
| 2014. | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 50.054.500 | | 50.041.000 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2015. | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | - | | 76.534.914 | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Barang Milik daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2016. | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | 76.534.914 | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 3 | | 0 | 0 | |
| 2017. | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2018. | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2019.** | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | **1.484.174.555** | | **328.512.525** | **10** | **22,13** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya daya tarik destinasi parawisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | | | 33,93 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen) | 11,21 | | | | 0 | 0 | |
| 2020. | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | 278.933.600 | | 278.933.600 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2021. | 3.26.02.2.01.0005 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | 278.933.600 | | 278.933.600 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2022. | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya kawasan strategis pariwisata | | | | | | 0 | 0 | |
| 2023. | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2024. | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 1.205.240.955 | | 49.578.925 | 12,5 | 4,11 | |
| | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | | | | | | 0 | 0 | |
| 2025. | 3.26.02.2.03.0001 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2026. | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2027. | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2028. | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 969.072.030 | | 23.780.000 | 0 | 2,45 | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2029. | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 222.308.600 | | 11.938.600 | 0 | 5,37 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2030. | 3.26.02.2.03.0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2031. | 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 13.860.325 | | 13.860.325 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 16 | | 8 | | 50 | 0 | |
| **2032.** | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | **677.971.780** | | **408.141.596** | **100** | **60,2** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya jangkauan pemasaran parawisata | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen) | 11,21 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | | | 11,7 | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali) | 8 | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2033. | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 677.971.780 | | 408.141.596 | 100 | 60,2 | |
| | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | | | | | | 0 | 0 | |
| 2034. | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2035. | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 677.971.780 | | 408.141.596 | 100 | 60,2 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| **2036.** | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | **73.126.900** | | **73.028.500** | **12** | **99,87** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | | | 7,36 | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina (Kelompok) | 10 | | | | 0 | 0 | |
| 2037. | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | 73.126.900 | | 73.028.500 | 12 | 99,87 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia Pariwsiata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar | | | | | | 0 | 0 | |
| 2038. | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | 73.126.900 | | 73.028.500 | 12 | 99,87 | |
| | | Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan) | 25 | | 3 | | 12 | 0 | |
| 2039. | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas pelaku Ekonomi Kreatiff | | | | | | 0 | 0 | |
| 2040. | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **28.124.529.534** | | **24.741.628.767** | **40,08** | **87,97** | |
| **2041.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **15.096.996.353** | | **13.834.093.339** | **42,11** | **91,63** | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 90 | | 0 | 0 | |
| 2042. | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 24.235.000 | | 24.230.700 | 75 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2043. | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 13.106.000 | | 13.106.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2044. | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 6.407.200 | | 6.406.600 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2045. | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2046. | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 4.721.800 | | 4.718.100 | 100 | 99,92 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2047. | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14.557.238.923 | | 13.301.380.437 | 66,67 | 91,37 | |
| | | Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2048. | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 14.359.187.023 | | 13.103.328.687 | 100 | 91,25 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 164 | | 164 | | 100 | 0 | |
| 2049. | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 196.740.000 | | 196.740.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 33 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2050. | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 1.311.900 | | 1.311.750 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2051. | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 10.562.200 | | 10.560.400 | 0 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2052. | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 10.562.200 | | 10.560.400 | 0 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2053. | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2054. | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2055. | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2056. | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 160.126.300 | | 155.751.250 | 40 | 97,27 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2057. | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.154.900 | | 2.154.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2058. | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 16.100.500 | | 16.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 2059. | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 8.833.900 | | 8.824.250 | 0 | 99,89 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2060. | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 18.500.000 | | 14.500.000 | 0 | 78,38 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2061. | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 114.537.000 | | 114.172.100 | 0 | 99,68 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2062. | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2063. | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2064. | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2065. | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 283.838.530 | | 281.179.668 | 0 | 99,06 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2066. | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 24.638.530 | | 23.379.668 | 0 | 94,89 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 34 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2067. | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 259.200.000 | | 257.800.000 | 0 | 99,46 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2068. | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 60.995.400 | | 60.990.884 | 33,33 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2069. | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 60.995.400 | | 60.990.884 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2070. | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2071. | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2072.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | **1.780.406.110** | | **985.514.278** | **10** | **55,35** | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | | | 39,77 | | 0 | 0 | |
| | | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | | | 39,77 | | 0 | 0 | |
| 2073. | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 420.379.090 | | 388.111.858 | 25 | 92,32 | |
| | | Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2074. | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | 28.122.100 | | 16.453.200 | 50 | 58,51 | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 2075. | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | 392.256.990 | | 371.658.658 | 0 | 94,75 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2076. | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2077. | 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2078. | 3.27.02.2.01.0015 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2079. | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.360.027.020 | | 597.402.420 | 0 | 43,93 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola | | | | | | 0 | 0 | |
| 2080. | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | 503.790.900 | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2081. | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | 253.791.700 | | - | 0 | 0 | |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2082. | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | 602.444.420 | | 597.402.420 | 0 | 99,16 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2083.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | **1.315.036.100** | | **1.309.865.302** | **50** | **99,61** | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | | | 99,61 | | 0 | 0 | |
| 2084. | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | 25.719.700 | | 25.719.740 | 0 | 100 | |
| | | Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2085. | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | 25.719.700 | | 25.719.740 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2086. | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2087. | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2088. | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 1.289.316.400 | | 1.284.145.562 | 100 | 99,6 | |
| | | Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2089. | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2090. | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | 1.289.316.400 | | 1.284.145.562 | 100 | 99,6 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| **2091.** | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | **39.000.000** | | **39.000.000** | **0** | **100** | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase penanganan bencana pertanian (%) | | | 9,02 | | 0 | 0 | |
| 2092. | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | 0 | 100 | |
| | | Persentase pengendalian dan penanganan bencana pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2093. | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | 0 | 100 | |
| | | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 500 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2094. | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 500 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2095.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | **1.760.722.950** | | **1.372.078.260** | **0** | **77,93** | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | | | 53,47 | | 0 | 0 | |
| 2096. | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 1.760.722.950 | | 1.372.078.260 | 0 | 77,93 | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2097. | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | 80.685.000 | | 80.213.760 | 0 | 99,42 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 18 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2098. | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | 58.820.000 | | 58.820.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2099. | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | 17.423.950 | | 17.358.500 | 0 | 99,62 | |
| | | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | 18 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2100. | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | 1.603.794.000 | | 1.215.686.000 | 0 | 75,8 | |
| | | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 160 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2101.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.271.139.531** | | **4.930.015.586** | **52,97** | **93,53** | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2102. | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 30.319.620 | | 30.169.210 | 75 | 99,5 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2103. | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.662.210 | | 12.661.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2104. | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.128.160 | | 9.978.160 | 100 | 98,52 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2105. | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2106. | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 7.529.250 | | 7.529.250 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2107. | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.879.354.038 | | 4.566.494.278 | 75 | 93,59 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2108. | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 4.741.894.564 | | 4.429.034.804 | 100 | 93,4 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 532 | | 532 | | 100 | 0 | |
| 2109. | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 131.760.000 | | 131.760.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2110. | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2111. | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.699.474 | | 5.699.474 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2112. | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.531.280 | | 5.531.280 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2113. | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.531.280 | | 5.531.280 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2114. | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 71.566.338 | | 48.535.338 | 29,33 | 67,82 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2115. | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2116. | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2117. | 3.27.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 71.566.338 | | 48.535.338 | 88 | 67,82 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 25 | | 22 | | 88 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2118. | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 131.454.500 | | 130.762.362 | 50,57 | 99,47 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2119. | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.400.100 | | 2.399.800 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2120. | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2121. | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 4.994.400 | | 4.994.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2122. | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 13.978.800 | | 13.478.800 | 100 | 96,42 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2123. | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2124. | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2125. | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 110.081.200 | | 109.889.362 | 54 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | | 27 | | 54 | 0 | |
| 2126. | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 28.626.000 | | 26.471.400 | 20 | 92,47 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2127. | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2128. | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2129. | 3.27.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2130. | 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 28.626.000 | | 26.471.400 | 100 | 92,47 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2131. | 3.27.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2132. | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 35.951.755 | | 33.788.955 | 66,67 | 93,98 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2133. | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 75 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2134. | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 9.088.455 | | 6.925.655 | 100 | 76,2 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2135. | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 26.863.300 | | 26.863.300 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2136. | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 88.336.000 | | 88.262.763 | 50 | 99,92 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2137. | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2138. | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 61.000.000 | | 60.938.313 | 100 | 99,9 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2139. | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 27.336.000 | | 27.324.450 | 100 | 99,96 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2140. | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2141.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | **1.113.053.900** | | **856.539.304** | **42,86** | **76,95** | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan produksi ternak ruminansia (Ton) | 533,50 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah produksi ternak ruminansia dan unggas (Kg) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Peningkatan produksi tanaman kopi (Ton) | 6389 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Peningkatan produksi tanaman kayu manis (Ton) | 28679 | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Peningkatan produksi ternak unggas (Ton) | 1800,98 | | | | 0 | 0 | |
| 2142. | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 777.512.200 | | 522.034.104 | 33,33 | 67,14 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2143. | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | 260.565.600 | | 5.356.600 | 0 | 2,06 | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2144. | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2145. | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | 516.946.600 | | 516.677.504 | 100 | 99,95 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) | 127000 | | 127.000 | | 100 | 0 | |
| 2146. | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 289.098.900 | | 288.062.400 | 50 | 99,64 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 2147. | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | 289.098.900 | | 288.062.400 | 100 | 99,64 | |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2148. | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2149. | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2150. | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 46.442.800 | | 46.442.800 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 0 | 0 | |
| 2151. | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 46.442.800 | | 46.442.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | 700 | | 700 | | 100 | 0 | |
| 2152. | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis) | 700 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2153.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | **1.348.290.528** | | **1.330.393.828** | **45,83** | **98,67** | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Peningkatan produksi tanaman kayu manis (Ton) | 28679 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Cakupan luas lahan komoditi perkebunan unggulan (Ha) (Ha) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Peningkatan produksi tanaman kopi (Ton) | 6389 | | | | 0 | 0 | |
| 2154. | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | 89.937.990 | | 89.787.784 | 50 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2155. | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2156. | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | 89.937.990 | | 89.787.784 | 100 | 99,83 | |
| | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | | | | | | | |
| 2157. | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 1.258.352.538 | | 1.240.606.044 | 43,75 | 98,59 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2158. | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2159. | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | 504.200.308 | | 501.175.160 | 75 | 99,4 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 4 | | 3 | | 75 | 0 | |
| 2160. | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | 754.152.230 | | 739.430.884 | 100 | 98,05 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2161. | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2162. | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2163.** | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | **136.757.170** | | **84.128.870** | **50** | **61,52** | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Persen) | 100 | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2164. | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | 69.748.300 | | 65.911.900 | 100 | 94,5 | |
| | | Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 2165. | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 69.748.300 | | 65.911.900 | 100 | 94,5 | |
| | | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2166. | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 18.216.970 | | 18.216.970 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 2167. | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | 18.216.970 | | 18.216.970 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2168. | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 48.791.900 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 0 | 0 | |
| 2169. | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | 16.654.400 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2170. | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | 32.137.500 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2171.** | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Perkebunan dan Peternakan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2172. | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2173. | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2174.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | **263.126.892** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Cakupan bina kelompok tani (Kelompok Tani) | 318 | | | | 0 | 0 | |
| 2175. | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 263.126.892 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan Pertanian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2176. | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | 96.613.794 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2177. | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | 75.247.578 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 120 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2178. | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | 91.265.520 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **4.907.706.400** | | **4.659.502.810** | **68,18** | **94,94** | |
| **2179.** | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.494.874.000** | | **4.364.020.294** | **80,7** | **97,09** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (SAKIP) | 86 | | 70 | | 81,4 | 0 | |
| 2180. | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 52.837.600 | | 52.629.800 | 100 | 99,61 | |
| | | Jumlah Dokumen, perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2181. | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 31.809.500 | | 31.601.700 | 100 | 99,35 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2182. | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.972.100 | | 10.972.100 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2183. | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 10.056.000 | | 10.056.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2184. | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.073.430.965 | | 3.957.457.419 | 100 | 97,15 | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2185. | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.927.057.965 | | 3.811.085.369 | 100 | 97,05 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 2186. | 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 136.080.000 | | 136.080.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 2187. | 3.30.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2188. | 3.30.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 10.293.000 | | 10.292.050 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2189. | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 9.145.200 | | 9.145.200 | 100 | 100 | |
| | | Pelaksanaan Penatusahaan BMD SKPD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2190. | 3.30.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2191. | 3.30.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 9.145.200 | | 9.145.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2192. | 3.30.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2193. | 3.30.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2194. | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penataan Adminstrasi Kepegawaia Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2195. | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2196. | 3.30.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2197. | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2198. | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 159.451.400 | | 159.401.796 | 86,67 | 99,97 | |
| | | Terlaksananya Pemenuhan penyediaan kebutuhan Administrasi UMUM | | | | | | 0 | 0 | |
| 2199. | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 3.551.500 | | 3.551.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2200. | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 11.200.000 | | 11.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2201. | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 23.778.100 | | 23.778.100 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2202. | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 21.256.800 | | 21.256.800 | 33,33 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 1 | | 33,33 | 0 | |
| 2203. | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 99.665.000 | | 99.615.396 | 100 | 99,95 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2204. | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Unit barang | | | | | | 0 | 0 | |
| 2205. | 3.30.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2206. | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 76.198.835 | | 61.624.255 | 100 | 80,87 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2207. | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 50.998.835 | | 36.424.255 | 100 | 71,42 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2208. | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 25.200.000 | | 25.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2209. | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 101.310.000 | | 101.261.824 | 50 | 99,95 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2210. | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 101.310.000 | | 101.261.824 | 100 | 99,95 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2211. | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2212.** | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2213. | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2214. | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2215.** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | **193.757.100** | | **193.660.100** | **66,67** | **99,95** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen) | 100 | | | | 0 | 0 | |
| 2216. | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 76.798.100 | | 76.701.100 | 83,33 | 99,87 | |
| | | Tersedianya Sarana Prasasarana Pasar | | | | | | 0 | 0 | |
| 2217. | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 54.600.350 | | 54.600.350 | 66,67 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| 2218. | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 22.197.750 | | 22.100.750 | 100 | 99,56 | |
| | | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2219. | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | 116.959.000 | | 116.959.000 | 50 | 100 | |
| | | Tebinaya Pengelola Sarana distribusi pasar | | | | | | 0 | 0 | |
| 2220. | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | 116.959.000 | | 116.959.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 2221. | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2222.** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | **103.830.600** | | **62.202.350** | **68,33** | **59,91** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya kelancara distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Kestabilan Harga dan Tingkat Inflasi () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2223. | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 18.143.200 | | 18.084.200 | 50 | 99,67 | |
| | | Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 2224. | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | 18.143.200 | | 18.084.200 | 100 | 99,67 | |
| | | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2225. | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan | 114 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | | | | | | | |
| 2226. | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | 75.104.800 | | 33.575.550 | 100 | 44,7 | |
| | | Kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | 0 | 0 | |
| 2227. | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 25.104.800 | | 25.016.120 | 100 | 99,65 | |
| | | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 114 | | 114 | | 100 | 0 | |
| 2228. | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 50.000.000 | | 8.559.430 | 100 | 17,12 | |
| | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2229. | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.582.600 | | 10.542.600 | 41,67 | 99,62 | |
| | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | 0 | 0 | |
| 2230. | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | 10.582.600 | | 10.542.600 | 41,67 | 99,62 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 60 | | 25 | | 41,67 | 0 | |
| **2231.** | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | **75.617.000** | | **-** | **0** | **0** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Jumlah Promosi dan Pameran dagang (-) | 6 | | | | 0 | 0 | |
| 2232. | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 75.617.000 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Jumlah promosi Dagang Produk Dalam Negeri | | | | | | 0 | 0 | |
| 2233. | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2234. | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | 75.617.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2235. | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2236.** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | **39.627.700** | | **39.620.066** | **20** | **99,98** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (Persen) | 1,72 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 2237. | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 39.627.700 | | 39.620.066 | 20 | 99,98 | |
| | | Jumlah UTTP yang ditera, dibina dan diawasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 2238. | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | 39.627.700 | | 39.620.066 | 40 | 99,98 | |
| | | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 350 | | 140 | | 40 | 0 | |
| 2239. | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 350 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **182.424.800** | | **182.424.700** | **80** | **100** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2240.** | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | **182.424.800** | | **182.424.700** | **100** | **100** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Laju Pertumbuhan IKM (Persen) | 0,59 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%)) | | | | | 0 | 0 | |
| 2241. | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 182.424.800 | | 182.424.700 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) | | | | | | 0 | 0 | |
| 2242. | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2243. | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 91.981.200 | | 91.981.200 | 100 | 100 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2244. | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | 43.659.400 | | 43.659.300 | 200 | 100 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 2 | | 4 | | 200 | 0 | |
| 2245. | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | 46.784.200 | | 46.784.200 | 100 | 100 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| **2246.** | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | - | | - | **0** | **0** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Persentase data Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas (Persen) | 7,22 | | | | 0 | 0 | |
| 2247. | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2248. | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **37.106.787.312** | | **34.669.523.566** | **105,06** | **93,43** | |
| **2249.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **32.542.423.734** | | **30.203.345.255** | **110,29** | **92,81** | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | | 4,08 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | | | 67,82 | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 2250. | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 98.613.750 | | 98.569.549 | 100 | 99,96 | |
| | | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2251. | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 98.613.750 | | 98.569.549 | 100 | 99,96 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2252. | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14.236.235.307 | | 12.446.433.322 | 100 | 87,43 | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2253. | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 13.659.569.307 | | 11.869.803.322 | 100 | 86,9 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 85 | | 85 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2254. | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 576.666.000 | | 576.630.000 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2255. | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 85.495.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2256. | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 85.495.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 11 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2257. | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2258. | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 83 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2259. | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 27 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2260. | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.738.479.727 | | 5.701.486.423 | 91,67 | 99,36 | |
| | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2261. | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 137.341.500 | | 137.341.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2262. | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 691.633.427 | | 668.000.030 | 50 | 96,58 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 5 | | 50 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2263. | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 445.102.400 | | 443.289.586 | 100 | 99,59 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2264. | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 417.353.800 | | 417.103.800 | 100 | 99,94 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2265. | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2266. | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 1.453.860.000 | | 1.442.942.354 | 100 | 99,25 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2267. | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.593.188.600 | | 2.592.809.153 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2268. | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.893.713.500 | | 3.715.044.353 | 20 | 95,41 | |
| | | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2269. | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 3.177.751.000 | | 3.158.530.000 | 50 | 99,4 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 2 | | 50 | 0 | |
| 2270. | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 21 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2271. | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 715.962.500 | | 556.514.353 | 10 | 77,73 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 1 | | 10 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2272. | 4.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2273. | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2274. | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2275. | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.025.950.765 | | 3.972.300.287 | 650 | 98,67 | |
| | | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2276. | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2277. | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 482.787.165 | | 438.521.946 | 1200 | 90,83 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 12 | | 1200 | 0 | |
| 2278. | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2279. | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.543.163.600 | | 3.533.778.341 | 100 | 99,74 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2280. | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.553.922.200 | | 1.549.257.135 | 68 | 99,7 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2281. | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 291.875.000 | | 291.558.883 | 100 | 99,89 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2282. | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.165.350.000 | | 1.165.096.052 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 34 | | 34 | | 100 | 0 | |
| 2283. | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 40.640.000 | | 40.590.000 | 40 | 99,88 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 4 | | 40 | 0 | |
| 2284. | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2285. | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 56.057.200 | | 52.012.200 | 100 | 92,78 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2286. | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2287. | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 861.177.000 | | 681.870.293 | 133,33 | 79,18 | |
| | | Terlaksananya administrasi kuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2288. | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 586.177.000 | | 412.121.793 | 100 | 70,31 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2289. | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 235.000.000 | | 230.500.000 | 200 | 98,09 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 2290. | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 40.000.000 | | 39.248.500 | 100 | 98,12 | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2291. | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2292. | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 1.392.832.500 | | 1.386.096.000 | 66,67 | 99,52 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2293. | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | 824.237.500 | | 818.469.750 | 100 | 99,3 | |
| | | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2294. | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | 568.595.000 | | 567.626.250 | 100 | 99,83 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2295. | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2296. | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | | | 293.290.000 | | 293.238.861 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Penataan Organisasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 2297. | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 143.467.700 | | 143.416.561 | 100 | 99,96 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2298. | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 79.325.900 | | 79.325.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2299. | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | 70.496.400 | | 70.496.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2300. | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 362.713.985 | | 359.049.032 | 100 | 98,99 | |
| | | Terlaksananya Protokol dan Komunikasi pimpinan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2301. | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | 187.996.700 | | 185.594.248 | 100 | 98,72 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 160 | | 160 | | 100 | 0 | |
| 2302. | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | 40.610.600 | | 40.140.940 | 100 | 98,84 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 160 | | 160 | | 100 | 0 | |
| 2303. | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | 134.106.685 | | 133.313.844 | 100 | 99,41 | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 160 | | 160 | | 100 | 0 | |
| **2304.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | **2.942.623.218** | | **2.881.952.321** | **95** | **97,94** | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Persentase Capaian Aksi HAM (%) | | | 78 | | 0 | 0 | |
| | | | Capaian SPM (Persentase) | | | 84,8 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) (Nilai) | | | 19.534 | | 0 | 0 | |
| | | | Hafidz Al Qur'""""an (Orang) | | | 2.023 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | | | 88 | | 0 | 0 | |
| 2305. | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | 212.791.800 | | 212.781.179 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2306. | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | 74.942.700 | | 74.942.694 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 9 | | 9 | | 100 | 0 | |
| 2307. | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | 57.423.500 | | 57.416.048 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 2308. | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 80.425.600 | | 80.422.437 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2309. | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 2.346.019.600 | | 2.287.977.539 | 100 | 97,53 | |
| | | Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat | | | | | | 0 | 0 | |
| 2310. | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | 2.038.484.300 | | 2.010.302.955 | 100 | 98,62 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2311. | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | 92.514.400 | | 83.001.400 | 100 | 89,72 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2312. | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | 215.020.900 | | 194.673.184 | 100 | 90,54 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2313. | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 335.112.418 | | 332.678.460 | 100 | 99,27 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum | | | | | | 0 | 0 | |
| 2314. | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | 121.822.600 | | 121.796.700 | 100 | 99,98 | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 342 | | 342 | | 100 | 0 | |
| 2315. | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 147.821.779 | | 147.163.760 | 100 | 99,55 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2316. | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | 65.468.039 | | 63.718.000 | 100 | 97,33 | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2317. | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | 48.699.400 | | 48.515.143 | 50 | 99,62 | |
| | | Terlaksananya kerjasama daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2318. | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | 48.699.400 | | 48.515.143 | 50 | 99,62 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 6 | | 3 | | 50 | 0 | |
| 2319. | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2320.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | **1.621.740.360** | | **1.584.225.990** | **98,61** | **97,69** | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Tingkat Inflasi ((%)) | | | 5,52 | | 0 | 0 | |
| | | | Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka) | | | 9 | | 0 | 0 | |
| 2321. | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | 226.356.300 | | 224.504.658 | 100 | 99,18 | |
| | | Terlaksananya kebijakan perekonomian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2322. | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | 101.065.400 | | 100.593.502 | 100 | 99,53 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2323. | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | 96.326.600 | | 95.780.841 | 100 | 99,43 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2324. | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 28.964.300 | | 28.130.315 | 100 | 97,12 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2325. | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | 349.383.960 | | 348.742.855 | 94,44 | 99,82 | |
| | | Terlaksananya administrasi pembangunan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2326. | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | 114.185.550 | | 114.158.714 | 83,33 | 99,98 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 6 | | 5 | | 83,33 | 0 | |
| 2327. | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | 109.460.000 | | 108.852.498 | 100 | 99,45 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2328. | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | 125.738.410 | | 125.731.643 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2329. | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 896.050.600 | | 861.778.460 | 100 | 96,18 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2330. | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 376.544.300 | | 345.031.600 | 100 | 91,63 | |
| | | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2331. | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 354.742.400 | | 351.996.056 | 100 | 99,23 | |
| | | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 400 | | 400 | | 100 | 0 | |
| 2332. | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 164.763.900 | | 164.750.804 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 120 | | 120 | | 100 | 0 | |
| 2333. | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | 149.949.500 | | 149.200.017 | 100 | 99,5 | |
| | | Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam | | | | | | 0 | 0 | |
| 2334. | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | 38.825.900 | | 38.151.305 | 100 | 98,26 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2335. | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | 24.278.900 | | 24.278.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2336. | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | 86.844.700 | | 86.770.512 | 100 | 99,91 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **29.413.538.188** | | **28.531.312.571** | **107,34** | **97** | |
| **2337.** | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **21.732.543.538** | | **21.108.974.850** | **121,65** | **97,13** | Sekretariat DPRD |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 2338. | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 40.462.200 | | 40.462.200 | 173,33 | 100 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2339. | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.517.200 | | 12.517.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2340. | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 21.315.000 | | 21.315.000 | 300 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 6 | | 300 | 0 | |
| 2341. | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 6.630.000 | | 6.630.000 | 120 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 6 | | 120 | 0 | |
| 2342. | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.466.814.038 | | 3.161.495.480 | 94,83 | 91,19 | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2343. | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.197.104.038 | | 2.897.485.480 | 96,77 | 90,63 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 31 | | 30 | | 96,77 | 0 | |
| 2344. | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 257.400.000 | | 251.700.000 | 166,67 | 97,79 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 20 | | 166,67 | 0 | |
| 2345. | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 12.310.000 | | 12.310.000 | 21,05 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 19 | | 4 | | 21,05 | 0 | |
| 2346. | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 135.169.200 | | 134.888.810 | 170 | 99,79 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2347. | 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 82.382.400 | | 82.102.010 | 40 | 99,66 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 10 | | 4 | | 40 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2348. | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 52.786.800 | | 52.786.800 | 300 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 9 | | 300 | 0 | |
| 2349. | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 153.502.000 | | 151.501.972 | 47,06 | 98,7 | |
| | | Terlaksananyya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2350. | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2351. | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 153.502.000 | | 151.501.972 | 94,12 | 98,7 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 17 | | 16 | | 94,12 | 0 | |
| 2352. | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.368.113.900 | | 1.350.693.414 | 135,14 | 98,73 | |
| | | Terlaksananya Adminsitasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2353. | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 184.267.700 | | 184.267.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2354. | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 317.266.400 | | 316.981.679 | 400 | 99,91 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 4 | | 400 | 0 | |
| 2355. | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 59.176.200 | | 59.169.640 | 50 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 2356. | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 377.584.700 | | 373.220.100 | 100 | 98,84 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2357. | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 175.661.700 | | 175.661.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2358. | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 63.500.000 | | 50.750.000 | 100 | 79,92 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2359. | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 190.657.200 | | 190.642.595 | 96 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 24 | | 96 | 0 | |
| 2360. | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2361. | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2362. | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2363. | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.368.364.600 | | 1.338.201.740 | 200 | 97,8 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2364. | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 30.345.000 | | 13.682.140 | 300 | 45,09 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 12 | | 300 | 0 | |
| 2365. | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.338.019.600 | | 1.324.519.600 | 100 | 98,99 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2366. | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 738.945.500 | | 729.709.400 | 100 | 98,75 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2367. | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 248.690.000 | | 248.397.500 | 100 | 99,88 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2368. | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 377.242.500 | | 376.795.900 | 100 | 99,88 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2369. | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 55.180.000 | | 55.080.000 | 100 | 99,82 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 52 | | 52 | | 100 | 0 | |
| 2370. | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 57.833.000 | | 49.436.000 | 100 | 85,48 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2371. | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 14.461.172.100 | | 14.202.021.834 | 100 | 98,21 | |
| | | Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2372. | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | 13.960.000.300 | | 13.702.580.762 | 100 | 98,16 | |
| | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 2373. | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | 359.700.000 | | 359.700.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2374. | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | 141.471.800 | | 139.741.072 | 100 | 98,78 | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| **2375.** | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | **7.680.994.650** | | **7.422.337.721** | **94,02** | **96,63** | Sekretariat DPRD |
| | | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | | | 97,69 | | 0 | 0 | |
| | | | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 2376. | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 1.346.595.800 | | 1.247.014.873 | 60 | 92,6 | |
| | | Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2377. | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2378. | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | 1.141.616.000 | | 1.114.683.073 | 100 | 97,64 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 2379. | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | 50.484.600 | | 29.243.400 | 100 | 57,93 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2380. | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | 154.495.200 | | 103.088.400 | 100 | 66,73 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2381. | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2382. | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 1.505.474.700 | | 1.499.351.296 | 100 | 99,59 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | 0 | 0 | |
| 2383. | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | 119.818.200 | | 119.818.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2384. | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 142.687.900 | | 142.687.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2385. | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | 1.009.926.800 | | 1.009.803.396 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2386. | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | 131.456.300 | | 131.456.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2387. | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | 101.585.500 | | 95.585.500 | 100 | 94,09 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2388. | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 1.033.330.160 | | 1.009.437.090 | 80 | 97,69 | |
| | | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2389. | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | 287.034.300 | | 280.626.720 | 100 | 97,77 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 2390. | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | 301.034.300 | | 297.083.850 | 100 | 98,69 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 2391. | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | 309.312.300 | | 305.534.260 | 100 | 98,78 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 2392. | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | 9.757.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2393. | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | 126.192.260 | | 126.192.260 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2394. | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 1.126.441.450 | | 1.122.491.850 | 160 | 99,65 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2395. | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terselenggaranya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2396. | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | 423.638.800 | | 422.127.300 | 100 | 99,64 | |
| | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2397. | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | 400 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 1 | | 4 | | 400 | 0 | |
| 2398. | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | 168.000.000 | | 168.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2399. | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | 17.391.200 | | 17.391.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2400. | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | 457.411.450 | | 454.973.350 | 100 | 99,47 | |
| | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2401. | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 1.339.201.040 | | 1.222.115.540 | 100 | 91,26 | |
| | | Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | | | | | | 0 | 0 | |
| 2402. | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2403. | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | 7.824.700 | | 7.824.700 | 0 | 100 | |
| | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2404. | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | 1.316.376.340 | | 1.199.290.840 | 200 | 91,11 | |
| | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 2405. | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 16.683.400 | | 9.783.400 | 13,33 | 58,64 | |
| | | Terlaksana dan terawasinya pelaksanaan kode etik DPRD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2406. | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2407. | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 16.683.400 | | 9.783.400 | 26,67 | 58,64 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 15 | | 4 | | 26,67 | 0 | |
| 2408. | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | 1.313.268.100 | | 1.312.143.672 | 100 | 99,91 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2409. | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 681.506.600 | | 680.426.218 | 100 | 99,84 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 68 | | 68 | | 100 | 0 | |
| 2410. | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | 22.732.000 | | 22.732.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 2411. | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | 58.812.800 | | 58.812.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2412. | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 550.216.700 | | 550.172.654 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | **7.957.020.810** | | **7.361.389.386** | **88,25** | **92,51** | |
| **2413.** | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.062.531.321** | | **5.500.629.009** | **91,13** | **90,73** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (nilai) | 86 | | 80 | | 93,02 | 0 | |
| 2414. | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 151.736.275 | | 144.661.265 | 100 | 95,34 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2415. | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 49.985.455 | | 44.479.062 | 100 | 88,98 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2416. | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 32.271.200 | | 31.322.993 | 100 | 97,06 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2417. | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 23.220.000 | | 23.052.500 | 100 | 99,28 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2418. | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 46.259.620 | | 45.806.710 | 100 | 99,02 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2419. | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.126.482.263 | | 4.754.503.016 | 107,5 | 92,74 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2420. | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 4.886.101.135 | | 4.516.221.888 | 122,5 | 92,43 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 40 | | 49 | | 122,5 | 0 | |
| 2421. | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 183.320.000 | | 183.320.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2422. | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 57.061.128 | | 54.961.128 | 100 | 96,32 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 2423. | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 32.437.537 | | 31.098.555 | 100 | 95,87 | |
| | | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2424. | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 32.437.537 | | 31.098.555 | 100 | 95,87 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2425. | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 101.870.000 | | 88.274.350 | 100 | 86,65 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2426. | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 54.125.000 | | 53.042.500 | 100 | 98 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 40 | | 40 | | 100 | 0 | |
| 2427. | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 47.745.000 | | 35.231.850 | 100 | 73,79 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 2428. | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 242.103.100 | | 229.532.758 | 100 | 94,81 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2429. | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 15.019.600 | | 15.019.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2430. | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 38.513.500 | | 37.784.900 | 100 | 98,11 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2431. | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 38.664.000 | | 28.464.000 | 100 | 73,62 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2432. | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 149.906.000 | | 148.264.258 | 100 | 98,9 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 70 | | 70 | | 100 | 0 | |
| 2433. | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 95.066.636 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2434. | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2435. | 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 95.066.636 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2436. | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 183.775.510 | | 133.358.323 | 100 | 72,57 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2437. | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 119.634.000 | | 72.100.323 | 100 | 60,27 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2438. | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 64.141.510 | | 61.258.000 | 100 | 95,5 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2439. | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 129.060.000 | | 119.200.742 | 66,67 | 92,36 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2440. | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 98.480.000 | | 98.330.742 | 100 | 99,85 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2441. | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2442. | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 30.580.000 | | 20.870.000 | 100 | 68,25 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| **2443.** | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **1.175.132.710** | | **1.146.193.306** | **87,88** | **97,54** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PERSEN) | 94 | | 94 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2444. | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | 711.429.360 | | 699.333.626 | 94,44 | 98,3 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2445. | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | 30.779.000 | | 29.848.200 | 100 | 96,98 | |
| | | Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2446. | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | 47.818.300 | | 47.642.500 | 100 | 99,63 | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2447. | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | 32.992.200 | | 32.558.475 | 100 | 98,69 | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2448. | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | 169.934.860 | | 165.270.851 | 100 | 97,26 | |
| | | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2449. | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | 37.999.200 | | 37.324.200 | 100 | 98,22 | |
| | | Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | 1500 | | 1.500 | | 100 | 0 | |
| 2450. | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | 391.905.800 | | 386.689.400 | 66,67 | 98,67 | |
| | | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| 2451. | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 24.999.650 | | 24.774.650 | 50 | 99,1 | |
| | | Meningkatkan capaian analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2452. | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 24.999.650 | | 24.774.650 | 100 | 99,1 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2453. | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2454. | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2455. | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 369.418.600 | | 356.706.230 | 100 | 96,56 | |
| | | Meningkatkan capaian perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2456. | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | 45.653.500 | | 40.019.400 | 100 | 87,66 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2457. | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 323.765.100 | | 316.686.830 | 100 | 97,81 | |
| | | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2458. | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | 69.285.100 | | 65.378.800 | 100 | 94,36 | |
| | | Meningkatkan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2459. | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | 69.285.100 | | 65.378.800 | 100 | 94,36 | |
| | | Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2460.** | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **719.356.779** | | **714.567.071** | **85,71** | **99,33** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Parsen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (PERSEN) | 99 | | 99 | | 100 | 0 | |
| | | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (Persen) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 2461. | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 150.499.100 | | 150.418.696 | 66,67 | 99,95 | |
| | | meningkatkan keselarasan kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2462. | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 49.776.500 | | 49.776.500 | 100 | 100 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2463. | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | 22.645.000 | | 22.645.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2464. | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | 24.753.000 | | 24.678.000 | 100 | 99,7 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2465. | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2466. | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2467. | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2468. | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2469. | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | 53.324.600 | | 53.319.196 | 100 | 99,99 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2470. | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | 222.521.700 | | 221.569.575 | 85,71 | 99,57 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | meningkatkan keselarasan kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA | | | | | | 0 | 0 | |
| 2471. | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 55.539.900 | | 55.352.735 | 100 | 99,66 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2472. | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | 22.766.500 | | 22.766.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2473. | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | 26.961.800 | | 26.375.440 | 0 | 97,83 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 0 | | 1 | | 0 | 0 | |
| 2474. | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | 69.412.400 | | 69.412.400 | 100 | 100 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2475. | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 15.258.100 | | 15.079.500 | 100 | 98,83 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2476. | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | 19.791.500 | | 19.791.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2477. | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | 12.791.500 | | 12.791.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2478. | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2479. | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 346.335.979 | | 342.578.800 | 100 | 98,92 | |
| | | Meningkatkan keselarasan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | | | | | | 0 | 0 | |
| 2480. | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 31.207.900 | | 30.795.480 | 100 | 98,68 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2481. | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | 21.961.600 | | 21.956.900 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2482. | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | 29.493.900 | | 29.066.620 | 100 | 98,55 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | | | | | | | |
| 2483. | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | 78.706.600 | | 78.106.600 | 100 | 99,24 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2484. | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 48.315.700 | | 48.191.300 | 100 | 99,74 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2485. | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 49.715.400 | | 49.052.300 | 100 | 98,67 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2486. | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 22.307.000 | | 22.305.000 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2487. | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 64.627.879 | | 63.104.600 | 100 | 97,64 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | **346.556.261.130** | | **346.454.011.469** | **86,9** | **99,97** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2488.** | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **9.822.753.884** | | **9.844.809.966** | **82,86** | **100,22** | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| 2489. | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 151.752.860 | | 147.687.425 | 95,92 | 97,32 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2490. | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 33.944.590 | | 32.267.450 | 100 | 95,06 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2491. | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 9.761.900 | | 9.585.500 | 100 | 98,19 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2492. | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 10.559.500 | | 10.559.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2493. | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 9.160.350 | | 9.160.350 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2494. | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 9.143.620 | | 7.930.100 | 100 | 86,73 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2495. | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 53.608.500 | | 52.698.225 | 71,43 | 98,3 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 14 | | 10 | | 71,43 | 0 | |
| 2496. | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 25.574.400 | | 25.486.300 | 100 | 99,66 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 2497. | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.903.963.624 | | 8.903.963.624 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2498. | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 8.333.137.624 | | 8.333.137.624 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 65 | | 65 | | 100 | 0 | |
| 2499. | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 570.826.000 | | 570.826.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 65 | | 65 | | 100 | 0 | |
| 2500. | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 45.798.500 | | 74.937.000 | 100 | 163,62 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2501. | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | 29.138.500 | 100 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 67 | | 67 | | 100 | 0 | |
| 2502. | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 31.152.500 | | 31.152.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2503. | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 14.646.000 | | 14.646.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 60 | | 60 | | 100 | 0 | |
| 2504. | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 228.590.750 | | 225.605.100 | 83,33 | 98,69 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2505. | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 8.985.550 | | 8.749.300 | 100 | 97,37 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 2506. | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 29.902.900 | | 29.902.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2507. | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 40.235.100 | | 39.656.100 | 100 | 98,56 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 55 | | 55 | | 100 | 0 | |
| 2508. | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 48.557.200 | | 46.386.800 | 100 | 95,53 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2509. | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2510. | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 100.910.000 | | 100.910.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 300 | | 300 | | 100 | 0 | |
| 2511. | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 71.212.700 | | 71.212.700 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2512. | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 21 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2513. | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2514. | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 71.212.700 | | 71.212.700 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2515. | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 213.343.450 | | 213.343.450 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2516. | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 45.918.450 | | 45.918.450 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2517. | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 167.425.000 | | 167.425.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2518. | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 208.092.000 | | 208.060.667 | 66,67 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2519. | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 145.872.000 | | 145.840.667 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2520. | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 2521. | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2522. | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 47.220.000 | | 47.220.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2523.** | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | **335.394.607.366** | | **335.338.473.218** | **89,9** | **99,98** | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Opini BPK (laporan) | 4 | | | | 0 | 0 | |
| 2524. | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 288.650.950 | | 287.971.550 | 100 | 99,76 | |
| | | Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2525. | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | 7.693.900 | | 7.693.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) | 446 | | 446 | | 100 | 0 | |
| 2526. | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | 17.757.700 | | 17.078.300 | 100 | 96,17 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2527. | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2528. | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | 100.604.400 | | 100.604.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 2529. | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 162.594.950 | | 162.594.950 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 91 | | 91 | | 100 | 0 | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2530. | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 1.115.751.621 | | 1.106.148.855 | 77,77 | 99,14 | |
| | | opini BPK | | | | | | 0 | 0 | |
| 2531. | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 44.535.221 | | 44.441.400 | 100 | 99,79 | |
| | | Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2532. | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 20.124.600 | | 20.124.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2533. | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | 14.695.500 | | 14.695.500 | 104,35 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 46 | | 48 | | 104,35 | 0 | |
| 2534. | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | 18.118.000 | | 18.118.000 | 104,35 | 100 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 46 | | 48 | | 104,35 | 0 | |
| 2535. | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 46 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2536. | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2537. | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 648.938.700 | | 640.451.295 | 100 | 98,69 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2538. | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 138.601.500 | | 138.493.360 | 100 | 99,92 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2539. | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | 163.882.750 | | 163.882.750 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen ) | 16 | | 16 | | 100 | 0 | |
| 2540. | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 66.855.350 | | 65.941.950 | 69 | 98,63 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 200 | | 138 | | 69 | 0 | |
| 2541. | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 196.003.300 | | 182.596.218 | 100 | 93,16 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2542. | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 196.003.300 | | 182.596.218 | 100 | 93,16 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 265 | | 265 | | 100 | 0 | |
| | | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2543. | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 295.042.500 | | 262.597.600 | 100 | 89 | |
| | | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2544. | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | 31.406.700 | | 31.406.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 2545. | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 135.578.600 | | 132.731.700 | 100 | 97,9 | |
| | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 46 | | 46 | | 100 | 0 | |
| 2546. | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | 92.722.800 | | 89.429.800 | 100 | 96,45 | |
| | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2547. | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | 10.686.400 | | 5.006.400 | 100 | 46,85 | |
| | | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2548. | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 24.648.000 | | 4.023.000 | 100 | 16,32 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 48 | | 48 | | 100 | 0 | |
| 2549. | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 333.499.158.995 | | 333.499.158.995 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2550. | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | 332.259.158.995 | | 332.259.158.995 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) | 70 | | 70 | | 100 | 0 | |
| 2551. | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 1.240.000.000 | | 1.240.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **2552.** | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | **408.945.100** | | **491.551.971** | **76,56** | **120,2** | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (persen) | 85 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2553. | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 408.945.100 | | 491.551.971 | 76,56 | 120,2 | |
| | | persentase penambahan nilai aset daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2554. | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | 124.650.200 | | 15.831.500 | 0 | 12,7 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2555. | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 17.995.000 | | 17.995.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2556. | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 24.353.000 | | 22.598.900 | 100 | 92,8 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 48 | | 48 | | 100 | 0 | |
| 2557. | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 41.373.400 | | 39.815.970 | 100 | 96,24 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2558. | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 76.177.300 | | 71.507.900 | 100 | 93,87 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2559. | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 33.104.000 | | 30.266.300 | 100 | 91,43 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2560. | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 52.722.000 | | 36.449.000 | 100 | 69,13 | |
| | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2561. | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 38.570.200 | | 257.087.401 | 12,5 | 666,54 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan) | 8 | | 1 | | 12,5 | 0 | |
| **2562.** | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **929.954.780** | | **779.176.314** | **100** | **83,79** | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Upaya eksistensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan | Persentase Peningkatan PAD (persen) | 8 | | 16,79 | | 209,88 | 0 | |
| | | | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2563. | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 929.954.780 | | 779.176.314 | 100 | 83,79 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan PAD | | | | | | 0 | 0 | |
| 2564. | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | 43.325.900 | | 39.570.200 | 100 | 91,33 | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2565. | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | 87.337.480 | | 81.767.886 | 100 | 93,62 | |
| | | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2566. | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | 49.426.700 | | 49.426.700 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2567. | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | 268.748.880 | | 239.790.238 | 100 | 89,22 | |
| | | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2568. | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | 155.287.100 | | 89.160.500 | 100 | 57,42 | |
| | | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) | 64000 | | 64.000 | | 100 | 0 | |
| 2569. | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | 93.510.570 | | 91.891.407 | 100 | 98,27 | |
| | | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 2570. | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | 32.177.300 | | 31.542.273 | 100 | 98,03 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 2571. | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | 100.110.900 | | 62.947.600 | 100 | 62,88 | |
| | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2572. | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | 100.029.950 | | 93.079.510 | 100 | 93,05 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | **6.281.666.907** | | **5.473.887.883** | **228,84** | **87,14** | |
| **2573.** | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.138.823.857** | | **4.585.400.369** | **232,64** | **89,23** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai LAKIP () | 86 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai LAKIP () | 86 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 2574. | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 88.856.100 | | 48.440.900 | 33,33 | 54,52 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 2575. | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 48.651.000 | | 48.440.900 | 100 | 99,57 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2576. | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2577. | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 40.205.100 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2578. | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2579. | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.693.728.127 | | 4.196.087.926 | 301,55 | 89,4 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 2580. | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 4.535.571.627 | | 4.040.343.426 | 279,66 | 89,08 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 59 | | 165 | | 279,66 | 0 | |
| 2581. | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 143.880.000 | | 142.680.000 | 300 | 99,17 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 8 | | 24 | | 300 | 0 | |
| 2582. | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 14.276.500 | | 13.064.500 | 325 | 91,51 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 13 | | 325 | 0 | |
| 2583. | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 8.330.500 | | 8.326.000 | 100 | 99,95 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2584. | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 8.330.500 | | 8.326.000 | 100 | 99,95 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2585. | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 35.504.500 | | 34.304.500 | 60 | 96,62 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2586. | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 35.504.500 | | 34.304.500 | 120 | 96,62 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 6 | | 120 | 0 | |
| 2587. | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 46 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2588. | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 143.088.200 | | 140.333.346 | 96,43 | 98,07 | |
| | | Terlaksannya Administrasi Umum BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | | | | | 0 | 0 | |
| 2589. | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 3.348.200 | | 3.300.700 | 100 | 98,58 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2590. | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 8.810.000 | | 8.204.800 | 100 | 93,13 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 42 | | 42 | | 100 | 0 | |
| 2591. | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 11.750.000 | | 9.850.000 | 100 | 83,83 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 2592. | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 119.180.000 | | 118.977.846 | 85,71 | 99,83 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 35 | | 30 | | 85,71 | 0 | |
| 2593. | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.230.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2594. | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2595. | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 6.230.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2596. | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 61.696.430 | | 58.063.750 | 1200 | 94,11 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2597. | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 35.999.830 | | 32.367.150 | 1200 | 89,91 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 36 | | 1200 | 0 | |
| 2598. | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 25.696.600 | | 25.696.600 | 1200 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 24 | | 1200 | 0 | |
| 2599. | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 101.390.000 | | 99.843.947 | 88,6 | 98,48 | |
| | | Terlaksananya Fasilatasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2600. | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 98.480.000 | | 98.153.947 | 166,67 | 99,67 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | | 5 | | 166,67 | 0 | |
| 2601. | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2.910.000 | | 1.690.000 | 10,53 | 58,08 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 19 | | 2 | | 10,53 | 0 | |
| **2602.** | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | **1.142.843.050** | | **888.487.514** | **222,6** | **77,74** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah (Jabatan) | 450 | | 450 | | 100 | 0 | |
| | | | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) | | | 85 | | 0 | 0 | |
| 2603. | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 141.326.900 | | 140.407.155 | 181,2 | 99,35 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian ASN, dan Tersedianya Informasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2604. | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | 67.359.700 | | 67.253.350 | 456 | 99,84 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 200 | | 912 | | 456 | 0 | |
| 2605. | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | 26.923.600 | | 26.732.200 | 87,6 | 99,29 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | 250 | | 219 | | 87,6 | 0 | |
| 2606. | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 47.043.600 | | 46.421.605 | 0 | 98,68 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karier ASN | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) | | | 11,28 | | 0 | 0 | |
| 2607. | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | 833.525.250 | | 669.471.216 | 509,74 | 80,32 | |
| | | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya. | | | | | | 0 | 0 | |
| 2608. | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | 22.405.500 | | 22.311.500 | 164 | 99,58 | |
| | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 50 | | 82 | | 164 | 0 | |
| 2609. | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | 22.868.300 | | 22.835.600 | 25,22 | 99,86 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 2550 | | 643 | | 25,22 | 0 | |
| 2610. | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | 788.251.450 | | 624.324.116 | 1340 | 79,2 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | 5 | | 67 | | 1340 | 0 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | | | 79,9 | | 0 | 0 | |
| 2611. | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 83.012.700 | | 55.295.119 | 93,96 | 66,61 | |
| | | Persentase ASN dengan Nillai SKP Baik | | | | | | 0 | 0 | |
| 2612. | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 19.561.200 | | 17.729.769 | 100 | 90,64 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2613. | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | 40.401.200 | | 18.449.000 | 8,33 | 45,66 | |
| | | Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 600 | | 50 | | 8,33 | 0 | |
| 2614. | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | 13.261.050 | | 10.469.100 | 180 | 78,95 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan) | 5 | | 9 | | 180 | 0 | |
| 2615. | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | 9.789.250 | | 8.647.250 | 87,5 | 88,33 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen) | 8 | | 7 | | 87,5 | 0 | |
| | | Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | | | 38,6 | | 0 | 0 | |
| 2616. | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | 84.978.200 | | 23.314.024 | 0 | 27,44 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | 0 | 0 | |
| 2617. | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | 84.978.200 | | 23.314.024 | 0 | 27,44 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **2.527.829.908** | | **2.377.242.190** | **34,32** | **94,04** | |
| **2618.** | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | **2.527.829.908** | | **2.377.242.190** | **34,32** | **94,04** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar,kader,manajerial dan fungsional | Jumlah ASN yang Mengikuti Perjenjangan Struktural dan Formal yang Berkualitas (Orang) | 2 | | 567 | | 28350 | 0 | |
| | | | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) | | | 86 | | 0 | 0 | |
| 2619. | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 2.520.268.108 | | 2.371.299.890 | 68,64 | 94,09 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dasar bagi CASN daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2620. | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta | | | 2.520.268.108 | | 2.371.299.890 | 68,64 | 94,09 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen) | 826 | | 567 | | 68,64 | 0 | |
| | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) | | | 0,02 | | 0 | 0 | |
| 2621. | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 7.561.800 | | 5.942.300 | 0 | 78,58 | |
| | | Terlaksananya Kompetensi Teknis ASN | | | | | | 0 | 0 | |
| 2622. | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 7.561.800 | | 5.942.300 | 0 | 78,58 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **441.580.900** | | **424.088.863** | **66,67** | **96,04** | |
| **2623.** | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | **441.580.900** | | **424.088.863** | **66,67** | **96,04** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan | Peningkatan Hasil riset daerah (Angka) | 88 | | 88 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | | | | | | | | |
| | | | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2624. | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2625. | 5.05.02.2.01.0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2626. | 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2627. | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2628. | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 151.844.400 | | 149.056.400 | 100 | 98,16 | |
| | | Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2629. | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | 151.844.400 | | 149.056.400 | 100 | 98,16 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2630. | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 148.001.300 | | 147.581.740 | 100 | 99,72 | |
| | | Meningkatkan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2631. | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | 148.001.300 | | 147.581.740 | 100 | 99,72 | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2632. | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 141.735.200 | | 127.450.723 | 100 | 89,92 | |
| | | Meningkatkan pengembangan inovasi dan teknologi | | | | | | 0 | 0 | |
| 2633. | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | 70.273.900 | | 63.440.423 | 100 | 90,28 | |
| | | Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2634. | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | 71.461.300 | | 64.010.300 | 100 | 89,57 | |
| | | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2635. | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2636.** | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | - | | - | **0** | **0** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2637. | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatkan Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2638. | 5.05.03.2.02.0009 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **10.233.279.422** | | **10.135.898.922** | **90,89** | **99,05** | |
| **2639.** | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **9.580.763.572** | | **9.483.783.072** | **76,67** | **98,99** | Inspektorat |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai IKM (-) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 2640. | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.368.600 | | 8.368.100 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran | | | | | | 0 | 0 | |
| 2641. | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3.046.700 | | 3.046.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 2642. | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 2.840.500 | | 2.840.000 | 100 | 99,98 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 2643. | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 2.481.400 | | 2.481.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2644. | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.895.027.207 | | 8.895.027.207 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen Adm. Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2645. | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 8.765.967.407 | | 8.765.967.407 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 46 | | 46 | | 100 | 0 | |
| 2646. | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 126.280.000 | | 126.280.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2647. | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 2.779.800 | | 2.779.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 2648. | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2649. | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2650. | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 63.365.000 | | 63.365.000 | 33,33 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2651. | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2652. | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2653. | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 63.365.000 | | 63.365.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 2654. | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 433.044.165 | | 433.044.165 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Kegiatan Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2655. | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.599.100 | | 1.599.100 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2656. | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 94.696.275 | | 94.696.275 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| 2657. | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 54.804.800 | | 54.804.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 31 | | 31 | | 100 | 0 | |
| 2658. | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 41.773.990 | | 41.773.990 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2659. | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 240.170.000 | | 240.170.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 45 | | 45 | | 100 | 0 | |
| 2660. | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2661. | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2662. | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2663. | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2664. | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 80.778.600 | | 80.778.600 | 116,67 | 100 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2665. | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 15.620.000 | | 15.620.000 | 133,33 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 4 | | 133,33 | 0 | |
| 2666. | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 65.158.600 | | 65.158.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2667. | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 96.980.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan barang milik kantor | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2668. | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2669. | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 96.980.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2670. | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2671. | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2672.** | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | **540.691.750** | | **540.291.750** | **114,29** | **99,93** | Inspektorat |
| | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Kapabilitas APIP (3) | 60 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan (%) | 80 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) | | | | | 0 | 0 | |
| 2673. | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 416.782.450 | | 416.382.450 | 118,37 | 99,9 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Internal | | | | | | 0 | 0 | |
| 2674. | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 29.611.700 | | 29.611.700 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2675. | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 55.298.900 | | 55.298.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| 2676. | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | 31.588.900 | | 31.588.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 8 | | 8 | | 100 | 0 | |
| 2677. | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | 23.759.900 | | 23.359.900 | 228,57 | 98,32 | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 7 | | 16 | | 228,57 | 0 | |
| 2678. | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | 174.059.900 | | 174.059.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan) | 285 | | 285 | | 100 | 0 | |
| 2679. | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | 38.850.000 | | 38.850.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2680. | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | 63.613.150 | | 63.613.150 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen ) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 2681. | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 123.909.300 | | 123.909.300 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 0 | 0 | |
| 2682. | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | 25.927.300 | | 25.927.300 | 100 | 100 | |
| | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2683. | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 97.982.000 | | 97.982.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| **2684.** | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | **111.824.100** | | **111.824.100** | **127,78** | **100** | Inspektorat |
| | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci (Level) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase Indeks MCP (%) | 80 | | 78 | | 97,5 | 0 | |
| | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | | | | | 0 | 0 | |
| 2685. | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | 111.824.100 | | 111.824.100 | 127,78 | 100 | |
| | | Terlakananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | | | | | | 0 | 0 | |
| 2686. | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | 19.636.100 | | 19.636.100 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2687. | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | 92.188.000 | | 92.188.000 | 155,56 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 9 | | 14 | | 155,56 | 0 | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | **51.124.156.898** | | **44.654.727.041** | **76,47** | **87,35** | |
| **2688.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.103.383.450** | | **1.754.381.589** | **104,26** | **83,41** | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (undefined) | 3.51 | | 70 | | 1994,3 | 0 | |
| 2689. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 31.793.850 | | 31.793.850 | 75 | 100 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat | | | | | | 0 | 0 | |
| 2690. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 11.761.300 | | 11.761.300 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 2691. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.017.650 | | 10.017.650 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2692. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2693. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 10.014.900 | | 10.014.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2694. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2695. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.954.706.100 | | 1.608.456.849 | 395,56 | 82,29 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2696. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.842.438.200 | | 1.496.188.949 | 120 | 81,21 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | | 18 | | 120 | 0 | |
| 2697. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 102.600.000 | | 102.600.000 | 400 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 3 | | 12 | | 400 | 0 | |
| 2698. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 9.667.900 | | 9.667.900 | 666,67 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3 | | 20 | | 666,67 | 0 | |
| 2699. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.824.400 | | 1.824.000 | 100 | 99,98 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat | | | | | | 0 | 0 | |
| 2700. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.824.400 | | 1.824.000 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2701. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2702. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2703. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2704. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 48.185.300 | | 46.184.420 | 50,71 | 95,85 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2705. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.725.600 | | 285.600 | 0 | 16,55 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2706. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 9.965.700 | | 9.964.600 | 2,86 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 35 | | 1 | | 2,86 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2707. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 2.100.000 | | 2.080.000 | 100 | 99,05 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2708. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 34.394.000 | | 33.854.220 | 100 | 98,43 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 2709. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 11.582.900 | | 11.102.900 | 25 | 95,86 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2710. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2711. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2712. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 11.582.900 | | 11.102.900 | 50 | 95,86 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 2 | | 50 | 0 | |
| 2713. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 27.822.900 | | 27.623.800 | 116,67 | 99,28 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2714. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.622.400 | | 1.428.200 | 100 | 88,03 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2715. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 26.200.500 | | 26.195.600 | 133,33 | 99,98 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 4 | | 133,33 | 0 | |
| 2716. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 27.468.000 | | 27.395.770 | 38,89 | 99,74 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2717. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 23.240.000 | | 23.195.770 | 100 | 99,81 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2718. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 4.228.000 | | 4.200.000 | 16,67 | 99,34 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | | 1 | | 16,67 | 0 | |
| 2719. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2720.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **679.385.700** | | **614.856.940** | **61,11** | **90,5** | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | 3.51 | | 100 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 2721. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 22.385.700 | | 22.385.700 | 150 | 100 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2722. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2723. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 22.385.700 | | 22.385.700 | 150 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |
| 2724. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 657.000.000 | | 592.471.240 | 16,67 | 90,18 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2725. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2726. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2727. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 657.000.000 | | 592.471.240 | 33,33 | 90,18 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 3 | | 1 | | 33,33 | 0 | |
| **2728.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **23.251.100** | | **21.836.000** | **40** | **93,91** | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indek Kepuasan Masyarakat (undefined) | 3.51 | | 3.51 | | 100 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| 2729. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 23.251.100 | | 21.836.000 | 40 | 93,91 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2730. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 23.251.100 | | 21.836.000 | 40 | 93,91 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 2 | | 40 | 0 | |
| **2731.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **70.803.700** | | **70.503.100** | **100** | **99,58** | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat (undefined) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2732. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 70.803.700 | | 70.503.100 | 100 | 99,58 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2733. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 23.240.000 | | 23.239.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| 2734. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 47.563.700 | | 47.263.700 | 100 | 99,37 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **2735.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **80.059.300** | | **78.208.850** | **81,67** | **97,69** | Kecamatan Gunung Tujuh |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) () | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 2736. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 80.059.300 | | 78.208.850 | 81,67 | 97,69 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2737. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 9.309.600 | | 9.309.600 | 40 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 5 | | 2 | | 40 | 0 | |
| 2738. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2739. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 6.850.200 | | 6.820.400 | 100 | 99,56 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2740. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 6.129.500 | | 6.129.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2741. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 52.694.400 | | 50.874.250 | 150 | 96,55 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |
| 2742. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 5.075.600 | | 5.075.100 | 100 | 99,99 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **2743.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **1.930.792.300** | | **1.949.561.954** | **44,72** | **100,97** | Kecamatan Kayu Aro |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP () | BAIK | | 70 | | 0 | 0 | |
| 2744. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 21.301.900 | | 44.576.600 | 25,71 | 209,26 | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2745. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 5.537.400 | | 8.434.600 | 28,57 | 152,32 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 2 | | 28,57 | 0 | |
| 2746. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 5.121.900 | | 30.519.000 | 0 | 595,85 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2747. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2748. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 5.616.600 | | 2.100.000 | 0 | 37,39 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2749. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2750. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 5.026.000 | | 3.523.000 | 100 | 70,1 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2751. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2752. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.743.733.200 | | 1.742.993.200 | 66,67 | 99,96 | |
| | | jumlah laporan keuangan yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 2753. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.635.043.200 | | 1.635.043.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 2754. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 104.340.000 | | 103.600.000 | 0 | 99,29 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2755. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2756. | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2757. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | |
| 2758. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 4.350.000 | | 4.350.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 2759. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.754.200 | | 4.754.200 | 100 | 100 | |
| | | jumlah dokumen Administrasi Barang milik daerah yang berhasil disususn | | | | | | 0 | 0 | |
| 2760. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | jumlah dokumen Administrasi Barang milik daerah yang berhasil disususn | | | | | | 0 | 0 | |
| 2761. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2762. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4.754.200 | | 4.754.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2763. | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2764. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2765. | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2766. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2767. | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2768. | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2769. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2770. | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2771. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 61.885.500 | | 69.865.500 | 60 | 112,89 | |
| | | persentase tingkat keterpenuhannya layanan administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 2772. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.548.500 | | 2.548.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2773. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2774. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2775. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 7.107.000 | | 7.107.000 | 0 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2776. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.750.000 | | 5.250.000 | 100 | 77,78 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2777. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2778. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2779. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 45.480.000 | | 54.960.000 | 100 | 120,84 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 2780. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 12.206.100 | | - | 0 | 0 | |
| | | persentase pengadaan barang milik daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2781. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2782. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2783. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2784. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2785. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2786. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2787. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 12.206.100 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2788. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 35.565.700 | | 36.026.754 | 100 | 101,3 | |
| | | penyediaan jasa penunjang urusan pemrintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2789. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2790. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 6.618.500 | | 10.017.754 | 100 | 151,36 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2791. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2792. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 28.947.200 | | 26.009.000 | 100 | 89,85 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2793. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 51.345.700 | | 51.345.700 | 33,33 | 100 | |
| | | jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemmerintah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2794. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 46.480.000 | | 46.480.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2795. | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2796. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 4.865.700 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2797. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | 4.865.700 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 1 | | 0 | 0 | |
| 2798. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **2799.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **67.199.600** | | **39.273.900** | **29,17** | **58,44** | Kecamatan Kayu Aro |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (%) | 100 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 2800. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 62.199.800 | | 39.273.900 | 58,33 | 63,14 | |
| | | jumlah desa yang menyelenggarakan kepada pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2801. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 49.999.800 | | 31.447.300 | 16,67 | 62,89 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 6 | | 1 | | 16,67 | 0 | |
| 2802. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 12.200.000 | | 7.826.600 | 100 | 64,15 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2803. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 4.999.800 | | - | 0 | 0 | |
| | | jumlah layanan yang terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 2804. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 4.999.800 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2805. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2806.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **7.999.900** | | **7.999.900** | **66,67** | **100** | Kecamatan Kayu Aro |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Desa (Indeks) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 2807. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.999.900 | | 7.999.900 | 66,67 | 100 | |
| | | jumlah dokumnen | | | | | | 0 | 0 | |
| 2808. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2809. | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2810. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 7.999.900 | | 7.999.900 | 66,67 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| **2811.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **62.849.800** | | **62.849.800** | **0,67** | **100** | Kecamatan Kayu Aro |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 7.500 | | 0 | 0 | |
| 2812. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 62.849.800 | | 62.849.800 | 0,67 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2813. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 32.800.000 | | 32.800.000 | 0,33 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 300 | | 1 | | 0,33 | 0 | |
| 2814. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 30.049.800 | | 30.049.800 | 1 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 200 | | 2 | | 1 | 0 | |
| **2815.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **33.489.700** | | **22.408.300** | **41,67** | **66,91** | Kecamatan Kayu Aro |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 7.500 | | 0 | 0 | |
| 2816. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 33.489.700 | | 22.408.300 | 41,67 | 66,91 | |
| | | jumlah dokumen | | | | | | 0 | 0 | |
| 2817. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 5.728.800 | | 4.388.100 | 100 | 76,6 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 21 | | 21 | | 100 | 0 | |
| 2818. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 13.000.200 | | 13.000.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | | terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2819. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2820. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 1.095.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 21 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2821. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2822. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 13.665.400 | | 5.020.000 | 50 | 36,74 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| **2823.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.211.331.870** | | **1.741.760.377** | **64,14** | **78,77** | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2824. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 19.633.400 | | 19.201.600 | 79,05 | 97,8 | |
| | | tersussunya dokumen perncanaan penggaaran dan evalusasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2825. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 6.784.900 | | 6.701.400 | 100 | 98,77 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2826. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 3.853.500 | | 3.853.500 | 20 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 10 | | 2 | | 20 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 2827. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 1.848.900 | | 1.650.600 | 100 | 89,27 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2828. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.329.700 | | 3.329.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2829. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 1.650.000 | | 1.500.000 | 100 | 90,91 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2830. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 2.166.400 | | 2.166.400 | 133,33 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 | | 4 | | 133,33 | 0 | |
| 2831. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2832. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.059.836.370 | | 1.600.763.977 | 110,53 | 77,71 | |
| | | Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2833. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.955.726.370 | | 1.498.303.977 | 121,05 | 76,61 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | | 23 | | 121,05 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2834. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 104.110.000 | | 102.460.000 | 100 | 98,42 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2835. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2836. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2837. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.930.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | tersedianyan administrasi barang milik daerah pada perangkat milik daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2838. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2839. | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2840. | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2841. | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2842. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2843. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4.930.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2844. | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2845. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | tersusunyakepegawaian daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2846. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2847. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2848. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 50.792.000 | | 47.463.100 | 60 | 93,45 | |
| | | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2849. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.578.900 | | 2.000.000 | 100 | 77,55 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2850. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2851. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 5.569.600 | | 5.569.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2852. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 1.566.700 | | 816.700 | 100 | 52,13 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2853. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2854. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2855. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 41.076.800 | | 39.076.800 | 0 | 95,13 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2856. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2857. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2858. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2859. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2860. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2861. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 34.160.100 | | 32.351.700 | 54,17 | 94,71 | |
| | | tersedianyan jasa penunjang urusan pemerintah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2862. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2863. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 8.417.500 | | 7.151.700 | 100 | 84,96 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2864. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2865. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 25.742.600 | | 25.200.000 | 8,33 | 97,89 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 1 | | 8,33 | 0 | |
| 2866. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 41.980.000 | | 41.980.000 | 100 | 100 | |
| | | terlaksanaanya pemiliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2867. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 41.980.000 | | 41.980.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2868. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2869. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2870. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2871.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **77.538.260** | | **76.121.200** | **100** | **98,17** | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 85 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2872. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 77.538.260 | | 76.121.200 | 100 | 98,17 | |
| | | tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2873. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 50.000.000 | | 48.733.200 | 100 | 97,47 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | |
| 2874. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 27.538.260 | | 27.388.000 | 100 | 99,45 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2875. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2876. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2877. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2878.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **17.132.000** | | **17.132.000** | **150** | **100** | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indek Kepuasan masyarakat (B) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| 2879. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 17.132.000 | | 17.132.000 | 150 | 100 | |
| | | tersedianya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2880. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 17.132.000 | | 17.132.000 | 150 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2881. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | terlaksanaya lembaga kemasyrakatan di tingkat kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2882. | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2883.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **74.280.946** | | **70.274.696** | **100** | **94,61** | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 2884. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 74.280.946 | | 70.274.696 | 100 | 94,61 | |
| | | tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2885. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 37.635.831 | | 35.879.581 | 100 | 95,33 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 2886. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 36.645.115 | | 34.395.115 | 100 | 93,86 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **2887.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **39.160.800** | | **35.010.900** | **79,23** | **89,4** | Kecamatan Kayu Aro Barat |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2888. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 39.160.800 | | 35.010.900 | 79,23 | 89,4 | |
| | | meningkat fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2889. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | 2.400.000 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | meningkatnya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2890. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 6.518.500 | | 1.579.700 | 100 | 24,23 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2891. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 12.890.000 | | 12.890.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2892. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 9.664.700 | | 9.664.700 | 96,15 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 26 | | 25 | | 96,15 | 0 | |
| 2893. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 3.075.000 | | 1.570.500 | 0 | 51,07 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2894. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 7.012.600 | | 6.906.000 | 100 | 98,48 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **2895.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.920.271.800** | | **2.444.772.732** | **63,64** | **83,72** | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2896. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 24.335.800 | | 24.280.800 | 75 | 99,77 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2897. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 8.829.600 | | 8.829.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2898. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 9.789.700 | | 9.734.700 | 100 | 99,44 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2899. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2900. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 5.716.500 | | 5.716.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2901. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2902. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2903. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2904. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.757.299.190 | | 2.283.330.529 | 100 | 82,81 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2905. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.602.148.090 | | 2.128.429.429 | 100 | 81,8 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | | 19 | | 100 | 0 | |
| 2906. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 147.140.000 | | 146.890.000 | 100 | 99,83 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2907. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2908. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 8.011.100 | | 8.011.100 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2909. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.974.800 | | 3.974.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2910. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2911. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 3.974.800 | | 3.974.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2912. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2913. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 18 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2914. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2915. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 62.489.300 | | 62.482.900 | 80 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2916. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.511.300 | | 1.504.900 | 100 | 99,58 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2917. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2918. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 5.655.000 | | 5.655.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2919. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.525.000 | | 6.525.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2920. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2921. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 48.798.000 | | 48.798.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 2922. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2923. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2924. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2925. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2926. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2927. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 44.061.910 | | 42.592.903 | 100 | 96,67 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2928. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2929. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 11.944.410 | | 10.475.403 | 100 | 87,7 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2930. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2931. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 32.117.500 | | 32.117.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 2932. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 28.110.800 | | 28.110.800 | 33,33 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2933. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 28.110.800 | | 28.110.800 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2934. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2935. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2936. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2937.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **62.834.800** | | **55.834.327** | **50** | **88,86** | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai Akip () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2938. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 62.834.800 | | 55.834.327 | 100 | 88,86 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Penyelaranggaan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2939. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 50.000.000 | | 42.999.527 | 100 | 86 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2940. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 12.834.800 | | 12.834.800 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2941. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 0 | 0 | |
| 2942. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2943. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2944.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **305.650.168** | | **264.767.600** | **80** | **86,62** | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,66 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2945. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 5.650.000 | | 5.650.000 | 50 | 100 | |
| | | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2946. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2947. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 5.650.000 | | 5.650.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 2948. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 300.000.168 | | 259.117.600 | 100 | 86,37 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2949. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 115.886.568 | | 115.638.800 | 100 | 99,79 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2950. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 145.166.300 | | 115.367.500 | 100 | 79,47 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 2951. | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | 38.947.300 | | 28.111.300 | 100 | 72,18 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **2952.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **28.039.800** | | **28.039.800** | **100** | **100** | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2953. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 28.039.800 | | 28.039.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2954. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 6.530.000 | | 6.530.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2955. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 21.509.800 | | 21.509.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 40 | | 40 | | 100 | 0 | |
| **2956.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **34.708.700** | | **34.448.000** | **83,33** | **99,25** | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2957. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 34.708.700 | | 34.448.000 | 83,33 | 99,25 | |
| | | Meningkatnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 2958. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 8.376.800 | | 8.116.100 | 100 | 96,89 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2959. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2960. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 10.250.000 | | 10.250.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2961. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 8.005.900 | | 8.005.900 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2962. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 1.925.000 | | 1.925.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2963. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 6.151.000 | | 6.151.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **2964.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.744.659.903** | | **2.434.009.370** | **70,5** | **88,68** | Kecamatan Siulak |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 2965. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 25.609.100 | | 25.606.100 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2966. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 13.668.500 | | 13.668.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2967. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 5.454.800 | | 5.454.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 2968. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 6.485.800 | | 6.482.800 | 100 | 99,95 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 2969. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2970. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.565.897.623 | | 2.261.292.736 | 101,52 | 88,13 | |
| | | tertibnya administrasi keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 2971. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.455.934.023 | | 2.152.159.136 | 104,55 | 87,63 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | | 23 | | 104,55 | 0 | |
| 2972. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 104.450.000 | | 103.620.000 | 100 | 99,21 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 2973. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.513.600 | | 5.513.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 2974. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.095.000 | | 2.095.000 | 50 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2975. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 2.095.000 | | 2.095.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 2 | | 50 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2976. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 2977. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2978. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2979. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 59.833.100 | | 59.833.100 | 76 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 2980. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 987.000 | | 987.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2981. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2982. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 3.574.100 | | 3.574.100 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2983. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2984. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 2985. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 49.772.000 | | 49.772.000 | 80 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 20 | | 80 | 0 | |
| 2986. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 9.067.100 | | 9.067.100 | 12,5 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2987. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2988. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 9.067.100 | | 9.067.100 | 25 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8 | | 2 | | 25 | 0 | |
| 2989. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 35.677.980 | | 29.635.334 | 90 | 83,06 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2990. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 12.493.680 | | 6.451.034 | 100 | 51,63 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 2991. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2992. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 23.184.300 | | 23.184.300 | 80 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 4 | | 80 | 0 | |
| 2993. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 46.480.000 | | 46.480.000 | 50 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 2994. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2995. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 46.480.000 | | 46.480.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 2996. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2997. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2998.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **10.159.460** | | **8.836.260** | **33,33** | **86,98** | Kecamatan Siulak |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 85 | | 0 | 0 | |
| 2999. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 8.836.260 | | 8.836.260 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3000. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3001. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 8.836.260 | | 8.836.260 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3002. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 1.323.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3003. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 1.323.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3004. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3005. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3006.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **29.385.900** | | **29.385.900** | **40** | **100** | Kecamatan Siulak |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| 3007. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 29.385.900 | | 29.385.900 | 40 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3008. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3009. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 29.385.900 | | 29.385.900 | 40 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 2 | | 40 | 0 | |
| 3010. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3011. | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3012.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **24.306.872** | | **24.306.872** | **125** | **100** | Kecamatan Siulak |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 3013. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 24.306.872 | | 24.306.872 | 125 | 100 | |
| | | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3014. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 3.314.572 | | 3.314.572 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3015. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 20.992.300 | | 20.992.300 | 150 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 100 | | 150 | | 150 | 0 | |
| **3016.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **99.965.400** | | **102.139.200** | **78,79** | **102,17** | Kecamatan Siulak |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 3017. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 99.965.400 | | 102.139.200 | 78,79 | 102,17 | |
| | | meningkatkan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penggawasan pemerintahan desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3018. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 8.100.700 | | 8.100.700 | 61,54 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 26 | | 16 | | 61,54 | 0 | |
| 3019. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 6.322.900 | | 6.322.900 | 150 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |
| 3020. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 9.757.600 | | 9.757.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3021. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 50.000.000 | | 49.886.000 | 40 | 99,77 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 5 | | 2 | | 40 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3022. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 10.312.800 | | 12.600.600 | 100 | 122,18 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3023. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3024. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 15.471.400 | | 15.471.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3025.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.163.198.656** | | **1.862.726.391** | **91,34** | **86,11** | Kecamatan Siulak Mukai |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | | | 0 | 0 | |
| 3026. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 18.785.900 | | 18.129.800 | 150 | 96,51 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3027. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 9.876.100 | | 9.543.200 | 250 | 96,63 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 5 | | 250 | 0 | |
| 3028. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 4.446.800 | | 4.446.800 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3029. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3030. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 4.463.000 | | 4.139.800 | 100 | 92,76 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3031. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3032. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3033. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3034. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.996.537.056 | | 1.697.330.265 | 131,35 | 85,01 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3035. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.887.823.256 | | 1.590.845.365 | 66,67 | 84,27 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 18 | | 12 | | 66,67 | 0 | |
| 3036. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 101.400.000 | | 99.200.000 | 41,67 | 97,83 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 5 | | 41,67 | 0 | |
| 3037. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3038. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 7.313.800 | | 7.284.900 | 285,71 | 99,6 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7 | | 20 | | 285,71 | 0 | |
| 3039. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.170.200 | | 1.113.100 | 100 | 95,12 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3040. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3041. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3042. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.170.200 | | 1.113.100 | 100 | 95,12 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3043. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3044. | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3045. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3046. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3047. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 67.675.300 | | 67.124.426 | 100 | 99,19 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3048. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 665.700 | | 665.100 | 100 | 99,91 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3049. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 7.903.300 | | 7.903.300 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3050. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 3.033.600 | | 3.033.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3051. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 56.072.700 | | 55.522.426 | 100 | 99,02 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3052. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3053. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3054. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3055. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3056. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3057. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 32.720.200 | | 32.718.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3058. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 4.275.200 | | 4.273.800 | 100 | 99,97 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3059. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 28.445.000 | | 28.445.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3060. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 46.310.000 | | 46.310.000 | 50 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3061. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 46.310.000 | | 46.310.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3062. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3063. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3064.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **11.539.800** | | **11.539.800** | **50** | **100** | Kecamatan Siulak Mukai |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| 3065. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.539.800 | | 11.539.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3066. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.539.800 | | 11.539.800 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3067. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3068. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3069. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3070.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **11.423.344** | | **8.623.344** | **100** | **75,49** | Kecamatan Siulak Mukai |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Jumlah Desa Mandiri (Desa) | | | 8.623.344 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3071. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 11.423.344 | | 8.623.344 | 100 | 75,49 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3072. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 11.423.344 | | 8.623.344 | 100 | 75,49 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3073. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | terlaksananya peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3074. | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3075.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **17.250.000** | | **16.800.000** | **80** | **97,39** | Kecamatan Siulak Mukai |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 16.800.000 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3076. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 17.250.000 | | 16.800.000 | 80 | 97,39 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3077. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 750.000 | | 300.000 | 100 | 40 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3078. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 16.500.000 | | 16.500.000 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 90 | | 60 | 0 | |
| **3079.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **100.226.900** | | **52.352.300** | **100** | **52,23** | Kecamatan Siulak Mukai |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 3080. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 100.226.900 | | 52.352.300 | 100 | 52,23 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3081. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 9.882.400 | | 4.065.400 | 100 | 41,14 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 3082. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 12.767.500 | | 12.627.800 | 100 | 98,91 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 3083. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3084. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 12.293.200 | | 12.293.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3085. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 9.283.800 | | 9.588.800 | 100 | 103,29 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 3086. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 8.591.100 | 100 | 17,18 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3087. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 6.000.000 | | 5.186.000 | 100 | 86,43 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3088.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.124.317.700** | | **2.368.224.264** | **68,07** | **75,8** | Kecamatan Air Hangat |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3089. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 21.314.000 | | 15.382.000 | 100 | 72,17 | |
| | | Jumlah Dokumen , Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3090. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3.995.000 | | 3.995.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 3091. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 11.702.300 | | 7.720.300 | 100 | 65,97 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3092. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 2.867.900 | | 1.667.900 | 100 | 58,16 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3093. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 2.748.800 | | 1.998.800 | 100 | 72,72 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3094. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3095. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.957.632.000 | | 2.240.410.790 | 105,67 | 75,75 | |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3096. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.855.506.000 | | 2.138.823.790 | 92 | 74,9 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | | 23 | | 92 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3097. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 99.600.000 | | 99.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3098. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 2.526.000 | | 1.987.000 | 125 | 78,66 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 16 | | 20 | | 125 | 0 | |
| 3099. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.715.500 | | 1.565.500 | 100 | 91,26 | |
| | | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3100. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.715.500 | | 1.565.500 | 100 | 91,26 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3101. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 12.000.000 | | 4.500.000 | 8,33 | 37,5 | |
| | | Jumlah Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 3102. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 25 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3103. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 12.000.000 | | 4.500.000 | 16,67 | 37,5 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 1 | | 16,67 | 0 | |
| 3104. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 51.194.100 | | 49.079.100 | 100 | 95,87 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3105. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 892.100 | | 892.100 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3106. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 3.652.000 | | 3.652.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3107. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.370.000 | | 5.000.000 | 100 | 78,49 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3108. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 40.280.000 | | 39.535.000 | 100 | 98,15 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3109. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 20.000.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3110. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 20.000.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3111. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 9 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3112. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3113. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3114. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3115. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 33.100.900 | | 30.964.974 | 66,67 | 93,55 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3116. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3117. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 5.980.900 | | 4.444.974 | 100 | 74,32 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3118. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 27.120.000 | | 26.520.000 | 100 | 97,79 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3119. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 27.361.200 | | 26.321.900 | 66,67 | 96,2 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3120. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 25.861.200 | | 24.821.900 | 100 | 95,98 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3121. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3122. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3123.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **29.912.400** | | **29.612.400** | **100** | **99** | Kecamatan Air Hangat |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 3124. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 29.912.400 | | 29.612.400 | 100 | 99 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3125. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 5.486.600 | | 5.186.600 | 100 | 94,53 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3126. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 24.425.800 | | 24.425.800 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3127. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3128. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3129. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3130.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **20.349.200** | | **18.390.500** | **50** | **90,37** | Kecamatan Air Hangat |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| 3131. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 20.349.200 | | 18.390.500 | 50 | 90,37 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3132. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3133. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 20.349.200 | | 18.390.500 | 100 | 90,37 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3134.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **40.883.100** | | **33.259.700** | **100** | **81,35** | Kecamatan Air Hangat |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 3135. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 40.883.100 | | 33.259.700 | 100 | 81,35 | |
| | | TerlaksananyaMeningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3136. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 15.957.300 | | 9.332.300 | 100 | 58,48 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3137. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 24.925.800 | | 23.927.400 | 100 | 95,99 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **3138.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **73.009.000** | | **60.056.400** | **100** | **82,26** | Kecamatan Air Hangat |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3139. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 73.009.000 | | 60.056.400 | 100 | 82,26 | |
| | | Terlaksananya Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan DEsa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3140. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 5.100.900 | | 4.480.300 | 100 | 87,83 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3141. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3142. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 5.715.000 | | 5.565.000 | 100 | 97,38 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3143. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 5.704.700 | | 3.004.700 | 100 | 52,67 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 3144. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 40.518.000 | 100 | 81,04 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3145. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 6.488.400 | | 6.488.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3146.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.682.740.900** | | **2.425.666.509** | **91,98** | **90,42** | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | IKM () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (.) | BAIK | | | | 0 | 0 | |
| 3147. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 38.379.000 | | 31.811.580 | 75 | 82,89 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3148. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 7.952.600 | | 7.952.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 3149. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 24.094.000 | | 11.194.180 | 25 | 46,46 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 12 | | 3 | | 25 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 3150. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | 6.332.400 | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 2 | | 0 | 0 | |
| 3151. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 6.332.400 | | 6.332.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3152. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3153. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3154. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3155. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.501.660.700 | | 2.252.858.689 | 93,33 | 90,05 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3156. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.396.449.700 | | 2.147.647.689 | 80 | 89,62 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | | 20 | | 80 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3157. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 99.600.000 | | 99.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3158. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3159. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3160. | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3161. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.611.000 | | 5.611.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3162. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3163. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.650.000 | | 1.650.000 | 25 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3164. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3165. | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3166. | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3167. | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3168. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3169. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.650.000 | | 1.650.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 3170. | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3171. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3172. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3173. | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3174. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3175. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 75.905.200 | | 75.800.240 | 170 | 99,86 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3176. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.847.500 | | 2.847.500 | 200 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 3177. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3178. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3179. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 16.107.400 | | 16.107.400 | 200 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 3180. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 11.000.000 | | 11.000.000 | 200 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 3181. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3182. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 45.950.300 | | 45.845.340 | 80 | 99,77 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 20 | | 80 | 0 | |
| 3183. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 18.527.000 | | 18.527.000 | 20 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3184. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3185. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3186. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3187. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 18.527.000 | | 18.527.000 | 20 | 100 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 2 | | 20 | 0 | |
| 3188. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 23.006.600 | | 21.406.600 | 58,33 | 93,05 | |
| | | Tersedianya JasaPenunjang Urusan Pemerintah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3189. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3190. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 9.490.000 | | 7.890.000 | 66,67 | 83,14 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| 3191. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3192. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 13.516.600 | | 13.516.600 | 50 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 3193. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 23.612.400 | | 23.612.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3194. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3195. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 23.612.400 | | 23.612.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3196. | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3197. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3198. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3199. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3200.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **119.642.200** | | **69.499.950** | **26,67** | **58,09** | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | IKM () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3201. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 14.100.000 | | 14.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Penye,enggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3202. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3203. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 14.100.000 | | 14.100.000 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3204. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 5.542.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3205. | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3206. | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3207. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 5.542.200 | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3208. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3209. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3210. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 100.000.000 | | 55.399.950 | 16,67 | 55,4 | |
| | | Terlsksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | | | | | | 0 | 0 | |
| 3211. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3212. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3213. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 100.000.000 | | 55.399.950 | 33,33 | 55,4 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 3 | | 1 | | 33,33 | 0 | |
| **3214.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **18.787.800** | | **18.695.800** | **200** | **99,51** | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| 3215. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 18.787.800 | | 18.695.800 | 200 | 99,51 | |
| | | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3216. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3217. | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3218. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 18.787.800 | | 18.695.800 | 200 | 99,51 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3219. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3220. | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3221. | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3222.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **44.773.300** | | **44.648.300** | **125** | **99,72** | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | IKM () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | | | 0 | 0 | |
| 3223. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 44.773.300 | | 44.648.300 | 125 | 99,72 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3224. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 14.125.000 | | 14.000.000 | 150 | 99,12 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 150 | | 150 | 0 | |
| 3225. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 30.648.300 | | 30.648.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **3226.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **69.614.900** | | **61.965.600** | **280** | **89,01** | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | IKM () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 3227. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 69.614.900 | | 61.965.600 | 280 | 89,01 | |
| | | Meningkatnya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3228. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3229. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | 625 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 4 | | 25 | | 625 | 0 | |
| 3230. | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3231. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3232. | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3233. | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3234. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 5.799.000 | | 5.799.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| | | Meningkatnya Sosialisasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3235. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 625 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 4 | | 25 | | 625 | 0 | |
| 3236. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 46.766.600 | 50 | 93,53 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 4 | | 2 | | 50 | 0 | |
| 3237. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 4.415.900 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3238.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **1.919.374.950** | | **2.322.677.526** | **119,91** | **121,01** | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Penilaian Sakip (.) | 86 | | 69 | | 80,23 | 0 | |
| 3239. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 18.679.600 | | 17.154.600 | 106,25 | 91,84 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3240. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 7.334.000 | | 7.184.000 | 125 | 97,95 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | | 5 | | 125 | 0 | |
| 3241. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 3.910.000 | | 3.460.000 | 100 | 88,49 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3242. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 4.401.600 | | 4.101.600 | 100 | 93,18 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3243. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 3.034.000 | | 2.409.000 | 100 | 79,4 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3244. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.744.856.000 | | 2.157.696.355 | 84,85 | 123,66 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3245. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.658.586.000 | | 2.071.208.355 | 100 | 124,88 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | | 14 | | 100 | 0 | |
| 3246. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 80.960.000 | | 79.210.000 | 54,55 | 97,84 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 11 | | 6 | | 54,55 | 0 | |
| 3247. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.310.000 | | 7.278.000 | 100 | 137,06 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3248. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.782.000 | | 4.632.000 | 66,67 | 96,86 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3249. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4.782.000 | | 4.632.000 | 66,67 | 96,86 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 2 | | 66,67 | 0 | |
| 3250. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3251. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3252. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3253. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 55.396.050 | | 53.199.720 | 436,25 | 96,04 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3254. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.497.400 | | 1.497.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3255. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 10.853.650 | | 10.817.400 | 1500 | 99,67 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 15 | | 1500 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3256. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.000.000 | | 3.840.000 | 100 | 64 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3257. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 37.045.000 | | 37.044.920 | 45 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 9 | | 45 | 0 | |
| 3258. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 15.372.800 | | 15.350.000 | 0 | 99,85 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3259. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3260. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 15.372.800 | | 15.350.000 | 0 | 99,85 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3261. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3262. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 38.308.500 | | 35.558.000 | 83,33 | 92,82 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3263. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 23.390.500 | | 20.640.000 | 150 | 88,24 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 3 | | 150 | 0 | |
| 3264. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 14.918.000 | | 14.918.000 | 16,67 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 2 | | 16,67 | 0 | |
| 3265. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 41.980.000 | | 39.086.851 | 25 | 93,11 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3266. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 41.980.000 | | 39.086.851 | 100 | 93,11 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3267. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3268. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3269. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3270.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **134.822.300** | | **94.508.300** | **75** | **70,1** | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 1 | | 0 | 0 | |
| 3271. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 34.822.300 | | 34.472.300 | 100 | 98,99 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelaranggaan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3272. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 2.854.500 | | 2.504.500 | 100 | 87,74 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3273. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 31.967.800 | | 31.967.800 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3274. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 100.000.000 | | 60.036.000 | 50 | 60,04 | |
| | | Jumlah Layanan Terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 3275. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3276. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 100.000.000 | | 60.036.000 | 100 | 60,04 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3277.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **7.882.000** | | **7.132.000** | **0** | **90,48** | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Desa (Indeks) | | | 1 | | 0 | 0 | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| 3278. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.882.000 | | 7.132.000 | 0 | 90,48 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3279. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 7.882.000 | | 7.132.000 | 0 | 90,48 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3280.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **18.590.000** | | **18.590.000** | **0** | **100** | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indek Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 3 | | 0 | 0 | |
| 3281. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 18.590.000 | | 18.590.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3282. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3283. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 18.590.000 | | 18.590.000 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3284.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **72.314.700** | | **56.657.200** | **68,33** | **78,35** | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 30 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat () | | | 30 | | 0 | 0 | |
| 3285. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 72.314.700 | | 56.657.200 | 68,33 | 78,35 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3286. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 3.444.000 | | 3.244.000 | 25 | 94,19 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 12 | | 3 | | 25 | 0 | |
| 3287. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3288. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 9.837.000 | | 9.237.000 | 16,67 | 93,9 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 12 | | 2 | | 16,67 | 0 | |
| 3289. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 5.572.000 | | 4.672.000 | 100 | 83,85 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3290. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 36.042.500 | 100 | 72,09 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3291. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 3.461.700 | | 3.461.700 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **3292.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.405.503.500** | | **2.132.749.045** | **63,53** | **88,66** | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3293. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 44.209.700 | | 44.209.700 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Dokumen , Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3294. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 17.821.700 | | 17.821.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 3295. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.114.200 | | 10.114.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3296. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 9.240.000 | | 9.240.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3297. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 7.033.800 | | 7.033.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3298. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3299. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.229.173.500 | | 1.968.227.945 | 96,08 | 88,29 | |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3300. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.118.647.000 | | 1.857.701.445 | 88,24 | 87,68 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 17 | | 15 | | 88,24 | 0 | |
| 3301. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 99.600.000 | | 99.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3302. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 10.926.500 | | 10.926.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3303. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.496.000 | | 3.496.000 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3304. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 3.496.000 | | 3.496.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3305. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 3306. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 17 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3307. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3308. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 52.938.600 | | 52.938.600 | 75 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3309. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3310. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 6.228.600 | | 6.228.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3311. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3312. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 43.110.000 | | 43.110.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3313. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 15.926.800 | | 4.627.500 | 25 | 29,05 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3314. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3315. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 4.627.500 | | 4.627.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 3316. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3317. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3318. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 11.299.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3319. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 38.395.300 | | 37.896.800 | 66,67 | 98,7 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3320. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3321. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 11.752.500 | | 11.254.800 | 100 | 95,77 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3322. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 26.642.800 | | 26.642.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3323. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 21.363.600 | | 21.352.500 | 50 | 99,95 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3324. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 21.363.600 | | 21.352.500 | 200 | 99,95 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0.5 | | 1 | | 200 | 0 | |
| 3325. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3326. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3327. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3328.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **11.253.500** | | **11.253.500** | **100** | **100** | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3329. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.253.500 | | 11.253.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3330. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 4.471.300 | | 4.471.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3331. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 6.782.200 | | 6.782.200 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3332. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3333. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3334. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3335.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **23.843.300** | | **23.843.300** | **100** | **100** | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3336. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 23.843.300 | | 23.843.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3337. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 23.843.300 | | 23.843.300 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| **3338.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **40.513.300** | | **40.513.300** | **100** | **100** | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 70 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3339. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 40.513.300 | | 40.513.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3340. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 15.293.900 | | 15.293.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3341. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 25.219.400 | | 25.219.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **3342.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **76.609.600** | | **64.576.800** | **100** | **84,29** | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 3343. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 76.609.600 | | 64.576.800 | 100 | 84,29 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3344. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 6.521.300 | | 6.521.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3345. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3346. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 6.347.200 | | 6.347.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3347. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.717.700 | | 7.717.700 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3348. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 37.967.200 | 100 | 75,93 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3349. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 6.023.400 | | 6.023.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3350.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.152.548.300** | | **2.605.474.834** | **97,1** | **82,65** | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3351. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.204.785 | | 8.084.560 | 135 | 98,53 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3352. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 2.664.825 | | 2.544.600 | 140 | 95,49 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 7 | | 140 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3353. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 1.504.630 | | 1.504.630 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3354. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 2.051.200 | | 2.051.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3355. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 1.984.130 | | 1.984.130 | 200 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | | 4 | | 200 | 0 | |
| 3356. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3357. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.985.724.685 | | 2.439.209.776 | 120 | 81,7 | |
| | | Tertibnya administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3358. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.883.837.301 | | 2.337.322.392 | 100 | 81,05 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | | 25 | | 100 | 0 | |
| 3359. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 99.900.000 | | 99.900.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3360. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 1.987.384 | | 1.987.384 | 160 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 10 | | 16 | | 160 | 0 | |
| 3361. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.073.430 | | 5.073.430 | 200 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3362. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.073.430 | | 5.073.430 | 200 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 3363. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 15.055.000 | | 15.000.000 | 16,67 | 99,63 | |
| | | Tertibnya administrasi kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 3364. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3365. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 15.055.000 | | 15.000.000 | 33,33 | 99,63 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 1 | | 33,33 | 0 | |
| 3366. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 63.002.200 | | 64.968.600 | 150 | 103,12 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3367. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.383.500 | | 2.383.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3368. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 5.016.700 | | 7.329.100 | 300 | 146,09 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 3 | | 300 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3369. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 5.550.000 | | 5.550.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3370. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 50.052.000 | | 49.706.000 | 100 | 99,31 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 3371. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3372. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3373. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3374. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3375. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3376. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 33.995.200 | | 31.704.468 | 100 | 93,26 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3377. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 7.832.000 | | 5.541.268 | 100 | 70,75 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3378. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 26.163.200 | | 26.163.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 3379. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 41.493.000 | | 41.434.000 | 100 | 99,86 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3380. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 37.480.000 | | 37.440.200 | 100 | 99,89 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3381. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.593.000 | | 1.593.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3382. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2.420.000 | | 2.400.800 | 100 | 99,21 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3383.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **122.107.600** | | **114.879.100** | **54,76** | **94,08** | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3384. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 20.534.300 | | 20.489.100 | 66,67 | 99,78 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3385. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 1.936.900 | | 1.891.700 | 100 | 97,67 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3386. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 18.597.400 | | 18.597.400 | 33,33 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 1 | | 33,33 | 0 | |
| 3387. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 101.573.300 | | 94.390.000 | 42,86 | 92,93 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3388. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 1.573.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3389. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3390. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 100.000.000 | | 94.390.000 | 85,71 | 94,39 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 14 | | 12 | | 85,71 | 0 | |
| **3391.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **2.593.600** | | **2.593.600** | **100** | **100** | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| 3392. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 2.593.600 | | 2.593.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3393. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 2.593.600 | | 2.593.600 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **3394.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **23.842.100** | | **23.840.300** | **100** | **99,99** | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 60 | | 0 | 0 | |
| 3395. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 23.842.100 | | 23.840.300 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3396. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 4.073.600 | | 4.073.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 15 | | 15 | | 100 | 0 | |
| 3397. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 19.768.500 | | 19.766.700 | 100 | 99,99 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| **3398.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **78.825.000** | | **78.445.300** | **140** | **99,52** | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3399. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 78.825.000 | | 78.445.300 | 140 | 99,52 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3400. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 2.028.300 | | 2.028.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3401. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 8.851.800 | | 8.851.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3402. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 14.672.800 | | 14.670.100 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3403. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 1.522.100 | | 1.522.100 | 300 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 3 | | 300 | 0 | |
| 3404. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 51.750.000 | | 51.373.000 | 100 | 99,27 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3405. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3406.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.852.314.145** | | **2.142.507.047** | **51,64** | **75,11** | Kecamatan Danau Kerinci |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3407. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 16.448.200 | | 16.030.314 | 81,25 | 97,46 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3408. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 5.367.400 | | 5.322.800 | 100 | 99,17 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 3409. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 6.109.200 | | 5.767.014 | 0 | 94,4 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3410. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.081.300 | | 3.059.000 | 100 | 99,28 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3411. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 1.890.300 | | 1.881.500 | 125 | 99,53 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 5 | | 125 | 0 | |
| 3412. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3413. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.697.937.765 | | 2.014.329.838 | 107,02 | 74,66 | |
| | | Jumlah Lapora Keuangan yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3414. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.586.073.465 | | 1.902.466.138 | 121,05 | 73,57 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | | 23 | | 121,05 | 0 | |
| 3415. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3416. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 11.864.300 | | 11.863.700 | 100 | 99,99 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 19 | | 19 | | 100 | 0 | |
| 3417. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.323.800 | | 5.322.400 | 100 | 99,97 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3418. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3419. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.323.800 | | 5.322.400 | 100 | 99,97 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3420. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 12.000.000 | | 11.025.000 | 50 | 91,88 | |
| | | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3421. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3422. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 12.000.000 | | 11.025.000 | 100 | 91,88 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3423. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 61.975.245 | | 61.964.895 | 66,67 | 99,98 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 3424. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 805.900 | | 802.050 | 100 | 99,52 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3425. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3426. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 10.433.900 | | 10.433.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3427. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 7.465.500 | | 7.459.000 | 100 | 99,91 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3428. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3429. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 43.269.945 | | 43.269.945 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3430. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3431. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3432. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3433. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3434. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3435. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 34.701.135 | | 33.834.600 | 66,67 | 97,5 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun: | | | | | | 0 | 0 | |
| 3436. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3437. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 8.793.035 | | 7.926.600 | 100 | 90,15 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3438. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 25.908.100 | | 25.908.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 3439. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 23.928.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah jenis peralatan yang dipelihara. | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3440. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 22.488.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3441. | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3442. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.440.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3443. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3444. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3445.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **24.660.300** | | **24.650.200** | **50** | **99,96** | Kecamatan Danau Kerinci |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3446. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 24.660.300 | | 24.650.200 | 100 | 99,96 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3447. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 3.450.000 | | 3.440.000 | 100 | 99,71 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3448. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 21.210.300 | | 21.210.200 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3449. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 3450. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3451. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3452.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **24.115.500** | | **20.992.060** | **100** | **87,05** | Kecamatan Danau Kerinci |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indek Kepuasan Masyarakat () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| 3453. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 24.115.500 | | 20.992.060 | 100 | 87,05 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3454. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 24.115.500 | | 20.992.060 | 100 | 87,05 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | |
| **3455.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **54.598.200** | | **54.557.900** | **100** | **99,93** | Kecamatan Danau Kerinci |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3456. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 54.598.200 | | 54.557.900 | 100 | 99,93 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3457. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 27.705.800 | | 27.665.500 | 100 | 99,85 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 200 | | 200 | | 100 | 0 | |
| 3458. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 26.892.400 | | 26.892.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **3459.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **73.898.100** | | **68.990.800** | **120** | **93,36** | Kecamatan Danau Kerinci |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3460. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 73.898.100 | | 68.990.800 | 120 | 93,36 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3461. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 3.437.900 | | 3.416.100 | 100 | 99,37 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3462. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3463. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 10.752.500 | | 10.752.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3464. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 6.033.800 | | 1.189.000 | 100 | 19,71 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 3465. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 49.960.000 | 200 | 99,92 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 3466. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 3.673.900 | | 3.673.200 | 100 | 99,98 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3467.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.544.777.620** | | **2.256.663.963** | **62,56** | **88,68** | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 60 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penilaian SAKIP (BB) | 80 | | | | 0 | 0 | |
| 3468. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 16.375.300 | | 15.798.300 | 77,5 | 96,48 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3469. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 4.289.500 | | 4.288.500 | 140 | 99,98 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 7 | | 140 | 0 | |
| 3470. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 9.225.900 | | 8.650.800 | 50 | 93,77 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 2 | | 50 | 0 | |
| 3471. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 100 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3472. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3473. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.859.900 | | 2.859.000 | 20 | 99,97 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 20 | 0 | |
| 3474. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.313.239.920 | | 2.102.277.853 | 109,66 | 90,88 | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3475. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.195.932.000 | | 1.985.066.453 | 95,65 | 90,4 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | | 22 | | 95,65 | 0 | |
| 3476. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 111.720.000 | | 111.720.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3477. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.587.920 | | 5.491.400 | 133,33 | 98,27 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 20 | | 133,33 | 0 | |
| 3478. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.790.000 | | 5.790.000 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3479. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.790.000 | | 5.790.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3480. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 3481. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3482. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3483. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 64.623.300 | | 63.416.010 | 100 | 98,13 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3484. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 12.525.400 | | 12.502.800 | 100 | 99,82 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3485. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 9.500.000 | | 9.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3486. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3487. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 41.097.900 | | 39.913.210 | 100 | 97,12 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3488. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3489. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3490. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3491. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3492. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3493. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 30.722.100 | | 30.401.800 | 66,67 | 98,96 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3494. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3495. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 9.967.500 | | 9.647.200 | 100 | 96,79 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3496. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 20.754.600 | | 20.754.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 24 | | 24 | | 100 | 0 | |
| 3497. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 114.027.000 | | 38.980.000 | 33,33 | 34,18 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3498. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 38.980.000 | | 38.980.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3499. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3500. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 75.047.000 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3501. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3502.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **17.471.400** | | **17.471.000** | **50** | **100** | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Penilaian SAKIP (Laporan/Dokumen) | 4 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 300 | | 0 | 0 | |
| 3503. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 17.471.400 | | 17.471.000 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3504. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 17.471.400 | | 17.471.000 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3505. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 3506. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3507. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3508. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3509.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **24.419.830** | | **24.336.500** | **100** | **99,66** | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (B) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 2,2 | | 0 | 0 | |
| 3510. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 24.419.830 | | 24.336.500 | 100 | 99,66 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3511. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 24.419.830 | | 24.336.500 | 100 | 99,66 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3512.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **58.841.400** | | **58.841.400** | **100** | **100** | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (B) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 60 | | 0 | 0 | |
| 3513. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 58.841.400 | | 58.841.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3514. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 29.913.000 | | 29.913.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 33 | | 33 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3515. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 28.928.400 | | 28.928.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 60 | | 60 | | 100 | 0 | |
| **3516.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **80.190.600** | | **78.781.400** | **100** | **98,24** | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (B) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3517. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 80.190.600 | | 78.781.400 | 100 | 98,24 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3518. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 5.244.000 | | 5.240.000 | 100 | 99,92 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3519. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3520. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 7.415.700 | | 6.815.700 | 100 | 91,91 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3521. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 10.096.300 | | 10.094.400 | 100 | 99,98 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3522. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 49.224.400 | 100 | 98,45 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3523. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 7.434.600 | | 7.406.900 | 100 | 99,63 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3524.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.656.844.120** | | **2.886.494.969** | **60** | **78,93** | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 3525. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 10.722.800 | | 10.722.800 | 60 | 100 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3526. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3.846.700 | | 3.846.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3527. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 3.419.900 | | 3.419.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3528. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.456.200 | | 3.456.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 3529. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3530. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3531. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.519.202.670 | | 2.750.436.110 | 100 | 78,16 | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3532. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3.382.572.170 | | 2.616.305.610 | 100 | 77,35 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 3533. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 131.840.000 | | 129.340.000 | 100 | 98,1 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 13 | | 13 | | 100 | 0 | |
| 3534. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 4.790.500 | | 4.790.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3535. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 10.036.400 | | 10.026.400 | 100 | 99,9 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3536. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 10.036.400 | | 10.026.400 | 100 | 99,9 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3537. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 3538. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 30 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3539. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3540. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 44.813.600 | | 44.418.581 | 80 | 99,12 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 3541. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.056.400 | | 1.056.400 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3542. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 5.172.500 | | 5.172.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3543. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 5.544.700 | | 5.544.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3544. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3545. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 33.040.000 | | 32.644.981 | 100 | 98,8 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3546. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Porsentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3547. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3548. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3549. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3550. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3551. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3552. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 37.153.800 | | 36.052.296 | 100 | 97,04 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3553. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 3.591.000 | | 2.489.496 | 100 | 69,33 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3554. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 33.562.800 | | 33.562.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3555. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 34.914.850 | | 34.838.782 | 66,67 | 99,78 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3556. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 26.754.850 | | 26.678.782 | 100 | 99,72 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3557. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 8.160.000 | | 8.160.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3558. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3559.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **11.088.800** | | **11.088.800** | **100** | **100** | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 3560. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 6.038.500 | | 6.038.500 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3561. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 6.038.500 | | 6.038.500 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3562. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 5.050.300 | | 5.050.300 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 3563. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 5.050.300 | | 5.050.300 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3564. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3565.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **330.433.449** | | **253.978.797** | **80** | **76,86** | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | 78,89 | | 0 | 0 | |
| 3566. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 19.626.300 | | 12.910.600 | 50 | 65,78 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3567. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 6.715.700 | | - | 0 | 0 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 78 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3568. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 12.910.600 | | 12.910.600 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3569. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 310.807.149 | | 241.068.197 | 100 | 77,56 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3570. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 105.735.819 | | 105.735.819 | 100 | 100 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3571. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 170.000.000 | | 101.996.500 | 100 | 60 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 4 | | 100 | 0 | |
| 3572. | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | 35.071.330 | | 33.335.878 | 100 | 95,05 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **3573.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **76.921.900** | | **76.921.900** | **100** | **100** | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| 3574. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 76.921.900 | | 76.921.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3575. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 32.740.900 | | 32.740.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3576. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 26.649.500 | | 26.649.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3577. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 17.531.500 | | 17.531.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| **3578.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **64.321.600** | | **63.678.900** | **100** | **99** | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 99 | | 0 | 0 | |
| 3579. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 64.321.600 | | 63.678.900 | 100 | 99 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3580. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3581. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 4.590.000 | | 3.990.000 | 100 | 86,93 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3582. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3583. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3584. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 3.946.600 | | 3.946.600 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3585. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 49.957.300 | 100 | 99,91 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3586. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 5.785.000 | | 5.785.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3587.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.207.962.350** | | **2.114.812.602** | **66,88** | **95,78** | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 60 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3588. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 13.725.000 | | 13.725.000 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3589. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 9.235.000 | | 9.235.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3590. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 4.490.000 | | 4.490.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3591. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3592. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3593. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.050.461.750 | | 2.010.413.002 | 60 | 98,05 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3594. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.978.611.750 | | 1.404.863.002 | 65 | 71 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | | 13 | | 65 | 0 | |
| 3595. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 60.300.000 | | 594.000.000 | 100 | 985,07 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3596. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 11.550.000 | | 11.550.000 | 15 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 20 | | 3 | | 15 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3597. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3598. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3599. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 3600. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3601. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3602. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 59.909.500 | | 59.908.500 | 160 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3603. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.187.500 | | 2.187.500 | 500 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 5 | | 500 | 0 | |
| 3604. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 27.582.000 | | 27.582.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3605. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.970.000 | | 6.970.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3606. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3607. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 23.170.000 | | 23.169.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3608. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 15.620.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3609. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3610. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3611. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3612. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 15.620.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3613. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 30.766.100 | | 30.766.100 | 141,67 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3614. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3615. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3616. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 30.766.100 | | 30.766.100 | 425 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 17 | | 425 | 0 | |
| 3617. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 37.480.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3618. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3619. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 37.480.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3620. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3621. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **3622.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **7.730.000** | | **7.605.000** | **11,11** | **98,38** | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 3623. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.730.000 | | 7.605.000 | 16,67 | 98,38 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3624. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3625. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.730.000 | | 7.605.000 | 33,33 | 98,38 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 1 | | 33,33 | 0 | |
| 3626. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan Kegiatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3627. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3628. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3629.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **12.495.000** | | **12.495.000** | **11,11** | **100** | Kecamatan Bukit Kerman |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Desa (Indeks) | | | 0,55 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3630. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 12.495.000 | | 12.495.000 | 11,11 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3631. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 12.495.000 | | 12.495.000 | 11,11 | 100 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 18 | | 2 | | 11,11 | 0 | |
| **3632.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **68.972.200** | | **68.972.200** | **100** | **100** | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks kerukunan sosial (Angka) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 3633. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 68.972.200 | | 68.972.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3634. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 34.491.200 | | 34.491.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3635. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 34.481.000 | | 34.481.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **3636.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **77.795.900** | | **74.795.900** | **75** | **96,14** | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 100 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3637. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 77.795.900 | | 74.795.900 | 75 | 96,14 | |
| | | Terlaksananya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3638. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 8.137.000 | | 8.137.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3639. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3640. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 19.658.900 | | 19.658.900 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 36 | | 36 | | 100 | 0 | |
| 3641. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3642. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 50.000.000 | | 47.000.000 | 100 | 94 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3643.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.092.330.700** | | **1.836.135.816** | **68,16** | **87,76** | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Nilai SAKIP (Baik) | 80 | | | | 0 | 0 | |
| 3644. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 10.550.000 | | 10.550.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3645. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 100 | 0 | |
| 3646. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3647. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.450.000 | | 3.450.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3648. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | |
| 3649. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3650. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.954.515.700 | | 1.739.169.355 | 175 | 88,98 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3651. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.844.953.000 | | 1.630.563.655 | 400 | 88,38 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | | 56 | | 400 | 0 | |
| 3652. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 104.880.000 | | 103.923.000 | 100 | 99,09 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 3653. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 4.682.700 | | 4.682.700 | 25 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 1 | | 25 | 0 | |
| 3654. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.098.100 | | 5.098.100 | 50 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3655. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.098.100 | | 5.098.100 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 3656. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersusunnya Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3657. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3658. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3659. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 65.164.400 | | 64.596.878 | 64 | 99,13 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3660. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.278.900 | | 1.278.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3661. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 14.437.800 | | 14.437.800 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3662. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 9.367.700 | | 9.367.700 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3663. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3664. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 40.080.000 | | 39.512.478 | 20 | 98,58 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 5 | | 20 | 0 | |
| 3665. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3666. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3667. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3668. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 19.522.500 | | 16.721.483 | 50 | 85,65 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3669. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 4.522.500 | | 1.721.483 | 50 | 38,06 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 3670. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 50 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| 3671. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 37.480.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3672. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3673. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 37.480.000 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3674. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3675.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **125.800.000** | | **78.110.717** | **100** | **62,09** | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| 3676. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 25.800.000 | | 25.800.000 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3677. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3678. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 22.900.000 | | 22.900.000 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3679. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 100.000.000 | | 52.310.717 | 100 | 52,31 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 3680. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 100.000.000 | | 52.310.717 | 100 | 52,31 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **3681.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **21.864.900** | | **21.864.900** | **50** | **100** | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| 3682. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 21.864.900 | | 21.864.900 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3683. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 21.864.900 | | 21.864.900 | 50 | 100 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| **3684.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **71.900.000** | | **71.900.000** | **100** | **100** | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (undefined) | BAIK | | | | 0 | 0 | |
| 3685. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 71.900.000 | | 71.900.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3686. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 28.175.000 | | 28.175.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3687. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 43.725.000 | | 43.725.000 | 100 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **3688.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **85.335.000** | | **60.985.000** | **66,67** | **71,47** | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) () | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 3689. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 85.335.000 | | 60.985.000 | 66,67 | 71,47 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3690. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3691. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3692. | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3693. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 12.350.000 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3694. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 10.110.000 | | 10.110.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 3695. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 50.000.000 | | 38.000.000 | 100 | 76 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3696. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 6.375.000 | | 6.375.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3697.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.427.176.900** | | **2.261.430.760** | **53,48** | **93,17** | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen) | 8 | | 8 | | 100 | 0 | |
| 3698. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 16.209.400 | | 10.432.600 | 66,67 | 64,36 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3699. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 4.791.100 | | 4.791.100 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3700. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 3.907.800 | | 3.260.000 | 100 | 83,42 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | |
| 3701. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 3.770.700 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3702. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 1.281.700 | | 1.204.700 | 100 | 93,99 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3703. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 1.281.300 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3704. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.176.800 | | 1.176.800 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3705. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.315.986.000 | | 2.159.310.882 | 98,25 | 93,24 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 3706. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.207.413.000 | | 2.053.361.482 | 94,74 | 93,02 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | | 18 | | 94,74 | 0 | |
| 3707. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 100.300.000 | | 99.230.000 | 100 | 98,93 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3708. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 8.273.000 | | 6.719.400 | 100 | 81,22 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3709. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.416.200 | | 5.416.200 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3710. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.416.200 | | 5.416.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3711. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3712. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 16 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3713. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3714. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 36.076.500 | | 34.332.578 | 64,44 | 95,17 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 3715. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 980.600 | | 980.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3716. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 2.733.900 | | 2.733.900 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3717. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 4.400.000 | | 4.400.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3718. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3719. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 27.962.000 | | 26.218.078 | 22,22 | 93,76 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 9 | | 2 | | 22,22 | 0 | |
| 3720. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun: | | | | | | 0 | 0 | |
| 3721. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3722. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3723. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3724. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3725. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 34.748.800 | | 33.807.950 | 60 | 97,29 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun: | | | | | | 0 | 0 | |
| 3726. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 3.409.000 | | 2.468.150 | 100 | 72,4 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3727. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 31.339.800 | | 31.339.800 | 20 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 20 | 0 | |
| 3728. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 18.740.000 | | 18.130.550 | 33,33 | 96,75 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3729. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 18.740.000 | | 18.130.550 | 100 | 96,75 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3730. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3731. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3732.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **22.099.700** | | **18.137.700** | **50** | **82,07** | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | 4.136.300 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3733. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 19.874.000 | | 16.720.000 | 50 | 84,13 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Penyelaranggaan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3734. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3735. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 19.874.000 | | 16.720.000 | 100 | 84,13 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3736. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 2.225.700 | | 1.417.700 | 50 | 63,7 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 0 | 0 | |
| 3737. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | 2.225.700 | | 1.417.700 | 100 | 63,7 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3738. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3739.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **11.020.000** | | **6.818.000** | **100** | **61,87** | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | Indeks Desa (Indeks) | | | 377.955.969 | | 0 | 0 | |
| 3740. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 11.020.000 | | 6.818.000 | 100 | 61,87 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3741. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 11.020.000 | | 6.818.000 | 100 | 61,87 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| **3742.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **52.122.800** | | **51.122.800** | **100** | **98,08** | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) | | | 345.664.496 | | 0 | 0 | |
| 3743. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 52.122.800 | | 51.122.800 | 100 | 98,08 | |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | | 0 | 0 | |
| 3744. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 27.435.300 | | 26.435.300 | 100 | 96,36 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| 3745. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 24.687.500 | | 24.687.500 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 50 | | 50 | | 100 | 0 | |
| **3746.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **84.301.900** | | **63.410.200** | **100** | **75,22** | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | 262,14 | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen) | 5 | | | | 0 | 0 | |
| 3747. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 84.301.900 | | 63.410.200 | 100 | 75,22 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3748. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 8.025.800 | | 7.838.400 | 100 | 97,67 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3749. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3750. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 12.805.400 | | 12.805.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3751. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 5.360.000 | | 5.270.000 | 100 | 98,32 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3752. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 5.573.200 | | 5.573.200 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3753. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 52.537.500 | | 31.923.200 | 100 | 60,76 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| **3754.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.055.642.100** | | **2.832.364.275** | **88,71** | **92,69** | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Dokumen) | 8 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3755. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 29.707.365 | | 29.707.365 | 133,33 | 100 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3756. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 8.181.765 | | 8.181.765 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3757. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 8.439.500 | | 8.439.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3758. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3759. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 6.599.600 | | 6.599.600 | 200 | 100 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 2 | | 200 | 0 | |
| 3760. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3761. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.486.500 | | 6.486.500 | 133,33 | 100 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | | 4 | | 133,33 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3762. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.889.337.605 | | 2.708.819.160 | 101,52 | 93,75 | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3763. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.766.560.405 | | 2.587.501.960 | 104,55 | 93,53 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | | 23 | | 104,55 | 0 | |
| 3764. | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 116.870.000 | | 115.410.000 | 100 | 98,75 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3765. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.907.200 | | 5.907.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 20 | | 20 | | 100 | 0 | |
| 3766. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 6.494.230 | | 6.494.230 | 50 | 100 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3767. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 6.494.230 | | 6.494.230 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 2 | | 50 | 0 | |
| 3768. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3769. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3770. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3771. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 49.027.900 | | 49.027.900 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 0 | 0 | |
| 3772. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 882.000 | | 882.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3773. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3774. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 8.288.500 | | 8.288.500 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3775. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 4.527.000 | | 4.527.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3776. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3777. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 35.330.400 | | 35.330.400 | 200 | 100 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 10 | | 20 | | 200 | 0 | |
| 3778. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3779. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3780. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3781. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3782. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3783. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 39.090.000 | | 38.315.620 | 237,5 | 98,02 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 0 | 0 | |
| 3784. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 10.390.000 | | 9.615.620 | 400 | 92,55 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 12 | | 400 | 0 | |
| 3785. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 28.700.000 | | 28.700.000 | 75 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 3 | | 75 | 0 | |
| 3786. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 41.985.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3787. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3788. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 37.716.500 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3789. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3790. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 4.268.500 | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3791.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **112.913.900** | | **30.333.200** | **100** | **26,86** | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3792. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 12.914.700 | | - | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3793. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 12.914.700 | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3794. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 99.999.200 | | 30.333.200 | 200 | 30,33 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3795. | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | | 0 | 0 | |
| 3796. | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3797. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 99.999.200 | | 30.333.200 | 200 | 30,33 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 6 | | 12 | | 200 | 0 | |
| **3798.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **30.447.200** | | **30.447.200** | **40** | **100** | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal | TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| | | | Indeks Desa (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| 3799. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 30.447.200 | | 30.447.200 | 40 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3800. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 30.447.200 | | 30.447.200 | 40 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 2 | | 40 | 0 | |
| **3801.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **229.119.940** | | **229.219.940** | **100** | **100,04** | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Event) | 2 | | | | 0 | 0 | |
| | | | TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Dokumen) | 2 | | | | 0 | 0 | |
| 3802. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 229.119.940 | | 229.219.940 | 100 | 100,04 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | | | | | | 0 | 0 | |
| 3803. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 29.493.800 | | 29.593.800 | 100 | 100,34 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3804. | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | 199.626.140 | | 199.626.140 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 150 | | 150 | | 100 | 0 | |
| **3805.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **75.295.265** | | **75.295.265** | **50** | **100** | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas | TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks) | 3.51 | | | | 0 | 0 | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%) | | | | | 0 | 0 | |
| 3806. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 75.295.265 | | 75.295.265 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 0 | 0 | |
| 3807. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 10.945.655 | | 10.945.655 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3808. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 4.310.910 | | 4.310.910 | 0 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3809. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 5.702.000 | | 5.702.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 26 | | 26 | | 100 | 0 | |
| 3810. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3811. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 54.336.700 | | 54.336.700 | 50 | 100 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | 50 | 0 | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **5.082.878.781** | | **4.573.269.939** | **78,04** | **89,97** | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| **3812.** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.344.341.862** | | **2.895.906.217** | **90,33** | **86,59** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | | | 70 | | 0 | 0 | |
| 3813. | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 15.612.300 | | 15.373.200 | 25 | 98,47 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3814. | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 15.612.300 | | 15.373.200 | 100 | 98,47 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3815. | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3816. | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3817. | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3818. | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3819. | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.114.617.381 | | 2.671.501.659 | 352,68 | 85,77 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3820. | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2.998.061.681 | | 2.555.393.159 | 110,71 | 85,23 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 28 | | 31 | | 110,71 | 0 | |
| 3821. | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 100.700.000 | | 100.700.000 | 1200 | 100 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 12 | | 1200 | 0 | |
| 3822. | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3823. | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 15.855.700 | | 15.408.500 | 100 | 97,18 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 100 | 0 | |
| 3824. | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.575.000 | | 1.575.000 | 0 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3825. | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 1.575.000 | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3826. | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | 1.575.000 | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 3 | | 0 | 0 | |
| 3827. | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0 | 0 | |
| 3828. | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 35 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3829. | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 7 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3830. | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 98.465.398 | | 98.465.398 | 63,44 | 100 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 0 | 0 | |
| 3831. | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 496.450 | | 496.450 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3832. | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 9.024.648 | | 9.024.648 | 9,09 | 100 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | | 1 | | 9,09 | 0 | |
| 3833. | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 7.138.600 | | 7.138.600 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3834. | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 5.306.000 | | 5.306.000 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| 3835. | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3836. | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 73.635.000 | | 73.635.000 | 35 | 100 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | | 35 | | 35 | 0 | |
| 3837. | 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 2.864.700 | | 2.864.700 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |
| 3838. | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 10.251.083 | | 10.251.083 | 1,71 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3839. | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3840. | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 10.251.083 | | 10.251.083 | 3,42 | 100 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 117 | | 4 | | 3,42 | 0 | |
| 3841. | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3842. | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 42.820.700 | | 37.839.150 | 66,67 | 88,37 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3843. | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 350 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3844. | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 16.617.500 | | 11.635.950 | 100 | 70,02 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3845. | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 26.203.200 | | 26.203.200 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3846. | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 61.000.000 | | 60.900.727 | 50 | 99,84 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 0 | 0 | |
| 3847. | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 61.000.000 | | 60.900.727 | 100 | 99,84 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2 | | 2 | | 100 | 0 | |
| 3848. | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3849.** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | **632.509.440** | | **632.235.790** | **55,56** | **99,96** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Meingkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 3850. | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 632.509.440 | | 632.235.790 | 55,56 | 99,96 | |
| | | Meingkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3851. | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3852. | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 12.438.800 | | 12.238.800 | 100 | 98,39 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3853. | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 14.621.100 | | 14.621.100 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 240 | | 240 | | 100 | 0 | |
| 3854. | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 1.906.400 | | 1.906.400 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 3855. | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 7.172.000 | | 7.103.300 | 100 | 99,04 | |
| | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3856. | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3857. | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3858. | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | 596.371.140 | | 596.366.190 | 100 | 100 | |
| | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka (Orang) | 30 | | 30 | | 100 | 0 | |
| 3859. | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3860. | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3861. | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang) | 120 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3862.** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | **893.954.900** | | **865.836.000** | **51,2** | **96,85** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 3863. | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | 893.954.900 | | 865.836.000 | 51,2 | 96,85 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Persentase Pendidikan Politik dan Kader Partai Politik | | | | | | 0 | 0 | |
| 3864. | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3865. | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 4.508.700 | | 4.500.000 | 100 | 99,81 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 6 | | 6 | | 100 | 0 | |
| 3866. | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 888.246.200 | | 860.136.000 | 56 | 96,84 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 500 | | 280 | | 56 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| 3867. | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100 | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 97 | | 97 | | 100 | 0 | |
| 3868. | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **3869.** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | **37.127.632** | | **36.746.732** | **75** | **98,97** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | | | 80 | | 0 | 0 | |
| 3870. | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | 37.127.632 | | 36.746.732 | 75 | 98,97 | |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | | | | | | 0 | 0 | |
| 3871. | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3872. | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3873. | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 6.686.832 | | 6.647.932 | 100 | 99,42 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 60 | | 60 | | 100 | 0 | |
| 3874. | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 17.433.300 | | 17.423.500 | 100 | 99,94 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |
| 3875. | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 13.007.500 | | 12.675.300 | 100 | 97,45 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan | 10 | | 10 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | | | | | | | |
| 3876. | 8.01.05 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | **90.302.947** | | **88.979.700** | **80** | **98,53** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | | | 75 | | 0 | 0 | |
| 3877. | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 90.302.947 | | 88.979.700 | 80 | 98,53 | |
| | | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3878. | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3879. | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 11.531.920 | | 11.312.300 | 100 | 98,1 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan | 3 | | 3 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | | Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | |
| 3880. | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 16.767.427 | | 16.250.400 | 100 | 96,92 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | 0 | |
| 3881. | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 56.642.800 | | 56.083.600 | 100 | 99,01 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 11 | | 11 | | 100 | 0 | |
| 3882. | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 5.360.800 | | 5.333.400 | 100 | 99,49 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| **3883.** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | **84.642.000** | | **53.565.500** | **83,33** | **63,28** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang deselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) | | | 14,3 | | 0 | 0 | |
| 3884. | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 84.642.000 | | 53.565.500 | 83,33 | 63,28 | |
| | | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | | | | | | 0 | 0 | |
| 3885. | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 4.067.100 | | 4.067.100 | 100 | 100 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 5 | | 100 | 0 | |
| 3886. | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | - | | - | 0 | 0 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3887. | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 29.740.100 | | 22.723.400 | 100 | 76,41 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan | 9 | | 9 | | 100 | 0 | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | | Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | | | | | | | |
| 3888. | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 23.274.100 | | 16.117.500 | 100 | 69,25 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 450 | | 450 | | 100 | 0 | |
| 3889. | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 16.153.200 | | 10.657.500 | 100 | 65,98 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 100 | 0 | |
| 3890. | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.407.500 | | - | 100 | 0 | |
| | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | **JUMLAH** | | **1.239.422.762.906** | | **1.186.780.009.832** | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 = 6 / 5 x 100% | | 8 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | % | |
| | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 78,6 | 95,75 | |
| | Predikat kinerja | | | | | | | Tinggi | Sangat tinggi | |

### 2.2.2. Evaluasi Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi realisai kinerja kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025, disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel II. 86**
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

#### 1. Dinas Pendidikan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | - | 9,00 | 8,6 | 8,76 | - | 97,33 |
| 2 | Harapan Lama Sekoah | - | 13,93 | 13,92 | 14,18 | - | 101,79 |
| 3 | Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SD | - | 61,43 | 54,13 | 58,93 | - | 95,91 |
| 4 | Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SMP | - | 66,57 | 62,85 | 65,46 | - | 98,33 |
| 5 | Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD | - | 56,80 | 43,6 | 53,89 | - | 94,88 |
| 6 | Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SMP | - | 60,55 | 57,79 | 59,04 | - | 97,51 |
| 7 | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun | - | 80,16 | 71,75 | 77,12 | - | 96,21 |
| 8 | Angka Partisipasi sekolah Anak Usia 7-15 Tahun | - | 98,72 | 97,23 | 98,16 | - | 99,43 |
| 9 | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun | - | 34,61 | 22,88 | 30,57 | - | 88,33 |
| 10 | Proporsi satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | - | 31,16 | 26,98 | 28,94 | - | 92,88 |
| 11 | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 | - | 76,37 | 68,28 | 76,28 | - | 99,88 |
| 12 | Iklim Keamanan SD | - | 76,51 | 71,78 | 75,6 | - | 98,81 |
| 13 | Iklim Keamanan SMP | - | 69,87 | 66,79 | 68,37 | - | 97,85 |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Iklim Kebinekaan SD | - | 70,42 | 70,45 | 69,42 | - | 98,58 |
| 15 | Iklim Keninekaan SMP | - | 69,94 | 69,37 | 68,93 | - | 98,56 |
| 16 | Ilim Inkusivitas SD | - | 61,08 | 54,72 | 58,57 | - | 95,89 |
| 17 | Iklim Inklusivitas SMP | - | 58,42 | 54,6 | 56,02 | - | 95,89 |
| 18 | Angka Partisipasi Kasar SD | - | 102,60 | 104,75 | 105,81 | - | 103,13 |
| 19 | Angka Partisipasi Kasar SMP | - | 86,28 | 101,14 | 104,68 | - | 121,33 |
| 20 | Angka Partisipasi Murni SD | - | 93,28 | 94,43 | 95,31 | - | 102,18 |
| 21 | Angka Partisipasi Murni SMP | - | 75,68 | 72,95 | 75,87 | - | 100,26 |
| 22 | Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan Kualifikasi S1/D4 | - | 92,96 | 94,89 | 85,26 | - | 91,7 |
| 23 | Proporsi Guru Pendidikan Dasar Memiliki Sertifikat Pendidik | - | 33,28 | 29,69 | 31,94 | - | 95,98 |
| 24 | Satuan Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) | - | 88,78 | 87,67 | 87,67 | - | 98,74 |
| 25 | Satuan Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) | - | 90,32 | 89,23 | 89,23 | - | 98,79 |

## 2. Dinas Kesehatan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Usia Harapan Hidup ( UHH) | 71,8 | 73,89 | 73,39 | 75,1 | 102 | 102 |
| 2 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 16 | 15,5 | 12,31 | 2.9 | 129 | 534 |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 183 | 200 | 175 | 109 | 104 | 183 |
| 4 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 100 | 77,7 | 55,6 | 77,7 | 55,6 |
| 5 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 100 | 67,3 | 59 | 67,3 | 59 |
| 6 | Pelayanan kesehatan bayi | 100 | 100 | 97,6 | 93,9 | 97,6 | 93,9 |
| 7 | Pelayanan kesehatan Balita | 100 | 100 | 96,1 | 87 | 96,1 | 87 |
| 8 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 95 | 100 | 97,4 | 97,5 | 97,4 | 97,5 |
| 9 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 100 | 68 | 90 | 85 | 90 |
| 10 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100 | 100 | 73,2 | 98,4 | 96,1 | 98,4 |
| 11 | Cakupan Imunisasi Lengkap | 100 | 100 | 100 | 81,4 | 100 | 81,4 |
| 12 | Tingkat Prevalensi Tuberkulosis ( Per 100.000 Penduduk) | 37 | 37 | 36,7 | 37 | 100 | 100 |
| 13 | Skreening PTM Usia 15-49 tahun | 65 | 90 | 33,46 | 49,6 | 51,4 | 55 |
| 14 | Persentase Desa/Kelurahan Yang Mencapai UCI | 100 | 100 | 70,7 | 65,5 | 70,7 | 92,6 |
| 15 | Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 95 | 95 | 83,32 | 87,6 | 87,6 | 92 |
| 16 | Kebutuhan tenaga Dokter Umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Kebutuhan tenaga Dokter Gigi | 80 | 85 | 81 | 16 | 101 | 102 |
| 18 | Cakupan Akreditasi Puskesmas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Pemenuhan Sarana dan prasarana | 85 | 90 | 68.87 | 60 | 80,9 | 60 |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0,32 | 0,5 | 0,26 | 0,5 | 81 | 85 |

## 3. Dinas Sosial

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 95,40% | 95,45% | 97,75% | 98,91% | 100% | 100% |
| 2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,51 A | 81, 60 A | 81, 51 A | 81, 60 A | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 100,00% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |

## 4. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Pengganggguran Terbuka | 2,5% | | 1,9% | | 99,98% | |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya | - | 95% | - | 0% | - | 0% |
| 3 | Jumlah Tenaga kerja | 212 Org | - | 274 | - | 100% | - |
| 4 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan dalam Negeri | - | 85% | - | 99,52% | - | 1% |
| 5 | JumlahTenaga Kerja yang ditempatkan | 100 Org | - | 506 | - | 100% | - |
| 6 | Jumlah Lembaga Hubungan Industrial yang dibina | 4 Unit | - | 10 Perusahaan | - | 100% | - |
| 7 | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Hak - hak Pekerja dan Dialog Sosial | - | 100 Orang | - | 19.149 Orang | - | 100% |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | - | 10% | - | 11% | - | 1,1% |
| 9 | Persentase Koperasi Aktif | 81,97% | 65% | 70,28% | 9% | 99,34% | 14% |
| 10 | Koperasi Aktif | 200 Koperasi | - | 175 Koperasi | - | 99,34% | - |
| 11 | Koperasi Keseluruhan | 244 Koperasi | 470 Koperasi | 249 Koperasi | 470 Koperasi | 100% | 100% |
| 12 | Persentase Koperasi yang diberikanDukungan fasilitas Pelatihan | - | 10% | - | 85% | - | 100% |
| 13 | Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas | - | 10% | - | 9% | - | 90,0% |
| 14 | Persentase UMKM Aktif | 51,30% | - | 61,90% | - | 100% | - |
| 15 | UMKM Aktif | 17.000 UMKM | - | 7.811 UMKM | - | 98,64% | - |
| 16 | UMKM Keseluruhan | 33.141 UMKM | - | 12.618 UMKM | - | 88,65% | - |
| 17 | Pesetase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informasi ke Formal | - | 20% | - | 2% | - | 10,0% |
| 18 | Pertumbuhan wirausaha | - | 2% | - | 0,07% | - | 0,0% |
| 19 | Wira Usaha Baru (WUB) | 200 WUB | | 343 WUB | | 100% | |
| 20 | Promosi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | - | 1% | - | 0% | - | 0,0% |
| 21 | Pesentase Kopersai yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | - | 100% | - | 0% | - | 0% |

## 5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | | 2,32% | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Persentase Peserta KB Aktif (CPR) | | 86,65% | | | | |
| 3 | Indeks Perustamaan Gender | | 0,859% | | | | |

## 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Produksi Padi (ton) | 86.791 | 96.570 | 86.791 | 94.217 | 100,00 | 97,56 |
| 2 | Peningkatan Produksi Jagung (ton) | 3.846 | 3.884 | 3.164 | 3.291 | 82,27 | 84,73 |
| 3 | Peningkatan Produksi Cabai (ton) | 162.363 | 167.234 | 178.974 | 229.059 | 110,23 | 136,97 |
| 4 | Peningkatan Produksi Bawang Merah (ton) | 10.987 | 11.317 | 12.110 | 23.154 | 110,22 | 204,59 |
| 5 | Peningkatan Produksi Kentang (ton) | 135.287 | 139.346 | 149.128 | 144.829 | 110,23 | 103,93 |

## 7. Dinas Lingkungan Hidup

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 70,22 | 77,59 | 70,57 | 70,57 | 100,50 | 90,95 |
| 2 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 52,9 | 73,39 | 40 | 40 | 75,61 | 54,5 |
| 3 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 78,16 | 76,64 | 93,54 | 93,54 | 119,68 | 122,05 |
| 4 | Indeks Tutupan Lahan/Hutan (\|IKTL) | 85,28 | 86,54 | 80,59 | 80,59 | 94,50 | 93,12 |
| 5 | Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | 0 | 723,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Persentase Pengelolaan Sampah dan Limbah | 65 | 80 | 72,36 | 72,36 | 111,32 | 90,45 |

## 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Infrastruktur (%) | 0 | 70,18 | 0 | 56,44 | 0 | 80,42 |
| 2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang (%) | 72,27 | 97,80 | 97,70 | 97,70 | 135,19 | 99,89 |

## 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Penerbitan KK | 98 | 98,2 | 98,38 | 98,37 | 100,39 | 100,18 |
| 2 | Cakupan Penerbitan KTP Elektronik | 98 | 98,5 | 99,58 | 98,35 | 101,61 | 99,85 |
| 3 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | 93 | 93,5 | 92,92 | 94,85 | 99,91 | 101,45 |
| 4 | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Cakupan Penerbitan KIARI | 60 | 62 | 57,57 | 61,25 | 95,95 | 98,79 |
| 6 | Database Kependudukan yang akurat | Ada | ada | Ada | Ada | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | Baik | Baik | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | A | A | A | A | 100,00 | 100,00 |

## 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah desa mandiri | 6 Desa | 15 Desa | 33 Desa | 44 Desa | 33 Desa | 44 Desa |
| 2 | Jumlah desa yang meningkat indeks status perkembangan desa | 77 Desa | 100 Desa | 38 Desa | 65 Desa | 38 Desa | 65 Desa |
| 3 | Persentase PKK Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Realisasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyerapan Dana Desa | | | | | | |
| 5 | Jumlah Pendirian BUMDes | 260 BUMDes | 270 BUMDes | 190 BUMDes | 220 BUMDes | 190 BUMDes | 220 BUMDes |
| 6 | Jumlah TTG | 18 TTG | 20 TTG | 13 TTG | 13 TTG | 13 TTG | 13 TTG |
| 7 | Persentase Laporan PertanggungJawaban Kepala desa Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Penilaian SAKIP | B | B | B | BB | B | BB |

## 11. Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDESK SPBE | 2,10 | 2,50 | 2,18 | 2,35 | 83,85 | 76,08 |

## 12. Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang pada jalan kab/kota | 24,47 | 0,0066 | 290 | 367 | 67,75 | 93,63 |

## 13. Dinas Pemuda dan Olahraga

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase pemuda yang berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2 | Jumlah atlit yang berprestasi | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang |
| 3 | Nilai IKM | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 4 | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | BB | BB | BB |

## 14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Nilai Investasi Bwerskala Nasional (PMDN/PMA) | 3,174 | 3,023 | 4,277 | 2,874 | 1,348 | 1,052 |

## 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Ketahanan Daerah | - | 0,31 | - | 0,28 | - | 90% |
| 2 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | - | 10% | - | 5% | - | 50% |
| 3 | Persentase Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | - | 20% | - | 20% | - | 100% |
| 4 | Persentase Penanganan Tanggap Bencana Darurat | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 100% |

## 16. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | 100% | 100% | 15,25% | 19,70% | 15,25% | 19,70% |
| 2 | Kualitas Konsumsi Pangan yang di indikasi oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 93% | 93% | 91,56% | 91,96% | 94,45% | 98,88% |
| 3 | Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 75% | 70% | 70% | 90% | - | 100% |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 1,40% | 1,40% | 1,04% | 1,04% | 74,28% | 74,28% |
| 5 | Persentase ketersediaan pangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | (Tersedianya cadangan beras/ jagung | | | | | | |
| 7 | sesuai kebutuhan) | | | | | | |
| 8 | Produksi Perikanan Budidaya | 3.800 Ton | 3.700 Ton | 3.960 Ton | 4.018 Ton | 100 | 100 |
| 9 | Produksi Perikanan Tangkap | 2.100 Ton | 1.000 Ton | 2.155 Ton | 1.006 Ton | 100 | 100 |
| 10 | Angka Konsumsi Ikan | 37 Kg/Kapita | 23,34 Kg/Kapita | 39,26 Kg/Kapita | 24,21 Kg/Kapita | 100 | 100 |

## 17. Dinas Perkebunana dan Peternakan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan (Ton) | 32.139 | 32.229 | 32.199 | 34.425 | 100,19 | 106,81 |
| 2 | Jumlah Produksi Ternak Ruminansia (Kg) | 420.996 | 462.338 | 425.127 | 531.812 | 100,98 | 115,03 |
| 3 | Jumlah Produksi Ternak Unggas (Kg) | 2.107.794 | 625.042 | 2.115.641 | 2.135.452 | 100,37 | 341,65 |
| 4 | Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%) | 90,00 | 91,00 | 90,00 | 94,50 | 100,00 | 103,85 |

## 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | 78,75 | 79,00 | 78,75 | 0,36 | 78,75 | 0,36 |
| 2 | Persentase Koleksi Naskah Kuno yang Dimiliki | - | 0,02 | - | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tingkat Ketersediaan Arsip | 60,05 | 61,00 | 60,05 | 87,27 | 60,05 | 87,27 |
| 4 | Persentase Kecakupan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip | - | 15,20 | - | - | - | - |

## 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan | 14,55 | 24 | 38,85 | 33,93 | 267 | 141,75 |
| 2 | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | 7,6 | 9,82 | 7,36 | 7,36 | 96,94 | 74,95 |
| 3 | Persentase Cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan | 18,34 | 20 | 16,67 | 13,28 | 90,89 | 66,41 |

## 20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) | 2,74 | 2,76 | 2,74 | 2,76 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Pertumbuhan IKM | 1019 | 1025 | 1019 | 1025 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase laju pertumbuhan IKM | 0,39 | 0,59 | 0,39 | 0,59 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Cakupan bina kelompok pengrajin IKM | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 10,13 | 10,15 | 10,15 | 10,31 | 100,20 | 100,58 |
| 6 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang | 150 | 250 | 378 | 77 | 252,00 | 30,80 |
| 8 | Retribusi sektor pasar rakyat | 900.000.000 | 950.000.000 | 892.552.000 | 975.004.000 | 99,17 | 102,63 |
| 9 | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | BB | 100,00 | 100,00 |

## 21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang diakomodir ke dalam APBD | 86,00 | | 86,00 | | |
| 2 | Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 98,00 | | 98,00 | | |
| 3 | Persentase Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD | 98,00 | | 98,00 | | |
| 4 | Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 99,00 | | 99,00 | | |
| 5 | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam menunjang Perencanaan pembangunan | 100,00 | | 100,00 | | |
| 6 | Persentase fasilitasi penerapan Inovasi daerah | inovatif | | inovatif | | |
| 7 | Nilai Evaluasi AKIP | BB | | BB | | |

## 22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | 84 | 85 | 84 | 85 | 100% | 100% | |
| 2 | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 37,62 | 38,62 | 37,62 | 38,62 | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | 10,53 | 11,28 | 10,53 | 11,28 | 100% | 100% | |
| 4 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | 76,18 | 79,9 | 76,18 | 79,9 | 100% | 100% | |
| 5 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional | 85 | 86 | 85 | 86 | 100% | 100% | |
| 6 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | - | 0,02 | - | 0,02 | 100% | 100% | |

## 23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Penguatan Isiologi Pancasila dan Karakter Bangsa | 100% (4 kali) | 100% (5 kali) | 100% (4 kali) | 100% (5 kali) | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Pendidikan Politik dan Kader Partai Politik | - | 100% | - | 100% | - | 96,84% |
| 3 | Persentase Organisasi Kemayarakatan yang Aktif | - | 70% | - | 70% | - | 100% |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah yg dilaksanakan. | - | 99,01% | - | 99,01% | - | 100% |
| 5 | Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan | 100% (6 kali) | 100% (5 kali) | (0 kali) | 100% (5 kali) | 100% | 100% |

## 24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Ketetapan Perda APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 3 | 3,05 | 3,08 | 3,86 | 3,08 | 3,86 |

## 25. Inspektorat

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Auditi | 71% | 72% | 71,20% | 64,78% | 100,28 | 89,97 |
| 2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh Auditi | 75% | 75% | 75,63% | 74,09% | 100,84 | 98,79 |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jumlah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mendapatkan WBK/WBBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 5 | Persentase PD Yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal BB | 80% | 81% | 92,30% | 89,28% | 115,38 | 110,22 |
| 6 | Nilai Maturitas SPIP | Level 2 | Level 3 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| 7 | Indeks MCP | 75% | 76% | 75% | 78% | 100 | 102,63 |

## 26. Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. | 100,00 | 100,00 | 73,99 | 92,55 | 73,99 | 92,55 |
| 2 | Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam Daerah | 100,00 | 100,00 | 96,84 | 96,93 | 96,84 | 96,93 |
| 3 | Cakupan Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran | 100,00 | 100,00 | 97,85 | 97,80 | 97,85 | 97,80 |
| 4 | Cakupan Investigasi Kejadian kebakaran | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Cakupan terlaksananya Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran | 100,00 | 100,00 | 59,89 | 86,36 | 59,89 | 86,36 |
| 6 | Persentase layanan sesuai SOP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,23 | 100,00 | 96,23 |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | B | B | B | B | B | B |
| 9 | Persentase laporan keuangan disususn tepat waktu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD Restra PD terhadap RPJMD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## 27. Sekretariat Daerah

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | | 3,67 | 3,66 | 4,08 | | 111,17 |
| 2 | Indeks RANHAM | | 80,16 | 71,75 | 79 | | 98,55 |
| 3 | Tingkat Inflasi | | 2,07 | 2,07 | 5,52 | | 266,67 |
| 4 | Hafidz Al-Qur'an | | 1613 | 1313 | 2023 | | 125,42 |

## 28. Sekretariat DPRD

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan DPRD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas Bersama Pemerintah Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% | 100% |
| 3 | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 45 Kali | 45 Kali | 45 Kali | 45 Kali | 100% | 100% |
| 4 | Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 100% | 100% |

| No | Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja 2024 | Capaian Kinerja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pelaporan | B | B | B | B | 100% | 100% |

### 2.2.3. Evaluasi Capaian Program Unggulan

Evaluasi capaian Program Unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menilai Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Secara umum, pelaksanaan Program Unggulan menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut adalah capaian Program Unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2025:

## Tabel II. 87
## Capaian Program Unggulan Kabupetan Kerinci Tahun 2025

| PROGRAM UNGGULAN DAERAH | PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SATUAN | Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi |
| Percepatan Pemekaran Kerinci Hilir | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SETDA BAGIAN PEM | Persentase | 60 | 60 |
| BUNGA DESA (Bupati Nginap di Desa) | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SETDA | Kali/Kecamatan | 2 | 2 |
| PATEN PLUS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Plus) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN | Kecamatan | 2 | 2 |
| Pengembangan Desa Digital | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PMD,Kominfo | Bimtek/Desa | 285 | 285 |
| Pengembangan Varietas Itik Koto Majidin | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Disbunnak | Ekor | 200 | 200 |
| Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Disbunnak | Unit | 11 | 11 |

| PROGRAM UNGGULAN DAERAH | PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SATUAN | Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi |
| Pembangunan Jalan Usaha Tani | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DTPH | Meter | 3000 | 3040 |
| Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Disbunnak | Batang | 125.000 | 127.000 |
| Bantuan Benih Kentang | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DTPH | Kg | 17.000 | 17.000 |
| Pengembangan Varietas Ayam Petelur | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Disbunnak | Ekor | 1.500 | 1.500 |
| Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DTPH, Disbunnak, DPKP | Kg | 27.713.426 | 6.220.628 |
| Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN<br>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DTPH | Ha | 800 | 800 |
| Bantuan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Diskopnaker | UMKM | 0 | 0 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Dinas Pariwisata | | N/A | N/A |
| Pengembangan SDM Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dinas Pariwisata | orang | 30 | 30 |

| PROGRAM UNGGULAN DAERAH | PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SATUAN | Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi |
| Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Dinas Pariwisata | unit | 1 | 0 |
| Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Disdik, Setda | Orang | 1.613 | N/A |
| Insentif Guru Ngaji, Imam Masjid dan Da'I Muda | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Disdik, Setda | Orang | N/A | N/A |
| Satu Paud Satu Desa | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Disdik | Unit | 250 | 250 |
| Desa Binaan Perguruan Tinggi | PROGRAM PENATAAN DESA<br>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Bappeda, Kesbangpol, PMD | Kecamatan | N/A | N/A |
| Percepatan Operasional RSUD Kerinci | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinkes | Unit | 2 | 2 |
| Revitalisasi Posyandu | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Dinkes | Desa | 285 | 285 |
| Coverage BPJS menuju UHC (BPJS Untuk Semua) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinkes | Persen | 92,00 | 92,14 |
| Satu Mobil Sampah Satu Kecamatan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Kecamatan,DLH | Unit | 11 | 11 |
| Peningkatan Aksesibilitas Air | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PUPR,PDAM | Unit | 600 | 600 |

| PROGRAM UNGGULAN DAERAH | PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SATUAN | Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi |
| Betonisasi Jalan Lingkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PUPR | Meter | 48.400 | 49.457 |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PUPR,BPBD | | N/A | N/A |

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, capaian program unggulan menunjukkan hasil yang secara umum telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian pembangunan daerah. Sebagian besar program unggulan telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa diantaranya melampaui target seperti pembangunan jalan usaha tani, bantuan bibit kulit manis dan kopi, Coverage BPJS menuju UHC (BPJS untuk semua), dan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan. Akan tetapi masih terdapat juga program unggulan yang belum mencapai target pada tahun 2025 yaitu bantuan pupuk bagi kelompok tani dan pengembangan potensi alam dan agrowisata.

Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk mendanai seluruh program unggulan secara optimal, sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemapuan keuangan daerah. Namun, secara keseluruhan program unggulan telah menunjukkan perkembangan yang positif untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. Selanjutnya, pada periode perencanaan selanjutnya diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas pelaksana, penyempurnaan tata kelola pelaksanaan program, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan capaian dan peningkatan kualitas hasil pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Secara umum permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Kerinci yaitu:

### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

#### 2.3.1.1. Rendahnya Pendapatan Masyarakat

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha. Total PDRB Kabupaten Kerinci terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan total PDRB di Provinsi Jambi. Persentase kontribusi PDRB Kabupaten Kerinci terhadap PDRB Provinsi Jambi terus meningkat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kabupaten Kerinci, sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor pengadaan listrik dan gas dan jasa perusahaan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 88**
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.240,24 | 3.346,63 | 3.468,60 | 3.566,19 | 3.885,79 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 121,15 | 128,57 | 129,1 | 142,12 | 146,45 |
| C. | Industri Pengolahan | 186,59 | 193,33 | 204,22 | 210,03 | 223,02 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,96 | 3,21 | 3,59 | 3,77 | 3,88 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 22,67 | 22,44 | 22,39 | 22,69 | 22,84 |
| F. | Konstruksi | 824,76 | 918,69 | 1.083,83 | 1.138,91 | 1.014,61 |

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 606,58 | 630,63 | 657,79 | 691,4 | 742,29 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 168,56 | 181,8 | 190,32 | 202,28 | 230,91 |
| I. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 55,2 | 57,84 | 61,15 | 65,3 | 68,33 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 526,86 | 568,74 | 617,55 | 640,81 | 690,31 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 71,29 | 73,25 | 74,32 | 77,19 | 82,09 |
| L. | Real Estate | 111,26 | 112,64 | 117,81 | 122,53 | 128,33 |
| M.N. | Jasa Perusahaan | 2,57 | 2,73 | 3,11 | 3,3 | 3,56 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 345,01 | 347,29 | 355,53 | 400,75 | 389,84 |
| P. | Jasa Pendidikan | 290,87 | 296,51 | 297,18 | 318,97 | 328,81 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 120,79 | 128,66 | 131,68 | 147,92 | 153,05 |
| R.S.T.U. | Jasa lainnya | 107,4 | 112,03 | 115,16 | 123,12 | 127,13 |
| **PDRB** | | **6822,79** | **7125,01** | **7.533,32** | **7.877,28** | **8.241,23** |

Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan pertumbuhan PDRB per tahun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor komunikasi mulai mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Kerinci tahun 2021-2025 didominasi oleh sektor-sektor primer. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kabupaten Kerinci yang merupakan wilayah perdesaan yang memiliki daerah pertanian di Provinsi Jambi meskipun lahan pertanian banyak dikonversi ke bangunan. Pada tahun 2025, terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan yang sebelumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabe berikut:

**Tabel II. 89**
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kerinci Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025**

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,12 | 3,28 | 3,64 | 2,81 | 9,12 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 9,49 | 6,12 | 0,41 | 10,09 | 3,05 |
| C | Industri Pengolahan | 1,24 | 3,61 | 5,63 | 2,84 | 5,77 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,48 | 8,34 | 11,84 | 4,98 | 2,89 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,22 | -1 | -0,25 | 1,35 | 0,65 |
| F | Konstruksi | 26,16 | 9,01 | 17,97 | 5,08 | -11,24 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,96 | 3,96 | 4,31 | 5,11 | 6,82 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,88 | 7,85 | 4,69 | 6,29 | 12,54 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,71 | 4,79 | 5,72 | 6,79 | 4,50 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,04 | 7,95 | 8,58 | 3,77 | 7,72 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,24 | 2,74 | 1,46 | 3,87 | 5,24 |
| L | Real Estat | 0,18 | 1,24 | 4,59 | 4 | 4,74 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,26 | 6,21 | 13,84 | 6,13 | 6,53 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1,02 | 0,66 | 2,37 | 12,72 | -1,49 |
| P | Jasa Pendidikan | 1,28 | 1,94 | 0,23 | 7,33 | 3,21 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,05 | 6,52 | 2,35 | 12,33 | 4,17 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 2,79 | 4,31 | 2,8 | 6,9 | 3,26 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | | **3,89** | **4,43** | **5,73** | **4,57** | **4,61** |

Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

### 2.3.1.2. Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum Optimal

Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa yang pada akhirnya pada Perpres Nomor 92 tahun 2011 menjadi

dasar hukum terbentuknya Badan baru yang mengurusi ekonomi kreatif *(Bekraf)* yang merupakan bagian dari Kementerian Pariwisasa dan Ekonomi Kreatif. Peluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masih terbuka lebar. Fokus dari ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Pada tahun 2015 berdasarkan Perpres Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif terdapat 16 bidang yang dikoordinasikan oleh Bekraf yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) aplikasi dan game developer; 2) arsitektur; 3) desain interior; 4) desain komunikasi visual; 5) desain produk; 6) fashion; 7) film, animasi dan video film; 8) kriya; 9) kuliner; 10) fotografi; 11) musik ;12) penerbitan; 13) periklanan; 14) seni pertunjukan ;15) seni rupa ; 16) televise dan radio.

Pendekatan industri saat ini telah bergerak ke arah industri berorientasi konsumen sehingga muncul era produksi non-massal dengan faktor kandungan khusus, unik dan khas. Industri kreatif yang sarat kandungan kharakterisitik dan daya kreatifitas disainernya dapat mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan. Pasar konsumsi produk dan jasa industri kreatif relatif besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Data dari PBB tahun 2003, menunjukkan 50% dari belanja konsumen di negara G7 adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara itu, penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Pada tahun 2010, ekonomi kreatif di Indonesia menciptakan nilai tambah sebesar 4,68 triliun rupiah atau 7,29% dari PDB nasional (Renstra Kemenparekraf 2012-2017). Ekonomi kreatif juga menyerap 8,6 juta tenaga kerja atau 7,9% dari total nasional. Pada tahun 2021 Jumlah Objek wisata Buatan di Kabupaten Kerinci sebanyak 25 Destinasi, sedang kan destinasi wisata Alami sebanyak 121 Destinasi.

Dalam konteks Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten yang memiliki potensi wisata yang besar, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika

dikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masuk melalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal (Suparwoko, 2010). Keterkaitan antara sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

1) Penguatan kualitas kepariwisataan di mana ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa kreatif sebagai suvenir dan sebagai hiburan
2) Penciptaan daya tarik wisata di mana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyen yang unik dapat dikembangkan sebagai wisata.
3) Promosi di mana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tarik wisata dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik. Untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Kerinci diperlukan kemitraan dengan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya dan kreatifitas pelaku usaha.

#### 2.3.1.3. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya dari aspek kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat tersebut, antara lain angka kematian ibu, bayi, balita, prevelensi gizi buruk, dan usia harapan hidup. Berikut angka kematian ibu dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 90**
**Angka Kematian Ibu Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka kematian ibu | 245,57 | 159 | 97,12 | 129 | 109 |

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2026

Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun ke tahun berfluktuatif. Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Namun

kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 129. Angka ini menunjukkan masih terdapatnya kasus kematian ibu pasca melahirkan. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 109.

**Tabel II. 91**
**Angka Kematian Bayi Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka kematian bayi | 10,70 | 15,29 | 7,45 | 8,87 | 6,91 |

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2026

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup memiliki kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan tahun 2021, angka kematian bayi tahun 2025 lebih rendah. Angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 15,01 dan pada tahun 2025 sebesar 6,91. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat terutama pada bayi meningkat.

#### 2.3.1.4. Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan antara lain meliputi bencana kebakaran, gempa bumi, puting beliung. Pemasalahan kebencanaan ini dirumuskan Berdasarkan analisis data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas. Kemudian terkait potensi terjadinya bencana alam, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana perlu dilakukan mengingat potensi kebencanaan lokal yang dimiliki Kabupaten Kerinci di antaranya gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu mekanisme yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam penanganan bencana. Hingga saat ini mekanisme CSR dari swasta yang dapat

dikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana. Ke depannya mekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganan kebencanaan yang lebih optimal.

#### 2.3.1.5. Rendahnya Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dimana timbulan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai 24.801.628,65 ton/tahun dan 67.949,67 ton/hari, dimana tidak seimbang dengan sampah yang terkelola. Dimana sampah terkelola hanya sebesar 34% per tahun, yang selebihnya sampah terbuang ke lingkungan sebanyak 65,51%. Selain itu, pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Kerinci. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci dari tahun 2021–2024 cenderungan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 berada pada angka 44.283 ton. Hal ini juga belum dimbangi dengan volume sampah yang ditangani dimana hingga tahun 2025, volume sampah yang ditangani hanya sebesar 39.494 ton. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci adalah rendahnya daya tampung TPS per m3 dimana daya tampung TPS pada tahun 2024 sebesar 227 m3 yang mengalami penurunan secara terus-menerus dari tahun 2021. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah berupa jumlah mobil sampah yang tersedia hanya sebanyak 18 unit.

Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih. Pada tahun 2026, Pemerintah mulai menerapkan secara serentak di seluruh Indonesia Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan ini sebagai respons strategis atas darurat sampah dan kebutuhan akan penataan lingkungan yang lebih tertata di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan ini dilatarbelakangi karena komitmen pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah secara nasional dan terpadu, sejalan dengan visi menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan. Gerakan ini juga bertujuan

untuk mengalihfungsikan sampah menjadi energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, dan memperindah tata kota guna menciptakan ruang publik yang sehat dan menarik.

#### 2.3.1.6. Masih Rendahnya Sarana dan Prasarana Pendukung Seni Budaya

Seni budaya merupakan salah satu identitas daerah yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisatawan, sedangkan adat istiadat yang khas merupakan modal sosial yang menjadi perekat antar warga di wilayah Kabupaten Kerinci. Kegiatan seperti pameran, lomba, festival seni dan budaya merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda sekaligus sebagai wujud upaya melestarikan kebudayaan. Kabupaten Kerinci memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang khas. Seni dan budaya daerah menghadapi tantangan dan gempuran budaya dari luar yang tidak selalu selaras dengan nilai dan budaya daerah, seni dan budaya daerah cenderung terpinggirkan dalam proses akulturasi kebudayaan.

Pelestarian seni dan budaya selama ini belum didukung oleh masih belum tersebar meratanya kelompok pelestari seni dan budaya daerah maupun belum tersedianya gedung untuk kegiatan pelestarian seni dan budaya daerah. Pembinaan seni dan budaya daerah sebagai bagian dari seni dan budaya nasional juga dinilai masih mengalami kendala kurangnya perhatian dan dukungan berbagai pihak, baik sarana, pendanaan maupun kebijakan. Berikut ditampilkan grafik jumlah grup kesenian menurut Kabupaten Kerinci.

#### 2.3.1.7. Masih Rendahnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kepemudaan dan Olah Raga

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, antara lain: (1) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; (2) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas

tenaga dan pembina keolahragaan; serta (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

### 2.3.1.8. Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini pengelolaan sektor pariwisata masih menghadapi sejumlah tantangan yang mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan potensi tersebut.

**Tabel II. 92**
**Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RASIO KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,68 |

Sumber data: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih tergolong kecil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor seperti rendahnya kunjungan wisatawan, infrastruktur penunjang pariwisata yang belum memadai, sertah lemahnya promosi dan pemasaran destinasi wisata. Oleh karena itu, diperlukan Langkah-lankah strategis dan terencana dengan Menyusun pengembangan pariwisata yan berorientasi pada keberlanjutan. Pemberdayaan Masyarakat lokal juga perlu ditingkatkan agar mereka menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian destinasi wisata.

### 2.3.1.9. Pengawasan Investasi PMA dan PMDN belum Optimal

Kegiatan investasi sangat terkait dengan prosedur perizinan mendirikan usaha yang berlaku di daerah, Indikator pengukurannya adalah jumlah prosedur, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap prosedur, biaya yang dibutuhkan, serta persayaratan modal disetor minimum. Oleh karena itu, kemudahan mendirikan usaha di Kota Kabupaten Kerinci ini sebaiknya diikuti dengan peningkatan investasi yang

mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### 2.3.1.10. Belum Optimalnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung performa wilayah

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kerinci berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi.

**Tabel II. 93**
**Persentase Jaringan Jalan Kondisi Mantap**
**Tahun 2021-2025**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERSENTASE JARINGAN JALAN KONDISI MANTAP** | 48,29 | 49,12 | 46,88 | 45,4 | 33,2 |

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2026

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

#### 2.3.1.11. Belum Optimalnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan pada upaya penelusuran data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang

bersangkutan. Hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan secara akumulatif maka diketahui permasalahan tersebut yaitu: Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan hubungan antar perangkat daerah dan unit kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan maupun evaluasi. Bertolak dari hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan ini bersumber pada perubahan regulasi yang berlangsung di pusat khususnya mengenai pemerintahan daerah. Jika ditelusur secara historis dari UU No. 32 Tahun 2004, menjadi UU No 23 Tahun 2017 dan dewasa ini telah ada revisi yaitu UU No 9 Tahun 2015. Perubahan perubahan ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kerinci, sehingga mengharuskan untuk melakukan adaptasi secara cepat.

Di dalam sistem perencanaan peraturan yang disusun oleh Kemendagri dan Bappenas seringkali mengandung perbedaan, sehingga menyulitkan daerah untuk mengacu dan mengakomodasi peraturan tersebut ke dalam perencanaan daerah. Bahkan dalam beberapa peraturan perundangan yang mengatur hingga tingkat operasional masih dijumpai perbedaan-perbedaan prinsip. Tidak adanya sinkronisasi peraturan perundangan yang memudahkan daerah untuk melakukan konsulidasi baik dalam perencanaan, implementasi, penganggaran, pengawasan dan evaluasi.

Kondisi semacam ini menjadikan isu yang mendasar serta secara luas dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dalam regulasi pemerintahan daerah juga sangat mengganggu dalam proses koordinasi antar unit kerja maupun perangkat daerah, sehingga beberapa permasalahan muncul terkait dengan kesulitan untuk mengkonsolidasi baik di level perencanaan, perumusan indikator, pembagian urusan maupun pengawasan internal, serta penyerapan SILPA. Hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas dan sah yang mengatur pengelolaan SILPA. Artinya, langkah

administratif dalam rencana kerja pada tahun anggaran selanjutnya dalam penyerapan kembali SILPA bukan merupakan kebijakan yang tuntas.

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

#### 2.3.2.1. Urusan Wajib

**A. Pendidikan**

Permasalahan pembangunan urusan pendidikan, meliputi antara lain (i) kurangnya dan masih rendahnya mutu lembaga pendidikan kejuruan dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan ; (ii) belum optimalnya pencapaian SPM dan SNP; (iii) masih kurangnya sarana daan prasarana pendidikan dasar; (iv) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta; (v) kurangnya kualifikasi dan kompetensi guru ; (vi) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar; (vii) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; (viii) kurangnya daya saing siswa di bidang iptek ; (ix) belum maksimalnya output pembelajaran; dan (x) belum optimalnya penerapan menajemen pendidikan di sekolah.

**B. Kesehatan**

Permasalahan pembangunan urusan kesehatan, meliputi antara lain (i) masihrendahnya mutu pelayanan kesehatan (ii) masih adanya kematian ibu melahirkan; (iii) masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; (iv) belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesehatan; (v) masih ditemukannya balita gizi buruk; (vi) munculnya kasus TB-MDR; (vii) masih rendahnya tingkat pengetahuan komprehensip tentang HIV-AIDS;(viii) belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan di pedesaan-pedesaan; (ix) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolahh secara berkala; (x) belum optimalnya deteksi dini berkala status kesehatan pada kelompok rawan; (xi) belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan; (xii) belum optimalnya akses STBM; (xii) masih perlunya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; (xiii) jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar belum mencapai target; (xiv)

rumah tangga ber-PHBS belum mencapai target; (xv) tingginya penyebab kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan.

**C. Pekerjaan Umum**

Permasalahan pembangunan urusan pekerjaan umum, meliputi antara lain (i) masih kurangnya jaringan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan lainnya (ii) masih kurangnya jaringan irigasi pedesaan; (iii) masih kurangnya jarangan jalan ke sentra-sentra produk pertanian; (iv) masih kurangnya sarana dan prasarana air bersih; (v) masih kurangnya pasar-pasar tradisional yang berkualitas; (vi) masih perlunya dibangun tempat-tempat peribadatan yang memadai; (vii) masih belum terintegrasinya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kecamatan ke kawasan-kawasan permukiman dan kawasan-kawasan ekonomi; (viii) belum optimalnya sarana prasarana bidang Pekerjaan Umum; (ix) masih belum terpenuhinya infrastruktur untuk mendukung potensi pariwisata; dan (x) masih kurangnya infrastruktur untuk mendukung industri mikro, kecil dan menengah.

**D. Penataan Ruang**

Permasalahan pembangunan urusan penataan ruang, meliputi antara lain (i) Belum optimalnya implementasi dokumen RTRW; (ii) Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (iii) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) Belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; dan (v) Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah.

**Tabel II. 94**
**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**
**Tahun 2021-2025**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 93,08 | 91,08 | 83,4 | 97,8 | 97,7 |

Sumber: Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2026

**E. Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan urusan lingkungan hidup, meliputi antara lain (i) masih belum efektif dan efesiennya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (ii) belum tersedianya grand design rencana pembangunan yang berbasis tanaman lokal; (iii) masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat; (iv) adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya; (v) meningkatnya jumlah sampah dan terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; (vi) kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; dan (vii) masih adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan.

**F. Sosial**

Permasalahan pembangunan urusan sosial, meliputi antara lain (i)masih adanya fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PPKS belum ditangani secara baik; (ii) masih rendahnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; (iii) masih belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; (iv) masih belum optimalnya pembinaan kepada panti-panti asuhan; (v) masih belum optimalnya pembinaan bagi para penyandang cacat dan trauma; (vi) masih belum optimalnya pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); (vii)masih belum optimalnya pembinaan kepada anak-anak terlantar; dan (viii) belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetikawanan sosial, kearifan lokal, kegotong royongan dan penghargaan pada pahlawan dan perintis kemerdekaan.

**G. Ketenagakerjaan**

Permasalahan pembangunan urusan ketenagakerjaan, meliputi antara lain (i) masih belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (ii) masih rendahnya lapangan kerja baru bagi masyarakat; (iii) masih rendahnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

(iv) masih rendahnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (v) masih kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta belum maksimalnya hubungan industri di perusahaan, dan (vi) belum adanya balai latihan kerja.

**H. Koperasi**

Permasalahan pembangunan urusan koperasi, usaha kecill dan menengah, meliputi antara lain (i)masih rendahnya pengembangan industri mikro,kecil dan menengah; (ii) masih rendahnya kapasitas permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (iii) masih belum optimalnyapembinaan kepada usaha kecil, mikro dan menengah: (iv) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah untuk berkompetisi dalam penyedian barang dan jasa; dan (v) masih kurangnya fasilitasi kerjasama UMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar.

**I. Penanaman Modal**

Permasalahan pembangunan urusan penanaman modal, meliputi antara lain(i) masih rendahnya target capaian investasi; (ii) masih belum dikembangkannya berbagai jaringan investasi; (iii) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (iv) masih rendahnya iklim investasi dan kerjasama investasi; (v) masih rendahnya pemanfatan bahan baku lokal dalam investasi; (vi) masih belum optimalnya pemanfaatan tehnologi informasi; dan (vii) masih kurangnya regulasi yang mendukung tumbuhnya investasi.

**J. Kebudayaan**

Permasalahan Pembangunan urusan kebudayaan, meliputi antara lain (i) masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal; (ii) masih belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya lokal; (iii) masih rendahnya pengelolaan kekayaan budaya lokal; (iv) masih rendahnya pengelolaan keragaman budaya;(v) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (vi) kurangnya promosi budaya lokal; dan (vii) kurangnya sarana dan prasarana pagelaran seni dan festival budaya yang representatif.

**K. Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, meliputi antara lain (i) masih kurangnya pengembangan aktivitas kepemudaan dan kegiatan-kegiatan keolahragaan; (ii) masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda; (iii) masih kurangnya penggerakan potensi-potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (iv) masih rendahnya pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan; dan (v) masih kurangnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga.

**L. Perhubungan**

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan, meliputi antara lain (i) masih kurangnya pemahaman masyrakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (ii) kurang optimalnya fungsi terminal; (iii) masih kurangnya fasilitas perlengkapanjalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (iv) masih kurangnya data- data perencanaan dan penggembangan transportasi; (v) masih kurangnya dan belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; dan (vi) masih kurangnya kuantitas dan kualitas kapasitas kompetensi sumber daya aparatur.

### 2.3.2.2. Urusan Pilihan

**a. Pertanian**

Permasalahan pembangunan urusan pertanian, meliputi antara lain (i) masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui industrialisasi pedesaan; (ii) masih rendahnya perluasan pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan; (iii) belum adanya kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga riset guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian; (iv) masih rendahnya sumber daya petani; (v) masih rendahnya kesejahteraan petani; (vi) masih rendahnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; (vii) masih rendahnya penerapan teknologi pertanian; (viii) masih rendahnya produksi pertanian

dan (ix) masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian. Permasalahan pembangunan terkait dengan pertanian dan peternakan dalam lingkup urusan pertanian, meliputi antara lain (i) masih tingginya penyakit ternak; (ii) rendahnya produksi hasil peternakan; (iii) belum berfungsinya kawasan budidaya laut, air payau; dan (iv) belum berkembangnyabudidaya perikanan. Sementara itu, permasalahan pembangunan terkait dengan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam lingkup bidang urusan pertanian, meliputi antara lain (i) belum tersedianya perlengkapan gedung kantor; (ii) rendahnya kesejahteraan petani; (iii) rendahnya kemampuan lembaga petani;

(iv) rendahnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan; (v) rendahnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; dan (vi) rendahnya ketahanan pangan pertanian/perkebunan.

**b. Perdagangan**

Permasalahan pembangunan urusan perdagangan, meliputi antara lain (i) belum adanya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; (ii) rendahnya nilai ekspor; (ii) rendahnya efisiensi perdagangan dalam negeri; dan (iii) belum optimalnya pembinaan kepada pedagang kaki lima.

**c. Perindustrian**

Permasalahan pembangunan urusan perindustrian, meliputi antara lain (i) belum adanya pengembangan industri kecil dan menengah; (ii) rendahnya kemampuan teknologi industri; dan (iii) rendahnya kapasitas iptek sistem produksi.

**d. Pariwisata**

Permasalahan pembangunan urusan pariwisata, meliputi antara lain (i) belum adanya perencanaan pengembangan pariwisata; (ii) belum adanya rencana pengembangan destinasi wisata; (iii) belum adanya rencana pengembangan kemitraan.

**e. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan urusan perencanaan pembangunan, meliputi antara lain (i) masih belum berkualitasnya data

dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas; (ii) sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara dokumen rencana pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan dokumen rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan (iii) kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan masih rendah; (iv) masih rendahnya koordinasi antar perumus kebijakan dokumen rencana pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah; (v) masih belum dipahaminya fungsi perencanaan sebagai alat untuk mengukur kinerja; dan (vi)masih tingginya inkonsistensi antar dokumen perencanaan.

## 2.4. Capaian SPM

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem otonomi daerah telah terjadi perpindahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom. Implementasi otonomi daerah ini terwujud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan tersebut meliputi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat serta Kawasan Pemukiman, dan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara diartikan sebagai barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dalam

rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud, maka pelaksanaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah agar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berikut adalah capaian SPM untuk beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci:

**a. Bidang Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan

dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesehatan. Target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

**Tabel II. 95**
**Realisasi SPM Bidang Pendidikan**

| NO | INDIKATOR KINERJA JENIS LAYANAN SPM | CAPIAN (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pendidikan Dasar Usia Dini | 93,60% | 97,44% | 91,02% | 89,54% | 100,00% |
| 2 | Pendidikan Dasar | 92,23% | 99,88% | 93,97% | 94,26% | 100,00% |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | 93,53% | 98,86% | 93,05% | 93,77% | 100,00% |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### b. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Kesehatan yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV).

Target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai berikut:

## Tabel II. 96
## Realisasi SPM Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 95.53 | 98.50 | 77.05 | 67.68 | 78,12 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100,00 | 100,00 | 91.09 | 71.31 | 83,40 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 99.71 | 98.58 | 96.83 | 61.10 | 92.70 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 71.32 | 92.51 | 81.15 | 64.00 | 99,52 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan | 39.51 | 95.31 | 90.81 | 80.68 | 83,73 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 32.28 | 81.56 | 79.46 | 88.91 | 86,67 |
| 7 | Pelayanan Kesahatan Pada Usia Lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 72.27 | 79.89 | 77.35 | 91.56 | 72,65 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 22.33 | 89.52 | 50.00 | 89.72 | 38,15 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 13.67 | 87.06 | 12.24 | 89.26 | 81,68 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan | 95.00 | 100,00 | 91.34 | 95.45 | 100,00 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 50.40 | 97.00 | 34.79 | 100,00 | 98,67 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang | 93.33 | 98.86 | 27.65 | 76.88 | 80,24 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Immunodeficiency Virus) | mendapatkan layanan kesehatan | | | | | |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### c. Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum terdiri dari Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

**Tabel II. 97**
**Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 0,00 | 0,00 | 80.45 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 0,00 | 0,00 | 64.79 | 13.33 | 90,00 |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### d. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci

dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

**Tabel II. 98**
**SPM Bidang Perumahan Rakyat**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | 0,00 | 0,00 | 80.00 | 7.69 | 80,00 |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol-PP), Pelayanan Informasi Rawan Bencana (BPBD), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (BPBD), Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (BPBD), dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran (Damkar).

#### a) SATPOL PP

Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) sebagai berikut:

**Tabel II. 99**
**Realisasi SPM SATPOL PP**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi | Persentase pencapaian penerimaan layanan dasar | 0 | 0 | 100 | 0 | 93,33 |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### b) KEBENCANAAN (BPBD)

Target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

**Tabel II. 100**
**Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD)**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 85,17 |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsigaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 89,39 |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 72,22 |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### c) DAMKAR

Target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:

**Tabel II. 101**
**Target Pencapaian SPM Damkar**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | 90,47 | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 96,67 |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

### f. Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 jenis layanan Bidang Sosial yang harus dilaksanakan, dimana kewenangan Kabupaten / Kota adalah layanan keterlantaran diluar panti yaitu: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak terlantar di luar panti, Rehabilitas Sosial Dasar penyandang lanjut Usia terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kewenangan Kabupaten/Kota. Target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pemberian Standar Layanan Minimal (SPM) bidang Sosial sebagai berikut:

**Tabel II. 102**
**Realisasi SPM Bidang Sosial**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Capain (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | 0,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti | 0,00 | 90,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 0,00 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | 0,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2025*

## 2.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaah pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan daerah. Hasil telaah yang memuat usulan, Lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, serta rekomendasi tindak lanjut sebagaimana disajikan pada table berikut.

# Tabel II. 103
# Pokok-Pokok Pikiran DPRD
# Tahun 2027

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. YUNUS | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | PEMBANGUNAN MONUMEN | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 10 | Paket | 500.000.000 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata |
| 2 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | REHAB WISATA PIDUNG | DESA PIDUNG, Kab. Kerinci | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 1 | Paket | 200.000.000 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata |
| 3 | MUKHSIN ZAKARIA | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Belum Ada | Desa Lolo Kecil kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 1 | paket | 200.000.000 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DOSI ARAFIQ | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pemanfaatan Monumen menjadi tempat wisata, kurangnya lokasi untuk UMKM Tugu Macan | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 1 | Paket | 170.000.000 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata |
| 5 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Butuh event dan prasarananya | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | even ingin dilimpahkan, dinas cuma support, lebih baik pihak 3 yang melaksanakan, bukan dinas yang menjadi pelaksana utama ubah jadi 1 kegiatan dg anggaran 100 jt, | 1 | kegiatan | 100.000.000 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata |
| 6 | ZULFIKAR | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sungai sudah dangkal perlu di normalisasi | se kecamatan batang merangin dan kecamatan danau kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Normalisasi/restorasi sungai | null | 1000 | 1000000000 | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 7 | M. YUNUS | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | SUNGAI SUDAH DANGKAL PERLU DI NORMALISASI | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 10 | Paket | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | SUDAH RUSAK PARAH | IRIGASI PAPUN PANJANG DESA KOTO AGUNG, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | null | 1 | Paket | - | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | Peningkatan Aksesibilitas Air |
| 9 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BUTUH NORMALISASI SUNGAI | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Normalisasi dan restorasi sungai | null | 10 | Paket | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 10 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Turap yang ada sudah roboh | Desa Pasar Siulak Gedang, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 300 | meter | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 11 | ISLAMUDIN | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BUTUH TEMBOK PENAHAN | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 10 | PAKET | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JAFRUL | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | pembangunan Saluran irigasi lapangan pemuda desa koto Lanang kayu aho mangkak, kondisi rusak berat | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan jaringan irigasi permukaan | null | 400 | Meter | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 13 | MUSRIZAL , M.Si | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | belum ada dinding penahan tebing | desa talang lindung kec. keliling danau, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | paket | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 14 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | belum ada dinding penahan | desa koto baru kec. keliling danau, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | paket | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 15 | MUSRIZAL , M.Si | Peningkatan Aksesibilitas Air | tidak ada tanggul sungai | desa koto Baru kec. keliling danau, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan tanggul sungai | null | 700 | M | - | Pembangunan Tanggul Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Peningkatan Aksesibilitas Air | Peningkatan Aksesibilitas Air |
| 16 | MUSRIZAL , M.Si | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | belum ada pebahan tebing | desa pasar semerap kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | paket | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JONI EFENDI, S.Pd | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 1 | Paket | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 18 | JONI EFENDI, S.Pd | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | sungai tuak, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 1 | Paket | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 19 | JONI EFENDI, S.Pd | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | desa siulak deras mudik, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 1 | Paket | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 20 | MASYKUR | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tebing harus di perbaiki menimalisir banjir | RT 02 kelurahan lempur tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 50 | M | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 21 | MASYKUR | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tembok penahan yang sudah tidak layak | RT 01 kelurahan lempur tengah kec. gunung raya, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 200 | M | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | dr. SURMILA APRI YULISA | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyaknya Tebing Yang Amblas | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | Paket | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 23 | dr. SURMILA APRI YULISA | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyaknya Tebing Yang Amblas | Desa Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | Paket | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 24 | dr. SURMILA APRI YULISA | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyak Tebing Yang Amblas | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 1 | Paket | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 25 | dr. SURMILA APRI YULISA | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | null | 1 | Paket | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | Peningkatan Aksesibilitas Air |
| 26 | Ir. BOY EDWAR, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | sungai batang merao - pesantren nurul Haq, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan Tanggul Sungai | null | 200 | meter | - | Pembangunan Tanggul Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ir. BOY EDWAR, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | tembok penahan tebing kemantan raya air hangat timur, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 100 | meter | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 28 | Ir. BOY EDWAR, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | pembangunan tembok penahan tebing sulak kecil - hamparan pugu, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 200 | meter | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 29 | Ir. BOY EDWAR, MM | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tidak lancarnya aliran air | saluran pembuang desa pendung mudik, kecamatan air hangat, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | null | 100 | meter | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 30 | LISNUR BANI, S.PdI | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | perlu adanya tembok penahan tebing sungai | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan Tanggul Sungai | null | 200 | meter | - | Pembangunan Tanggul Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Betonisasi Jalan Lingkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DOSI ARAFIQ | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Kawat Bronjong penahan tebing antara Desa Kersik Tio dan Desa Mekar Jaya | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 100 | Meter | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 32 | DOSI ARAFIQ | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Tembok Penahan Sungai Penghubung | Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan Tanggul Sungai | null | 100 | Meter | - | Pembangunan Tanggul Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 33 | DOSI ARAFIQ | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Tembok penahan banjir penghubung Desa Koto Baru | Desa Koto Baru, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 1000 | Meter | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |
| 34 | ADI PURNOMO, SE, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Butuh normalisasi | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Normalisasi/Restorasi Sungai | null | 1000000000 | 10 paket | - | Normalisasi/Restorasi Sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Secara Terpadu |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Gedung Sekolah Sudah tidak Layak | SDN 88 Siulak Panjang, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 36 | ZULFIKAR | Rehab Perpustakaan (SMP) | belum ada | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Perpustakaan (SMP) | - |
| 37 | ZULFIKAR | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | belum ada | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ZULFIKAR | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | belum ada | se kecamatan batang merangin dan kecamatan danau kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | - |
| 39 | M. YUNUS | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | BELUM ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 40 | M. YUNUS | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | RUSAK PARAH | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 41 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | RUSAK PARAH | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | DiterimaSesuai prioritas dan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | BELUM ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | - |
| 43 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | SISWA BERPRESTASI | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz |
| 44 | ZULFIKAR | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | RUSAK | BATANG MERANGIN DAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ZULKISMI, SE | Rehab Ruang Kelas | ruang kelas yang sudah banyak yang rusak di SDN 03/III Sungai Deras | SDN 03/III Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Kelas | - |
| 46 | TOMI EMIRAL | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Ruang Kelas Sudah Rusak SD 96/111 Desa Tambak Tinggi | Desa Tambak Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 47 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | • Rehap pengadaan mebeL TK, SD, dan SMP, Kondisi Rusak berat<br>• Pengadaan alat mainan TK, SD, dan SMP. Kondisi Rusak berat | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 19 | Paket | 1.575.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Banyak yang sudah rusak | Seluruh kecamatan air hangat, kec. Air hangat barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 49 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pembangunan Ruang Kator (SMP) | Rusak berat | Smp 1 semurup, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Ruang Kator (SMP) | - |
| 50 | JAFRUL | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | rehab pagar Sekolah Dasar Koto lanang, kondisi rusak | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 51 | JAFRUL | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pamasangan paving block di sekolah Dasar desa koto Lanang, belum ada | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kemdikdasmen RI | | | | | | | |
| 52 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Rusak dan belum ada | Semua sekolah dapil 3, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Silakan lanjutkan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 19 | Unit | 168.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | - |
| 53 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyaknya siswa yg terdampak tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yg lebih tinggi | Desa Tutung Bungkuk, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Diterima | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu | Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz |
| 54 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Kecamatan Siulak, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 19 | Paket | 1.575.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |
| 56 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Kecamatan Gunung Kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |
| 57 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Bangunan sudah rusak | Semua desa di kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 58 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Belum Ada | SD Masgo Atas Kec.Gunung Raya Kab.Kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | FIQRI ELFANDA PUTRA | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | sekolah sudah tidak layak di pakai | Desa betung kuning, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 60 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pagar tembok roboh | desa koto patah smp 16 kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 61 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pagar sekolah , tebing penahan dan wc | SD 101 /III/ Koto patah kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 145/III Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Rumah Dinas Sekolah | - |
| 63 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 121/III Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Rumah Dinas Sekolah | - |
| 64 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 80/III Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Rumah Dinas Sekolah | - |
| 65 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 39/III Kubang Gedang, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Rumah Dinas Sekolah | - |
| 66 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 160/III Koto Panjang , Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Rumah Dinas Sekolah | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | MASYKUR | Rehab Ruang Perpustakaan | sangat di perlukan | SD 58 Lempur Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Perpustakaan | - |
| 68 | MASYKUR | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | masih di butuhkan | kelurahan Lempur, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 69 | MASYKUR | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | masih banyak guru dan murid kekurangan kursi dan meja | kelurahan lempur tengah kec. gunung raya, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | paket | 2.100.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | IRWANDI, S.Sy | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Kondisi Bangunan untuk digunakan TK ABA Sebukar rusak parah sehingga perlu untuk dilakukan rehabilitasi | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | - |
| 71 | IRWANDI, S.Sy | Mebel Murid dan Guru (PAUD) | TK ABA Sebukar masih sangat kekurangan mebel Murid dan Guru | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Dapat diajukan melalui Dapodik Sekolah Melalui Kemdikdasmen RI | 2 | Paket | 367.500.000 | Pengadaan Mebel PAUD | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Mebel Murid dan Guru (PAUD) | - |
| 72 | IRWANDI, S.Sy | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | TK ABA Sebukar Masih sangat kekurangan alat praktik dan peraga siswa | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Dapat diajukan melalui Dapodik Sekolah Melalui Kemdikdasmen RI | 1 | Paket | 105.000.000 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | - |
| 73 | IRWANDI, S.Sy | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | TK ABA Sebukar masih sangat kekurangan Perlengkapan TK | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Dapat diajukan melalui Dapodik Sekolah Melalui Kemdikdasmen RI | 5 | Paket | 840.000.000 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | IRWANDI, S.Sy | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Masih terdapat sekolah SMP yang perlu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, pagar dan toilet | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | - |
| 75 | IRWANDI, S.Sy | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Masih terdapat sekolah SD yang perlu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, pagar dan toilet | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 76 | IRWANDI, S.Sy | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | masih banyak jamban dan paving block SD yang perlu dibangun dan di rehab | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | IRWANDI, S.Sy | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyak siswa kurang mampu yang membutuhkan beasiswa | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Diterima | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu | Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz |
| 78 | MARIYUS | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Rusak | Kecamatan kayu aro, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 79 | LISNURBANI, S.PdI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | perlu adanya paving block | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 80 | LISNURBANI, S.PdI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | IRWANDRI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | perlu adanya paving block | Kec. Gunung Kerinci, Kec. Siulak, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | - |
| 82 | IRWANDRI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | perlu adanya paving block di SD | Kec. Gunung Kerinci, Kec. Siulak, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 83 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | banyaknya anak kurang mampu dalam pembiayaan sekolah | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Diterima Sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu | Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz |
| 84 | JUMADI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | pagar sekolah SD Sungai Asam | Desa Sungai Asam, Kec.Kayuaro Barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | JUMADI | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | gedung sekolah kurang memadai 3 lokal | Desa Sungai Asam, Kec. Kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - |
| 86 | JUMADI | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK Sekolah SD Kurang Memadai 3 Ruang | Desa Sungai Asam, Kec.Kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 87 | DOSI ARAFIQ | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan Gedung 3 Lokal | Desa Gunung labu Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | JUMADI | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK PAUD kurang memadai 1 ruang | Desa Sungai Asam, Kec. kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 89 | DOSI ARAFIQ | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan dedung sekolah | Desa sungai Lintang, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - |
| 90 | DOSI ARAFIQ | Pembangunan Unit Sekolah Baru | Gedung kurang memadai | Desa Kebun Baru, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 1 | Unit | 1.575.000.000 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Unit Sekolah Baru | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | DOSI ARAFIQ | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan WC Sekolah | Desa tangkil, Kecamatan Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - |
| 92 | DOSI ARAFIQ | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Kekurangan tempat pembelajaran dan bermain PAUD | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | - |
| 93 | BIR ALI | Rehab Ruang Perpustakaan | belum memiliki | SDN 58 Lempur Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab Ruang Perpustakaan | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | BIR ALI | Pembangunan Unit Sekolah Baru | dibutuhkan peningkatan sekolah | kelurahan lempur tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 1 | Unit | 1.575.000.000 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Unit Sekolah Baru | - |
| 95 | BIR ALI | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK tidak layak | kelurahan lempur tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | - |
| 96 | BIR ALI | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | kekurangan jumlah mabel | lempur tengah, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |
| 97 | IRWANDRI | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Perlunya pengadaan pakaian sekolah untuk siswa baru SD dan SMP se-Kabupaten Kerinci | Kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ANDESPA KENDORA, SH | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | banyaknya siswa tidak mampu | kecamatan bukit kerman, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Silakan lanjutkan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz |
| 99 | ANDESPA KENDORA, SH | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | kurang layak | SDN 27/III lolo kecil, Kab. Kerinci | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Disetujui | Silakan lanjutkan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 60 | Unit | 11.025.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | - |
| 100 | ZULFIKAR | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | tidak ada | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi berupa mesin dan peralatan industri untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis serta produktivitas SDM industri | null | 10 | Paket | 200.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | pembinaan, penyuluhan pemuda tani mardeka Indonesia (TMI) kec. depati tujuh dalam peningkatan pengolahan pangan lokal | kec. depati tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Fasilitasi Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi IKM | null | 1 | kegiatan | 70.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | - |
| 102 | JAFRUL | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | pemberdayaan kelompok pedagang kecil. | depati tujuh, air hangat, air hangat barat, dan air hangat timur, Kab. Kerinci | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Disetujui | null | Fasilitasi Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi IKM | null | 1 | kegiatan | 70.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | - |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | DOSI ARAFIQ | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | program KelompokTani Wanita | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi berupa mesin dan peralatan industri untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis serta produktivitas SDM industri | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | - |
| 104 | ZULFIKAR | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | banyak petani kekurangan pupuk | se kecamatan batang merangin dan danau kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Paket/Kg | 2.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 105 | ZULFIKAR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | jalan sudah rusak | se kecamatan danau kerinci dan batang merangin, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 2000 | M | 400.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | M. YUNUS | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | BANYAK PUPUK YANG TIDAK ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, pupuk yang tersedia adalah pupuk kompos serta menyesuaikan anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Paket | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 107 | M. YUNUS | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | BELUM ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Disetujui, dengan catatan memenuhi SOP/Juknis yang berlaku dan disesuaikan dengan plafon anggaran. | null | 10 | Paket/Unit | 490.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |
| 108 | M. YUNUS | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | BELU ADA PENGERASAN | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Disetujui, dengan catatan memenuhi SOP/Juknis yang berlaku, sesuai dengan komoditas tanaman perkebunan dan disesuaikan dengan plafon anggaran. | null | 10 | Paket | 2.000.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 109 | M. YUNUS | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | BANYAK LAHAN YAMG KOSONG | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Kelompok Tani | 450.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | BUTUH PENINGKATAN | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/Lokasi | 2.000.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 111 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | BANYAK PUPUK YANG TIDAK ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Paket/Kg | 2.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 112 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Pembangunan Pompa Hydran | BELUM ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/Unit | 1.500.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan Pompa Hydran | Peningkatan Aksesibilitas Air |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | BELUM ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/Unit | 490.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |
| 114 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | BANYAK PEMINAT | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/KT | 900.000.000 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Pengembangan Varietas Ayam Petelur |
| 115 | ZULKISMI, SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | keterbatasan akses menuju perladangan warga, dan juga warga susah untuk membawa hasil perkebunan ke desa. permasalhan utamanya belum ada jalan menuju perldangan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 116 | ZULKISMI, SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | rehabilitasi jalan usaha tani menuju perladangan warga | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 2000 | Meter | 400.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ZULKISMI, SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | pembukaan jalan akses warga menuju perladangan warga dan juga menuju ke desa pungut hilir | Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 5000 | Meter | 1.000.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 118 | ZULKISMI, SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | pembukaan jalan usaha tani menuju ke perladangan warga | Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 3000 | Meter | 600.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 119 | ZULKISMI, SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | peningkatan jalan usaha tani menuju ke perkebunan warga | Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 120 | ZULKISMI, SE | Bantuan Bibit Kopi | bantuan untuk bibit kopi | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | Batang | 45.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 121 | ZULKISMI, SE | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | pengadaan bantuan bibit kayu kulit manis | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | Batang | 45.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ZULKISMI, SE | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | pengadaan bantuan kadangan sapi maupun perbaikan | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5 | Unit Kandang | 245.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |
| 123 | TOMI EMIRAL | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Susahnya mendapatkan Bibit Kulit Masin yang bagus | Desa Belui Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | Batang | 450.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 124 | TOMI EMIRAL | Bantuan Bibit Kopi | Susuhnya mendapatkan Bibit Kopi yang Berkualitas | Desa Belui Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | Batang | 450.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 125 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | jalan rusak berat | Desa Air Panas Semurup kec.Air Hangat Barat, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 3 | KM | 600.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 126 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Bantuan Bibit Kopi | Petani butuh bibit berkualitas | Seluruh kabupaten kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Batang | 4.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Bibit ayam berkualitas dibutuhkan oleh peternak | Kec air hangat barat dan kec air hangat, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Ekor | 90.000.000 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Pengembangan Varietas Ayam Petelur |
| 128 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Lahan tidur yg semakin banyak, dan keterbatasan modal para petani | Desa Tutung Bungkuk, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | null | null | 10000 | batang | 45.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 129 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Banyaknya lahan tidur diwilayah terdampak | Desa Tutung Bungkuk, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5 | Unit | 245.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |
| 130 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Kecamatan Siulak, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 131 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Kecamatan Gunung Kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 133 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Bantuan Bibit Kopi | pengadaan bibit kopi, kayu manis kelompok tani | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | batang | 45.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 134 | ZAKARIA S.PdI | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bibit dan alsintan | Kecamatan gunung tujuh,k.aro,k,aro barat, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 3000 | Kg | 6.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 135 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Jalan susah di akses | Semua desa di kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Bantuan Pemiliharaan Kopi Robusta | Bahan pupuk yang mahal | Semua desa di dapil 4, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5 | Ha | 18.774.500 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pemeliharaan Kopi Robusta | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 137 | MUSRIZAL , M.Si | Bantuan Bibit Kopi | memerlukan bibit | desa koto baru kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | Batang | 45.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 138 | JAFRUL | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Pengadaan pupuk padi kelompok Tani dalam meningkatkan swasembada pangan Masyarakat | Depati tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, pupuk yang tersedia adalah pupuk kompos serta menyesuaikan anggaran yang tersedia. | null | 1500 | Kg | 3.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 139 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai betung hilir, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai langkap, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 141 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa siulak deras mudik, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 142 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa lubuk nagodang, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 143 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa koto kapeh, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 144 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa simpang tutup, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan bibit untuk petani | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 146 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | desa sungai kuning, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 147 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | desa pasir jaya, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 148 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangat di perlukan untuk penunjang hasil pertanian | Desa Telago pulau Tengah Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 300 | M | 60.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 149 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangan di perlukan karena menunjang masayarakat ke perkebunan | Desa Limok manaih kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Sangat di perlukan karena jalan tidak ada untuk warga ke perkebunan | Desa Telago Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 151 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangat di harapkan Masyarakat | desa Bintang Marak Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 152 | IRWANDI, S.Sy | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | masih terdapat peternak yang kekurangan kandang sapi | Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | unit | 490.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |
| 153 | IRWANDI, S.Sy | Bantuan Bibit Kopi | masih banyak masyarakat yang membutuhkan bibit kopi | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 154 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Bantuan Bibit Kopi | belum tersedianya bibit kopi dan kulit manis yang berkualitas dalam perkebunan kopi dan kulit manis | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | batang | 450.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | kesulitan dalam mengembangkan pertanian karena keterbatasan dalam mendapatkan pupuk dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam kelompok tani | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5000 | Kg | 10.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 156 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | belum tersedianya bibit kopi dan kulit manis yang berkualitas dalam perkebunan kopi dan kulit manis | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | batang | 450.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 157 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | memperlancar petani ke kebun | sungai Ngeracah Desa Koto Lebuh Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 2000 | M | 400.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 158 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | support pemerintah dalam menembah penghasilan masyarakat | Desa air Betung, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | batang | 45.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 159 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Pengadaan sapi ternak | Desa Kersik Tuo, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 49.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Pengadaan Sapi Ternak | Desa Koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 49.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |
| 161 | DOSI ARAFIQ | Bantuan Bibit Kopi | Pengadaan Bibit kopi Arabika dan Robusta | Desa kersik Tuo, Kayu aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5000 | Batang | 22.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Bibit Kopi | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 162 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Pengadaan bibit kuliot manis | Desa koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Batang | 4.500.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi |
| 163 | ANDESPA KENDORA, SH | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | kekurangan stok telur ayam | Desa kebun 5 kec. gung raya, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | ekor | 90.000.000 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Pengembangan Varietas Ayam Petelur |
| 164 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Kebutuhan peternak | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | unit | 490.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ADI PURNOMO, SE, MM | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Banyak kelangkaan pupuk | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, pupuk yang tersedia adalah pupuk kompos serta menyesuaikan anggaran yang tersedia. | null | 500000 | Kg | 1.000.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani |
| 166 | IRWANDRI | Alat dan Mesin Pertanian | USULAN KELOMPOK | DESA SIULAK DERAS MUDIK, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | Disetujui dan sesuaikan | 8 | BUAH | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 167 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | kerusakan bendung, saluran tanah, tidak optimalnya distribusi air secara merata ke lahan persawahan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 3500 | Meter | 300.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 168 | ZULFIKAR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10000 | 1000000000 | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | ZULFIKAR | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | banyak keperluasn petani | se kecamatan danau kerinci dan ke batang merangin, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 10 | Paket | 100.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 170 | M. YUNUS | Pengembangan Jalan Usaha Tani | BUKA BARU | SE KECAMATAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 171 | M. YUNUS | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BELUM ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 172 | M. YUNUS | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BELUM ADA IRIGASI | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BANYAK YANG RUSAK | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 174 | ANGRAPRADANA PUTRA, SE, MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | SANGAT DI HARAPKAN | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Alpukat dan Sparodi) | null | 100 | Paket | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 175 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | terdapat irigasi dan juga bendungan yang rusak dan juga belum ada bendungan di area persawahan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 700 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | ZULKISMI, SE | Pengembangan Jalan Usaha Tani | perlunya rehabilitasi jalan usaha tani menuju ke perswahan warga, kondisi jalan yang rusak dan masih dalam kondisi tanah | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 150.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 177 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum adanya bendungan irigasi menuju persawahan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 100 | Meter | 185.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 178 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi di persawahan warga | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 500 | Meter | 180.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 179 | ZULKISMI, SE | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Rehabilitasi jalan usaha tani menuju persawahan warga yang sudah rusak dan juga belum di bangun | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1500 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 180 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunan irigasi di persawahan warga | Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 750 | Meter | 210.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rehabilitasi irigasi di persawahan warga | Baru Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 170.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 182 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rehabilitasi jalan usaha tani yang sudah rusak menuju persawahan warga | Baru Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1500 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 183 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi jalan usaha tani menuju persawahan warga yang sudah rusak | Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 175.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 184 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi menuju ke persawahan warga | Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 700 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 185 | ZULKISMI, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi di persawahan warga yang sudah rusak | Kemantan Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 230.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bibit bisa kurang sehat, tidak seragam, atau tidak sesuai spesifikasi sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | Kegiatan | 250.000.000 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 187 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bibit bisa kurang sehat, tidak seragam, atau tidak sesuai spesifikasi sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. | Kecamatan Gunung Kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1 | Kegiatan | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | TOMI EMIRAL | Alat dan Mesin Pertanian | Sulitnya Masyarakat dalam mengolah lahan secara manual (Bantuan Mesing traktor bajak tanah kering/perladangan) | Desa Belui Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | disetujui untuk di akomodir dan dibahas | 5 | Unit | 135.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 189 | TOMI EMIRAL | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Sulitnya masyarakat mendapatkan Air Untuk pertanian sawah | Desa Tambak Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 190 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Alat dan Mesin Pertanian | Pengadaan Alsintan kelompok tani : Handtraktor, Mesin bajak sawah, Mesin bajak tanah dan Mesin sedot air | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,dan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | UNIT | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 191 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Saluran irigasi dan Beronjong. Kondisi Rusak berat | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1,5 | Meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Alat dan Mesin Pertanian | Kualitas alat pertanian petani butuh di tingkatkan | Kecamatan air hangat barat dan air hangat , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | unit | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 193 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Petani membutuhkan bibit bersertifikat | Kabupaten kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1000 | Ton | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 194 | JAFRUL | Pengembangan Jalan Usaha Tani | pembangunan buka jalan usaha tani Desa Ladeh | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 400 | Meter | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | JAFRUL | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunanjalan usaha tani (lanjutan) desa Koto lanang | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 500 | Meter | 260.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 196 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | sering mengalami kekeringan | tebing tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 200 | meter | 100.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 197 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Belum tersedianya jalan yg layak dan baik | Desa Tutung Bungkuk , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 300 | meter | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 198 | YUZA DWIKI NOPDIAN, SE | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Banyaknya lahan tidur yang dimiliki oleh rakyat terdampak | Desa Koto Lebuh Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Bawang dan Saprodi) | null | 1000 | batang | 150.000.000 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | ISLAMUDIN | Pengembangan Jalan Usaha Tani | BUTUH PENINGKATAN | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 15 | PAKET | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 200 | ISLAMUDIN | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 10 | PAKET | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 201 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan mengalami retak, berlubang, bergelombang, atau amblas akibat usia jalan, beban lalu lintas, dan faktor cuaca. | Kecamatan Siulak , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Kegiatan | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan mengalami retak, berlubang, bergelombang, atau amblas akibat usia jalan, beban lalu lintas, dan faktor cuaca. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Kegiatan | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 203 | ZAKARIA S.PdI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Susah nya akses masyarakat untuk ke kebun | Desa pelompek pasar baru, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 3000 | Meter | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 204 | ZAKARIA S.PdI | Alat dan Mesin Pertanian | Untuk mempermudah petani menggarap lahan | Kecatan gunung 7, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5 | unit | 100.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 205 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Alat dan Mesin Pertanian | Dibutuhkan sarana dan prasarana pertanian | Semua desa di kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5 | unit | 100.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 206 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum Ada | Desa Manjuto Lempur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 200 | m | 150.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak parah | Desa Manjuto Lempur Kec.Gunung Raya, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | km | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 208 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak | Desa Pasar Kerman Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 209 | FIQRI ELFANDA PUTRA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | sangat di butuhkan sering terjadi banjir | desa Betung Kuning, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 210 | FIQRI ELFANDA PUTRA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | peningkatan jalan | desa betung kuning, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 211 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum Ada | Desa Manjuto Lempur Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 300 | m | 170.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | MUSRIZAL , M.Si | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masih mengunakan bibit lokal | desa talang lindung kec. keliling danau, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Alpukat dan Saprodi) | null | 1 | paket | 100.000.000 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 213 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa Koto baru kec. keliling danau, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 850 | M | 185.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 214 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa koto patah Kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 215 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa serumpuh pauh kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa pancuran tiga kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 217 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya Bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 218 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Desa Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 219 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1 | paket | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 221 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat Kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Pungut Tengah , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | paket | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Pungut Hilir , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | paket | 150.000.000 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 223 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Baru Kubang, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | paket | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 225 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | desa pasir jaya, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 226 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | desa sungai kuning, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 227 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Ada Jalan | Desa Koto Lebuh Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 228 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunan saluran irigasi persawahan didusun Pinggir Bukit | Depati Tujuh, Air Hangat, Air hangat Barat, Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 400 | Meter | 170.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa koto lebuh tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 230 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 231 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai betung hilir, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 232 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak ada irigasi di persawahan | desa lubuk nagodang, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 233 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa siulak deras mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 234 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai langkap, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa lubuk nagodang, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 236 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa koto kapeh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 237 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa simpang tutup, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 238 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | lanjutan pembukaan jalan baru | desa siulak tenang, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 239 | MASYKUR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | terdapat banyak jalan yang rusak | jalan RT4 menuju lempur mudik - Kelurahan Lempur Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5000 | M | 235.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | MASYKUR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | normalisasi sangat di perlukan | Desa sungai hangat kec. gunung raya, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 241 | MASYKUR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Sangat di butuhkan | Desa Talang Kemuning Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 242 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 243 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Desa Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Ir. BOY EDWAR, MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | kurangnya bibit/benih bagi petani | DAPIL 3 Kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 2000 | kilo gram | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 245 | IRWANDI, S.Sy | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | masyarakat masih kekurangan bibit | Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe Rawit dan Saprodi) | null | 20 | paket | 100.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | IRWANDI, S.Sy | Alat dan Mesin Pertanian | petani masih kekurangan alat dan mesin pertanian | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | paket | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 247 | IRWANDI, S.Sy | Pengembangan Jalan Usaha Tani | masih banyak wilayah yang belum dibangun jalan usaha tani | Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5 | KM | 400.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 248 | MARIYUS | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan rusak | Kecqmatan gunung 7. Kayu aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2 | Km | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 249 | IRWANDRI | Alat dan Mesin Pertanian | usulan kelompok | Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | buah | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 250 | IRWANDRI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | perlu jalan usaha tani | Desa Talang Tinggi, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2500 | meter | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | IRWANDRI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | perlu bibit bawang | Desa Siulak Deras mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Bawang dan Saprodi) | null | 5 | paket | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 252 | IRWANDRI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rusak | Desa Siulak Deras Mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2500 | meter | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 253 | LISNURBANI, S.PdI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 250 | meter | 100.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Alat dan Mesin Pertanian | Meningkatkan produksi para petani | Desa Mukai Sebrang, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | unit | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 255 | DOSI ARAFIQ | Alat dan Mesin Pertanian | mempercepat proses penyediaan lahan | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |
| 256 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | pengadaan Bibit Kentang | Desa Kersik Tuo, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 200 | Kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Pengadaan bibit kentang unggul | Desa Sungai Tanduk, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 200 | Kotak | 200.000.000 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 258 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Pengadaan bibit kentang | Desa Koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 200 | Kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | DOSI ARAFIQ | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembuatan irigasi lahan pertanian | Desa Koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 200 | Meter | 100.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 260 | JUMADI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | melancarkan pembuangan air sawah | desa koto baru, kec. kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2000 | m | 220.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 261 | JUMADI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | melancarkan pembuangan air sawah | desa pasar sungai tanduk, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2000 | m | 220.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 262 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa sungai asam, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa giri mulyo, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 264 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa guning baru,kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa sako dua, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 266 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa batu hampar, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa bento, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 268 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa kampung baru, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | des kersik tuo, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 270 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa batang sangir, kec kayu aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa bedeng baru, kec kayu aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 272 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa kebun baru, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa kampung baru, kec kayu aro, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang G0/G1 dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 274 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | untuk mempermudah masyarakat dalam mengelurkan hasil tani | RT 03 dan RT 05 lempr mudik, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1500 | m | 220.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 275 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | untuk mempermudah masyarakat mengatur perairan air sawah | rt 04 PGE, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2000 | m | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 276 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | dibutuhkan untuk ketahanan pangaan | desa manjuto, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | dibutuhkan untuk masyarakat | desa lempur , Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 278 | ANDESPA KENDORA, SH | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | peningkatan | desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | PAKET | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
| 279 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Kebutuhan petani | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1000000000 | 10 paket | 200.000.000 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bantuan Benih Kentang |
| 280 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Butuh peningkatan | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000000000 | 10 paket | 200.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Jalan Usaha Tani |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | SUB KEGIATAN | Prioritas | Isu | Program Prioritas/Program Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ADI PURNOMO, SE, MM | Alat dan Mesin Pertanian | Belum ada | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | paket | 200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Peningkatan Ekonomi Pertanian | Alat dan Mesin Pertanian | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan |

Berdasarkan hasil telaah Poko-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027, terdapat beberapa prioritas Pembangunan Daerah yang belum secara langsung didukung oleh usulan Pokir DPRD yaitu Peningkatan Birokrasi Daerah yang Berkualitas dan Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh prioritas Pembangunan Daerah memperoleh representasi usulan dari hasil penyerapan aspirasi DPRD. Prioritas yang belum didukung oleh Pokir tetap menjadi bagian dari agenda Pembangunan Daerah dan akan diakomodasi melalui program dan kegiatan perangkat daerah dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan daerah Peningkatan Ekonomi Pertanian didukung oleh Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai berikut.

**Tabel II. 104**
**Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Ekonomi Pertanian**
**Tahun 2027**

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | PEMBANGUNAN MONUMEN | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | REHAB WISATA PIDUNG | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Belum Ada | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pemanfaatan Monumen menjadi tempat wisata, kurangnya lokasi untuk UMKM Tugu Macan | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Butuh event dan prasarananya | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | banyak petani kekurangan pupuk | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | BANYAK PUPUK YANG TIDAK ADA | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | BELUM ADA | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | BANYAK LAHAN YAMG KOSONG | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | BANYAK PUPUK YANG TIDAK ADA | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | BELUM ADA | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengembangan Varietas Ayam Petelur | BANYAK PEMINAT | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | bantuan untuk bibit kopi | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | pengadaan bantuan bibit kayu kulit manis | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | pengadaan bantuan kadangan sapi maupun perbaikan | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Susahnya mendapatkan Bibit Kulit Masin yang bagus | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | Susuhnya mendapatkan Bibit Kopi yang Berkualitas | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | Petani butuh bibit berkualitas | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Bibit ayam berkualitas dibutuhkan oleh peternak | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Lahan tidur yg semakin banyak, dan keterbatasan modal para petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Banyaknya lahan tidur diwilayah terdampak | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | pengadaan bibit kopi, kayu manis kelompok tani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bibit dan alsintan | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pemiliharaan Kopi Robusta | Bahan pupuk yang mahal | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | memerlukan bibit | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Pengadaan pupuk padi kelompok Tani dalam meningkatkan swasembada pangan Masyarakat | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | masih terdapat peternak yang kekurangan kandang sapi | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | masih banyak masyarakat yang membutuhkan bibit kopi | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | belum tersedianya bibit kopi dan kulit manis yang berkualitas dalam perkebunan kopi dan kulit manis | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | kesulitan dalam mengembangkan pertanian karena keterbatasan dalam mendapatkan pupuk dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam kelompok tani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | belum tersedianya bibit kopi dan kulit manis yang berkualitas dalam perkebunan kopi dan kulit manis | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | support pemerintah dalam menembah penghasilan masyarakat | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Pengadaan sapi ternak | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Pengadaan Sapi Ternak | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Bibit Kopi | Pengadaan Bibit kopi Arabika dan Robusta | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Pengadaan bibit kuliot manis | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengembangan Varietas Ayam Petelur | kekurangan stok telur ayam | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Kebutuhan peternak | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Banyak kelangkaan pupuk | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | USULAN KELOMPOK | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | banyak keperluasn petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | SANGAT DI HARAPKAN | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bibit bisa kurang sehat, tidak seragam, atau tidak sesuai spesifikasi sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bibit bisa kurang sehat, tidak seragam, atau tidak sesuai spesifikasi sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | Sulitnya Masyarakat dalam mengolah lahan secara manual (Bantuan Mesing traktor bajak tanah kering/perladangan) | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | Pengadaan Alsintan kelompok tani :<br><br>Handtraktor, Mesin bajak sawah, Mesin bajak tanah dan Mesin sedot air | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | Kualitas alat pertanian petani butuh di tingkatkan | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Petani membutuhkan bibit bersertifikat | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Banyaknya lahan tidur yang dimiliki oleh rakyat terdampak | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | Untuk mempermudah petani menggarap lahan | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | Dibutuhkan sarana dan prasarana pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masih mengunakan bibit lokal | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat Kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | kurangnya bibit/benih bagi petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | masyarakat masih kekurangan bibit | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | petani masih kekurangan alat dan mesin pertanian | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | usulan kelompok | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi | perlu bibit bawang | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | | |
| Alat dan Mesin Pertanian | Meningkatkan produksi para petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | mempercepat proses penyediaan lahan | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | pengadaan Bibit Kentang | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Pengadaan bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Pengadaan bibit kentang | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Kebutuhan petani | Peningkatan Ekonomi Pertanian |
| Alat dan Mesin Pertanian | Belum ada | Peningkatan Ekonomi Pertanian |

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing merupakan prioritas Pembangunan daerah ketiga yang didukung oleh Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai berikut.

**Tabel II. 105**
**Pokok-Pokok Pikihran DPRD yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Tahun 2027**

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | SISWA BERPRESTASI | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | • Rehap pengadaan mebeL TK, SD, dan SMP, Kondisi Rusak berat<br>• Pengadaan alat mainan TK, SD, dan SMP. Kondisi Rusak berat | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyaknya siswa yg terdampak tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yg lebih tinggi | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | masih banyak guru dan murid kekurangan kursi dan meja | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Mebel Murid dan Guru (PAUD) | TK ABA Sebukar masih sangat kekurangan mebel Murid dan Guru | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | TK ABA Sebukar Masih sangat kekurangan alat praktik dan peraga siswa | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | TK ABA Sebukar masih sangat kekurangan Perlengkapan TK | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyak siswa kurang mampu yang membutuhkan beasiswa | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | banyaknya anak kurang mampu dalam pembiayaan sekolah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | kekurangan jumlah mabel | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Perlunya pengadaan pakaian sekolah untuk siswa baru SD dan SMP se-Kabupaten Kerinci | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | banyaknya siswa tidak mampu | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | tidak ada | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | pembinaan, penyuluhan pemuda tani mardeka Indonesia (TMI) kec. depati tujuh dalam peningkatan pengolahan pangan lokal | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |
| Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | pemberdayaan kelompok pedagang kecil. | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | program KelompokTani Wanita | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing |

Kemudian untuk prioritas Pembangunan daerah keempat yaitu Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Bekelanjutan dudukung oleh Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebgai berikut.

**Tabel II. 106**
**Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan Tahun 2027**

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sungai sudah dangkal perlu di normalisasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | SUNGAI SUDAH DANGKAL PERLU DI NORMALISASI | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | SUDAH RUSAK PARAH | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BUTUH NORMALISASI SUNGAI | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Turap yang ada sudah roboh | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BUTUH TEMBOK PENAHAN | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | pembangunan Saluran irigasi lapangan pemuda desa koto Lanang kayu aho mangkak, kondisi rusak berat | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | belum ada dinding penahan tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | belum ada dinding penahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Peningkatan Aksesibilitas Air | tidak ada tanggul sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | belum ada pebahan tebing | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tebing harus di perbaiki menimalisir banjir | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tembok penahan yang sudah tidak layak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyaknya Tebing Yang Amblas | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyaknya Tebing Yang Amblas | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyak Tebing Yang Amblas | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tidak lancarnya aliran air | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | perlu adanya tembok penahan tebing sungai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Kawat Bronjong penahan tebing antara Desa Kersik Tio dan Desa Mekar Jaya | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Tembok Penahan Sungai Penghubung | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Tembok penahan banjir penghubung Desa Koto Baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Butuh normalisasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Gedung Sekolah Sudah tidak Layak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Perpustakaan (SMP) | belum ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | belum ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | belum ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | BELUM ADA | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | RUSAK PARAH | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | RUSAK PARAH | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | BELUM ADA | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | RUSAK | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Ruang Kelas | ruang kelas yang sudah banyak yang rusak di SDN 03/III Sungai Deras | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Ruang Kelas Sudah Rusak SD 96/111 Desa Tambak Tinggi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Banyak yang sudah rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Ruang Kator (SMP) | Rusak berat | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | rehab pagar Sekolah Dasar Koto lanang, kondisi rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pamasangan paving block di sekolah Dasar desa koto Lanang, belum ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Rusak dan belum ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Bangunan sudah rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Belum Ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | sekolah sudah tidak layak di pakai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pagar tembok roboh | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pagar sekolah , tebing penahan dan wc | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Ruang Perpustakaan | sangat di perlukan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | masih di butuhkan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Kondisi Bangunan untuk digunakan TK ABA Sebukar rusak parah sehingga perlu untuk dilakukan rehabilitasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Masih terdapat sekolah SMP yang perlu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, pagar dan toilet | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Masih terdapat sekolah SD yang perlu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, pagar dan toilet | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | masih banyak jamban dan paving block SD yang perlu dibangun dan di rehab | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | perlu adanya paving block | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | perlu  adanya paving block | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | perlu adanya paving block di SD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | pagar sekolah SD Sungai Asam | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | gedung sekolah kurang memadai 3 lokal | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK Sekolah SD Kurang Memadai 3 Ruang | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan Gedung 3 Lokal | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK PAUD kurang memadai 1 ruang | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan dedung sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru | Gedung kurang memadai | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan WC Sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Kekurangan tempat pembelajaran dan bermain PAUD | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab Ruang Perpustakaan | belum memiliki | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru | dibutuhkan peningkatan sekolah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK tidak layak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | kurang layak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | jalan sudah rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | BELU ADA PENGERASAN | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | BUTUH PENINGKATAN | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan Pompa Hydran | BELUM ADA | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | keterbatasan akses menuju perladangan warga, dan juga warga susah untuk membawa hasil perkebunan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| | ke desa. permasalhan utamanya belum ada jalan menuju perldangan warga | |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | rehabilitasi jalan usaha tani menuju perladangan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | pembukaan jalan akses warga menuju perladangan warga dan juga menuju ke desa pungut hilir | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | pembukaan jalan usaha tani menuju ke perladangan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | peningkatan jalan usaha tani menuju ke perkebunan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | jalan rusak berat | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Jalan susah di akses | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangat di perlukan untuk penunjang hasil pertanian | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangan di perlukan karena menunjang masayarakat ke perkebunan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Sangat di perlukan karena jalan tidak ada untuk warga ke perkebunan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangat di harapkan Masyarakat | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | memperlancar petani ke kebun | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | kerusakan bendung, saluran tanah, tidak optimalnya distribusi air secara merata ke lahan persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | BUKA BARU | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BELUM ADA | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BELUM ADA IRIGASI | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BANYAK YANG RUSAK | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | terdapat irigasi dan juga bendungan yang rusak dan juga belum ada bendungan di area persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | perlunya rehabilitasi jalan usaha tani menuju ke perswahan warga, kondisi jalan yang rusak dan masih dalam kondisi tanah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum adanya bendungan irigasi menuju persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi di persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | Rehabilitasi jalan usaha tani menuju persawahan warga yang sudah rusak dan juga belum di bangun | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunan irigasi di persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rehabilitasi irigasi di persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rehabilitasi jalan usaha tani yang sudah rusak menuju persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi jalan usaha tani menuju persawahan warga yang sudah rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi menuju ke persawahan warga | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi di persawahan warga yang sudah rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Sulitnya masyarakat mendapatkan Air Untuk pertanian sawah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Saluran irigasi dan Beronjong. Kondisi Rusak berat | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | pembangunan buka jalan usaha tani Desa Ladeh | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunanjalan usaha tani (lanjutan) desa Koto lanang | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | sering mengalami kekeringan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | Belum tersedianya jalan yg layak dan baik | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | BUTUH PENINGKATAN | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan mengalami retak, berlubang, bergelombang, atau amblas akibat usia jalan, beban lalu lintas, dan faktor cuaca. | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan mengalami retak, berlubang, bergelombang, atau amblas akibat usia jalan, beban lalu lintas, dan faktor cuaca. | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Susah nya akses masyarakat untuk ke kebun | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum Ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak parah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | sangat di butuhkan sering terjadi banjir | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | peningkatan jalan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum Ada | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya Bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Ada Jalan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunan saluran irigasi persawahan didusun Pinggir Bukit | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak ada irigasi di persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | lanjutan pembukaan jalan baru | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | terdapat banyak jalan yang rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | normalisasi sangat di perlukan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Sangat di butuhkan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pengembangan Jalan Usaha Tani | masih banyak wilayah yang belum dibangun jalan usaha tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | perlu jalan usaha tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembuatan irigasi lahan pertanian | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | melancarkan pembuangan air sawah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

| USULAN | MASALAH | PRIORITAS |
|---|---|---|
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | melancarkan pembuangan air sawah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | untuk mempermudah masyarakat dalam mengelurkan hasil tani | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | untuk mempermudah masyarakat mengatur perairan air sawah | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | dibutuhkan untuk ketahanan pangaan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | dibutuhkan untuk masyarakat | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | peningkatan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Butuh peningkatan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan |

## 2.6. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong pengembangan inovasi daerah pada berbagai sektor Pembangunan. Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh perengkat daerah, baik di bidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintah dan lainnya.

Pada tahun 2025 total jumlah inovasi di Kabupaten Kerinci adalah 95 inovasi yang terdiri dari 44 inovasi dari 25 Perangkat Daerah, 20 inovasi dari 17 Kecamatan dan 31 inovasi dari 18 Puskesmas. Kabupaten Kerinci mendapatkan peringkat 178 nasional dengan nilai indeks 50,71 dan mendapatkan predikat **"Inovatif"** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6098 Tahun 2025. Inovasi Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 107**
**Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| **INOVASI PERANGKAT DAERAH** | | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | 1 | RT ISTIMEWA (Rukun Tentangga Ikut Serta Mengawasi Wanita dan Anak) 2.0 | RT ISTIMEWA merupakan inovasi berupa peningkatan peran kader sebagai pemberdayaan masyarakat selain mengawasi dan melaporkan sasaran yang beresiko terhadap stunting. Kader juga mengawasi dan melaporkan sasaran beresiko terhadap penurunan AKI dan AKB dan mencari mitra dan bekerjasama dengan PKK, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam intervensi terhadap kasus tersebut. Tujuannya untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting, kematian ibu dan bayi. |
| 2 | | 1 | e-RK (Elektronik Remunirasi dan Kinerja) | e-RK (Remunerasi Kinerja) adalah sistem penilaian kinerja yang juga dapat dijadikan dasar pemberian insentif kepada seluruh pegawai Pemerintah |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Daerah | | | Kabupaten Kerinci. Ini merupakan sistem tertutup yang memerlukan login untuk masuk, melihat data, dan melakukan aktifitas. |
| | | 2 | SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) | Sistem Informasi yang dirancang untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari pengisian, pengolahan dan pemusatan data secara terkomputerisasi sehingga dapat menangani berbagai laporan yang berhubungan dengan kepegawaian. |
| | | 3 | e-Absensi Kerinci | Aplikasi ini dikembangkan dengan mengedepankan kemudahan bagi pengguna sehingga pengguna yang awam dengan teknologi pun dapat menggunakan aplikasi absensi ini. Pengguna dapat melakukan perekaman absen dengan mudah tanpa harus terhubung ke internet pada saat perekaman. Data absensi akan terhubung dengan database SIAP yang akan mengelola data absen semua pegawai. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan solusi atas efisiensi biaya dan waktu |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dan juga dapat meningkatkan disiplin ASN di Pemkab Kerinci. |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | PAK DEWA (Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WhatsApp) | PAK DEWA merupakan inovasi pelayanan administrasi dokumen kependudukan secara Onlie melalui Aplikasi Whatt App. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan tanpa terkendala oleh jarak, geografis, waktu, dan biaya. |
| | | 2 | PAK KAMLING (Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Perekaman Keliling) | PAK KAMLING merupakan inovasi pelayanan administrasi dokumen kependudukan Jemput Bola (JEBOL). Yaitu petugas mendatangi langsung sekolah atau desa dalam kabupaten kerinci dengan menggunakan transportasi mobil pelayanan. Guna mempermudah masyarakat dalam perekaman KTP dan penerbitan dokumen kependudukan tanpa terkendala jarak, geografis, waktu, dan biaya. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bappeda-Litbang | 1 | LABINOV (Laboratorium Inovasi Kabupaten Kerinci) | LABINOV (Laboratorium Inovasi) Kabupaten Kerinci yaitu wadah bagi OPD untuk menggali /menciptakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan inovasi. |
| | | 2 | Klinik JANGKI TINO (Jejaring Komunikasi dan Informasi Tentang Inovasi) | KLINIK JANGKI TINO merupakan inovasi berupa layanan klinik konsultasi inovasi sebagai media bagi ASN, Perangkat Daerah dan masyarakat dalam hal konsultasi dan koordinasi dan berbagi informasi tentang inovasi yang dapat dilakukan secara klasikal maupun melalui media sosial. Tujuannya untuk mempermudah ASN, Perangkat Daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan inovasi. |
| 5 | Dinas Pendidikan | 1 | Absensi Guru ASN Berbasis Android | APLIKASI GURU ASN BERBASIS ANDROID merupakan sarana presensi bagi guru ASN dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui Google Play. Tujuan aplikasi ini untuk meningkatkan disiplin kehadiran guru ASN. |
| | | 2 | Aplikasi E-SPPD | APLIKASI E-SPPD merupakan aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk menertibkan administrasi Surat |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Tujuan inovasi ini adalah meningkatkan ketersediaan dan penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, meminimalkan kesalahan administrasi pencatatan manual, dan mempercepat pelaporan SPPD. |
| | | 3 | GEMBUR TAZQUR'AN (Pengembangan Kurikulum Tahfiz Qur'an) | Inovasi berupa penambahan kurikulum tahfizh pada Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri. Tujuan nya meningkatkan kualitas pelajaran agama Islam bagi peserta didik. |
| | | 4 | Pengembangan Kurikulum Anti Korupsi | Inovasi merupakan inovasi berupa penambahan kurikulum anti korupsi pada Satuan Pendidikan SD dan SMP. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman anti korupsi peserta didik SD dan SMP Negeri sebagai upaya membentuk generasi anti korupsi sejak dini. |
| 6 | Dinas Sosial | 1 | Ramah Disabilitas | RAMAH DISABILITAS merupakan inovasi dalam bentuk penguatan pemberian hak yang sama kepada kaum Disabilitas dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung, pemberdayaan dan pelatihan untuk mempemudahkan Penyandang Disabilitas |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mempunyai keterampilan yang kreatif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial serta menjadi pribadi yang lebih unggul. |
| | | 2 | KUBE (Kelompok Usaha Bersama Plus) | KUBE PLUS (Kelompok Usaha Bersama) yaitu merupakan wadah untuk menggali potensi yang ada pada wilayah di Kabupaten Kerinci.Anggota KUBE menjadi sejahtera serta memiliki kehidupan yang layak di tengah masyarakat luas. |
| | | 3 | SAKANTI ( Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial Digital Terintegrasi) | Sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesejahteraan sosial secara online. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Dinas Sosial |
| 7 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortukultura | 1 | BATATERAS (Blok Pengadaan Mata Tempel Jeruk Lokal Berbasis Masyarakat) | BATATERAS merupakan inovasi berupa sumber benih jeruk di dalam screen house bebas hama dan penyakit yang dikelola oleh dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dibawah bidang Hortikultura untuk mempermudah penangkar dan petani jeruk membuat bibit bebas Hama dan penyakit secara mandiri. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 1 | MELAIR PEDATI (Mengatasi Kesulitan Air di Perkebunan Dataran Tinggi) | MENGATASI KESULITAN AIR DI PERKEBUNAN DATARAN TINGGI merupakan sebuah inovasi yang mengubah sistem pengairan pada lahan perkebunan masyarakat dengan mengalirkan air dari celah-celah perbukitan di tempat yang lebih rendah ke lahan perkebunan yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi Pompa Hidrolik Ram atau Pompa Hidram tanpa menggunakan bahan bakar atau tambahan energi dari luar. Sehingga dapat menekan biaya produksi dalam pemenuhan kebutuhan air terutama bagi tanaman perkebunan baik di musim hujan maupun kemarau. |
| | | 2 | EFI PANEN TOPI (Efisiensi Pasca Panen Tanaman<br><br>Kopi) | EFISIENSI PASCA PANEN TANAMAN KOPI merupakan inovasi mempermudah petani dalam penanganan pasca panen tanaman kopi dengan cara dengan cara mengubah alat Pulper dan Huller (2 unit) menjadi 1 unit yang menyatu sehingga mesin bisa dibawa kemana-mana (*portable*) ke lokasi perkebunan dan tidak memerlukan tempat yang luas sehingga dapat menekan ongkos penanganan pasca panen tanaman kopi. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | 1 | PEKABUDIL (PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA IKAN LOKAL) | PEKABUDIL merupakan inovasi dalam pengembangan usaha pembudidaya ikan lokal (ikan semah) dalam satu kawasan perairan umum. Hal ini dilakukan dengan cara akselerasi pengembangan kawasan budidaya perikanan yang berkelanjutan yaitu penebaran benih ikan (restocking) di perairan umum tanpa mengenyampingkan kearifan lokal. |
| | | 2 | TUAN CANA ( Pemberian Bantuan Bencana) | Pemberian Bantuan Bencana berupa beras cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | SIAP KADES (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Keuangan dan Aset Desa) | SIAP KADES (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Keuangan dan Aset Desa) yaitu dapat mengurangi intensitas layanan tatap muka antara petugas dan penerima layanan serta membantu petugas dalam mengidentifikasi desa-desa yang belum mengajukan rekomendasi permohonan penyaluran DD, ADD , BHPR dan BKP serta jumlah dana yang telah disalurkan. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) | Klinik LKPM merupakan inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan pada jam tertentu (12.00-14.00 WIB) dengan membuat jadwal piket secara sistematis dan berkalasehingga pengumpulan data realisasi penanaman modal lebih akurat. Klinik LKPM bertujuan mempermudah investor melaporkan LKPM dan agar tercapainya Target Investasi. |
| 12 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja | 1 | SISA TENGKER (Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja) | Inovasi untuk menigkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pencari kerja dalam memperoleh informasi terkait lowongan pekerjaan baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, Pencari Kerja melakukan pendaftaran sebagai pencari kerja secara online kemudian memperoleh bukti berupa Kartu Tanda Daftar Pencari Kerja (AK/1) dengan proses mudah, cepat, tepat, bermanfaat sehingga terwujudnya kebutuhan masyarakat melalui kegiatan yang konstruktif dilandasi pemikiran serta kerja nyata. |
| | | 2 | Kios *Three In One* Penyediaan Layanan (Sistem Berbasis on Line) | Kios Three In One Penyediaan Layanan (Sistem Informasi Pelatihan dan Bursa Tenaga Kerja) guna mempercepat masyarakat/ Angkatan Kerja dalam |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | memperoleh informasi pelatihan dan informasi pasar kerja baik Lokal, Nasional, maupun Global.Melalui Layanan Kios Three In One mempermudah akses informasi yang akurat tentang pelatihan Sertifikasi dan Informasi Peluang kerja |
| 13 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1 | SINHARPOK (Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis Berbasis WEB) | SINHARPOK merupakan inovasi berupa Publikasi Data dan Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dengan memanfaatkan Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengembangan Website untuk memudahkan akses informasi harga barang kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat umum. |
| 14 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1 | BATASI (Barcode Wisata Kerinci) | BATASI merupakan inovasi dalam memasarkan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, murah dan mudah melalui aplikasi Quick Respon Code (Barcode) yang dicetak berupa banner dan bisa diakses diruang publik seperti di Bandara, Restoran, Lobby Hotel, Loket Biro Perjalanan dan Objek Wisata Kabupaten Kerinci yang terhubung ke Instragram disparbud untuk mempermudah pengunjung mencari informasi pariwisata mulai dari |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Objek Wisata, Kuliner, Akomodasi, dan Oleh-oleh khas Kerinci. |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | PESANMU (Pengolahan Persampahan Menuju Kerinci Bersih) | Inovasi dalam upaya mengatasi permasalahan sampah dengan cara mengiventarisir permasalahan persampahan dan menetapkan kebijakan dalam pengelolaan persampahan sehingga kerinci bersih dapat terwujud. |
| 16 | Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum | 1 | SIJAKI (Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kerinci) | Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga kerja terlatih yang tersertifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menghadapi beberapa kendala yaitu lambatnya akses informasi kepada masyarakat tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Kerinnci, menghadapi proses birokratis yang rumit dalam mengurus sertifikat kompetensi kerja konstruksi dan proses pengajuan sertifikat komptensi kerja yang lambat. |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | DONGKEL (Mendongeng Keliling) | DONGKEL merupakan inovasi berupa kegiatan mendongeng keliling ke sekolah-sekolah tingkat dasar dalam Kabupaten Kerinci dengan tujuan agar |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | anak-anak lebih banyak mengenal cerita-cerita rakyat Kerinci. Sehingga cerita rakyat tersebut tidak hilang tergerus zaman. |
| | | 2 | INSOMA (Inklusi Sosial Kemasyarakatan) | INSOMA merupakan inovasi kegiatan perpustakaan yang bertransformasi bukan hanya sebagai penyedia informasi berbentuk buku saja, akan tetapi juga merupakan wadah pembelajaran dan diskusi dalam upaya pengembangan perekonomian dan pengetahuan secara luas. Yaitu dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan ruang diskusi sehingga peran perpustakaan lebih luas dalam mengembangkan potensi masyarakat selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan |
| | | 3 | GAS (Galeri Arsip Statis) | GAS (Galeri Arsip Statis) memastikan arsip tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai pertanggungjawaban nasional. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 | SIPADI (Sistem Pengarsipan Digitalisasi Terintegrasi) | SIPADI merupakan sistem arsip digitalisasi yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi dapat menjadi solusi untuk pengelolaan arsip yang lebih baik di Pemerintah Kabupaten Kerinci. |
| 18 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 1 | *e*- PBB-P2 | SISTEM APLIKASI PBB-P2 ONLINE BERBASIS WEB merupakan inovasi dalam peningkatan tata kelola administrasi PBB-P2 dengan cara menyediakan dan mengimplementasikan system pendukung secara online dalam pengelolaan PBB-P2, untuk memudahkan petugas dan meningkatkan pelayanan bagi objek PBB-P2. |
| | | 2 | *e*- BPHTB | SISTEM APLIKASI BPHTB ONLINE BERBASIS WEB merupakan inovasi dalam hal peningkatan tata kelola administrasi BPHTB dengan cara menyediakan dan mengimplementasikan system pendukung dalam pengelolaan BPHTB secara online, tujuannya untuk memudahkan petugas dan meingkatkan pelayanan bagi objek BPHTB. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | SIPAREM (Inovasi Parlemen Remaja) | SIPAREM merupakan inovasi berupa kegiatan parlemen remaja dalam bentuk sosialisasi model baru yaitu dengan cara simulasi bermain peran sehingga memudahkan pemahaman pemilih Pemula mengaplikasikan nilai-nilai Pendidikan Politik. |
| | | 2 | PERAWAN (Perang Melawan Narkoba) | PERAWAN (Perang Melawan Narkoba) yaitu sebagai wadah fasilitasi, komunikasi dan informasi bagi ASN Perangkat Daerah, Masyarakat dan khusunya Siswa dalam Kabupaten Kerinci terkait Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. |
| 20 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Rumah Produksi Website | Merupakan inovasi berupa website dan aplikasi layanan Pemerintah Kabupaten Kerinci guna mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga menjadi efektif dan efisien. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Inspektorat | 1 | SIPAK KADES (Sistem Informasi PElaporan Aset Kekayaan Kepala Desa) | Aplikasi berbasis web bagi kepala desa dalam melaporkan harta kekayaannya dan tidak perlu lagi ke kantor. |
| 22 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1 | TIGER KINCAI (Tim Gerak Cepat Pol PP dan Damkar) Kerinci | Pelayanan dan Pemberian Informasi Publik, Serta Kritikan dan Saran Melalui Media Digitalisasi |
| 23 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | SIPENAKI ( Sistem Penanggulangan Bencana Kerinci) | Merupakan inovasi sebuah platform satu data bencana untuk wilayah Kabupaten Kerinci |
| 24 | Dinas Pemuda dan olahraga | 1 | SIRAGA-K (Sistem Informasi Data Sarana Olahraga Kabupaten Kerinci) | SIRAGA-K adalah sebuah sistem informasi berbasis web/mobile yang memuat data sarana olahraga di Kabupaten Kerinci secara lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. |
| 25 | Sekretariat DPRD | 1 | e- Absensi Tenaga Honorer | Merupakan sarana presensi bagi enaga honorer dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui Google Play. |
| | | 2 | SESPANDI E-Risalah (Semua Tersimpan Di E-Risalah) | Inovasi ini mengubah proses manual penyusunan risalah rapat menjadi digital, memanfaatkan teknologi |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | untuk konversi suara menjadi teks dan pengelolaan dokumen secara elektronik dan semuanya tersimpan di aplikasi atau website SESPANDI E-Risalah secara tertib. |
| | | 3 | QRKU SEKANTI (QRKU Sekretariat Dewan Kerinci Sakti) | Merupakan sebuah sistem pendataan daftar hadir tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, |
| **INOVASI KECAMATAN** | | | | |
| 1 | Kecamatan Sitinjau Laut | 1 | GERDASAM (Gerakan Sampah Peduli Lingkungan) | GERDASAM merupakan inovasi yang dilakukan dengan membuat peraturan Kecamatan, Peraturan Desa tentang cara pengelolaan sampah yg sehat dan benar, menyediakan tempat/lahan pembuangan sampah akhir, membuat terobosan baru memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | menjadi barang-barang UP2K melalui dasa wisma dan pokja PKK di Kecamatan dan Desa. |
| 2 | Kecamatan Air Hangat Barat | 1 | SIMPADESA (Pengelolaan Administrasi Desa/Kecamatan Berbasis IT) | Inovasi IT. Yang terbangun di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci sebagai perwujudan program IT yang berbasis IT (WhatsApp/WA) sebagai wahana mempermudah pelayanan secara efektif, efisien kepada masyarakat secara umum |
| 3 | Kecamatan Air Hangat | 1 | Satuan Link Kantor Camat Air Hangat (SATLINKCAH) | SATLINKCAH merupakan inovasi yang dapat memudahkan mengirim ataupun menerima informasi secara online ke website SATLINKCAH, serta data, surat dan informasi bisa dikelola dan diterima secara terstruktur, akurat, cepat dan tepat sasaran. |
| 4 | Kecamatan Gunung Kerinci | 1 | BULE CANTING (Budidaya Lele Cegah Stunting) | Inovasi ini menawarkan sejumlah keunggulan dan pembaharuan yang signifikan. Salah satunya adalah pengendalian lingkungan yang lebih baik, memungkinkan untuk mengatur suhu air, kualitas air, dan kondisi lingkungan lainya secara terkontrol dan hasil ikan lele yang dibagikan kembali kepada |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | masyarakat sekitar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dari masyarakat. |
| 5 | Kecamatan Kayu Aro Barat | 1 | SADAR TANI ( Satu Data Pertanian) | Inovasi ini dilakukan untuk mewujudkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi, akurat, dan up-to-date; meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan pertanian berbasis data, mempermudah petani dan penyuluh dalam mengakses informasi. |
| 6 | Kecamatan Batang Merangin | 1 | WHACAMDES<br><br>(WhatsApp Kecamatan dan Desa) | WHACAMDES (WhatsApp Kecamatan dan Desa) merupakakan inovasi pelayanan berbasis online (Group WhatsApp) yang dilakukan untuk sinkronisasi Data dan Informasi antara Pihak Kecamatan dan Desa, serta Mempercepat Komunikasi dan Penyebaran Informasi dari Pihak Kecamatan ke Desa atau sebaliknya. |
| 7 | Kecamatan Gunung Raya | 1 | GRADATA (Gunung Raya Data Terpadu) | Memudahkan semua Pemerintahan Desa Se-kecamatan Gunung Raya maupun Pemerintahan Kecamatan itu sendiri mengirim ataupun menerima informasi secara online |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Kecamatan Kayu Aro | 1 | JUMILAH (Jumat Bersih Indah dan Ibadah) | JUMILAH merupakan inovasi yang Menggabungkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan (Jumat bersih ) dengan Kegiatan Keagamaan. |
| 9 | Kecamatan Keliling Danau | 1 | JUMBER (Jumat Bersih) | JUMBER merupakan inovasi yang dilakukan untuk menciptakan kerjasama yang baik antara kecamatan dengan desa untuk satu tujuan menjadikan Wilayah Kecamatan Keliling Danau menjadi Lingkungan yang bersih dan indah |
| 10 | Kecamatan Siulak | 1 | SIP UMKM SiDO (Sistim Informasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siulak Data Online) | SIP UMKM SiDO (Sistim Informasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siulak Data Online) yaitu wadah bagi UMKM mempromosikan dan memasarkan produk-produknya dan juga merupakan tempat bagi siapa saja yang menginginkan produk-produk UMKM yang ada di Kecamatan Siulak. |
| 11 | Kecamatan Siulak Mukai | 1 | RATU RANTING (Masyarakat Bersatu<br>Berantas Stunting) | Fokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan stunting. Hal tersebut berdampak pada pencegahan dan penaggulangan stuting, peningkatan gizi, kesehatan dan kualitas hidup anak. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | RAJA BOS RIMBA (Masyarakat Bekerja Membuat Kompos Dari Limbah Keluarga) | Inovasi untuk Mengurangi volume sampah, mengurangi polusi, dan menghasilkan pupuk alami yang baik untuk tanaman. Inovasi ini juga mendukung gaya hidup berkelanjutan dan<br><br>dapat menghemat pengeluaran untuk pupuk. |
| | | 3 | CETING MESRA (Cegah Stunting Bersama)<br><br>MASYARAKAT | Inovasi yang menitikberatkan ffokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan stunting. Hal tersebut berdampak pada pencegahan dan penaggulangan stuting, peningkatan gizi, kesehatan dan kualitashidup anak. |
| 12 | Kecamatan Tanah Cogok | 1 | PERMATA INTAN (Pelayanan Ramah dan Prima Aparat Kecamatan). | Kegiatan apparat Kecamatan dalam melayani masyarakat menjadi lebih baik dengan layanan ramah dan prima. |
| 13 | Kecamatan Danau Kerinci Barat | 1 | GETAPODUNG (Gerakan Tanam Pohon Pelindung) | Penanaman pohon di sepanjang jalan raya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pengguna jalan. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Kecamatan Bukit Kerman | 1 | KANTOR KITA | Absensi Berbasis Android yang dinamai **KANTOR KITA.** dangan ada Absen Berbasis Andorid tersebut memudahkan Kepala Desa Memantau Perangkat Desa |
| | | 2 | PASARKERMAN.DESA.ID | Website Desa tersebut memudahkan semua penduduk Desa Pasar Kerman yang ada didesa maupun untuk mahasiswa yang kuliah diluar bisa mengakses lansung webside Desa Tersebut secara online ke website Pasarkerman.desa.id |
| 15 | Kecamatan Air Hangat Timur | 1 | KOHE JAPI (Kotoran Hewan Jadi Sapi) | Pengolahan kotoan sapi untuk pengolahan pupuk organik, penjualannya digunakan membeli sapi |
| 16 | Kecamatan Gunung Tujuh | 1 | SI PRIMA (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital) | Inovasi memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen dan data. |
| 17 | Kecamatan Danau Kerinci | 1 | NGOBAR (Ngobrol Bareng Kecamatan Danau Kerinci) | Upaya melakukan pendekatan antara masyarakat, perangkat desa dan kecamatan. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| **INOVASI PUSKESMAS** | | | | |
| 1 | Puskesmas Kersik Tuo | 1 | LAMA TAK EKSIS (Lacak Masyarakat Tersangka Tuberkulosis) | Metode baru untuk memutuskan rantai penularan TB dimasyarakat secara cepat dan meningkatkan capaian suspek TB Paru dan mengobati masyarakat sampai sembuh |
| 2 | Puskesmas Jujun | 1 | JASAKES (Pekerja Sadar Kesehatan) | Inovasi untuk mendeteksi secara dini permasalahan kesehatan pekerja untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif |
| | | 2 | SIDORA (Selamatkan Ibu Hamil dengan Donor Darah) | Inovasi menyediakan informasi calon pendonor darah dengan ibu hamil. |
| | | 3 | SEMANGGI (Selamatkan Remaja Putri dari Kurang Gizi). | Pemberian pendampingan kepada remaja dalam memenuhi gizi harian. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 | TUKANG KOLANG-KALING (Ketuk Pintu Dalam Rangka Konseling Lapangan Penyakit Berbasis Lingkungan) | Inovasi pendekatan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah dan memberikan konsultasi kepada masyarakat. |
| 3 | Puskesmas Sanggaran Agung | 1 | BIDUAN KAMIL SILAHKAN KE FASKES ( Bidan dan Dukun Kawal Ibu Hamil Sampai Melahirkan Ke Fasilitas Kesehatan) | Kolaborasi tenaga kesehatan untuk memantau ibu dari awal kehamilan hingga akhir kehamilan bersama dukun kampung agar pada saat proses persalinan ibu dan bayi sehat dan adanya kesepakatan antara bidan dan dukun beranak. |
| | | 2 | NASEHAT (Istana Anak Sehat dengan Gizi Seimbang) | Inovasi dengan mengedukasi ibu dalam modifikasi Bahan Pangan Lokal “Nugget Lokan” dapat menambah pengetahuan modifiikasi makanan yang bergizi serta bahan nya mudah ditemukan di wilayah tempat tinggal. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | CITOW (Chat Informasi tentang Obat Via WhatsApp) | Inovasi berupa layanan *chat* yang merupakan media bagi pasien untuk bertanya jika ada hal yang rancu atau bakhan ketidaktahuan pasien tentang obat yang diterima setelah berobat di Puskesmas Sanggaran Agung. |
| | | 4 | SI CANTIG REMAS HATI (Aksi Cegah Stunting Remaja Cerdas Hidup Sehat) | Inovasi ini bertujuan untuk pencegahan stunting sejak dini dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada remaja (0-19 tahun ) di sekolah wilayah kerja Puskesmas Sanggaran Agung sehingga terwujud remaja cerdas dan hidup sehat. |
| | | 5 | KEMAH CINTA (Kelompok Motivator ASI Ramah Anak Ciptakan Balita Sehat) | Inovasi berupa edukasi dalam membentuk motivator ASI untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman ibu tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada bayi dan dapat memaksimalkan pertumbuhan danperkembangan anak di Wilayah Kerja Puskesmas Sanggaran Agung. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 6 | Galaksi Hati Dini (Gerakan Langkah Awal Skrining Deteksi Hipertensi Dan Diabetes Secara Dini | Inovasi berupa edukasi dalam mendeteksi Hipertensi dan Diabetes Secara Dini |
| 4 | Puskesmas Siulak Deras | 1 | PAKET CANDU (Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Terpadu) | Inovasi untuk memberikan informasi kepada calon pengantin pentingnya memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan. |
| 5 | Puskesmas Siulak Mukai | 1 | RME (Implementasi Rekam Medis Elektronik) | Inovsi dengan menerapkan teknologi pendukung untuk mempercepat pelayanan pasien di PKM Siulak Mukai agar tertib administrasi dan tepat sasaran. |
| | | 2 | PELITA GIZI (Pemberian Makanan Lokal Bergizi untuk Tumbuh Kembang Anak) | Inovasi ini bertujuan menyediakan makanan tambahan yang bergizi, mudah diakses dan sesuai dengan budaya local. |
| 6 | Puskesmas Lolo | 1 | ODC (One Day Care) | Inovasi layanan kepada pasien dengan pelayanan tanpa batas 24 jam melalui media elektronik ataupun bisa langsung datang pada jam kerja. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Dokter Puskesmas Masuk Desa (DORMASA) | Inovasi merupakan sebuah pelayanan kesehatan dari Puskesmas Lolo dimana masyarakat mendapatkan pelayanan dokter secara langsung tanpa harus ke puskesmas. |
| 7 | Puskemas Tamiai | 1 | SEJUTA AKSI CEKATAN (Setiap Jumat Ayo Aktifitas Fisik dan Cek Kesehatan) | Inovasi ini mengajak dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menggalangkan aksi kesehatan dengan banyak melakukan aktivitas fisik guna menghindari penyakit dan melakukan cek kesehatan setiap hari jumat. |
| 8 | Puskesmas Tarutung | 1 | Sahabat ASI | Inovasi dengan me;melakukan edukasi pada Ibu Hamil Dan Ibu Balita di Puskesmas Tarutung untuk Pencegahan Masalah Gizi Menggunakan Aplikasi Media Sosial. |
| 9 | Puskesmas Lempur | 1 | BAHAS Si NAGA GIZI (Balita Sehat Mengkonsumsi Makanan Beragam dan Bergizi) | Inovasi dengan melakukan Penyuluhan dengan Media Leaflet dan poster serta demo tentang pengolahan makanan lokal dan kreasi ibu balita untuk menarik balita mengkonsumsi makanan |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Puskemas Siulak Gedang | 1 | SOSPERNAS (Sosialisasi Periode Emas) | Inovasi SOSPERNAS (Sosialisasi Periode Emas) yang dilakukan adalah sebagian kegiatan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di wilayah kerja puskesmas siulak gedang. |
| | | 2 | PUJAAN HATI TUAN (Pantau dan jaga Ibu Hamil Resti untuk turunkan AKI dan AKB) | Inovasi Pujaan Hati Tuan adalah inovasi yang dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil, Kelas Ibu Balita, Kunjungan dan Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi, membuat grup di media sosial untuk memudahkan ibu hamil berkonsultasi dengan tenaga kesehatan |
| 11 | Puskesmas Hiang | 1 | SEWINDU (Sertifikat Wisuda Imunisasi Terpadu) | Inovasi dengan memberikan sertifikat imunisasi dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi bayi dan balita PKM Hiang. |
| 12 | Puskesmas Simpang Tutup | 1 | PANDU RASA ( Pelayanan Terpadu Ramah Lansia ) | Inovasi ini adalah suatu hal baru di karenakan belum ada pelayanan khusus untuk lansia sebelumnya. Alur pelayanan yang sedemikian dipermudah untuk lansia pun merupakan suatu hal yang baru. Ruangan poli lansia di sediakan khusus untuk melaksanakan pelayanan ini sehingga pasien lansia tidak terlalu |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | lama mengantri bersama dengan pasien yang lain yang lebih muda dengan kondisi fisik yang relative labih baik dibanding pasien lansia. |
| 13 | Puskesmas Depati Tujuh | 1 | MBAK RESTI ( Mobilisasi Berkala Kehamilan Resiko Tinggi) | Inovasi dengan mendeteksi ibu hamil dalam memperoleh informasi, pelayanan dan dukungan yang berkualitas, Mencegah kematian ibu dan bayi melalui peningkatan pengelolaan ibu hamil dengan risiko tinggi |
| | | 2 | GEMA PELITA TBC (Gerakan Bersama Jemput Layani Penderita TBC) | Inovasi “Gema Pelita” TBC kemungkinan besar merujuk pada suatu program atau metode inovatif yang bertujuan untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit TBC |
| 14 | Puskesmas Bukit Kerman | 1 | CETING KAR (Cegah Stunting dari Akar) | Program inovasi untuk mengatasi stunting melalui pemantauan status gizi yang adekuat mulai dari remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita. Inisiatif pembuatan inovasi program ini adalah untuk memberikan perhatian lebih kepada remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita untuk mencegah dan mengatasi stunting |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Puskesmas Gunung Labu | 1 | CETING ASIK (Cegah Stunting Melalui ASI<br><br>Eksklusif) dengan memberikan sertifikat bagi anak yang lulus ASI eksklusif | Ceting Asik merupakan salah satu bentuk inovasi untuk percepatan penurunan kasus stunting. Inovasi ini merupakan kegiatan pendampingan yang dibangun untuk menumbuhkembangkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah dan masyarakat. |
| 16 | Puskesmas Semerap | 1 | Bidan Datang Kunjungan Bumil Resti Cegah Kematian Meternal dan Neonatal (BIDADARI CINTA) | Inovasi Bidadari Cinta bermanfaat untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita. Tujuan inovasi ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita, meningkatkan status gizi ibu hamil dan stimulasi tumbuh kembang balita, meningkatkan pemantauan dan pendampingan oleh tenaga kesehatan. |
| 17 | Puskesmas Pelompek | 1 | KUTU PERGI (Kupas Tuntas Permasalahan Gigi) | Inovasi utnuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil, ibu dan anak balita/ pralansia dan lansia yang ada di desa wilayah kerja puskesmas pelompek |
| 18 | Puskesmas Kemantan | 1 | Si Ningrat Ketawa (Skrining Gratis Kesehatan Jiwa) | Inovasi pencegahan gangguan kejiwaan kepada masyarakat. |

| NO | PELAKSANA INOVASI | INOVASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 2 | SECERIA POJOK PTM ( Segera Cek Diri Anda di Pojok Penyakit Tidak Menular) | Inovasi pemeriksaan penyakit tidak menular melalui pendekatan kepada masyarakat |

# BAB 3
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2025, proyeksi Tahun 2027 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2027. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2027 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung agenda Pembangunan Nasional melalui implementasi Asta Cita dan juga diselaraskan dengan prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi guna menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 2025 menunjukkan performa yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang Indonesia lainnya seperti Tiongkok (5,0 persen), Singapura (4,8 persen), Malaysia (4,9 persen), Korea Selatan (1,0 persen) dan Filipina (4,4 persen). Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Infokom. Hal ini diantaranya karena membaiknya industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Dari sisi pengeluaran, Kosumsi Rumah Tangga sebagai penyumbang utama tumbuh 4,98 persen. Hal ini menunjukkan daya beli

yang kuat dan didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat dimana pertumbuhan kosumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada kelompok restoran dan hotel sebesar 6,38 persen seiring meningkatnya kegiatan wisata selama liburan yang tercermin dari peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara. Pada kelompok kosumsi transportasi dan komunikasi tumbuh tinggi sebesar 6,32 persen juga didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan stimulus di bidang tranportasi, antara lain diskon tarif tol dan diskon tarif berbagai moda transportasi.

Pertumbuhan Investasi (PMTB) tumbuh 5,09 persen. Pertumbuhan ini didorong investasi mesin dan perlengkapan yang tumbuh sebesar 17, 99 persen disebabkan oleh peningkatan impor barang modal jenis mesin, produksi industri mesin serta belanja pemerintah untuk peralatan dan mesin. Selain itu, investasi kendaraan tumbuh sebesar 5,16 persen didorong oleh peningkatan impor kendaraan. Pertumbuhan PMTB ini sejalan dengan peningkatan realisasi investasi BKPM sebesar 12,66 persen.

Kinerja ekspor meningkat 7,03 persen . Ekspor tumbuh positif pada ekspor barang nonmigas dan ekspor jasa. Beberapa komoditas barang nonmigas yang mengalami peningkatan nilai dan volume ekspor selama tahun 2025 antara lain lemak dan minyak hewani/nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan Listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Pertumbuhan ekspor jasa salah satunya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 10,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pelaksanaan program prioritas nasional memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan dan Tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah orang yang bekerja yaitu mencapai 147,9 juta orang pada November 2025 atau bertambah 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 menurun menjadi 4,74 persen dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Hal tersebut juga

diikuti oleh punurunan Tingkat kemiskinan. Pada September 2025, Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,25 persen, lebih rendah dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan implementasi program prioritas nasional berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan secara bertahap.

### 3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

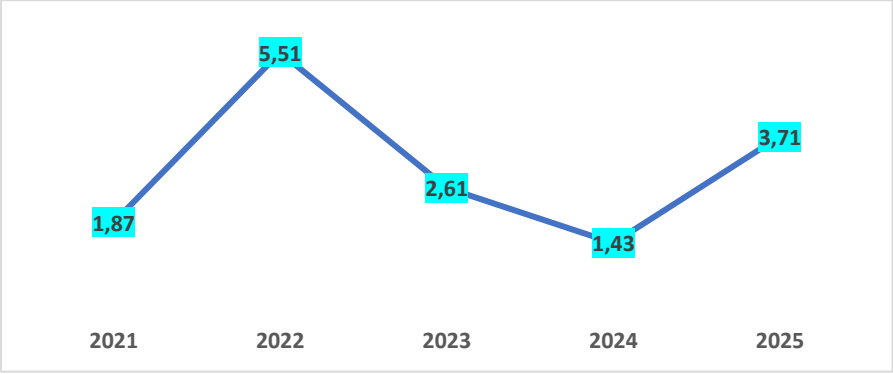
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 8,88 persen. Salah satu pemicunya adalah kegiatan angkutan pertambangan yang cukup tinggi dan juga angkutan udara yang meningkat sebagai dampak sebagai dampak dari stimulasi ekonomi triwulan II dan triwulan IV. Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen;Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Sementara itu, dua lapangan usaha terkontraksi sepanjang tahun 2025, yaitu Konstruksi dengan kontraksi 4,14 persen, serta Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib yang terkontraksi 2,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2025 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, beberapa kegiatan eksplorasi migas dan fasilitas pengolahan gas di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Singapura, Jepang dan Tiongkok. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Thailand dan Malaysia. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang memiliki andil terbesar, yaitu 69,40 persen. Komponen

lainnya yang memberikan kontribusi besar adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 40,88 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 20,46 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mempunyai andil sebesar 5,64 persen, sedangkan PK-LNPRT dan Perubahan Inventori masing-masing memiliki andil relatif kecil, yaitu 0,58 persen dan 0,77 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa, yang berperan sebagai pengurang dalam perhitungan PDRB, memiliki andil sebesar 37,73 persen.

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

**Gambar III. 1**
**Tingkat Inflasi Provinsi Jambi**
**Tahun 2021-2025**



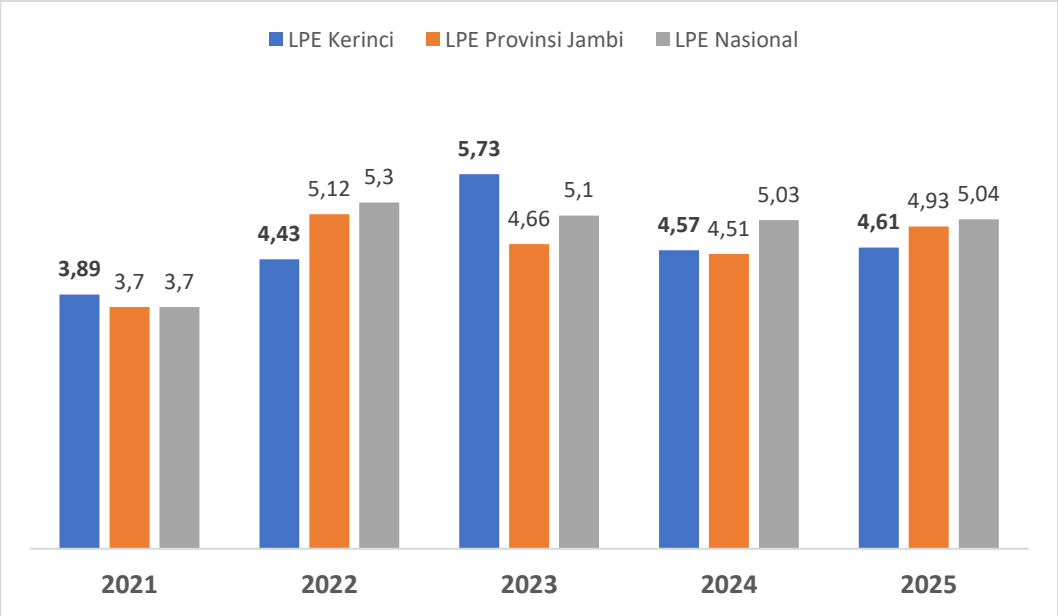

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2026

Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi pada tahun 2025 (yoy) tercatat sebesar 3,71 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 5,52 persen dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,03 persen. Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,49 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,86 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,25 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,59 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,92 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 2,68 persen; kelompok Pendidikan sebesar 2,20 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,68 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,14 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,22 persen.

### 3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kerinci

Pembangunan Kabupaten Kerinci merupakan proses yang berjalan seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Kuduanya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci tahun 2025 sebesar 4,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yag mencapai 4,57 persen. Pertumbuhan ini terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun adanya pengaruh ekonomi global.

**Gambar III. 2**
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021-2025**




Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2026

### 3.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kerinci dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Menurut BPS (2018), Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat

dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III. 1**
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2021-2025**

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.240,24 | 3.346,63 | 3.468,60 | 3.566,19 | 3.885,79 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 121,15 | 128,57 | 129,1 | 142,12 | 146,45 |
| C. | Industri Pengolahan | 186,59 | 193,33 | 204,22 | 210,03 | 223,02 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,96 | 3,21 | 3,59 | 3,77 | 3,88 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 22,67 | 22,44 | 22,39 | 22,69 | 22,84 |
| F. | Konstruksi | 824,76 | 918,69 | 1.083,83 | 1.138,91 | 1.014,61 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 606,58 | 630,63 | 657,79 | 691,4 | 742,29 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 168,56 | 181,8 | 190,32 | 202,28 | 230,91 |
| I. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 55,2 | 57,84 | 61,15 | 65,3 | 68,33 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 526,86 | 568,74 | 617,55 | 640,81 | 690,31 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 71,29 | 73,25 | 74,32 | 77,19 | 82,09 |
| L. | Real Estate | 111,26 | 112,64 | 117,81 | 122,53 | 128,33 |

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.N. | Jasa Perusahaan | 2,57 | 2,73 | 3,11 | 3,3 | 3,56 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 345,01 | 347,29 | 355,53 | 400,75 | 389,84 |
| P. | Jasa Pendidikan | 290,87 | 296,51 | 297,18 | 318,97 | 328,81 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 120,79 | 128,66 | 131,68 | 147,92 | 153,05 |
| R.S.T.U. | Jasa lainnya | 107,4 | 112,03 | 115,16 | 123,12 | 127,13 |
| **PDRB** | | **6822,79** | **7125,01** | **7.533,32** | **7.877,28** | **8.241,23** |

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu meningkat. Tahun 2021 PDRB Kabupaten Kerinci berada pada angka Rp 6.822,79 miliar hingga pada tahun 2025 mencapai Rp 8.241,23 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi riil yang positif dan berkelanjutan yang menunjukkan peningkatan nilai tambah dari berbagai sektor di Kabupaten Kerinci.

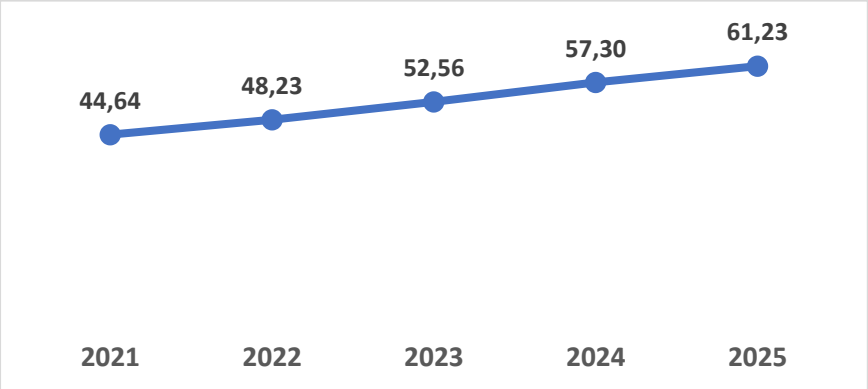
Berdasarkan struktur lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dengan nilai yang terus meningkat dari Rp3.240,24 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 3.885,79 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci. Ini dapat menjadi perhatian bagi Kabupaten Kerinci untuk melakukan pengelolaan yang lebih optimal pada sektor ini.

### 3.1.3.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Gambar III. 3**
**PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2026

PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci hingga tahun 2025 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2025, PDRB Kabupaten Kerinci mencapai 61,23 juta. PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci tahun 2021 hingga tahun 2025 terjadi peningkatan PDRB Per Kapita secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Kerinci.

Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Kabupaten Kerinci. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Kabupaten Kerinci yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif.

Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun 2022 keatas diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya pengembangan pembangunan bandara di Kabupaten Kerinci. Pasar lokal Kabupaten Kerinci diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Di sisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kerinci paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Atas Dasar Harga Konstan Menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III. 2**
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025**

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
| 1 | Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga | 3,57 | 4,76 | 3,99 | 4,17 | 4,89 |
| 2 | Pengeluaran Kosumsi LNPRT | 0,73 | 4,04 | 8,34 | 11,43 | 1,28 |
| 3 | Pengeluaran Kosumsi Pemerintah | 1,34 | 1,8 | 1,87 | 1,61 | -6,33 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 22,32 | 8,23 | 15,45 | 4,11 | -8,09 |
| 5 | Perubahan Inventori | 49,58 | 0,88 | -2,49 | 157,81 | 0,41 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | -61,57 | -36,5 | -94,89 | -5,98 | 7,31 |
| **PDRB** | | **3,89** | **4,43** | **5,73** | **4,57** | **4,61** |

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

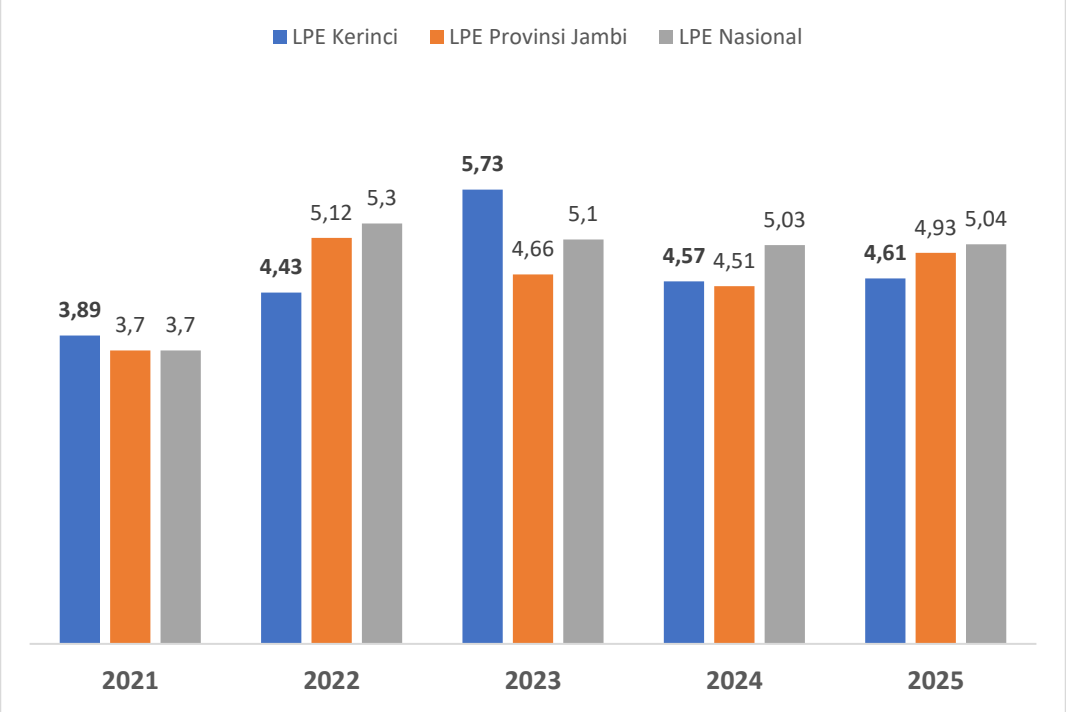
### 3.1.3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat persentase kenaikan nilai ekonomi suatu negara atau daerah selama periode tertentu, seperti tahun atau kuartal. Ini adalah ukuran kinerja ekonomi dalam hal pertumbuhan dan produktivitas. Laju pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Tujuan utama pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, standar hidup,

dan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang lebih baik.

Laju pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa cepat suatu daerah atau wilayah mengalami peningkatan dalam produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar III. 4**
**Laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kerinci 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci pada periode 2021 s/d 2025 berfluktuatif cenderung meningkat dimana pada tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 3,89 persen dan tumbuh di tahun 2023 sebesar 5,73 persen, hal ini sejalan dengan penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,03 di tahun 2023, ditahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci cenderung melambat sebesar 4,57 persen namun tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di

Kabupaten Kerinci di Tahun 2024. Namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025 menjadi 4,61 persen.

Jika dibandingkan secara regional dan nasional, pada tahun 2021 Kabupaten Kerinci berada diatas LPE Provinsi Jambi (3,7%) maupun Nasional (3,7%). Kemudian pada tahun 2024, LPE Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan namun berada di bawah LPE Provinsi Jambi (5,12%) dan Nasional (5,3%). Selanjutnya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan kembali dan berada di atas Provinsi Jambi (4,66%) dan Nasional (5,1%). Namun, pada tahun 2024 LPE Kabupaten Kerinci mengalami penurunan tapi masih berada diatas Provinsi Jambi (4,51%) dan sedikit lebih rendah dibandingkan Nasional (5,03%). Pata tahun 2025, LPE Kabupaten Kerinci sedikit meningkat, namun masih berada di bawah Provinsi Jambi (4,93%) dan Nasional (5,04%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya tantangan dalam menjaga daya saing pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel III. 3**
**Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010**
**Tahun 2021-2025**

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,12 | 3,28 | 3,64 | 2,81 | 9,12 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 9,49 | 6,12 | 0,41 | 10,09 | 3,05 |
| C | Industri Pengolahan | 1,24 | 3,61 | 5,63 | 2,84 | 5,77 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,48 | 8,34 | 11,84 | 4,98 | 2,89 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,22 | -1 | -0,25 | 1,35 | 0,65 |
| F | Konstruksi | 26,16 | 9,01 | 17,97 | 5,08 | -11,24 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,96 | 3,96 | 4,31 | 5,11 | 6,82 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,88 | 7,85 | 4,69 | 6,29 | 12,54 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,71 | 4,79 | 5,72 | 6,79 | 4,50 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,04 | 7,95 | 8,58 | 3,77 | 7,72 |

| Lapangan Usaha | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,24 | 2,74 | 1,46 | 3,87 | 5,24 |
| L | Real Estat | 0,18 | 1,24 | 4,59 | 4 | 4,74 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,26 | 6,21 | 13,84 | 6,13 | 6,53 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1,02 | 0,66 | 2,37 | 12,72 | -1,49 |
| P | Jasa Pendidikan | 1,28 | 1,94 | 0,23 | 7,33 | 3,21 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,05 | 6,52 | 2,35 | 12,33 | 4,17 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 2,79 | 4,31 | 2,8 | 6,9 | 3,26 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | | **3,89** | **4,43** | **5,73** | **4,57** | **4,61** |

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 12,54 persen yang diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,12 persen. Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada Informasi dan Komunikasi sebesar 7,72 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,82 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,53 persen. Sementara itu, dua lapangan usaha terkontraksi sepanjang tahun 2025, yaitu Konstruksi dengan kontraksi 12,24 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,49 persen.

**Tabel III. 4**
**PDRB Kabupaten Kerinci Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah) Tahun 2021-2025**

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
| 1 | Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga | 3.870,11 | 4.054,42 | 4.216,10 | 4.391,96 | 4.606,63 |
| 2 | Pengeluaran Kosumsi LNPRT | 43,82 | 45,59 | 49,40 | 55,04 | 55,74 |
| 3 | Pengeluaran Kosumsi Pemerintah | 783,99 | 798,10 | 813,06 | 826,18 | 777,21 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1.935,00 | 2.094,24 | 2.417,83 | 2.517,27 | 2.323,47 |
| 5 | Perubahan Inventori | 32,34 | 32,63 | 31,82 | 82,03 | 90,39 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | 157,52 | 100,03 | 5,11 | 4,81 | 4.468,96 |
| **PDRB** | | **6.822,79** | **7.125,01** | **7.533,32** | **7.877,28** | **8.241,22** |

Sumber: Kerinci Dalam Angka 2026

Dari segi pengeluaran, kosumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kerinci dari tahun 2021-2025. Nilai kosumsi rumah tangga tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 berada pada angka Rp 4.606,63 juta. Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan menjadi motor penggerak utama terhadap perekonomian Kabupaten Kerinci. Kemudian, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan yang kosisten dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, pada sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi Rp 2.323,47 juta yang sebelumnya sebesar Rp 2.517,27 juta pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi, baik oleh pemerintah maupun swasta melemah pada tahun 2025.

Sementara itu, Pengeluaran Kosumsi Pemerintah juga mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi Rp 777,21 juta dimana sebelumnya terjadi peningkatan yang konsisten pada tahun 2021-2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya dinamika dalam kebijakan belanja daerah. Sebaliknya, komponen ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 4.468,96, dimana pada tahun 2021 berada pada angka Rp 157,52 juta dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi Rp 4,81 juta. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Kerinci, Teruma pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci.

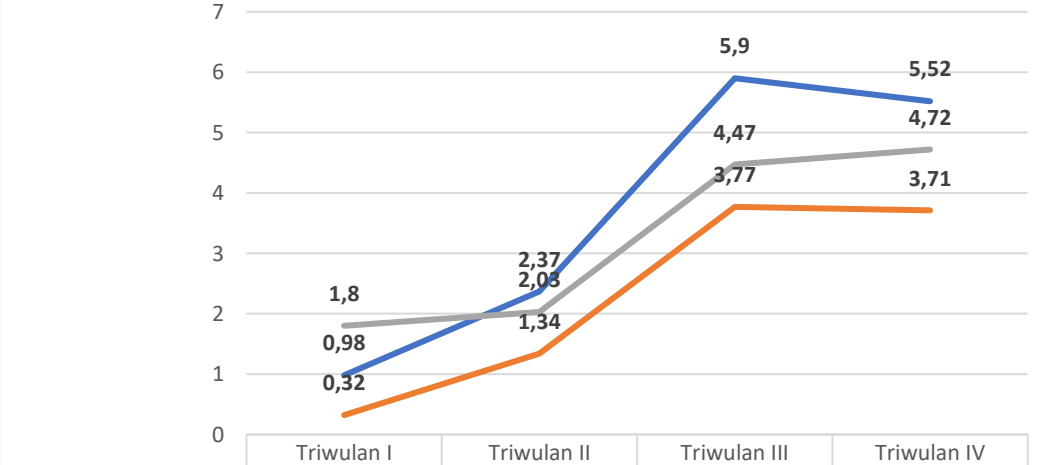
Adapun komponen perubahan inventori dan kosumsi LNPRT juga menunjukkan perkembangan yang stabil dengan nilai perubahan inventori pada tahun 2021 sebesar Rp 32,34 juta hingga pada tahun 2025 menjadi Rp 90,39 juta. Kemudian pada kosumsi LNPRT juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana hingga tahun 2025 menjadi Rp 55,74 juta. Secara keseluruhan, total PDRB Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dari Rp 6.822,79 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 8.241,22 juta pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa perekonomian

Kabupaten Kerinci bergerak secara positif dan terus mengalami penuatan selama lima tahun terakhir.

### 3.1.3.4. Tingkat Inflasi

Peningkatan pendapatan dapat dipenuhi apabila pertumbuhan sektor-sektor ekonomi meningkat. Peningkatan kegiatan produksi mendorong permintaan barang dan jasa bahan baku. Oleh karena terjadi peningkatan permintaan sementara kuantitasnya terbatas maka posisi tawar barang dan jasa tersebut meningkat yang mengakibatkan perubahan harganya. Demikian seterusnya siklus kegiatan ekonomi berjalan sehingga di suatu wilayah memerlukan kondisi tercapainya keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Dalam hal untuk menjaga stabilitas perekonomian juga diperlukan ke elastisitasan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tingkat inflasi Kabupaten Kerinci merujuk pada inflasi yang terjadi di Kabupaten Bungo. Perbandingan tingkat inflasi Kabupaten Bungo dengan Kota Jambi dan Provinsi Jambi Bulan Januari-Desember 2025 dapat dilihat Gambar berikut.

**Gambar III. 5**
**Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi Per Triwulan Tahun 2025**




| | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---|---|---|---|---|
| Inflasi Kerinci | 0,98 | 2,37 | 5,9 | 5,52 |
| Inflasi Jambi | 0,32 | 1,34 | 3,77 | 3,71 |
| Inflasi Bungo | 1,8 | 2,03 | 4,47 | 4,72 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2026

Pada Tahun 2025 tingkat inflasi Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan hingga triwulan III dan mengalami sedikit penurunan pada triwulan IV, terakhir pada bulan Desember inflasi Kabupaten Kerinci sebesar 5,52 persen. Namun secara keseluruhan, tingkat inflasi cenderung mengalami kenaikan hingga Desember 2025. Penurunan inflasi pada bulan Desember karena adanya perlambatan kenaikan indeks harga konsumen. Penurunan ini menunjukkan daya beli konsumen relative terjaga, harga bahan baku lebih stabil, dan biaya hidup tidak naik secepat sebelumnya.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu: Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,73 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 0,09 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bakar Rumah Tangga 0,03 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,05 persen; Kelompok Kesehatan 0,04 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,06 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya 0,21 persen; Kelompok Pendidikan 0,04 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,31 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,96 persen. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan tidak mengalami perubahan indeks.

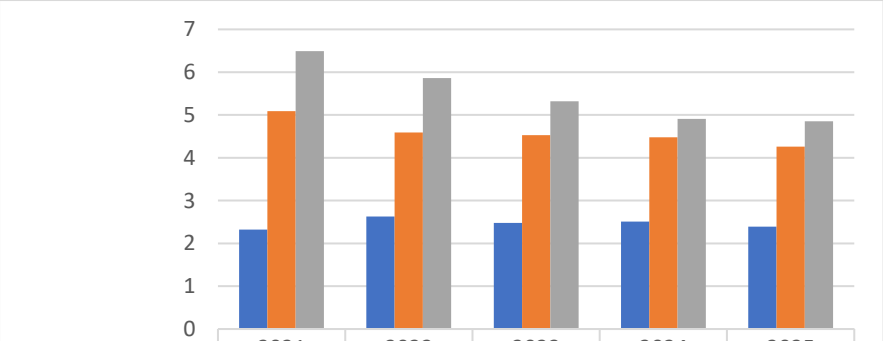
Kabupaten Kerinci harus tetap mempertahankan Tingkat Inflasi agar tetap terkendali. Beberapa Langkah yang dilakukan berupa intervensi pasar berupa operasi pasar terhadap komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, beras dan minyak goreng. Selanjutnya Kabupaten Kerinci juga memperkuat kerja sama lintas daerah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi dan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Kayu Aro. Sinergi ini penting untuk memperlancar arus distribusi pangan antar wilayah.

#### 3.1.3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Kerinci berfluktuatif dari tahun ke tahun. TPT tahun 2025 mengalami

penurunan menjadi 2.39, hal ini dikarenakan jumlah pengangguran yang semakin berkurang. Tapi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jambi dan TPT Nasional, angka TPT Kabupaten Kerinci masih lebih aman. Selain itu, TPT Kabupaten Kerinci juga lebih baik dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,45 persen pada tahun 2025.

**Gambar III. 6**
**Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2025**




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 2,32 | 2,63 | 2,48 | 2,51 | 2,39 |
| Provinsi Jambi | 5,09 | 4,59 | 4,53 | 4,48 | 4,26 |
| Nasional | 6,49 | 5,86 | 5,32 | 4,91 | 4,85 |

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kerinci memiliki nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,63 persen. Terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,48 persen. Akan tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 2,51, hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Ketika populasi meningkat, penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Jika permintaan tenaga kerja tidak mampu menyerap banyaknya penawaran tenaga kerja maka pengangguran akan meningkat. Hingga pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kerinci mengalami penurunan kembali menjadi 2,39 persen.

Tantangan kedepan untuk menurunkan angka TPT di Kabupaten Kerinci adalah:

e. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan

kebutuhan industri ekonomi kreatif dan dunia usaha khususnya disektor pariwisata dan jasa (produk batik dan barista);

f. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan;

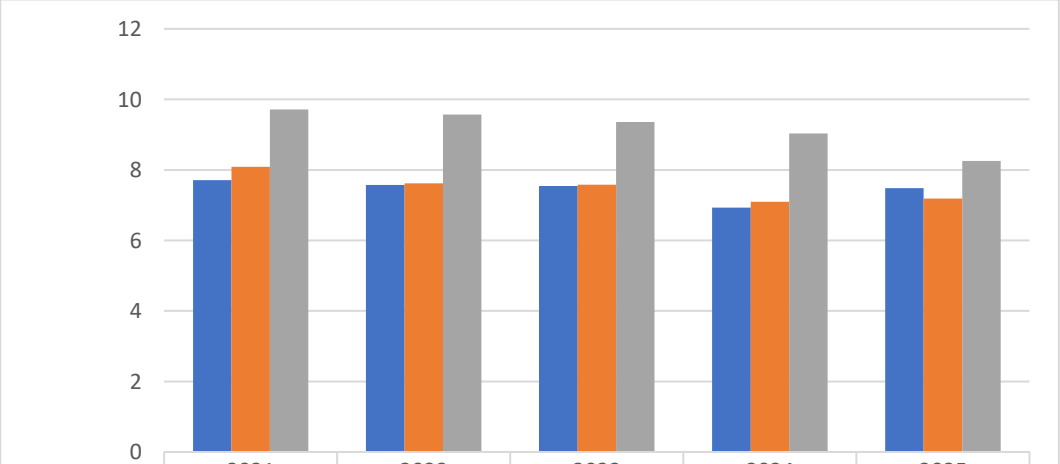
g. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana balai latihan kerja (BLK);

h. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

### 3.1.3.6. Tingkat Kemiskinan

Tingginya angka persentase penduduk miskin pada tahun 2021 dipicu pandemi *covid-19* yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 6,93. Kabupaten Kerinci memiliki sektor unggulan dan didukung program pemerintah telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Akan tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 7,48 persen.

**Gambar III. 7**
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2021-2025**




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | 7,71 | 7,57 | 7,54 | 6,93 | 7,48 |
| Jambi | 8,09 | 7,62 | 7,58 | 7,1 | 7,19 |
| Nasional | 9,71 | 9,57 | 9,36 | 9,03 | 8,25 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,62 persen, Kabupaten Kerinci masih berada pada angka yang lebih tinggi. Aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, oleh karena itu informasi mengenai profil dan karakteristik kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan (*stakeholder*). Upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kerinci dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta adanya dukungan dari pemerintah, *stakeholder* dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.

### 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang terus berkembang, kebijakan ekonomi Kabupaten Kerinci diarahkan pada struktur perekonomian yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Arah kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung terwujudnya swasembada pangan, percepatan hilirisasi industri, serta penguatan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, kebijakan diarahkan pada percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pengembangan usaha untuk menigkatkan efesiensi, inovasi, serta daya saing daerah. Upaya pengurangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM dan perluasan kesempatan kerja. Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan ekonomi juga difokuskan pada pengembangan ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta pelestarian lingkungan hidup.

Dengan pertimbangan prospek ekonomi nasional, regional serta potensi ekonomi local yang dimiliki, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci tahun 2027 diproyeksikan akan tumbuh positif. Akan tetapi, terdapat beberapa tatangan yang tentu nantinya akan dihadapi dan perlu untuk

diantisipasi seperti volatilitas harga komoditas unggulan, perlambatan ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, perubahan iklim, serta risiko fiscal yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah.

Sebagai respon terhadap tantangan dan peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan langkah-langkah strategis pembangunan ekonomi daerah seperti optimalisasi realisasi belanja daerah dengan memprioritaskan belanja produktif dan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, strategi pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas UMKM, pengambangan ekonomi kreatif, serta percepatan transformasi digital untuk mendorong inovasi, produktivitas dan daya saing produk lokal.

Strategi peningkatan investasi diarahkan pada kemudahan perizinan dan digitalisasi dengan memanfaatkan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mempercepat perizinan usaha terutama pariwisata serta pertanian dan perkebunan. Selanjutnya dengan mendorong pembangunan dan peningkatan aksesibilitas jalan serta fasilitas umum guna memudahkan mobilitas wisatawan dan distribusi logistik komoditas pertanian. Selain itu, dengan melakukan promosi potensi wisata skala global dengan berfokus pada destinasi unggulan seperti Gunung Kerinci, Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, dan agrowisata Perkebunan teh Kayu Aro. Kemudian penguatan sektor agribisnis yaitu mendorong investasi pada pengolahan produk pertanian (seperti pengemasan kayu manis, kopi dan sayuran organik) agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah dan menguatkan ekosistem perdagangan melalui sinergi antar daerah untuk memperluas pangsa pasar produk lokal Kerinci.

Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah, penguatan koordinasi pengendalian inflasi melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD), memperkuat kerja sama lintas daerah, dan melaksanakan operasi pasar terhadap komonitas utama akan terus ditingkatkan. Melalui

berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci diharapkan mampu menciptakan perekonomian daerah yang semakin tumbuh sehingga mampu untuk menghadapi tantangan pembangunan kedepannya.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut di atas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

### 3.2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

### 3.2.2. Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.2.3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

### 3.2.4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

### 3.2.5. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Dalam hal perolehan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah:

a. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
c. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
d. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khusunya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.
e. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
f. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan daerah.
g. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Dengan melihat analisis kondisi /*eksisting* perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan di kawasan strategis dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah:

a. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
b. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi pendapatan daerah,
c. Peningkatan kualitas SDM
d. Peningkatan investasi.

Dengan strategi tersebut maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

a. Peninjauan dan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
b. Meningkatkan kualitas BUMD
c. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi
e. Meningkatan kualitas SDM
f. Meningkatkan pelayanan perijinan
g. Mempercepat pembangunan infrastruktur

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

a. Melakukan peninjauan Perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi,
b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.
c. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.
d. Merancang *design* / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak
e. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi
g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
h. Penegakan Peraturan Daerah
i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah
k. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah
l. Penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan
m. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju pelayanan prima.
n. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi/ target pendapatan Kabupaten Kerinci tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III. 5**
**Realisasi APBD Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| NO | URAIAN | Data Capaian Awal 2025 | PROYEKSI APBD 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **46.445.797.473,24** | **91.800.000.000,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 26.320.617.010,37 | 51.000.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 2.728.755.802,74 | 15.300.000.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.035.138.716,42 | 15.300.000.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.361.285.943,71 | 10.200.000.000,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.124.113.617.283,00** | **1.402.500.000.000,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.041.264.080.483,00 | 1.326.000.000.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 82.849.536.800,00 | 76.500.000.000,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **11.556.748.740,51** | **15.300.000.000,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 152.516.056,51 | 0 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.404.232.684,00 | 15.300.000.000,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.182.116.163.496,75** | **1.509.600.000.000,00** |

### 3.2.6. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintah. Dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Dengan hal tersebut, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana tahun anggaran 2027 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis kabupaten, peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan,

kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahananan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kuntinuitas produk-produk unggulan dan mengurangi kemiskinan.

Pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran. Untuk anggarannya disusun dengan prinsip *money follow program* berbasis *money follow function* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penggunaan dana Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik, serta digunakan untuk belanja tidak terduga, sedangkan penggunaan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/ kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak termasuk pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang ada di masing-masing perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Perpres 12 Tahun 2025 menetapkan RPJMN 2025-2029 sebagai kerangka lima tahun yang menjadi acuan strategis pembangunan nasional, termasuk kerangka pendanaan indikatif serta arah wilayah dan kebijakan lintas sektor. Terkait permasalahan tersebut, kebijakan belanja daerah menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan arah pembangunan nasional ke tingkat kewilayahan, memastikan program-program nasional dapat dijalankan secara efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah pada prinsipnya juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Beberapa isu strategis tersebut antara lain penguatan kualitas

sumber daya manusia melalui sektor Pendidikan dan Kesehatan, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, maupun pengendalian inflasi di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berperan strategis dalam memastikan alokasi dan pemanfaatan anggaran yang efektif, efisien, dan berkeadilan guna meningkatkan akses serta kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Pada sektor pendidikan, kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memperluas akses pendidikan bermutu, serta memperkuat sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan dan pengembangan SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pada sektor kesehatan, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan penguatan sistem informasi kesehatan menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan yang mendukung terwujudnya masyarakat sehat dan produktif. Pada isu pencegahan stunting, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan gizi ibu hamil dan balita, penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan sanitasi dan akses air bersih, serta edukasi gizi masyarakat. Dukungan pembiayaan juga mencakup penguatan kapasitas tenaga kesehatan, kader posyandu, dan fasilitator lapangan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Sementara itu dalam upaya pengentasan kemiskinan, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk memperluas jangkauan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif.

Pemerintah daerah juga mendorong sinergi program dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan

penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kemudian terkait isu pengendalian inflasi di daerah, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung program-program strategis pengendalian inflasi yang meliputi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja yang bersifat produktif dan antisipatif untuk mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok, optimalisasi cadangan pangan daerah, serta peningkatan infrastruktur pendukung logistik dan distribusi. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja publik yang pro-rakyat, melalui fasilitasi pasar murah, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi dan UMKM. Langkah ini sejalan dengan strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas strategis di tingkat daerah.

Sinergi kebijakan keuangan daerah dengan arah kebijakan nasional diwujudkan melalui penerapan belanja berbasis kinerja, peningkatan efisiensi anggaran, serta optimalisasi sumber pendanaan dari transfer pusat dan kemitraan dengan sektor non-pemerintah. Dengan kebijakan keuangan yang terarah dan akuntabel, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kualitas SDM pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029 menuju *Indonesia Emas 2045*.

Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III. 6**
**Realisasi APBD Kabupaten Kerinci**
**Tahun2025**

| NO | URAIAN | Data Capaian Awal 2025 | PROYEKSI APBD TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **713.734.599.281,00** | **933.300.000.000,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 500.321.199.870,00 | 606.900.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 201.859.174.819,00 | 306.000.000.000,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 3.605.000,00 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.550.619.592,00 | 20.400.000.000,00 |

| NO | URAIAN | Data Capaian Awal 2025 | PROYEKSI APBD TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **137.097.583.768,00** | **309.767.780.979,18** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 2.435.889.503,00 | 15.300.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.540.588.866,00 | 25.500.000.000,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 46.464.778.839,00 | 96.900.000.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi | 68.975.570.760,00 | 161.867.780.979,18 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.521.037.900,00 | 10.200.000.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 159.717.900,00 | 0 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **22.478.493,00** | **10.200.000.000,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 22.478.493,00 | 10.200.000.000,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **311.156.706.398,00** | **346.957.798.663,03** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.823.421.045,00 | 5.100.000.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 307.333.285.353,00 | 341.857.798.663,03 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.162.011.367.940,00** | **1.600.225.579.642,21** |
| | **Total Surplus/Defisit** | **20.104.795.556,75** | **-90.625.579.642,21** |

### 3.2.7. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk mendukung keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan daerah, serta memastikan keberlanjutan fiskal yang sehat dan efisien. Kebijakan penerimaan pembiayaan difokuskan untuk menutup defisit anggaran secara proporsional, sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pengelolaan kewajiban dan investasi daerah yang produktif.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, kebijakan diarahkan pada:

1. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali atas investasi daerah yang telah berjalan.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan kas daerah, guna mengurangi potensi *idle cash* dan memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.

3. Pemanfaatan pinjaman daerah secara selektif dan hati-hati, hanya untuk kegiatan yang memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan serta memiliki kemampuan pengembalian yang terukur.

Sementara pada sisi pengeluaran pembiayaan, kebijakan diarahkan pada:

1. Pembayaran kewajiban jangka panjang daerah, termasuk pelunasan pokok utang yang telah jatuh tempo secara tepat waktu untuk menjaga kepercayaan lembaga keuangan dan kredibilitas fiskal daerah.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD dan/atau lembaga keuangan daerah, yang berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di masa mendatang.
3. Penguatan struktur permodalan daerah, guna mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga sustainabilitas fiskal, meningkatkan efektivitas pengelolaan kas dan investasi daerah, serta mendorong kemandirian keuangan daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2027 kemudian dituangkan dalam Tabel sebagai berikut:

**Tabel III. 7**
**Realisasi APBD Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2025**

| NO | URAIAN | Data Capaian Awal 2025 | PROYEKSI APBD TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **43.412.317.407,18** | **100.625.579.642,21** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.412.244.303,41 | 100.625.579.642,21 |

| NO | URAIAN | Data Capaian Awal 2025 | PROYEKSI APBD TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 73.103,77 | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | **10.000.000.000,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 10.000.000.000,00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0,00** | **10.000.000.000,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **43.412.317.407,18** | **90.625.579.642,21** |
| **6.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)** | **63.517.112.963,93** | - |

# Tabel III. 8
# Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
# Tahun Anggaran 2025
# 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | 2025% | REALISASI 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 | 7 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.196.002.582.085,00** | **1.182.116.163.496,75** | **98,84** | **1.202.727.660.762,03** | **1.255.744.179.074,98** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **49.408.022.790,00** | **46.445.797.473,24** | **94,00** | **37.087.811.298,76** | **66.830.111.653,98** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 26.585.699.459,00 | 26.320.617.010,37 | 99,00 | 13.949.169.871,20 | 17.424.834.177,33 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.444.400.000,00 | 2.728.755.802,74 | 61,40 | 2.862.157.350,00 | 3.265.975.650,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.027.923.331,00 | 10.035.138.716,42 | 100,07 | 10.302.516.778,79 | 9.927.923.331,75 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 8.350.000.000,00 | 7.361.285.943,71 | 88,16 | 9.973.967.298,77 | 36.211.378.494,90 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **49.408.022.790,00** | **46.445.797.473,24** | **94,00** | **37.087.811.298,76** | **66.830.111.653,98** |
| | | | | | | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.134.221.908.246,00** | **1.124.113.617.283,00** | **99,11** | **1.155.162.021.581,00** | **1.187.327.067.421,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.043.547.639.022,00 | 1.041.264.080.483,00 | 99,78 | 1.095.755.912.809,00 | 1.097.462.000.731,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 90.674.269.224,00 | 82.849.536.800,00 | 91,37 | 59.406.108.772,00 | 89.865.066.690,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER** | **1.134.221.908.246,00** | **1.124.113.617.283,00** | **99,11** | **1.155.162.021.581,00** | **1.187.327.067.421,00** |
| | | | | | | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **12.372.651.049,00** | **11.556.748.740,51** | **93,41** | **10.477.827.882,27** | **1.587.000.000,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 152.516.056,51 | 100,00 | 16.131.377,27 | 1.587.000.000,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 12.372.651.049,00 | 11.404.232.684,00 | 92,17 | 10.461.696.505,00 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | 2025% | REALISASI 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 | 7 |
| | **JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **12.372.651.049,00** | **11.556.748.740,51** | **93,41** | **10.477.827.882,27** | **1.587.000.000,00** |
| | | | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.196.002.582.085,00** | **1.182.116.163.496,75** | **98,84** | **1.202.727.660.762,03** | **1.255.744.179.074,98** |
| | | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.239.422.762.905,52** | **1.162.011.367.940,00** | **93,75** | **1.227.598.759.939,44** | **1.259.465.899.429,77** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **765.217.429.194,52** | **713.734.599.281,00** | **93,27** | **751.379.821.414,11** | **695.179.587.819,77** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 542.097.857.696,74 | 500.321.199.870,00 | 92,29 | 475.767.281.305,00 | 420.392.745.858,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 211.427.201.497,78 | 201.859.174.819,00 | 95,47 | 239.776.440.066,00 | 244.633.216.625,77 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 42.000.000,00 | 3.605.000,00 | 8,58 | 10.520.000,00 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.650.370.000,00 | 11.550.619.592,00 | 99,14 | 35.825.580.043,11 | 30.145.787.336,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | | 7.838.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA OPERASI** | **765.217.429.194,52** | **713.734.599.281,00** | **93,27** | **751.379.821.414,11** | **695.179.587.819,77** |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **140.813.967.866,00** | **137.097.583.768,00** | **97,36** | **181.694.828.496,00** | **261.505.577.246,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 2.493.171.000,00 | 2.435.889.503,00 | 97,70 | 0 | 2772501404 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.853.041.242,00 | 15.540.588.866,00 | 92,21 | 25.553.914.981,00 | 49.829.478.947,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 48.101.330.580,00 | 46.464.778.839,00 | 96,60 | 51.380.291.429,00 | 106.944.180.947,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 69.683.863.144,00 | 68.975.570.760,00 | 98,98 | 102.065.323.628,00 | 99.485.765.095,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.522.561.900,00 | 3.521.037.900,00 | 99,96 | 2.395.298.458,00 | 2.314.772.853,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 160.000.000,00 | 159.717.900,00 | 99,82 | 300.000.000,00 | 158.878.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA MODAL** | **140.813.967.866,00** | **137.097.583.768,00** | **97,36** | **181.694.828.496,00** | **261.505.577.246,00** |
| | | | | | | |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.240.000.000,00** | **22.478.493,00** | **1,81** | **1.502.455.281,33** | **69.369.000,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.240.000.000,00 | 22.478.493,00 | 1,81 | 1.502.455.281,33 | 69.369.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | 2025% | REALISASI 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 | 7 |
| | **JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.240.000.000,00** | **22.478.493,00** | **1,81** | **1.502.455.281,33** | **69.369.000,00** |
| | | | | | | |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **332.151.365.845,00** | **311.156.706.398,00** | **93,68** | **293.021.654.748,00** | **302.711.365.364,00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 4.008.009.945,00 | 3.823.421.045,00 | 95,39 | 1.912.914.536,00 | 1.422.580.664,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 328.143.355.900,00 | 307.333.285.353,00 | 93,66 | 291.108.740.212,00 | 301.288.784.700,00 |
| | **JUMLAH BELANJA TRANSFER** | **332.151.365.845,00** | **311.156.706.398,00** | **93,68** | **293.021.654.748,00** | **302.711.365.364,00** |
| | | | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.239.422.762.905,52** | **1.162.011.367.940,00** | **93,75** | **1.227.598.759.939,44** | **1.259.465.899.429,77** |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **-43.420.180.820,52** | **20.104.795.556,75** | **(46,30)** | **-24.871.099.177,41** | **-3.721.720.354,79** |
| | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **43.420.180.820,52** | **43.412.317.407,18** | **99,98** | **68.283.343.480,82** | **72.005.063.835,61** |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **43.420.180.820,52** | **43.412.317.407,18** | **99,98** | **68.283.343.480,82** | **75.505.063.835,61** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.420.180.820,52 | 43.412.244.303,41 | 99,96 | 68.283.343.480,82 | 75.505.063.835,61 |
| | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 73.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **43.420.180.820,52** | **43.412.317.407,18** | **99,98** | **68.283.343.480,82** | **75.505.063.835,61** |
| | | | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000.000,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000.000,00** |
| | | | | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **43.420.180.820,52** | **43.412.317.407,18** | **99,98** | **68.283.343.480,82** | **72.005.063.835,61** |
| | | | | | | |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | 2025% | REALISASI 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 | 7 |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **0,00** | **63.517.112.963,93** | **0,00** | **43.412.244.303,41** | **68.283.343.480,82** |

Sumber: BPKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2026 *(audited)*

Dalam rangka memenuhi kewajiban *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (antara lain untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, pelayanan publik, pengawasan, pengembangan kompetensi ASN, serta kebutuhan belanja pegawai), pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan tanpa meningkatkan beban masyarakat secara berlebihan. Strategi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah akan berfokus pada beberapa hal.

Upaya optimalisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan melalui peningkatan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan, perluasan basis pajak dengan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, pengurangan kebocoran penerimaan melalui integrasi data perpajakan, perizinan, dan transaksi usaha, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, pelayanan yang mudah, dan penegakan hukum secara proposional. Selain itu, evaluasi tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

Optimalisasi kapasitas fiskal juga dilakukan melaui penguatan pengelolaan aset daerah. Strategi ini ditempuh melalui inventarisasi dan sertifikasi seluruh aset daerah, optimalisasi pemanfaatan aset yang belum produktif melaui kerja sama pemanfaatan, sewa, Bangun Guna Serah (BGS), atau bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan, serta pengembangan aset daerah menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Di samping itu, penguatan kapasitas fiskal didukung melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya yang dilakukan meliputi restrukturisasi dan peningkatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, pengembangan unit-unit usaha yang memiliki prospek keuntungan dan memberikan dividen kepada daerah, serta pelaksanaan evaluasi terhadap BUMD yang kurang produktif.

Dalam rangka memperluas basis penerimaan, Pemerintah Daerah juga mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melaui penyederhanaan pelayanan perizinan dan peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan kawasan strategis, pariwisata, pertanian, perkebunan, UMKM dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya memperluas basis penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah juga berupaya meningkatkan pemanfaatan transfer Pemerintah Pusat melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan agar memenuhi indikator kinerja yang menjadi dasar penyaluran transfer berbasis kinerja. Optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, dan sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan, disertai pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan pelaporan dipenuhi tepat waktu.

Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan perlu diimbangi dengan optimalisasi berbagai alternatif sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penajaman strategi pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD seperti strategi pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan stategi optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik dengan prinsip berbagi risiko, manfaat, dan tanggung jawab. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi proyek prioritas yang layak dikerjasamakan melalui KPBU seperti jalan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, rumah sakit, pasar daerah, kawasan pariwisata, dan infrastruktur digital. Selain itu, dengan

menyusun studi kelayakan yang memenuhi aspek teknis, ekonomi, hukum dan lingkungan. Kemudian dengan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen KPBU, meningkatkan koordinasi dengen Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten dan calon investor. Selain itu, membuat regulasi terkait kemudahan perizinan, serta dukungan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong pemanfaatan skema KPBU untuk proyek yang memiliki potensi pengembalian investasi maupun yang memeprlukan dukungan pemerintah.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan dengan menyusun peta kebutuhan pembangunan daerah sebagai acuan penyaluran program CSR agar selaras dengan prioritas RPJMD dan RKPD, membentuk forum koordinasi CSR yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN/BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya dan mengintegrasikan program CSR dengan program pembangunan daerah untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Selain itu, dengan memprioritaskan CSR pada bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta pengembangan desa. Selanjutnya dengan mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring pelaksanaan CSR yang transparan dan akuntabel dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas fiskal juga didukung melalui penerapan strategi efisiensi dan peningkatan kualitas belanja. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan *spending review* untuk mengurangi belanja yang kurang produktif. Selain itu, pengalokasian anggaran diprioritaskan pada program atau kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan efektivitas belanja juga dilakukan sehingga ruang fiskal untuk memenuhi *mandatory spending* menajdi lebih besar.

## 3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai tindak lanjut atas rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN, maka Kabupaten Kerinci juga diharuskan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB.

### 3.3.1. Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan

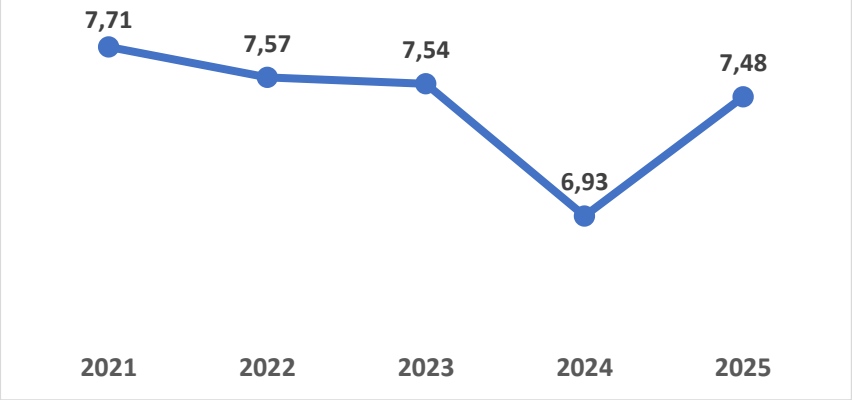
Kemiskinan merupakan tema mendasar yang terdapat di semua daerah. Kerinci tanpa terkecuali juga menemukan kemiskinan sebagai tema yang harus mendapatkan perhatian. Memperkecil angka kemiskinan harus berjalan beriringan dengan membangun sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah harus menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mendongkrak indikator-indikator tersebut.

**Tabel III. 9**
**Indikator TPB Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tingkat Kemiskinan** | Persen | 7.71 | 7.57 | 7.54 | 6.93 | 7,48 |
| **TPAK (TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA)** | Persen | 70.9 | 73.53 | 71.89 | 77.64 | 74,7 |
| **TPT (TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA)** | Persen | 2.32 | 2.63 | 2.48 | 2.51 | 2,39 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2025

**Gambar III. 8**
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kerinci**
**Tahun 2021-2025**




Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2025

Berdasarkan Gambar di atas, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 yaitu berada di angka 6,93 persen. Namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 menjadi 7,48 persen. Peningkatan Tingkat Kemiskinan diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 77,64 pada tahun 2024 menjadi 74,4 pada tahun 2025. Begitu juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana berada pada angka 2,51 pada tahun 2024 dan menurun menjadi 2,39 tahun 2025. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga angka penyerapan angkatan kerja dalam jalur yang positif.

### 3.3.2. Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan

Kelaparan dan kemiskinan merupakan aspek yang saling mempengaruhi karena kelaparan adalah akibat dari adanya kemiskinan. Namun demikian, ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi standar minimal pangan tidak hanya datang dari kecilnya daya beli. Hal lain yang bisa mempengaruhi adalah terbatasnya bahan pangan yang tersedia yang disebabkan salah satunya adalah faktor geografis, yaitu bencana alam.

**Tabel III. 10**
**Indikator TPB Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prevalensi Stunting** | Indeks | 26.70 | 24.20 | 8.70 | 16,4 | 16,4 |
| **Indeks Ketahanan Pangan** | Indeks | 83.31 | 81.94 | 82.42 | 83,76 | 69,9 |
| **Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan** | Persen | 1.2% | 1.08% | 0.7% | 0.36% | 1,04% |

Sumber: Dinas kesehatan, Badan Pangan Nasional dan DPKP Tahun 2026

Dinas kesehatan mencatat prevalensi stunting mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 15,5. Angka tersebut berarti pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang positif untuk menekan angka stunting. Namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 16,04. Harapannya adalah angka tersebut bisa kembali menurun sehingga pembangunan sumber daya manusia daerah bisa efektif.

Sementara untuk indeks ketahanan pangan dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan namun masih dengan jumlah yang tidak signifikan. Hal ini bisa dipengaruhi salah satunya adalah jumlah produksi bahan pangan daerah. Mengingat Kabupaten Kerinci merupakan daerah pertanian, maka produksi padi yang bisa berubah-ubah setiap tahunnya menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap indikator tersebut. Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah adalah bagaimana memaksimalkan potensi produksi pangan daerah agar tidak terjadi kekurangan pangan yang berimbas pada kelaparan.

### 3.3.3. Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Kehidupan yang sehat merupakan dan sejahtera dapat terwujud dengan peran aktif seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, pusat, maupun masyarakat.

**Tabel III. 11**
**Indikator TPB Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kesehatan | Indeks | 76.92 | 77.35 | 77.77 | 82,14 | 82,55 |
| Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup | Indeks | 10,44 | 13,3 | 9,4 | 12,31 | 6,91 |
| Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup | Indeks | 107 | 214 | 97 | 175 | 109 |
| Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran | Indeks | 15 | 2,45 | 5,83 | 13,57 | 4 |
| Tingkat Prevalensi Tuberkulosis | Indeks | 45,24 | 49,56 | 81,93 | 126,2 | 206,8 |
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 70 | 70,28 | 70,55 | 71,57 | 73,39 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Indikator-indikator yang menggambarkan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari tabel di atas. Jika kita lihat dari salah satunya yaitu Indeks kesehatan, bisa kita lihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun selalu terjadi peningkatan meski tidak dengan angka yang signifikan. Selain itu, indikator Angka Harapan Hidup juga selalu meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, ada beberapa aspek yang masih harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya bisa kita lihat pada indikator Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu per Kelahiran Hidup serta Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran.

### 3.3.4. Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas

Pendidikan merupakan aspek vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah baik pusat maupun daerah sangat bertanggung jawab untuk dapat menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat. Tidak hanya sebatas tanggung jawab wilayah administratif namun juga sebagai mandat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

**Tabel III. 12**
**Indikator TPB Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan Berkualitas**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Melek Huruf | Indeks | 99.51 | 99.54 | 99.61 | 99.62 | |
| Indeks Pendidikan | Indeks | 67.09 | 67.15 | 67.27 | 67.53 | 68,59 |
| HLS (HARAPAN LAMA SEKOLAH) | Tahun | 13.88 | 13.89 | 13.91 | 13.92 | 14,2 |
| RLS (RATA LAMA SEKOLAH) | Tahun | 8.56 | 8.57 | 8.59 | 8.6 | 8,76 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Kerinci Tahun 2026

Dari data tabel di atas, bisa kita lihat bahwa seluruh indikator-indikator yang berhubungan dengan pendidikan selalu naik dalam kurun waktu 5 tahun meski tidak dalam angka yang signifikan. Namun hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk indikator Rata Lama Sekolah, meski indikatornya menunjukkan kenaikan setiap tahun, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh nasional (standar global UNDP) yaitu sebesar 15 tahun.

### 3.3.5. Tujuan V: Kesetaraan Gender

Salah satu aspek yang diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender di mana terdapatnya keadilan dalam proses membangun daerah antara perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan gender juga berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Saat semua individu, termasuk perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan sejahtera. Pada akhirnya akan tercipta pembangunan manusia yang berkualitas di suatu wilayah.

**Tabel III. 13**
**Indikator TPB Tujuan V: Kesetaraan Gender**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0,42 |
| Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 86.81 | 87.03 | 87.15 | 87.49 | 87,5 |

Sumber: DPPKBPPPA Tahun 2026

Data dari Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci mencatat bahwa ketimpangan gender dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Sementara di sisi lain, Indeks Pembangunan Gender juga menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menandakan jika pemerintah Kabupaten Kerinci telah menunjukkan kinerja yang positif dalam hal mengentaskan ketimpangan gender yang menjadi salah satu indikator yang menyokong pembangunan manusia.

### 3.3.6. Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap orang untuk digunakan bagi keperluan sehari-hari seperti minum, mencuci dan memasak. Dengan kata lain, air merupakan sarana untuk menunjang produktivitas yang nantinya secara tidak langsung berdampak kepada berkembangnya ekonomi sebuah daerah. Oleh karena itu, aspek pemenuhan air bersih merupakan hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

**Tabel III. 14**
**Indikator TPB Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan | Persen | N/A | N/A | N/A | 53,52 | 64,33 |
| Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persen | N/A | N/A | N/A | 70,00 | 78,98 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Data Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan di atas menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 menjadi 64,33 persen yang sebelumnya 53,52 persen pada tahun 2024. Artinya jaringan perpipaan menunjukkan perbaikan pelayanan dan semakin luasnya cakupan layanan air bersih. Sementara untuk Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 78,98 di tahun 2025.

### 3.3.7. Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau

Kebutuhan akan energi yang terus meningkat harus diikuti dengan ketersediaan produk di lapangan. Hal ini untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak ada lonjakan harga. Sehingga pemerintah daerah harus mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan aspek energi bersih dan terjangkau telah terpenuh dengan baik.

**Tabel III. 15**
**Indikator TPB Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau**

| Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pelanggan Listrik | Pelanggan | 50.839 | - | - | 58.163 | 40.331 |
| Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik PLN | Persen | 95,83 | 99,36 | 95,22 | - | - |
| Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Sakti | Pelanggan | 32.901 | 34.172 | - | 34.682 | 34.015 |
| Jumlah Air Disalurkan | M3 | 32.901 | 396.288 | - | 4.576.302 | 4.415.069 |
| Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas/ Elpiji untuk Memasak | Persen | 65,43 | 67,26 | 77,53 | - | - |

Sumber: Kerinci Dalam Angka 2025

Data di atas menjelaskan jika jumlah pelanggan listrik mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 17.83 pelanggan. Sementara untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase tertinggi dicatatkan pada tahun 2021 sebesar 99,36 persen.

### 3.3.8. Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pilar penting yang menyokong berkembangnya pembangunan sebuah daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi bersinggungan dengan banyak aspek seperti meningkatnya

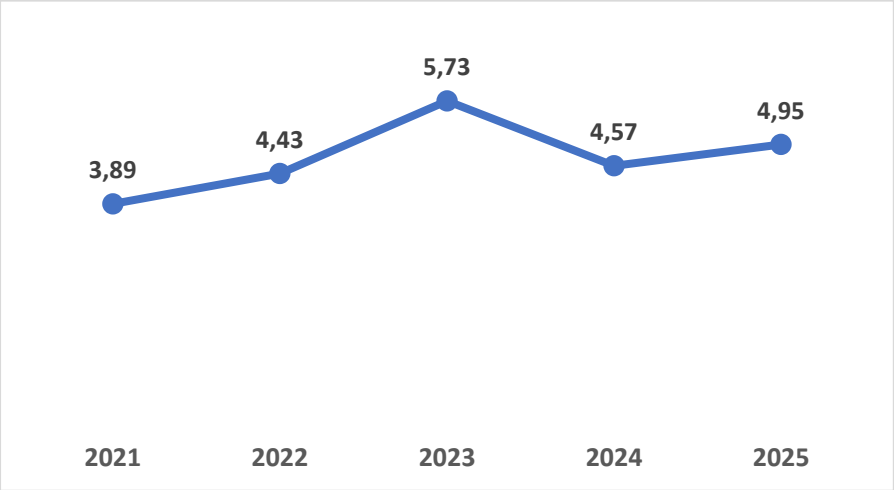
lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dicapai jika aspek pekerjaan yang inklusif dan produktif tidak terpenuhi.

**Tabel III. 16**
**Indikator TPB Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDRB ADHB | Milyar | 11.238,00 | 12.225,60 | 13.405,30 | 14.719 | 15.810,23 |
| PDRB ADHK | Milyar | 6.822,80 | 7.125,00 | 75.33,40 | 7.877,30 | 8.241,23 |
| PDRB PER KAPITA | Juta | 44.64 | 48.233 | 52.546 | 57.339 | 61,23 |
| INFLASI | Persen | 1.65 | 6.04 | 2.85 | 2.07 | 5,52 |
| LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI | Persen | 3.89 | 4.43 | 5.73 | 4.57 | 4,95 |
| PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PROVINSI | Persen | 4.83 | 4.43 | 4.59 | 4.64 | N/A |

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

**Gambar III. 9**
**Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi**




Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Dari Gambar di atas, bisa kita lihat beberapa indikator yang bersinggungan dengan perkembangan ekonomi daerah. Salah satunya adalah PDRB per Kapita yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2024 yang mana mencerminkan kemajuan dalam produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Namun demikian, indikator lainnya seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi hanya menunjukkan satu kali penurunan di tahun 2024 sebesar 1,16 persen. Lalu

ada indikator Inflasi yang menunjukkan yang memiliki nilai tertinggi di tahun 2022 dengan angka 6,04 persen. Dengan kata lain, meski salah satu indikator terus menunjukkan tren positif, hal itu tidak serta merta berlaku untuk indikator-indikator lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar indikator-indikator tersebut bisa seragam dalam menunjukkan tren yang positif.

### 3.3.9. Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan sebuah daerah tentu tidak bisa dilepaskan dengan aspek industri, inovasi dan infrastruktur. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas guna menciptakan iklim investasi yang sehat demi mendukung kemajuan infrastruktur di daerah.

**Tabel III. 17**
**Indikator TPB Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah IKM | Unit | 1.010 | 1.015 | 1.019 | 1.029 | 1.025 |
| Penanaman Modal Dalam Negeri | Persen | 60 | 65,75 | 51,06 | 84,8 | 100 |
| Realisasi total terhadap target investasi | Persen | 66 | 146,2 | 90,3 | 152,4 | 199,85 |
| Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi | Persen | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 75,28 |
| Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| Indeks Inovasi Daerah | Indeks | - | 48,55 | 49,53 | 56,99 | 50,71 |
| Indeks Daya Saing Infrastruktur | Indeks | | 2,44 | 1,92 | 2,67 | 2,58 |
| Persentase Jaringan Jalan Kondisi Mantap | Persen | 48,96 | 40,43 | 46,88 | 48,28 | 33,2 |
| Tingkat Kemantapan Jalan | Indeks | 48,25 | 49,12 | 46,88 | 45,40 | 33,2 |

Sumber: Disperindag,DPMPTSP,Kemendagri, BRIN dan PUPR Tahun 2026

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Kerinci seperti yang dijelaskan oleh BRIN di atas mengalami penurunan di tahun 2023. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 2,67 dan menurun kembali pada tahun 2025 menjadi 2,58. Sementara untuk Indeks Penanaman Modal dalam Negeri, angka terbesar dicatatkan pada tahun 2025 sebesar 100 persen. Untuk Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan dan Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha, angka selalu menunjukkan persentase sempurna hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025.

### 3.3.10. Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan

Masalah kesenjangan adalah permasalahan yang kompleks. Untuk itu, pemerintah diharuskan mampu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat yang berpenghasilan rata-rata atau di bawah rata-rata.

**Tabel III. 18**
**Indikator TPB Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gini Rasio | Indeks | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0,29 |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2026

Dari data tabel di atas, bisa kita simpulkan bahwa indeks kesenjangan di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu lima tahun hanya naik sebesar 0,02 poin di tahun 2023 sebelum kembali turun sebesar 0,01 poin di tahun 2024. Meski tidak ada pergerakan signifikan, namun hal ini juga berarti sejak tahun 2021 indeks gini rasio belum pernah turun ke angka yang lebih rendah. Ini mengindikasikan jika keuntungan dari pembangunan ekonomi masih belum tersebar merata, dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rata-rata atau di bawah rata-rata belum mendapatkan porsi adil dari hasil pembangunan. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan harus menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat.

### 3.3.11. Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan

Permukiman berkelanjutan adalah aspek yang mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, aspek ini juga didasari oleh perencanaan pemerintah daerah untuk menyediakan aksesibilitas terhadap semua orang yang disertai strategi perencanaan yang matang.

**Tabel III. 19**
**Indikator TPB Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | Persen | 91.08 | 91.08 | 83.4 | 97.8 | 97,7 |
| Persentase Rumah Layak Huni | Persen | 74,6 | 75,64 | 76,42 | 77,39 | 78,98 |
| Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | Persen | 31,4 | 50,15 | 52,8 | 52,8 | 48,67 |
| Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%) | Persen | 64,5 | 65.,5 | 67,59 | 68 | 75 |
| Daya Tampung TPS | M3 | 297,5 | 290,5 | 245 | 227,5 | |
| Volume Sampah yg ditangani | Ton | 29,653 | 30,351 | 31,467 | 31,856 | 39.494 |
| Jumlah TPS | Unit | 85 | 83 | 70 | 65 | 80 |

Sumber: PUPR dan DLH Tahun 2026

Pembangunan yang terstruktur berarti kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan peruntukannya sesuai ketetapan RTRW. Dari data di atas, bisa disimpulkan jika persentase kesesuaiannya berfluktuatif dengan mencapai angka terendah di tahun 2023 dan tertinggi di tahun 2024. Sementara untuk indikator Persentase Rumah Layak Huni, dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan jika pembangunan daerah berjalan ke arah yang positif. Indikator Irigasi Kabupaten mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Hal ini selaras dengan lanskap Kabupaten Kerinci sebagai lahan pertanian sehingga keadaan irigasi yang baik sangat diperlukan. Namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 48,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jaringan irigasi pada tahun 2025 mengalami sedikit kemunduran. Artinya, jumlah atau panjang irigasi yang berfungsi dengan

baik berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerusakan, kurangnya pemeliharaan ataupun perbaikan yang tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi.

Sementara untuk indikator Daya Tampung TPS, angkanya terus menurun sementara di saat yang bersamaan volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat terus meningkat. Ketidak seimbangan ini tentu saja akan menimbulkan pencemaran tanah dan juga mengganggu tujuan dari pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk segera menetapkan langkah-langkah konkrit untuk segera mengatasi permasalah sampah di Kabupaten Kerinci.

### 3.3.12. Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.

Konsumsi yang bertanggung jawab tidak lain adalah bentuk kesadaran masyarakat untuk meminimalisir limbah rumah tangga mereka. Hal ini bertujuan untuk memperkecil volume sampah yang masuk dan juga untuk mensiasati ketersediaan tempat penampungan sampah. Di sisi lain, produksi yang bertanggung jawab adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan standar manajemen lingkungan yang berlaku.

**Tabel III. 20**
**Indikator TPB Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume Timbunan Sampah | Ton | 45.974 | 46.337 | 46.556 | 46.848 | 44.283 |
| Volume Sampah yg ditangani | Ton | 29.653 | 30.351 | 31.467 | 31.856 | 39.494 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

Data tabel di atas menjelaskan jika Volume Timbulan Sampah masih melebihi Volume Sampah yang ditangani. Itu artinya sampah-sampah masih belum tertangani secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Kerinci karena akan

menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran hingga krisis lingkungan yang lebih besar.

### 3.3.13. Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim

Penanganan perubahan iklim merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah nyata dan kolaborasi mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga individu.

**Tabel III. 21**
**Indikator TPB Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 76.34 | 92.55 | 90.02 | 93.54 | 93,54 |
| IRB (INDEKS RISIKO BENCANA) | Indeks | 125.06 | 132.02 | 140.58 | 143,41 | 189,86 |
| IKLH (INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) | persen | 73.35 | 76.35 | 69.08 | 70.57 | 76,66 |

Sumber: DLH dan Inarisk Tahun 2026

Di Kabupaten Kerinci sendiri, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi tantangan serius karena faktor geografis Kabupaten Kerinci yang merupakan lahan pertanian, sehingga budaya masyarakat petani kerap membakar gabah kering menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kualitas udara. Selain itu, keterbatasan tempat pembuangan sampah juga bisa berkontribusi terhadap kualitas udara karena masyarakat memilih untuk membakar sendiri sampah-sampah rumah tangga mereka. Meski demikian, Indeks Kualitas Udara masih mencatatkan angka di bawah 100 yang berarti aman bagi sebagian besar orang.

### 3.3.14. Tujuan XIV: Ekosistem Daratan

Aspek ekosistem daratan tidak lepas dari bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan lahan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pertanian, perumahan, rekreasi, komersial, industri, transportasi, dan lain sebagainya.

Rencana Pola Ruang dalam RTRW kabupaten Kerinci mencatat di tahun 2024-2044 bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Kerinci didominasi oleh Hutan (65,39%) dan Semak balukar/ Padang Rumput 43,46%. Dengan kata lain, terdapat spesies-spesies yang menghuni tanah dengan luas tersebut dan pemerintah diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut karena secara langsung akan bermanfaat untuk ekosistem dan menjaga keberlangsungan.

**Tabel III. 22**
**Indikator TPB Tujuan XIV: Ekosistem Daratan**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Persen | 86.93 | 74.46 | 74.54 | 80.59 | 90,03 |
| Rasio Jaringan Irigasi (M/Ha) | Indeks | 6.00 | 9.00 | 10.20 | 10.6 | 28,26 |

Sumber: DLH dan PUPR Tahun 2026

Jika kita lihat dari data tabel di atas, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mencapai angka 90,03 persen pada tahun 2025. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan Rasio Jaringan Irigasi selama lima tahun terakhir. Artinya, kualitas lingkungan di Kabupaten Kerinci semakin baik karena tutupan lahan semakin terjaga. Begitu juga dengan jaringan irigasi juga semakin berkembang atau semakin banyak lahan yang terlayani air. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dan infrastruktur air berjalan searah, sehingga lahan yang produktif mendapat dukungan irigasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan di Kabupaten Kerinci semakin terjaga dan kemampuan pengairan untuk mendukung lahan juga semakin baik.

### 3.3.15. Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Sebuah pembangunan daerah yang berhasil tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pemerintah daerah menjaga keamanan dan memberikan

keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, indikator-indikator perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga arah pembangunan daerah telah berada dalam jalur yang benar.

**Tabel III. 23**
**Indikator TPB Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhii Kebutuhan Dasarnya | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhii Kebutuhan Dasarnya | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | Persen | 94.85 | 90.00 | 98.30 | 96.84 | 100 |
| Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | Persen | 70,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial, Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar Tahun 2026

Dari data yang dicatatkan oleh Dinas Sosial tersebut, bisa kita simpulkan jika pemerintah Kabupaten Kerinci tidak abai terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi golongan penyandang disabilitas terlantar, golongan anak yang terlantar, dan golongan pengemis terlantar. Sementara dari data yang dicatatkan Kesbangpol, Satpol-PP dan Damkar, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Konflik Sosial yang Diselesaikan juga menunjukkan angka yang memuaskan.

### 3.3.16. Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Aspek Kemitraan untuk Mencapai Tujuan merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan di sini berarti menitikberatkan pada kerja sama

baik antara badan usaha dan masyarakat, maupun antar negara-negara berkembang yang dikenal dengan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Beberapa target yang hendak dicapai untuk tujuan ini antara lain penguatan sumber daya domestik dan keuangan, peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, peningkatan investasi, peningkatan adopsi teknologi dan inovasi, peningkatan ekspor, serta pengembangan kapasitas statistik.

**Tabel III. 24**
**Indikator TPB Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

| Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB | Indeks | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0,17 |
| Rasio Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB | Persen | 2.74 | 2.69 | 2.72 | 2.76 | 2,76 |
| Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | Persen | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0,68 |
| Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | Persen | 48.81 | 48.97 | 48.28 | 48.84 | 50,78 |
| Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan kawasan Industri | Milyar | 9,903 | 9,925 | 9,95 | 11 | N/A |
| Persentase Penggunaan Internet Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas | Persen | 47,36 | 56,84 | - | - | - |

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2026

Penerimaan pajak terhadap PDRB menggambarkan potensi daerah yang dapat dikonversi menjadi penerimaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin optimal pula penggalian potensi pajak dalam mendukung belanja publik. Berdasarkan data di atas, Rasio Pajak Terhadap PDRB berfluktuatif dengan angka tertinggi di tahun 2023 sebesar 0,23 poin.

### 3.3.17. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2027

Pada Tahun 2027, Kabupaten Kerinci akan terus melaksanakan program pembangunan dalam bentuk pendampingan kolaborasi dengan pelaku pembangunan lainnya yang akan menstimulus pertumbuhan

inklusif. Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur, peningkatan produksi sektor pertanian, pariwisata juga masih tetap akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Berdasarkan hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional maka capaian dan proyeksi indikator makro Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III. 25**
**Capaian Makro Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dan Target Tahun 2027**

| No | Sasaran Makro Pembangunan | Capaian Tahun 2025 | | | Target Kerinci Tahun 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indonesia | Jambi | Kerinci | |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,11 | 4,93 | 4,61 | 5,05 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,74 | 4,08 | 2,39 | 2,25 |
| 3. | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,25 | 7,19 | 7,48 | 7,25 |
| 4. | Rasio Gini | 0,363 | 0,291 | 0,29 | 0,29 |
| 5. | Intensitas emisi GRK (Ton CO2eq) | NA | NA | NA | 772,62 |

# BAB 4
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun RKPD Tahun 2027 dengan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan proritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027, mengacu dan memperhatikan:

1. Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
2. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2026;
3. Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
4. Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027;
5. Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi tahun 2027; dan
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Misi 1** | : | **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan** |
| Tujuan | : | Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien |
| Sasaran | : | 1. Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik<br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br>3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Hukum |
| **Misi 2** | : | **Meningkatkan Pengembangan Ekomoni Inklusif Berbasis Pertanian** |

Tujuan : Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, dan berkelanjutan

Sasaran :
1. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata

**Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya**

Tujuan : Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing

Sasaran :
1. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja
5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
6. Meningkanya Pendapatan Masyarakat

**Misi 4 : Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi**

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Sasaran :
1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4. Menurunnya Tingkat Resiko Bencana

**Misi 4 : Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan**

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah

Sasaran :
1. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

Guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan tersebut, maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Konsistensi Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 pada Tabel berikut.

## Tabel IV. 1
## Konsistensi Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

| NO. | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 | | | | RKPD TAHUN 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum. Stabilitas dan Kepemimpinan | | | | | | | |
| 1.1 | Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 82 | Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 82 |
| 1.1.1 | Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik | Angka | 2,62 | Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik | Angka | 2,62 |
| 1.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Sakip | | 72 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Sakip | | 72 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 4,6 | | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 4,6 |
| | | Opini BPK | | WTP | | Opini BPK | | WTP |
| | | Indeks MCSP | Angka | 78 | | Indeks MCSP | Angka | 78 |
| 1.1.3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 64,76 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 89,00 |
| 2 | Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian | | | | | | | |

| NO. | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 | | | | RKPD TAHUN 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.1 | Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkelanjutan | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,81 | Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkelanjutan | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,05 |
| 2.1.1 | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB | % | 2,94 | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB | % | 2,94 |
| | | Rasio PDRB Industri pengolahan | % | 3,2 | | Rasio PDRB Industri pengolahan | % | 3,2 |
| | | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 84,5 | | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 84,5 |
| | | Inflasi | % | 1.5-3 | | Inflasi | % | 1.5-3 |
| 2.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | | 2,14 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | | 2,14 |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Kesehatan. Pengarusutamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya | | | | | | | |
| 3.1 | Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 75,41 | Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 75,41 |

| NO. | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 | | | | RKPD TAHUN 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3.1.1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,3 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,3 |
| | | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,99 | | Harapan lama sekolah | Tahun | 14,20 |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | Usia harapan hidup | Tahun | 73,91 | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | Usia harapan hidup | Tahun | 73,91 |
| | | Prevalensi Stunting | % | 10,24 | | Prevalensi Stunting | % | 10,24 |
| 3.1.3 | Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas | Persentase IPG | | 87,71 | Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas | Persentase IPG | | 87,71 |
| 3.1.4 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,37 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,25 |
| 3.1.5 | Menurunya jumlah penduduk miskin | Tingkat Kemiskinan | % | 4,94 | Menurunya jumlah penduduk miskin | Tingkat Kemiskinan | % | 7,25 |
| 3.1.6 | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat | PDRB PerKapita (juta) | Rp Juta | 62,92 | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat | PDRB PerKapita (juta) | Rp Juta | 62,92 |
| | | Indeks Gini | Angka | 0,28 | | Indeks Gini | Angka | 0,29 |
| 4 | Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi | | | | | | | |

| NO. | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 | | | | RKPD TAHUN 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 4.1 | Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | Indeks Daya Saing Infrastuktur | Angka | 76,71 | Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | Indeks Daya Saing Infrastuktur | Angka | 76,71 |
| 4.1.1 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah | Indeks Infrastruktur | Angka | 74,892 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah | Indeks Infrastruktur | Angka | 74,892 |
| 4.1.2 | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | % | 98,39 | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | % | 98,39 |
| 4.1.3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | Angka | 78,01 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | Angka | 78,01 |
| | | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%) | % | 74,64 | | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%) | % | 74,64 |
| | | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Ton CO2 eq) | | 772,62 | | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Ton CO2 eq) | | 772,62 |
| 4.1.4 | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Angka | 138,95 | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Angka | 138,95 |
| 5 | Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan | | | | | | | |
| 5.1 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,83 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,83 |

| NO. | RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 | | | | RKPD TAHUN 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 5.1.1 | Meningkatnya Kapabilitas Inovasi | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 58,51 | Meningkatnya Kapabilitas Inovasi | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 58,51 |
| 5.1.2 | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal | Angka | 1,237 | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal | Angka | 1,237 |
| | | Indeks Akses Keuangan Daerah | | 4,82 | | Indeks Akses Keuangan Daerah | | 4,82 |

## 4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2027

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri dengan menetapkan prioritas pembangunan yaitu:

1. Produktivitas:
   a. Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan inovasi
   b. Stimulus untuk Produktivitas dan daya beli Masyarakat
   c. Digitalisasi dan efesiensi tata Kelola
   d. Regulasi dan kelembagaan
2. Investasi:
   a. Efisiensi dan efektivitas investasi
   b. Infrastruktur dan konektivitas ekonomi
   c. Inovasi pembiayaan Pembangunan
   d. Investasi berorientasi industry dan ekspor
3. Industri:
   a. Industri nasional
   b. Hilirisasi sumber daya alam strategis
   c. Swasembada pangan, energi dan air.

### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027

Pada tahun 2027 RKPD Provinsi Jambi mengangkat tema adalah Akselerasi Produktivitas, Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2027 yaitu :

1. Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang merata dan berkeadilan;
3. Peningkatan layanan infrastruktur penunjang perekonomian daerah;
4. Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, efektif dan efisiensi;
5. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2027

Tema RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 adalah Bersinergi Membangun Ekonomi yang Inklusif, SDM Unggul dan Infrastruktur Andal demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2027 mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

1. Transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;
2. Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik;
3. Pembangunan infrastruktur pemerintahan;
4. Pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif;
5. Pengelolaan persampahan terpadu menuju Kerinci ASRI.

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing Perangkat Daerah (PD) diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kerinci, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2027 pada Tabel berikut:

## Tabel IV. 2
## Program Unggulan Kabupaten Kerinci

| VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Program Unggulan** | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| **1** | **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan** | | | |
| **1.1** | **Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Percepatan pemekaran Kerinci Hilir** | **SETDA BAGIAN PEM** |
| 1.1.1 | Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik | | |
| 1.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Sakip | | |
| | | Indeks Pelayanan Publik | BUNGA DESA (Buati Nginap di Desa) | SETDA |
| | | | PETEN PLUS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Plus) | KECAMATAN |
| | | Opini BPK | | |
| | | Indeks MCSP | | |
| 1.1.3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum | Indeks Reformasi Hukum | | |
| **2** | **Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian** | | | |
| **2.1** | **Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, dan berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | | |
| 2.1.1 | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB | Pengembangan Varietas Itik Koto Majidin | Disbunnak |
| | | | Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing | Disbunnak |

| VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Program Unggulan** | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| | | | Pembangunan Jalan Usaha Tani | DTPH |
| | | | Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi | Disbunnak |
| | | | Bantuan Benih Kentang | DTPH |
| | | | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Disbunnak |
| | | | Bantuan Pupuk bagi Kelompok Tani | DTPH, Disbunnak, DPKP |
| | | Rasio PDRB Industri pengolahan | Bantuan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM | Diskopnaker |
| | | Indeks Ketahanan Pangan | Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan | DTPH |
| | | Inflasi | | |
| 2.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata | Dinas Pariwisata |
| | | | Pengembangan SDM Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | | | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Dinas Pariwisata |
| **3** | **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya** | | | |
| **3.1** | **Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | |
| 3.1.1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan | Rata-rata lama sekolah | (1) Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, (2) Insentif Guru Ngaji, Iman masjid dan Da'I Muda, (3) Satu Paud Satu Desa, (4) Desa Binaan Perguruan Tinggi. | Disdik, Setda, Bappeda, Kebangpol, PMD |
| | | Harapan lama sekolah | | |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia harapan hidup | Percepatan Operasional RSUD Kerinci | Dinkes |
| | | | Revitalisasi Posyandu | Dinkes |

| VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Program Unggulan** | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| | | | Coverage BPJS Menuju UHV (BPJS Untuk Semua) | Dinkes |
| | | Prevalensi stunting | | |
| 3.1.3 | Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas | Persentase IPG | | |
| 3.1.4 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | | |
| 3.1.5 | Menurunnya jumlah penduduk miskin | Tingkat Kemiskinan | | |
| 3.1.6 | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat | PDRB PerKapita (juta) | | |
| | | Indeks Gini | | |
| **4** | **Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi** | | | |
| **4.1** | **Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan** | **Indeks Daya Saing Infrastuktur** | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah | Indeks Infrastruktur | Peningkatan Aksesbilitas Air | PUPR, PDAM |
| | | | Betonisasi Jalan Lingkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | PUPR |
| | | | Perbaikan Drainase dan pengendalian Banjir Secara Terpadu | PUPR, BPBD |
| 4.1.2 | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | | |
| 4.1.3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | | |

| VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Program Unggulan** | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| | | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%) | Satu Mobil Sampah Satu Kecamatan | Kecamatan, DLH |
| | | Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq) | | |
| 4.1.4 | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | | |
| **5** | **Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan** | | | |
| **5.1** | **Meningkatnya Daya Saing Daerah** | **Indeks Daya Saing Daerah** | | |
| 5.1.1 | Meningkatnya Kapabilitas Inovasi | Indeks Inovasi Daerah | Pengembangan Desa Digital | PMD, Kominfo |
| 5.1.2 | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal | | |
| | | Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks) | | |

Pemerintah Kabupaten menempatkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai agenda utama dalam perencanaan tahunan dan jangka menengah. Program prioritas dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan sebelumnya, analisis isu strategis, kemampuan fiskal daerah, arah kebijakan nasional dan provinsi, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan hari ini, tetapi juga visioner dalam mempersiapkan fondasi masa depan.

Secara keseluruhan, rangkaian program prioritas dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan memperkuat kolaborasi antar-perangkat daerah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten berkomitmen memastikan bahwa seluruh program prioritas ini berjalan secara konsisten, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta lingkungan hidup yang terjaga demi keberlanjutan generasi mendatang.

Program Prioritas Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

## Tabel IV. 3
## Tabel Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kerinci

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| 20252029 - MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA<br>- Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan<br>- Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian<br>- Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya<br>- Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi<br>- Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan | Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | |
| | | | | Nilai SAKIP (Kategori) | | |
| | | | | Indeks MCSP (Angka) | | |
| | | | | Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci (Level) | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |
| | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Nilai SAKIP (Kategori) | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | Nilai SAKIP (Kategori) | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum | | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, dan berkelanjutan | | | Pertumbuhan Ekonomi(%) | | |
| | | Terkendalinya Laju Inflasi | | Tingkat Inflasi (%) | | |
| | | | Meningkatnya kelancara distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase) | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| | | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro | | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | | |
| | | | | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB (Persentase) | | |
| | | | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) | | |
| | | | meingkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase penanganan bencana pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%)) | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata | | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Jumlah Unit Usaha yang telah melakukan pembinaan dan pendampingan (Unit) | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | |
| | | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | |
| | | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | |
| | Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing | | | Indeks Pembangunan Manusia(Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan | | Indeks Pendidikan (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya distribusi institusi pendidikan | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | | Terlestarikannya bahasa dan sastra Daerah | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) | 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | Indeks Kesehatan (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%) | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | | |
| | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | Meningkatnya kesempatan kerja | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | |
| | | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | |
| | | Menurunnya jumlah penduduk miskin | | Tingkat Kemiskinan ((%)) | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat | | Rasio Gini (Indeks) | | |
| | | | | PDRB PerKapita (juta) (Angka) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan | | | Indeks daya saing infrastruktur(Angka) | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah | | Indeks Infrastruktur (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelyanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | |
| | | | | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | |
| | | | Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
| | | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase) | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
| | | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%) | | |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) (%) | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | | Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%) | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | |
| | | | Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Indeks Kualitas Lahan (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | | Indeks Risiko Bencana (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | Meningkatnya Daya Saing Daerah | | | Indeks Daya Saing Daerah(Angka) | | |
| | | Meningkatnya Kapabilitas Inovasi | | Indeks Inovasi Daerah (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas penataan desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | | Indeks Kapasitas Fiskal (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya Upaya eksistensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |

Intervensi pembangunan kewilayahan Kabupaten Kerinci diarahkan pada peningkatan infrastruktur, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut adalah Intervensi Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kerinci Tahun 2027.

**Tabel IV. 4**
**Intervensi Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kerinci Tahun 2027**

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| | Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi | Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-DAS Batang Merangin-Tembesi | Danau Kerinci | **Program:** Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.<br>**Kegiatan:** Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota,<br>**Sub kegiatan:** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan, Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci |
| | | Revitalisasi Danau Kerinci | Danau Kerinci | - | Tidak Ada, karena merupakan kewenangan pusat (BWSS VI) |
| | | Pembangunan PLTS Apung Danau Kerinci | Danau Kerinci | - | Tidak Ada, karena merupakan kewenangan provinsi jambi |
| | | Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Sei Batang Sangkir dan D. I. Sei SiulakDeras | Batang Sangkir dan Siulak Deras | - | Tidak Ada, karena merupakan kewenangan pusat dan provinsi jambi |

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| | | Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Daerah | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), **Kegiatan:** pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam satu daerah, **Subkegiatan:** peningkatan jaringan irigasi permukaan dan sub operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci |
| | | Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, **Kegiatan:** Pengembangan Prasarana Pertanian, **Subkegiatan:** Pengendalian dan Pemanfaatan lahan Pertanian | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci |
| | | Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. **Kegiatan:** penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten, **Subkegiatan:** jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten | Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci |

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| | | Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, **Kegiatan:** Pengawasan penggunaan sarana pertanian, **Subkegiatan:** Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan, berbentuk biji atau benih, berbentuk batang, berbentuk umbi | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci |
| | | Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program Pembangunan Prasarana Pertanian, **Kegiatan:** Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian, **Subkegiatan:** jumlah embung pertanian yang dibangun dan direhabilitasi dan dipelihara. | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci |
| | | Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program penyediaan dan pengembangann sarana pertanian, **Kegiatan:** pengembangan prasarana pertanian, **Subkegiatan:** pengelolaan lahan pertanian, pangan berkelnajutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B di Kab/Kota. | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci |

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| | | Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program penyediaan dan pengembangann sarana pertanian, **Kegiatan:** pengembangan prasarana pertanian, **Subkegiatan:** pengelolaan lahan pertanian, pangan berkelnajutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B di Kab/Kota. | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci |
| | | Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, **Kegiatan:** pengawasan penggunaan sarana pertanian, **Subkegiatan:** pendampingan pengunaan sarana pendukung pertanian | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci |

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| | | gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama | | | |
| | | Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian | Kabupaten Kerinci | **Program:** Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, **Kegiatan:** penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten, **Subkegiatan:** jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten,<br><br>**Program:** Program pengeendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat venteriner, **Kegiatan:** Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik venteriner dalam daerah kabupaten, **Subkegiatan:** penyediaan jasa medik venteriner | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci |
| | | Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi | Pematang Lingkung | | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci |

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| | | Pengembangan Kawasan Perkebunan | Kayu Aro Barat, Kayu Aro, Gunung Tujuh, Sulak, Siulak Mukai, Gunung Kerinci, Bukit Kerman, Batang Meranging, Gunung Raya, Air Hanat Timur | **Program:** program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, **Kegiatan:** Perbanyakan Benih Bersertifikas tanaman Pangan Benbentuk biji/Benih. **Subkegiatan:** Tersedianya benih bersertifikas tanaman pangan berbentuk biji/benih | Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci |

# BAB 5
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pendanaan pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tema pembangunan daerah yaitu "Bersinergi membangun Ekonomi yang Inklusif, SDM Unggul dan Infrastruktur Andal demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera" dengan prioritas pembangunan terdiri dari transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur pemerintahan, pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif, dan pengelolaan persampahan terpadu menuju Kerinci ASRI. Penandaan pembangunan difokuskan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dengan rincian seagai berikut.

**Tabel V. 1**
**Rekapitulasi Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah**

| Prioritas Pembangunan | Anggaran |
|---|---|
| **Transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan dan Perikanan** | **Rp 57.638.042.431,00** |
| Dinas Perkebunan dan Peternakan | Rp 18.233.843.710,00 |
| Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Rp 29.965.164.060,00 |
| Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan | Rp 9.439.034.661,00 |
| **Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan peningkatan pelayanan publik** | **Rp 587.339.495.921,00** |
| Dinas Kesehatan | Rp 196.268.022.427,00 |
| Dinas Pendidikan | Rp 376.893.275.000,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 7.957.482.800,00 |
| Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Rp 6.220.715.694,00 |
| **Pembangunan infrastruktur pemerintahan** | **Rp 206.488.076.000,00** |
| PUPR | Rp 206.488.076.000,00 |
| **Pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif** | **Rp 22.400.910.817,00** |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp 14.356.189.002,00 |
| Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja | Rp 8.044.721.815,00 |
| **Pengelolaan persampahan terpadu menuju Kerinci ASRI** | **Rp 14.619.763.683,00** |
| Dinas Lingkungan Hidup | Rp 14.619.763.683,00 |

Transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan pertama didukung dengan anggaran sebesar Rp 57.638.042.431 dengan rincian Rp18.233.843.710 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, Rp29.965.164.060 pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultara, dan Rp9.439.034.661 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya prioritas pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan publik dengan anggaran Rp 587.339.495.921 dengan rincian pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja masing-masing sebesar Rp 196.268.022.427, Rp 376.893.275.000, Rp7.957.482.800, dan Rp 6.220.715.694.

Prioritas pembangunan Pembangunan Infrastruktur pemerintahan didukung dengan anggaran Rp 206.488.076.000 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian Pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif yang merupakan urusan Dinas pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan total anggaran Rp 22.400.910.817. Pengelolaan Persampahan Terpadu Menuju Kerinci ASRI merupakan prioritas pembangunan terakhir dengan anggaran Rp 14.619.763.683 yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan fiskal melalui analisis risiko fiskal yang komprehensif. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi kapasitas pendanaan pembangunan, sehingga target prioritas pembangunan tetap dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel V. 2**
**Risiko Fiskal dan Strategi Mitigasi Pendanaan Pembangunan Daerah**

| Risiko Fiskal | Potensi Dampak | Tingkat Risiko | Strategi Mitigasi |
|---|---|---|---|
| **Perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD)**, termasuk penyesuaian DAU, DAK, DBH, dan insentif fiskal | Penurunan kapasitas pendanaan program prioritas dan *mandatory spending* | Tinggi | Meningkatkan PAD, menyusun prioritas belanja, serta menyiapkan skenario APBD berdasarkan beberapa asumsi penerimaan. |
| **Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)** akibat perlambatan ekonomi, perubahan regulasi, atau rendahnya kepatuhan wajib pajak | Target pendapatan tidak tercapai sehingga ruang fiskal menyempit | Tinggi | Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. |
| **Kebijakan efisiensi belanja pemerintah nasional** | Berkurangnya alokasi anggaran untuk program tertentu serta penyesuaian prioritas pembangunan | Tinggi | Melakukan *refocusing* program, meningkatkan efisiensi belanja operasional, dan mengutamakan program berdaya ungkit tinggi. |
| **Inflasi dan kenaikan harga barang/jasa** | Meningkatnya biaya pelaksanaan pembangunan dan pengadaan | Sedang | Penyusunan standar harga yang adaptif, efisiensi pengadaan, serta penguatan pengendalian inflasi daerah. |

| Risiko Fiskal | Potensi Dampak | Tingkat Risiko | Strategi Mitigasi |
|---|---|---|---|
| **Perlambatan pertumbuhan ekonomi** | Menurunnya investasi, aktivitas ekonomi, dan penerimaan daerah | Sedang | Mendorong investasi, pengembangan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, dan peningkatan kemudahan berusaha. |
| **Bencana alam dan perubahan iklim** | Tambahan belanja tidak terduga dan terganggunya pelaksanaan pembangunan | Sedang–Tinggi | Menyediakan Belanja Tidak Terduga (BTT), memperkuat mitigasi bencana, serta mengintegrasikan aspek ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan. |
| **Perubahan regulasi nasional** | Penyesuaian program, indikator, dan penganggaran | Sedang | Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan penyesuaian dokumen perencanaan secara cepat. |

Risiko fiskal menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat maupun kondisi ekonomi daerah. Risiko utama meliputi Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), fluktuasi Pendapatan Asli Dearah (PAD), dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang berpotensi mengurangi kapasitas pendanaan pembangunan. Selain itu, inflasi, perlambatan ekonomi, bencana alam dan perubahan iklim, serta perubahan regulasi nasional juga mempengaruhi pelaksanaan program dan stabilitas fiskal daerah. Untuk meminimalkan dampak risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, meningkatkan efisiensi belanja, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta memperkuat koordinasi dan mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah, diperlukan penetapan program-program yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun perencanaan. Penentuan program tersebut dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan, prioritas daerah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah sehingga alokasi dapat memberikan manfaat yang optimal. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Matriks rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu terhadap prioritas tahunan yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Kerinci. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dapat dilihat pada Lampiran-lampiran.

# BAB 6
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 6.1. Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pembangunan daerah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah periode 2026-2027 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Indikator kinerja utama dan target capaian Kinerja Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel VI. 1**
**Indikator Kinerja Utama**
**Tahun 2027**

| VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Kondisi Awal (2025)** | **Tahun** |
| | | | | **2027** |
| **1** | **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan** | | | |
| **1.1** | **Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **67,82** | **82** |
| 1.1.1 | Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,35 | 2,62 |
| 1.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Sakip | 64,57 | 72 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,08 | 4,6 |
| | | Opini BPK | WTP | WTP |
| | | Indeks MCSP | 78,86 | 78 |
| 1.1.3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum | Indeks Reformasi Hukum | 88,00 | 89,00 |
| **2** | **Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian** | | | |
| **2.1** | **Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, dan berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **4,61** | **5,05** |
| 2.1.1 | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB | 9,12 | 2,94 |
| | | Rasio PDRB Industri pengolahan | 2,76 | 3,2 |
| | | Indeks Ketahanan Pangan | 69,9 | 84,5 |
| | | Inflasi | 5,52 | 1.5-3 |
| 2.1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | 0,68 | 2,14 |

| VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Kondisi Awal (2025)** | **Tahun** |
| | | | | **2027** |
| **3** | **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya** | | | |
| **3.1** | **Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **75,1** | **75,41** |
| 3.1.1 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan | Rata-rata lama sekolah | 8,76 | 9,3 |
| | | Harapan lama sekolah | 14,18 | 14,20 |
| 3.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia harapan hidup | 73,66 | 73,91 |
| | | Prevalensi stunting | 16,4 | 10,24 |
| 3.1.3 | Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas | Persentase IPG | 87,5 | 87,71 |
| 3.1.4 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,39 | 2,25 |
| 3.1.5 | Menurunnya jumlah penduduk miskin | Tingkat Kemiskinan | 7,48 | 7,25 |
| 3.1.6 | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat | PDRB PerKapita (juta) | 61,23 | 62,92 |
| | | Indeks Gini | 0,29 | 0,29 |
| **4** | **Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi** | | | |
| **4.1** | **Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan** | **Indeks Daya Saing Infrastuktur** | | **2,55** |
| 4.1.1 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah | Indeks Infrastruktur | 57,22 | 74,892 |
| 4.1.2 | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 97,7 | 98,39 |
| 4.1.3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | 76,66 | 78,01 |
| | | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%) | 75,00 | 74,64 |
| | | Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq) | N/A | 772,62 |
| 4.1.4 | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | 189,86 | 138,95 |
| **5** | **Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan** | | | |
| **5.1** | **Meningkatnya Daya Saing Daerah** | **Indeks Daya Saing Daerah** | **3,73** | **3,83** |
| 5.1.1 | Meningkatnya Kapabilitas Inovasi | Indeks Inovasi Daerah | 50,71 | 58,51 |
| 5.1.2 | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal | 0,052 | 1,237 |
| | | Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks) | | 4,82 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029

## 6.2. Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Kerinci yang tertuang dalam Tabel berikut.

## Tabel VI. 2
## Indikator Program Prioritas pada Setiap Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan** | | | | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,76 | 8,63 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,18 | 14,20 |
| **III** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| 1 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | % | 77,12 | 86,10 |
| 2 | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 98,16 | 99,82 |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 30,57 | 42,68 |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan** | | | | |
| **V** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | |
| 1 | Angka Kematian Balita | Per 100.000 Kelahiran Hidup | 4,00 | 11,50 |
| 2 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | (%) | 96,00 | 90,00 |
| 3 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | (%) | 89,00 | 98,00 |
| **VI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | 109,00 | 170,00 |
| 2 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | % | 16,4 | 10,24 |
| 3 | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna | % | 14,12 | 30,00 |
| 4 | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen spp-irt (sertifikat produksi pangan industry rumah tangga) sesuai standar | Persentase | 50,00 | 75,00 |
| 5 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 4,40 | 100,00 |
| 6 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 133,76 | 100,00 |
| 7 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 93,90 | 100,00 |
| 8 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 94,71 | 100,00 |
| 9 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 93,50 | 100,00 |
| 10 | Cakupan imunisasi bayi lengkap | Persentase | 81,40 | 90,00 |
| 11 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | % | 98,40 | 100,00 |
| 12 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 55,60 | 100,00 |
| 13 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | % | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu | Persentase | 98,00 | 85,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 15 | Persentase Apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan | Persentase | 95,00 | 96,00 |
| 16 | Percepatan Operasinal Rumah Sakit | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | 16,4 | 10,24 |
| 18 | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun | % | 0,00 | 2,50 |
| 19 | Cakupan Imunisasi di Usia Sekolah Dasar | % | 97,00 | 98,00 |
| 20 | Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional | % | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi ketersediaan Sarana, Prasarana, dan alat kesehatan (SPA) Sesuai Standar | % | RS Bukit Kerman (72,78) RS Kerinci (50) | 80,00 |
| 22 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana | % | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan | % | 86,04 | 88,00 |
| 24 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti persentase pemerintah daerah | Persentase | 90,00 | 92,00 |
| 25 | Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | (%) | 61,48 | 90,00 |
| 27 | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. | (%) | 8,90 | 8,50 |
| 28 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | Orang | 12,9 | 12,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 29 | Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis Masyarakat | Persentase | 67,94 | 85,00 |
| 30 | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. | Orang | 0,70 | 0,6 |
| 31 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 72,18 | 100,00 |
| 33 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 64,00 | 100,00 |
| 34 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | % | 83,63 | 100,00 |
| 35 | Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis | Persentase | 96,66 | 98,00 |
| 36 | Revitalisasi Posyandu | Persentase | 82,20 | 90,00 |
| 37 | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat | Persentase | 50,00 | 85,00 |
| 38 | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar | % | 70,00 | 100,00 |
| 39 | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memiliki perbekalan Kesehatan sesuai standar | Persentase | 93,75 | 94,00 |
| 40 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Persentase | 90,00 | 100,00 |
| 41 | Presentase lanjut usia yang mandiri | % | 98,40 | 98,50 |
| 42 | Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna | Persentase | 0,00 | 50,00 |
| 43 | Rasio tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi | Persentase | 0,73 | 4,49 |
| 44 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun. | (%) | 0,00 | 23,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 45 | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar | Persentase | 20,00 | 93,00 |
| 46 | Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | Persentase | 91,66 | 100,00 |
| 47 | Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun | Persentase | 8,90 | 8,00 |
| 48 | Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar | Persentase | 57,00 | 100,00 |
| 49 | Persentase sarana IRTP ( Industri Rumah Tangga Pangan)yang memenuhi ketentuan | Persentase | 60,00 | 85,00 |
| **1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** | | | | |
| **VIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | |
| 1 | Persentase kondisi mantap jalan | % | 33,20 | 52,72 |
| 2 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 84,00 | 75,46 |
| 3 | Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 48,67 | 78,79 |
| 4 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | % | 97,70 | 98,39 |
| 6 | Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 1,93 | 6,75 |
| **AB** | **1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| 1 | Persentase Rumah Layak Huni | % | 78,98 | 77,89 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 2 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 78,98 | 86,19 |
| 3 | Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) | % | 64,83 | 100,00 |
| **AC** | **2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | |
| 1 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | % | 100,00 | 100,00 |
| **1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | |
| **X** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Persentase penanganan tanggap bencana darurat | % | 100,00 | 40,00 |
| 2 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persentase | 100,00 | 40,00 |
| 3 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 4 | Persentase Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | % | 100,00 | 40,00 |
| 5 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | Persentase | 50,00 | 40,00 |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial** | | | | |
| **XII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | |
| 1 | Tingkat Kemiskinan | (%) | 7,48 | 7,25 |
| 2 | Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | Keluarga | 254,00 | 100,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 3 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi | % | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial | Persentase | 100,00 | 80,00 |
| **2.07.2.17.2.17.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja** | | | | |
| **XIV** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | |
| 1 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 83,00 | 90,00 |
| 2 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB | Persentase | 52,50 | 20,00 |
| **XV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | |
| 1 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 100,00 | 90,00 |
| 2 | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | % | 95,00 | 95,00 |
| 3 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | Persentase | 99,52 | 85,00 |
| 4 | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Orang | 18.785,00 | 100,00 |
| 5 | Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya | Orang | 139.246,00 | 100,00 |
| 6 | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) | Orang | 139.246,00 | 1.500,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **AB** | **2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | |
| 1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persentase | 0,00 | 20,00 |
| 2 | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase | 11,00 | 15,00 |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif | Persentase | 9,00 | 70,00 |
| 4 | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | Persentase | 85,00 | 15,00 |
| 5 | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase | 9,00 | 15,00 |
| 6 | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Persentase | 2,00 | 25,00 |
| 7 | Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | 2,00 | 25,00 |
| 8 | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Persentase | 0,00 | 2,00 |
| 9 | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase | 0,00 | 100,00 |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | |
| **XVII** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,42 | 0,60 |
| 2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 87,50 | 87,71 |
| 3 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 100,00 | 63,92 |
| 4 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 66,50 | 50:65.45 |
| **XVIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **AA** | **2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | |
| 1 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 73,80 | 75,60 |
| 2 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 0,859 | 0,90 |
| 3 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 100,00 | 85,00 |
| 4 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| **AB** | **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |
| 1 | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | Persentase | 90,89 | 45,00 |
| 2 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 3,32 | 2,94 |
| 3 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jiwa | 2,20 | 2,30 |
| 4 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | Persentase | 76,80 | 91,00 |
| 5 | Total Fertility Rate (TFR). | Orang | 2,20 | 2,30 |
| **2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan** | | | | |
| **XX** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 69,90 | 84,50 |
| 2 | Angka Konsumsi Ikan | Kg/KAP/TH | 24,21 | 25,06 |
| 3 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Ton | 5024,00 | 5.000,00 |
| **XXI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **AA** | **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). | (%) | 91,96 | 95,80 |
| **AB** | **3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Ton | 5.024,00 | 5.000,00 |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup** | | | | |
| **XXIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| 1 | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota | % | 72,36 | 85,00 |
| 2 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 62,05 | 73,79 |
| 3 | Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | Ton CO2 eq | 14716,68 | 772,62 |
| 4 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 82,99 | 77,24 |
| 5 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 90,03 | 86,68 |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | |
| **XXV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 81,33 | 83,80 |
| **XXVI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **AA** | **2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | |
| 1 | Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Perekaman KTP elektronik | % | 98,60 | 99,87 |
| 3 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama | % | 46,67 | 5,00 |
| 4 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Persentase | 61,25 | 70,00 |
| 7 | Persentase pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun | % | 98,57 | 99,89 |
| 8 | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| **XXVIII** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Persentase Desa Mandiri | % | 15,43 | 16,84 |
| 2 | Jumlah Desa Mandiri | Desa | 44,00 | 48,00 |
| **XXIX** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | |
| 1 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 18,30 | 40,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 3 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 4 | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persentase | 15,50 | 50,50 |
| 5 | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Persentase | 33,00 | 38,00 |
| 6 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persentase | 35,00 | 65,00 |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan** | | | | |
| **XXXI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | |
| 1 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | % | - | 0,14 |
| 2 | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota | Persentase | 24,47 | 19,15 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Nilai | 73,29 | 73,68 |
| **2.16.2.21.2.20.25.0000 - Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| **XXXIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | |
| 1 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | % | 95,00 | 100,00 |
| 2 | Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital | Desa | 57,00 | 285,00 |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | % | 69,57 | 100,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 4 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 69,57 | 100,00 |
| 5 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | % | 80,00 | 100,00 |
| **AB** | **2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | 2,19 | 2,50 |
| **AC** | **2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 82,00 | 100,00 |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | |
| **XXXV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | |
| 1 | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Persentase | 199,85 | 100,00 |
| 2 | Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persentase | 75,28 | 100,00 |
| 5 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persentase | 30,00 | 100,00 |
| 6 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 0,00 | 100,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 7 | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | Persentase | 75,00 | 100,00 |
| **2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olah Raga** | | | | |
| **XXXVII** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | | 70,00 |
| 2 | Indeks Partisipasi Olahraga | Persentase | | 85,00 |
| **XXXVIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | |
| 1 | Peningkatan Prestasi Olahraga | % Indeks | | 70,00 |
| 2 | Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 15,00 | 75,00 |
| 3 | Rasio Wirausaha Pemuda | Persentase | 0,90 | 3,70 |
| 4 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | Persentase | 2,00 | 7,00 |
| 5 | Nilai SAKIP | Kategori | | AA |
| 6 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | Persentase | 0,00 | 7,00 |
| **2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** | | | | |
| **XL** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | |
| 1 | Terlestarikannya cagar budaya | % | 13,28 | 5,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **AB** | **3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persentase | 12,00 | 13,60 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | A | B |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persentase | 33,93 | 24,50 |
| 4 | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | Persentase | 7,36 | 15,34 |
| **2.23.2.24.0.00.26.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | |
| **XLII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 2 | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | Persentase | 83,78 | 0,04 |
| 3 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase | | 18,50 |
| **XLIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | |
| 1 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 1,47 | 79,70 |
| 2 | Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat | % | 61,40 | 79,70 |
| **AB** | **2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | |
| 1 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | 87,50 | 18,50 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 2 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | % | 16,94 | 65,00 |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura** | | | | |
| **XLV** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB | Persentase | 9,12 | 2,94 |
| **XLVI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | |
| 1 | Jumlah Produksi Padi | Ton | 94217,00 | 116.850,00 |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp | 275.000.000,00 | 410.000.000,00 |
| 3 | Jumlah Produksi Jagung | Ton | 3291,00 | 4.700,00 |
| 4 | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai | Ton | 229.059,00 | 180.863,00 |
| 5 | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah | Ton | 23154,00 | 12.239,00 |
| 6 | Produksi Kentang | Ton | 144829,00 | 150.702,00 |
| **3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan** | | | | |
| **XLVIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | |
| 1 | Jumlah produksi ternak ruminansia dan unggas | Kg | 2.667.264,00 | 1.145.456,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 3 | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Dokumen | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Cakupan luas lahan komoditi perkebunan unggulan (Ha) | Ha | 50.873,00 | 51.028,00 |
| 5 | Cakupan bina kelompok tani | Kelompok Tani | 300,00 | 295,00 |
| **3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | | | | |
| **L** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Persentase | 10,31 | 10,33 |
| **AB** | **3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | |
| 1 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | (%) | 2,76 | 2,79 |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah** | | | | |
| **LII** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | |
| 1 | Tingkat Inflasi | (%) | 5,52 | 2,07 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 75,10 | 75,23 |
| **LIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,08 | 4,60 |
| 2 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 88,00 | 89,00 |
| 3 | Nilai SAKIP | Indeks | 74,59 | 100,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **LIV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **4.01 - SEKRETARIAT DAERAH** | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 67,82 | 82,00 |
| 2 | Tingkat Kematangan UKPBJ | Angka | 9,00 | 9,00 |
| 3 | Persentase Capaian Aksi HAM | % | 78,00 | 83,00 |
| 4 | Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) | Nilai | 1,9534 | 2,70 |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | |
| **LVI** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | |
| 1 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 50,71 | 58,51 |
| **LVII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | | 82,00 |
| **LVIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **5.01 – PERENCANAAN** | | | |
| 1 | Proporsi Dokumen Perencanaan Sesuai Standar | % | | 100,00 |
| 2 | Jumlah Inovasi yang Diakomodir IGA BSKDN Kemendagri | Angka | 43,00 | 52,00 |
| 3 | Jumlah Kajian Strategis Daerah | Angka | 2,00 | 4,00 |
| 4 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah** | | | | |
| **LX** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Nilai | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian |
| **LXI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **5.02 - KEUANGAN** | | | |
| 1 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase | 3,93 | 3,25 |
| 2 | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | Persentase | 80,00 | 103,35 |
| 3 | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | Persentase | 85,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Persentase | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Persentase Penurunan SILPA | Persentase | 31,65 | 33,23 |
| 6 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Persentase | 0,52 | 3,63 |
| 7 | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | Persentase | 0,41 | 0,47 |
| 8 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | Persentase | 6,38 | 0,33 |
| 9 | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | Persentase | 0,43 | 0,32 |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | | | | |
| **LXIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **5.03 - KEPEGAWAIAN** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 1 | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | Persentase | 85,00 | 90,00 |
| 2 | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase | 38,62 | 40,32 |
| 3 | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | Persentase | 11,28 | 12,78 |
| 4 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | Persentase | 79,90 | 87,50 |
| **AB** | **5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | |
| 1 | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional | Persentase | 86,00 | 88,00 |
| 2 | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase | 0,02 | 0,06 |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat** | | | | |
| **LXV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH** | | | |
| 1 | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci | Level | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Nilai Maturitas SPIP | Level | 2,00 | 3,00 |
| 3 | Indeks MCSP | Persentase | 78,86 | 78,00 |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Gunung Tujuh** | | | | |
| **LXVII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 75,00 | 75,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 2 | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah | % | 3,50 | 3,50 |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,60 |
| **LXVIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 76,31 |
| 2 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 76,61 |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 80,00 |
| 4 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 76,61 |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kayu Aro** | | | | |
| **LXX** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 75,00 | 75,00 |
| 2 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) | % | 75,00 | 75,00 |
| 3 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 2,33 | 2,62 |
| **LXXI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Desa | Indeks | 75,00 | 75,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 2 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 75,00 | 75,00 |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 75,00 | 75,00 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 75,00 | 75,00 |
| 5 | Nilai SAKIP | Kategori | B | B |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kayu Aro Barat** | | | | |
| **LXXIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 85,00 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 72,00 |
| 4 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 5 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Gunung Kerinci** | | | | |
| **LXXV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 75,00 | 75,00 |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,60 |
| **LXXVI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | B |
| 2 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 75,00 |
| 4 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 70,00 |
| 5 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Siulak** | | | | |
| **LXXVIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 75,00 | 75,00 |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,60 |
| **LXXIX** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 3 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 70,00 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 75,00 |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Siulak Mukai** | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **LXXXI** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 100,00 | 75,00 |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 85,00 | 4,60 |
| **LXXXII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 2 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 80,00 | 75,00 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 85,00 | 85,00 |
| 4 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Jumlah Desa Mandiri | Desa | 2,00 | 8,00 |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Air Hangat** | | | | |
| **LXXXIV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 85,00 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 72,00 |
| 4 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 5 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Air Hangat Timur** | | | | |
| **LXXXVI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Desa | Indeks | 25,00 | 0,60 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Air Hangat Barat** | | | | |
| **LXXXVIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | | 75,00 |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | | 4,60 |
| **LXXXIX** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | B |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 75,00 |
| 4 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 5 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 70,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Depati Tujuh** | | | | |
| **XCI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 80,00 | 85,00 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 72,00 |
| 4 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 5 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sitinjau Laut** | | | | |
| **XCIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 70,00 | 80,00 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 85,00 |
| **XCIV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,60 |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 60,00 | 70,00 |
| 4 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 5 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Danau Kerinci** | | | | |
| **XCVI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 85,00 |
| 2 | Indeks Desa | Indeks | 0,50 | 0,65 |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 72,00 |
| 4 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Keliling Danau** | | | | |
| **XCVIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,60 |
| 2 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 75,00 | 75,00 |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 60,00 | 70,00 |
| 4 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 75,00 | 75,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 7 | Nilai SAKIP | Kategori | B | B |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Gunung Raya** | | | | |
| **C** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 85,00 | 75,00 |
| **CI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | B |
| 2 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 5,00 | 70,00 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 77,00 | 75,00 |
| 5 | Indeks Desa | Indeks | 0,59 | 0,65 |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Bukit Kerman** | | | | |
| **CIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 75,67 | 75,00 |
| **CIV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 – KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 70,00 | 75,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 2 | Nilai SAKIP | Kategori | B | B |
| 3 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 70,00 |
| 4 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Indeks Desa | Indeks | 0,596 | 0,65 |
| **7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Batang Merangin** | | | | |
| **CVI** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) | % | 75,00 | 75,00 |
| **CVII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 70,00 | 75,00 |
| **CVIII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 70,00 |
| 2 | Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 3 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Nilai SAKIP | Kategori | 70,00 | BB |
| **7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Tanah Cogok** | | | | |
| **CX** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,20 | 4,60 |
| **CXI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 80,00 |
| 2 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 60,00 | 88,30 |
| 3 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 4 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| **7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Danau Kerinci Barat** | | | | |
| **CXIII** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 80,00 | 4,60 |
| **CXIV** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **7.01 - KECAMATAN** | | | |
| 1 | Indeks kerukunan sosial | Angka | 70,00 | 70,00 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80,00 | 80,00 |
| 3 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 70,00 | 70,00 |
| 4 | Indeks Desa | Indeks | 0,55 | 0,65 |
| 5 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | % | 100,00 | 100,00 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 6 | Nilai SAKIP | Kategori | BB | BB |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | |
| **CXVI** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | Persentase | 100,00 | 57,10 |
| **CXVII** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | |
| 1 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Persentase | 100,00 | 85,00 |
| 2 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persentase | 100,00 | 90,00 |
| 3 | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | Persentase | 96,84 | 83,00 |
| 4 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase | 100,00 | 90,00 |
| 5 | Nilai SAKIP | Kategori | | BB |

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029

# BAB 7
# PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

## 7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2027 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyelarasan Prioritas Pembangunan dan Sinergitas Perencanaan, Pembangunan antar Sektor, antar Wilayah dan antar Tingkatan Pemerintahan.

Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional. Dokumen RKPD Kabupaten Kerinci berfungsi sebagai landasan, pedoman dasar dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai pedoman dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik

dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD Kabupetan Kerinci Tahun 2027 yaitu " Bersinergi Membangun Ekonomi yang Inklusif, SDM Unggul dan Infrastruktur Andal demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera " sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah mengarah pada pencapaian tersebut. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2027 mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik; Pembangunan infrastruktur pemerintahan; Pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif; dan Pengelolaan persampahan terpadu menuju Kerinci ASRI.

Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum

daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing-masing Perangkat Daerah dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan Perangkat Daerah pada posisi strategis, di mana Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian Perangkat Daerah dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.
2. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 tidak hanya ditentukan oleh kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan, tetapi juga oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan peran pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

## 7.2. Kesimpulan

Berdasarkan Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2027. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2027 yaitu :***"*Bersinergi Membangun Ekonomi yang Inklusif, SDM Unggul dan Infrastruktur Andal demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera*"*** sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
3. RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2027, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi maupun dengan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan

mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara *sharing* pembiayaan pembangunan dengan APBD Provinsi, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat dalam RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

4. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil, dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Siulak, 30 JUNI 2026

BUPATI KERINCI

MONADI

# LAMPIRAN

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. KERINCI
# TAHUN 2027

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | **Dinas Pendidikan** | | | | | | **376.893.275.000,00** | | | | | | | | **419.194.203.750,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **376.893.275.000,00** | | | | | | | | **419.194.203.750,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **376.893.275.000,00** | | | | | | | | **419.194.203.750,00** | |
| **1.** | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **309.349.025.000,00** | | | | | | | | **316.284.520.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***309.186.275.000,00*** | | | | | | | | ***316.018.817.500,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | A Kategori | | A Kategori | A Kategori | 309.186.275.000,00 | | | | | | | A Kategori | 316.018.817.500,00 | |
| | | | 2.Indeks Pelayanan Publik. | 5.00 Indeks | | 4.40 Indeks | 4.60 Indeks | 309.186.275.000,00 | | | | | | | 4.80 Indeks | 316.018.817.500,00 | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 191.750.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 184.668.750,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 191.750.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 184.668.750,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.500.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 92.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 44.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.191.250,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 17.640.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.500.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 36.750.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 38.587.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 92.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.100.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 92.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 44.100.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 31.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 17.640.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 17.640.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 31.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 18.191.250,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.191.250,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 36.750.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 306.414.338.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 308.149.723.750,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 306.414.338.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 308.149.723.750,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 25.357.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 588.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 617.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 26.460.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | | 1 Laporan | 29.767.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 31.500.000,00 | | | | | | | 15 Laporan | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2814 Orang/bulan | | 2814 Orang/bulan | 2814 Orang/bulan | 305.794.838.000,00 | | | | | | | 2814 Orang/bulan | 307.417.663.750,00 | |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 305.794.838.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 307.417.663.750,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2814 Orang/bulan | | 2814 Orang/bulan | 3879 Orang/bulan | 305.794.838.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2814 Orang/bulan | 307.417.663.750,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 588.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 617.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 588.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 617.400.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 29.767.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 29.767.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 25.357.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 25.357.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 31.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Laporan | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 26.460.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 26.460.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 31.500.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 63.393.750,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 31.500.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 63.393.750,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 31.500.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | | 2 Laporan | 30.318.750,00 | |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 30.318.750,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 30.318.750,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 31.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 5 Laporan | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 224.229.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 269.561.250,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 224.229.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 269.561.250,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 56.229.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 41.343.750,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 94.500.000,00 | | | | | | | 7 Orang | 99.225.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 63 Paket | | 50 Paket | 53 Paket | 73.500.000,00 | | | | | | | 56 Paket | 44.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | | 0 Orang | 7 Orang | 0,00 | | | | | | | 7 Orang | 51.817.500,00 | |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 73.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 63 Paket | | 50 Paket | 98 Paket | 73.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 56 Paket | 44.100.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 41.343.750,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 41.343.750,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 56.229.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 56.229.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 51.817.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Orang | 51.817.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 94.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 99.225.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 94.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Orang | 99.225.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 608.050.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 544.083.750,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat | | | | | | 608.050.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 544.083.750,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 231.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 275.625.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 16.800.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 17.640.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | | 36 Laporan | 36 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 36 Laporan | 115.762.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 26.250.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 31.500.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.750.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 16.537.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 36.750.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 38.587.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 19.293.750,00 | |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 15.750.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 16.537.500,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 16.537.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 36.750.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 19.293.750,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 19.293.750,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 26.250.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 31.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 250.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 115.762.500,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | | 36 Laporan | 75 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 36 Laporan | 115.762.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 16.800.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 17.640.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 16.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 17.640.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 231.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.625.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 231.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 275.625.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.345.508.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 2.315.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.345.508.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 2.315.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 14 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 68.250.000,00 | | | | | | | 14 Unit | 71.662.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 236.250.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 248.062.500,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 584.258.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 413.437.500,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | | 2 Unit | 1.102.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 57.750.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 60.637.500,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 399.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 418.950.000,00 | |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.102.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 1.102.500.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 584.258.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 413.437.500,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 584.258.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 413.437.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 68.250.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 71.662.500,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 14 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 68.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 14 Unit | 71.662.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 57.750.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 60.637.500,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 57.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 60.637.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 236.250.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 248.062.500,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 236.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 248.062.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 399.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 418.950.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 399.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 418.950.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 362.500.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 4.553.325.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 362.500.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 4.553.325.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 136.500.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 143.325.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 226.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 4.410.000.000,00 | |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 136.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 143.325.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 136.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 143.325.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 226.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 4.410.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 226.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 4.410.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 171.150.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 204.513.750,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 171.150.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 204.513.750,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 131.250.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 137.812.500,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 0 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | | 10 Unit | 24.806.250,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 39.900.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 41.895.000,00 | |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 131.250.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 137.812.500,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 131.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 137.812.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 24.806.250,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 24.806.250,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 39.900.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 41.895.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 39.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 41.895.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **2.** | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | **67.118.750.000,00** | | | | | | | | **102.337.908.750,00** | |
| | | ***Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah*** | | | | | | ***60.753.650.000,00*** | | | | | | | | ***79.607.666.250,00*** | |
| | | | 1.Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | 94.59 % | | 83.13 % | 86.10 % | 60.753.650.000,00 | | | | | | | 89.07 % | 79.607.666.250,00 | |
| | | | 2.Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | 100.00 % | | 99.27 % | 99.82 % | 60.753.650.000,00 | | | | | | | 100.00 % | 79.607.666.250,00 | |
| | | | 3.Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan | 54.79 % | | 38.65 % | 42.68 % | 60.753.650.000,00 | | | | | | | 46.72 % | 79.607.666.250,00 | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | 36.208.450.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar | | 52.180.222.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar | | | | | | 36.208.450.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar | | 52.180.222.500,00 | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | | 0 Paket | 2 Paket | 0,00 | | | | | | | 2 Paket | 441.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 3 Buku | | 3 Buku | 3 Buku | 0,00 | | | | | | | 3 Buku | 99.225.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.750.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 38.587.500,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 36.750.000,00 | | | | | | | 1 Kegiatan | 38.587.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 84.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 88.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 6 Komunitas | | 6 Komunitas | 6 Komunitas | 42.000.000,00 | | | | | | | 6 Komunitas | 44.100.000,00 | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 37.800.000,00 | | | | | | | 1 Konten Digital | 39.690.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 2.100.000.000,00 | | | | | | | 10 Paket | 2.205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 229 Orang | | 229 Orang | 229 Orang | 42.000.000,00 | | | | | | | 229 Orang | 44.100.000,00 | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 0,00 | | | | | | | 3 Paket | 385.875.000,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 229 Orang | | 229 Orang | 229 Orang | 110.250.000,00 | | | | | | | 229 Orang | 115.762.500,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 75 Orang | | 0 Orang | 65 Orang | 0,00 | | | | | | | 70 Orang | 330.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | | 0 Paket | 2 Paket | 0,00 | | | | | | | 2 Paket | 330.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | | | | | | | 5 Ruang | 1.102.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 229 Orang | | 229 Orang | 229 Orang | 36.750.000,00 | | | | | | | 229 Orang | 38.587.500,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 354 Peserta Didik | | 354 Peserta Didik | 354 Peserta Didik | 2.100.000.000,00 | | | | | | | 354 Peserta Didik | 2.205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 31.500.000,00 | | | | | | | 25 Orang | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 8 Ruang | | 0 Ruang | 8 Ruang | 0,00 | | | | | | | 8 Ruang | 2.756.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | | | | | | | 5 Ruang | 1.102.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 10 Unit | | 0 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | | 10 Unit | 551.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 60 Unit | | 60 Unit | 60 Unit | 9.525.000.000,00 | | | | | | | 60 Unit | 11.576.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 37 Unit | | 0 Unit | 37 Unit | 0,00 | | | | | | | 37 Unit | 5.512.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 229 Satuan Pendidikan | | 229 Satuan Pendidikan | 229 Satuan Pendidikan | 178.500.000,00 | | | | | | | 229 Satuan Pendidikan | 187.425.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 1.575.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 1.653.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 229 Satuan Pendidikan | | 229 Satuan Pendidikan | 229 Satuan Pendidikan | 36.750.000,00 | | | | | | | 229 Satuan Pendidikan | 38.587.500,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 229 Satuan Pendidikan | | 229 Satuan Pendidikan | 229 Satuan Pendidikan | 19.950.000.000,00 | | | | | | | 229 Satuan Pendidikan | 20.947.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 425 Peserta Didik | | 425 Peserta Didik | 425 Peserta Didik | 235.000.000,00 | | | | | | | 425 Peserta Didik | 220.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 229 Orang | | 229 Orang | 229 Orang | 50.400.000,00 | | | | | | | 229 Orang | 52.920.000,00 | |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | 1.575.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.653.750.000,00 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 1.575.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 1.653.750.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 9.525.000.000,00 | | | - | - | - | | | 11.576.250.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 60 Unit | | 60 Unit | 18 Unit | 9.525.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Unit | 11.576.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.102.500.000,00 | |
| | | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Ruang | 1.102.500.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | 2.100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.205.000.000,00 | |
| | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 10 Paket | | 10 Paket | 1 Paket | 2.100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 2.205.000.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 10 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | 235.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 220.500.000,00 | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 425 Peserta Didik | | 425 Peserta Didik | 425 Peserta Didik | 235.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 425 Peserta Didik | 220.500.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 330.750.000,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 75 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 70 Orang | 330.750.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | 110.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 115.762.500,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 229 Orang | | 229 Orang | 231 Orang | 110.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 229 Orang | 115.762.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | 36.750.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 229 Satuan Pendidikan | | 229 Satuan Pendidikan | 231 Satuan Pendidikan | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 229 Satuan Pendidikan | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | 19.950.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 20.947.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 229 Satuan Pendidikan | | 229 Satuan Pendidikan | 231 Satuan Pendidikan | 19.950.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOS Reguler | | | | | 229 Satuan Pendidikan | 20.947.500.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | 50.400.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 52.920.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 229 Orang | | 229 Orang | 231 Orang | 50.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 229 Orang | 52.920.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | 42.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 229 Orang | | 229 Orang | 231 Orang | 42.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 229 Orang | 44.100.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | 37.800.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 39.690.000,00 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 37.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Konten Digital | 39.690.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 31.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 25 Orang | | 25 Orang | 50 Orang | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Orang | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 36.750.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 84.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 88.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 84.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 88.200.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 42.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.100.000,00 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 6 Komunitas | | 6 Komunitas | 2 Komunitas | 42.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Komunitas | 44.100.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 385.875.000,00 | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 3 Paket | | 3 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | | | | 3 Paket | 385.875.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | 36.750.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Kegiatan | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 99.225.000,00 | |
| | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 3 Buku | | 3 Buku | 0 Buku | 0,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | | | | 3 Buku | 99.225.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 330.750.000,00 | |
| | | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 330.750.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.756.250.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 8 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Ruang | 2.756.250.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 5.512.500.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 37 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 37 Unit | 5.512.500.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | 36.750.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 229 Orang | | 229 Orang | 231 Orang | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 229 Orang | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | 178.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 187.425.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 229 Satuan Pendidikan | | 229 Satuan Pendidikan | 231 Satuan Pendidikan | 178.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 229 Satuan Pendidikan | 187.425.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.102.500.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Ruang | 1.102.500.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | 2.100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.205.000.000,00 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 354 Peserta Didik | | 354 Peserta Didik | 354 Peserta Didik | 2.100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 354 Peserta Didik | 2.205.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 441.000.000,00 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | | | | 2 Paket | 441.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 19.608.425.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 30.523.815.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Pendidikan Menengah Pertama | | | | | | 19.608.425.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 30.523.815.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 68.906.250,00 | |
| | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 2 Buku | | 2 Buku | 2 Buku | 0,00 | | | | | | | 2 Buku | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.350.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 29.767.500,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 52.500.000,00 | | | | | | | 1 Kegiatan | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 73.500.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 77.175.000,00 | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 28.350.000,00 | | | | | | | 2 Komunitas | 29.767.500,00 | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 16.275.000,00 | | | | | | | 1 Konten Digital | 17.088.750,00 | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 8 Paket | | 8 Paket | 8 Paket | 1.575.000.000,00 | | | | | | | 8 Paket | 1.653.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 17.850.000,00 | | | | | | | 54 Orang | 18.742.500,00 | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 137.812.500,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 55.125.000,00 | | | | | | | 300 Orang | 57.881.250,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 15 Orang | | 0 Orang | 15 Orang | 0,00 | | | | | | | 15 Orang | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 3 Paket | | 0 Paket | 3 Paket | 0,00 | | | | | | | 3 Paket | 551.250.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 42.000.000,00 | | | | | | | 54 Orang | 44.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 538 Peserta Didik | | 538 Peserta Didik | 538 Peserta Didik | 2.100.000.000,00 | | | | | | | 538 Peserta Didik | 2.205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 65.100.000,00 | | | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 68.355.000,00 | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 21.000.000,00 | | | | | | | 25 Orang | 22.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 5 Ruang | | 0 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | | | | | | | 5 Ruang | 1.378.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | | | | | | | 5 Ruang | 1.102.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | | 5 Unit | 220.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 5.350.000.000,00 | | | | | | | 35 Unit | 7.717.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 15 Unit | | 0 Unit | 15 Unit | 0,00 | | | | | | | 15 Unit | 2.756.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 1.653.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 44.625.000,00 | | | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 46.856.250,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 9.712.500.000,00 | | | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 10.198.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 507 Peserta Didik | | 507 Peserta Didik | 507 Peserta Didik | 400.000.000,00 | | | | | | | 507 Peserta Didik | 275.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 26.250.000,00 | | | | | | | 54 Orang | 27.562.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.653.750.000,00 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 1.653.750.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 5.350.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 7.717.500.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 35 Unit | | 35 Unit | 18 Unit | 5.350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 35 Unit | 7.717.500.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.102.500.000,00 | |
| | | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Ruang | 1.102.500.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.756.250.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 15 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Unit | 2.756.250.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | 1.575.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.653.750.000,00 | |
| | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 8 Paket | | 8 Paket | 1 Paket | 1.575.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Paket | 1.653.750.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 220.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 5 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 220.500.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 2.100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.205.000.000,00 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 538 Peserta Didik | | 538 Peserta Didik | 538 Peserta Didik | 2.100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 538 Peserta Didik | 2.205.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | 400.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.625.000,00 | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 507 Peserta Didik | | 507 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 400.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 507 Peserta Didik | 275.625.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.125.000,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 15 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Orang | 55.125.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 55.125.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 57.881.250,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 55.125.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Orang | 57.881.250,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | 44.625.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 46.856.250,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 44.625.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 46.856.250,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 9.712.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 10.198.125.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 9.712.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 10.198.125.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 54 Orang | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | 17.850.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 18.742.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 17.850.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 54 Orang | 18.742.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | 16.275.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 17.088.750,00 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 16.275.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Konten Digital | 17.088.750,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 21.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 22.050.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Orang | 22.050.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 28.350.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 29.767.500,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.350.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 29.767.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 73.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 77.175.000,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 73.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 77.175.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 28.350.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 29.767.500,00 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 28.350.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Komunitas | 29.767.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | 52.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.125.000,00 | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 52.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Kegiatan | 55.125.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | 65.100.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 68.355.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 65.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 68.355.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.378.125.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Baru Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 5 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Ruang | 1.378.125.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | 42.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 42.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 54 Orang | 44.100.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.125.000,00 | |
| | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 2 Buku | | 2 Buku | 0 Buku | 0,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | | | | 2 Buku | 55.125.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 3 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 68.906.250,00 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | 1 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | | | | 1 Paket | 68.906.250,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 137.812.500,00 | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1 Paket | | 1 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | | | | 1 Paket | 137.812.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | 9.131.850.000,00 | | | | | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 14.268.555.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | 9.131.850.000,00 | | | | | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 14.268.555.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 105.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 110.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.775.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 28.113.750,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 66.150.000,00 | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 26.250.000,00 | | | | | | | 2 Komunitas | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 26.250.000,00 | | | | | | | 1 Konten Digital | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 367.500.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 385.875.000,00 | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 327 Satuan Pendidikan | | 327 Satuan Pendidikan | 327 Satuan Pendidikan | 76.200.000,00 | | | | | | | 327 Satuan Pendidikan | 48.510.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 327 Satuan Pendidikan | | 327 Satuan Pendidikan | 327 Satuan Pendidikan | 6.562.500.000,00 | | | | | | | 327 Satuan Pendidikan | 6.890.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang | | 30 Orang | 303 Orang | 63.000.000,00 | | | | | | | 30 Orang | 66.150.000,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 10 Orang | | 0 Orang | 10 Orang | 0,00 | | | | | | | 10 Orang | 49.612.500,00 | |
| | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | | | | | | | 5 Paket | 882.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 275.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 327 Orang | | 327 Orang | 327 Orang | 47.700.000,00 | | | | | | | 327 Orang | 81.585.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 300 Peserta Didik | | 0 Peserta Didik | 300 Peserta Didik | 0,00 | | | | | | | 300 Peserta Didik | 330.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 327 Satuan Pendidikan | | 327 Satuan Pendidikan | 327 Satuan Pendidikan | 34.125.000,00 | | | | | | | 327 Satuan Pendidikan | 35.831.250,00 | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 35 Orang | | 35 Orang | 35 Orang | 27.300.000,00 | | | | | | | 35 Orang | 28.665.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | | 0 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | | | | | | | 2 Ruang | 551.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | | | | | | | 5 Ruang | 826.875.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 1.680.000.000,00 | | | | | | | 9 Unit | 1.764.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | | 5 Unit | 551.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 10 Unit | | 0 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | | 10 Unit | 110.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 3 Unit | | 0 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | | 3 Unit | 1.102.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 327 Orang | | 327 Orang | 327 Orang | 26.250.000,00 | | | | | | | 327 Orang | 27.562.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | 1.680.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.764.000.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 9 Unit | | 9 Unit | 5 Unit | 1.680.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Unit | 1.764.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | 367.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 385.875.000,00 | |
| | | Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 367.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 385.875.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 882.000.000,00 | |
| | | Perlengkapan PAUD yang Tersedia | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 882.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 330.750.000,00 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 300 Peserta Didik | | 0 Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Peserta Didik | 330.750.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 49.612.500,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 10 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Orang | 49.612.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | 63.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.150.000,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 63.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang | 66.150.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | 76.200.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 48.510.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 327 Satuan Pendidikan | | 327 Satuan Pendidikan | 327 Satuan Pendidikan | 76.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 327 Satuan Pendidikan | 48.510.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | 6.562.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 6.890.625.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 327 Satuan Pendidikan | | 327 Satuan Pendidikan | 327 Satuan Pendidikan | 6.562.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOP PAUD | | | | | 327 Satuan Pendidikan | 6.890.625.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 327 Orang | | 327 Orang | 327 Orang | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 327 Orang | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Konten Digital | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 27.300.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 28.665.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 35 Orang | | 35 Orang | 35 Orang | 27.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 35 Orang | 28.665.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 26.775.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 28.113.750,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.775.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 28.113.750,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 63.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.150.000,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 66.150.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Komunitas | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Ruang | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | 47.700.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 81.585.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 327 Orang | | 327 Orang | 327 Orang | 47.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 327 Orang | 81.585.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.102.500.000,00 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 3 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 1.102.500.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.625.000,00 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 275.625.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 110.250.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 10 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 110.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | 105.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 110.250.000,00 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 105.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | | | | | 1 Paket | 110.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | 34.125.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 35.831.250,00 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 327 Satuan Pendidikan | | 327 Satuan Pendidikan | 327 Satuan Pendidikan | 34.125.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 327 Satuan Pendidikan | 35.831.250,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 826.875.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Ruang | 826.875.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 2.170.025.000,00 | | | | | | Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 5.365.316.250,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 2.170.025.000,00 | | | | | | Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 5.365.316.250,00 | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 110.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1 Buku | | 0 Buku | 1 Buku | 0,00 | | | | | | | 1 Buku | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.250.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 21.000.000,00 | | | | | | | 1 Kegiatan | 22.050.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 551.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 36.750.000,00 | | | | | | | 2 Komunitas | 38.587.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 31.500.000,00 | | | | | | | 1 Konten Digital | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 26 Orang | | 26 Orang | 26 Orang | 26.250.000,00 | | | | | | | 26 Orang | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5 Orang | | 0 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | | 5 Orang | 33.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 165.375.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 20 Orang | | 20 Orang | 20 Orang | 26.250.000,00 | | | | | | | 20 Orang | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 200 Peserta Didik | | 0 Peserta Didik | 200 Peserta Didik | 0,00 | | | | | | | 200 Peserta Didik | 220.500.000,00 | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 26 Orang | | 26 Orang | 26 Orang | 21.000.000,00 | | | | | | | 26 Orang | 22.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | | 0 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | | | | | | | 2 Ruang | 275.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 0 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | | | | | | | 2 Ruang | 551.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 2 unit | | 0 unit | 2 unit | 0,00 | | | | | | | 2 unit | 551.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 4 Unit | | 0 Unit | 4 Unit | 0,00 | | | | | | | 4 Unit | 220.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | | 2 Unit | 275.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1664 Peserta Didik | | 1664 Peserta Didik | 1664 Peserta Didik | 48.825.000,00 | | | | | | | 1664 Peserta Didik | 51.266.250,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 275.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1 Satuan Pendidikan | | 1 Satuan Pendidikan | 1 Satuan Pendidikan | 131.250.000,00 | | | | | | | 1 Satuan Pendidikan | 137.812.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 26 Satuan Pendidikan | | 26 Satuan Pendidikan | 26 Satuan Pendidikan | 1.764.200.000,00 | | | | | | | 26 Satuan Pendidikan | 1.653.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 26 Orang | | 26 Orang | 26 Orang | 36.750.000,00 | | | | | | | 26 Orang | 38.587.500,00 | |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 220.500.000,00 | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 200 Peserta Didik | | 0 Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Peserta Didik | 220.500.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Orang | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 131.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 137.812.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1 Satuan Pendidikan | | 1 Satuan Pendidikan | 1 Satuan Pendidikan | 131.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Satuan Pendidikan | 137.812.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 1.764.200.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.653.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 26 Satuan Pendidikan | | 26 Satuan Pendidikan | 26 Satuan Pendidikan | 1.764.200.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | | | | | 26 Satuan Pendidikan | 1.653.750.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 36.750.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 26 Orang | | 26 Orang | 26 Orang | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Orang | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 26 Orang | | 26 Orang | 26 Orang | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Orang | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | 31.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.075.000,00 | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 31.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Konten Digital | 33.075.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 21.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 22.050.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 26 Orang | | 26 Orang | 26 Orang | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Orang | 22.050.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 36.750.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 38.587.500,00 | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 36.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Komunitas | 38.587.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | 21.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 22.050.000,00 | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Kegiatan | 22.050.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 165.375.000,00 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 165.375.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0037 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.125.000,00 | |
| | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1 Buku | | 0 Buku | 0 Buku | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Buku | 55.125.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.625.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Ruang | 275.625.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.625.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 275.625.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | 26.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 27.562.500,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 20 Orang | | 20 Orang | 26 Orang | 26.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Orang | 27.562.500,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.625.000,00 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 275.625.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | 48.825.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 51.266.250,00 | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1664 Peserta Didik | | 1664 Peserta Didik | 1664 Peserta Didik | 48.825.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1664 Peserta Didik | 51.266.250,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 220.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 4 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 220.500.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 2 unit | | 0 unit | 0 unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 unit | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 110.250.000,00 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 110.250.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 551.250.000,00 | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Ruang | 551.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **3.** | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | **42.000.000,00** | | | | | | | | **44.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan*** | | | | | | ***42.000.000,00*** | | | | | | | | ***44.100.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 100.00 Persentase | | 100.00 Persentase | 100.00 Persentase | 42.000.000,00 | | | | | | | 100.00 Persentase | 44.100.000,00 | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 44.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 44.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 284 Orang | | 284 Orang | 284 Orang | 42.000.000,00 | | | | | | | 284 Orang | 44.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 42.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.100.000,00 | |
| | | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 284 Orang | | 284 Orang | 284 Orang | 42.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 284 Orang | 44.100.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **4.** | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | **152.250.000,00** | | | | | | | | **159.862.500,00** | |
| | | ***Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan*** | | | | | | ***152.250.000,00*** | | | | | | | | ***159.862.500,00*** | |
| | | | 1.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | 50.50 Persentase | | 34.88 Persentase | 36.56 Persentase | 152.250.000,00 | | | | | | | 38.32 Persentase | 159.862.500,00 | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 152.250.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 159.862.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen dan Laporan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 152.250.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 159.862.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 110.250.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 47.250.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 49.612.500,00 | |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 105.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 110.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 110.250.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 47.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 49.612.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 47.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 49.612.500,00 | Dinas Pendidikan |
| **5.** | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | | **131.250.000,00** | | | | | | | | **137.812.500,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi institusi pendidikan*** | | | | | | ***131.250.000,00*** | | | | | | | | ***137.812.500,00*** | |
| | | | 1.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui | 100.00 Persentase | | 100.00 Persentase | 100.00 Persentase | 131.250.000,00 | | | | | | | 100.00 Persentase | 137.812.500,00 | |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | 131.250.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 137.812.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | 131.250.000,00 | | | | | | Dinas Pendidikan | | 137.812.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 131.250.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 137.812.500,00 | |
| | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | 131.250.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 137.812.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 131.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 137.812.500,00 | Dinas Pendidikan |
| **6.** | **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **230.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Terlestarikannya bahasa dan sastra Daerah*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***165.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra | 100.00 Persentase | | 100.00 Persentase | 100.00 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.00 Persentase | 165.000.000,00 | |
| | 1.01.06.2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 230.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | 1 Bahasa | | 1 Bahasa | 1 Bahasa | 0,00 | | | | | | | 1 Bahasa | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 200 Buku | | 200 Buku | 200 Buku | 100.000.000,00 | | | | | | | 200 Buku | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | |
| | 1.01.06.2.01.0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | 65.000.000,00 | |
| | | Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | 1 Bahasa | | 1 Bahasa | 0 Bahasa | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Bahasa | 65.000.000,00 | Dinas Pendidikan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.01.06.2.01.0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 65.000.000,00 | |
| | | Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | 1.01.06.2.01.0008 | Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 200 Buku | | 200 Buku | 200 Buku | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Buku | 100.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | | **Dinas Kesehatan** | | | | | | **111.901.348.471,00** | | | | | | | | **217.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **111.901.348.471,00** | | | | | | | | **217.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **111.901.348.471,00** | | | | | | | | **217.000.000,00** | |
| **7.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***80.042.236.091,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | A Kategori | A Kategori | 80.042.236.091,00 | | | | | | | A Kategori | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 125.000.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 105.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 75.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 55.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 79.431.156.091,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 79.431.156.091,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 700 Dokumen | | 700 Dokumen | 700 Dokumen | 1.778.920.000,00 | | | | | | | 700 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 700 Orang/bulan | | 700 Orang/bulan | 700 Orang/bulan | 77.552.236.091,00 | | | | | | | 700 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 77.552.236.091,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 700 Orang/bulan | | 700 Orang/bulan | 1001 Orang/bulan | 77.552.236.091,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 700 Orang/bulan | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 1.600.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 700 Dokumen | | 700 Dokumen | 12 Dokumen | 1.600.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 700 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 2 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | | - | - | 60.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | | - | 4 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 106.400.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 106.400.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | - | 80.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | 25 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 295.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 295.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | | - | - | 95.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 95.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | | - | 12 Dokumen | 95.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 1.050.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | 5 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| **8.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***30.387.112.380,00*** | | | | | | | | ***217.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 30.387.112.380,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 217.000.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 30.387.112.380,00 | | | | | | | 8.3 % | 217.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | Puskesmas,UPTD,RSUD dan Jejaring Kesehatan | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.000.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 2 Paket | 1.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 1 Paket | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | Masyarakat dalam wilayah kerja | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | Masyarakat dalam wilayah kerja | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4020 Orang | | 3095 Orang | 4000 Orang | 64.770.000,00 | | | | | | | 4005 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 244.576.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 526.785.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 89.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 182.000.000,00 | | | | | | | 3567 Orang | 80.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 5 Orang | | 9 Orang | 8 Orang | 210.000.000,00 | | | | | | | 7 Orang | 217.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 38513 Orang | 144.840.000,00 | | | | | | | 38513 Orang | 63.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 195.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 200 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 3567 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 90.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 200 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 3567 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 42.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4020 Orang | | 3095 Orang | 250 Orang | 42.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 4005 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 60.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 220 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15602 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 35.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 600 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | 35464 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 30.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 400 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | 162297 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 36.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 300 Orang | 36.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 38513 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 136.411.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 4150 Orang | 136.411.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 2274 Orang | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 125.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 150.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 253.323.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 21 Dokumen | 253.323.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 182.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 182.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 20.682.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 20.682.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | 239.349.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 239.349.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | 195.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 195.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | 2 Unit | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 210.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 217.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 5 Orang | | 9 Orang | 23 Orang | 210.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 7 Orang | 217.000.000,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 264.000.000,00 | | | | | | Puskesmas,UPTD,RSUD dan Jejaring Kesehatan | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 264.000.000,00 | | | | | | Puskesmas,UPTD,RSUD dan Jejaring Kesehatan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 264.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | Puskesmas,UPTD,RSUD dan Jejaring Kesehatan | | 7.050.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | Puskesmas,UPTD,RSUD dan Jejaring Kesehatan | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | - | | - | - | 180.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | - | | - | - | 90.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | - | | - | - | 5.700.029.380,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | 90.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | - | | - | 15 Unit | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | 5.700.029.380,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | - | | - | 2 Unit | 5.700.029.380,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | 180.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | - | | - | 60 Unit | 180.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | Masyarakat dalam wilayah kerja | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | - | | - | - | 35.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | | - | - | 255.500.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | - | | - | - | 196.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | - | | - | - | 43.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 40.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | | - | 70319 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 30.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | | - | 2802 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 185.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | - | | - | 5020 Orang | 185.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | 35.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | - | | - | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 184.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | | - | 900 Orang | 184.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | - | | - | 2100 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0055 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa | | | | | | 32.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa | Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | - | | - | 555 Orang | 32.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 250.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **9.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | **2.905.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***205.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 205.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | Tenaga Kesehatan | | 0,00 | |
| | | Terelaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | Tenaga Kesehatan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | 70.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.535.000.000,00 | | | | | | Tenaga Kesehatan | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.535.000.000,00 | | | | | | Tenaga Kesehatan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 135.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 135.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 21 Dokumen | 135.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| **10.** | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | **460.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman*** | | | | | | ***460.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman | 100 Persentase | | 90 Persentase | 95 Persentase | 460.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 145.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 145.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 145.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 145.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 55 Dokumen | 145.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | 315.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | 315.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 315.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | 315.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 66 Dokumen | 315.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| **11.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **629.200.000,00** | | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***492.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 492.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 192.000.000,00 | | | | | | Masyarakat dalam wilayah kerja | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 192.000.000,00 | | | | | | Masyarakat dalam wilayah kerja | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 192.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | 192.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 21 Dokumen | 192.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 437.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 119.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 21 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| | | **PUSKESMAS PELOMPEK** | | | | | | **1.780.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.780.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.780.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **12.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 480.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 480.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 480.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| **13.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.020.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.020.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.020.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 526.785.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 89.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 287.800.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 135.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 65 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 24 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 600 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 24 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 78 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 24.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 57.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 65 Dokumen | 57.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | 87.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 13 Orang | 87.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 100 Orang | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 120 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | - | | - | - | 17.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | 17.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | - | | - | 24 Dokumen | 17.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 190.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 190.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 140.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 65 Dokumen | 140.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 24 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 24 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 140.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 120 Laporan | 140.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS PELOMPEK |
| | | **PUSKESMAS KERSIK TUO** | | | | | | **3.384.312.096,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.384.312.096,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.384.312.096,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **14.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 1.650.908.996,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 1.650.908.996,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 1.650.908.996,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| **15.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.733.403.100,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.733.403.100,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.733.403.100,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 38513 Orang | 144.840.000,00 | | | | | | | 38513 Orang | 63.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 287.800.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 135.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 38.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 1254 Orang | 38.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 104.280.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 2438 Orang | 104.280.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 37.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 975 Orang | 37.400.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 38513 Orang | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 172.356.800,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 172.356.800,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 244.692.800,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 13 Dokumen | 244.692.800,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | 101.420.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 58 Orang | 101.420.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 100 Orang | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 36 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 300.424.300,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 8 Dokumen | 300.424.300,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 165.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 6 Dokumen | 165.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 316.329.200,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 15 Dokumen | 316.329.200,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 63.250.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 15 Laporan | 63.250.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 189.750.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 189.750.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS KERSIK TUO |
| | | **PUSKESMAS GUNUNG LABU** | | | | | | **1.706.400.000,00** | | | | | | | | **1.836.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.706.400.000,00** | | | | | | | | **1.836.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.706.400.000,00** | | | | | | | | **1.836.000.000,00** | |
| **16.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 410.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 410.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 410.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| **17.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.275.900.000,00*** | | | | | | | | ***1.642.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.275.900.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.642.000.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.275.900.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 1.642.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 182.000.000,00 | | | | | | | 3567 Orang | 80.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 72.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 230 Orang | 72.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 37.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 41.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 156 Orang | 37.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 41.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 156.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 170.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 1500 Orang | 156.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 170.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 13.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 56 Orang | 13.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 165.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 170.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 125 Dokumen | 165.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 170.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 26.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 26.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 6.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 8.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 450.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 30 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 450.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | | - | - | 32.500.000,00 | | | | | | | - | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 270.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 300.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 270.800.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 300.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 155.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 36 Dokumen | 155.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 160.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | 13.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | | - | 1000 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 15.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 231.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 240.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 125 Dokumen | 231.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 240.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 73.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 100 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 73.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 73.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 75.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 100 Laporan | 73.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 75.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| **18.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **629.200.000,00** | | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***7.500.000,00*** | | | | | | | | ***9.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 7.500.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 9.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 437.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 119.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 7.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 9.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 100 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 9.000.000,00 | PUSKESMAS GUNUNG LABU |
| | | **PUSKESMAS SIULAK DERAS** | | | | | | **1.401.900.000,00** | | | | | | | | **1.423.900.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.401.900.000,00** | | | | | | | | **1.423.900.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.401.900.000,00** | | | | | | | | **1.423.900.000,00** | |
| **19.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 676.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 676.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 676.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **20.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***725.900.000,00*** | | | | | | | | ***1.283.900.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 725.900.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.283.900.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 725.900.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 1.283.900.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 9.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 10.200.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 138 Orang | 9.400.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 10.200.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 32.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 34.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 734 Orang | 32.400.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 34.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 47.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 48.500.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 1582 Orang | 47.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 48.500.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 34.300.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 35.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 20 Orang | 34.300.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 35.200.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 138.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 140.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 138.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 140.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 33.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 35.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 33.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 35.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 12.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 14.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.800.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 14.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 680.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi | | | | | 12 Dokumen | 680.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 33.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 21 Orang | 33.600.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 33.600.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 147.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 149.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 147.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 149.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 140.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 137.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 140.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 55.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 57.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 55.800.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 57.200.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 45.100.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 47.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 45.100.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Kelurahan Siulak Deras \|\| 0 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 47.200.000,00 | PUSKESMAS SIULAK DERAS |
| | | **PUSKESMAS SIMPANG TUTUP** | | | | | | **1.188.000.000,00** | | | | | | | | **403.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.188.000.000,00** | | | | | | | | **403.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.188.000.000,00** | | | | | | | | **403.000.000,00** | |
| **21.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 303.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 303.000.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 303.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| **22.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***729.000.000,00*** | | | | | | | | ***403.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 729.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 403.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 729.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 403.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 182.000.000,00 | | | | | | | 3567 Orang | 80.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 59.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 35 Orang | 59.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 14.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 23 Orang | 14.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 72.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 689 Orang | 72.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 13.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 6 Orang | 13.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 106.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 106.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 23.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 23.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | - | | | 403.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | Pendapatan dari BLUD | | | | | 12 Dokumen | 403.000.000,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | | - | - | 32.500.000,00 | | | | | | | - | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | | - | - | 32.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | | - | - | 255.500.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | - | | - | - | 196.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 11.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | - | | - | 2 Orang | 11.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 210.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 210.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 125.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 125.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | | - | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 2.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | | - | 12 Orang | 2.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | 19.500.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | | - | 12 Dokumen | 19.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 52.500.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 12 Dokumen | 52.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 72.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 72.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 72.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 72.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| **23.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **629.200.000,00** | | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***12.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 12.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 437.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 119.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Kerinci \|\| Desa Simpang Tutup \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP |
| | | **PUSKESMAS SIULAK GEDANG** | | | | | | **4.145.000.000,00** | | | | | | | | **4.312.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.145.000.000,00** | | | | | | | | **4.312.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **4.145.000.000,00** | | | | | | | | **4.312.000.000,00** | |
| **24.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 1.800.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 1.800.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 1.800.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| **25.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.585.000.000,00*** | | | | | | | | ***3.642.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.585.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 3.642.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.585.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 3.642.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 300 Orang | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 3567 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 170.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 500 Orang | 150.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 35464 Orang | 170.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 300 Orang | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 162297 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 110.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 50 Orang | 110.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 2274 Orang | 120.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 370.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 390.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 370.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 12 Dokumen | 390.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 110.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 110.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 12 Dokumen | 120.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.900.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | Pendapatan dari BLUD | | | | | 12 Dokumen | 1.900.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | - | 322.800.000,00 | | | | | | | - | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 50 Orang | 50.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | - | 55.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 330.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 0 Dokumen | 300.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | - | 330.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 400.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 270.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 400.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 270.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 17.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | - | 17.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 180.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | - | 180.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 330.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 13 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | - | 330.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| **26.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **629.200.000,00** | | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***110.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 110.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 437.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 119.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Telago Biru \|\| 1 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 12 Dokumen | 110.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK GEDANG |
| | | **PUSKESMAS SIULAK MUKAI** | | | | | | **2.160.000.000,00** | | | | | | | | **2.356.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.160.000.000,00** | | | | | | | | **2.356.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.160.000.000,00** | | | | | | | | **2.356.000.000,00** | |
| **27.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 750.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 750.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 750.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| **28.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.160.000.000,00*** | | | | | | | | ***2.116.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.160.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.116.000.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.160.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 2.116.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 526.785.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 89.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 38513 Orang | 144.840.000,00 | | | | | | | 38513 Orang | 63.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 287.800.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 135.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 20 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 645 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 44.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 99.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 1888 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 99.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 614 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 35.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 175 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 38513 Orang | 35.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 46.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 32 Orang | 46.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 327.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 350.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 60 Dokumen | 327.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 350.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 65.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 30 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 65.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | - | | | 33.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2000 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 33.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | 52.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 40 Orang | 52.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 100 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 800.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 800.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | - | 322.800.000,00 | | | | | | | - | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 220.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 250.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 250.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 175.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 185.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 175.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 185.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 80.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 80.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | - | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 14 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 50.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | - | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 14 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 70.000.000,00 | PUSKESMAS SIULAK MUKAI |
| | | **Puskesmas Sungai Tutung** | | | | | | **1.689.000.000,00** | | | | | | | | **1.752.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.689.000.000,00** | | | | | | | | **1.752.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.689.000.000,00** | | | | | | | | **1.752.000.000,00** | |
| **29.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 550.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 550.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 550.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| **30.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.064.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.707.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.064.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.707.000.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.064.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 1.707.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 287.800.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 135.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 75.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 90 ORANG Orang | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 30.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 75.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 85.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 1164 Orang | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 85.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 980 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 45.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 39.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 30 Orang | 39.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 45.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 178.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 185.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 178.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 185.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 71.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 77.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 71.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 77.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 48.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 48.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 55.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 44 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 100 Orang | 80.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 550.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 550.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 255.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 255.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 255.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 138.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 145.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 138.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 145.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 190.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 190.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 200.000.000,00 | Puskesmas Sungai Tutung |
| | | **Puskesmas Kemantan** | | | | | | **1.505.769.100,00** | | | | | | | | **1.656.346.010,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.505.769.100,00** | | | | | | | | **1.656.346.010,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.505.769.100,00** | | | | | | | | **1.656.346.010,00** | |
| **31.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 528.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 528.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 528.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Kemantan |
| **32.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***977.769.100,00*** | | | | | | | | ***1.656.346.010,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 977.769.100,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.656.346.010,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 977.769.100,00 | | | | | | | 8.3 % | 1.656.346.010,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 526.785.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 89.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 182.000.000,00 | | | | | | | 3567 Orang | 80.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 38513 Orang | 144.840.000,00 | | | | | | | 38513 Orang | 63.160.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 65.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 71.500.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 100 Orang | 65.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 71.500.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 35.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 39.050.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 12 Orang | 35.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 39.050.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 65.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 72.050.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 2000 Orang | 65.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 72.050.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 25.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 28.160.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 300 Orang | 25.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 38513 Orang | 28.160.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 145.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 159.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 145.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 159.500.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 40.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 40.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 44.550.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 56.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 56.100.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 580.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 580.800.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 52.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 57.640.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 48 Orang | 52.400.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 57.640.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 157.269.100,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 172.996.010,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 157.269.100,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 172.996.010,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 151.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 151.250.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 115.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 126.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 115.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 126.500.000,00 | Puskesmas Kemantan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 87.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 96.250.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 87.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 96.250.000,00 | Puskesmas Kemantan |
| | | **PUSKESMAS DEPATI TUJUH** | | | | | | **2.005.661.550,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.005.661.550,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.005.661.550,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **33.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 987.861.550,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 987.861.550,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 987.861.550,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| **34.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.017.800.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.017.800.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.017.800.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 526.785.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 89.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 182.000.000,00 | | | | | | | 3567 Orang | 80.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 36.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 100 Orang | 36.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 12 Orang | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 34.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 2000 Orang | 34.800.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 170.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 170.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 64.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 20 Dokumen | 64.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 22.300.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 20 Dokumen | 22.300.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 20 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | - | 322.800.000,00 | | | | | | | - | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | | - | - | 255.500.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 44.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 40 Orang | 44.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 189.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 20 Dokumen | 189.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 69.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | | - | 50 Orang | 69.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | 72.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | 20 Dokumen | 72.800.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 159.200.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 20 Laporan | 159.200.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS DEPATI TUJUH |
| | | **Puskesmas Semurup** | | | | | | **1.932.700.000,00** | | | | | | | | **2.203.010.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.932.700.000,00** | | | | | | | | **2.203.010.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.932.700.000,00** | | | | | | | | **2.203.010.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **35.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 715.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 715.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 715.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Semurup |
| **36.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.217.700.000,00*** | | | | | | | | ***2.203.010.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.217.700.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.203.010.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.217.700.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 2.203.010.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 104.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 114.950.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 300 Orang | 104.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 114.950.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 68.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 74.800.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 500 Orang | 68.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 74.800.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 208.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 229.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 208.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 229.400.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 39.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 43.780.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 39.800.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 43.780.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 865.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 865.000.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 74.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 82.280.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 40 Orang | 74.800.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | | - | 82.280.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 255.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 280.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | | - | 280.000.000,00 | Puskesmas Semurup |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 175.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 192.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 175.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 192.500.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 73.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 80.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 73.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 80.300.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 219.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 240.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 219.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 240.000.000,00 | Puskesmas Semurup |
| | | **PUSKESMAS HIANG** | | | | | | **1.801.479.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.801.479.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.801.479.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **37.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 814.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 814.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 814.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| **38.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***987.479.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 987.479.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 987.479.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 48.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 1121 Orang | 48.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 8.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 700 Orang | 8.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 133.815.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 133.815.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 3.200.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.200.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 178.664.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 178.664.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 76.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 12 Dokumen | 76.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 92.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 92.400.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 249.300.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 249.300.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS HIANG |
| | | **PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG** | | | | | | **1.922.860.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.922.860.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.922.860.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **39.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 813.900.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 813.900.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 813.900.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **40.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.091.260.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.091.260.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.091.260.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 25.080.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 230 Orang | 25.080.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 91.960.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 3770 Orang | 91.960.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 109.780.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 12570 Orang | 109.780.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 26.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 50 Orang | 26.400.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 234.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 234.400.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 26.840.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 26.840.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 9.700.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.700.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | | - | - | 32.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 211.100.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 211.100.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 176.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 176.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | | - | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 160.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 160.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| **41.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **629.200.000,00** | | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***17.700.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 17.700.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 437.200.000,00 | | | | | | - | | 119.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 437.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 119.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 17.700.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 17.700.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG |
| | | **PUSKESMAS SEMERAP** | | | | | | **1.783.289.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.783.289.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.783.289.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **42.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 573.326.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 573.326.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 573.326.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| **43.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.209.963.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.209.963.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.209.963.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 244.576.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 82.800.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 191 Orang | 82.800.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 48.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 1449 Orang | 48.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 64.800.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 24 Orang | 64.800.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 201.083.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 16 Dokumen | 201.083.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 128.880.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 128.880.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 39.360.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 39.360.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | 5.227.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.227.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 99.060.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 39 Orang | 99.060.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 96.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 96.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 234.153.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 234.153.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 132.600.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 132.600.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 78.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 78.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Keliling Danau \|\| Desa Semerap \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS SEMERAP |
| | | **PUSKESMAS JUJUN** | | | | | | **2.272.249.750,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.272.249.750,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.272.249.750,00** | | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **44.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 1.065.617.850,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 1.065.617.850,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 1.065.617.850,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| **45.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.206.631.900,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.206.631.900,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.206.631.900,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 126.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 220 Orang | 126.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 105.964.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 90 Orang | 105.964.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 110.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 500 Orang | 110.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 64.702.900,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 400 Orang | 64.702.900,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 120.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 30 Orang | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 117.125.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 40 Dokumen | 117.125.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 40 Dokumen | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 30 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 156.290.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 35 Dokumen | 156.290.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 165.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 25 Dokumen | 165.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 52.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 25 Laporan | 52.500.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 99.050.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 60 Laporan | 99.050.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS JUJUN |
| | | **Puskesmas Tamiai** | | | | | | **1.583.590.000,00** | | | | | | | | **1.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.583.590.000,00** | | | | | | | | **1.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.583.590.000,00** | | | | | | | | **1.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **46.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 686.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 686.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 686.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| **47.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***897.590.000,00*** | | | | | | | | ***1.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 897.590.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.000.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 897.590.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 1.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 61.000.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 120 Orang | 61.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 68.000.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 517 Orang | 68.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 32.000.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 142 Orang | 32.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 170.700.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 170.700.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 33.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 33.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 32.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 32.600.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | Pendapatan dari BLUD | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | - | | - | - | 43.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 14.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 13 Orang | 14.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 184.700.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 184.700.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 165.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 165.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Tamiai |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 900.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 12 Dokumen | 900.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 1.000.000,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0055 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa | | | | | | 11.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa | Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | - | | - | 142 Orang | 11.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 124.190.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 124.190.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Batang Merangin \|\| Desa Pasar Tamiai \|\| 1 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | Puskesmas Tamiai |
| | | **PUSKESMAS LOLO** | | | | | | **1.218.645.890,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.218.645.890,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.218.645.890,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **48.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 419.099.890,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 419.099.890,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 419.099.890,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| **49.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***799.546.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 799.546.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 799.546.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4020 Orang | | 3095 Orang | 4000 Orang | 64.770.000,00 | | | | | | | 4005 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 287.800.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 135.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 32.091.180,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 140 Orang | 32.091.180,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 22.770.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4020 Orang | | 3095 Orang | 140 Orang | 22.770.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 4005 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 22.990.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 400 Orang | 22.990.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 21.560.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 350 Orang | 21.560.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 112.530.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 350 Orang | 112.530.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 51.480.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 12 Orang | 51.480.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 120.991.200,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 250 Dokumen | 120.991.200,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | 17.380.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 Orang | | 100 Orang | 14 Orang | 17.380.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 100 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 181.752.120,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 181.752.120,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 78.501.500,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 78.501.500,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LOLO |
| | | **PUSKESMAS BUKIT KERMAN** | | | | | | **1.077.621.970,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.077.621.970,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.077.621.970,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **50.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 194.407.180,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 194.407.180,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 194.407.180,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| **51.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***883.214.790,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 883.214.790,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 883.214.790,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 15602 Orang | 529.034.000,00 | | | | | | | 15602 Orang | 163.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 38513 Orang | 144.840.000,00 | | | | | | | 38513 Orang | 63.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 44.026.400,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 59 Orang | 44.026.400,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 60.720.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15602 Orang | | 15602 Orang | 336 Orang | 60.720.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 15602 Orang | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 117.700.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 508 Orang | 117.700.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 26.840.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 1100 Orang | 26.840.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 15.840.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 38513 Orang | | 38513 Orang | 1000 Orang | 15.840.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 38513 Orang | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 92.153.600,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 92.153.600,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 29.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 29.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 660.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 660.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 39.600.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 8 Orang | 39.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 148.649.600,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 1 Dokumen | 148.649.600,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 175.997.690,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 1 Dokumen | 175.997.690,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 108.597.500,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 1 Laporan | 108.597.500,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 23.430.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 1 Laporan | 23.430.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS BUKIT KERMAN |
| | | **PUSKESMAS TARUTUNG** | | | | | | **1.033.566.400,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.033.566.400,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.033.566.400,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **52.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 290.850.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 290.850.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 290.850.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| **53.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***742.716.400,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 742.716.400,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 742.716.400,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 2274 Orang | 711.391.000,00 | | | | | | | 2274 Orang | 265.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 38.200.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 545 Orang | 38.200.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2274 Orang | | 2274 Orang | 54 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 2274 Orang | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 140.016.400,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 140.016.400,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 51.800.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 51.800.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | - | 322.800.000,00 | | | | | | | - | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 24.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 23 Orang | 24.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 112.400.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 112.400.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 Dokumen | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 43.600.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 12 Dokumen | 43.600.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | - | | - | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 120.200.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 120.200.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS TARUTUNG |
| | | **PUSKESMAS LEMPUR** | | | | | | **1.966.200.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.966.200.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.966.200.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **54.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 902.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 902.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 902.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| **55.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***1.064.200.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.064.200.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 1.064.200.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 107.200.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 600 Orang | 107.200.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 401 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 DOKUMEN Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 24.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 20 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | - | 995.929.200,00 | | | | | | | - | 338.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 2.127.831.500,00 | | | | | | | - | 1.058.450.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | - | 451.960.000,00 | | | | | | | - | 228.520.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | - | | - | 16 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 24 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 190.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 12 DOKIMEN Dokumen | 190.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | | - | 48 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 170.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 DOKIMEN Laporan | 170.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 103.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 24 Laporan | 103.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS LEMPUR |
| | | **PUSKESMAS MUARA HEMAT** | | | | | | **842.691.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **842.691.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **842.691.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **56.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 120.230.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 120.230.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 120.230.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| **57.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***722.461.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 722.461.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 722.461.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 35464 Orang | 1.465.800.000,00 | | | | | | | 35464 Orang | 679.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.682.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 6.228.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.788.057.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 1.623.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.354.112.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 415.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 526.785.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 89.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 527.040.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 177.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 3567 Orang | 1.172.197.580,00 | | | | | | | 3567 Orang | 471.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 162297 Orang | 701.292.900,00 | | | | | | | 162297 Orang | 165.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 29.700.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3567 Orang | | 3567 Orang | 100 Orang | 29.700.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 3567 Orang | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 10.340.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 35464 Orang | | 35464 Orang | 200 Orang | 10.340.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 35464 Orang | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 50.160.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162297 Orang | | 162297 Orang | 100 Orang | 50.160.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 162297 Orang | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 102.216.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 102.216.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 24.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 113.162.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 113.162.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 60.720.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.720.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | - | 4.133.032.120,00 | | | | | | | - | 1.736.996.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 1.814.717.500,00 | | | | | | | - | 387.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 168.483.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | | - | 12 Dokumen | 168.483.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 24 Dokumen | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 26.180.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 26.180.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | | | | | - | 0,00 | PUSKESMAS MUARA HEMAT |
| | | **LABKESDA** | | | | | | **492.161.700,00** | | | | | | | | **541.377.800,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **492.161.700,00** | | | | | | | | **541.377.800,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **492.161.700,00** | | | | | | | | **541.377.800,00** | |
| **58.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 250.000.000,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.000.000,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 275.000.000,00 | LABKESDA |
| **59.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***242.161.700,00*** | | | | | | | | ***266.377.800,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 242.161.700,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 266.377.800,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 242.161.700,00 | | | | | | | 8.3 % | 266.377.800,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 242.161.700,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 266.377.800,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 15 Dokumen | 242.161.700,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 266.377.800,00 | LABKESDA |
| | | **GUDANG FARMASI** | | | | | | **5.366.607.500,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.366.607.500,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **5.366.607.500,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **60.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***5.366.607.500,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 5.366.607.500,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 5.366.607.500,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.000.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 20 Paket | 5.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | | | | | 1 Paket | 0,00 | GUDANG FARMASI |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | - | | - | - | 178.857.300,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | 178.857.300,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | - | | - | 1 Paket | 178.857.300,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | - | 0,00 | GUDANG FARMASI |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | - | 3.971.562.590,00 | | | | | | | - | 1.510.127.800,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 187.750.200,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | | - | 1 Dokumen | 187.750.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | GUDANG FARMASI |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN** | | | | | | **17.024.149.000,00** | | | | | | | | **11.350.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **17.024.149.000,00** | | | | | | | | **11.350.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **17.024.149.000,00** | | | | | | | | **11.350.000.000,00** | |
| **61.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***1.115.149.000,00*** | | | | | | | | ***300.000.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | A Kategori | A Kategori | 1.115.149.000,00 | | | | | | | A Kategori | 300.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 125.000.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 105.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 75.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 6 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 100.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 79.431.156.091,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 79.431.156.091,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 700 Dokumen | | 700 Dokumen | 700 Dokumen | 1.778.920.000,00 | | | | | | | 700 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 89.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 700 Dokumen | | 700 Dokumen | 12 Dokumen | 89.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 700 Dokumen | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 106.400.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 106.400.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.400.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 295.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 295.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 200.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | | 100 Orang | 50 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 300.000.000,00 | | | | | | | 100 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 40.000.000,00 | | | | | | | 100 Paket | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 50 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Paket | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Laporan | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.126.149.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.126.149.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 814.149.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 312.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 391.749.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 391.749.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 282.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 282.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 37.000.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 7.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | | | - | - | | - | - | 2.550.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 1.050.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.625.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 3.625.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | - | 1.100.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 550.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 550.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | - | 60.500.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | 20 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 2.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| **62.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***10.774.000.000,00*** | | | | | | | | ***11.050.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 10.774.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 11.050.000.000,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 10.774.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 11.050.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 7.450.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 3.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.000.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 2.450.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 3.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 50 Unit | 2.450.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 3.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 50 Paket | 1.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.100.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 4.000.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | 3.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 4.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 4.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 264.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 264.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 264.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | 24.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | - | | - | - | 400.000.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | - | | - | - | 6.400.000.000,00 | | | | | | | - | 1.100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | - | | - | - | 1.200.000.000,00 | | | | | | | - | 800.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | - | | - | 4 Unit | 4.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | - | 1.100.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 800.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | - | | - | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 800.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | - | | - | 50 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 150.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| **63.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | **2.905.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***2.500.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 2.500.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 300 Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 300.000.000,00 | | | | | | | 300 Orang | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 300 Orang | | 300 Orang | 50 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Orang | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.535.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.535.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | - | | - | - | 2.400.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.02.0005 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | 2.400.000.000,00 | | | - | - | PP3. Penin gkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | - | | - | 50 Orang | 2.400.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD | | | | | - | 0,00 | RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN |
| | | **RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama** | | | | | | **23.082.820.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **23.082.820.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **23.082.820.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **64.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **107.475.406.557,00** | | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***1.417.820.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | A Kategori | A Kategori | 1.417.820.000,00 | | | | | | | A Kategori | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 365.000.000,00 | | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 125.000.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 105.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 75.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 79.431.156.091,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 79.431.156.091,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 700 Dokumen | | 700 Dokumen | 700 Dokumen | 1.778.920.000,00 | | | | | | | 700 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 89.520.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 700 Dokumen | | 700 Dokumen | 12 Dokumen | 89.520.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 700 Dokumen | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 106.400.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 106.400.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.400.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 11.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 295.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 295.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 200.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | | 100 Orang | 50 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 300.000.000,00 | | | | | | | 100 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 40.000.000,00 | | | | | | | 100 Paket | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Paket | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Paket | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 15 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Laporan | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.126.149.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.126.149.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 814.149.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 312.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 422.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 36 Laporan | 422.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 37.000.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | | | - | - | | - | - | 7.075.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.440.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 1.050.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | 1 Paket | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.625.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 3.625.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 1.150.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | - | 1.375.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | - | 1.100.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 550.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 550.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 1.375.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | 2 Unit | 1.375.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 1.150.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 7 Unit | 1.150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | - | 9.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | - | 60.500.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 9.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | 1 Unit | 9.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 10.500.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | 11 Unit | 10.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 20.980.201.466,00 | | | | | | - | | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 20.980.201.466,00 | | | | | | | - | 275.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 4.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| **65.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **84.798.415.870,00** | | | | | | | | **27.357.633.810,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***14.040.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Angka Kematian Ibu (AKI) | 155 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 175 (per 100.000 kelahiran hidup) | 170 (per 100.000 kelahiran hidup) | 14.040.000.000,00 | | | | | | | 165 (per 100.000 kelahiran hidup) | 0,00 | |
| | | | 999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | 4.43 % | | 12.17 % | 10.24 % | 14.040.000.000,00 | | | | | | | 8.3 % | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 7.450.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 3.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.000.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.935.529.190,00 | | | | | | - | | 20.307.633.810,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.100.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 4.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 300.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | 1.100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 1.100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Pendapatan dari BLUD<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 2 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 264.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 264.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 264.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | 240.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 240.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.598.886.680,00 | | | | | | - | | 7.050.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | - | | - | - | 400.000.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | - | | - | - | 6.400.000.000,00 | | | | | | | - | 1.100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | - | | - | - | 1.200.000.000,00 | | | | | | | - | 800.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | 2.400.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | - | | - | 6 Unit | 2.400.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | - | | - | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | - | | - | 50 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| **66.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | **2.905.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan masyarakat*** | | | | | | ***200.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 200.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 300 Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 300.000.000,00 | | | | | | | 300 Orang | 0,00 | |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 300 Orang | | 300 Orang | 50 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Orang | 0,00 | RSUD Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama |
| | | **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** | | | | | | **206.488.076.000,00** | | | | | | | | **209.074.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **198.248.076.000,00** | | | | | | | | **200.814.000.000,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **189.601.000.327,30** | | | | | | | | **192.069.000.000,00** | |
| **67.** | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **17.193.836.105,00** | | | | | | | | **17.575.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***17.193.836.105,00*** | | | | | | | | ***17.260.000.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 17.193.836.105,00 | | | | | | | B Kategori | 17.260.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 376.774.000,00 | | | | | | - | | 350.000.000,00 | |
| | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah (%) | | | | | | 376.774.000,00 | | | | | | - | | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 73.645.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 114.845.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 121.540.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 66.744.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 70.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 73.645.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 75.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 73.645.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 75.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 114.845.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 80.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 114.845.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 121.540.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 125.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 121.540.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 125.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 66.744.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 66.744.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 70.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 12.979.566.876,00 | | | | | | - | | 13.230.000.000,00 | |
| | | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | | | | | | 12.979.566.876,00 | | | | | | - | | 13.230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 638.600.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 640.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 26.780.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 56.260.906,00 | | | | | | | 3 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 94 Orang/bulan | | 94 Orang/bulan | 94 Orang/bulan | 12.257.925.970,00 | | | | | | | 94 Orang/bulan | 12.500.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 12.257.925.970,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 12.500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 94 Orang/bulan | | 94 Orang/bulan | 94 Orang/bulan | 12.257.925.970,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 94 Orang/bulan | 12.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 638.600.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 640.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 638.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 640.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 26.780.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 26.780.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 56.260.906,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 56.260.906,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 60.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 23.690.000,00 | | | | | | - | | 25.000.000,00 | |
| | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah (%) | | | | | | 23.690.000,00 | | | | | | - | | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.690.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 23.690.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.690.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 147.878.851,00 | | | | | | - | | 195.000.000,00 | |
| | | Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal (%) | | | | | | 147.878.851,00 | | | | | | - | | 195.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 74 Paket | | 74 Paket | 74 Paket | 65.245.350,00 | | | | | | | 74 Paket | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 74 Orang | | 74 Orang | 74 Orang | 82.633.501,00 | | | | | | | 74 Orang | 125.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 65.245.350,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 70.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 74 Paket | | 74 Paket | 95 Paket | 65.245.350,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74 Paket | 70.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 82.633.501,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 125.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 74 Orang | | 74 Orang | 95 Orang | 82.633.501,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74 Orang | 125.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 643.915.482,00 | | | | | | - | | 660.000.000,00 | |
| | | Persentase Layanan administrasi perangkat daerah (%) | | | | | | 643.915.482,00 | | | | | | - | | 660.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 318.127.839,00 | | | | | | | 20 Laporan | 320.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 26.563.026,00 | | | | | | | 25 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 281.509.815,00 | | | | | | | 10 Paket | 290.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 17.714.802,00 | | | | | | | 15 Paket | 20.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 17.714.802,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 17.714.802,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Paket | 20.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 26.563.026,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 26.563.026,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 30.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 281.509.815,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 290.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 15 Paket | 281.509.815,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 290.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 318.127.839,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 320.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 30 Laporan | 318.127.839,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 320.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 2.118.059.881,00 | | | | | | - | | 2.230.000.000,00 | |
| | | Persentase pengadaan BMD Pada Perangkat Daerah (%) | | | | | | 2.118.059.881,00 | | | | | | - | | 2.230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.397.059.881,00 | | | | | | | 1 Unit | 1.500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 515.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 520.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 206.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit | 210.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 515.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 520.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 515.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 520.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | 1.397.059.881,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.397.059.881,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 1.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 206.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 210.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 206.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Unit | 210.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 227.472.364,00 | | | | | | - | | 230.000.000,00 | |
| | | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Kantor (%) | | | | | | 227.472.364,00 | | | | | | - | | 230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 88.053.236,00 | | | | | | | 5 Laporan | 90.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 139.419.128,00 | | | | | | | 12 Laporan | 140.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 88.053.236,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 90.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 88.053.236,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 90.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 139.419.128,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 140.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 139.419.128,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 140.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 676.478.651,00 | | | | | | - | | 655.000.000,00 | |
| | | Persentase terpeliharanya mobil dinas, operasional, lapangan dan alat berat (%) | | | | | | 676.478.651,00 | | | | | | - | | 655.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 16 Unit | | 16 Unit | 16 Unit | 159.564.134,00 | | | | | | | 16 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 203.745.845,00 | | | | | | | 1 Unit | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 193.168.672,00 | | | | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 120.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 90.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 193.168.672,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 193.168.672,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | 159.564.134,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 16 Unit | | 16 Unit | 16 Unit | 159.564.134,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Unit | 160.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 120.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 90.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 203.745.845,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 205.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 203.745.845,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 205.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **68.** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | **18.234.351.726,36** | | | | | | | | **18.480.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi*** | | | | | | ***18.234.351.726,36*** | | | | | | | | ***18.480.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 58.80 Persentase | | 54.80 Persentase | 55.80 Persentase | 18.234.351.726,36 | | | | | | | 56.80 Persentase | 18.480.000.000,00 | |
| | | | 999.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 17.90 Persentase | | 16.11 Persentase | 16.22 Persentase | 18.234.351.726,36 | | | | | | | 17.48 Persentase | 18.480.000.000,00 | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 12.308.402.234,00 | | | | | | - | | 12.475.000.000,00 | |
| | | Rasio Bangunan Pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 12.308.402.234,00 | | | | | | - | | 12.475.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 278.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 280.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 261.114.013,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 270.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 123.775.521,00 | | | | | | | 1 Lembaga | 125.000.000,00 | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | 1.5 KM | | 1.5 KM | 1.5 KM | 3.645.663.092,00 | | | | | | | 1.5 KM | 3.700.000.000,00 | |
| | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 12 KM | | 12 KM | 12 KM | 5.999.749.608,00 | | | | | | | 12 KM | 6.000.000.000,00 | |
| | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 1 KM | | 0 KM | 0 KM | 0,00 | | | | | | | 1 KM | 0,00 | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 1 KM | | 0 KM | 1 KM | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 1 KM | 2.100.000.000,00 | |
| | 1.03.02.2.01.0078 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 123.775.521,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 125.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 123.775.521,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Lembaga | 125.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 1 KM | | 0 KM | 0 KM | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 KM | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | 5.999.749.608,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 12 KM | | 12 KM | 12 KM | 5.999.749.608,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 KM | 6.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | 3.645.663.092,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 3.700.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | 1.5 KM | | 1.5 KM | 1.5 KM | 3.645.663.092,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1.5 KM | 3.700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 1 KM | | 0 KM | 1 KM | 2.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 KM | 2.100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | 261.114.013,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 270.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 261.114.013,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 270.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | 278.100.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 280.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 278.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 280.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.925.949.492,36 | | | | | | - | | 6.005.000.000,00 | |
| | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | | | | | | 5.925.949.492,36 | | | | | | - | | 6.005.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 UNIT | | 0 UNIT | 0 UNIT | 0,00 | | | | | | | 0 UNIT | 0,00 | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 1 UNIT | | 0 UNIT | 0 UNIT | 0,00 | | | | | | | 0 UNIT | 0,00 | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | 1 UNIT | | 0 UNIT | 0 UNIT | 0,00 | | | | | | | 0 UNIT | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 312.474.705,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 315.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 KM | | 3 KM | 3 KM | 1.482.154.962,00 | | | | | | | 3 KM | 1.490.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1 KM | | 0 KM | 0 KM | 0,00 | | | | | | | 0 KM | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 2 KM | | 2 KM | 2 KM | 4.131.319.825,36 | | | | | | | 2 KM | 4.200.000.000,00 | |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 4.131.319.825,36 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 4.200.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 2 KM | | 2 KM | 2 KM | 4.131.319.825,36 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 KM | 4.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1 KM | | 0 KM | 0 KM | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 KM | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 1.482.154.962,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.490.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 KM | | 3 KM | 3 KM | 1.482.154.962,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 KM | 1.490.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.02.0048 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | 1 UNIT | | 0 UNIT | 0 UNIT | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 UNIT | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.02.0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | | | | | | 312.474.705,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 315.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 312.474.705,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 315.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.02.2.02.0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 1 UNIT | | 0 UNIT | 0 UNIT | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 UNIT | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.03.02.2.02.0054 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 UNIT | | 0 UNIT | 0 UNIT | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 UNIT | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **69.** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | **5.850.124.870,80** | | | | | | | | **5.931.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum*** | | | | | | ***5.850.124.870,80*** | | | | | | | | ***5.931.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota | 12.5 % | | 2.5 % | 5.0 % | 5.850.124.870,80 | | | | | | | 7.5 % | 5.931.000.000,00 | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.850.124.870,80 | | | | | | - | | 5.931.000.000,00 | |
| | | Persentase Penduduk berakses air minum jaringan perpipaan(%) | | | | | | 5.850.124.870,80 | | | | | | - | | 5.931.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 987.741.397,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 990.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 990.410.277,80 | | | | | | | 2 Unit | 991.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 1 Liter/Detik | | 1 Liter/Detik | 1 Liter/Detik | 1.831.973.196,00 | | | | | | | 1 Liter/Detik | 1.850.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 6 Liter/Detik | | 6 Liter/Detik | 6 Liter/Detik | 2.040.000.000,00 | | | | | | | 6 Liter/Detik | 2.100.000.000,00 | |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | 987.741.397,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 990.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 987.741.397,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 990.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | 2.040.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.100.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 6 Liter/Detik | | 6 Liter/Detik | 6 Liter/Detik | 2.040.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Liter/Detik | 2.100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | 1.831.973.196,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.850.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 1 Liter/Detik | | 1 Liter/Detik | 1 Liter/Detik | 1.831.973.196,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Liter/Detik | 1.850.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | 990.410.277,80 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 991.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 990.410.277,80 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 991.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **70.** | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | | **2.000.000.000,00** | | | | | | | | **2.010.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya layanan persampahan regional*** | | | | | | ***2.000.000.000,00*** | | | | | | | | ***2.010.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional | 58 Persentase | | 50 Persentase | 52 Persentase | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 54 Persentase | 2.010.000.000,00 | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | | | | - | | 2.010.000.000,00 | |
| | | Tersususnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA Kewenangan Kabupaten yang Disusun | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | | | | - | | 2.010.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 306.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 310.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 0 Ton/hari | | 0 Ton/hari | 0 Ton/hari | 1.694.000.000,00 | | | | | | | 0 Ton/hari | 1.700.000.000,00 | |
| | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | 306.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 310.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 310.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | | | | 1.694.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.700.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 0 Ton/hari | | 0 Ton/hari | 1 Ton/hari | 1.694.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Ton/hari | 1.700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **71.** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | **204.000.000,00** | | | | | | | | **205.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah*** | | | | | | ***204.000.000,00*** | | | | | | | | ***205.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 94.71 Persentase | | 82.23 Persentase | 86.19 Persentase | 204.000.000,00 | | | | | | | 90.35 Persentase | 205.000.000,00 | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 204.000.000,00 | | | | | | - | | 205.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten | | | | | | 204.000.000,00 | | | | | | - | | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 205.000.000,00 | |
| | 1.03.05.2.01.0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 205.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 205.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **72.** | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | **3.875.152.045,44** | | | | | | | | **3.880.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan*** | | | | | | ***3.875.152.045,44*** | | | | | | | | ***3.880.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 44.11 Persentase | | 40.11 Persentase | 41.11 Persentase | 3.875.152.045,44 | | | | | | | 42.11 Persentase | 3.880.000.000,00 | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 3.875.152.045,44 | | | | | | - | | 3.880.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Panjang Drainase yang terbangun terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota | | | | | | 3.875.152.045,44 | | | | | | - | | 3.880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 408.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 410.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 969.000.000,00 | | | | | | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 970.000.000,00 | |
| | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 500 M | | 500 M | 500 M | 2.498.152.045,44 | | | | | | | 500 M | 2.500.000.000,00 | |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | 2.498.152.045,44 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.500.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 500 M | | 500 M | 500 M | 2.498.152.045,44 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 500 M | 2.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | 408.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 410.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 408.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 410.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | 969.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 970.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 969.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 970.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **73.** | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | **612.000.000,00** | | | | | | | | **615.000.000,00** | |
| | | ***Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah*** | | | | | | ***612.000.000,00*** | | | | | | | | ***615.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | 81.69 Persentase | | 72.6 Persentase | 74.89 Persentase | 612.000.000,00 | | | | | | | 77.42 Persentase | 615.000.000,00 | |
| | | Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik | | | | | | 612.000.000,00 | | | | | | - | | 615.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | 0 Ton/hari | | 0 Ton/hari | 0 Ton/hari | 204.000.000,00 | | | | | | | 0 Ton/hari | 205.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.03.07.2.01.0015 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 205.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | 0 Ton/hari | | 0 Ton/hari | 1 Ton/hari | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Ton/hari | 205.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 612.000.000,00 | | | | | | - | | 615.000.000,00 | |
| | | Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik | | | | | | 612.000.000,00 | | | | | | - | | 615.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | - | | - | - | 408.000.000,00 | | | | | | | - | 410.000.000,00 | |
| | 1.03.07.2.01.0042 | 1.03.07.2.01.0026 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | 408.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 410.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | - | | - | 0 M³/Hari | 408.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 410.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **74.** | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | **28.947.600.000,00** | | | | | | | | **29.390.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas bangunan gedung*** | | | | | | ***28.947.600.000,00*** | | | | | | | | ***29.390.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | 89.52 Persentase | | 85.52 Persentase | 86.52 Persentase | 28.947.600.000,00 | | | | | | | 87.52 Persentase | 29.390.000.000,00 | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | 28.947.600.000,00 | | | | | | - | | 29.390.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten | | | | | | 28.947.600.000,00 | | | | | | - | | 29.390.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 163.200.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 165.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 224.400.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | |
| | 1.03.08.2.01.0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | 163.200.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 165.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 163.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 165.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | 224.400.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 225.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 224.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten | | | | | | 28.947.600.000,00 | | | | | | - | | 29.390.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | | - | - | 28.560.000.000,00 | | | | | | | - | 29.000.000.000,00 | |
| | 1.03.08.2.01.0034 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 28.560.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 29.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | | - | 25 Bangunan Gedung | 28.560.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 29.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **75.** | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | **29.459.877.498,00** | | | | | | | | **30.000.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata*** | | | | | | ***29.459.877.498,00*** | | | | | | | | ***30.000.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 29.459.877.498,00 | | | | | | | 100 Persentase | 30.000.000.000,00 | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 29.459.877.498,00 | | | | | | - | | 30.000.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pengawasan, Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | 29.459.877.498,00 | | | | | | - | | 30.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | 100 Kawasan | | 100 Kawasan | 100 Kawasan | 29.459.877.498,00 | | | | | | | 100 Kawasan | 30.000.000.000,00 | |
| | 1.03.09.2.01.0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 29.459.877.498,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | 100 Kawasan | | 100 Kawasan | 100 Kawasan | 29.459.877.498,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Kawasan | 30.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **76.** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | **80.768.961.296,08** | | | | | | | | **81.446.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman*** | | | | | | ***80.768.961.296,08*** | | | | | | | | ***81.446.000.000,00*** | |
| | | | 999.Tingkat Kemantapan Jalan | 56.91 Persentase | | 51.20 Persentase | 52.72 Persentase | 80.768.961.296,08 | | | | | | | 54.29 Persentase | 81.446.000.000,00 | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 80.768.961.296,08 | | | | | | - | | 81.446.000.000,00 | |
| | | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) | | | | | | 80.768.961.296,08 | | | | | | - | | 81.446.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 1.530.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 1.531.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 19 Jembatan | | 19 Jembatan | 19 Jembatan | 315.180.000,00 | | | | | | | 19 Jembatan | 320.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 250 KM | | 250 KM | 250 KM | 525.300.000,00 | | | | | | | 250 KM | 530.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | 7 KM | | 7 KM | 7 KM | 33.428.355.871,00 | | | | | | | 7 KM | 33.500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 250 KM | | 250 KM | 250 KM | 2.161.483.530,00 | | | | | | | 250 KM | 2.200.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 6 KM | | 6 KM | 6 KM | 29.548.641.895,00 | | | | | | | 6 KM | 30.000.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 5 KM | | 5 KM | 5 KM | 5.100.000.000,00 | | | | | | | 5 KM | 5.200.000.000,00 | |
| | | | Panjang jembatan yang dibangun | 54 Meter | | 54 Meter | 54 Meter | 8.160.000.000,08 | | | | | | | 54 Meter | 8.165.000.000,00 | |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | 1.530.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.531.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 1.530.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Dokumen | 1.531.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | 525.300.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 530.000.000,00 | |
| | | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 250 KM | | 250 KM | 250 KM | 525.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 250 KM | 530.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | 2.161.483.530,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 250 KM | | 250 KM | 250 KM | 2.161.483.530,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 250 KM | 2.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | | | | 33.428.355.871,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 33.500.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | 7 KM | | 7 KM | 7 KM | 33.428.355.871,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 KM | 33.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | 29.548.641.895,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 6 KM | | 6 KM | 6 KM | 29.548.641.895,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 KM | 30.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | 5.100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 5.200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 5 KM | | 5 KM | 5 KM | 5.100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 KM | 5.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | 315.180.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 320.000.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 19 Jembatan | | 19 Jembatan | 19 Jembatan | 315.180.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 19 Jembatan | 320.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | | | | 8.160.000.000,08 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 8.165.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun | 54 Meter | | 54 Meter | 54 Meter | 8.160.000.000,08 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 54 Meter | 8.165.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **77.** | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | **686.096.785,62** | | | | | | | | **702.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi*** | | | | | | ***686.096.785,62*** | | | | | | | | ***702.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | 79.12 Persentase | | 73.42 Persentase | 75.46 Persentase | 686.096.785,62 | | | | | | | 77.21 Persentase | 702.000.000,00 | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | 553.056.559,62 | | | | | | - | | 565.000.000,00 | |
| | | Meningkatannya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi | | | | | | 553.056.559,62 | | | | | | - | | 565.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Lembaga | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 0 Orang | | 100 Orang | 0 Orang | 0,00 | | | | | | | 0 Orang | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 503.056.559,62 | | | | | | | 100 Orang | 505.000.000,00 | |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 0 Orang | | 100 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Orang | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Lembaga | 60.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | 503.056.559,62 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 505.000.000,00 | |
| | | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 503.056.559,62 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 505.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 53.040.226,00 | | | | | | - | | 55.000.000,00 | |
| | | Ketersediaan Informasi Jasa Kontruksi Daerah | | | | | | 53.040.226,00 | | | | | | - | | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.040.226,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | | | | | | | 1 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | 1 Perangkat Pendukung | | 0 Perangkat Pendukung | 0 Perangkat Pendukung | 0,00 | | | | | | | 0 Perangkat Pendukung | 0,00 | |
| | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | 1 Perangkat Pendukung | | 0 Perangkat Pendukung | 0 Perangkat Pendukung | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Perangkat Pendukung | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | 53.040.226,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.040.226,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Orang | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 82.000.000,00 | |
| | | Persentase Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 82.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | 5 Bangunan Konstruksi | | 5 Bangunan Konstruksi | 5 Bangunan Konstruksi | 80.000.000,00 | | | | | | | 5 Bangunan Konstruksi | 82.000.000,00 | |
| | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 82.000.000,00 | |
| | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | 5 Bangunan Konstruksi | | 5 Bangunan Konstruksi | 5 Bangunan Konstruksi | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Bangunan Konstruksi | 82.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **78.** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **1.769.000.000,00** | | | | | | | | **1.835.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang*** | | | | | | ***1.569.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.415.000.000,00*** | |
| | | | 999.Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 98.39 % | | 98.00 % | 98.09 % | 1.569.000.000,00 | | | | | | | 9819 % | 1.415.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | 806.000.000,00 | | | | | | - | | 830.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | 806.000.000,00 | | | | | | - | | 830.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 206.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah publikasi informasi penataan ruang | 1 Publikasi | | 1 Publikasi | 1 Publikasi | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Publikasi | 110.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat | Jumlah publikasi informasi penataan ruang | 1 Publikasi | | 1 Publikasi | 1 Publikasi | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Publikasi | 110.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 510.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 510.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | 206.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 206.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 210.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 210.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 210.000.000,00 | |
| | | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 210.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 103.000.000,00 | | | | | | - | | 105.000.000,00 | |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah | | | | | | 103.000.000,00 | | | | | | - | | 105.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | 103.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 105.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 660.000.000,00 | | | | | | - | | 690.000.000,00 | |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | | | | | | 660.000.000,00 | | | | | | - | | 690.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 210.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | 10 Kasus | | 10 Kasus | 10 Kasus | 250.000.000,00 | | | | | | | 10 Kasus | 260.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 210.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | 210.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 220.000.000,00 | |
| | | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 210.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.04.0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 260.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Audit Tata Ruang | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | 10 Kasus | | 10 Kasus | 10 Kasus | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Kasus | 260.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 210.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **8.647.075.672,70** | | | | | | | | **8.745.000.000,00** | |
| **79.** | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | **839.247.840,00** | | | | | | | | **845.000.000,00** | |
| | | ***Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah*** | | | | | | ***839.247.840,00*** | | | | | | | | ***845.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | | 100 % | 100 % | 839.247.840,00 | | | | | | | 100 % | 845.000.000,00 | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 349.184.626,00 | | | | | | - | | 350.000.000,00 | |
| | | Persentase data penerima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten | | | | | | 349.184.626,00 | | | | | | - | | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 349.184.626,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | |
| | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | | | | 349.184.626,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 350.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 349.184.626,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 490.063.214,00 | | | | | | - | | 495.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya pembangunan/rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten | | | | | | 490.063.214,00 | | | | | | - | | 495.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 Unit Rumah | | 5 Unit Rumah | 5 Unit Rumah | 259.572.080,00 | | | | | | | 5 Unit Rumah | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 50 Unit Rumah | | 50 Unit Rumah | 50 Unit Rumah | 230.491.134,00 | | | | | | | 50 Unit Rumah | 235.000.000,00 | |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | 230.491.134,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 235.000.000,00 | |
| | | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 50 Unit Rumah | | 50 Unit Rumah | 50 Unit Rumah | 230.491.134,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Unit Rumah | 235.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 259.572.080,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 260.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 Unit Rumah | | 5 Unit Rumah | 5 Unit Rumah | 259.572.080,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit Rumah | 260.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **80.** | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **6.479.827.832,70** | | | | | | | | **6.555.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*** | | | | | | ***6.479.827.832,70*** | | | | | | | | ***6.555.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | 100 % | | 100 % | 100 % | 6.479.827.832,70 | | | | | | | 100 % | 6.555.000.000,00 | |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 151.000.000,00 | | | | | | - | | 155.000.000,00 | |
| | | Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 151.000.000,00 | | | | | | - | | 155.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 151.000.000,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 155.000.000,00 | |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | 151.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 155.000.000,00 | |
| | | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 151.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 155.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 6.328.827.832,70 | | | | | | - | | 6.400.000.000,00 | |
| | | Persentase Kawasan Permukiman Kumuhdibawah 10 Ha yang ditangani | | | | | | 6.328.827.832,70 | | | | | | - | | 6.400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | | 0 Unit Rumah | 0 Unit Rumah | 6.328.827.832,70 | | | | | | | 0 Unit Rumah | 6.400.000.000,00 | |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | 6.328.827.832,70 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | | 0 Unit Rumah | 392 Unit Rumah | 6.328.827.832,70 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Unit Rumah | 6.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **81.** | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | **206.000.000,00** | | | | | | | | **210.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penyediaan PSU permukiman*** | | | | | | ***206.000.000,00*** | | | | | | | | ***210.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | 100 % | | 85 % | 90 % | 206.000.000,00 | | | | | | | 95 % | 210.000.000,00 | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 206.000.000,00 | | | | | | - | | 210.000.000,00 | |
| | | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | | | | | | 206.000.000,00 | | | | | | - | | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 13 Unit Rumah | | 13 Unit Rumah | 13 Unit Rumah | 206.000.000,00 | | | | | | | 13 Unit Rumah | 210.000.000,00 | |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 206.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 13 Unit Rumah | | 13 Unit Rumah | 13 Unit Rumah | 206.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 13 Unit Rumah | 210.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| **82.** | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | **1.122.000.000,00** | | | | | | | | **1.135.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)*** | | | | | | ***1.122.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.135.000.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.122.000.000,00 | | | | | | | 100 % | 1.135.000.000,00 | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | | 1.122.000.000,00 | | | | | | - | | 1.135.000.000,00 | |
| | | Persentase penyelenggaraan PSU permukiman | | | | | | 1.122.000.000,00 | | | | | | - | | 1.135.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 522.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 525.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 0 Lokasi | | 0 Lokasi | 2 Lokasi | 600.000.000,00 | | | | | | | 0 Lokasi | 610.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | 0 Lokasi | 0,00 | | | | | | | 2 Lokasi | 0,00 | |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | 522.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 525.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 522.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 525.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | 0 Lokasi | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Lokasi | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | 600.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 610.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 0 Lokasi | | 0 Lokasi | 2 Lokasi | 600.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Lokasi | 610.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.240.000.000,00** | | | | | | | | **8.260.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **8.240.000.000,00** | | | | | | | | **8.260.000.000,00** | |
| **83.** | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | | **8.240.000.000,00** | | | | | | | | **8.260.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan*** | | | | | | ***8.240.000.000,00*** | | | | | | | | ***8.260.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 8.240.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 8.260.000.000,00 | |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 8.240.000.000,00 | | | | | | - | | 8.260.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah | | | | | | 8.240.000.000,00 | | | | | | - | | 8.260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.240.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 8.260.000.000,00 | |
| | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 8.240.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 8.260.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.240.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 8.260.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | **Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran** | | | | | | **18.270.910.504,00** | | | | | | | | **19.925.001.278,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **18.270.910.504,00** | | | | | | | | **19.925.001.278,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **18.270.910.504,00** | | | | | | | | **19.925.001.278,00** | |
| **84.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **14.174.372.947,00** | | | | | | | | **14.457.808.407,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***14.099.292.947,00*** | | | | | | | | ***14.381.226.807,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 14.099.292.947,00 | | | | | | | B Kategori | 14.381.226.807,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 29.480.984,00 | | | | | | - | | 30.646.701,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 29.480.984,00 | | | | | | - | | 30.646.701,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.060.985,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 5.162.205,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 3 Dokumen | 5 Dokumen | 11.220.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 11.444.400,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.040.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 2.080.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 3.121.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 3.121.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 0 Laporan | 4 Laporan | 3.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 3.688.096,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 2.039.999,00 | | | | | | | 4 Laporan | 2.028.800,00 | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 11.220.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.444.400,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 11.220.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 11.444.400,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 3.060.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.121.200,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 3.121.200,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 3.060.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.121.200,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 3.121.200,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 5.060.985,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.162.205,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.060.985,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 5.162.205,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 2.040.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.080.800,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.040.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 2.080.800,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 3.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.688.096,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 0 Laporan | 4 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 3.688.096,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2.039.999,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.028.800,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 2.039.999,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 2.028.800,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 11.273.123.940,00 | | | | | | - | | 11.498.586.419,00 | |
| | | tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 11.273.123.940,00 | | | | | | - | | 11.498.586.419,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 227.196.840,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 231.740.777,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 5.100.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 5.202.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 91 Orang/bulan | | 91 Orang/bulan | 91 Orang/bulan | 11.030.627.100,00 | | | | | | | 91 Orang/bulan | 11.251.239.642,00 | |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 11.030.627.100,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.251.239.642,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 91 Orang/bulan | | 91 Orang/bulan | 531 Orang/bulan | 11.030.627.100,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 91 Orang/bulan | 11.251.239.642,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 227.196.840,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 231.740.777,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 227.196.840,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 231.740.777,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 10.404.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 5.202.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 21.220.000,00 | | | | | | - | | 21.644.400,00 | |
| | | tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah | | | | | | 21.220.000,00 | | | | | | - | | 21.644.400,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 10.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 11.220.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 11.444.400,00 | |
| | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 10.200.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 11.220.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.444.400,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 11.220.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 11.444.400,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 104.040.000,00 | | | | | | - | | 106.120.800,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 104.040.000,00 | | | | | | - | | 106.120.800,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 94 Paket | | 94 Paket | 94 Paket | 73.440.000,00 | | | | | | | 94 Paket | 74.908.800,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 8 Orang | | 8 Orang | 8 Orang | 30.600.000,00 | | | | | | | 8 Orang | 31.212.000,00 | |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 73.440.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 74.908.800,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 94 Paket | | 94 Paket | 94 Paket | 73.440.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 94 Paket | 74.908.800,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 8 Orang | | 8 Orang | 8 Orang | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Orang | 31.212.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 255.939.430,00 | | | | | | - | | 261.058.219,00 | |
| | | tersedianya Perlengkapan Kantor | | | | | | 255.939.430,00 | | | | | | - | | 261.058.219,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 207.440.358,00 | | | | | | | 30 Laporan | 211.589.165,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 11.295.847,00 | | | | | | | 2 Paket | 11.521.764,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 13.196.250,00 | | | | | | | 5 Paket | 13.460.175,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 3.606.975,00 | | | | | | | 5 Paket | 3.679.115,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 10 Paket | 10.200.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 10.404.000,00 | |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.606.975,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.679.115,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 3.606.975,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 3.679.115,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 10.404.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 11.295.847,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.521.764,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 11.295.847,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 11.521.764,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 13.196.250,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.460.175,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 13.196.250,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 13.460.175,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 10.404.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 207.440.358,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 211.589.165,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 207.440.358,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Laporan | 211.589.165,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 2.225.915.781,00 | | | | | | - | | 2.269.806.000,00 | |
| | | tersedianya Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kasus | | | | | | 2.225.915.781,00 | | | | | | - | | 2.269.806.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | | 4 Unit | 6 Unit | 1.833.415.781,00 | | | | | | | 6 Unit | 1.869.456.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 357.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 364.140.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 10.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | | 15 Unit | 30 Unit | 25.500.000,00 | | | | | | | 30 Unit | 26.010.000,00 | |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 357.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 364.140.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 357.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 364.140.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 1.833.415.781,00 | | | - | - | - | | | 1.869.456.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | | 4 Unit | 0 Unit | 1.833.415.781,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 6 Unit | 1.869.456.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 2 Unit | 10.200.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.010.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | | 15 Unit | 30 Unit | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 30 Unit | 26.010.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 98.337.812,00 | | | | | | - | | 100.304.568,00 | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 98.337.812,00 | | | | | | - | | 100.304.568,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 22.905.171,00 | | | | | | | 3 Laporan | 23.363.274,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 65.232.641,00 | | | | | | | 4 Laporan | 66.537.294,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 10.404.000,00 | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 22.905.171,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.363.274,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 22.905.171,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 23.363.274,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 10.404.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 65.232.641,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 66.537.294,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 65.232.641,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 66.537.294,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | 166.315.000,00 | | | | | | - | | 169.641.300,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 17.595.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 17.946.900,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 36.720.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 37.454.400,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 91.800.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 10.200.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 91.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.636.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 91.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 93.636.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 36.720.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 37.454.400,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 36.720.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 37.454.400,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 10.404.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 17.595.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.946.900,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 17.595.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 17.946.900,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 166.315.000,00 | | | | | | - | | 169.641.300,00 | |
| | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | 166.315.000,00 | | | | | | - | | 169.641.300,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 10.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 10.200.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| **85.** | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **2.166.263.226,00** | | | | | | | | **2.253.898.490,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat*** | | | | | | ***2.105.263.226,00*** | | | | | | | | ***2.191.678.490,00*** | |
| | | | 999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 2.105.263.226,00 | | | | | | | 100 Persentase | 2.191.678.490,00 | |
| | | Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.636.023.343,00 | | | | | | - | | 1.686.083.810,00 | |
| | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 20 Orang | | 25 Orang | 20 Orang | 23.460.000,00 | | | | | | | 20 Orang | 23.929.200,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas | 200 Orang | | 0 Orang | 200 Orang | 40.000.000,00 | | | | | | | 200 Orang | 40.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.400.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 30.600.000,00 | | | | | | | 20 Dokumen | 31.212.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 40.800.000,00 | | | | | | | 20 Dokumen | 41.616.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 30 Laporan | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 80 laporan | | 80 laporan | 80 laporan | 1.291.763.343,00 | | | | | | | 80 laporan | 1.334.938.610,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 16 Unit | | 16 Unit | 166 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 16 Unit | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 60 Orang | | 0 Orang | 60 Orang | 60.000.000,00 | | | | | | | 60 Orang | 61.200.000,00 | |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Dokumen | 31.212.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.616.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Dokumen | 41.616.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 20.808.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0013 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 61.200.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 60 Orang | | 0 Orang | 60 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Orang | 61.200.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | | | 23.460.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.929.200,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 20 Orang | | 25 Orang | 20 Orang | 23.460.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Orang | 23.929.200,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | 1.291.763.343,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.334.938.610,00 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 80 laporan | | 80 laporan | 80 laporan | 1.291.763.343,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80 laporan | 1.334.938.610,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Laporan | 52.020.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 16 Unit | | 16 Unit | 16 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Unit | 52.020.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01.0025 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas | 200 Orang | | 0 Orang | 200 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Orang | 40.800.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | 216.039.883,00 | | | | | | - | | 247.330.680,00 | |
| | | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | 216.039.883,00 | | | | | | - | | 247.330.680,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda | 5 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 5.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 46.920.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 74.858.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 71.400.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 72.828.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 25.500.000,00 | | | | | | | 12 laporan | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 46.919.883,00 | | | | | | | 12 Laporan | 47.828.280,00 | |
| | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan | 5 laporan | | 0 laporan | 5 laporan | 5.000.000,00 | | | | | | | 5 laporan | 5.100.000,00 | |
| | 1.05.02.2.02.0004 | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.010.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 laporan | 26.010.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 15.606.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan | 5 laporan | | 0 laporan | 5 laporan | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 laporan | 5.100.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda | 5 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 5.100.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | 71.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 72.828.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 71.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 72.828.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | 46.919.883,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.828.280,00 | |
| | | Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 46.919.883,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 47.828.280,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | 46.920.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 74.858.400,00 | |
| | | TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 46.920.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 74.858.400,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | 314.200.000,00 | | | | | | - | | 320.484.000,00 | |
| | | Meningkatnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | 314.200.000,00 | | | | | | - | | 320.484.000,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 102.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 214.200.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 218.484.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 102.000.000,00 | |
| | | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 102.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | 214.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 218.484.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 2 Laporan | | 0 Laporan | 4 Laporan | 214.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 218.484.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.636.023.343,00 | | | | | | - | | 1.686.083.810,00 | |
| | | Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.636.023.343,00 | | | | | | - | | 1.686.083.810,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | - | - | 12.000.000,00 | | | | | | | - | 12.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | - | | - | - | 5.000.000,00 | | | | | | | - | 5.100.000,00 | |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | - | | - | 5 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.100.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.02.2.01.0024 | Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.240.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | - | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 12.240.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| **86.** | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | **1.930.274.331,00** | | | | | | | | **3.213.294.381,00** | |
| | | ***Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran*** | | | | | | ***1.894.574.331,00*** | | | | | | | | ***3.176.880.381,00*** | |
| | | | 999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.894.574.331,00 | | | | | | | 100 Persentase | 3.176.880.381,00 | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.894.574.331,00 | | | | | | - | | 3.176.880.381,00 | |
| | | MENINGKATNYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | 1.894.574.331,00 | | | | | | - | | 3.176.880.381,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 44.318.990,00 | | | | | | | 20 Dokumen | 45.205.370,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.900.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 46.818.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 435.400.000,00 | | | | | | | 100 Laporan | 1.688.522.563,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 1.329.655.341,00 | | | | | | | 3 Unit | 1.356.248.448,00 | |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 45.900.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.818.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 40 Dokumen | 45.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 46.818.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 435.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.688.522.563,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 435.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Laporan | 1.688.522.563,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | 44.318.990,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 45.205.370,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 44.318.990,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Dokumen | 45.205.370,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | 1.329.655.341,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.356.248.448,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 3 Unit | | 3 Unit | 24 Unit | 1.329.655.341,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 1.356.248.448,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 15.606.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran*** | | | | | | ***35.700.000,00*** | | | | | | | | ***36.414.000,00*** | |
| | | | 999.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 35.700.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 36.414.000,00 | |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | | | 5.100.000,00 | | | | | | - | | 5.202.000,00 | |
| | | Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | | | 5.100.000,00 | | | | | | - | | 5.202.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 5.202.000,00 | |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 5.202.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | 30.600.000,00 | | | | | | - | | 31.212.000,00 | |
| | | Meningkatnya SDM Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | 30.600.000,00 | | | | | | - | | 31.212.000,00 | |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 30.600.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 31.212.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 31.212.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | MENINGKATNYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | 1.894.574.331,00 | | | | | | - | | 3.176.880.381,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | - | | - | - | 24.000.000,00 | | | | | | | - | 24.480.000,00 | |
| | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | 24.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.480.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | - | | - | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 24.480.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran |
| | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | **23.676.416.236,00** | | | | | | | | **24.581.506.018,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **23.676.416.236,00** | | | | | | | | **24.581.506.018,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **23.676.416.236,00** | | | | | | | | **24.581.506.018,00** | |
| **87.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8.115.866.975,00** | | | | | | | | **8.362.638.648,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***7.839.091.975,00*** | | | | | | | | ***8.078.944.273,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 7.839.091.975,00 | | | | | | | BB Kategori | 8.078.944.273,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 184.500.000,00 | |
| | | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 184.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 82.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 41.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 61.500.000,00 | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 82.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 8 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 82.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 41.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 41.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 61.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 61.500.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.301.753.450,00 | | | | | | - | | 5.434.297.286,00 | |
| | | Administrasi Keuangan | | | | | | 5.301.753.450,00 | | | | | | - | | 5.434.297.286,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 281.875.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 288.921.875,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.241.250,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 24.847.281,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 15 Laporan | 41.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 44 Orang/bulan | | 44 Orang/bulan | 44 Orang/bulan | 4.955.637.200,00 | | | | | | | 44 Orang/bulan | 5.079.528.130,00 | |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.955.637.200,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 5.079.528.130,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 44 Orang/bulan | | 44 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 4.955.637.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 44 Orang/bulan | 5.079.528.130,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 281.875.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 288.921.875,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 281.875.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 288.921.875,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 24.241.250,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 24.847.281,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.241.250,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 24.847.281,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 41.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Laporan | 41.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 30.750.000,00 | |
| | | administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 30.750.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 30.750.000,00 | |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 30.750.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 78.750.000,00 | | | | | | - | | 124.593.750,00 | |
| | | administrasi kepegawaian daerah | | | | | | 78.750.000,00 | | | | | | - | | 124.593.750,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | | 44 Paket | 44 Paket | 33.750.000,00 | | | | | | | 44 Paket | 34.593.750,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | | 8 Orang | 20 Orang | 45.000.000,00 | | | | | | | 20 Orang | 90.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 33.750.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 34.593.750,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | | 44 Paket | 45 Paket | 33.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 44 Paket | 34.593.750,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 45.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | | 8 Orang | 10 Orang | 45.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Orang | 90.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 317.219.500,00 | | | | | | - | | 325.149.987,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 18.450.000,00 | | | | | | | 30 Paket | 18.911.250,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 42.619.500,00 | | | | | | | 4 Paket | 43.684.987,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 5 Paket | 3 Paket | 6.150.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 6.303.750,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 6.150.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.303.750,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 6.150.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 6.303.750,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 18.450.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 18.911.250,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 18.450.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Paket | 18.911.250,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 42.619.500,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 43.684.987,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 42.619.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Paket | 43.684.987,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.775.184.025,00 | | | | | | - | | 1.819.563.625,00 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.775.184.025,00 | | | | | | - | | 1.819.563.625,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | | 0 Unit | 7 Unit | 200.000.000,00 | | | | | | | 7 Unit | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 400.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 410.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 701.634.025,00 | | | | | | | 1 Unit | 719.174.875,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 21 Unit | | 10 Unit | 21 Unit | 236.775.000,00 | | | | | | | 21 Unit | 242.694.375,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 236.775.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 242.694.375,00 | |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 701.634.025,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 719.174.875,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 701.634.025,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 719.174.875,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 205.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | | 0 Unit | 40 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 7 Unit | 205.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 236.775.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 242.694.375,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 21 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 236.775.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Unit | 242.694.375,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 400.000.000,00 | | | - | - | - | | | 410.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 400.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 1 Unit | 410.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 236.775.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 242.694.375,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 236.775.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 242.694.375,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 149.650.000,00 | | | | | | - | | 153.391.250,00 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 149.650.000,00 | | | | | | - | | 153.391.250,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 67.650.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 69.341.250,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 82.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 84.050.000,00 | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 67.650.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 69.341.250,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 67.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 69.341.250,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 82.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 84.050.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 82.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 84.050.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 283.310.000,00 | | | | | | - | | 290.392.750,00 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 283.310.000,00 | | | | | | - | | 290.392.750,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 254.610.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 260.975.250,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 28.700.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 29.417.500,00 | |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 254.610.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 260.975.250,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 254.610.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 260.975.250,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 28.700.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 29.417.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 28.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 29.417.500,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 317.219.500,00 | | | | | | - | | 325.149.987,00 | |
| | | administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 317.219.500,00 | | | | | | - | | 325.149.987,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | - | - | 250.000.000,00 | | | | | | | - | 256.250.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 256.250.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | - | 25 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 256.250.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **88.** | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | **15.560.549.261,00** | | | | | | | | **16.218.867.370,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*** | | | | | | ***8.772.049.261,00*** | | | | | | | | ***9.275.654.870,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | 100 Persentase | | 20 Persentase | 40 Persentase | 8.772.049.261,00 | | | | | | | 60 Persentase | 9.275.654.870,00 | |
| | | | 2.Persentase Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 % | | 30 % | 40 % | 8.772.049.261,00 | | | | | | | 60 % | 9.275.654.870,00 | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 217.812.500,00 | | | | | | - | | 223.257.812,00 | |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 217.812.500,00 | | | | | | - | | 223.257.812,00 | |
| | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 200 Orang | | 160 Orang | 200 Orang | 217.812.500,00 | | | | | | | 200 Orang | 223.257.812,00 | |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | 217.812.500,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 223.257.812,00 | |
| | | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 200 Orang | | 160 Orang | 200 Orang | 217.812.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Orang | 223.257.812,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | 8.554.236.761,00 | | | | | | - | | 9.052.397.058,00 | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | 8.554.236.761,00 | | | | | | - | | 9.052.397.058,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 500.000.000,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 512.500.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 350.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 4 Kawasan | | 3 Kawasan | 4 Kawasan | 100.000.000,00 | | | | | | | 4 Kawasan | 102.860.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 18 Kegiatan | | 18 Kegiatan | 18 Kegiatan | 5.926.945.511,00 | | | | | | | 18 Kegiatan | 6.317.813.527,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 20 Keluarga | | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 0,00 | | | | | | | 20 Keluarga | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 71.391.250,00 | | | | | | | 12 laporan | 73.176.031,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 102.500.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 105.062.500,00 | |
| | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 100 Orang | | 70 Orang | 100 Orang | 235.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 240.875.000,00 | |
| | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 1500 Orang | | 900 Orang | 1500 Orang | 170.000.000,00 | | | | | | | 1500 Orang | 174.250.000,00 | |
| | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 5.926.945.511,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.317.813.527,00 | |
| | | Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 18 Kegiatan | | 18 Kegiatan | 18 Kegiatan | 5.926.945.511,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Kegiatan | 6.317.813.527,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | 102.500.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 105.062.500,00 | |
| | | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 102.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 105.062.500,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | 170.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 174.250.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 1500 Orang | | 900 Orang | 1500 Orang | 170.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1500 Orang | 174.250.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 20 Keluarga | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Keluarga | 0,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 102.860.000,00 | |
| | | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 4 Kawasan | | 3 Kawasan | 4 Kawasan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Kawasan | 102.860.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 235.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 240.875.000,00 | |
| | | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 100 Orang | | 70 Orang | 100 Orang | 235.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 240.875.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.025.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 1.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 1.025.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | | | | 350.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 400.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 71.391.250,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 73.176.031,00 | |
| | | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 71.391.250,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 laporan | 73.176.031,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 512.500.000,00 | |
| | | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 512.500.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | ***Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana*** | | | | | | ***4.288.500.000,00*** | | | | | | | | ***4.395.712.500,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penanganan Pasca Bencana | 100 Persentase | | 20 Persentase | 40 Persentase | 4.288.500.000,00 | | | | | | | 60 Persentase | 4.395.712.500,00 | |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | 4.288.500.000,00 | | | | | | - | | 4.395.712.500,00 | |
| | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | 4.288.500.000,00 | | | | | | - | | 4.395.712.500,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 102.500.000,00 | | | | | | | 50 Orang | 105.062.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 51.250.000,00 | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 265.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 271.625.000,00 | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 71.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 72.775.000,00 | |
| | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 20 Kegiatan | | 10 Kegiatan | 20 Kegiatan | 3.800.000.000,00 | | | | | | | 20 Kegiatan | 3.895.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 51.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 51.250.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 102.500.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 105.062.500,00 | |
| | | Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 102.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Orang | 105.062.500,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | 3.800.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 3.895.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 20 Kegiatan | | 10 Kegiatan | 20 Kegiatan | 3.800.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Kegiatan | 3.895.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | 265.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 271.625.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 265.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 271.625.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.04.0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 71.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 72.775.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 71.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 72.775.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | ***Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat*** | | | | | | ***2.500.000.000,00*** | | | | | | | | ***2.547.500.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase penanganan tanggap bencana darurat | 100 % | | 20 % | 40 % | 2.500.000.000,00 | | | | | | | 60 % | 2.547.500.000,00 | |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | 2.500.000.000,00 | | | | | | - | | 2.547.500.000,00 | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | 2.500.000.000,00 | | | | | | - | | 2.547.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 5000 Orang | | 5000 Orang | 5000 Orang | 1.500.000.000,00 | | | | | | | 5000 Orang | 1.537.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang | | 500 Orang | 500 Orang | 800.000.000,00 | | | | | | | 500 Orang | 800.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 800.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 800.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang | | 500 Orang | 800 Orang | 800.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 500 Orang | 800.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 1.500.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 1.537.500.000,00 | |
| | | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 5000 Orang | | 5000 Orang | 500 Orang | 1.500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5000 Orang | 1.537.500.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | 8.554.236.761,00 | | | | | | - | | 9.052.397.058,00 | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | - | | - | - | 98.400.000,00 | | | | | | | - | 100.860.000,00 | |
| | 1.05.03.2.02.0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 98.400.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 100.860.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | - | | - | 120 Orang | 98.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 100.860.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | **Dinas Sosial** | | | | | | **7.198.510.056,00** | | | | | | | | **8.254.276.018,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.198.510.056,00** | | | | | | | | **8.254.276.018,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **7.198.510.056,00** | | | | | | | | **8.254.276.018,00** | |
| **89.** | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.502.824.241,00** | | | | | | | | **5.034.390.203,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.331.424.241,00*** | | | | | | | | ***4.911.990.203,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | BB Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 4.331.424.241,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.911.990.203,00 | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 102.885.000,00 | | | | | | - | | 102.885.962,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 102.885.000,00 | | | | | | - | | 102.885.962,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 51.000.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 51.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.085.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 11.085.962,00 | |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | - | | | 51.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 51.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | - | | | 20.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | Dinas Sosial |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | - | | | 20.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 11.085.000,00 | | | - | - | - | | | 11.085.962,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.085.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 11.085.962,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.551.851.241,00 | | | | | | - | | 4.118.416.241,00 | |
| | | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | | | | | | 3.551.851.241,00 | | | | | | - | | 4.118.416.241,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 172.384.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 172.384.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 3.379.467.241,00 | | | | | | | 27 Orang/bulan | 3.946.032.241,00 | |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.379.467.241,00 | | | - | - | - | | | 3.946.032.241,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 3.379.467.241,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 27 Orang/bulan | 3.946.032.241,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 172.384.000,00 | | | - | - | - | | | 172.384.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 172.384.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 172.384.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | | - | | 14.000.000,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | | - | | 14.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 14.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 14.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 14.000.000,00 | | | - | - | - | | | 14.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 5 Laporan | 14.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 14.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | | | 38.500.000,00 | | | | | | - | | 38.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 Paket | | 23 Paket | 23 Paket | 19.500.000,00 | | | | | | | 24 Paket | 19.500.000,00 | |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 19.500.000,00 | | | - | - | - | | | 19.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 Paket | | 23 Paket | 26 Paket | 19.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Paket | 19.500.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 243.860.000,00 | | | | | | - | | 247.860.000,00 | |
| | | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | | | | | | 243.860.000,00 | | | | | | - | | 247.860.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 34 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 31 Laporan | 204.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 200 Paket | | 200 Paket | 200 Paket | 18.360.000,00 | | | | | | | 200 Paket | 18.360.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 15.300.000,00 | | | | | | | 4 Paket | 15.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 65 Paket | | 45 Paket | 50 Paket | 10.200.000,00 | | | | | | | 55 Paket | 10.200.000,00 | |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 10.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 65 Paket | | 45 Paket | 0 Paket | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 55 Paket | 10.200.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 18.360.000,00 | | | - | - | - | | | 18.360.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 200 Paket | | 200 Paket | 200 Paket | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 200 Paket | 18.360.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 15.300.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Paket | 15.300.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 204.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 34 Laporan | | 30 Laporan | 26 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 31 Laporan | 204.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 237.488.000,00 | | | | | | - | | 188.488.000,00 | |
| | | Persentase Penyediaan Pengadaan Sesuai Kebutuhan | | | | | | 237.488.000,00 | | | | | | - | | 188.488.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 86.488.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 86.488.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | | 40 Unit | 40 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 40 Unit | 51.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 51.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 86.488.000,00 | | | - | - | - | | | 86.488.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 86.488.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 86.488.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 51.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | | 40 Unit | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Unit | 51.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | - | | | 51.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 1 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 51.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 71.440.000,00 | | | | | | - | | 71.440.000,00 | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | | | | | | 71.440.000,00 | | | | | | - | | 71.440.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 30.600.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 30.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.840.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 40.840.000,00 | |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | - | | | 30.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 30.600.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 40.840.000,00 | | | - | - | - | | | 40.840.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.840.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 40.840.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 242.800.000,00 | | | | | | - | | 252.800.000,00 | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | 242.800.000,00 | | | | | | - | | 252.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 142.800.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 142.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 110.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 142.800.000,00 | | | - | - | - | | | 142.800.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 142.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 142.800.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 110.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 38.500.000,00 | | | | | | - | | 38.500.000,00 | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | | | 38.500.000,00 | | | | | | - | | 38.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | - | 19.000.000,00 | | | | | | | - | 19.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 19.000.000,00 | | | - | - | - | | | 19.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | 3 Orang | 19.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 19.000.000,00 | Dinas Sosial |
| **90.** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | **782.837.000,00** | | | | | | | | **979.750.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemberdayaan sosial*** | | | | | | ***602.837.000,00*** | | | | | | | | ***919.750.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial | 99.25 Persentase | | 99.21 Persentase | 99.22 Persentase | 602.837.000,00 | | | | | | | 99.23 Persentase | 919.750.000,00 | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 752.837.000,00 | | | | | | - | | 919.750.000,00 | |
| | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. | | | | | | 752.837.000,00 | | | | | | - | | 919.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Keluarga | | 150 Keluarga | 150 Keluarga | 150.000.000,00 | | | | | | | 150 Keluarga | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Lembaga | | 50 Lembaga | 50 Lembaga | 150.000.000,00 | | | | | | | 50 Lembaga | 210.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 124.350.000,00 | | | | | | | 30 Orang | 124.350.000,00 | |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | - | | | 200.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Keluarga | | 150 Keluarga | 155 Keluarga | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Keluarga | 200.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | - | | | 210.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Lembaga | | 50 Lembaga | 50 Lembaga | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Lembaga | 210.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | 124.350.000,00 | | | - | - | - | | | 124.350.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang | | 30 Orang | 50 Orang | 124.350.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang | 124.350.000,00 | Dinas Sosial |
| | | | - | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 60.000.000,00 | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 60.000.000,00 | |
| | 1.06.02.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | - | | - | 4 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 60.000.000,00 | Dinas Sosial |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. | | | | | | 752.837.000,00 | | | | | | - | | 919.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi | - | | - | - | 214.000.000,00 | | | | | | | - | 235.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial | - | | - | - | 114.487.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 1.06.02.2.03.0010 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | | | | | | 114.487.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial | - | | - | 240 Orang | 114.487.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 150.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.02.2.03.0015 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | | | | | | 214.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 235.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi | - | | - | 90 Orang | 214.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 235.400.000,00 | Dinas Sosial |
| **91.** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | **713.600.000,00** | | | | | | | | **755.400.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Rehabilitasi Sosial*** | | | | | | ***713.600.000,00*** | | | | | | | | ***553.400.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 713.600.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 553.400.000,00 | |
| | | | 999.Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 713.600.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 553.400.000,00 | |
| | | | 999.Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 713.600.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 553.400.000,00 | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | 713.600.000,00 | | | | | | - | | 755.400.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi | | | | | | 713.600.000,00 | | | | | | - | | 755.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 129 Orang | | 125 Orang | 126 Orang | 202.000.000,00 | | | | | | | 127 Orang | 202.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 260 Orang | | 260 Orang | 260 Orang | 200.000.000,00 | | | | | | | 260 Orang | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 128 Orang | | 128 Orang | 128 Orang | 170.200.000,00 | | | | | | | 128 Orang | 202.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 70.000.000,00 | | | | | | | 50 Orang | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 73 Orang | | 73 Orang | 73 Orang | 71.400.000,00 | | | | | | | 73 Orang | 71.400.000,00 | |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 260 Orang | | 260 Orang | 260 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 260 Orang | 210.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | 170.200.000,00 | | | - | - | - | | | 202.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 128 Orang | | 128 Orang | 128 Orang | 170.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 128 Orang | 202.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | 202.000.000,00 | | | - | - | - | | | 202.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 129 Orang | | 125 Orang | 128 Orang | 202.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 127 Orang | 202.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | - | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Orang | 70.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | 71.400.000,00 | | | - | - | - | | | 71.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 73 Orang | | 73 Orang | 73 Orang | 71.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 73 Orang | 71.400.000,00 | Dinas Sosial |
| **92.** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | **440.000.000,00** | | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial*** | | | | | | ***240.000.000,00*** | | | | | | | | ***250.000.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | 100 Keluarga | | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 240.000.000,00 | | | | | | | 100 Keluarga | 250.000.000,00 | |
| | | | 999.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 240.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 250.000.000,00 | |
| | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | | | | | | 440.000.000,00 | | | | | | - | | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 8930 Orang | | 8930 Orang | 8930 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 8930 Orang | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 12376 Usulan | | 12376 Usulan | 12376 Usulan | 100.000.000,00 | | | | | | | 12376 Usulan | 100.000.000,00 | |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 8930 Orang | | 8930 Orang | 8930 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8930 Orang | 100.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 12376 Usulan | | 12376 Usulan | 12376 Usulan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12376 Usulan | 100.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 440.000.000,00 | | | | | | - | | 500.000.000,00 | |
| | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | | | | | | 440.000.000,00 | | | | | | - | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | - | - | 140.000.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | 140.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | - | 20 Orang | 140.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 150.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | - | 20 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 150.000.000,00 | Dinas Sosial |
| **93.** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | **559.248.815,00** | | | | | | | | **684.074.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana*** | | | | | | ***559.248.815,00*** | | | | | | | | ***684.074.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 559.248.815,00 | | | | | | | 100 Persentase | 684.074.000,00 | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 440.208.815,00 | | | | | | - | | 490.034.000,00 | |
| | | Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 440.208.815,00 | | | | | | - | | 490.034.000,00 | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 50.661.815,00 | | | | | | | 1 Orang | 90.487.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 4430 Orang | | 4430 Orang | 4430 Orang | 153.000.000,00 | | | | | | | 4430 Orang | 153.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 4430 Orang | | 4430 Orang | 4430 Orang | 200.000.000,00 | | | | | | | 4430 Orang | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 90 Orang | | 90 Orang | 90 Orang | 36.547.000,00 | | | | | | | 90 Orang | 36.547.000,00 | |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 4430 Orang | | 4430 Orang | 4430 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4430 Orang | 210.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | 153.000.000,00 | | | - | - | - | | | 153.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 4430 Orang | | 4430 Orang | 4430 Orang | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4430 Orang | 153.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | 50.661.815,00 | | | - | - | - | | | 90.487.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 10 Orang | 50.661.815,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Orang | 90.487.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.06.2.01.0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | 36.547.000,00 | | | - | - | - | | | 36.547.000,00 | |
| | | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 90 Orang | | 90 Orang | 90 Orang | 36.547.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 90 Orang | 36.547.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 119.040.000,00 | | | | | | - | | 194.040.000,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | 119.040.000,00 | | | | | | - | | 194.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Kampung | | 3 Kampung | 3 Kampung | 54.040.000,00 | | | | | | | 3 Kampung | 54.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 Orang | | 55 Orang | 55 Orang | 65.000.000,00 | | | | | | | 55 Orang | 140.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | 54.040.000,00 | | | - | - | - | | | 54.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Kampung | | 3 Kampung | 3 Kampung | 54.040.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Kampung | 54.040.000,00 | Dinas Sosial |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | 65.000.000,00 | | | - | - | - | | | 140.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 Orang | | 55 Orang | 55 Orang | 65.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 55 Orang | 140.000.000,00 | Dinas Sosial |
| **94.** | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **300.661.815,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan*** | | | | | | ***200.000.000,00*** | | | | | | | | ***300.661.815,00*** | |
| | | | 999.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 200.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 300.661.815,00 | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 300.661.815,00 | |
| | | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 300.661.815,00 | |
| | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 2 Makam | | 2 Makam | 2 Makam | 200.000.000,00 | | | | | | | 2 Makam | 300.661.815,00 | |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 300.661.815,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 2 Makam | | 2 Makam | 2 Makam | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Makam | 300.661.815,00 | Dinas Sosial |
| | | **Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja** | | | | | | **8.044.721.815,00** | | | | | | | | **14.890.100.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.044.721.815,00** | | | | | | | | **14.890.100.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **647.000.000,00** | | | | | | | | **933.000.000,00** | |
| **95.** | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | **410.000.000,00** | | | | | | | | **460.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya produktivitas tenaga kerja*** | | | | | | ***410.000.000,00*** | | | | | | | | ***460.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | 95 % | | 95 % | 95 % | 410.000.000,00 | | | | | | | 95 % | 460.000.000,00 | |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan/konsultasi produktivitas | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 120 Perusahaan | | 120 Perusahaan | 120 Perusahaan | 50.000.000,00 | | | | | | | 120 Perusahaan | 60.000.000,00 | |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 120 Perusahaan | | 120 Perusahaan | 20 Perusahaan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 120 Perusahaan | 60.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | 360.000.000,00 | | | | | | - | | 400.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pencari Kerja Yang Terlatih Berdasarkan Kompetensi | | | | | | 360.000.000,00 | | | | | | - | | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | - | | - | - | 360.000.000,00 | | | | | | | - | 400.000.000,00 | |
| | 2.07.03.2.01.0009 | Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | 360.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | - | | - | 15 Orang | 360.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 400.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **96.** | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | **90.000.000,00** | | | | | | | | **143.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penempatan tenaga kerja*** | | | | | | ***90.000.000,00*** | | | | | | | | ***143.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | 85 Persentase | | 85 Persentase | 85 Persentase | 90.000.000,00 | | | | | | | 85 Persentase | 143.000.000,00 | |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 66.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 66.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | - | | - | 1500 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 66.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 77.000.000,00 | |
| | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 77.000.000,00 | |
| | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 77.000.000,00 | |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 77.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | - | | - | 100 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 77.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **97.** | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | **147.000.000,00** | | | | | | | | **330.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi*** | | | | | | ***112.000.000,00*** | | | | | | | | ***165.000.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 112.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 165.000.000,00 | |
| | | Jumlah Asosiasi Pengusaha danSerikat Pekerja yang Diverifikasi | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 40.000.000,00 | | | | | | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 4386 Perkara | | 4386 Perkara | 4386 Perkara | 50.000.000,00 | | | | | | | 4386 Perkara | 99.000.000,00 | |
| | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 40.000.000,00 | | | | | | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 4386 Perkara | | 4386 Perkara | 4386 Perkara | 50.000.000,00 | | | | | | | 4386 Perkara | 99.000.000,00 | |
| | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 40.000.000,00 | | | | | | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 4386 Perkara | | 4386 Perkara | 4386 Perkara | 50.000.000,00 | | | | | | | 4386 Perkara | 99.000.000,00 | |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 99.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 4386 Perkara | | 4386 Perkara | 10 Perkara | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4386 Perkara | 99.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4386 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 66.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | | - | - | | - | - | 35.000.000,00 | | | | | | | - | 99.000.000,00 | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | - | | 99.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | - | | 99.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | - | | - | - | 35.000.000,00 | | | | | | | - | 99.000.000,00 | |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | 35.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 99.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | - | | - | 42 Perusahaan | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 99.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |
| | | Jumlah Asosiasi Pengusaha danSerikat Pekerja yang Diverifikasi | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - | | - | - | 22.000.000,00 | | | | | | | - | 66.000.000,00 | |
| | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - | | - | - | 22.000.000,00 | | | | | | | - | 66.000.000,00 | |
| | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 231.000.000,00 | |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - | | - | - | 22.000.000,00 | | | | | | | - | 66.000.000,00 | |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | 22.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 66.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - | | - | 9236 Orang | 22.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 66.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **7.397.721.815,00** | | | | | | | | **13.957.100.000,00** | |
| **98.** | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6.616.000.000,00** | | | | | | | | **11.714.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***6.056.000.000,00*** | | | | | | | | ***11.392.600.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 6.056.000.000,00 | | | | | | | B Kategori | 11.392.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 70.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 70.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 70.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.730.000.000,00 | | | | | | - | | 6.853.000.000,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.730.000.000,00 | | | | | | - | | 6.853.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | 35 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | | | | | | | 40 Orang/bulan | 6.600.000.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 5.730.000.000,00 | | | | | | - | | 6.853.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | | | | | | | 40 Orang/bulan | 6.600.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.500.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 6.600.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | | 35 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Orang/bulan | 6.600.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | 35 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Orang/bulan | 6.600.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 220.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 33.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 60.000.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 60.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 1 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 60.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 296.000.000,00 | | | | | | - | | 446.600.000,00 | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | 296.000.000,00 | | | | | | - | | 446.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55 Laporan | | 55 Laporan | 55 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 55 Laporan | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Paket | 121.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 16.000.000,00 | | | | | | | 4 Paket | 17.600.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 296.000.000,00 | | | | | | - | | 446.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55 Laporan | | 55 Laporan | 55 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 55 Laporan | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Paket | 121.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 16.000.000,00 | | | | | | | 4 Paket | 17.600.000,00 | |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 16.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 17.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Paket | 17.600.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 121.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Paket | 121.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 33.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 275.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55 Laporan | | 55 Laporan | 55 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 55 Laporan | 275.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 3.630.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 3.630.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 9 Unit | 330.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 3.300.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 330.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Unit | | 9 Unit | 10 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Unit | 330.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 3.300.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 10 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 3.300.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | - | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | - | | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 66.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 44.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 4 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 66.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 385.000.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 385.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 176.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 176.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 176.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 30.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | - | | - | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 30.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 385.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 176.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 33.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 33.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | 10 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 33.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 176.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 4 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 176.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **99.** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | **55.000.000,00** | | | | | | | | **60.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan koperasi*** | | | | | | ***55.000.000,00*** | | | | | | | | ***60.500.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 20 Persentase | | 10 Persentase | 15 Persentase | 55.000.000,00 | | | | | | | 15 Persentase | 60.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | | - | | 60.500.000,00 | |
| | | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | | - | | 60.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 30 Unit Usaha | | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 55.000.000,00 | | | | | | | 30 Unit Usaha | 60.500.000,00 | |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 55.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 60.500.000,00 | |
| | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 30 Unit Usaha | | 30 Unit Usaha | 165 Unit Usaha | 55.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Unit Usaha | 60.500.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **100.** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | **40.000.000,00** | | | | | | | | **44.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi*** | | | | | | ***40.000.000,00*** | | | | | | | | ***44.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Koperasi Aktif | 80 Persentase | | 65 Persentase | 70 Persentase | 40.000.000,00 | | | | | | | 70 Persentase | 44.000.000,00 | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 44.000.000,00 | |
| | | PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 150 Unit Usaha | | 150 Unit Usaha | 150 Unit Usaha | 40.000.000,00 | | | | | | | 150 Unit Usaha | 44.000.000,00 | |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 150 Unit Usaha | | 150 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Unit Usaha | 44.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **101.** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***200.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | 20 Persentase | | 10 Persentase | 15 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | | 15 Persentase | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 120 Orang | | 30 Orang | 60 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 120 Orang | 200.000.000,00 | |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 200.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 120 Orang | | 30 Orang | 200 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 120 Orang | 200.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **102.** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | **270.000.000,00** | | | | | | | | **957.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya produktivitas koperasi*** | | | | | | ***210.000.000,00*** | | | | | | | | ***891.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 25 Persentase | | 15 Persentase | 15 Persentase | 210.000.000,00 | | | | | | | 20 Persentase | 891.000.000,00 | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |
| | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 60.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | 11 Unit Usaha | | 11 Unit Usaha | 11 Unit Usaha | 50.000.000,00 | | | | | | | 11 Unit Usaha | 55.000.000,00 | |
| | | | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 60.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | |
| | | jumlah Koperasi yang Di fasilitasi Pelaporannya | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 60.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | 11 Unit Usaha | | 11 Unit Usaha | 11 Unit Usaha | 50.000.000,00 | | | | | | | 11 Unit Usaha | 55.000.000,00 | |
| | | | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 60.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | |
| | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 60.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | 11 Unit Usaha | | 11 Unit Usaha | 11 Unit Usaha | 50.000.000,00 | | | | | | | 11 Unit Usaha | 55.000.000,00 | |
| | | | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 60.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | |
| | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.000.000,00 | |
| | | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.000.000,00 | |
| | | Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | 11 Unit Usaha | | 11 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 11 Unit Usaha | 55.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 66.000.000,00 | |
| | | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 15 Unit Usaha | | 15 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Unit Usaha | 66.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |
| | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 770.000.000,00 | |
| | | jumlah Koperasi yang Di fasilitasi Pelaporannya | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |
| | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 770.000.000,00 | |
| | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | - | | 957.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 770.000.000,00 | |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 770.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | - | | - | 150 Kelompok Masyarakat | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 770.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **103.** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | **260.000.000,00** | | | | | | | | **860.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri*** | | | | | | ***260.000.000,00*** | | | | | | | | ***860.000.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah Unit Usaha yang telah melakukan pembinaan dan pendampingan | 30 Unit | | 20 Unit | 25 Unit | 260.000.000,00 | | | | | | | 25 Unit | 860.000.000,00 | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | 260.000.000,00 | | | | | | - | | 860.000.000,00 | |
| | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | | | | 260.000.000,00 | | | | | | - | | 860.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | - | | - | - | 110.000.000,00 | | | | | | | - | 440.000.000,00 | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | | | 260.000.000,00 | | | | | | - | | 860.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | - | | - | - | 110.000.000,00 | | | | | | | - | 440.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya data potensi UMKM dan SHAT UMKM | | | | | | 260.000.000,00 | | | | | | - | | 860.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | - | | - | - | 110.000.000,00 | | | | | | | - | 440.000.000,00 | |
| | 2.17.07.2.01.0016 | Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 220.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | - | | - | 30 Lembaga | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 220.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.07.2.01.0018 | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha | | | | | | 110.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 440.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | - | | - | 100 Orang | 110.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 440.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.07.2.01.0023 | Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM | Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM | - | | - | 3 Kegiatan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 200.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| **104.** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | **56.721.815,00** | | | | | | | | **121.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya daya saing UMKM*** | | | | | | ***56.721.815,00*** | | | | | | | | ***121.000.000,00*** | |
| | | | 999.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | 3 Persentase | | 2 Persentase | 2 Persentase | 56.721.815,00 | | | | | | | 2.5 Persentase | 121.000.000,00 | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | 56.721.815,00 | | | | | | - | | 121.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain danTeknologi | | | | | | 56.721.815,00 | | | | | | - | | 121.000.000,00 | |
| | | | Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan | - | | - | - | 56.721.815,00 | | | | | | | - | 121.000.000,00 | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | | | 56.721.815,00 | | | | | | - | | 121.000.000,00 | |
| | | | Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan | - | | - | - | 56.721.815,00 | | | | | | | - | 121.000.000,00 | |
| | | Jumlah yang Difasilitasi | | | | | | 56.721.815,00 | | | | | | - | | 121.000.000,00 | |
| | | | Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan | - | | - | - | 56.721.815,00 | | | | | | | - | 121.000.000,00 | |
| | 2.17.08.2.01.0011 | Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator | | | | | | 56.721.815,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 121.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator | Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan | - | | - | 200 Lembaga | 56.721.815,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 121.000.000,00 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja |
| | | **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | **15.567.841.610,00** | | | | | | | | **16.674.841.610,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **15.567.841.610,00** | | | | | | | | **16.674.841.610,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **1.800.000.000,00** | | | | | | | | **1.752.000.000,00** | |
| **105.** | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **900.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan*** | | | | | | ***900.000.000,00*** | | | | | | | | ***900.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 0.901 Persentase | | 0.901 Persentase | 0.901 Persentase | 900.000.000,00 | | | | | | | 0.901 Persentase | 900.000.000,00 | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | 2.08.02.2.01.0015 | Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota | - | | - | 2 Lembaga | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 800.000.000,00 | | | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 800.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,hukum,sosial,dan ekonomi kewenangan kab/ kota | | | | | | 800.000.000,00 | | | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 800.000.000,00 | |
| | | | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | - | 800.000.000,00 | | | | | | | - | 800.000.000,00 | |
| | 2.08.02.2.02.0013 | Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 800.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 800.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | 4 Lembaga | 800.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 800.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **106.** | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | **600.000.000,00** | | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | | ***Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan*** | | | | | | ***300.000.000,00*** | | | | | | | | ***300.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 % | | 100 % | 100 % | 300.000.000,00 | | | | | | | 100 % | 300.000.000,00 | |
| | | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | - | | - | 100 % | 300.000.000,00 | | | | | | | - | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | |
| | | Teratasi Pencegahan Kekerasan Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota | - | | - | - | 300.000.000,00 | | | | | | | - | 300.000.000,00 | |
| | 2.08.03.2.01.0008 | Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota | - | | - | 50 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 300.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | - | | - | - | 300.000.000,00 | | | | | | | - | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.08.03.2.03.0012 | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | - | | - | 50 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 300.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **107.** | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | | ***Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***150.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | 80 Indeks | | 73.8 Indeks | 75.6 Indeks | 100.000.000,00 | | | | | | | 78 Indeks | 150.000.000,00 | |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.08.06.2.02.0013 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | - | | - | 2 Lembaga | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 150.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **108.** | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **102.000.000,00** | |
| | | ***meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak ekkerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak*** | | | | | | ***200.000.000,00*** | | | | | | | | ***102.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 90 Indeks | | 82 Indeks | 85 Indeks | 200.000.000,00 | | | | | | | 87 Indeks | 102.000.000,00 | |
| | | | 999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 200.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 102.000.000,00 | |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | | 102.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | | 102.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 102.000.000,00 | |
| | 2.08.07.2.02.0016 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 102.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota | - | | - | 30 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 102.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **13.767.841.610,00** | | | | | | | | **14.922.841.610,00** | |
| **109.** | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7.337.841.610,00** | | | | | | | | **8.747.841.610,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabilitas dan efektif*** | | | | | | ***6.587.841.610,00*** | | | | | | | | ***7.897.841.610,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 6.587.841.610,00 | | | | | | | BB Kategori | 7.897.841.610,00 | |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 205.000.000,00 | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 205.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersusunya Perencana, pengangaran,evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 205.000.000,00 | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 82 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 83 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 82 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 83 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 82 Dokumen | 55.000.000,00 | | | | | | | 83 Dokumen | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 82 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 7 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Dokumen | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 55.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 55.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 4 Dokumen | 55.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Dokumen | 55.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 4 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Dokumen | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 5 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.837.341.610,00 | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 5.437.341.610,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.837.341.610,00 | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 5.437.341.610,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 82 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 83 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 82 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 81 Orang/bulan | 82 Orang/bulan | 4.587.341.610,00 | | | | | | | 83 Orang/bulan | 5.187.341.610,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.587.341.610,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 5.187.341.610,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 81 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.587.341.610,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Orang/bulan | 5.187.341.610,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Dokumen | 200.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 4 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 82 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | | 83 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 82 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 85 Dokumen | | 81 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Dokumen | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 3 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 180.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataandan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 85 Paket | | 81 Paket | 82 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 83 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 85 Orang | | 81 Orang | 82 Orang | 150.000.000,00 | | | | | | | 83 Orang | 150.000.000,00 | |
| | 2.14.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 30.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 85 Paket | | 81 Paket | 30 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Paket | 30.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 150.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 85 Orang | | 81 Orang | 18 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Orang | 150.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 699.500.000,00 | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 749.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 699.500.000,00 | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 749.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 82 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 83 Laporan | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 82 Paket | 79.500.000,00 | | | | | | | 83 Paket | 79.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 82 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 83 Paket | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 82 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | | 83 Paket | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 82 Paket | 350.000.000,00 | | | | | | | 83 Paket | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 20.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Paket | 20.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 350.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 400.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 4 Paket | 350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Paket | 400.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 79.500.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 79.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 2 Paket | 79.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Paket | 79.500.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 50.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 85 Paket | | 81 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Paket | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 Laporan | | 81 Laporan | 25 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Laporan | 200.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 900.000.000,00 | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1.600.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 900.000.000,00 | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1.600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 85 Unit | | 81 Unit | 82 Unit | 400.000.000,00 | | | | | | | 83 Unit | 1.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 400.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 1.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 85 Unit | | 81 Unit | 1 Unit | 400.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Unit | 1.000.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 66.000.000,00 | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 76.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 66.000.000,00 | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 76.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 85 Laporan | | 81 Laporan | 82 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 85 Laporan | | 81 Laporan | 82 Laporan | 26.000.000,00 | | | | | | | 83 Laporan | 26.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 40.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 85 Laporan | | 81 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Laporan | 50.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 26.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 26.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 85 Laporan | | 81 Laporan | 12 Laporan | 26.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Laporan | 26.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 350.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 85 Unit | | 81 Unit | 82 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 83 Unit | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 85 Unit | | 81 Unit | 82 Unit | 200.000.000,00 | | | | | | | 83 Unit | 200.000.000,00 | |
| | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 85 Unit | | 81 Unit | 32 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Unit | 200.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 85 Unit | | 81 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 83 Unit | 150.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 900.000.000,00 | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1.600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | - | 500.000.000,00 | | | | | | | - | 600.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 500.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 600.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 600.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **110.** | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | **350.000.000,00** | | | | | | | | **325.000.000,00** | |
| | | ***Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***75.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 46.5-30.51 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | | 46.5-41.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 46.5-37.67 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 100.000.000,00 | | | | | | | 46.5-33.9 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 75.000.000,00 | |
| | | | 999.TFR (Angka Kelahiran Total) | 2.27 Jiwa | | 2.31 Jiwa | 2.3 Jiwa | 100.000.000,00 | | | | | | | 2.28 Jiwa | 75.000.000,00 | |
| | | | - | - | | - | - | 250.000.000,00 | | | | | | | - | 250.000.000,00 | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK). | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 75.000.000,00 | |
| | 2.14.02.2.01.0052 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK). | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 75.000.000,00 | |
| | | Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK). | Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK). | - | | - | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 75.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | - | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk | | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan | - | | - | - | 250.000.000,00 | | | | | | | - | 250.000.000,00 | |
| | 2.14.02.2.02.0029 | Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | | | | 250.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyusunan analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan | Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan | - | | - | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 250.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **111.** | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | **5.550.000.000,00** | | | | | | | | **5.350.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)*** | | | | | | ***5.350.000.000,00*** | | | | | | | | ***5.250.000.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 95 Persentase | | 90 Persentase | 91 Persentase | 5.350.000.000,00 | | | | | | | 93 Persentase | 5.250.000.000,00 | |
| | | | 999.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 2.52 % | | 3.15 % | 2.94 % | 5.350.000.000,00 | | | | | | | 2.73 % | 5.250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | 150.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | | 1 Laporan | 18 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | 5.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | 5.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 5.000.000.000,00 | | | | | | | 18 Laporan | 5.000.000.000,00 | |
| | 2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 5.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 5.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | 18 Laporan | 5.000.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2000 Orang | | 2000 Orang | 2000 Orang | 200.000.000,00 | | | | | | | 2000 Orang | 100.000.000,00 | |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2000 Orang | | 2000 Orang | 2000 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2000 Orang | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.03.2.03.0033 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | 200.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | | - | 18 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **112.** | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | **530.000.000,00** | | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)*** | | | | | | ***330.000.000,00*** | | | | | | | | ***100.000.000,00*** | |
| | | | 999.Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | 60 Persentase | | 42.5 Persentase | 45 Persentase | 330.000.000,00 | | | | | | | 50 Persentase | 100.000.000,00 | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 430.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 430.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 14 Laporan | | 14 Laporan | 14 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 14 Laporan | 100.000.000,00 | |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 14 Laporan | | 14 Laporan | 14 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 14 Laporan | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 100 Orang | | 100 Orang | 287 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | - | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 430.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | - | | - | - | 80.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | 80.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | - | | - | 6 Orang | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.04.2.01.0033 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) | | | | | | 150.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) | - | | - | 4 Laporan / Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 100.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.14.04.2.02.0007 | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | - | | - | 3 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | **Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan** | | | | | | **9.439.034.661,00** | | | | | | | | **10.657.815.354,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.375.500.000,00** | | | | | | | | **3.097.010.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **2.375.500.000,00** | | | | | | | | **3.097.010.000,00** | |
| **113.** | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | | **320.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | | - | 160.000.000,00 | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 320.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 320.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | | - | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | | - | 160.000.000,00 | |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | - | | - | 5 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 160.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 160.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | - | | - | 1 unit | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 160.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **114.** | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | **841.500.000,00** | | | | | | | | **1.008.330.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat*** | | | | | | ***637.500.000,00*** | | | | | | | | ***800.250.000,00*** | |
| | | | 999.Skor Pola Pangan Harapan | 93.56 Nilai | | 92.36 Nilai | 92.76 Nilai | 637.500.000,00 | | | | | | | 93.16 Nilai | 800.250.000,00 | |
| | | Tersedianya penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan | | | | | | 535.500.000,00 | | | | | | - | | 696.210.000,00 | |
| | | | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 76.500.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 78.030.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 4 laporan | | 4 laporan | 4 laporan | 204.000.000,00 | | | | | | | 4 laporan | 208.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 30 Keluarga | | 30 Keluarga | 30 Keluarga | 155.000.000,00 | | | | | | | 30 Keluarga | 260.100.000,00 | |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | 155.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 30 Keluarga | | 30 Keluarga | 30 Keluarga | 155.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Keluarga | 260.100.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 4 laporan | | 4 laporan | 4 laporan | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 laporan | 208.080.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 76.500.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 78.030.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 76.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 78.030.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | 306.000.000,00 | | | | | | - | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyusunan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi | | | | | | 306.000.000,00 | | | | | | - | | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 204.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 208.080.000,00 | |
| | | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 208.080.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | 535.500.000,00 | | | | | | - | | 696.210.000,00 | |
| | | Tersedianya penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan | | | | | | 535.500.000,00 | | | | | | - | | 696.210.000,00 | |
| | | | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.01.0020 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | - | | - | 13 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 150.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **115.** | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | **928.000.000,00** | | | | | | | | **1.456.560.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya penanganan kerawanan pangan*** | | | | | | ***928.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.456.560.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 0.1 % | | 1 % | 0.7 % | 928.000.000,00 | | | | | | | 0.3 % | 1.456.560.000,00 | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 104.040.000,00 | |
| | | Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 104.040.000,00 | |
| | | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 104.040.000,00 | |
| | | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 826.000.000,00 | | | | | | - | | 1.352.520.000,00 | |
| | | Tertanganinya daerah rawan pangan | | | | | | 826.000.000,00 | | | | | | - | | 1.352.520.000,00 | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 306.000.000,00 | | | | | | | 10 Laporan | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 520.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 1.040.400.000,00 | |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 520.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.040.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 520.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 1.040.400.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | 306.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Laporan | 312.120.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **116.** | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | **306.000.000,00** | | | | | | | | **312.120.000,00** | |
| | | ***meingkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan*** | | | | | | ***306.000.000,00*** | | | | | | | | ***312.120.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | 78 Persentase | | 72 Persentase | 74 Persentase | 306.000.000,00 | | | | | | | 76 Persentase | 312.120.000,00 | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 306.000.000,00 | | | | | | - | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar | | | | | | 306.000.000,00 | | | | | | - | | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 306.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 312.120.000,00 | |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 306.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 312.120.000,00 | |
| | | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 312.120.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **7.063.534.661,00** | | | | | | | | **7.560.805.354,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **7.063.534.661,00** | | | | | | | | **7.560.805.354,00** | |
| **117.** | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.551.240.000,00** | | | | | | | | **4.642.264.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.204.440.000,00*** | | | | | | | | ***4.288.528.800,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 4.204.440.000,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.288.528.800,00 | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 91.800.000,00 | | | | | | - | | 93.636.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 91.800.000,00 | | | | | | - | | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 40.800.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 41.616.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 51.000.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 52.020.000,00 | |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 41.616.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 41.616.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 52.020.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 52.020.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.799.500.000,00 | | | | | | - | | 3.875.690.000,00 | |
| | | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 3.799.500.000,00 | | | | | | - | | 3.875.690.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 208.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 25.500.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 3.570.000.000,00 | | | | | | | 20 Orang/bulan | 3.641.600.000,00 | |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.570.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 3.641.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 3.570.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Orang/bulan | 3.641.600.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 208.080.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 208.080.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 26.010.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 26.010.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 51.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 52.020.000,00 | |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 52.020.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 52.020.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 295.800.000,00 | | | | | | - | | 301.716.000,00 | |
| | | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 295.800.000,00 | | | | | | - | | 301.716.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 25 Laporan | 204.000.000,00 | | | | | | | 25 Laporan | 208.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 40.800.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 41.616.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 40.800.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 41.616.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 10.404.000,00 | |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 10.404.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 41.616.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 41.616.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 41.616.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 41.616.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 25 Laporan | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Laporan | 208.080.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 78.540.000,00 | | | | | | - | | 80.110.800,00 | |
| | | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 78.540.000,00 | | | | | | - | | 80.110.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 78.540.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 80.110.800,00 | |
| | 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 78.540.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 80.110.800,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 78.540.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 80.110.800,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 81.600.000,00 | | | | | | - | | 83.232.000,00 | |
| | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 81.600.000,00 | | | | | | - | | 83.232.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 71.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 72.828.000,00 | |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 10.404.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 71.400.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 72.828.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 71.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 72.828.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 153.000.000,00 | | | | | | - | | 155.860.000,00 | |
| | | Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 153.000.000,00 | | | | | | - | | 155.860.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 153.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 155.860.000,00 | |
| | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 153.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 155.860.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 155.860.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **118.** | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | **678.294.661,00** | | | | | | | | **939.860.554,00** | |
| | | ***Meningkatnya produksi perikanan tangkap*** | | | | | | ***628.294.661,00*** | | | | | | | | ***879.860.554,00*** | |
| | | | 999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 1500 Ton | | 1200 Ton | 1300 Ton | 628.294.661,00 | | | | | | | 1400 Ton | 879.860.554,00 | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 478.294.661,00 | | | | | | - | | 709.860.554,00 | |
| | | Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sungai, danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya | | | | | | 478.294.661,00 | | | | | | - | | 709.860.554,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 68.294.661,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 69.660.554,00 | |
| | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 300.000.000,00 | | | | | | | 50 Unit | 520.200.000,00 | |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | 68.294.661,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 69.660.554,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 68.294.661,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 69.660.554,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 520.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Unit | 520.200.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 230.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 0 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 0 Orang | 60.000.000,00 | |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 0 Orang | | 0 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Orang | 60.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sungai, danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya | | | | | | 478.294.661,00 | | | | | | - | | 709.860.554,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | - | | - | - | 110.000.000,00 | | | | | | | - | 120.000.000,00 | |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | 110.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 120.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | - | | - | 2 Unit | 110.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 120.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 110.000.000,00 | |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | - | | - | 2 Kelompok | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 60.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil | - | | - | 60 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 110.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **119.** | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | **1.429.000.000,00** | | | | | | | | **1.498.580.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya produksi perikanan budidaya*** | | | | | | ***1.429.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.498.580.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 3900 Ton | | 3750 Ton | 3800 Ton | 1.429.000.000,00 | | | | | | | 3850 Ton | 1.498.580.000,00 | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 205.000.000,00 | | | | | | - | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya pembudidaya ikan | | | | | | 205.000.000,00 | | | | | | - | | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 40 Kelompok | | 40 Kelompok | 40 Kelompok | 205.000.000,00 | | | | | | | 40 Kelompok | 260.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 205.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 40 Kelompok | | 40 Kelompok | 40 Kelompok | 205.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Kelompok | 260.100.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | 1.224.000.000,00 | | | | | | - | | 1.238.480.000,00 | |
| | | Terkelolanya pelaksanaan pembudidayaan ikan | | | | | | 1.224.000.000,00 | | | | | | - | | 1.238.480.000,00 | |
| | | | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 510.000.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 520.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 40 Unit | | 40 Unit | 40 Unit | 408.000.000,00 | | | | | | | 40 Unit | 406.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 306.000.000,00 | | | | | | | 50 Unit | 312.120.000,00 | |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 408.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 406.160.000,00 | |
| | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 40 Unit | | 40 Unit | 40 Unit | 408.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Unit | 406.160.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 306.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 312.120.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Unit | 312.120.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | 510.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 520.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 510.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 520.200.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **120.** | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 110.000.000,00 | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 220.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | - | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 110.000.000,00 | |
| | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | - | | - | 250 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 110.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | 3.25.05.2.01.0006 | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 110.000.000,00 | |
| | | Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | - | | - | 17 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 110.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| **121.** | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | **205.000.000,00** | | | | | | | | **260.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat*** | | | | | | ***205.000.000,00*** | | | | | | | | ***260.100.000,00*** | |
| | | | 999.Angka Konsumsi Ikan | 26.67 Kg/KAP/TH | | 24.65 Kg/KAP/TH | 25.06 Kg/KAP/TH | 205.000.000,00 | | | | | | | 25.36 Kg/KAP/TH | 260.100.000,00 | |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 205.000.000,00 | | | | | | - | | 260.100.000,00 | |
| | | Tersedianya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 205.000.000,00 | | | | | | - | | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 21 Pelaku Usaha | | 19 Pelaku Usaha | 20 Pelaku Usaha | 205.000.000,00 | | | | | | | 21 Pelaku Usaha | 260.100.000,00 | |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 205.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 260.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 21 Pelaku Usaha | | 19 Pelaku Usaha | 19 Pelaku Usaha | 205.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Pelaku Usaha | 260.100.000,00 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | | | | **14.619.763.683,00** | | | | | | | | **17.140.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.619.763.683,00** | | | | | | | | **17.140.000.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **14.619.763.683,00** | | | | | | | | **17.140.000.000,00** | |
| **122.** | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7.649.763.683,00** | | | | | | | | **8.580.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***7.399.763.683,00*** | | | | | | | | ***8.210.000.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 7.399.763.683,00 | | | | | | | B Kategori | 8.210.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | - | | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 10 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | | 0 Laporan | 5 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 70.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | | 10 Laporan | 6 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Laporan | 40.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 20.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.750.000.000,00 | | | | | | - | | 6.280.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 5.750.000.000,00 | | | | | | - | | 6.280.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 240.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 18 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | | 48 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | | | | | | | 50 Orang/bulan | 6.000.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.500.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | | 48 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 5.500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Orang/bulan | 6.000.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 220.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 240.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 240.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 6 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 40.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | - | | 25.000.000,00 | |
| | | Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | - | | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 0 Laporan | 3 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 135.000.000,00 | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai serta evaluasi penilaian kinerja pegawai | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 135.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | | 50 Paket | 50 Paket | 60.000.000,00 | | | | | | | 50 Paket | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 60.000.000,00 | | | | | | | 10 Orang | 70.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 65.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | | 50 Paket | 70 Paket | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Paket | 65.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | | 10 Orang | 6 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Orang | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 385.000.000,00 | | | | | | - | | 440.000.000,00 | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana yang mendukang terselenggaranya tata usaha dan laporan administrasi | | | | | | 385.000.000,00 | | | | | | - | | 440.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | | 7 Paket | 7 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 7 Paket | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 25.000.000,00 | | | | | | | 20 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 10 Paket | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 120.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 15.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 120.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 120.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 55.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | | 7 Paket | 7 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Paket | 55.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Paket | 30.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 220.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 220.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 924.763.683,00 | | | | | | - | | 1.100.000.000,00 | |
| | | Jumlah unit barang yang disediakan dalam mendukung kegiatan operasional | | | | | | 924.763.683,00 | | | | | | - | | 1.100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 924.763.683,00 | | | | | | | 2 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 924.763.683,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 4 Unit | 924.763.683,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 1.000.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | - | | 80.000.000,00 | |
| | | Jumlah kegiatan jasa yang mendukung operasional | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | - | | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 245.000.000,00 | | | | | | - | | 270.000.000,00 | |
| | | Jumlah Unit aset daerah yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | | 245.000.000,00 | | | | | | - | | 270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 120.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 125.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 125.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 125.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 150.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 120.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 120.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | - | | 250.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | - | | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | | - | 4 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **123.** | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **350.000.000,00** | | | | | | | | **630.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP*** | | | | | | ***350.000.000,00*** | | | | | | | | ***630.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | 100 Persentase | | 60 Persentase | 70 Persentase | 350.000.000,00 | | | | | | | 80 Persentase | 630.000.000,00 | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 350.000.000,00 | | | | | | - | | 350.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | | | 350.000.000,00 | | | | | | - | | 350.000.000,00 | |
| | | | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 0 Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | | | | | | | Dokumen | 350.000.000,00 | |
| | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | 350.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 350.000.000,00 | |
| | | RPPLH kabupaten/kota yang disusun | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 0 Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 350.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 280.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 280.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 280.000.000,00 | |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 280.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 280.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **124.** | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **810.000.000,00** | | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | | ***Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup*** | | | | | | ***650.000.000,00*** | | | | | | | | ***850.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kualitas Air | 74.39 Indeks | | 73.59 Indeks | 73.79 Indeks | 650.000.000,00 | | | | | | | 73.99 Indeks | 850.000.000,00 | |
| | | | 999.Indeks Kualitas Lahan | 86.89 Indeks | | 86.61 Indeks | 86.68 Indeks | 650.000.000,00 | | | | | | | 86.75 Indeks | 850.000.000,00 | |
| | | | 999.Indeks Kualitas Udara | 78.14 Indeks | | 76.94 Indeks | 77.24 Indeks | 650.000.000,00 | | | | | | | 77.54 Indeks | 850.000.000,00 | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 760.000.000,00 | | | | | | - | | 890.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | 760.000.000,00 | | | | | | - | | 890.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 60.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 80.000.000,00 | | | | | | | 10 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 460.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | 5 Unit | | Unit | 5 Unit | 80.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 100.000.000,00 | |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 110.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | 5 Unit | | Unit | 5 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 100.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | |
| | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 100.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | 460.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 510.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 460.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 510.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **125.** | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | **550.000.000,00** | | | | | | | | **570.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati*** | | | | | | ***550.000.000,00*** | | | | | | | | ***570.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 50 (%) | | 35 (%) | 38 (%) | 550.000.000,00 | | | | | | | 40 (%) | 570.000.000,00 | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | 550.000.000,00 | | | | | | - | | 570.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | 550.000.000,00 | | | | | | - | | 570.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 30 Orang | 60.000.000,00 | |
| | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 500.000.000,00 | | | | | | | 10 Ha | 510.000.000,00 | |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 510.000.000,00 | |
| | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Ha | 510.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **126.** | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | | ***60.000.000,00*** | |
| | | | 999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota | 60 % | | 60 % | 60 % | 50.000.000,00 | | | | | | | 60 % | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 120.000.000,00 | |
| | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 20 Badan Usaha | | 20 Badan Usaha | 20 Badan Usaha | 50.000.000,00 | | | | | | | 20 Badan Usaha | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 20 Badan Usaha | | 20 Badan Usaha | 20 Badan Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Badan Usaha | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **127.** | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | | ***110.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 75 Persentase | | 75 Persentase | 75 Persentase | 50.000.000,00 | | | | | | | 75 Persentase | 110.000.000,00 | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 110.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 110.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **128.** | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | **60.000.000,00** | | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalm perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*** | | | | | | ***60.000.000,00*** | | | | | | | | ***60.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 60.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 Entitas | | 5 Entitas | 5 Entitas | 60.000.000,00 | | | | | | | Entitas | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 Entitas | | 5 Entitas | 5 Entitas | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Entitas | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **129.** | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | | ***60.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | 10 Persentase | | 60 Persentase | 70 Persentase | 50.000.000,00 | | | | | | | 80 Persentase | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 5 Pengaduan | | 5 Pengaduan | 5 Pengaduan | 50.000.000,00 | | | | | | | 5 Pengaduan | 60.000.000,00 | |
| | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 5 Pengaduan | | 5 Pengaduan | 3 Pengaduan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Pengaduan | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **130.** | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | **5.000.000.000,00** | | | | | | | | **6.060.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola persampahan*** | | | | | | ***5.000.000.000,00*** | | | | | | | | ***6.060.000.000,00*** | |
| | | | 999.Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota | 92 % | | 83 % | 85 % | 5.000.000.000,00 | | | | | | | 87 % | 6.060.000.000,00 | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | - | | 6.060.000.000,00 | |
| | | Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | - | | 6.060.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 50.000.000,00 | | | | | | | 5 Kelompok | 60.000.000,00 | |
| | | | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 300 Ton | | 300 Ton | 300 Ton | 2.950.000.000,00 | | | | | | | 300 Ton | 3.300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 2.700.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 2 Kelompok | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Kelompok | 60.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.700.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 2.700.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | 2.950.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 3.300.000.000,00 | |
| | | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 300 Ton | | 300 Ton | 125 Ton | 2.950.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Ton | 3.300.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | **7.957.482.800,00** | | | | | | | | **7.771.293.247,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.957.482.800,00** | | | | | | | | **7.771.293.247,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **7.957.482.800,00** | | | | | | | | **7.771.293.247,00** | |
| **131.** | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6.866.981.202,00** | | | | | | | | **6.714.385.936,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***6.866.981.202,00*** | | | | | | | | ***6.714.385.936,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | 87 Indeks | | 82.4 Indeks | 83.8 Indeks | 6.866.981.202,00 | | | | | | | 85 Indeks | 6.714.385.936,00 | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | A Kategori | A Kategori | 6.866.981.202,00 | | | | | | | A Kategori | 6.714.385.936,00 | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 125.373.570,00 | | | | | | - | | 131.642.249,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan | | | | | | 125.373.570,00 | | | | | | - | | 131.642.249,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.299.525,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.264.501,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 64.044.435,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 67.246.657,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 22.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 21.029.610,00 | | | | | | | 5 Laporan | 22.081.091,00 | |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 64.044.435,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 67.246.657,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 64.044.435,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 67.246.657,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.050.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 22.050.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 19.299.525,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.264.501,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.299.525,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 20.264.501,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 21.029.610,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.081.091,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 21.029.610,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 22.081.091,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.695.349.000,00 | | | | | | - | | 4.904.295.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.695.349.000,00 | | | | | | - | | 4.904.295.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 160.020.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 168.021.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 18.900.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 19.845.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 4.496.429.000,00 | | | | | | | 27 Orang/bulan | 4.696.429.000,00 | |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.496.429.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.696.429.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 4.496.429.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 27 Orang/bulan | 4.696.429.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 160.020.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 168.021.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 160.020.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 168.021.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | 44 Dokumen | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 20.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 18.900.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.845.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 18.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 19.845.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 52.062.500,00 | | | | | | - | | 54.695.025,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 52.062.500,00 | | | | | | - | | 54.695.025,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 28 Paket | | 27 Paket | 27 Paket | 21.262.500,00 | | | | | | | 27 Paket | 22.325.625,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1000 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 30.800.000,00 | | | | | | | 10 Orang | 32.369.400,00 | |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 21.262.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.325.625,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 28 Paket | | 27 Paket | 27 Paket | 21.262.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 27 Paket | 22.325.625,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 30.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.369.400,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1000 Orang | | 10 Orang | 12 Orang | 30.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Orang | 32.369.400,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 271.750.000,00 | | | | | | - | | 285.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 271.750.000,00 | | | | | | - | | 285.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45000 Laporan | | 45 Laporan | 45 Laporan | 223.650.000,00 | | | | | | | 45 Laporan | 234.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 18.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 19.600.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 20.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.500.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 11.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 11.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.900.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 18.900.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 19.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 19.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 20.600.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 223.650.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 234.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45000 Laporan | | 45 Laporan | 45 Laporan | 223.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Laporan | 234.800.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.370.000.002,00 | | | | | | - | | 1.083.116.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 20.000.002,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 600.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 650.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | 4 Unit | 8 Unit | 300.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 320.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 600.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 650.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 12 Unit | 600.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 650.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 20.000.002,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 20.000.002,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 320.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | 4 Unit | 10 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 320.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 126.606.250,00 | | | | | | - | | 78.061.288,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 126.606.250,00 | | | | | | - | | 78.061.288,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.100.750,00 | | | | | | | 4 Laporan | 30.555.788,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.505.500,00 | | | | | | | 1 Laporan | 47.505.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 29.100.750,00 | | | - | - | - | | | 30.555.788,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.100.750,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 30.555.788,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 97.505.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.505.500,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.505.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 47.505.500,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 208.110.000,00 | | | | | | - | | 158.660.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 208.110.000,00 | | | | | | - | | 158.660.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 56.400.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 6.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 135.960.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 135.960.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | 12 Unit | 15 Unit | 15.750.000,00 | | | | | | | 15 Unit | 16.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 135.960.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 135.960.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 135.960.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 135.960.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 15.750.000,00 | | | - | - | - | | | 16.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | 12 Unit | 0 Unit | 15.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Unit | 16.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 56.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Laporan Unit | 56.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 6.700.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 17.729.880,00 | | | | | | - | | 18.616.374,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 17.729.880,00 | | | | | | - | | 18.616.374,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - | | - | - | 17.729.880,00 | | | | | | | - | 18.616.374,00 | |
| | 2.12.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 17.729.880,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.616.374,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - | | - | 4 Dokumen | 17.729.880,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 18.616.374,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.370.000.002,00 | | | | | | - | | 1.083.116.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.370.000.002,00 | | | | | | - | | 1.083.116.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | - | 450.000.000,00 | | | | | | | - | 113.116.000,00 | |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 450.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 113.116.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 450.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 113.116.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **132.** | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | **617.381.096,00** | | | | | | | | **572.443.417,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk*** | | | | | | ***617.381.096,00*** | | | | | | | | ***572.443.417,00*** | |
| | | | 3.Perekaman KTP elektronik | 99.91 % | | 99.85 % | 99.87 % | 617.381.096,00 | | | | | | | 99.89 % | 572.443.417,00 | |
| | | | 4.Persentase Penerbitan KK | 98.9 % | | 98.4 % | 98.5 % | 617.381.096,00 | | | | | | | 98.6 % | 572.443.417,00 | |
| | | | 5.Persentase Penerbitan KTP Elektronik | 99.5 % | | 99 % | 99.1 % | 617.381.096,00 | | | | | | | 99.2 % | 572.443.417,00 | |
| | | | 999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | 15 % | | 5 % | 7 % | 617.381.096,00 | | | | | | | 9 % | 572.443.417,00 | |
| | | | 999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 80 Persentase | | 68 Persentase | 70 Persentase | 617.381.096,00 | | | | | | | 75 Persentase | 572.443.417,00 | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 472.980.540,00 | | | | | | Masyarakat Kabupaten Kerinci | | 439.444.267,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 472.980.540,00 | | | | | | Masyarakat Kabupaten Kerinci | | 439.444.267,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 45000 Dokumen | | 40000 Dokumen | 40000 Dokumen | 369.274.540,00 | | | | | | | 45000 Dokumen | 335.738.267,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 103.706.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 103.706.000,00 | |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | 369.274.540,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 335.738.267,00 | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 45000 Dokumen | | 40000 Dokumen | 40000 Dokumen | 369.274.540,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45000 Dokumen | 335.738.267,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 103.706.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.706.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 103.706.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 103.706.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 59.400.556,00 | | | | | | Masyarakat Kabupaten Kerinci | | 47.999.150,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 59.400.556,00 | | | | | | Masyarakat Kabupaten Kerinci | | 47.999.150,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 59.400.556,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 47.999.150,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | 59.400.556,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.999.150,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 59.400.556,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 47.999.150,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | | - | - | 45.000.000,00 | | | | | | | - | 45.000.000,00 | |
| | 2.12.02.2.03.0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 45.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | | - | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 45.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | - | | - | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 40.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **133.** | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **193.210.066,00** | | | | | | | | **195.374.267,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil*** | | | | | | ***108.210.066,00*** | | | | | | | | ***110.374.267,00*** | |
| | | | 999.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 108.210.066,00 | | | | | | | 100 Persentase | 110.374.267,00 | |
| | | | 999.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 108.210.066,00 | | | | | | | 100 Persentase | 110.374.267,00 | |
| | | | 999.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 108.210.066,00 | | | | | | | 100 Persentase | 110.374.267,00 | |
| | | | 999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 108.210.066,00 | | | | | | | 100 Persentase | 110.374.267,00 | |
| | | | 999.Persentase pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 Tahun | 99.92 % | | 99.88 % | 99.89 % | 108.210.066,00 | | | | | | | 99.9 % | 110.374.267,00 | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | 108.210.066,00 | | | | | | - | | 110.374.267,00 | |
| | | Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil | | | | | | 108.210.066,00 | | | | | | - | | 110.374.267,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 8200 Dokumen | | 7000 Dokumen | 7200 Dokumen | 38.955.666,00 | | | | | | | 7500 Dokumen | 41.119.867,00 | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 8200 Layanan | | 7000 Layanan | 7200 Layanan | 69.254.400,00 | | | | | | | 7500 Layanan | 69.254.400,00 | |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | 38.955.666,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.119.867,00 | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 8200 Dokumen | | 7000 Dokumen | 7200 Dokumen | 38.955.666,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7500 Dokumen | 41.119.867,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | 69.254.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 69.254.400,00 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 8200 Layanan | | 7000 Layanan | 3 Layanan | 69.254.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7500 Layanan | 69.254.400,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | - | - | | - | - | 85.000.000,00 | | | | | | | - | 85.000.000,00 | |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | - | | - | - | 45.000.000,00 | | | | | | | - | 45.000.000,00 | |
| | 2.12.03.2.02.0002 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | | | | | | 45.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | - | | - | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 45.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | - | | - | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 40.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **134.** | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | **226.865.436,00** | | | | | | | | **234.453.277,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan*** | | | | | | ***226.865.436,00*** | | | | | | | | ***234.453.277,00*** | |
| | | | 2.Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun | 100 % | | 100 % | 100 % | 226.865.436,00 | | | | | | | 100 % | 234.453.277,00 | |
| | | | 3.Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten | 100 % | | 100 % | 100 % | 226.865.436,00 | | | | | | | 100 % | 234.453.277,00 | |
| | | | 4.Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama | 5 % | | 5 % | 5 % | 226.865.436,00 | | | | | | | 5 % | 234.453.277,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 226.865.436,00 | | | | | | | 100 Persentase | 234.453.277,00 | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | 71.756.810,00 | | | | | | - | | 74.344.651,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | 71.756.810,00 | | | | | | - | | 74.344.651,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 42.856.810,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 44.499.651,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 28.900.000,00 | | | | | | | 15 Dokumen | 29.845.000,00 | |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | 42.856.810,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 44.499.651,00 | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 42.856.810,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 44.499.651,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | 28.900.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 29.845.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 28.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Dokumen | 29.845.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 155.108.626,00 | | | | | | - | | 160.108.626,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.108.626,00 | | | | | | | 1 Laporan | 40.108.626,00 | |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 65.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 40.108.626,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.108.626,00 | |
| | | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.108.626,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 40.108.626,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 155.108.626,00 | | | | | | - | | 160.108.626,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 155.108.626,00 | | | | | | - | | 160.108.626,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | - | | - | 4 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 50.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **135.** | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | **53.045.000,00** | | | | | | | | **54.636.350,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas profil kependudukan*** | | | | | | ***53.045.000,00*** | | | | | | | | ***54.636.350,00*** | |
| | | | 999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 53.045.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 54.636.350,00 | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | 53.045.000,00 | | | | | | - | | 54.636.350,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | 53.045.000,00 | | | | | | - | | 54.636.350,00 | |
| | | | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.045.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 33.636.350,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | 32.045.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.636.350,00 | |
| | | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.045.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 33.636.350,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | **11.576.339.294,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **11.576.339.294,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **11.576.339.294,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **136.** | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.361.455.113,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***5.321.455.113,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 5.321.455.113,00 | | | | | | | BB Kategori | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 80.784.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | Laporan | 20.784.000,00 | | | | | | | 7 Laporan | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 7 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 20.784.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 3 Laporan | 20.784.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.712.972.225,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.712.972.225,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 160.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 4.552.972.225,00 | | | | | | | 26 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.552.972.225,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 4.552.972.225,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Orang/bulan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 160.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 160.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 10.196.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya panataan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | 10.196.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.196.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 10.196.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 10.196.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 20.901.800,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah | | | | | | 20.901.800,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 Paket | | 26 Paket | 26 Paket | 20.901.800,00 | | | | | | | 26 Paket | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.901.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 Paket | | 26 Paket | 27 Paket | 20.901.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Paket | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 288.920.800,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 288.920.800,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | | 28 Laporan | 30 Laporan | 189.000.000,00 | | | | | | | 32 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 61.176.000,00 | | | | | | | 30 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 30.588.000,00 | | | | | | | 4 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 8.156.800,00 | | | | | | | 5 Paket | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 8.156.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 3 Paket | 8.156.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 61.176.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 61.176.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Paket | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 30.588.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 30.588.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Paket | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 189.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | | 28 Laporan | 25 Laporan | 189.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 32 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 105.916.288,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 105.916.288,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.642.288,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 86.274.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 19.642.288,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.642.288,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 86.274.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 86.274.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 91.764.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 91.764.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 91.764.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 91.764.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 91.764.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 80.784.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 80.784.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | 3 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **137.** | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas penataan desa*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase Fasilitasi Penataan Desa | 88.5 Persentase | | 37.5 Persentase | 50.5 Persentase | 0,00 | | | | | | | 55.5 Persentase | 0,00 | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | 36 Unit | | 36 Unit | 36 Unit | 0,00 | | | | | | | 36 Unit | 0,00 | |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | 36 Unit | | 36 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 36 Unit | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **138.** | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya efektivitas kerja sama desa*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | 43 Persentase | | 36 Persentase | 38 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | | 40 Persentase | 0,00 | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **139.** | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **4.304.595.649,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*** | | | | | | ***4.126.165.649,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 70 Persentase | | 30 Persentase | 40 Persentase | 4.126.165.649,00 | | | | | | | 50 Persentase | 0,00 | |
| | | | 999.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | 95 Persentase | | 55 Persentase | 65 Persentase | 4.126.165.649,00 | | | | | | | 75 Persentase | 0,00 | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | 4.304.595.649,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 4.304.595.649,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 61.176.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 245 Desa | | 10 Desa | 10 Desa | 61.176.000,00 | | | | | | | 10 Desa | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.274.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 148.236.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.784.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 701.867.649,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.078.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.176.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.078.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 285 Laporan | | 0 Laporan | 95 Laporan | 3.001.750.000,00 | | | | | | | 150 Laporan | 0,00 | |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | 56.078.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.078.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 701.867.649,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 701.867.649,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | 61.176.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 61.176.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | | | | 66.274.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.274.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | 61.176.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.176.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | 3.001.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 285 Laporan | | 0 Laporan | 95 Laporan | 3.001.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | 56.078.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.078.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | 40.784.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.784.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | 61.176.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 245 Desa | | 10 Desa | 10 Desa | 61.176.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Desa | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | 148.236.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 148.236.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **140.** | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | **1.810.288.532,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan*** | | | | | | ***1.810.288.532,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.810.288.532,00 | | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.810.288.532,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 1.810.288.532,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.274.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.784.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.322.250.532,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.980.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | 330.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | 66.274.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.274.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | 50.980.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.980.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | | | 40.784.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.784.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 1.322.250.532,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.322.250.532,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | **Dinas Perhubungan** | | | | | | **14.286.365.632,00** | | | | | | | | **2.712.853.163.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **14.286.365.632,00** | | | | | | | | **2.712.853.163.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **14.286.365.632,00** | | | | | | | | **2.712.853.163.000,00** | |
| **141.** | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.009.365.632,00** | | | | | | | | **4.052.383.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.944.365.632,00*** | | | | | | | | ***3.867.383.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 3.944.365.632,00 | | | | | | | B Kategori | 3.867.383.000,00 | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 160.000.000,00 | |
| | | tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 80.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 8 Dokumen | 80.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 80.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.201.483.000,00 | | | | | | - | | 3.201.483.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.201.483.000,00 | | | | | | - | | 3.201.483.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 174.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 174.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 2 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 420 Orang/bulan | | 350 Orang/bulan | 378 Orang/bulan | 2.987.483.000,00 | | | | | | | 420 Orang/bulan | 2.987.483.000,00 | |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.987.483.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.987.483.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 420 Orang/bulan | | 350 Orang/bulan | 266 Orang/bulan | 2.987.483.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 420 Orang/bulan | 2.987.483.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 174.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 174.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 174.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 174.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 2 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | 1 Laporan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 91.250.000,00 | | | | | | - | | 98.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 91.250.000,00 | | | | | | - | | 98.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 41.250.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 48.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Orang | 50.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 41.250.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 48.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 55 Paket | 41.250.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 48.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Orang | 50.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 250.932.632,00 | | | | | | - | | 278.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 250.932.632,00 | | | | | | - | | 278.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 25.000.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 2.732.632,00 | | | | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.200.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 3.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.200.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 3.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.200.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 3.200.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 25.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 25.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 2.732.632,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 2.732.632,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | - | | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Dinas Perhubungan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 50.200.000,00 | | | | | | - | | 50.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor | | | | | | 50.200.000,00 | | | | | | - | | 50.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.200.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 25.200.000,00 | |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 25.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 25.200.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 25.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.200.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 25.200.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 205.500.000,00 | | | | | | - | | 234.500.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 205.500.000,00 | | | | | | - | | 234.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 26.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 112.000.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 112.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 55.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 37 Unit | | 37 Unit | 37 Unit | 12.500.000,00 | | | | | | | 37 Unit | 12.500.000,00 | |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 55.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 55.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 112.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 112.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 112.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 112.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 12.500.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 12.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 37 Unit | | 37 Unit | 37 Unit | 12.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 37 Unit | 12.500.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 26.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 26.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **142.** | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | **10.277.000.000,00** | | | | | | | | **2.708.800.780.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat*** | | | | | | ***9.677.000.000,00*** | | | | | | | | ***2.708.200.780.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Konektivitas Darat | 0.20 Persentase | | 0.1880 Persentase | 0.1915 Persentase | 9.677.000.000,00 | | | | | | | 0.20 Persentase | 2.708.200.780.000,00 | |
| | | | 999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | 4123 Persentase | | 4058 Persentase | 4078 Persentase | 9.677.000.000,00 | | | | | | | 4093 Persentase | 2.708.200.780.000,00 | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | 177.000.000,00 | | | | | | - | | 180.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kerinci | | | | | | 177.000.000,00 | | | | | | - | | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 177.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 180.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 177.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 180.000.000,00 | |
| | | Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 177.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 180.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 7.600.000.000,00 | | | | | | - | | 2.705.000.000.000,00 | |
| | | TERSEDIANYA PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN KERINCI | | | | | | 7.600.000.000,00 | | | | | | - | | 2.705.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4123 Unit | | 4058 Unit | 4078 Unit | 2.600.000.000,00 | | | | | | | 4093 Unit | 2.700.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 4118 Unit | | 4058 Unit | 4073 Unit | 5.000.000.000,00 | | | | | | | 4088 Unit | 5.000.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 2.600.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.700.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4123 Unit | | 4058 Unit | 200 Unit | 2.600.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4093 Unit | 2.700.000.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | 5.000.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 5.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 4118 Unit | | 4058 Unit | 500 Unit | 5.000.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | | | | | 4088 Unit | 5.000.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | - | | 500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Terminal Tipe C | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | - | | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 500.000.000,00 | | | | | | | 0 Dokumen | 500.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 500.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Dokumen | 500.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | 750.000.000,00 | | | | | | - | | 750.000.000,00 | |
| | | Tersedianya ijin penyelenggaraan parkir dan pembangunan faslitas parkir di Kabupaten Kerinci | | | | | | 750.000.000,00 | | | | | | - | | 750.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 750.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 750.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 750.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 750.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 750.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci \|\| Desa Sanggaran Agung \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Sitinjau Laut \|\| Desa Angkasa Pura \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Balai \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Kayu Aro \|\| Desa Sangir \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Kayu Aro \|\| Desa Pasar Sungai Tanduk \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Gunung Tujuh \|\| Desa Pelompek Pasar Baru \|\| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 1 Laporan | 750.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 550.000.000,00 | | | | | | - | | 1.570.780.000,00 | |
| | | Terlaksananya kelancaran arus lalu lintas di jalan Kabupaten Kerinci | | | | | | 550.000.000,00 | | | | | | - | | 1.570.780.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 870.780.000,00 | |
| | | | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 300.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 700.000.000,00 | |
| | | TERLAKSANANYA MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS | | | | | | 550.000.000,00 | | | | | | - | | 1.570.780.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 870.780.000,00 | |
| | | | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 300.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 700.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 870.780.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 870.780.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 700.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 300.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 700.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya audit dan inspeksi keselamatan jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | | 6 Orang | 3 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 2 Orang | 200.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 200.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | | 6 Orang | 2 Orang | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang | 200.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | - | - | | - | - | 600.000.000,00 | | | | | | | - | 600.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.12 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | | - | | 600.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | | - | | 600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | - | - | 600.000.000,00 | | | | | | | - | 600.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.12.0001 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 600.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 600.000.000,00 | |
| | | Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | - | 1 Dokumen | 600.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Pasar Senen \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 600.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | **9.319.866.742,00** | | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.319.866.742,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **8.919.866.742,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **143.** | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.910.866.742,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.590.866.742,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 3.590.866.742,00 | | | | | | | B Kategori | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA dan RKA-P | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 8 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 2.871.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.581.000.000,00 | | | | | | | 21 Orang/bulan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.871.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.581.000.000,00 | | | | | | | 21 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.581.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 14 bulan Orang/bulan | 2.581.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Orang/bulan | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | | 20 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 Orang | | 9 Orang | 9 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 9 Orang | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | | 20 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 Orang | | 9 Orang | 9 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 9 Orang | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Paket | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 Orang | | 9 Orang | 12 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Orang | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 315.521.858,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 315.521.858,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 155.521.858,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | | | 315.521.858,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 155.521.858,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan | | | | | | 315.521.858,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 155.521.858,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 315.521.858,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 155.521.858,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 2 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 155.521.858,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 155.521.858,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 118.878.142,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 118.878.142,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 68.878.142,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 118.878.142,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 68.878.142,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 118.878.142,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 68.878.142,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 68.878.142,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 68.878.142,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 180.466.742,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Abngunan lainnya | | | | | | 180.466.742,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 54.966.742,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 125.500.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 180.466.742,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 54.966.742,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 125.500.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 125.500.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 2 Unit | 125.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 54.966.742,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 54.966.742,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | | | - | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.871.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 2.871.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.871.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | | - | 1 paket Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| **144.** | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | **1.750.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah*** | | | | | | ***1.750.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.750.000.000,00 | | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | | | | | | 1.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik | - | | - | - | 750.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah) | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | | - | - | 800.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | | | | | | 1.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik | - | | - | - | 750.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah) | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | | - | - | 800.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.16.02.2.01.0025 | Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | 800.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | | - | 100% % | 800.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.02.2.01.0026 | Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | 750.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik | - | | - | 94000 Orang | 750.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.02.2.01.0027 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah) | - | | - | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| **145.** | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | **3.259.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika*** | | | | | | ***3.259.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.9 Indeks | | 2.3 Indeks | 2.4 Indeks | 3.259.000.000,00 | | | | | | | 2.5 Indeks | 0,00 | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 509.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | 509.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 509.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | 509.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 509.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | | Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Master Plan Kabupaten atau kota Cerdas | | | | | | 2.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | 2.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | 300.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Master Plan Kabupaten atau kota Cerdas | | | | | | 2.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | | - | - | 2.250.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | 2.750.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | | - | - | 2.250.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.16.03.2.02.0040 | Penyediaan Akses Internet | | | | | | 2.250.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | | - | 32 Titik | 2.250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.03.2.02.0042 | Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | | - | 24 Layanan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **146.** | **2.20.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | B Kategori | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.20.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA dan RKA-P | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.20.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | - | | - | 1 dokumen Data | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **147.** | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah*** | | | | | | ***200.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 1264 Angka | | 924 Angka | 1004 Angka | 200.000.000,00 | | | | | | | 1094 Angka | 0,00 | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.21.02.2.01.0009 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | - | | - | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | 2.21.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | - | | - | 3 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Komunikasi dan Informatika |
| | | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | | | **6.220.715.694,00** | | | | | | | | **5.709.280.534,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **6.220.715.694,00** | | | | | | | | **5.709.280.534,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **6.220.715.694,00** | | | | | | | | **5.709.280.534,00** | |
| **148.** | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.920.416.294,00** | | | | | | | | **4.362.972.152,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.640.416.294,00*** | | | | | | | | ***4.074.572.152,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | BB Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 4.640.416.294,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.074.572.152,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 126.666.020,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 130.466.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 126.666.020,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 130.466.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 7 Dokumen | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 61.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 41.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 26.666.020,00 | | | | | | | 5 Laporan | 27.466.000,00 | |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 60.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 61.800.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 60.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 61.800.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 41.200.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 26.666.020,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 27.466.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 6 Laporan | 26.666.020,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 27.466.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.269.913.674,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 3.368.011.084,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.269.913.674,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 3.368.011.084,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 133.920.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 137.937.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 30.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 3.105.993.674,00 | | | | | | | Orang/bulan | 3.199.173.484,00 | |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.105.993.674,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.199.173.484,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 33 Orang/bulan | 3.105.993.674,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Orang/bulan | 3.199.173.484,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 133.920.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 137.937.600,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 133.920.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 137.937.600,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.900.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 30.900.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Terlaksanany Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 72.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 30.900.000,00 | |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 30.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.900.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 30.900.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 319.315.600,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 328.895.068,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 319.315.600,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 328.895.068,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | | 70 Laporan | 70 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 70 Laporan | 257.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 30.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 36.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.315.600,00 | | | | | | | 1 Paket | 4.445.068,00 | |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 4.315.600,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.445.068,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.315.600,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 4.445.068,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.900.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 30.900.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 35.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.050.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 36.050.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 250.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 257.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | | 70 Laporan | 70 Laporan | 250.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 70 Laporan | 257.500.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 784.521.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 103.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 103.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 5 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 103.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 82.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 82.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 41.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 41.200.000,00 | |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 40.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 40.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 41.200.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 40.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 41.200.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 257.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 257.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 150.000.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 154.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 103.000.000,00 | |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 150.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 154.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 150.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 154.500.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 103.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 20.600.000,00 | |
| | | Terlaksanany Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 20.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 20.600.000,00 | |
| | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 20.600.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 72.100.000,00 | |
| | | Terlaksanany Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 72.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 41.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 41.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | 8 Orang | 40.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 41.200.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 784.521.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 103.000.000,00 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 784.521.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 103.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | - | 684.521.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 684.521.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 684.521.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **149.** | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **213.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kemudahan berinventasi*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***213.000.000,00*** | |
| | | | 999.Realisasi Total terhadap Target Investasi | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 213.000.000,00 | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 103.000.000,00 | |
| | | Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 103.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 103.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.000.000,00 | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 103.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 110.000.000,00 | |
| | | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 110.000.000,00 | |
| | 2.18.02.2.02.0007 | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | - | | - | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 110.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **150.** | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **400.000.000,00** | | | | | | | | **412.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal*** | | | | | | ***400.000.000,00*** | | | | | | | | ***412.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 400.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 412.000.000,00 | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 412.000.000,00 | |
| | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 412.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 257.500.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 154.500.000,00 | |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 257.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 250.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 257.500.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 154.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 154.500.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **151.** | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **350.000.000,00** | | | | | | | | **360.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko*** | | | | | | ***250.000.000,00*** | | | | | | | | ***257.500.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 250.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 257.500.000,00 | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 350.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 360.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 350.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 360.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 70 Pelaku Usaha | | 70 Pelaku Usaha | 70 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | | | | | | | 70 Pelaku Usaha | 103.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 700 Pelaku Usaha | | 700 Pelaku Usaha | 700 Pelaku Usaha | 150.000.000,00 | | | | | | | 700 Pelaku Usaha | 154.500.000,00 | |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | 150.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 154.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 700 Pelaku Usaha | | 700 Pelaku Usaha | 700 Pelaku Usaha | 150.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 700 Pelaku Usaha | 154.500.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 70 Pelaku Usaha | | 70 Pelaku Usaha | 70 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 70 Pelaku Usaha | 103.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 350.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 360.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 103.000.000,00 | |
| | 2.18.04.2.01.0009 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | - | | - | 500 Kegiatan Usaha | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 103.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **152.** | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **232.474.800,00** | | | | | | | | **239.449.044,00** | |
| | | ***Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal*** | | | | | | ***232.474.800,00*** | | | | | | | | ***239.449.044,00*** | |
| | | | 999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 232.474.800,00 | | | | | | | 100 Persentase | 239.449.044,00 | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 232.474.800,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 239.449.044,00 | |
| | | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 232.474.800,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 239.449.044,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 16 Kegiatan Usaha | | 16 Kegiatan Usaha | 16 Kegiatan Usaha | 132.474.800,00 | | | | | | | 16 Kegiatan Usaha | 136.449.044,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | 132.474.800,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 136.449.044,00 | |
| | | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 16 Kegiatan Usaha | | 16 Kegiatan Usaha | 16 Kegiatan Usaha | 132.474.800,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Kegiatan Usaha | 136.449.044,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 232.474.800,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 239.449.044,00 | |
| | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 103.000.000,00 | |
| | 2.18.05.2.01.0007 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | 100.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | | - | 16 Kegiatan Usaha | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 103.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **153.** | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **117.824.600,00** | | | | | | | | **121.359.338,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal*** | | | | | | ***117.824.600,00*** | | | | | | | | ***121.359.338,00*** | |
| | | | 999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 117.824.600,00 | | | | | | | 100 Persentase | 121.359.338,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 117.824.600,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 121.359.338,00 | |
| | | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 117.824.600,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 121.359.338,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 117.824.600,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 121.359.338,00 | |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | 117.824.600,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 121.359.338,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 117.824.600,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Air Hangat \|\| Desa Sawahan Jaya \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 121.359.338,00 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | **Dinas Pemuda dan Olah Raga** | | | | | | **9.454.637.856,00** | | | | | | | | **9.526.147.413,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.454.637.856,00** | | | | | | | | **9.526.147.413,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **9.454.637.856,00** | | | | | | | | **9.526.147.413,00** | |
| **154.** | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.321.209.600,00** | | | | | | | | **4.407.633.792,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.219.209.600,00*** | | | | | | | | ***4.303.593.792,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | AA Kategori | | AA Kategori | AA Kategori | 4.219.209.600,00 | | | | | | | AA Kategori | 4.303.593.792,00 | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 155.295.000,00 | | | | | | - | | 158.400.900,00 | |
| | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah (%) | | | | | | 155.295.000,00 | | | | | | - | | 158.400.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 62.730.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 63.984.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 56.100.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 57.222.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | | 8 Laporan | 8 Laporan | 36.465.000,00 | | | | | | | 8 Laporan | 37.194.300,00 | |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 62.730.000,00 | | | - | - | - | | | 63.984.600,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 62.730.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 63.984.600,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 56.100.000,00 | | | - | - | - | | | 57.222.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 56.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 57.222.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 36.465.000,00 | | | - | - | - | | | 37.194.300,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | | 8 Laporan | 8 Laporan | 36.465.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Laporan | 37.194.300,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.496.254.000,00 | | | | | | - | | 3.566.179.080,00 | |
| | | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | | | | | | 3.496.254.000,00 | | | | | | - | | 3.566.179.080,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 159.324.000,00 | | | | | | | 8 Dokumen | 162.510.480,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 72.930.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 74.388.600,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 3.264.000.000,00 | | | | | | | 26 Orang/bulan | 3.329.280.000,00 | |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.264.000.000,00 | | | - | - | - | | | 3.329.280.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 3.264.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Orang/bulan | 3.329.280.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 159.324.000,00 | | | - | - | - | | | 162.510.480,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 159.324.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Dokumen | 162.510.480,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 72.930.000,00 | | | - | - | - | | | 74.388.600,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 72.930.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 74.388.600,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah (%) | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8 Laporan | | 8 Laporan | 8 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 8 Laporan | 52.020.000,00 | |
| | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | - | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8 Laporan | | 8 Laporan | 8 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Laporan | 52.020.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 54.672.000,00 | | | | | | - | | 55.765.440,00 | |
| | | Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal (%) | | | | | | 54.672.000,00 | | | | | | - | | 55.765.440,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 Paket | | 26 Paket | 26 Paket | 29.172.000,00 | | | | | | | 26 Paket | 29.755.440,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 25.500.000,00 | | | | | | | 15 Orang | 26.010.000,00 | |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 29.172.000,00 | | | - | - | - | | | 29.755.440,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 Paket | | 26 Paket | 26 Paket | 29.172.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Paket | 29.755.440,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | - | | | 26.010.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Orang | 26.010.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 285.753.000,00 | | | | | | - | | 291.468.060,00 | |
| | | Persentase Layanan administrasi perangkat daerah (%) | | | | | | 285.753.000,00 | | | | | | - | | 291.468.060,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 153.000.000,00 | | | | | | | 50 Laporan | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 35 Paket | | 35 Paket | 35 Paket | 25.500.000,00 | | | | | | | 35 Paket | 26.010.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 25.500.000,00 | | | | | | | 20 Paket | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 81.753.000,00 | | | | | | | 6 Paket | 83.388.060,00 | |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 81.753.000,00 | | | - | - | - | | | 83.388.060,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 81.753.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Paket | 83.388.060,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | - | | | 26.010.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 35 Paket | | 35 Paket | 35 Paket | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 35 Paket | 26.010.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | - | | | 26.010.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Paket | 26.010.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 153.000.000,00 | | | - | - | - | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Laporan | 156.060.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 86.700.000,00 | | | | | | - | | 88.434.000,00 | |
| | | Persentase pengadaan BMD Pada Perangkat Daerah (%) | | | | | | 86.700.000,00 | | | | | | - | | 88.434.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 15.300.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 20.400.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 52.020.000,00 | |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 15.606.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | - | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 20.808.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | - | | | 52.020.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 52.020.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 78.846.000,00 | | | | | | - | | 80.422.920,00 | |
| | | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Kantor (%) | | | | | | 78.846.000,00 | | | | | | - | | 80.422.920,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.240.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 12.484.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 52.020.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 53.060.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 14.586.000,00 | | | | | | | 10 Laporan | 14.877.720,00 | |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 12.240.000,00 | | | - | - | - | | | 12.484.800,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 12.484.800,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 14.586.000,00 | | | - | - | - | | | 14.877.720,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 14.586.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Laporan | 14.877.720,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 52.020.000,00 | | | - | - | - | | | 53.060.400,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 52.020.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 53.060.400,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 112.689.600,00 | | | | | | - | | 114.943.392,00 | |
| | | Persentase terpeliharanya mobil dinas, operasional, lapangan (%) | | | | | | 112.689.600,00 | | | | | | - | | 114.943.392,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 82.089.600,00 | | | | | | | 2 Unit | 83.731.392,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 30.600.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 31.212.000,00 | |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 82.089.600,00 | | | - | - | - | | | 83.731.392,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 82.089.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 83.731.392,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | - | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 31.212.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| **155.** | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | **308.828.256,00** | | | | | | | | **197.421.621,00** | |
| | | ***Meningkatnya daya saing kepemudaan*** | | | | | | ***275.000.000,00*** | | | | | | | | ***197.421.621,00*** | |
| | | | 999.Rasio Wirausaha Pemuda | 4.3 Persentase | | 3.5 Persentase | 3.7 Persentase | 275.000.000,00 | | | | | | | 3.9 Persentase | 197.421.621,00 | |
| | | | - | - | | - | - | 33.828.256,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | 275.000.000,00 | | | | | | - | | 197.421.621,00 | |
| | | Persentase pemuda yang berprestasi dan beperan aktif dalam pembanguan | | | | | | 275.000.000,00 | | | | | | - | | 197.421.621,00 | |
| | | | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | - | | - | - | 80.000.000,00 | | | | | | | - | 88.179.621,00 | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 65.000.000,00 | | | | | | | - | 109.242.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya | - | | - | - | 60.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.19.02.2.01.0018 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | - | | - | 7 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.02.2.01.0019 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 65.000.000,00 | | | - | - | - | | | 109.242.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 40 Orang | 65.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 109.242.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.02.2.01.0020 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | | - | 30 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.02.2.01.0021 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya | - | | - | 30 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.02.2.01.0022 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | - | | | 88.179.621,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | - | | - | 40 Orang | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 88.179.621,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 33.828.256,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 33.828.256,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | - | | - | - | 33.828.256,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.19.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 33.828.256,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | - | | - | 4 Organisasi | 33.828.256,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| **156.** | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | **4.187.100.000,00** | | | | | | | | **4.270.842.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga*** | | | | | | ***4.187.100.000,00*** | | | | | | | | ***4.270.842.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | 10 Persentase | | 6 Persentase | 7 Persentase | 4.187.100.000,00 | | | | | | | 8 Persentase | 4.270.842.000,00 | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 352.000.000,00 | | | | | | - | | 624.240.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Persentase pemuda yang berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan | | | | | | 352.000.000,00 | | | | | | - | | 624.240.000,00 | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | - | | - | - | 250.000.000,00 | | | | | | | - | 520.200.000,00 | |
| | | | Jumlah sentra pembinaan olahraga prestasi yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 102.000.000,00 | | | | | | | - | 104.040.000,00 | |
| | 2.19.03.2.01.0008 | Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | - | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah sentra pembinaan olahraga prestasi yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 6 Unit | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 104.040.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.03.2.01.0009 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | - | | | 520.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | - | | - | 2 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 520.200.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 308.000.000,00 | | | | | | - | | 416.160.000,00 | |
| | | Persentase Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 308.000.000,00 | | | | | | - | | 416.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 308.000.000,00 | | | | | | | - | 416.160.000,00 | |
| | 2.19.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 308.000.000,00 | | | - | - | - | | | 416.160.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 3 Kegiatan | 308.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 416.160.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | - | | - | - | 60.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.19.03.2.03.0012 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | - | | - | 30 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.03.2.03.0013 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 30 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | 3.116.100.000,00 | | | | | | - | | 3.178.422.000,00 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | 3.116.100.000,00 | | | | | | - | | 3.178.422.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 3.116.100.000,00 | | | | | | | - | 3.178.422.000,00 | |
| | 2.19.03.2.04.0008 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | | 3.116.100.000,00 | | | - | - | - | | | 3.178.422.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas | - | | - | 2 Lembaga | 3.116.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 3.178.422.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | 251.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | 251.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | | - | - | 251.000.000,00 | | | | | | | - | 52.020.000,00 | |
| | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | 251.000.000,00 | | | - | - | - | | | 52.020.000,00 | |
| | | Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | | - | 2 Unit | 251.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 52.020.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **157.** | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | **637.500.000,00** | | | | | | | | **650.250.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kepramukaan*** | | | | | | ***637.500.000,00*** | | | | | | | | ***650.250.000,00*** | |
| | | | 999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | 10 Persentase | | 6 Persentase | 7 Persentase | 637.500.000,00 | | | | | | | 8 Persentase | 650.250.000,00 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 637.500.000,00 | | | | | | - | | 650.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 600.000.000,00 | | | | | | | 1 Organisasi | 650.250.000,00 | |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | 600.000.000,00 | | | - | - | - | | | 650.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 600.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Organisasi | 650.250.000,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 637.500.000,00 | | | | | | - | | 650.250.000,00 | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 637.500.000,00 | | | | | | - | | 650.250.000,00 | |
| | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | - | | - | - | 37.500.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.19.04.2.01.0015 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | 37.500.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | - | | - | 30 Orang | 37.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | | **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** | | | | | | **14.356.189.002,00** | | | | | | | | **14.747.911.420,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.805.000.000,00** | | | | | | | | **2.121.666.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **1.805.000.000,00** | | | | | | | | **2.121.666.000,00** | |
| **158.** | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **625.000.000,00** | | | | | | | | **811.666.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan*** | | | | | | ***525.000.000,00*** | | | | | | | | ***811.666.000,00*** | |
| | | | 999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | 86.00 Persentase | | 78.00 Persentase | 80.00 Persentase | 525.000.000,00 | | | | | | | 82.00 Persentase | 811.666.000,00 | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 571.666.000,00 | |
| | | Terlaksananaya Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 571.666.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 7 Objek | | 5 Objek | 6 Objek | 150.000.000,00 | | | | | | | 6 Objek | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 130 Orang | | 100 Orang | 110 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 120 Orang | 171.666.000,00 | |
| | | | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 7 Objek | | 5 Objek | 2 Objek | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Objek | 150.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 171.666.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 130 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 120 Orang | 171.666.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2.22.02.2.01.0003 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 175.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 240.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian Kesenian tradisional dalam daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 175.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 240.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 10.00 Objek | | 10.00 Objek | 10.00 Objek | 100.000.000,00 | | | | | | | 10.00 Objek | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 36 Sertifikat | | 36 Sertifikat | 36 Sertifikat | 75.000.000,00 | | | | | | | 36 Sertifikat | 75.000.000,00 | |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | 100.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 165.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 10.00 Objek | | 10.00 Objek | 3 Objek | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10.00 Objek | 165.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | | | | 75.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 36 Sertifikat | | 36 Sertifikat | 36 Sertifikat | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 36 Sertifikat | 75.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **159.** | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***100.000.000,00*** | |
| | | | 999.Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | 32.00 Persentase | | 23.00 Persentase | 25.00 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | | 27.00 Persentase | 100.000.000,00 | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 100.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kesenian Tradisional Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 20 Lembaga | | 12 Lembaga | 14 Lembaga | 100.000.000,00 | | | | | | | 16 Lembaga | 100.000.000,00 | |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | 100.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 20 Lembaga | | 12 Lembaga | 18 Lembaga | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Lembaga | 100.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **160.** | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | | **60.000.000,00** | | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah*** | | | | | | ***60.000.000,00*** | | | | | | | | ***60.000.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | 50.00 Persentase | | 44.00 Persentase | 46.00 Persentase | 60.000.000,00 | | | | | | | 47.00 Persentase | 60.000.000,00 | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Akses Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 60 Orang | | 60 Orang | 60 Orang | 60.000.000,00 | | | | | | | 60 Orang | 60.000.000,00 | |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 60 Orang | | 60 Orang | 100 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Orang | 60.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **161.** | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | **870.000.000,00** | | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan*** | | | | | | ***870.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.000.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | 53.33 % | | 26.67 % | 33.33 % | 870.000.000,00 | | | | | | | 40.00 % | 1.000.000.000,00 | |
| | | | 999.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | 5.00 Persentase | | 5.00 Persentase | 5.00 Persentase | 870.000.000,00 | | | | | | | 5.00 Persentase | 1.000.000.000,00 | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | 310.000.000,00 | | | | | | Disparbud kab. Kerinci | | 330.000.000,00 | |
| | | Ditetapkannya cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota | | | | | | 310.000.000,00 | | | | | | Disparbud kab. Kerinci | | 330.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 3 Objek | | 3 Objek | 3 Objek | 150.000.000,00 | | | | | | | 3 Objek | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 160.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 3 Objek | | 3 Objek | 4 Objek | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Objek | 160.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Cagar budaya Kabupaten/ Kota | | | | | | 560.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 670.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 8 Objek | | 8 Objek | 8 Objek | 500.000.000,00 | | | | | | | 8 Objek | 600.000.000,00 | |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | 500.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 600.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 8 Objek | | 8 Objek | 2 Objek | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Objek | 600.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Ditetapkannya cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota | | | | | | 310.000.000,00 | | | | | | Disparbud kab. Kerinci | | 330.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan | - | | - | - | 160.000.000,00 | | | | | | | - | 170.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.22.05.2.01.0003 | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | | | | | | 160.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 170.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan | - | | - | 2 Objek | 160.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 170.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | 560.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 670.000.000,00 | |
| | | Terlaksananaya Pengelolaan Cagar budaya Kabupaten/ Kota | | | | | | 560.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 670.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | - | | - | - | 60.000.000,00 | | | | | | | - | 70.000.000,00 | |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | - | | - | 1 Objek | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 70.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **162.** | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | **150.000.000,00** | | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola museum*** | | | | | | ***150.000.000,00*** | | | | | | | | ***150.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | 5.00 Persentase | | 3.00 Persentase | 4.00 Persentase | 150.000.000,00 | | | | | | | 5.00 Persentase | 150.000.000,00 | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 150.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Museum Kabupaten/ Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **12.551.189.002,00** | | | | | | | | **12.626.245.420,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **12.551.189.002,00** | | | | | | | | **12.626.245.420,00** | |
| **163.** | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7.270.609.000,00** | | | | | | | | **6.541.540.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***6.710.609.000,00*** | | | | | | | | ***6.302.540.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | BB Kategori | | B Kategori | B Kategori | 6.710.609.000,00 | | | | | | | BB Kategori | 6.302.540.000,00 | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 180.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 80.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 8 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 80.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.131.088.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 5.030.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan | | | | | | 5.131.088.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 5.030.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 175.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | | 22 Laporan | 22 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 22 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 4.916.088.000,00 | | | | | | | 40 Orang/bulan | 4.800.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.916.088.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 4.800.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | | 40 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 4.916.088.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Orang/bulan | 4.800.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 175.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 180.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 175.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 180.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | | 22 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 22 Laporan | 50.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab, Kerinci | | 90.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Daerah | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab, Kerinci | | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 40 Paket | | 40 Paket | 40 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 40 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | | 7 Orang | 10 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Orang | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 30.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 40 Paket | | 40 Paket | 36 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Paket | 30.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 50.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | | 7 Orang | 10 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Orang | 60.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 430.000.000,00 | | | | | | - | | 447.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Administrasi umum Perangkat daerah | | | | | | 430.000.000,00 | | | | | | - | | 447.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 50 Laporan | 255.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 62 Paket | | 62 Paket | 62 Paket | 40.000.000,00 | | | | | | | 62 Paket | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 40.000.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | | 2 Paket | 3 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 102.000.000,00 | |
| | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 102.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | | 2 Paket | 3 Paket | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 102.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 45.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 62 Paket | | 62 Paket | 62 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 62 Paket | 45.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 45.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 45.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 255.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 50 Laporan | 56 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Laporan | 255.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 844.521.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 165.240.000,00 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Barang Milik daerah | | | | | | 844.521.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 165.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 4 Unit | 5 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 17 Unit | | 14 Unit | 16 Unit | 60.000.000,00 | | | | | | | 18 Unit | 61.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 104.040.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 4 Unit | 5 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 104.040.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 60.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 61.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 17 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Unit | 61.200.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 257.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daeerah | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 257.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 150.000.000,00 | | | | | | | 7 Laporan | 155.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 102.000.000,00 | |
| | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 155.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 155.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 100.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 102.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 102.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya tata kelola Barang Milik daerah | | | | | | 325.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 340.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 160.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 15.000.000,00 | | | | | | | 18 Unit | 15.300.000,00 | |
| | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 15.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 15.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Unit | 15.300.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 160.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 165.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 160.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 165.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | undefined | - | | - | undefined undefined | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 32.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 32.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 32.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 32.000.000,00 | |
| | 3.26.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 32.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 32.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya tata kelola Barang Milik daerah | | | | | | 844.521.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 165.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | - | 684.521.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 684.521.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 684.521.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 325.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 340.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya tata kelola Barang Milik daerah | | | | | | 325.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 340.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | | - | 160.000.000,00 | |
| | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | 3 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 160.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **164.** | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | **3.570.580.002,00** | | | | | | | | **4.663.905.420,00** | |
| | | ***Meningkatnya daya tarik destinasi parawisata*** | | | | | | ***3.490.580.002,00*** | | | | | | | | ***4.578.905.420,00*** | |
| | | | 999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | 24.70 Persentase | | 24.30 Persentase | 24.50 Persentase | 3.490.580.002,00 | | | | | | | 24.60 Persentase | 4.578.905.420,00 | |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 306.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya kawasan strategis pariwisata | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 306.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 40 Unit | | 25 Unit | 30 Unit | 300.000.000,00 | | | | | | | 35 Unit | 306.000.000,00 | |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 306.000.000,00 | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 40 Unit | | 25 Unit | 5 Unit | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 35 Unit | 306.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 3.190.580.002,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 4.272.905.420,00 | |
| | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | | | | | | 3.190.580.002,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 4.272.905.420,00 | |
| | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 150.000.000,00 | | | | | | | 5 Lokasi | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 18 Laporan | 51.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 8 Laporan | | 7 Laporan | 8 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 8 Laporan | 255.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 10 Unit | | 8 Unit | 9 Unit | 2.740.580.002,00 | | | | | | | 10 Unit | 3.766.905.420,00 | |
| | 3.26.02.2.03.0001 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 200.000.000,00 | |
| | | Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Lokasi | 200.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 2.740.580.002,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 3.766.905.420,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 10 Unit | | 8 Unit | 6 Unit | 2.740.580.002,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 3.766.905.420,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 255.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 8 Laporan | | 7 Laporan | 5 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Laporan | 255.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 51.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 51.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | - | - | | - | - | 80.000.000,00 | | | | | | | - | 85.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata | - | | - | - | 80.000.000,00 | | | | | | | - | 85.000.000,00 | |
| | 3.26.02.2.04.0019 | Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 85.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata | - | | - | 18 Pelaku Usaha | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 85.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **165.** | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | **1.260.000.000,00** | | | | | | | | **1.061.200.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya jangkauan pemasaran parawisata*** | | | | | | ***1.260.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.061.200.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | 14.50 Persentase | | 12.60 Persentase | 13.60 Persentase | 1.260.000.000,00 | | | | | | | 14.00 Persentase | 1.061.200.000,00 | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 1.260.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 1.061.200.000,00 | |
| | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | | | | | | 1.260.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kab. Kerinci | | 1.061.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Dokumen | | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 61.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 4 Kegiatan | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1.200.000.000,00 | | | | | | | 4 Kegiatan | 1.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | 60.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 61.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Dokumen | | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 61.200.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 4 Kegiatan | | 4 Kegiatan | 6 Kegiatan | 1.200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Kegiatan | 1.000.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **166.** | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | **220.000.000,00** | | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 220.000.000,00 | | | | | | | - | 125.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | - | | - | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 125.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | - | | - | - | 120.000.000,00 | | | | | | | - | 125.000.000,00 | |
| | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | | | | 120.000.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 125.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | - | | - | 4 Kegiatan | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 125.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **167.** | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | **230.000.000,00** | | | | | | | | **234.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif*** | | | | | | ***230.000.000,00*** | | | | | | | | ***234.600.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | 23.31 Persentase | | 12.27 Persentase | 15.34 Persentase | 230.000.000,00 | | | | | | | 17.79 Persentase | 234.600.000,00 | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kabupaten Kerinci | | 81.600.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia Pariwsiata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kabupaten Kerinci | | 81.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 80.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 81.600.000,00 | |
| | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | 80.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 81.600.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 81.600.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kabupaten Kerinci | | 153.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas pelaku Ekonomi Kreatiff | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | Disparbud Kabupaten Kerinci | | 153.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 120 Orang | | 120 Orang | 120 Orang | 150.000.000,00 | | | | | | | 120 Orang | 153.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 153.000.000,00 | |
| | | Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 120 Orang | | 120 Orang | 35 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 120 Orang | 153.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | **5.943.822.540,00** | | | | | | | | **6.062.698.990,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.943.822.540,00** | | | | | | | | **6.062.698.990,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **5.438.922.540,00** | | | | | | | | **5.547.700.990,00** | |
| **168.** | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.602.522.540,00** | | | | | | | | **4.694.572.990,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.244.522.540,00*** | | | | | | | | ***4.328.572.990,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | BB Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 4.244.522.540,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.328.572.990,00 | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 194.000.000,00 | | | | | | - | | 198.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 194.000.000,00 | | | | | | - | | 198.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | | 72.30 Dokumen | Dokumen | 41.000.000,00 | | | | | | | Dokumen | 42.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 76.30 Dokumen | | 72.30 Dokumen | 73.30 Dokumen | 61.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Dokumen | 62.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 76.30 Dokumen | | 72.30 Dokumen | 73.30 Dokumen | 41.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Dokumen | 42.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 73.30 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Laporan | 52.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 61.000.000,00 | | | - | - | - | | | 62.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 76.30 Dokumen | | 72.30 Dokumen | 5 Dokumen | 61.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Dokumen | 62.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 41.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 42.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 76.30 Dokumen | | 72.30 Dokumen | 2 Dokumen | 41.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Dokumen | 42.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 41.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 42.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | | 72.30 Dokumen | 2 Dokumen | 41.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 42.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 5 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Laporan | 52.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.155.522.540,00 | | | | | | - | | 3.220.572.990,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 3.155.522.540,00 | | | | | | - | | 3.220.572.990,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 76.30 Dokumen | | 72.30 Dokumen | 73.30 Dokumen | 160.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Dokumen | 170.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 73.30 Laporan | 61.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Laporan | 62.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 76.30 Orang/bulan | | 72.30 Orang/bulan | 73.30 Orang/bulan | 2.934.522.540,00 | | | | | | | 74.30 Orang/bulan | 2.988.572.990,00 | |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.934.522.540,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.988.572.990,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 76.30 Orang/bulan | | 72.30 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.934.522.540,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Orang/bulan | 2.988.572.990,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 160.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 170.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 76.30 Dokumen | | 72.30 Dokumen | 12 Dokumen | 160.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Dokumen | 170.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 61.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 18 Laporan | 61.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Laporan | 62.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | - | | 22.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | - | | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 73.30 Laporan | 21.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Laporan | 22.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 4 Laporan | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Laporan | 22.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 114.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 112.000.000,00 | | | | | | - | | 114.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | | 72.30 Paket | Paket | 21.000.000,00 | | | | | | | Paket | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 76.30 Orang | | 72.30 Orang | 73.30 Orang | 91.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Orang | 92.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | | 72.30 Paket | 1 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Paket | 22.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 91.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 92.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 76.30 Orang | | 72.30 Orang | 6 Orang | 91.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Orang | 92.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 304.000.000,00 | | | | | | - | | 308.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 304.000.000,00 | | | | | | - | | 308.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 73.30 Laporan | 171.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Laporan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 76.30 Paket | | 72.30 Paket | 73.30 Paket | 31.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Paket | 32.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 76.30 Paket | | 72.30 Paket | 73.30 Paket | 21.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Paket | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 76.30 Paket | | 72.30 Paket | 73.30 Paket | 81.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Paket | 82.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 81.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 82.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 76.30 Paket | | 72.30 Paket | 1 Paket | 81.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Paket | 82.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 31.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 76.30 Paket | | 72.30 Paket | 1 Paket | 31.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Paket | 32.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 76.30 Paket | | 72.30 Paket | 1 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Paket | 22.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 171.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 172.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 40 Laporan | 171.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Laporan | 172.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 491.000.000,00 | | | | | | - | | 502.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 491.000.000,00 | | | | | | - | | 502.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 73.30 Unit | 410.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Unit | 420.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 73.30 Unit | 81.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Unit | 82.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 81.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 82.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 2 Unit | 81.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Unit | 82.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.23.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 410.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 420.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 1 Unit | 410.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Unit | 420.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 72.000.000,00 | | | | | | - | | 74.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 72.000.000,00 | | | | | | - | | 74.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 73.30 Laporan | 21.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Laporan | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 73.30 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Laporan | 52.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 36 Laporan | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Laporan | 22.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 76.30 Laporan | | 72.30 Laporan | 12 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Laporan | 52.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 253.000.000,00 | | | | | | - | | 256.000.000,00 | |
| | | Nilai SAKIP | | | | | | 253.000.000,00 | | | | | | - | | 256.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 73.30 Unit | 121.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Unit | 122.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 73.30 Unit | 61.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Unit | 62.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 73.30 Unit | 71.000.000,00 | | | | | | | 74.30 Unit | 72.000.000,00 | |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 71.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 72.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 1 Unit | 71.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Unit | 72.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 61.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 1 Unit | 61.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Unit | 62.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 121.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 122.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 76.30 Unit | | 72.30 Unit | 1 Unit | 121.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 74.30 Unit | 122.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **169.** | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **698.700.000,00** | | | | | | | | **712.674.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Layanan Perpustakan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan*** | | | | | | ***698.700.000,00*** | | | | | | | | ***712.674.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks pembangunan literasi masyarakat | 80.75 Indeks | | 79.25 Indeks | 79.70 Indeks | 698.700.000,00 | | | | | | | 80.00 Indeks | 712.674.000,00 | |
| | | | 999.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 80.75 Nilai | | 79.25 Nilai | 79.70 Nilai | 698.700.000,00 | | | | | | | 80.00 Nilai | 712.674.000,00 | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 445.700.000,00 | | | | | | - | | 453.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 445.700.000,00 | | | | | | - | | 453.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 80.75 Eksemplar | | 79.25 Eksemplar | 79.70 Eksemplar | 201.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Eksemplar | 202.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 79.70 Perpustakaan | 46.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Perpustakaan | 47.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 79.70 Perpustakaan | 81.700.000,00 | | | | | | | 80.00 Perpustakaan | 85.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 79.70 Perpustakaan | 51.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Perpustakaan | 52.000.000,00 | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 80.75 Orang | | 79.25 Orang | 79.70 Orang | 66.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Orang | 67.000.000,00 | |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | 81.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 85.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 20 Perpustakaan | 81.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Perpustakaan | 85.700.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 4 Perpustakaan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Perpustakaan | 52.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 66.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 67.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 80.75 Orang | | 79.25 Orang | 50 Orang | 66.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Orang | 67.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | 201.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 202.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 80.75 Eksemplar | | 79.25 Eksemplar | 250 Eksemplar | 201.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Eksemplar | 202.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | 46.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 46.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Perpustakaan | 47.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 253.000.000,00 | | | | | | - | | 258.974.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 253.000.000,00 | | | | | | - | | 258.974.000,00 | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 79.70 Perpustakaan | 91.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Perpustakaan | 92.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 80.75 Lokus | | 79.25 Lokus | 79.70 Lokus | 76.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Lokus | 77.974.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 80.75 Orang | | 79.25 Orang | 79.70 Orang | 86.000.000,00 | | | | | | | 80.00 Orang | 89.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | 91.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 92.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 80.75 Perpustakaan | | 79.25 Perpustakaan | 3 Perpustakaan | 91.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Perpustakaan | 92.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | 86.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 89.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 80.75 Orang | | 79.25 Orang | 12 Orang | 86.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Orang | 89.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | 76.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 77.974.000,00 | |
| | | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 80.75 Lokus | | 79.25 Lokus | 5 Lokus | 76.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80.00 Lokus | 77.974.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **170.** | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | **137.700.000,00** | | | | | | | | **140.454.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno*** | | | | | | ***137.700.000,00*** | | | | | | | | ***140.454.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | 0.04 Persentase | | 0.03 Persentase | 0.04 Persentase | 137.700.000,00 | | | | | | | 0.04 Persentase | 140.454.000,00 | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 137.700.000,00 | | | | | | - | | 140.454.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 137.700.000,00 | | | | | | - | | 140.454.000,00 | |
| | | | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 0.04 Orang | | 0.03 Orang | 0.04 Orang | 61.700.000,00 | | | | | | | 0.04 Orang | 63.454.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 0.04 Eksemplar | | 0.03 Eksemplar | 0.04 Eksemplar | 76.000.000,00 | | | | | | | 0.04 Eksemplar | 77.000.000,00 | |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | 61.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 63.454.000,00 | |
| | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 0.04 Orang | | 0.03 Orang | 3 Orang | 61.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0.04 Orang | 63.454.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | 76.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 77.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 0.04 Eksemplar | | 0.03 Eksemplar | 5 Eksemplar | 76.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0.04 Eksemplar | 77.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **504.900.000,00** | | | | | | | | **514.998.000,00** | |
| **171.** | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | **504.900.000,00** | | | | | | | | **514.998.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis*** | | | | | | ***413.400.000,00*** | | | | | | | | ***421.998.000,00*** | |
| | | | 999.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 30.00 % | | 16.20 % | 18.50 % | 413.400.000,00 | | | | | | | 20.50 % | 421.998.000,00 | |
| | | | 999.Tingkat Ketersediaan Arsip | 70.00 Persentase | | 62.00 Persentase | 65.00 Persentase | 413.400.000,00 | | | | | | | 67.00 Persentase | 421.998.000,00 | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 220.900.000,00 | | | | | | - | | 226.998.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pegelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 220.900.000,00 | | | | | | - | | 226.998.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 70.00 Laporan | | 62.00 Laporan | 65.00 Laporan | 61.000.000,00 | | | | | | | 67.00 Laporan | 62.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 70.00 Berkas | | 62.00 Berkas | 65.00 Berkas | 102.900.000,00 | | | | | | | 67.00 Berkas | 105.998.000,00 | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 70.00 Berkas | | 62.00 Berkas | 65.00 Berkas | 57.000.000,00 | | | | | | | 67.00 Berkas | 59.000.000,00 | |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | 102.900.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 105.998.000,00 | |
| | | Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 70.00 Berkas | | 62.00 Berkas | 3 Berkas | 102.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 67.00 Berkas | 105.998.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | 57.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 59.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 70.00 Berkas | | 62.00 Berkas | 3 Berkas | 57.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 67.00 Berkas | 59.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 61.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 70.00 Laporan | | 62.00 Laporan | 2 Laporan | 61.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 67.00 Laporan | 62.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 101.000.000,00 | | | | | | - | | 102.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 101.000.000,00 | | | | | | - | | 102.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 0.04 Arsip | | 0.03 Arsip | 0.04 Arsip | 101.000.000,00 | | | | | | | 0.04 Arsip | 102.000.000,00 | |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | 101.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 102.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 0.04 Arsip | | 0.03 Arsip | 2 Arsip | 101.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0.04 Arsip | 102.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 183.000.000,00 | | | | | | - | | 186.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 183.000.000,00 | | | | | | - | | 186.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 70.00 Laporan | | 62.00 Laporan | 65.00 Laporan | 91.500.000,00 | | | | | | | 67.00 Laporan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 70.00 Pengguna | | 62.00 Pengguna | 65.00 Pengguna | 91.500.000,00 | | | | | | | 67.00 Pengguna | 93.000.000,00 | |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | 91.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 70.00 Pengguna | | 62.00 Pengguna | 1 Pengguna | 91.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 67.00 Pengguna | 93.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 91.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 70.00 Laporan | | 62.00 Laporan | 1 Laporan | 91.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 67.00 Laporan | 93.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | **Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura** | | | | | | **29.965.164.060,00** | | | | | | | | **30.635.239.341,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **29.965.164.060,00** | | | | | | | | **30.635.239.341,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **29.965.164.060,00** | | | | | | | | **30.635.239.341,00** | |
| **172.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **19.125.754.960,00** | | | | | | | | **19.594.273.631,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***19.085.754.960,00*** | | | | | | | | ***19.594.273.631,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | BB Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 19.085.754.960,00 | | | | | | | BB Kategori | 19.594.273.631,00 | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 170.000.000,00 | | | | | | - | | 77.044.022,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 170.000.000,00 | | | | | | - | | 77.044.022,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 23.661.640,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 70.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 25.521.303,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 15.973.677,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 11.887.402,00 | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.521.303,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 8 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 25.521.303,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.973.677,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 15.973.677,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.661.640,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 23.661.640,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.887.402,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 11.887.402,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 16.630.000.000,00 | | | | | | - | | 16.932.387.040,00 | |
| | | Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 16.630.000.000,00 | | | | | | - | | 16.932.387.040,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 33 Dokumen | | 33 Dokumen | 33 Dokumen | 230.000.000,00 | | | | | | | 33 Dokumen | 241.505.971,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 3.275.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 250 Orang/bulan | | 250 Orang/bulan | 250 Orang/bulan | 16.360.000.000,00 | | | | | | | 250 Orang/bulan | 16.687.605.682,00 | |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 16.360.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.687.605.682,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 250 Orang/bulan | | 250 Orang/bulan | 250 Orang/bulan | 16.360.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 250 Orang/bulan | 16.687.605.682,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 230.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 241.505.971,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 33 Dokumen | | 33 Dokumen | 32 Dokumen | 230.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 33 Dokumen | 241.505.971,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.275.387,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 3.275.387,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 14.378.370,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 14.378.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 14.378.370,00 | |
| | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.378.370,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 14.378.370,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 163.500.000,00 | | | | | | - | | 166.770.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 163.500.000,00 | | | | | | - | | 166.770.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | | 0 Paket | 150 Paket | 112.500.000,00 | | | | | | | 150 Paket | 114.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 51.000.000,00 | | | | | | | 4 Orang | 52.020.000,00 | |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 112.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 114.750.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | | 0 Paket | 150 Paket | 112.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Paket | 114.750.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Orang | 52.020.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 622.134.000,00 | | | | | | - | | 658.650.005,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 622.134.000,00 | | | | | | - | | 658.650.005,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 255.000.000,00 | | | | | | | 30 Laporan | 260.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 15.834.000,00 | | | | | | | 30 Paket | 16.151.596,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 23.000.000,00 | | | | | | | 6 Paket | 24.033.240,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 4.800.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 4.935.169,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 6 Paket | 3 Paket | 323.500.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 353.430.000,00 | |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 4.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.935.169,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 4.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 4.935.169,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 323.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 353.430.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 6 Paket | 3 Paket | 323.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 353.430.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 15.834.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.151.596,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 15.834.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Paket | 16.151.596,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 23.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.033.240,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 23.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Paket | 24.033.240,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 255.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Laporan | 260.100.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 983.497.000,00 | | | | | | - | | 1.207.887.754,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 983.497.000,00 | | | | | | - | | 1.207.887.754,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 684.521.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 591.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | 25 Unit | 12 Unit | 298.976.000,00 | | | | | | | 12 Unit | 616.287.754,00 | |
| | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 684.521.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 591.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 684.521.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 591.600.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 298.976.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 616.287.754,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | 25 Unit | 8 Unit | 298.976.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Unit | 616.287.754,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 314.129.400,00 | | | | | | - | | 320.411.988,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 314.129.400,00 | | | | | | - | | 320.411.988,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 45 Laporan | | 45 Laporan | 45 Laporan | 33.221.400,00 | | | | | | | 45 Laporan | 33.885.828,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 280.908.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 286.526.160,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 33.221.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.885.828,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 45 Laporan | | 45 Laporan | 45 Laporan | 33.221.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Laporan | 33.885.828,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 280.908.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 286.526.160,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 280.908.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 286.526.160,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 212.494.560,00 | | | | | | - | | 216.744.452,00 | |
| | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 212.494.560,00 | | | | | | - | | 216.744.452,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 110.494.560,00 | | | | | | | 6 Unit | 112.704.451,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 102.000.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 104.040.001,00 | |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 110.494.560,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 112.704.451,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 110.494.560,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 112.704.451,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.001,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 104.040.001,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **173.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | **2.941.723.800,00** | | | | | | | | **3.000.558.847,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian*** | | | | | | ***2.941.723.800,00*** | | | | | | | | ***3.000.558.847,00*** | |
| | | | 1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 10 Persentase | | 10 Persentase | 10 Persentase | 2.941.723.800,00 | | | | | | | 10 Persentase | 3.000.558.847,00 | |
| | | | 2.Peningkatan Produksi Hortikultura | 5 Persentase | | 3 Persentase | 5 Persentase | 2.941.723.800,00 | | | | | | | 5 Persentase | 3.000.558.847,00 | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 2.273.867.800,00 | | | | | | - | | 2.319.345.585,00 | |
| | | Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 2.273.867.800,00 | | | | | | - | | 2.319.345.585,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 330 Batang | | Batang | 300 Batang | 126.000.000,00 | | | | | | | 310 Batang | 128.520.000,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | 60 Ton | | 40 Ton | 45 Ton | 358.650.000,00 | | | | | | | 50 Ton | 365.823.000,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 220 Ton | | 180 Ton | 190 Ton | 246.778.800,00 | | | | | | | 200 Ton | 251.714.376,00 | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.483.875.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 1.513.552.561,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 58.564.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 59.735.648,00 | |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | 58.564.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 59.735.648,00 | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 58.564.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 59.735.648,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | 1.483.875.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.513.552.561,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.483.875.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 1.513.552.561,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | 246.778.800,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 251.714.376,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 220 Ton | | 180 Ton | 190 Ton | 246.778.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Ton | 251.714.376,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | 126.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 128.520.000,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 330 Batang | | Batang | 300 Batang | 126.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 310 Batang | 128.520.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.02.2.01.0015 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | | | | 358.650.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 365.823.000,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | 60 Ton | | 40 Ton | 45 Ton | 358.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Ton | 365.823.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 667.856.000,00 | | | | | | - | | 681.213.262,00 | |
| | | Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola | | | | | | 667.856.000,00 | | | | | | - | | 681.213.262,00 | |
| | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | 667.856.000,00 | | | | | | | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | 681.213.262,00 | |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | 667.856.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 681.213.262,00 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | 667.856.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Varietas Unggul Baru (VUB) | 681.213.262,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| **174.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | **5.077.653.900,00** | | | | | | | | **5.179.272.847,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian*** | | | | | | ***5.077.653.900,00*** | | | | | | | | ***5.179.272.847,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | 9000 Ha | | 9000 Ha | 9000 Ha | 5.077.653.900,00 | | | | | | | 9000 Ha | 5.179.272.847,00 | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 2.009.273.900,00 | | | | | | - | | 2.049.524.410,00 | |
| | | Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 2.009.273.900,00 | | | | | | - | | 2.049.524.410,00 | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 112.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 114.249.320,00 | |
| | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 552.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 563.095.692,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 9000 Ha | | 9000 Ha | 9000 Ha | 1.345.273.900,00 | | | | | | | 9000 Ha | 1.372.179.398,00 | |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | 112.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 114.249.320,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 112.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 114.249.320,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | 1.345.273.900,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.372.179.398,00 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 9000 Ha | | 9000 Ha | 12655 Ha | 1.345.273.900,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9000 Ha | 1.372.179.398,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | 552.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 563.095.692,00 | |
| | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 552.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 563.095.692,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 3.068.380.000,00 | | | | | | - | | 3.129.748.437,00 | |
| | | Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 3.068.380.000,00 | | | | | | - | | 3.129.748.437,00 | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 7 Unit | | 6 Unit | 7 Unit | 1.230.026.000,00 | | | | | | | 7 Unit | 1.254.626.826,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 1.838.354.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 1.875.121.611,00 | |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | 1.230.026.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.254.626.826,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 7 Unit | | 6 Unit | 7 Unit | 1.230.026.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Unit | 1.254.626.826,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | 1.838.354.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.875.121.611,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 1.838.354.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 1.875.121.611,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| **175.** | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | **110.767.800,00** | | | | | | | | **97.683.156,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*** | | | | | | ***110.767.800,00*** | | | | | | | | ***97.683.156,00*** | |
| | | | 999.Persentase penanganan bencana pertanian | 100 % | | 100 % | 100 % | 110.767.800,00 | | | | | | | 100 % | 97.683.156,00 | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | 110.767.800,00 | | | | | | - | | 97.683.156,00 | |
| | | Persentase pengendalian dan penanganan bencana pertanian | | | | | | 110.767.800,00 | | | | | | - | | 97.683.156,00 | |
| | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 500 Ha | | 500 Ha | 500 Ha | 51.000.000,00 | | | | | | | 500 Ha | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 500 Ha | | 500 Ha | 500 Ha | 59.767.800,00 | | | | | | | 500 Ha | 45.663.156,00 | |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 59.767.800,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 45.663.156,00 | |
| | | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 500 Ha | | 500 Ha | 500 Ha | 59.767.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 500 Ha | 45.663.156,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 52.020.000,00 | |
| | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 500 Ha | | 500 Ha | 500 Ha | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 500 Ha | 52.020.000,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| **176.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | **2.709.263.600,00** | | | | | | | | **2.763.450.860,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian*** | | | | | | ***2.709.263.600,00*** | | | | | | | | ***2.763.450.860,00*** | |
| | | | 1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 2.709.263.600,00 | | | | | | | 100 Persentase | 2.763.450.860,00 | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | 2.709.263.600,00 | | | | | | - | | 2.763.450.860,00 | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | | | | | | 2.709.263.600,00 | | | | | | - | | 2.763.450.860,00 | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya | - | | - | - | 107.487.600,00 | | | | | | | - | 1.627.366.005,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 930.786.000,00 | | | | | | | - | 109.637.352,00 | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 75.534.000,00 | | | | | | | - | 949.402.512,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | - | | - | - | 1.595.456.000,00 | | | | | | | - | 77.044.991,00 | |
| | 3.27.07.2.01.0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 930.786.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 109.637.352,00 | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 18 Unit | 930.786.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 109.637.352,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.07.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | 107.487.600,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.627.366.005,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya | - | | - | 18 Unit | 107.487.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 1.627.366.005,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.07.2.01.0013 | Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | 75.534.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 949.402.512,00 | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 54 Unit | 75.534.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 949.402.512,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | 3.27.07.2.01.0014 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota | | | | | | 1.595.456.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 77.044.991,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | - | | - | 18 Unit | 1.595.456.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 77.044.991,00 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | | **Dinas Perkebunan dan Peternakan** | | | | | | **18.233.843.710,00** | | | | | | | | **19.021.120.211,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **17.825.843.710,00** | | | | | | | | **18.604.960.211,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **17.825.843.710,00** | | | | | | | | **18.604.960.211,00** | |
| **177.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7.860.916.900,00** | | | | | | | | **8.431.044.865,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***7.755.916.900,00*** | | | | | | | | ***8.369.334.865,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 7.755.916.900,00 | | | | | | | BB Kategori | 8.369.334.865,00 | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | - | | 103.632.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | - | | 103.632.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 60.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 36.414.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 26.010.000,00 | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 36.414.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 36.414.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 20.808.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 20.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 26.010.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 26.010.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6.030.704.480,00 | | | | | | - | | 6.143.668.570,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6.030.704.480,00 | | | | | | - | | 6.143.668.570,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 154.554.480,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 157.645.569,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | | 1 Laporan | 7.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 644 Orang/bulan | | 630 Orang/bulan | 644 Orang/bulan | 5.836.150.000,00 | | | | | | | 644 Orang/bulan | 5.952.873.001,00 | |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.836.150.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 5.952.873.001,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 644 Orang/bulan | | 630 Orang/bulan | 644 Orang/bulan | 5.836.150.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 644 Orang/bulan | 5.952.873.001,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 154.554.480,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 157.645.569,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 154.554.480,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 157.645.569,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 7.140.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 7.140.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 26.010.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 26.010.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 10.404.000,00 | |
| | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 10.404.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 138.750.000,00 | | | | | | - | | 147.849.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 138.750.000,00 | | | | | | - | | 147.849.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 22 Orang | 25 Orang | 76.500.000,00 | | | | | | | 25 Orang | 78.030.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 32.250.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 39.219.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 1 Orang | 3 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | | 3 Orang | 30.600.000,00 | |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 32.250.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 39.219.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 43 Paket | 32.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 39.219.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 30.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 1 Orang | 3 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Orang | 30.600.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 76.500.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 78.030.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 22 Orang | 25 Orang | 76.500.000,00 | Kab. Kerinci | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 25 Orang | 78.030.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 301.280.000,00 | | | | | | - | | 311.742.600,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 301.280.000,00 | | | | | | - | | 311.742.600,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | | 0 Laporan | 10 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | | 10 Laporan | 2.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | | 50 Laporan | 255.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 9.180.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 9.363.600,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 35.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | | 1 Paket | 1.377.000,00 | |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.377.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 1.377.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 9.180.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 9.363.600,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 9.180.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 9.363.600,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 35.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 35.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 35.700.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 3.060.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 2.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | | 0 Laporan | 10 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Laporan | 2.040.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 255.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Laporan | 255.000.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.032.342.420,00 | | | | | | - | | 1.480.841.895,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.032.342.420,00 | | | | | | - | | 1.480.841.895,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 416.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 75.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 88.192.627,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 703.311.420,00 | | | | | | | 1 Unit | 717.377.648,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 102.000.000,00 | | | | | | | 12 Unit | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 152.031.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 155.071.620,00 | |
| | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 703.311.420,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 717.377.648,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 703.311.420,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 717.377.648,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 75.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 88.192.627,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 88.192.627,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 416.160.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 416.160.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 104.040.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Unit | 104.040.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 152.031.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 155.071.620,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 152.031.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 155.071.620,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 42.840.000,00 | | | | | | - | | 44.206.800,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 42.840.000,00 | | | | | | - | | 44.206.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.540.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 28.090.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75 Laporan | | 0 Laporan | 75 Laporan | 0,00 | | | | | | | 75 Laporan | 510.000,00 | |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 510.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 75 Laporan | 510.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 15.606.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 27.540.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 28.090.800,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.540.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 28.090.800,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 135.000.000,00 | | | | | | - | | 188.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 135.000.000,00 | | | | | | - | | 188.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 153.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 35.700.000,00 | |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 35.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 35.700.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 35.700.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 153.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 153.000.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| **178.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | **2.343.600.000,00** | | | | | | | | **2.398.122.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian*** | | | | | | ***2.343.600.000,00*** | | | | | | | | ***2.396.082.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah produksi ternak ruminansia dan unggas | 1236586 Kg | | 1115816 Kg | 1145456 Kg | 2.343.600.000,00 | | | | | | | 1176361 Kg | 2.396.082.000,00 | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 1.361.700.000,00 | | | | | | - | | 1.388.934.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 1.361.700.000,00 | | | | | | - | | 1.388.934.000,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 220 Batang | | 220 Batang | 220 Batang | 1.088.900.000,00 | | | | | | | 220 Batang | 1.110.678.000,00 | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 2.550.000,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 270.300.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 275.706.000,00 | |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | 270.300.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 275.706.000,00 | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 270.300.000,00 | Kab. Kerinci | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 1 Laporan | 275.706.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | 2.500.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 2.550.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | | | 1.088.900.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 1.110.678.000,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 220 Batang | | 220 Batang | 220000 Batang | 1.088.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 220 Batang | 1.110.678.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 210.200.000,00 | | | | | | - | | 218.484.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 210.200.000,00 | | | | | | - | | 218.484.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 210.200.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 214.404.000,00 | |
| | | | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 laporan | | 0 laporan | 1 laporan | 0,00 | | | | | | | 1 laporan | 2.040.000,00 | |
| | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | | 0 Varietas Unggul Baru (VUB) | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 0,00 | | | | | | | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 2.040.000,00 | |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | 210.200.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 214.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 210.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 214.404.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.040.000,00 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | | 0 Varietas Unggul Baru (VUB) | 0 Varietas Unggul Baru (VUB) | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 2.040.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.040.000,00 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 laporan | | 0 laporan | 0 laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 laporan | 2.040.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 771.700.000,00 | | | | | | - | | 790.704.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 771.700.000,00 | | | | | | - | | 790.704.000,00 | |
| | | | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 10 Dosis | | 0 Dosis | 10 Dosis | 0,00 | | | | | | | 10 Dosis | 3.570.000,00 | |
| | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 2700 Ekor | | 2700 Ekor | 2700 Ekor | 771.700.000,00 | | | | | | | 2700 Ekor | 787.134.000,00 | |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 771.700.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 787.134.000,00 | |
| | | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 2700 Ekor | | 2700 Ekor | 2700 Ekor | 771.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2700 Ekor | 787.134.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 3.570.000,00 | |
| | | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 10 Dosis | | 0 Dosis | 0 Dosis | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dosis | 3.570.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| **179.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | **6.830.826.810,00** | | | | | | | | **6.969.483.346,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian*** | | | | | | ***6.830.826.810,00*** | | | | | | | | ***6.969.483.346,00*** | |
| | | | 999.Cakupan luas lahan komoditi perkebunan unggulan (Ha) | 51223 Ha | | 50963 Ha | 51028 Ha | 6.830.826.810,00 | | | | | | | 51093 Ha | 6.969.483.346,00 | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 107.100.000,00 | | | | | | - | | 111.282.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 107.100.000,00 | | | | | | - | | 111.282.000,00 | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | | 1 Laporan | 2.040.000,00 | |
| | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 109.242.000,00 | |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 2.040.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | 107.100.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 109.242.000,00 | |
| | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 109.242.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 6.723.726.810,00 | | | | | | - | | 6.858.201.346,00 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 6.723.726.810,00 | | | | | | - | | 6.858.201.346,00 | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 13 Unit | | 8 Unit | 13 Unit | 2.980.942.272,00 | | | | | | | 13 Unit | 3.040.561.118,00 | |
| | | | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Unit | | 3 Unit | 4 Unit | 950.442.269,00 | | | | | | | 4 Unit | 969.451.114,00 | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 795.742.269,00 | | | | | | | 4 Unit | 811.657.114,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 2004 Unit | | 7535 Unit | 2004 Unit | 1.994.100.000,00 | | | | | | | 2004 Unit | 2.033.982.000,00 | |
| | | | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 2.500.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 2.550.000,00 | |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | 950.442.269,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 969.451.114,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Unit | | 3 Unit | 4 Unit | 950.442.269,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 969.451.114,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | 2.980.942.272,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 3.040.561.118,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 13 Unit | | 8 Unit | 13 Unit | 2.980.942.272,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 13 Unit | 3.040.561.118,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | 1.994.100.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.033.982.000,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 2004 Unit | | 7535 Unit | 2004 Unit | 1.994.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2004 Unit | 2.033.982.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | 795.742.269,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 811.657.114,00 | |
| | | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 795.742.269,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 811.657.114,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | | | | 2.500.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 2.550.000,00 | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 2.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 2.550.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| **180.** | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | **280.500.000,00** | | | | | | | | **286.110.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*** | | | | | | ***219.300.000,00*** | | | | | | | | ***223.686.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 219.300.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 223.686.000,00 | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 122.400.000,00 | | | | | | - | | 124.848.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 122.400.000,00 | | | | | | - | | 124.848.000,00 | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 122.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 124.848.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 122.400.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 124.848.000,00 | |
| | | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 122.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 124.848.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 61.200.000,00 | | | | | | - | | 62.424.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 61.200.000,00 | | | | | | - | | 62.424.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 61.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 62.424.000,00 | |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | 61.200.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 62.424.000,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 62.424.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 96.900.000,00 | | | | | | - | | 98.838.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 96.900.000,00 | | | | | | - | | 98.838.000,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | 5 Unit Usaha | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 61.200.000,00 | | | | | | | 5 Unit Usaha | 62.424.000,00 | |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | 35.700.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 36.414.000,00 | |
| | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | 61.200.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 62.424.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | 5 Unit Usaha | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit Usaha | 62.424.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| **181.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | **510.000.000,00** | | | | | | | | **520.200.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian*** | | | | | | ***357.000.000,00*** | | | | | | | | ***364.140.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Cakupan bina kelompok tani | 325 Kelompok Tani | | 285 Kelompok Tani | 295 Kelompok Tani | 357.000.000,00 | | | | | | | 305 Kelompok Tani | 364.140.000,00 | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | 510.000.000,00 | | | | | | - | | 520.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan Pertanian | | | | | | 510.000.000,00 | | | | | | - | | 520.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya | - | | - | - | 153.000.000,00 | | | | | | | - | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 153.000.000,00 | | | | | | | - | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | - | | - | - | 204.000.000,00 | | | | | | | - | 208.080.000,00 | |
| | 3.27.07.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | 153.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya | - | | - | 20 Unit | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | - | 156.060.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.07.2.01.0013 | Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | 153.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 25 Unit | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | - | 156.060.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | 3.27.07.2.01.0014 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 208.080.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | - | | - | 8 Unit | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 208.080.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | **X** | | | | | | | **408.000.000,00** | | | | | | | | **416.160.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **408.000.000,00** | | | | | | | | **416.160.000,00** | |
| **182.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **408.000.000,00** | | | | | | | | **416.160.000,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 408.000.000,00 | | | | | | | - | 416.160.000,00 | |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 408.000.000,00 | | | | | | - | | 416.160.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 408.000.000,00 | | | | | | - | | 416.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 153.000.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 255.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 260.100.000,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 153.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 156.060.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 156.060.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | X.XX.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 255.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 260.100.000,00 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | | | | | | **11.613.290.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **11.613.290.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **10.493.090.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **183.** | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8.465.090.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***8.217.590.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | A Kategori | A Kategori | 8.217.590.000,00 | | | | | | | A Kategori | 0,00 | |
| | | Jumlah Dokumen, perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 7.178.890.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Keuangan | | | | | | 7.178.890.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | | 60 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 6.928.890.000,00 | | | | | | | 70 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 6.928.890.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | | 60 Orang/bulan | 81 Orang/bulan | 6.928.890.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 70 Orang/bulan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Pelaksanaan Penatusahaan BMD SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 12.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 225.750.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan Adminstrasi Kepegawaia Perangkat Daerah | | | | | | 225.750.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | | 60 Paket | 60 Paket | 60.750.000,00 | | | | | | | 60 Paket | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 150.000.000,00 | | | | | | | 15 Orang | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 60.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | | 60 Paket | 81 Paket | 60.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Paket | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Orang | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 431.650.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemenuhan penyediaan kebutuhan Administrasi UMUM | | | | | | 431.650.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65 Laporan | | 65 Laporan | 65 Laporan | 215.000.000,00 | | | | | | | 65 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 42.350.000,00 | | | | | | | 15 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 30.800.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 6.000.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 137.500.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 6.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 42.350.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 42.350.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Paket | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 30.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 30.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 215.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65 Laporan | | 65 Laporan | 65 Laporan | 215.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 65 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 82.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Unit barang | | | | | | 82.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 82.500.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.30.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 82.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 82.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 96.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 96.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 55.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 41.800.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 55.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 41.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 41.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 217.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 217.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 80.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 137.500.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 137.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 137.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Dokumen, perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3.30.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | - | | - | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **184.** | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | **48.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha*** | | | | | | ***48.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | 100 Persentase | | 65 Persentase | 75 Persentase | 48.000.000,00 | | | | | | | 90 Persentase | 0,00 | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | | | | 48.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | | | | 48.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 48.000.000,00 | | | | | | | 50 Dokumen | 0,00 | |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | 48.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 48.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **185.** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | **1.280.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi*** | | | | | | ***1.280.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | 57.14 Persentase | | 35.71 Persentase | 42.86 Persentase | 1.280.000.000,00 | | | | | | | 50 Persentase | 0,00 | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 1.005.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana Prasasarana Pasar | | | | | | 1.005.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 80.000.000,00 | | | | | | | 14 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 925.000.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 0,00 | |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 925.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 925.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 14 Unit | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | 275.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tebinaya Pengelola Sarana distribusi pasar | | | | | | 275.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 14 Dokumen | | 12 Dokumen | Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | | 14 Dokumen | 0,00 | |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 250.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 6 Dokumen | | 3 Dokumen | 14 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 14 Dokumen | | 12 Dokumen | 14 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 14 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **186.** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | **280.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kelancara distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*** | | | | | | ***225.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 2.51 Persentase | | 2.51 Persentase | 2.51 Persentase | 225.000.000,00 | | | | | | | 2.51 Persentase | 0,00 | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | 55.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | 175.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | 175.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 120.000.000,00 | | | | | | | 18 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 114 Laporan | | 114 Laporan | 114 Laporan | 55.000.000,00 | | | | | | | 114 Laporan | 0,00 | |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | 55.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 114 Laporan | | 114 Laporan | 114 Laporan | 55.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 114 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | 120.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP2. Pengingkatan Ekonomi Pertanian | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **187.** | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor*** | | | | | | ***300.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai Ekspor Barang | 1469.90 Nilai | | 1385.12 Nilai | 1412.82 Nilai | 300.000.000,00 | | | | | | | 1441.07 Nilai | 0,00 | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah promosi Dagang Produk Dalam Negeri | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 24 Pelaku Usaha | | 24 Pelaku Usaha | 24 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | | | | | | | 24 Pelaku Usaha | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 25 Pelaku Usaha | | 25 Pelaku Usaha | 25 Pelaku Usaha | 200.000.000,00 | | | | | | | 25 Pelaku Usaha | 0,00 | |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 25 Pelaku Usaha | | 25 Pelaku Usaha | 25 Pelaku Usaha | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Pelaku Usaha | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | | 0,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 24 Pelaku Usaha | | 24 Pelaku Usaha | 24 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Pelaku Usaha | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Jumlah promosi Dagang Produk Dalam Negeri | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | - | | - | 24 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **188.** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | **120.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk*** | | | | | | ***120.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase penanganan pengaduan konsumen | 9.62 % | | 5.77 % | 6.73 % | 120.000.000,00 | | | | | | | 7.69 % | 0,00 | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah UTTP yang ditera, dibina dan diawasi | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 650 Unit | | 500 Unit | 550 Unit | 120.000.000,00 | | | | | | | 600 Unit | 0,00 | |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | 120.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 650 Unit | | 500 Unit | 550 Unit | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 600 Unit | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **1.120.200.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **189.** | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | **1.120.200.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya realisasi pembangunan industri*** | | | | | | ***1.120.200.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | 2.86 (%) | | 2.77 (%) | 2.79 (%) | 1.120.200.000,00 | | | | | | | 2.80 (%) | 0,00 | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | 1.120.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) | | | | | | 1.120.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 5 Dokumen | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 110.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 2 Dokumen | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 220.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | | 4 Dokumen | Dokumen | 590.200.000,00 | | | | | | | Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | 220.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 2 Dokumen | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 220.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | 110.000.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 5 Dokumen | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 110.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | 590.200.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 590.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 0,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | **Bagian Pemerintahan** | | | | | | **846.600.000,00** | | | | | | | | **863.532.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **846.600.000,00** | | | | | | | | **863.532.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **846.600.000,00** | | | | | | | | **863.532.000,00** | |
| **190.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **9.283.600.000,00** | | | | | | | | **9.237.168.001,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat*** | | | | | | ***846.600.000,00*** | | | | | | | | ***863.532.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Reformasi Hukum | 72.62 Indeks | | 62.14 Indeks | 64.76 Indeks | 846.600.000,00 | | | | | | | 67.38 Indeks | 863.532.000,00 | |
| | | | 3.Hafidz Al Qur'''''''an | 2813 Orang | | 1913 Orang | 2213 Orang | 846.600.000,00 | | | | | | | 2513 Orang | 863.532.000,00 | |
| | | | 3.Persentase Capaian Aksi HAM | 90 % | | 81 % | 83 % | 846.600.000,00 | | | | | | | 85 % | 863.532.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 4.Capaian SPM | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 846.600.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 863.532.000,00 | |
| | | | 5.Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) | 3.5 Nilai | | 2.5 Nilai | 2.7 Nilai | 846.600.000,00 | | | | | | | 2.9 Nilai | 863.532.000,00 | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | 693.600.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 707.472.000,00 | |
| | | Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan | | | | | | 693.600.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 707.472.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 224.400.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 228.888.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 9 Dokumen | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 163.200.000,00 | | | | | | | 9 Dokumen | 166.464.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 306.000.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 312.120.000,00 | |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | 163.200.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 166.464.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 9 Dokumen | | 9 Dokumen | 7 Dokumen | 163.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Dokumen | 166.464.000,00 | Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | 306.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 312.120.000,00 | Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | 224.400.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 228.888.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 224.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 228.888.000,00 | Bagian Pemerintahan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | | | | 153.000.000,00 | | | | | | OPD, instansi lainnya dan Masyarakat | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya kerjasama daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan | | | | | | 153.000.000,00 | | | | | | OPD, instansi lainnya dan Masyarakat | | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 52.020.000,00 | |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | 102.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 104.040.000,00 | Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | 51.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 52.020.000,00 | Bagian Pemerintahan |
| | | **Bagian Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | **7.570.000.000,00** | | | | | | | | **7.489.296.001,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **7.570.000.000,00** | | | | | | | | **7.489.296.001,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **7.570.000.000,00** | | | | | | | | **7.489.296.001,00** | |
| **191.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **9.283.600.000,00** | | | | | | | | **9.237.168.001,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat*** | | | | | | ***7.570.000.000,00*** | | | | | | | | ***7.489.296.001,00*** | |
| | | | 1.Indeks Reformasi Hukum | 72.62 Indeks | | 62.14 Indeks | 64.76 Indeks | 7.570.000.000,00 | | | | | | | 67.38 Indeks | 7.489.296.001,00 | |
| | | | 3.Hafidz Al Qur"""""an | 2813 Orang | | 1913 Orang | 2213 Orang | 7.570.000.000,00 | | | | | | | 2513 Orang | 7.489.296.001,00 | |
| | | | 3.Persentase Capaian Aksi HAM | 90 % | | 81 % | 83 % | 7.570.000.000,00 | | | | | | | 85 % | 7.489.296.001,00 | |
| | | | 4.Capaian SPM | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 7.570.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 7.489.296.001,00 | |
| | | | 5.Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) | 3.5 Nilai | | 2.5 Nilai | 2.7 Nilai | 7.570.000.000,00 | | | | | | | 2.9 Nilai | 7.489.296.001,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 7.570.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 7.489.296.001,00 | |
| | | Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat | | | | | | 7.570.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 7.489.296.001,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.200.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 2.321.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.250.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 4.647.896.001,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 120.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 520.200.000,00 | |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | 2.200.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 2.321.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 2.200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 2.321.200.000,00 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | 120.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 520.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 520.200.000,00 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | 5.250.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.647.896.001,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.250.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 4.647.896.001,00 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | **Bagian Hukum** | | | | | **867.000.000,00** | | | | | | | | **884.340.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | **867.000.000,00** | | | | | | | | **884.340.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | **867.000.000,00** | | | | | | | | **884.340.000,00** | |
| **192.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | **9.283.600.000,00** | | | | | | | | **9.237.168.001,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat*** | | | | | ***510.000.000,00*** | | | | | | | | ***520.200.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Reformasi Hukum | 72.62 Indeks | | 62.14 Indeks | 64.76 Indeks | 510.000.000,00 | | | | | | | 67.38 Indeks | 520.200.000,00 | |
| | | | 3.Hafidz Al Qur"""""an | 2813 Orang | | 1913 Orang | 2213 Orang | 510.000.000,00 | | | | | | | 2513 Orang | 520.200.000,00 | |
| | | | 3.Persentase Capaian Aksi HAM | 90 % | | 81 % | 83 % | 510.000.000,00 | | | | | | | 85 % | 520.200.000,00 | |
| | | | 4.Capaian SPM | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 510.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 520.200.000,00 | |
| | | | 5.Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) | 3.5 Nilai | | 2.5 Nilai | 2.7 Nilai | 510.000.000,00 | | | | | | | 2.9 Nilai | 520.200.000,00 | |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | 867.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 884.340.000,00 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum | | | | | | 867.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 884.340.000,00 | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 5 Kasus | | 5 Kasus | 5 Kasus | 357.000.000,00 | | | | | | | 5 Kasus | 364.140.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 342 Dokumen | | 342 Dokumen | 342 Dokumen | 357.000.000,00 | | | | | | | 342 Dokumen | 364.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 153.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 156.060.000,00 | |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | 357.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 364.140.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 342 Dokumen | | 342 Dokumen | 5 Dokumen | 357.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 342 Dokumen | 364.140.000,00 | Bagian Hukum |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | 357.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 364.140.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 5 Kasus | | 5 Kasus | 5 Kasus | 357.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Kasus | 364.140.000,00 | Bagian Hukum |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum | | | | | | 153.000.000,00 | | | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 156.060.000,00 | Bagian Hukum |
| | | **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam** | | | | | | **1.018.000.000,00** | | | | | | | | **1.061.260.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **1.018.000.000,00** | | | | | | | | **1.061.260.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **1.018.000.000,00** | | | | | | | | **1.061.260.000,00** | |
| **193.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **4.167.500.000,00** | | | | | | | | **4.286.350.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*** | | | | | | ***898.000.000,00*** | | | | | | | | ***931.260.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Inflasi | 2.07 (%) | | 2.07 (%) | 2.07 (%) | 898.000.000,00 | | | | | | | 2.07 (%) | 931.260.000,00 | |
| | | | 2.Tingkat Kematangan UKPBJ | 9 Angka | | 9 Angka | 9 Angka | 898.000.000,00 | | | | | | | 9 Angka | 931.260.000,00 | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | 663.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 676.260.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya kebijakan perekonomian | | | | | | 663.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 676.260.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 280.500.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 286.110.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 153.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 229.500.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 234.090.000,00 | |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | 280.500.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 286.110.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 280.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 286.110.000,00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | 229.500.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 234.090.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 6 Laporan | | 6 Laporan | 3 Laporan | 229.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 234.090.000,00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 156.060.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 156.060.000,00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | | | 355.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 385.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam | | | | | | 355.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 385.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 115.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 120.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 120.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 130.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | 120.000.000,00 | | | 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 130.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 130.000.000,00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | 120.000.000,00 | | | 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 130.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 130.000.000,00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | 115.000.000,00 | | | 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 125.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 115.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 125.000.000,00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | **Bagian Adminstrasi Pembangunan** | | | | | | **803.500.000,00** | | | | | | | | **832.170.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **803.500.000,00** | | | | | | | | **832.170.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **803.500.000,00** | | | | | | | | **832.170.000,00** | |
| **194.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **43.717.258.098,00** | | | | | | | | **44.788.207.259,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***153.000.000,00*** | | | | | | | | ***156.060.000,00*** | |
| | | | 3.Indeks Pelayanan Publik. | 5 Indeks | | 4.4 Indeks | 4.6 Indeks | 153.000.000,00 | | | | | | | 4.8 Indeks | 156.060.000,00 | |
| | | | 999.Indeks Reformasi Birokrasi | 92 Indeks | | 78 Indeks | 82 Indeks | 153.000.000,00 | | | | | | | 86 Indeks | 156.060.000,00 | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 153.000.000,00 | | | | | | | BB Kategori | 156.060.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 153.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 153.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 153.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 156.060.000,00 | |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 153.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 156.060.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 7 Dokumen | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 156.060.000,00 | Bagian Adminstrasi Pembangunan |
| **195.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **4.167.500.000,00** | | | | | | | | **4.286.350.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*** | | | | | | ***650.500.000,00*** | | | | | | | | ***676.110.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Inflasi | 2.07 (%) | | 2.07 (%) | 2.07 (%) | 650.500.000,00 | | | | | | | 2.07 (%) | 676.110.000,00 | |
| | | | 2.Tingkat Kematangan UKPBJ | 9 Angka | | 9 Angka | 9 Angka | 650.500.000,00 | | | | | | | 9 Angka | 676.110.000,00 | |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | | | 650.500.000,00 | | | | | | OPD | | 676.110.000,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi pembangunan | | | | | | 650.500.000,00 | | | | | | OPD | | 676.110.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 190.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 280.500.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 286.110.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 180.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 190.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | 190.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 190.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 200.000.000,00 | Bagian Adminstrasi Pembangunan |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | 180.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 190.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 5 Laporan | 180.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 190.000.000,00 | Bagian Adminstrasi Pembangunan |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | 280.500.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 286.110.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 6 Laporan | 280.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 286.110.000,00 | Bagian Adminstrasi Pembangunan |
| | | **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | **2.499.000.000,00** | | | | | | | | **2.548.980.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **2.499.000.000,00** | | | | | | | | **2.548.980.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **2.499.000.000,00** | | | | | | | | **2.548.980.000,00** | |
| **196.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **4.167.500.000,00** | | | | | | | | **4.286.350.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*** | | | | | | ***2.499.000.000,00*** | | | | | | | | ***2.548.980.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Inflasi | 2.07 (%) | | 2.07 (%) | 2.07 (%) | 2.499.000.000,00 | | | | | | | 2.07 (%) | 2.548.980.000,00 | |
| | | | 2.Tingkat Kematangan UKPBJ | 9 Angka | | 9 Angka | 9 Angka | 2.499.000.000,00 | | | | | | | 9 Angka | 2.548.980.000,00 | |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 2.499.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 2.548.980.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa | | | | | | 2.499.000.000,00 | | | | | | OPD dan Masyarakat | | 2.548.980.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 400 Dokumen | | 400 Dokumen | 400 Dokumen | 969.000.000,00 | | | | | | | 400 Dokumen | 988.380.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.020.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 1.040.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 120 Orang | | 120 Orang | 120 Orang | 510.000.000,00 | | | | | | | 120 Orang | 520.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 1.020.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.040.400.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 1.020.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 1.040.400.000,00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | 969.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 988.380.000,00 | |
| | | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 400 Dokumen | | 400 Dokumen | 6 Dokumen | 969.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 400 Dokumen | 988.380.000,00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 510.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 520.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 120 Orang | | 120 Orang | 120 Orang | 510.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 120 Orang | 520.200.000,00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | **836.400.000,00** | | | | | | | | **853.128.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **836.400.000,00** | | | | | | | | **853.128.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **836.400.000,00** | | | | | | | | **853.128.000,00** | |
| **197.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **43.717.258.098,00** | | | | | | | | **44.788.207.259,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***836.400.000,00*** | | | | | | | | ***853.128.000,00*** | |
| | | | 3.Indeks Pelayanan Publik. | 5 Indeks | | 4.4 Indeks | 4.6 Indeks | 836.400.000,00 | | | | | | | 4.8 Indeks | 853.128.000,00 | |
| | | | 999.Indeks Reformasi Birokrasi | 92 Indeks | | 78 Indeks | 82 Indeks | 836.400.000,00 | | | | | | | 86 Indeks | 853.128.000,00 | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 836.400.000,00 | | | | | | | BB Kategori | 853.128.000,00 | |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | 836.400.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 853.128.000,00 | |
| | | Terlaksananya Protokol dan Komunikasi pimpinan | | | | | | 836.400.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 853.128.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 160 Laporan | | 160 Laporan | 160 Laporan | 357.000.000,00 | | | | | | | 160 Laporan | 364.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 160 Laporan | | 160 Laporan | 160 Laporan | 173.400.000,00 | | | | | | | 160 Laporan | 176.868.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 160 Laporan | | 160 Laporan | 160 Laporan | 306.000.000,00 | | | | | | | 160 Laporan | 312.120.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | 357.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 364.140.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 160 Laporan | | 160 Laporan | 120 Laporan | 357.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 160 Laporan | 364.140.000,00 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | 173.400.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 176.868.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 160 Laporan | | 160 Laporan | 120 Laporan | 173.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 160 Laporan | 176.868.000,00 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | 306.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 160 Laporan | | 160 Laporan | 120 Laporan | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 160 Laporan | 312.120.000,00 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | **Bagian Organisasi** | | | | | | **867.000.000,00** | | | | | | | | **884.340.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **867.000.000,00** | | | | | | | | **884.340.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **867.000.000,00** | | | | | | | | **884.340.000,00** | |
| **198.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **43.717.258.098,00** | | | | | | | | **44.788.207.259,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***561.000.000,00*** | | | | | | | | ***572.220.000,00*** | |
| | | | 3.Indeks Pelayanan Publik. | 5 Indeks | | 4.4 Indeks | 4.6 Indeks | 561.000.000,00 | | | | | | | 4.8 Indeks | 572.220.000,00 | |
| | | | 999.Indeks Reformasi Birokrasi | 92 Indeks | | 78 Indeks | 82 Indeks | 561.000.000,00 | | | | | | | 86 Indeks | 572.220.000,00 | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 561.000.000,00 | | | | | | | BB Kategori | 572.220.000,00 | |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | | | | | | 867.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 884.340.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan Organisasi | | | | | | 867.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 884.340.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 255.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 306.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 306.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 312.120.000,00 | |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | 255.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 260.100.000,00 | Bagian Organisasi |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | 306.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 6 Laporan | | 6 Laporan | 4 Laporan | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 312.120.000,00 | Bagian Organisasi |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | 306.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 312.120.000,00 | Bagian Organisasi |
| | | **Bagian Umum** | | | | | | **41.860.858.098,00** | | | | | | | | **42.894.679.259,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **41.860.858.098,00** | | | | | | | | **42.894.679.259,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **41.860.858.098,00** | | | | | | | | **42.894.679.259,00** | |
| **199.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **43.717.258.098,00** | | | | | | | | **44.788.207.259,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***40.694.858.098,00*** | | | | | | | | ***42.062.359.259,00*** | |
| | | | 3.Indeks Pelayanan Publik. | 5 Indeks | | 4.4 Indeks | 4.6 Indeks | 40.694.858.098,00 | | | | | | | 4.8 Indeks | 42.062.359.259,00 | |
| | | | 999.Indeks Reformasi Birokrasi | 92 Indeks | | 78 Indeks | 82 Indeks | 40.694.858.098,00 | | | | | | | 86 Indeks | 42.062.359.259,00 | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 40.694.858.098,00 | | | | | | | BB Kategori | 42.062.359.259,00 | |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 20.963.463.560,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 21.493.912.831,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 20.963.463.560,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 21.493.912.831,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 969.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 988.380.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 85 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | 19.994.463.560,00 | | | | | | | 85 Orang/bulan | 20.505.532.831,00 | |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 19.994.463.560,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.505.532.831,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 85 Orang/bulan | 176 Orang/bulan | 19.994.463.560,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 85 Orang/bulan | 20.505.532.831,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 969.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 988.380.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 969.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 988.380.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 135.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 83.232.000,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | 135.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 83.232.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 85 Paket | | 85 Paket | 85 Paket | 135.000.000,00 | | | | | | | 85 Paket | 83.232.000,00 | |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 135.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 83.232.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 85 Paket | | 85 Paket | 176 Paket | 135.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 85 Paket | 83.232.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 7.944.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 8.120.880.000,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 7.944.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 8.120.880.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.346.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 2.392.920.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.162.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 3.225.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 350.000.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 360.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 80.000.000,00 | | | | | | | 10 Paket | 90.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 170.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 816.000.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 832.320.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket | | 7 Paket | 7 Paket | 1.020.000.000,00 | | | | | | | 7 Paket | 1.040.400.000,00 | |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 170.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 180.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 2 Paket | 170.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 180.000.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 816.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 832.320.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 816.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 832.320.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 1.020.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.040.400.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket | | 7 Paket | 7 Paket | 1.020.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Paket | 1.040.400.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 350.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 360.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 1 Paket | 350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 360.000.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 80.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 90.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 90.000.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 2.346.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.392.920.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.346.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 2.392.920.000,00 | Bagian Umum |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 3.162.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.225.240.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.162.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 3.225.240.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.103.994.538,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 3.166.074.428,00 | |
| | | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 3.103.994.538,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 3.166.074.428,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 2.287.994.538,00 | | | | | | | 9 Unit | 2.333.754.428,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 816.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 832.320.000,00 | |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 2.287.994.538,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.333.754.428,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 Unit | | 9 Unit | 5 Unit | 2.287.994.538,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Unit | 2.333.754.428,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 816.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 832.320.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 816.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 832.320.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 3.150.600.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 3.200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 3.150.600.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 3.200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 739.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 750.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.411.600.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 2.450.000.000,00 | |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 739.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 750.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 739.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 750.000.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 2.411.600.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.450.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 2.411.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 2.450.000.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 2.835.600.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 2.892.312.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | 2.835.600.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 2.892.312.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | | 34 Unit | 34 Unit | 1.836.000.000,00 | | | | | | | 34 Unit | 1.872.720.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 438.600.000,00 | | | | | | | 7 Unit | 447.372.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 510.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 520.200.000,00 | |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 438.600.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 447.372.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 438.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Unit | 447.372.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 1.836.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.872.720.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | | 34 Unit | 34 Unit | 1.836.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 34 Unit | 1.872.720.000,00 | Bagian Umum |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 52.020.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 510.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 520.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 510.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 520.200.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 974.200.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 1.129.188.000,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi kuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | | | 974.200.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 1.129.188.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 350.000.000,00 | | | | | | | 2 Orang/Bulan | 166.464.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 300.000.000,00 | | | | | | | 2 Orang/Bulan | 624.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 110.000.000,00 | | | | | | | 2 Orang | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 214.200.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 218.484.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 300.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 624.240.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang/Bulan | 624.240.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 214.200.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 218.484.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 214.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 218.484.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 110.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 110.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang | 120.000.000,00 | Bagian Umum |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 350.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 166.464.000,00 | |
| | | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang/Bulan | 166.464.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | 2.754.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 2.809.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah | | | | | | 2.754.000.000,00 | | | | | | Setda Kerinci | | 2.809.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 1.530.000.000,00 | | | | | | | 2 Paket | 1.560.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.224.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 1.248.480.000,00 | |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | 1.530.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.560.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 1 Paket | 1.530.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Paket | 1.560.600.000,00 | Bagian Umum |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | 1.224.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.248.480.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.224.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 1.248.480.000,00 | Bagian Umum |
| | | **Sekretariat DPRD** | | | | | | **38.614.054.200,00** | | | | | | | | **45.055.646.020,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **38.614.054.200,00** | | | | | | | | **45.055.646.020,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **38.614.054.200,00** | | | | | | | | **45.055.646.020,00** | |
| **200.** | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **24.305.192.340,00** | | | | | | | | **27.795.223.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***24.305.192.340,00*** | | | | | | | | ***27.590.223.300,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 24.305.192.340,00 | | | | | | | B Kategori | 27.590.223.300,00 | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 67.636.500,00 | | | | | | - | | 69.327.412,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 67.636.500,00 | | | | | | - | | 69.327.412,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 26.979.900,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 27.654.397,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 24.156.600,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 24.760.515,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 16.500.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 16.912.500,00 | |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 26.979.900,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 27.654.397,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 6 Dokumen | 26.979.900,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 27.654.397,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 24.156.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.760.515,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 24.156.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 24.760.515,00 | Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 16.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.912.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 16.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 16.912.500,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.281.360.200,00 | | | | | | - | | 4.388.363.455,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 4.281.360.200,00 | | | | | | - | | 4.388.363.455,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 260.440.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 266.920.250,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.920.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 21.443.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/bulan | | 32 Orang/bulan | 32 Orang/bulan | 4.000.000.200,00 | | | | | | | 33 Orang/bulan | 4.100.000.205,00 | |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.000.000.200,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.100.000.205,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/bulan | | 32 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 4.000.000.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 33 Orang/bulan | 4.100.000.205,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 260.440.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 266.920.250,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 260.440.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 266.920.250,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 20.920.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.443.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 11 Laporan | 20.920.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 21.443.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 227.351.750,00 | | | | | | - | | 233.036.068,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah | | | | | | 227.351.750,00 | | | | | | - | | 233.036.068,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 181.852.750,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 186.399.068,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 45.499.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 46.637.000,00 | |
| | 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 181.852.750,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 186.399.068,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 181.852.750,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 186.399.068,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 45.499.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.637.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 8 Laporan | 45.499.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 46.637.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 381.250.000,00 | | | | | | - | | 390.781.250,00 | |
| | | Terlaksananyya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 381.250.000,00 | | | | | | - | | 390.781.250,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 41.250.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 42.281.250,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 Orang | | 18 Orang | 18 Orang | 340.000.000,00 | | | | | | | 18 Orang | 348.500.000,00 | |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 41.250.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 42.281.250,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 55 Paket | 41.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 42.281.250,00 | Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 340.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 348.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 Orang | | 18 Orang | 25 Orang | 340.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Orang | 348.500.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | | Terlaksananya Adminsitasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 2.251.488.400,00 | | | | | | - | | 2.428.726.840,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 161.950.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 25 Laporan | 299.999.900,00 | | | | | | | 25 Laporan | 307.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 349.999.100,00 | | | | | | | 3 Paket | 410.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 131.357.700,00 | | | | | | | 1 Paket | 134.641.642,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 148.373.400,00 | | | | | | | 1 Paket | 152.082.940,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 3 Paket | 1.096.758.300,00 | | | | | | | 4 Paket | 1.124.177.258,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 76.875.000,00 | |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 148.373.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 152.082.940,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 148.373.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 152.082.940,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 1.096.758.300,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.124.177.258,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 1.096.758.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Paket | 1.124.177.258,00 | Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 75.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 76.875.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 3 Paket | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 76.875.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 349.999.100,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 410.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 2 Paket | 349.999.100,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 410.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 131.357.700,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 134.641.642,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 131.357.700,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 134.641.642,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 161.950.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 161.950.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 299.999.900,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 307.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 30 Laporan | 299.999.900,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Laporan | 307.500.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 2.200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 2.200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | | 0 Unit | 2.200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Unit | 2.200.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.399.749.800,00 | | | | | | - | | 1.893.683.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.399.749.800,00 | | | | | | - | | 1.893.683.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 199.750.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.199.999.800,00 | | | | | | | 12 Laporan | 1.688.683.000,00 | |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 199.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 205.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 199.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 205.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 1.199.999.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.688.683.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.199.999.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 1.688.683.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 724.132.500,00 | | | | | | - | | 844.776.813,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 724.132.500,00 | | | | | | - | | 844.776.813,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 99.960.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 203.920.000,00 | | | | | | | 7 Unit | 209.018.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 248.690.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 254.907.250,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 52 Unit | | 52 Unit | 52 Unit | 171.562.500,00 | | | | | | | 52 Unit | 175.851.563,00 | |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 248.690.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 254.907.250,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 248.690.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 254.907.250,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 203.920.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 209.018.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | | 7 Unit | 4 Unit | 203.920.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Unit | 209.018.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 171.562.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 175.851.563,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 52 Unit | | 52 Unit | 262 Unit | 171.562.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 52 Unit | 175.851.563,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 99.960.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 205.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 99.960.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 205.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 14.972.223.190,00 | | | | | | - | | 15.346.528.462,00 | |
| | | Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 14.972.223.190,00 | | | | | | - | | 15.346.528.462,00 | |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 30 Orang/Bulan | | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | 13.960.000.300,00 | | | | | | | 30 Orang/Bulan | 14.309.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 585.222.890,00 | | | | | | | 30 Orang | 599.853.462,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 427.000.000,00 | | | | | | | 6 Paket | 437.675.000,00 | |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | 13.960.000.300,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.309.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 30 Orang/Bulan | | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | 13.960.000.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang/Bulan | 14.309.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | 427.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 437.675.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 180 Paket | 427.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Paket | 437.675.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | 585.222.890,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 599.853.462,00 | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 585.222.890,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang | 599.853.462,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 2.251.488.400,00 | | | | | | - | | 2.428.726.840,00 | |
| | | Terlaksananya Adminsitasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 2.251.488.400,00 | | | | | | - | | 2.428.726.840,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - | | - | - | 60.000.000,00 | | | | | | | - | 61.500.000,00 | |
| | 4.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 61.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - | | - | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 61.500.000,00 | Sekretariat DPRD |
| **201.** | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | **14.308.861.860,00** | | | | | | | | **17.260.422.720,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan*** | | | | | | ***11.719.610.660,00*** | | | | | | | | ***14.145.190.240,00*** | |
| | | | 1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 11.719.610.660,00 | | | | | | | 100 Persentase | 14.145.190.240,00 | |
| | | | 1.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 11.719.610.660,00 | | | | | | | 100 Persentase | 14.145.190.240,00 | |
| | | | 1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persentase | | 90 Persentase | 90 Persentase | 11.719.610.660,00 | | | | | | | 90 Persentase | 14.145.190.240,00 | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | 3.095.612.800,00 | | | | | | - | | 3.173.073.000,00 | |
| | | Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | | | | | | 3.095.612.800,00 | | | | | | - | | 3.173.073.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 2.822.999.800,00 | | | | | | | 8 Dokumen | 2.893.573.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 220.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 225.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 52.613.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 54.000.000,00 | |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | 2.822.999.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.893.573.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 2.822.999.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Dokumen | 2.893.573.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | 52.613.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 52.613.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 54.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik | | | | | | 220.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 225.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 220.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 225.500.000,00 | Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | 1.501.993.450,00 | | | | | | - | | 2.042.651.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | 1.501.993.450,00 | | | | | | - | | 2.042.651.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 868.871.050,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 1.284.151.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 219.998.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 225.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 153.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 113.124.400,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 225.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 153.750.000,00 | |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 153.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 153.750.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 153.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 153.750.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | 868.871.050,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.284.151.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 868.871.050,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 1.284.151.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | 219.998.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 225.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 219.998.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 225.500.000,00 | Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | 113.124.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 225.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 113.124.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 225.500.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | 3.826.319.920,00 | | | | | | - | | 3.922.098.720,00 | |
| | | Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | | | | | | 3.826.319.920,00 | | | | | | - | | 3.922.098.720,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.001.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 30.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 1.219.625.600,00 | | | | | | | 24 Laporan | 1.250.116.240,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 1.219.625.600,00 | | | | | | | 24 Laporan | 1.250.116.240,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 1.219.625.600,00 | | | | | | | 24 Laporan | 1.250.116.240,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 137.442.120,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 141.000.000,00 | |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | 1.219.625.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.250.116.240,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 24 Laporan | | 24 Laporan | 27 Laporan | 1.219.625.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 1.250.116.240,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | 1.219.625.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.250.116.240,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 24 Laporan | | 24 Laporan | 27 Laporan | 1.219.625.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 1.250.116.240,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | 1.219.625.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.250.116.240,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 24 Laporan | | 24 Laporan | 27 Laporan | 1.219.625.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 1.250.116.240,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | 30.001.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.001.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 30.750.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | 137.442.120,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 141.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 137.442.120,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 141.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | 2.049.999.850,00 | | | | | | - | | 2.101.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | 2.049.999.850,00 | | | | | | - | | 2.101.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 1.230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 479.999.850,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 492.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 3 Orang | | 2 Orang | 3 Orang | 185.000.000,00 | | | | | | | 3 Orang | 190.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 168.000.000,00 | | | | | | | 7 Orang | 172.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.230.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1.200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 1.230.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | 185.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 190.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 3 Orang | | 2 Orang | 3 Orang | 185.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Orang | 190.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | 168.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 172.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 168.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Orang | 172.200.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | 17.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 17.500.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | 479.999.850,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 492.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 479.999.850,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 492.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | 1.209.940.640,00 | | | | | | - | | 1.702.250.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | | | | | | 1.209.940.640,00 | | | | | | - | | 1.702.250.000,00 | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.149.999.940,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 1.640.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.990.700,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 10.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 49.950.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 52.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | 49.950.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 49.950.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 52.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | 9.990.700,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.250.000,00 | |
| | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.990.700,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 10.250.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | 1.149.999.940,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.640.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.149.999.940,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 1.640.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | 14.995.200,00 | | | | | | - | | 231.650.000,00 | |
| | | Terlaksana dan terawasinya pelaksanaan kode etik DPRD | | | | | | 14.995.200,00 | | | | | | - | | 231.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 14.995.200,00 | | | | | | | 15 Laporan | 231.650.000,00 | |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | 14.995.200,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 231.650.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 13 Laporan | 14.995.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Laporan | 231.650.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | 2.610.000.000,00 | | | | | | - | | 4.087.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | 2.610.000.000,00 | | | | | | - | | 4.087.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 438.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 550.000.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 563.750.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 110 Dokumen | | 110 Dokumen | 110 Dokumen | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 110 Dokumen | 3.075.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.250.000,00 | |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.075.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 110 Dokumen | | 110 Dokumen | 240 Dokumen | 2.000.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 110 Dokumen | 3.075.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.250.000,00 | |
| | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.250.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 438.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 438.000.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | 550.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 563.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 550.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 563.750.000,00 | Sekretariat DPRD |
| | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | | | **16.189.831.593,28** | | | | | | | | **16.513.228.225,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **16.189.831.593,28** | | | | | | | | **16.513.228.225,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **14.966.831.593,28** | | | | | | | | **15.265.768.225,00** | |
| **202.** | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **10.820.931.593,28** | | | | | | | | **11.037.350.225,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***10.571.031.593,28*** | | | | | | | | ***10.782.452.225,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 10.571.031.593,28 | | | | | | | BB Kategori | 10.782.452.225,00 | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 290.700.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 296.514.000,00 | |
| | | tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | | 290.700.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 296.514.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.900.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 46.818.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 96.900.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 98.838.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 61.200.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 62.424.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 86.700.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 88.434.000,00 | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 96.900.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 98.838.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 9 Dokumen | 96.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 98.838.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 61.200.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.424.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 62.424.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 45.900.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.818.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 46.818.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 86.700.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.434.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 86.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 88.434.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 8.385.171.593,28 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 8.552.875.025,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah | | | | | | 8.385.171.593,28 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 8.552.875.025,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 224.400.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 228.888.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 91.800.000,00 | | | | | | | 7 Laporan | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 49 Orang/bulan | | 49 Orang/bulan | 49 Orang/bulan | 8.068.971.593,28 | | | | | | | 49 Orang/bulan | 8.230.351.025,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 8.068.971.593,28 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.230.351.025,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 49 Orang/bulan | | 49 Orang/bulan | 63 Orang/bulan | 8.068.971.593,28 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 49 Orang/bulan | 8.230.351.025,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 224.400.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 228.888.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 224.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 228.888.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 91.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.636.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 12 Laporan | 91.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 93.636.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 56.100.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 57.222.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 56.100.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 57.222.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 56.100.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 57.222.000,00 | |
| | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 56.100.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 57.222.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 56.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 57.222.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 280.500.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 286.110.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 280.500.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 286.110.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | | 50 Paket | 50 Paket | 76.500.000,00 | | | | | | | 50 Paket | 78.030.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 204.000.000,00 | | | | | | | 5 Orang | 208.080.000,00 | |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 76.500.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 78.030.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | | 50 Paket | 63 Paket | 76.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Paket | 78.030.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 204.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | - | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 7 Orang | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Orang | 208.080.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 533.460.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 544.129.200,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 533.460.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 544.129.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | | 70 Laporan | 70 Laporan | 397.800.000,00 | | | | | | | 70 Laporan | 405.756.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 45.900.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 46.818.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | | 7 Paket | 7 Paket | 71.400.000,00 | | | | | | | 7 Paket | 72.828.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 18.360.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 18.727.200,00 | |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 18.360.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 7 Paket | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 18.727.200,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 45.900.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.818.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 6 Paket | 45.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 46.818.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 71.400.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 72.828.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | | 7 Paket | 5 Paket | 71.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Paket | 72.828.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 397.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 405.756.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | | 70 Laporan | 70 Laporan | 397.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 70 Laporan | 405.756.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 357.000.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 364.140.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 357.000.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 364.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 357.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 364.140.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 357.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 364.140.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 357.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 364.140.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 357.000.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 364.140.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | | | | | 357.000.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 364.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 244.800.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 249.696.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 112.200.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 114.444.000,00 | |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 244.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 249.696.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 244.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 249.696.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 112.200.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 114.444.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 112.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 114.444.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 561.000.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 572.220.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 561.000.000,00 | | | | | | Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci | | 572.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 306.000.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 204.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 208.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 15 Unit | 52.020.000,00 | |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 306.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 7 Unit | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 312.120.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 204.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 208.080.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | | 15 Unit | 4 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Unit | 52.020.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **203.** | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **1.927.800.000,00** | | | | | | | | **1.966.356.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*** | | | | | | ***1.530.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.560.600.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.530.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 1.560.600.000,00 | |
| | | | 999.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.530.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 1.560.600.000,00 | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | 1.111.800.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 1.134.036.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 1.111.800.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 1.134.036.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 91.800.000,00 | | | | | | | 1 Berita Acara | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 91.800.000,00 | | | | | | | 1 Berita Acara | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 255.000.000,00 | | | | | | | 1 Berita Acara | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 510.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 520.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 1000 Usulan | | 1000 Usulan | 1000 Usulan | 61.200.000,00 | | | | | | | 1000 Usulan | 62.424.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | 91.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.636.000,00 | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 2 Berita Acara | 91.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Berita Acara | 93.636.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | 91.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.636.000,00 | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 2 Berita Acara | 91.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Berita Acara | 93.636.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | 255.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 260.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 2 Berita Acara | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Berita Acara | 260.100.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | 61.200.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.424.000,00 | |
| | | Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 1000 Usulan | | 1000 Usulan | 1000 Usulan | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1000 Usulan | 62.424.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 510.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 520.200.000,00 | |
| | | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 510.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 520.200.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 255.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 260.100.000,00 | |
| | | Meningkatkan capaian analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah | | | | | | 255.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | | 1 Buku | 1 Buku | 153.000.000,00 | | | | | | | 1 Buku | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 156.060.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | | 1 Buku | 1 Buku | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Buku | 156.060.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 459.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 468.180.000,00 | |
| | | Meningkatkan capaian perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | | | 459.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 468.180.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 6 Laporan | | 3 Laporan | 6 Laporan | 357.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 364.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 104.040.000,00 | |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 1 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 357.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 364.140.000,00 | |
| | | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 6 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 357.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 364.140.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 104.040.000,00 | |
| | | Meningkatkan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **204.** | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **2.218.100.000,00** | | | | | | | | **2.262.062.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*** | | | | | | ***407.800.000,00*** | | | | | | | | ***415.756.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persentase | | 99 Persentase | 100 Persentase | 407.800.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 415.756.000,00 | |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | 417.800.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 425.756.000,00 | |
| | | meningkatkan keselarasan kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | 417.800.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 425.756.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 91.800.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 57.222.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.600.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 31.212.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 18 Laporan | | 0 Laporan | 18 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 18 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 18 Laporan | | 0 Laporan | 18 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 18 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 81.600.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 83.232.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 86.700.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 88.434.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 91.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 93.636.000,00 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 91.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 93.636.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | 30.600.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 3 Laporan | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 31.212.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | 51.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 52.020.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | 81.600.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 83.232.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 81.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 83.232.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 56.100.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 57.222.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 57.222.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | 10.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 18 Laporan | | 0 Laporan | 3 Laporan | 10.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Tutung Bungkuk \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 10.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | 10.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 18 Laporan | | 0 Laporan | 18 Laporan | 10.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Siulak \|\| Desa Tutung Bungkuk \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 10.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | 86.700.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.434.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 86.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 88.434.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*** | | | | | | ***1.020.000.000,00*** | | | | | | | | ***1.040.400.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persentase | | 99 Persentase | 100 Persentase | 1.020.000.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 1.040.400.000,00 | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | 1.326.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 1.352.520.000,00 | |
| | | Meningkatkan keselarasan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | | | | | | 1.326.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 1.352.520.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 306.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 312.120.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 153.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 255.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 204.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 208.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 156.060.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 156.060.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | 204.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.080.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 208.080.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 306.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 312.120.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | 102.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | 255.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 260.100.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 260.100.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA*** | | | | | | ***321.300.000,00*** | | | | | | | | ***327.726.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100 Persentase | | 99 Persentase | 100 Persentase | 321.300.000,00 | | | | | | | 100 Persentase | 327.726.000,00 | |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | 474.300.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 483.786.000,00 | |
| | | meningkatkan keselarasan kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA | | | | | | 474.300.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 483.786.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 86.700.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 88.434.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.600.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 83.232.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.800.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 41.616.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 81.600.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 83.232.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 76.500.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 78.030.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 86.700.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.434.000,00 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 86.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 88.434.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | 40.800.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.616.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 3 Laporan | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 41.616.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | 35.700.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.414.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | 81.600.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 83.232.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 81.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 83.232.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 81.600.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 83.232.000,00 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 83.232.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | 35.700.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.414.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 3 Laporan | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | 35.700.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.414.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 36.414.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | 76.500.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 78.030.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 76.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 78.030.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **1.223.000.000,00** | | | | | | | | **1.247.460.000,00** | |
| **205.** | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | **1.172.000.000,00** | | | | | | | | **1.195.440.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah*** | | | | | | ***458.000.000,00*** | | | | | | | | ***467.160.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | 95 Persentase | | 90 Persentase | 91 Persentase | 458.000.000,00 | | | | | | | 92 Persentase | 467.160.000,00 | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | 306.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 312.120.000,00 | |
| | | Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | | | | | | 306.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.05.02.2.01.0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | 255.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 260.100.000,00 | |
| | | Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | | | | | | 255.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 260.100.000,00 | |
| | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | 255.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 260.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 260.100.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | 255.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 260.100.000,00 | |
| | | Meningkatkan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan | | | | | | 255.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 260.100.000,00 | |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | 255.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 260.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 260.100.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | 356.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 363.120.000,00 | |
| | | Meningkatkan pengembangan inovasi dan teknologi | | | | | | 356.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 363.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 51.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | 153.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 156.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 153.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 156.060.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | 50.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 51.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 51.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **206.** | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | **51.000.000,00** | | | | | | | | **52.020.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan*** | | | | | | ***51.000.000,00*** | | | | | | | | ***52.020.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 94 Persentase | | 90 Persentase | 91 Persentase | 51.000.000,00 | | | | | | | 92 Persentase | 52.020.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 52.020.000,00 | |
| | | Meningkatkan Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | Kabupaten Kerinci | | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 51.000.000,00 | | | | | | | 1 Kegiatan | 52.020.000,00 | |
| | 5.05.03.2.02.0009 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | - | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Kegiatan | 52.020.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah** | | | | | | **352.616.894.515,74** | | | | | | | | **359.700.659.239,27** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **352.616.894.515,74** | | | | | | | | **359.700.659.239,27** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **352.616.894.515,74** | | | | | | | | **359.700.659.239,27** | |
| **207.** | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **19.215.150.089,82** | | | | | | | | **19.631.339.084,98** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***19.215.150.089,82*** | | | | | | | | ***19.631.339.084,98*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 19.215.150.089,82 | | | | | | | A Kategori | 19.631.339.084,98 | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 399.366.913,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 412.366.913,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 399.366.913,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 412.366.913,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 103.107.976,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 106.107.976,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 120.709.890,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 125.709.890,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 175.549.047,00 | | | | | | | 10 Laporan | 180.549.047,00 | |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 103.107.976,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 106.107.976,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 103.107.976,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 106.107.976,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 120.709.890,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 125.709.890,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 120.709.890,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 125.709.890,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 175.549.047,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 180.549.047,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | | 10 Laporan | 5 Laporan | 175.549.047,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Laporan | 180.549.047,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 13.628.386.095,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 13.905.553.817,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 13.628.386.095,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 13.905.553.817,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 918.341.695,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 936.708.529,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/bulan | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 12.690.044.400,00 | | | | | | | 65 Orang/bulan | 12.943.845.288,00 | |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 12.690.044.400,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.943.845.288,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/bulan | | 65 Orang/bulan | 96 Orang/bulan | 12.690.044.400,00 | Kab. Kerinci | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 65 Orang/bulan | 12.943.845.288,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 918.341.695,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 936.708.529,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 918.341.695,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 936.708.529,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 217.990.887,82 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 287.150.322,98 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 217.990.887,82 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 287.150.322,98 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.555.589,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 66.866.700,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 110 Paket | | 110 Paket | 110 Paket | 84.150.000,00 | | | | | | | 110 Paket | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | | 60 Orang | 60 Orang | 68.285.298,82 | | | | | | | 60 Orang | 70.283.622,98 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 84.150.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 110 Paket | | 110 Paket | 110 Paket | 84.150.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 110 Paket | 150.000.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 65.555.589,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 66.866.700,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.555.589,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 66.866.700,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 68.285.298,82 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 70.283.622,98 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | | 60 Orang | 60 Orang | 68.285.298,82 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Orang | 70.283.622,98 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 588.811.731,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 603.701.164,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 588.811.731,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 603.701.164,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.319.818,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 2.389.412,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Laporan | | 300 Laporan | 300 Laporan | 309.000.000,00 | | | | | | | 300 Laporan | 318.270.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 55 Paket | | 55 Paket | 55 Paket | 53.534.256,00 | | | | | | | 55 Paket | 54.604.941,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 95.666.428,00 | | | | | | | 1 Paket | 97.579.757,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 26.291.229,00 | | | | | | | 10 Paket | 26.817.054,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | | 8 Paket | 8 Paket | 102.000.000,00 | | | | | | | 8 Paket | 104.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 26.291.229,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.817.054,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 26.291.229,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 26.817.054,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 102.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | | 8 Paket | 8 Paket | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Paket | 104.040.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 53.534.256,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.604.941,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 55 Paket | | 55 Paket | 55 Paket | 53.534.256,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 55 Paket | 54.604.941,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 95.666.428,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 97.579.757,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 95.666.428,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 97.579.757,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 2.319.818,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.389.412,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.319.818,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 2.389.412,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 309.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 318.270.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Laporan | | 300 Laporan | 300 Laporan | 309.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Laporan | 318.270.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.719.558.621,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 3.744.749.793,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 14 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 3.157.313.420,00 | | | | | | | 14 Unit | 3.171.259.688,00 | |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 3.157.313.420,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.171.259.688,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 14 Unit | | 14 Unit | 14 Unit | 3.157.313.420,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 14 Unit | 3.171.259.688,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 438.189.502,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | | 450.366.404,00 | |
| | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 438.189.502,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif | | 450.366.404,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 96.878.376,00 | | | | | | | 3 Laporan | 98.815.944,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 341.311.126,00 | | | | | | | 7 Laporan | 351.550.460,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 96.878.376,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 98.815.944,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 96.878.376,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 98.815.944,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 341.311.126,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 351.550.460,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 341.311.126,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 351.550.460,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 222.846.340,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 227.450.671,00 | |
| | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 222.846.340,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 227.450.671,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 170.963.730,00 | | | | | | | 6 Unit | 174.383.005,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 14.740.330,00 | | | | | | | 20 Unit | 15.182.540,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.142.280,00 | | | | | | | 1 Unit | 37.885.126,00 | |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 170.963.730,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 174.383.005,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 170.963.730,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 174.383.005,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 14.740.330,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.182.540,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 14.740.330,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Unit | 15.182.540,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 37.142.280,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 37.885.126,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.142.280,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 37.885.126,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 13.628.386.095,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 13.905.553.817,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 25.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | 15 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 25.000.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.719.558.621,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 3.744.749.793,00 | |
| | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.719.558.621,00 | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 3.744.749.793,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 562.245.201,00 | | | | | | | - | 573.490.105,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 562.245.201,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 573.490.105,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 16 Unit | 562.245.201,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 573.490.105,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **208.** | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | **330.579.686.157,00** | | | | | | | | **337.189.725.622,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan*** | | | | | | ***327.760.473.796,00*** | | | | | | | | ***334.315.683.272,00*** | |
| | | | 999.Persentase laporan keuangan tepat waktu | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 327.760.473.796,00 | | | | | | | 100 Persentase | 334.315.683.272,00 | |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | 720.073.188,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 734.474.651,00 | |
| | | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | 720.073.188,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 734.474.651,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.348.710,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 22.795.684,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 46 Laporan | | 46 Laporan | 46 Laporan | 325.361.768,00 | | | | | | | 46 Laporan | 331.869.003,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 86.383.540,00 | | | | | | | 18 Laporan | 88.111.211,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 48 Orang | | 48 Orang | 48 Orang | 55.513.679,00 | | | | | | | 48 Orang | 56.623.952,00 | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 230.465.491,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 235.074.801,00 | |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | 86.383.540,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.111.211,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 86.383.540,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 88.111.211,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | 325.361.768,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 331.869.003,00 | |
| | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 46 Laporan | | 46 Laporan | 46 Laporan | 325.361.768,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 46 Laporan | 331.869.003,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | 230.465.491,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 235.074.801,00 | |
| | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 230.465.491,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 235.074.801,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | 22.348.710,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.795.684,00 | |
| | | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.348.710,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 22.795.684,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 55.513.679,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 56.623.952,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 48 Orang | | 48 Orang | 48 Orang | 55.513.679,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Orang | 56.623.952,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | 327.040.400.608,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 333.581.208.621,00 | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | 327.040.400.608,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 333.581.208.621,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 700 Laporan | | 700 Laporan | 700 Laporan | 321.600.081.825,00 | | | | | | | 700 Laporan | 328.032.083.462,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.440.318.783,00 | | | | | | | 2 Laporan | 5.549.125.159,00 | |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | 321.600.081.825,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 328.032.083.462,00 | |
| | | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 700 Laporan | | 700 Laporan | 700 Laporan | 321.600.081.825,00 | Kab. Kerinci | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 700 Laporan | 328.032.083.462,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | 5.440.318.783,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.549.125.159,00 | |
| | | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 2 Laporan | | 2 Laporan | 0 Laporan | 5.440.318.783,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 5.549.125.159,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | ***Meningkatnya Tata Kelola Anggaran*** | | | | | | ***2.146.862.169,00*** | | | | | | | | ***2.188.245.155,00*** | |
| | | | 999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | 0.51 Persentase | | 0.46 Persentase | 0.47 Persentase | 2.146.862.169,00 | | | | | | | 0.48 Persentase | 2.188.245.155,00 | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | 1.882.930.817,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 1.920.589.432,00 | |
| | | opini BPK | | | | | | 1.882.930.817,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 1.920.589.432,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 106.662.711,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 108.795.965,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 42.959.952,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 43.819.151,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 140.753.498,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 143.568.567,00 | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 46.920.000,00 | | | | | | | 48 Dokumen | 47.858.400,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 138 Orang | | 138 Orang | 138 Orang | 180.504.841,00 | | | | | | | 138 Orang | 184.114.937,00 | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 918.264.636,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 936.629.929,00 | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 303.204.962,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 309.269.062,00 | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 46.920.000,00 | | | | | | | 48 Dokumen | 47.858.400,00 | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 49.347.396,00 | | | | | | | 48 Dokumen | 50.334.344,00 | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 47.392.821,00 | | | | | | | 48 Dokumen | 48.340.677,00 | |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | 106.662.711,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 108.795.965,00 | |
| | | Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 106.662.711,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 108.795.965,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | 42.959.952,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 43.819.151,00 | |
| | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 42.959.952,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 43.819.151,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | 47.392.821,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 48.340.677,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 47.392.821,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Dokumen | 48.340.677,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 49.347.396,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.334.344,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 49.347.396,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Dokumen | 50.334.344,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | 46.920.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.858.400,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 46.920.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Dokumen | 47.858.400,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | 46.920.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.858.400,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 46.920.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Dokumen | 47.858.400,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | 918.264.636,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 936.629.929,00 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 918.264.636,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 936.629.929,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | 303.204.962,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 309.269.062,00 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 303.204.962,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 309.269.062,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | 140.753.498,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 143.568.567,00 | |
| | | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 140.753.498,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 143.568.567,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 180.504.841,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 184.114.937,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 138 Orang | | 138 Orang | 138 Orang | 180.504.841,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 138 Orang | 184.114.937,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | 310.851.352,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 315.514.123,00 | |
| | | Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | 310.851.352,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 315.514.123,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 265 Orang | | 265 Orang | 265 Orang | 310.851.352,00 | | | | | | | 265 Orang | 315.514.123,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 310.851.352,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 315.514.123,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 265 Orang | | 265 Orang | 265 Orang | 310.851.352,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 265 Orang | 315.514.123,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | ***Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan*** | | | | | | ***625.430.192,00*** | | | | | | | | ***637.938.795,00*** | |
| | | | 999.Persentase Penurunan SILPA | 30.33 Persentase | | 34.26 Persentase | 33.23 Persentase | 625.430.192,00 | | | | | | | 32.23 Persentase | 637.938.795,00 | |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | 625.430.192,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 637.938.795,00 | |
| | | Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | 625.430.192,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 637.938.795,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 45.691.109,00 | | | | | | | 15 Dokumen | 46.604.931,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 98.587.906,00 | | | | | | | 20 Dokumen | 100.559.664,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 446 Dokumen | | 446 Dokumen | 446 Dokumen | 15.647.310,00 | | | | | | | 446 Dokumen | 15.960.256,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 112.643.853,00 | | | | | | | 24 Dokumen | 114.896.730,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 91 Orang | | 91 Orang | 91 Orang | 352.860.014,00 | | | | | | | 91 Orang | 359.917.214,00 | |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | 15.647.310,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.960.256,00 | |
| | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 446 Dokumen | | 446 Dokumen | 446 Dokumen | 15.647.310,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 446 Dokumen | 15.960.256,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | 45.691.109,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.604.931,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 45.691.109,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Dokumen | 46.604.931,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | 98.587.906,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 100.559.664,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 98.587.906,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Dokumen | 100.559.664,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | 112.643.853,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 114.896.730,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 112.643.853,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Dokumen | 114.896.730,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 352.860.014,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 359.917.214,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 91 Orang | | 91 Orang | 91 Orang | 352.860.014,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 91 Orang | 359.917.214,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | 327.040.400.608,00 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 333.581.208.621,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | - | | - | 285 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | - | 0,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **209.** | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | **908.751.387,72** | | | | | | | | **928.021.514,47** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola aset daerah*** | | | | | | ***908.751.387,72*** | | | | | | | | ***928.021.514,47*** | |
| | | | 999.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 0.36 Persentase | | 0.32 Persentase | 0.33 Persentase | 908.751.387,72 | | | | | | | 0.34 Persentase | 928.021.514,47 | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 908.751.387,72 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 928.021.514,47 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | persentase penambahan nilai aset daerah | | | | | | 908.751.387,72 | | | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efektivitas kualitas pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 928.021.514,47 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 109.509.900,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 112.795.197,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 160.135.385,00 | | | | | | | 3 Laporan | 163.338.092,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70.721.343,00 | | | | | | | 1 Laporan | 72.135.770,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 66.655.960,72 | | | | | | | 1 Laporan | 67.989.079,47 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 48 Laporan | | 48 Laporan | 48 Laporan | 89.505.612,00 | | | | | | | 48 Laporan | 91.295.724,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 52.342.233,00 | | | | | | | 48 Dokumen | 53.389.078,00 | |
| | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.253.092,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 43.098.154,00 | |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 317.627.862,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 323.980.420,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | 317.627.862,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 323.980.420,00 | |
| | | Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 317.627.862,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 323.980.420,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | 42.253.092,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 43.098.154,00 | |
| | | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.253.092,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 43.098.154,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | 52.342.233,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.389.078,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 48 Dokumen | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 52.342.233,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Dokumen | 53.389.078,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | 89.505.612,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 91.295.724,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 48 Laporan | | 48 Laporan | 48 Laporan | 89.505.612,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 48 Laporan | 91.295.724,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | 160.135.385,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 163.338.092,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 160.135.385,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 163.338.092,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 70.721.343,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 72.135.770,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70.721.343,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 72.135.770,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | 109.509.900,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 112.795.197,00 | |
| | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 109.509.900,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 112.795.197,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | 66.655.960,72 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 67.989.079,47 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 66.655.960,72 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 67.989.079,47 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **210.** | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **1.913.306.881,20** | | | | | | | | **1.951.573.017,82** | |
| | | ***Meningkatnya Upaya eksistensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan*** | | | | | | ***1.913.306.881,20*** | | | | | | | | ***1.951.573.017,82*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 3.55 Persentase | | 3.15 Persentase | 3.25 Persentase | 1.913.306.881,20 | | | | | | | 3.34 Persentase | 1.951.573.017,82 | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 1.913.306.881,20 | | | | | | Meningkatnya kapasitas fiskal dearah | | 1.951.573.017,82 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan PAD | | | | | | 1.913.306.881,20 | | | | | | Meningkatnya kapasitas fiskal dearah | | 1.951.573.017,82 | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 76.879.379,00 | | | | | | | 24 Dokumen | 78.416.966,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 214.308.749,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 218.594.924,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 208.232.709,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 212.397.363,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.878.825,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 92.696.401,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 112.573.050,00 | | | | | | | 10 Laporan | 114.824.511,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 672.642.360,00 | | | | | | | 12 Laporan | 686.095.207,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 101.202.860,00 | | | | | | | 1 Laporan | 103.226.917,00 | |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 15 Layanan | | 15 Layanan | 15 Layanan | 194.548.092,00 | | | | | | | 15 Layanan | 198.439.054,00 | |
| | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 64000 Obyek Pajak | | 64000 Obyek Pajak | 64000 Obyek Pajak | 242.040.857,20 | | | | | | | 64000 Obyek Pajak | 246.881.674,82 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | 90.878.825,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 92.696.401,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.878.825,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 92.696.401,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | 214.308.749,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 218.594.924,00 | |
| | | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 214.308.749,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 218.594.924,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | 101.202.860,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.226.917,00 | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 101.202.860,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 103.226.917,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | 672.642.360,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 686.095.207,00 | |
| | | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 672.642.360,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 686.095.207,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | 242.040.857,20 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 246.881.674,82 | |
| | | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 64000 Obyek Pajak | | 64000 Obyek Pajak | 64000 Obyek Pajak | 242.040.857,20 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 64000 Obyek Pajak | 246.881.674,82 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | 194.548.092,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 198.439.054,00 | |
| | | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 15 Layanan | | 15 Layanan | 15 Layanan | 194.548.092,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Layanan | 198.439.054,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | 76.879.379,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 78.416.966,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 76.879.379,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Dokumen | 78.416.966,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | 208.232.709,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 212.397.363,00 | |
| | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 208.232.709,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 212.397.363,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | 112.573.050,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 114.824.511,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 112.573.050,00 | Kab. Kerinci | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Laporan | 114.824.511,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | | | | | | **12.102.287.704,00** | | | | | | | | **12.442.856.336,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **12.102.287.704,00** | | | | | | | | **12.442.856.336,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **10.549.604.690,00** | | | | | | | | **10.501.955.118,00** | |
| **211.** | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8.378.204.690,00** | | | | | | | | **8.287.913.118,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***8.334.944.690,00*** | | | | | | | | ***8.071.489.518,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 8.334.944.690,00 | | | | | | | B Kategori | 8.071.489.518,00 | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 152.235.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 132.082.050,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | | | | | 152.235.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 132.082.050,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 65.560.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 55.166.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 74.315.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 64.184.450,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.360.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 12.730.800,00 | |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 74.315.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 64.184.450,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 74.315.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 64.184.450,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 65.560.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 55.166.800,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 65.560.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 55.166.800,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 12.360.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.730.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 12.730.800,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 7.021.872.590,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 7.257.248.768,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | | | | | 7.021.872.590,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 7.257.248.768,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9 Dokumen | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 177.984.000,00 | | | | | | | 9 Dokumen | 183.323.520,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 24.360.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 12.730.800,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/bulan | | 60 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 6.819.528.590,00 | | | | | | | 65 Orang/bulan | 7.061.194.448,00 | |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 6.819.528.590,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.061.194.448,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/bulan | | 60 Orang/bulan | 67 Orang/bulan | 6.819.528.590,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 65 Orang/bulan | 7.061.194.448,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 177.984.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 183.323.520,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9 Dokumen | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 177.984.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Dokumen | 183.323.520,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 24.360.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.730.800,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 6 Laporan | 24.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 12.730.800,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 12.360.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 12.730.800,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | 12.360.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 12.730.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.360.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 12.730.800,00 | |
| | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 12.360.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.730.800,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 12.730.800,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 144.200.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 148.526.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 144.200.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 148.526.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 184 Orang | | 184 Orang | 184 Orang | 51.500.000,00 | | | | | | | 184 Orang | 53.045.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 8 Orang | | 6 Orang | 8 Orang | 92.700.000,00 | | | | | | | 8 Orang | 95.481.000,00 | |
| | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 92.700.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 95.481.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 8 Orang | | 6 Orang | 8 Orang | 92.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Orang | 95.481.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 51.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.045.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 184 Orang | | 184 Orang | 184 Orang | 51.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 184 Orang | 53.045.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 319.300.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 328.879.000,00 | |
| | | Terlaksannya Administrasi Umum BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | | | | | 319.300.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 328.879.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 257.500.000,00 | | | | | | | 30 Laporan | 265.225.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 42 Paket | | 42 Paket | 42 Paket | 30.900.000,00 | | | | | | | 42 Paket | 31.827.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 22.660.000,00 | | | | | | | 6 Paket | 23.339.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 8.240.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 8.487.200,00 | |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 8.240.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.487.200,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 8.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 8.487.200,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 30.900.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.827.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 42 Paket | | 42 Paket | 42 Paket | 30.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 42 Paket | 31.827.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 22.660.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.339.800,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 22.660.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Paket | 23.339.800,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 257.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 265.225.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | 30 Laporan | 30 Laporan | 257.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Laporan | 265.225.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 426.187.100,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 159.135.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 426.187.100,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 159.135.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 20 Unit | 10 Unit | 426.187.100,00 | | | | | | | 10 Unit | 159.135.000,00 | |
| | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 426.187.100,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 159.135.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 20 Unit | 75 Unit | 426.187.100,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 159.135.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 72.100.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 74.263.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 72.100.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 74.263.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 41.200.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 42.436.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.900.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 31.827.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 41.200.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 42.436.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 41.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 42.436.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 30.900.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.827.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 31.827.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 229.950.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 175.048.500,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilatasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 229.950.000,00 | | | | | | BKPSDMD Kabupaten Kerinci | | 175.048.500,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 154.500.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 159.135.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 75.450.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 15.913.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 154.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 159.135.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 154.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 159.135.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 75.450.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.913.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 75.450.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 15.913.500,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| **212.** | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | **2.171.400.000,00** | | | | | | | | **2.214.042.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian*** | | | | | | ***401.700.000,00*** | | | | | | | | ***413.751.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | 97 Persentase | | 87 Persentase | 90 Persentase | 401.700.000,00 | | | | | | | 93 Persentase | 413.751.000,00 | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | 401.700.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 413.751.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian ASN, dan Tersedianya Informasi Kepegawaian | | | | | | 401.700.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 413.751.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 250 Dokumen | | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 66.950.000,00 | | | | | | | 250 Dokumen | 68.958.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 750 Dokumen | | 750 Dokumen | 750 Dokumen | 257.500.000,00 | | | | | | | 750 Dokumen | 265.225.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 77.250.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 79.567.500,00 | |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | 257.500.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 265.225.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 750 Dokumen | | 750 Dokumen | 1 Dokumen | 257.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 750 Dokumen | 265.225.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian | | | | | | 66.950.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 68.958.500,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 250 Dokumen | | 250 Dokumen | 1 Dokumen | 66.950.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 250 Dokumen | 68.958.500,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 77.250.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 79.567.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 77.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 79.567.500,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN*** | | | | | | ***262.650.000,00*** | | | | | | | | ***270.529.500,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | 99.1 Persentase | | 83.8 Persentase | 87.5 Persentase | 262.650.000,00 | | | | | | | 91.39 Persentase | 270.529.500,00 | |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | 262.650.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 270.529.500,00 | |
| | | Persentase ASN dengan Nillai SKP Baik | | | | | | 262.650.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 270.529.500,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 82.400.000,00 | | | | | | | 50 Orang | 84.872.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 77.250.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 79.567.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 9 Dokumen | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 41.200.000,00 | | | | | | | 9 Dokumen | 42.436.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 61.800.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 63.654.000,00 | |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | 77.250.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 79.567.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 77.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 79.567.500,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | 82.400.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 84.872.000,00 | |
| | | Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 82.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Orang | 84.872.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | 61.800.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 63.654.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Laporan | | 5 Laporan | 2 Laporan | 61.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 63.654.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | 41.200.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 42.436.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 9 Dokumen | | 9 Dokumen | 1 Dokumen | 41.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Dokumen | 42.436.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | ***Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN*** | | | | | | ***750.000.000,00*** | | | | | | | | ***750.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 43 Persentase | | 39.4 Persentase | 40.3 Persentase | 750.000.000,00 | | | | | | | 42.1 Persentase | 750.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | 750.000.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 750.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | 750.000.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 750.000.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 6 Orang | | 5 Orang | 6 Orang | 750.000.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 750.000.000,00 | |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | 750.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 750.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 6 Orang | | 5 Orang | 6 Orang | 750.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 750.000.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | ***Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karier ASN*** | | | | | | ***757.050.000,00*** | | | | | | | | ***779.761.500,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | 15.03 Persentase | | 12.03 Persentase | 12.78 Persentase | 757.050.000,00 | | | | | | | 13.53 Persentase | 779.761.500,00 | |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | 757.050.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 779.761.500,00 | |
| | | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya. | | | | | | 757.050.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 779.761.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 66.950.000,00 | | | | | | | 50 Dokumen | 68.958.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 618.000.000,00 | | | | | | | 9 Dokumen | 636.540.000,00 | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 600 Dokumen | | 550 Dokumen | 550 Dokumen | 72.100.000,00 | | | | | | | 600 Dokumen | 74.263.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | 66.950.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 68.958.500,00 | |
| | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 4 Dokumen | 66.950.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Dokumen | 68.958.500,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | 72.100.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 74.263.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 600 Dokumen | | 550 Dokumen | 1 Dokumen | 72.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 600 Dokumen | 74.263.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | 618.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 636.540.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | | 9 Dokumen | 6 Dokumen | 618.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Dokumen | 636.540.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **1.552.683.014,00** | | | | | | | | **1.940.901.218,00** | |
| **213.** | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **1.552.683.014,00** | | | | | | | | **1.940.901.218,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar,kader,manajerial dan fungsional*** | | | | | | ***1.243.683.014,00*** | | | | | | | | ***1.622.631.218,00*** | |
| | | | 1.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional | 92 Persentase | | 87 Persentase | 88 Persentase | 1.243.683.014,00 | | | | | | | 89 Persentase | 1.622.631.218,00 | |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | 1.243.683.014,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 1.622.631.218,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dasar bagi CASN daerah | | | | | | 1.243.683.014,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 1.622.631.218,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | Dokumen | | 600 Dokumen | Dokumen | 1.243.683.014,00 | | | | | | | Dokumen | 1.622.631.218,00 | |
| | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | 1.243.683.014,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.622.631.218,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | Dokumen | | 600 Dokumen | 600 Dokumen | 1.243.683.014,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 1.622.631.218,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | ***Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis*** | | | | | | ***309.000.000,00*** | | | | | | | | ***318.270.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis | 0.12 Persentase | | 0.04 Persentase | 0.06 Persentase | 309.000.000,00 | | | | | | | 0.08 Persentase | 318.270.000,00 | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | | 309.000.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 318.270.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Kompetensi Teknis ASN | | | | | | 309.000.000,00 | | | | | | ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci | | 318.270.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 15 Orang | | 10 Orang | 15 Orang | 309.000.000,00 | | | | | | | 15 Orang | 318.270.000,00 | |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | 309.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 318.270.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 15 Orang | | 10 Orang | 15 Orang | 309.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Orang | 318.270.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | **Inspektorat** | | | | | | **23.225.344.430,00** | | | | | | | | **23.229.260.899,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **23.225.344.430,00** | | | | | | | | **23.229.260.899,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **23.225.344.430,00** | | | | | | | | **23.229.260.899,00** | |
| **214.** | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **18.051.245.430,00** | | | | | | | | **17.948.554.639,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***17.903.345.430,00*** | | | | | | | | ***17.797.696.639,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | B Kategori | | B Kategori | B Kategori | 17.903.345.430,00 | | | | | | | B Kategori | 17.797.696.639,00 | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 97.981.000,00 | | | | | | - | | 100.450.620,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran | | | | | | 97.981.000,00 | | | | | | - | | 100.450.620,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 67.381.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 69.238.620,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 67.381.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 69.238.620,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 67.381.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 69.238.620,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 12.688.630.680,00 | | | | | | - | | 12.942.403.294,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Adm. Keuangan | | | | | | 12.688.630.680,00 | | | | | | - | | 12.942.403.294,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 260.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | | 4 Laporan | Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | Laporan | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 85 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | 12.418.330.680,00 | | | | | | | 85 Orang/bulan | 12.666.697.294,00 | |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 12.418.330.680,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.666.697.294,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 85 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | 12.418.330.680,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 85 Orang/bulan | 12.666.697.294,00 | Inspektorat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 255.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 260.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 260.100.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | | 4 Laporan | 15 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | Laporan | 15.606.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 15.300.000,00 | | | | | | - | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | 15.300.000,00 | | | | | | - | | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 15.606.000,00 | |
| | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 15.606.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 3.177.555.000,00 | | | | | | - | | 3.241.106.100,00 | |
| | | Tersedianya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 3.177.555.000,00 | | | | | | - | | 3.241.106.100,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 2.295.000.000,00 | | | | | | | 80 Orang | 2.340.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 87 Paket | | 87 Paket | 87 Paket | 66.555.000,00 | | | | | | | 87 Paket | 67.886.100,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 816.000.000,00 | | | | | | | 80 Orang | 832.320.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 66.555.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 67.886.100,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 87 Paket | | 87 Paket | 85 Paket | 66.555.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 87 Paket | 67.886.100,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 816.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 832.320.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80 Orang | | 80 Orang | 27 Orang | 816.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80 Orang | 832.320.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 2.295.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.340.900.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | | 80 Orang | 35 Orang | 2.295.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 80 Orang | 2.340.900.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 818.478.750,00 | | | | | | - | | 854.222.625,00 | |
| | | Tersedianya Kegiatan Umum Perangkat Daerah | | | | | | 818.478.750,00 | | | | | | - | | 854.222.625,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58 Laporan | | 45 Laporan | 50 Laporan | 408.000.000,00 | | | | | | | 53 Laporan | 416.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 Paket | | 45 Paket | 60 Paket | 86.700.000,00 | | | | | | | 60 Paket | 88.434.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 10 Paket | 12 Paket | 66.300.000,00 | | | | | | | 12 Paket | 67.626.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 5 Paket | 8 Paket | 15.300.000,00 | | | | | | | 10 Paket | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 28 Paket | 30 Paket | 242.178.750,00 | | | | | | | 30 Paket | 266.396.625,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 5 Paket | 12 Paket | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Paket | 15.606.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 242.178.750,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 266.396.625,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | 28 Paket | 30 Paket | 242.178.750,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Paket | 266.396.625,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 86.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.434.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 Paket | | 45 Paket | 60 Paket | 86.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Paket | 88.434.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 66.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 67.626.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 10 Paket | 12 Paket | 66.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Paket | 67.626.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 408.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 416.160.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58 Laporan | | 45 Laporan | 50 Laporan | 408.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 53 Laporan | 416.160.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 806.000.000,00 | | | | | | - | | 312.120.000,00 | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | | | | | 806.000.000,00 | | | | | | - | | 312.120.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 377 Unit | | 372 Unit | 374 Unit | 306.000.000,00 | | | | | | | 375 Unit | 312.120.000,00 | |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 500.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Unit | 0,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 306.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 377 Unit | | 372 Unit | 374 Unit | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 375 Unit | 312.120.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 117.300.000,00 | | | | | | - | | 119.646.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 117.300.000,00 | | | | | | - | | 119.646.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 30.600.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 31.212.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 86.700.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 88.434.000,00 | |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 31.212.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 86.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.434.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 86.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 88.434.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 330.000.000,00 | | | | | | - | | 363.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan barang milik kantor | | | | | | 330.000.000,00 | | | | | | - | | 363.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 220.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 242.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 44.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 48.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | | 25 Unit | 25 Unit | 66.000.000,00 | | | | | | | 25 Unit | 72.600.000,00 | |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 44.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 48.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 44.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 48.400.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 220.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 242.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 220.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 242.000.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 66.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 72.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | | 25 Unit | 25 Unit | 66.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Unit | 72.600.000,00 | Inspektorat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Inspektorat |
| **215.** | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | **3.698.775.000,00** | | | | | | | | **3.772.750.500,00** | |
| | | ***Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan*** | | | | | | ***2.265.675.000,00*** | | | | | | | | ***2.310.988.500,00*** | |
| | | | 999.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 80 Persentase | | 77.5 Persentase | 78 Persentase | 2.265.675.000,00 | | | | | | | 78.5 Persentase | 2.310.988.500,00 | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | 2.968.200.000,00 | | | | | | - | | 3.027.564.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Internal | | | | | | 2.968.200.000,00 | | | | | | - | | 3.027.564.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 204.000.000,00 | | | | | | | 15 Dokumen | 208.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 285 Laporan | | 285 Laporan | 285 Laporan | 1.004.700.000,00 | | | | | | | 285 Laporan | 1.024.794.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 272 Laporan | | 272 Laporan | 272 Laporan | 1.004.700.000,00 | | | | | | | 272 Laporan | 1.024.794.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 27 Laporan | | 27 Laporan | 27 Laporan | 306.000.000,00 | | | | | | | 27 Laporan | 312.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 15 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 224.400.000,00 | | | | | | | 15 Laporan | 228.888.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 15 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 224.400.000,00 | | | | | | | 15 Laporan | 228.888.000,00 | |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | 306.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 312.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 27 Laporan | | 27 Laporan | 27 Laporan | 306.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 27 Laporan | 312.120.000,00 | Inspektorat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.004.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.024.794.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 272 Laporan | | 272 Laporan | 272 Laporan | 1.004.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 272 Laporan | 1.024.794.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | 224.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 228.888.000,00 | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 15 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 224.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Laporan | 228.888.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | 224.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 228.888.000,00 | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 15 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 224.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Laporan | 228.888.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | 1.004.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.024.794.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 285 Laporan | | 285 Laporan | 285 Laporan | 1.004.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 285 Laporan | 1.024.794.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Dokumen | 208.080.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 730.575.000,00 | | | | | | - | | 745.186.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 730.575.000,00 | | | | | | - | | 745.186.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 55 Laporan | | 35 Laporan | 40 Laporan | 526.575.000,00 | | | | | | | 45 Laporan | 537.106.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 204.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 208.080.000,00 | |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.080.000,00 | |
| | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 208.080.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 526.575.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 537.106.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 55 Laporan | | 35 Laporan | 40 Laporan | 526.575.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Laporan | 537.106.500,00 | Inspektorat |
| **216.** | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | **1.475.324.000,00** | | | | | | | | **1.507.955.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi*** | | | | | | ***1.475.324.000,00*** | | | | | | | | ***1.507.955.760,00*** | |
| | | | 999.Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci | 3 Level | | 3 Level | 3 Level | 1.475.324.000,00 | | | | | | | 3 Level | 1.507.955.760,00 | |
| | | | 999.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3 Nilai | | 3 Nilai | 3 Nilai | 1.475.324.000,00 | | | | | | | 3 Nilai | 1.507.955.760,00 | |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | 1.475.324.000,00 | | | | | | - | | 1.507.955.760,00 | |
| | | Terlakananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | | | | | | 1.475.324.000,00 | | | | | | - | | 1.507.955.760,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 23 Kegiatan | | 23 Kegiatan | 23 Kegiatan | 1.220.324.000,00 | | | | | | | 23 Kegiatan | 1.247.855.760,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 29 perangkat daerah | | 29 perangkat daerah | 29 perangkat daerah | 255.000.000,00 | | | | | | | 29 perangkat daerah | 260.100.000,00 | |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | 255.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 260.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 29 perangkat daerah | | 29 perangkat daerah | 29 perangkat daerah | 255.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 29 perangkat daerah | 260.100.000,00 | Inspektorat |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | 1.220.324.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.247.855.760,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 23 Kegiatan | | 23 Kegiatan | 23 Kegiatan | 1.220.324.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Kegiatan | 1.247.855.760,00 | Inspektorat |
| | | **Kecamatan Gunung Tujuh** | | | | | | **3.480.170.127,72** | | | | | | | | **3.568.691.600,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.454.670.127,72** | | | | | | | | **3.542.681.600,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.454.670.127,72** | | | | | | | | **3.542.681.600,00** | |
| **217.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.819.386.760,00** | | | | | | | | **2.872.395.200,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***2.704.126.760,00*** | | | | | | | | ***2.853.668.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | BB Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 2.704.126.760,00 | | | | | | | BB Kategori | 2.853.668.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat | | | | | | 69.280.000,00 | | | | | | - | | 73.985.600,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 18.727.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 28.560.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 29.131.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 4.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 18.360.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 18.727.200,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 28.560.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 29.131.200,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 28.560.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 29.131.200,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 18.360.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 4.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | Laporan | 0 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 4.200.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.395.150.000,00 | | | | | | - | | 2.446.803.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 2.395.150.000,00 | | | | | | - | | 2.446.803.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 163.200.000,00 | | | | | | | Dokumen | 166.464.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 2.216.650.000,00 | | | | | | | 18 Orang/bulan | 2.260.983.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.216.650.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.260.983.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.216.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Orang/bulan | 2.260.983.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 163.200.000,00 | | | - | - | PP5. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah | | | 166.464.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 3 Dokumen | 163.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 166.464.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 3 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 15.606.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 4.080.000,00 | | | | | | - | | 4.161.600,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat | | | | | | 4.080.000,00 | | | | | | - | | 4.161.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.080.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 4.161.600,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 4.080.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.161.600,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.080.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 4.161.600,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 37.800.000,00 | | | | | | - | | 36.200.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 37.800.000,00 | | | | | | - | | 36.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 22.500.000,00 | | | | | | | 20 Paket | 23.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Orang | 13.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 22.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 30 Paket | 22.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Paket | 23.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang | 13.200.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 81.600.000,00 | | | | | | - | | 83.232.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 81.600.000,00 | | | | | | - | | 83.232.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 76.500.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 78.030.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 76.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 78.030.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 76.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 78.030.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 91.800.000,00 | | | | | | - | | 93.636.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 91.800.000,00 | | | | | | - | | 93.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 61.200.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 62.424.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 30.600.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 31.212.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 61.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.424.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 62.424.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 2 Unit | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 31.212.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 37.676.760,00 | | | | | | - | | 38.177.000,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 37.676.760,00 | | | | | | - | | 38.177.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.056.760,00 | | | | | | | 3 Laporan | 6.177.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 31.620.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 32.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 6.056.760,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.177.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.056.760,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 6.177.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 31.620.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 31.620.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 32.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 96.200.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 96.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 20.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 61.200.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 20.400.000,00 | | | | | | | 8 Unit | 20.800.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 61.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 55.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 55.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 4 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 20.400.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | | 8 Unit | 5 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Unit | 20.800.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 69.280.000,00 | | | | | | - | | 73.985.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat | | | | | | 69.280.000,00 | | | | | | - | | 73.985.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 3.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | 3 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 3.200.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 2.395.150.000,00 | | | | | | - | | 2.446.803.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 3.750.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.750.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 3.750.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| **218.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **378.073.000,00** | | | | | | | | **365.297.000,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***378.073.000,00*** | | | | | | | | ***365.297.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88.31 Indeks | | 76.61 Indeks | 76.61 Indeks | 378.073.000,00 | | | | | | | 76.61 Indeks | 365.297.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 86.700.000,00 | | | | | | - | | 75.500.000,00 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 86.700.000,00 | | | | | | - | | 75.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 35.700.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 25.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 35.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 25.500.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 291.373.000,00 | | | | | | - | | 289.797.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 281.173.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 286.797.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 281.173.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 286.797.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 281.173.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 286.797.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 291.373.000,00 | | | | | | - | | 289.797.000,00 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 291.373.000,00 | | | | | | - | | 289.797.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | - | 10.200.000,00 | | | | | | | - | 3.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 3.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| **219.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **62.670.000,00** | | | | | | | | **64.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***62.670.000,00*** | | | | | | | | ***64.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 88.31 Indeks | | 76.31 Indeks | 76.31 Indeks | 62.670.000,00 | | | | | | | 76.31 Indeks | 64.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 62.670.000,00 | | | | | | - | | 64.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 62.670.000,00 | | | | | | - | | 64.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 62.670.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 64.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 62.670.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 64.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 5 Laporan | 62.670.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 64.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| **220.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **123.400.000,00** | | | | | | | | **125.888.400,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***123.400.000,00*** | | | | | | | | ***125.888.400,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 100 Angka | | 80 Angka | 80 Angka | 123.400.000,00 | | | | | | | 80 Angka | 125.888.400,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 123.400.000,00 | | | | | | - | | 125.888.400,00 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 123.400.000,00 | | | | | | - | | 125.888.400,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 62.200.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 63.464.400,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 61.200.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 62.424.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 61.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 62.424.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 62.424.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 62.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 63.464.400,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 62.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 63.464.400,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| **221.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **71.140.367,72** | | | | | | | | **115.101.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***55.840.367,72*** | | | | | | | | ***115.101.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 88.31 % | | 76.61 % | 76.61 % | 55.840.367,72 | | | | | | | 76.61 % | 115.101.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 71.140.367,72 | | | | | | - | | 115.101.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 12.240.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 12.468.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.120.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 13.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.727.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 18.360.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.727.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 13.300.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 12.240.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.468.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 2 Dokumen | 12.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 12.468.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 6.120.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 51.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 6.120.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 71.140.367,72 | | | | | | - | | 115.101.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 71.140.367,72 | | | | | | - | | 115.101.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | | - | - | 3.820.367,72 | | | | | | | - | 4.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 3.820.367,72 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | | - | 1 Dokumen | 3.820.367,72 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 4.000.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | **X** | | | | | | | **25.500.000,00** | | | | | | | | **26.010.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **25.500.000,00** | | | | | | | | **26.010.000,00** | |
| **222.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **25.500.000,00** | | | | | | | | **26.010.000,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 25.500.000,00 | | | | | | | - | 26.010.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 25.500.000,00 | | | | | | - | | 26.010.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 25.500.000,00 | | | | | | - | | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 35 Paket | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 20.808.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | Kecamatan Gunung Tujuh |
| | | **Kecamatan Kayu Aro** | | | | | | **3.515.568.092,00** | | | | | | | | **3.336.980.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.515.568.092,00** | | | | | | | | **3.336.980.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.515.568.092,00** | | | | | | | | **3.336.980.000,00** | |
| **223.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.717.568.092,00** | | | | | | | | **2.659.580.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***2.579.568.092,00*** | | | | | | | | ***2.620.580.000,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 2.579.568.092,00 | | | | | | | BB Kategori | 2.620.580.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | - | | 35.000.000,00 | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | - | | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7.000.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 7.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 6 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 5.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 8.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 9.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 8.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 7.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.215.438.092,00 | | | | | | - | | 2.273.000.000,00 | |
| | | jumlah laporan keuangan yang disusun | | | | | | 2.215.438.092,00 | | | | | | - | | 2.273.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.438.092,00 | | | | | | | 1 Laporan | 11.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.050.000.000,00 | | | | | | | 22 Orang/bulan | 2.100.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.050.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 2.100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 22 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 2.050.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 22 Orang/bulan | 2.100.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 150.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.438.092,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 5.438.092,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 11.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 12.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 18 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 12.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | - | | 10.000.000,00 | |
| | | jumlah dokumen Administrasi Barang milik daerah yang berhasil disususn | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | - | | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 9.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 36.000.000,00 | | | | | | - | | 42.500.000,00 | |
| | | jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan | | | | | | 36.000.000,00 | | | | | | - | | 42.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | Paket | 18.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 18.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | | | | | | | 1 Orang | 24.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 18.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 17 Paket | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 18.500.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 24.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 3 Orang | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Orang | 24.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 131.650.000,00 | | | | | | - | | 122.000.000,00 | |
| | | persentase tingkat keterpenuhannya layanan administrasi | | | | | | 131.650.000,00 | | | | | | - | | 122.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 75.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | | 15 Paket | 21.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 26.650.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 6 Paket | 11.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Paket | 11.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 21.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Paket | 21.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 26.650.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 1 Paket | 26.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 10.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 75.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 20 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 80.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | | persentase pengadaan barang milik daerah | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 40.000.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 35.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 35.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 2 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 15.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 38.100.000,00 | |
| | | penyediaan jasa penunjang urusan pemrintah daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | - | | 38.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 7.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 31.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 7.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 7.100.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 31.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 31.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 70.480.000,00 | | | | | | - | | 58.980.000,00 | |
| | | jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemmerintah | | | | | | 70.480.000,00 | | | | | | - | | 58.980.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 12 Unit | 37.480.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 3.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 3.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 6.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 37.480.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Unit | 37.480.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | 3.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 3.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 3.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 3.500.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 6.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 6.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 80.000.000,00 | |
| | | persentase pengadaan barang milik daerah | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | - | | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 70.000.000,00 | | | | | | | - | 30.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 5 Unit | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 30.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | | jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemmerintah | | | | | | 70.480.000,00 | | | | | | - | | 58.980.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 6.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 6.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 6.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| **224.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **350.000.000,00** | | | | | | | | **359.000.000,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***350.000.000,00*** | | | | | | | | ***359.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 350.000.000,00 | | | | | | | 80 Indeks | 359.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 105.000.000,00 | |
| | | jumlah desa yang menyelenggarakan kepada pemerintahan | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | - | | 105.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 230.000.000,00 | | | | | | - | | 254.000.000,00 | |
| | | jumlah layanan yang terlaksana | | | | | | 230.000.000,00 | | | | | | - | | 254.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | | 1 Dokumen | Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | Dokumen | 4.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 4.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 4.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **225.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **80.000.000,00** | | | | | | | | **55.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***80.000.000,00*** | | | | | | | | ***55.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 80.000.000,00 | | | | | | | 75 Indeks | 55.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 55.000.000,00 | |
| | | jumlah dokumnen | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 55.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 21 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 55.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| **226.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **200.000.000,00** | | | | | | | | **130.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | | ***130.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 85 Angka | | 75 Angka | 75 Angka | 100.000.000,00 | | | | | | | 75 Angka | 130.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 130.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | - | | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 300 Orang | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | 300 Orang | 60.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Orang | | 300 Orang | 300 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Orang | 60.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang | | 300 Orang | 150 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 300 Orang | 70.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| **227.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **168.000.000,00** | | | | | | | | **133.400.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***118.000.000,00*** | | | | | | | | ***133.400.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 85 % | | 75 % | 75 % | 118.000.000,00 | | | | | | | 75 % | 133.400.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 168.000.000,00 | | | | | | - | | 133.400.000,00 | |
| | | jumlah dokumen | | | | | | 168.000.000,00 | | | | | | - | | 133.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 21 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 5.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 18.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 17.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan | | | | | | 168.000.000,00 | | | | | | - | | 133.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 21 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 5.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 18.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 17.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 21 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Dokumen | 25.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 5.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 21 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Dokumen | 5.200.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 17.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Dokumen | 17.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 16.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 21 Dokumen | 16.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 10.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 21 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP4. Peningkatan Infastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro |
| | | **Kecamatan Kayu Aro Barat** | | | | | | **5.370.811.384,00** | | | | | | | | **5.505.106.180,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.301.196.384,00** | | | | | | | | **5.434.078.880,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.301.196.384,00** | | | | | | | | **5.434.078.880,00** | |
| **228.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.422.458.576,00** | | | | | | | | **4.508.504.262,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.245.908.576,00*** | | | | | | | | ***4.319.151.462,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 4.245.908.576,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.319.151.462,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 123.500.000,00 | | | | | | - | | 117.349.200,00 | |
| | | tersussunya dokumen perncanaan penggaaran dan evalusasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 123.500.000,00 | | | | | | - | | 117.349.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 33.750.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 34.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.600.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 21.218.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 33.750.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 31.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 10.323.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 20.808.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 20.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.218.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 21.218.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 33.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 33.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 31.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 33.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 34.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 33.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 34.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.323.200,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 10.323.200,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 20.808.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.452.760.400,00 | | | | | | - | | 3.521.726.012,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 3.452.760.400,00 | | | | | | - | | 3.521.726.012,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 229.360.400,00 | | | | | | | 13 Dokumen | 263.241.212,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 12.400.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 12.484.800,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.200.000.000,00 | | | | | | | 23 Orang/bulan | 3.235.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.235.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Orang/bulan | 3.235.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 229.360.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 263.241.212,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 229.360.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 13 Dokumen | 263.241.212,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 11.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 11.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 12.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.484.800,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 12.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 12.484.800,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 46.428.000,00 | | | | | | - | | 49.486.560,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | tersedianyan administrasi barang milik daerah pada perangkat milik daerah | | | | | | 46.428.000,00 | | | | | | - | | 49.486.560,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.610.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 5.722.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.854.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 8.011.080,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.232.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 6.886.640,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.732.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.866.640,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 6.732.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.866.640,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.732.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 6.866.640,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 7.854.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.011.080,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.854.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 8.011.080,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 6.232.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.886.640,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 0 Laporan | 6.232.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 6.886.640,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 22.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 5.610.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.722.200,00 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.610.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 5.722.200,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | tersusunyakepegawaian daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 20.400.000,00 | | | | | | | 25 Paket | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 30.600.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 31.212.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 20.808.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 31.212.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 134.432.672,00 | | | | | | - | | 137.343.840,00 | |
| | | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 134.432.672,00 | | | | | | - | | 137.343.840,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 3.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.100.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 5.355.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 104.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 12.342.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 12.588.840,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.804.472,00 | | | | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.186.200,00 | | | | | | | 1 Paket | 4.300.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 4.186.200,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.300.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.186.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 4.300.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 12.342.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.588.840,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 12.342.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 12.588.840,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 7.804.472,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.804.472,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 3.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.060.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 3.060.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.355.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 5.355.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 104.040.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 472.400.000,00 | | | | | | - | | 484.848.000,00 | |
| | | tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 472.400.000,00 | | | | | | - | | 484.848.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 350.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 360.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 52.020.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 350.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 360.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 350.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 360.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 20.808.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 52.020.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 52.020.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 53.457.504,00 | | | | | | - | | 53.710.650,00 | |
| | | tersedianyan jasa penunjang urusan pemerintah | | | | | | 53.457.504,00 | | | | | | - | | 53.710.650,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.240.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 12.484.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 31.400.004,00 | | | | | | | 4 Laporan | 31.212.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.817.500,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.013.850,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 0,00 | | | | | | | 20 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 0,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 12.240.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.484.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 12.484.800,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 9.817.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.013.850,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.817.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.013.850,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 31.400.004,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 31.400.004,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 31.212.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 88.480.000,00 | | | | | | - | | 92.020.000,00 | |
| | | terlaksanaanya pemiliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 88.480.000,00 | | | | | | - | | 92.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 51.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 40.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 40.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 52.020.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| **229.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **581.099.996,00** | | | | | | | | **614.594.000,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***491.099.996,00*** | | | | | | | | ***523.160.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 491.099.996,00 | | | | | | | 75 Indeks | 523.160.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | - | | 75.000.000,00 | |
| | | tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | - | | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 45.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 45.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 426.099.996,00 | | | | | | - | | 448.160.000,00 | |
| | | tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 426.099.996,00 | | | | | | - | | 448.160.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.099.996,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 32.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 386.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 416.160.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 40.099.996,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.099.996,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 32.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 386.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 416.160.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 386.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 416.160.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | | | - | - | | - | - | 90.000.000,00 | | | | | | | - | 91.434.000,00 | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | - | | 91.434.000,00 | |
| | | - | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | - | | 91.434.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | - | - | 90.000.000,00 | | | | | | | - | 91.434.000,00 | |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 91.434.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | - | 2 Laporan | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 91.434.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| **230.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.305.012,00** | | | | | | | | **3.241.162,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***2.305.012,00*** | | | | | | | | ***3.241.162,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 3.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.598 Indeks | 0.655 Indeks | 2.305.012,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 3.241.162,00 | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.305.012,00 | | | | | | - | | 3.241.162,00 | |
| | | terlaksanaya lembaga kemasyrakatan di tingkat kecamatan | | | | | | 2.305.012,00 | | | | | | - | | 3.241.162,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.305.012,00 | | | | | | | 1 Laporan | 3.241.162,00 | |
| | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | 2.305.012,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.241.162,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.305.012,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 3.241.162,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| **231.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **165.000.000,00** | | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***165.000.000,00*** | | | | | | | | ***175.000.000,00*** | |
| | | | 4.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 165.000.000,00 | | | | | | | 70 Angka | 175.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | | - | | 175.000.000,00 | |
| | | tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | | - | | 175.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 80.000.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 85.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 90.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 85.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 85.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 90.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 85.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 85.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| **232.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **130.332.800,00** | | | | | | | | **132.739.456,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***100.332.800,00*** | | | | | | | | ***132.739.456,00*** | |
| | | | 5.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.332.800,00 | | | | | | | 100 % | 132.739.456,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 130.332.800,00 | | | | | | - | | 132.739.456,00 | |
| | | meningkat fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | | | | | | 130.332.800,00 | | | | | | - | | 132.739.456,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 20.400.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.932.800,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.231.456,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 16.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | meningkatnya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | 130.332.800,00 | | | | | | - | | 132.739.456,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 20.400.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.932.800,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.231.456,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 16.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 16.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 15.500.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.200.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 20.808.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 14.932.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.231.456,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.932.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 15.231.456,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | **X** | | | | | | | **69.615.000,00** | | | | | | | | **71.027.300,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **69.615.000,00** | | | | | | | | **71.027.300,00** | |
| **233.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **69.615.000,00** | | | | | | | | **71.027.300,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 39.015.000,00 | | | | | | | - | 39.815.300,00 | |
| | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 6.732.000,00 | | | | | | - | | 6.886.640,00 | |
| | | tersedianyan administrasi barang milik daerah pada perangkat milik daerah | | | | | | 6.732.000,00 | | | | | | - | | 6.886.640,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 6.732.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 6.886.640,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | X.XX.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 6.732.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.886.640,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 6.732.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 6.886.640,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.683.000,00 | | | | | | - | | 1.716.660,00 | |
| | | tersedianya administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 1.683.000,00 | | | | | | - | | 1.716.660,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.683.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 1.716.660,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 1.683.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.716.660,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.683.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 1.716.660,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 61.200.000,00 | | | | | | - | | 62.424.000,00 | |
| | | terlaksanaanya pemiliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 61.200.000,00 | | | | | | - | | 62.424.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 30.600.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 31.212.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 30.600.000,00 | | | | | | | 9 Unit | 31.212.000,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 31.212.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | X.XX.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.212.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Unit | 31.212.000,00 | Kecamatan Kayu Aro Barat |
| | | **Kecamatan Gunung Kerinci** | | | | | | **5.124.833.200,00** | | | | | | | | **5.282.490.797,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.109.833.200,00** | | | | | | | | **5.266.086.797,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.109.833.200,00** | | | | | | | | **5.266.086.797,00** | |
| **234.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.876.433.200,00** | | | | | | | | **3.984.578.997,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.680.983.200,00*** | | | | | | | | ***3.880.533.997,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 3.680.983.200,00 | | | | | | | B Kategori | 3.880.533.997,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 110.197.800,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | - | | 110.197.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.450.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.913.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 21.218.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.913.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.450.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 15.450.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.600.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 21.218.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 20.484.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.218.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 21.218.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 20.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.218.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 21.218.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 15.450.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.450.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.450.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 15.450.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 15.450.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.913.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.450.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 15.913.500,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.913.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 15.913.500,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.484.800,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 20.484.800,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.286.933.200,00 | | | | | | - | | 3.323.473.325,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.286.933.200,00 | | | | | | - | | 3.323.473.325,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 234.000.000,00 | | | | | | | 15 Dokumen | 236.241.212,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 15.913.500,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.037.933.200,00 | | | | | | | 23 Orang/bulan | 3.071.318.613,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.037.933.200,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.071.318.613,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 38 Orang/bulan | 3.037.933.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Orang/bulan | 3.071.318.613,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 234.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 236.241.212,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 15 Dokumen | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 234.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Dokumen | 236.241.212,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.913.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 15.913.500,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | - | | 21.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Milik Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | - | | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 21.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 21.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 88.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 88.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | | 25 Paket | 37.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 2 Orang | 51.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 37.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 37.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 51.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 5 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang | 51.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 148.000.000,00 | | | | | | - | | 153.169.872,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 148.000.000,00 | | | | | | - | | 153.169.872,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 4.500.670,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 103.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 106.090.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 16.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 16.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 15.730.800,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 10.242.402,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.242.402,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 10.242.402,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 16.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 16.606.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.730.800,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 15.730.800,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 4.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.500.670,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 4.500.670,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 103.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 106.090.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 40 Laporan | 103.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 106.090.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 105.000.000,00 | | | | | | - | | 132.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 105.000.000,00 | | | | | | - | | 132.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 51.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 31.808.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 35.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 51.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 51.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 31.808.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 61.000.000,00 | | | | | | - | | 62.930.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | | 61.000.000,00 | | | | | | - | | 62.930.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 21.730.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 41.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 41.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.730.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 3 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 21.730.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 41.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 4 Laporan | 41.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 41.200.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 79.000.000,00 | | | | | | - | | 93.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 79.000.000,00 | | | | | | - | | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 52.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 39.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 41.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 52.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 39.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 39.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 41.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| **235.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **322.400.000,00** | | | | | | | | **344.913.000,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***272.400.000,00*** | | | | | | | | ***344.913.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 272.400.000,00 | | | | | | | 80 Indeks | 344.913.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 76.913.000,00 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Penyelaranggaan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 76.913.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 51.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 25.913.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.913.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 25.913.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 51.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 51.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 252.400.000,00 | | | | | | - | | 268.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 252.400.000,00 | | | | | | - | | 268.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 202.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 208.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 202.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 202.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 208.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **236.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **594.000.000,00** | | | | | | | | **611.080.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***594.000.000,00*** | | | | | | | | ***611.080.800,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.596 Indeks | 0.655 Indeks | 594.000.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 611.080.800,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 81.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | - | | 81.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 80.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 81.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 81.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 2 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 81.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 514.000.000,00 | | | | | | - | | 530.080.800,00 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 514.000.000,00 | | | | | | - | | 530.080.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 104.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 214.000.000,00 | | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 218.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 208.000.800,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.000.800,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | | | | | 1 Unit | 208.000.800,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 214.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 218.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 214.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 218.080.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | | | | | 1 Laporan | 104.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| **237.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **130.000.000,00** | | | | | | | | **132.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***130.000.000,00*** | | | | | | | | ***132.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 130.000.000,00 | | | | | | | 75 Angka | 132.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | | - | | 132.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | | - | | 132.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 45 Orang | | 45 Orang | 45 Orang | 80.000.000,00 | | | | | | | 45 Orang | 81.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 45 Orang | | 45 Orang | 45 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 45 Orang | 51.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 51.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 45 Orang | | 45 Orang | 45 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Orang | 51.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 81.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 45 Orang | | 45 Orang | 70 Orang | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Orang | 81.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| **238.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **187.000.000,00** | | | | | | | | **193.514.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***147.000.000,00*** | | | | | | | | ***172.514.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 147.000.000,00 | | | | | | | 100 % | 172.514.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 187.000.000,00 | | | | | | - | | 193.514.000,00 | |
| | | Meningkatnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 187.000.000,00 | | | | | | - | | 193.514.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 5.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 102.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 21.606.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 22.808.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 22.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.808.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 22.808.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 5.100.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 102.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 2 Dokumen | 102.000.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.606.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 21.606.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | **X** | | | | | | | **15.000.000,00** | | | | | | | | **16.404.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **15.000.000,00** | | | | | | | | **16.404.000,00** | |
| **239.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **15.000.000,00** | | | | | | | | **16.404.000,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | B Kategori | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 16.404.000,00 | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | - | | 16.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | - | | 16.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 16.404.000,00 | |
| | X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 16.404.000,00 | Kecamatan Gunung Kerinci |
| | | **Kecamatan Siulak** | | | | | | **4.623.240.510,00** | | | | | | | | **4.728.538.250,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.401.814.510,00** | | | | | | | | **4.503.666.802,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.401.814.510,00** | | | | | | | | **4.503.666.802,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **240.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.396.604.978,00** | | | | | | | | **3.474.687.461,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.396.604.978,00*** | | | | | | | | ***3.474.687.461,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 3.396.604.978,00 | | | | | | | BB Kategori | 3.474.687.461,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 65.904.000,00 | | | | | | - | | 76.632.080,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 65.904.000,00 | | | | | | - | | 76.632.080,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.200.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 16.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.504.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 15.814.080,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 10.404.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.504.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.814.080,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.504.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 15.814.080,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.010.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 26.010.000,00 | Kecamatan Siulak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 15.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 16.404.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 10.404.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | | tertibnya administrasi keuangan | | | | | | 3.049.965.652,00 | | | | | | - | | 3.048.744.971,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.043.965.652,00 | | | | | | | 23 Orang/bulan | 3.047.944.971,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.043.965.652,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.047.944.971,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.043.965.652,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Orang/bulan | 3.047.944.971,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 10.965.000,00 | | | | | | - | | 11.184.300,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 10.965.000,00 | | | | | | - | | 11.184.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.965.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 11.184.300,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 10.965.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.184.300,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 4 Laporan | 10.965.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 11.184.300,00 | Kecamatan Siulak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 22.215.600,00 | | | | | | - | | 22.659.912,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 22.215.600,00 | | | | | | - | | 22.659.912,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 22.215.600,00 | | | | | | | 6 Orang | 22.659.912,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 22.215.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.659.912,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 22.215.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 22.659.912,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 109.562.280,00 | | | | | | - | | 112.203.504,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 109.562.280,00 | | | | | | - | | 112.203.504,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 90.907.500,00 | | | | | | | 20 Laporan | 92.725.630,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.650.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 7.803.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.140.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 7.282.800,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 2.013.480,00 | | | | | | | 1 Paket | 2.503.749,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.851.300,00 | | | | | | | 1 Paket | 1.888.325,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 2.013.480,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.503.749,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 2.013.480,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 2.503.749,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 1.851.300,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.888.325,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.851.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 1.888.325,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 7.650.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.803.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 7.803.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.282.800,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 7.282.800,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 90.907.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 92.725.630,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 90.907.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 92.725.630,00 | Kecamatan Siulak |
| | | Terlaksananya Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 63.991.000,00 | | | | | | - | | 113.950.820,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 22.440.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 22.888.800,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 41.551.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 76.062.020,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 22.440.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.888.800,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 22.440.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 22.888.800,00 | Kecamatan Siulak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 41.551.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 76.062.020,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 8 Unit | 41.551.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 76.062.020,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 24.733.346,00 | | | | | | - | | 25.428.012,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 24.733.346,00 | | | | | | - | | 25.428.012,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.826.296,00 | | | | | | | 3 Laporan | 13.082.821,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.799.250,00 | | | | | | | 1 Laporan | 11.015.235,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 12.826.296,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.082.821,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.826.296,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 13.082.821,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 10.799.250,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.015.235,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.799.250,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 11.015.235,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 49.268.100,00 | | | | | | - | | 63.883.862,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 49.268.100,00 | | | | | | - | | 63.883.862,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 50.960.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 3.085.500,00 | | | | | | | 1 Unit | 3.147.210,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 8.702.600,00 | | | | | | | 1 Unit | 9.776.652,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 3.085.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.147.210,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 3.085.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 3.147.210,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.960.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 50.960.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 8.702.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.776.652,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 6 Unit | 8.702.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 9.776.652,00 | Kecamatan Siulak |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 65.904.000,00 | | | | | | - | | 76.632.080,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 8.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | 4 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 8.000.000,00 | Kecamatan Siulak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.049.965.652,00 | | | | | | - | | 3.048.744.971,00 | |
| | | tertibnya administrasi keuangan | | | | | | 3.049.965.652,00 | | | | | | - | | 3.048.744.971,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 6.000.000,00 | | | | | | | - | 800.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 6.000.000,00 | | | - | - | - | | | 800.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 800.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 63.991.000,00 | | | | | | - | | 113.950.820,00 | |
| | | Terlaksananya Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 63.991.000,00 | | | | | | - | | 113.950.820,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 15.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | 8 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 15.000.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 24.733.346,00 | | | | | | - | | 25.428.012,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | - | - | 1.107.800,00 | | | | | | | - | 1.329.956,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 1.107.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.329.956,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | - | 12 Laporan | 1.107.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 1.329.956,00 | Kecamatan Siulak |
| **241.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **653.246.400,00** | | | | | | | | **667.684.400,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***653.246.400,00*** | | | | | | | | ***667.684.400,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 653.246.400,00 | | | | | | | 75 Indeks | 667.684.400,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 44.880.000,00 | | | | | | - | | 45.777.600,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan | | | | | | 44.880.000,00 | | | | | | - | | 45.777.600,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 33.660.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 34.333.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.220.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 11.444.400,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 11.220.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.444.400,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 11.220.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 11.444.400,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 33.660.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 34.333.200,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 33.660.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 34.333.200,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 608.366.400,00 | | | | | | - | | 621.906.800,00 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 608.366.400,00 | | | | | | - | | 621.906.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 568.166.400,00 | | | | | | | 1 Laporan | 579.502.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 568.166.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 579.502.800,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 568.166.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 579.502.800,00 | Kecamatan Siulak |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 608.366.400,00 | | | | | | - | | 621.906.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 32.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 32.000.000,00 | Kecamatan Siulak |
| **242.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **100.295.902,00** | | | | | | | | **103.794.367,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***100.295.902,00*** | | | | | | | | ***103.794.367,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.598 Indeks | 0.655 Indeks | 100.295.902,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 103.794.367,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 93.733.169,00 | | | | | | - | | 95.787.833,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 93.733.169,00 | | | | | | - | | 95.787.833,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 77.733.169,00 | | | | | | | 2 Laporan | 79.287.833,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20 Lembaga Kemasyarakatan | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 16.000.000,00 | | | | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 16.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | 16.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20 Lembaga Kemasyarakatan | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 16.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 16.500.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 77.733.169,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 79.287.833,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 77.733.169,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 79.287.833,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | 6.562.733,00 | | | | | | - | | 8.006.534,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | 6.562.733,00 | | | | | | - | | 8.006.534,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.562.733,00 | | | | | | | 2 Laporan | 8.006.534,00 | |
| | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | 6.562.733,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.006.534,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.562.733,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 8.006.534,00 | Kecamatan Siulak |
| **243.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **102.000.000,00** | | | | | | | | **104.040.000,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***51.000.000,00*** | | | | | | | | ***52.020.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 80 Indeks | | 70 Indeks | 70 Indeks | 51.000.000,00 | | | | | | | 70 Indeks | 52.020.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 104.040.000,00 | |
| | | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 104.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 51.000.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 51.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 52.020.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 52.020.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 52.020.000,00 | Kecamatan Siulak |
| **244.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **149.667.230,00** | | | | | | | | **153.460.574,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***149.667.230,00*** | | | | | | | | ***153.460.574,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 149.667.230,00 | | | | | | | 100 % | 153.460.574,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 149.667.230,00 | | | | | | - | | 153.460.574,00 | |
| | | meningkatkan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penggawasan pemerintahan desa | | | | | | 149.667.230,00 | | | | | | - | | 153.460.574,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.167.230,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 12.410.574,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 16.830.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 17.166.600,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.890.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.287.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.340.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 17.686.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.440.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 22.888.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 12.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 149.667.230,00 | | | | | | - | | 153.460.574,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.167.230,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 12.410.574,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 16.830.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 17.166.600,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.890.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.287.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.340.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 17.686.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.440.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 22.888.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 12.020.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 22.440.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.888.800,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.440.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 22.888.800,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 12.167.230,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.410.574,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.167.230,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 12.410.574,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 17.340.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.686.800,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.340.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 17.686.800,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 16.830.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.166.600,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 2 Dokumen | 16.830.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 17.166.600,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 51.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | Kecamatan Siulak |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 19.890.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.287.800,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.890.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 20.287.800,00 | Kecamatan Siulak |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | 11.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Laporan | | 2 Laporan | 1 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 12.020.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | **X** | | | | | | | **221.426.000,00** | | | | | | | | **224.871.448,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **221.426.000,00** | | | | | | | | **224.871.448,00** | |
| **245.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **221.426.000,00** | | | | | | | | **224.871.448,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 221.426.000,00 | | | | | | | - | 224.871.448,00 | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 175.526.000,00 | | | | | | - | | 178.553.448,00 | |
| | | tertibnya administrasi keuangan | | | | | | 175.526.000,00 | | | | | | - | | 178.553.448,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 164.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 166.796.928,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 11.526.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 11.756.520,00 | |
| | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 164.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 166.796.928,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 164.000.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | 12 Dokumen | 166.796.928,00 | Kecamatan Siulak |
| | X.XX.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 11.526.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.756.520,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 18 Laporan | 11.526.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 11.756.520,00 | Kecamatan Siulak |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 20.400.000,00 | | | | | | - | | 20.808.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 20.400.000,00 | | | | | | - | | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 20.400.000,00 | | | | | | | 25 Paket | 20.808.000,00 | |
| | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 23 Paket | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 20.808.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 25.500.000,00 | | | | | | - | | 25.510.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 25.500.000,00 | | | | | | - | | 25.510.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 25.500.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 25.510.000,00 | |
| | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.510.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 1 Laporan | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 25.510.000,00 | Kecamatan Siulak |
| | | **Kecamatan Siulak Mukai** | | | | | | **3.695.059.471,00** | | | | | | | | **5.211.059.471,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.695.059.471,00** | | | | | | | | **5.211.059.471,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.695.059.471,00** | | | | | | | | **5.211.059.471,00** | |
| **246.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.948.526.260,00** | | | | | | | | **4.252.526.260,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***2.929.146.260,00*** | | | | | | | | ***4.229.146.260,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 2.929.146.260,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.229.146.260,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 68.100.000,00 | | | | | | - | | 91.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 68.100.000,00 | | | | | | - | | 91.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.320.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 26.320.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 12.240.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 13.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 28.360.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.180.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 10.180.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 13.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 12.240.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.240.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 18 Dokumen | 12.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 13.240.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 18.360.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 28.360.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 28.360.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 16.320.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.320.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.320.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 26.320.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 9.180.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.180.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.180.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 10.180.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | | 6 Laporan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 13.000.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.482.416.800,00 | | | | | | - | | 3.584.416.800,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 2.482.416.800,00 | | | | | | - | | 3.584.416.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 166.096.800,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 266.096.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.160.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 9.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 8.160.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 9.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang/bulan | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 2.300.000.000,00 | | | | | | | 15 Orang/bulan | 3.300.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.300.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.300.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang/bulan | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 2.300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Orang/bulan | 3.300.000.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 166.096.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 266.096.800,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 166.096.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 266.096.800,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 8.160.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.160.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 8.160.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 9.160.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 8.160.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.160.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 16 Laporan | 8.160.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 9.160.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 11.220.000,00 | | | | | | - | | 14.220.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 11.220.000,00 | | | | | | - | | 14.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.060.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 4.060.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.080.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 5.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.080.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 5.080.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 4.080.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.080.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 4.080.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 5.080.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 4.080.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 4.080.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 5.080.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 3.060.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.060.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.060.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 4.060.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 17.640.000,00 | | | | | | - | | 29.640.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 17.640.000,00 | | | | | | - | | 29.640.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.080.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 5.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.500.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 20.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 3.060.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 4.060.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 3.060.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.060.000,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 3.060.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 4.060.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 10.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 20.500.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 4.080.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 4.080.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 5.080.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 123.620.000,00 | | | | | | - | | 226.620.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 123.620.000,00 | | | | | | - | | 226.620.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.200.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 202.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 11.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.670.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 9.670.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 2.550.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 3.550.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 2.550.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.550.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 2.550.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 3.550.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 11.200.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 8.670.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.670.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.670.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 9.670.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 102.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 202.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 1 Laporan | 102.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 202.200.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 132.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 102.000.000,00 | | | | | | - | | 132.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 34.680.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 44.680.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 26.520.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 36.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 40.800.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 50.800.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 34.680.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 44.680.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 34.680.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 44.680.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 26.520.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.520.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 4 Unit | 26.520.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 36.520.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.800.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 4 Unit | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 50.800.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 35.629.460,00 | | | | | | - | | 46.629.460,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 35.629.460,00 | | | | | | - | | 46.629.460,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.100.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 30.529.460,00 | | | | | | | 4 Laporan | 40.529.460,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 6.100.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 30.529.460,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.529.460,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 1 Laporan | 30.529.460,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 40.529.460,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 107.900.000,00 | | | | | | - | | 127.900.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 107.900.000,00 | | | | | | - | | 127.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 30.400.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 30.400.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 107.900.000,00 | | | | | | - | | 127.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | - | 87.500.000,00 | | | | | | | - | 97.500.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 87.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 97.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | 1 Unit | 87.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 97.500.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| **247.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **406.653.211,00** | | | | | | | | **536.653.211,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***406.653.211,00*** | | | | | | | | ***536.653.211,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 Indeks | | 83 Indeks | 85 Indeks | 406.653.211,00 | | | | | | | 85 Indeks | 536.653.211,00 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 46.373.211,00 | | | | | | - | | 66.373.211,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 23.460.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 33.460.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 23.460.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.460.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 23.460.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 33.460.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 360.280.000,00 | | | | | | - | | 470.280.000,00 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 360.280.000,00 | | | | | | - | | 470.280.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.080.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 24.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 346.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 446.200.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 14.080.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.080.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 24.080.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 346.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 446.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 346.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 446.200.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 46.373.211,00 | | | | | | - | | 66.373.211,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 46.373.211,00 | | | | | | - | | 66.373.211,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | - | 22.913.211,00 | | | | | | | - | 32.913.211,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 22.913.211,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.913.211,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | 4 Laporan | 22.913.211,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 32.913.211,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| **248.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **48.960.000,00** | | | | | | | | **58.960.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***48.960.000,00*** | | | | | | | | ***58.960.000,00*** | |
| | | | 999.Jumlah Desa Mandiri | 14 Desa | | 6 Desa | 8 Desa | 48.960.000,00 | | | | | | | 9 Desa | 58.960.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 48.960.000,00 | | | | | | - | | 58.960.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 48.960.000,00 | | | | | | - | | 58.960.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 48.960.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 58.960.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 48.960.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 58.960.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 1 Laporan | 48.960.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 58.960.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | terlaksananya peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat desa | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 4287 Keluarga | | 4287 Keluarga | 4287 Keluarga | 0,00 | | | | | | | 4287 Keluarga | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 4287 Keluarga | | 4287 Keluarga | 280 Keluarga | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4287 Keluarga | 0,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| **249.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **86.700.000,00** | | | | | | | | **106.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***86.700.000,00*** | | | | | | | | ***106.700.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 75 Angka | 86.700.000,00 | | | | | | | 75 Angka | 106.700.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 86.700.000,00 | | | | | | - | | 106.700.000,00 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 86.700.000,00 | | | | | | - | | 106.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 51.000.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 61.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 35.700.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 45.700.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 35.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 45.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 45.700.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 61.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 450 Orang | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 61.000.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| **250.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **204.220.000,00** | | | | | | | | **256.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***204.220.000,00*** | | | | | | | | ***256.220.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 204.220.000,00 | | | | | | | 100 % | 256.220.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 204.220.000,00 | | | | | | - | | 256.220.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 204.220.000,00 | | | | | | - | | 256.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 35.700.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 45.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 51.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 61.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.220.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 12.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 43.260.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 53.260.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 12.240.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 13.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.800.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 50.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | 12.240.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.240.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 14 Dokumen | 12.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 13.240.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 14 Dokumen | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 50.800.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 14 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 43.260.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.260.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 14 Dokumen | 43.260.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 53.260.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 35.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 45.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 14 Dokumen | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 45.700.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 61.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 61.000.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 11.220.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.220.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.220.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 12.220.000,00 | Kecamatan Siulak Mukai |
| | | **Kecamatan Air Hangat** | | | | | | **4.477.320.120,00** | | | | | | | | **4.570.960.922,04** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.477.320.120,00** | | | | | | | | **4.570.960.922,04** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.477.320.120,00** | | | | | | | | **4.570.960.922,04** | |
| **251.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.958.392.668,00** | | | | | | | | **4.025.234.921,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.939.522.668,00*** | | | | | | | | ***4.005.987.521,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 3.939.522.668,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.005.987.521,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 63.241.920,00 | | | | | | - | | 64.206.758,00 | |
| | | Jumlah Dokumen , Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 63.241.920,00 | | | | | | - | | 64.206.758,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.227.100,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 6.351.642,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 8.874.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 9.051.480,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.152.800,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 26.675.856,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.988.020,00 | | | | | | | 4 Laporan | 7.127.780,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 8.874.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.051.480,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 8.874.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 9.051.480,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 26.152.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.675.856,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.152.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 26.675.856,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 6.227.100,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.351.642,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.227.100,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 6.351.642,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 6.988.020,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.127.780,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.988.020,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 7.127.780,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.560.090.148,00 | | | | | | - | | 3.630.226.231,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan | | | | | | 3.560.090.148,00 | | | | | | - | | 3.630.226.231,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.224.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 157.308.480,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 7.140.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 7.282.800,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.394.740.148,00 | | | | | | | 23 Orang/bulan | 3.460.634.951,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.394.740.148,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.460.634.951,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.394.740.148,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Orang/bulan | 3.460.634.951,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 154.224.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 157.308.480,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.224.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 157.308.480,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.282.800,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 7.282.800,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 6.630.000,00 | | | | | | - | | 6.762.600,00 | |
| | | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 6.630.000,00 | | | | | | - | | 6.762.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.630.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 6.762.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 6.630.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.762.600,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.630.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 6.762.600,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 35.250.000,00 | | | | | | - | | 33.084.720,00 | |
| | | Jumlah Administrasi Kepegawaian | | | | | | 35.250.000,00 | | | | | | - | | 33.084.720,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 17.250.000,00 | | | | | | | 25 Paket | 14.357.520,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 18.000.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 18.727.200,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 17.250.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.357.520,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 23 Paket | 17.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 14.357.520,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 3 Orang | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 18.727.200,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 117.330.600,00 | | | | | | - | | 119.677.212,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 117.330.600,00 | | | | | | - | | 119.677.212,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 86.700.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 88.434.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 12.240.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 12.484.800,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.290.600,00 | | | | | | | 1 Paket | 13.556.412,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 12.240.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.484.800,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 12.240.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 12.484.800,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 13.290.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.556.412,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.290.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 13.556.412,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 86.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 88.434.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 86.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 88.434.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 91.500.000,00 | | | | | | - | | 78.030.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 91.500.000,00 | | | | | | - | | 78.030.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 15.300.000,00 | | | | | | | 9 Unit | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 40.800.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 41.616.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 35.400.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 20.808.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 40.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.616.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 41.616.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Unit | 15.606.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 35.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 11 Unit | 35.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 20.808.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 34.630.000,00 | | | | | | - | | 34.762.600,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 34.630.000,00 | | | | | | - | | 34.762.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.630.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 6.762.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 28.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 28.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 6.630.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.762.600,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.630.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 6.762.600,00 | Kecamatan Air Hangat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 28.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 28.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 28.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 28.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 49.720.000,00 | | | | | | - | | 58.484.800,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 49.720.000,00 | | | | | | - | | 58.484.800,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 5.202.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 46.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 7.140.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 7.282.800,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 46.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 5.202.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.282.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 6 Unit | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 7.282.800,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan | | | | | | 3.560.090.148,00 | | | | | | - | | 3.630.226.231,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 3.986.000,00 | | | | | | | - | 5.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 3.986.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 3.986.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| **252.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **269.780.000,00** | | | | | | | | **290.575.600,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***259.580.000,00*** | | | | | | | | ***280.171.600,00*** | |
| | | | 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88.50 Indeks | | 83 Indeks | 85 Indeks | 259.580.000,00 | | | | | | | 87 Indeks | 280.171.600,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 29.580.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 30.171.600,00 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 29.580.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 30.171.600,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.380.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 19.767.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 10.200.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 19.380.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.767.600,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.380.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 19.767.600,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 240.200.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 260.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 240.200.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 260.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 230.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 230.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 230.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 240.200.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 260.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | - | 10.200.000,00 | | | | | | | - | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 10.200.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 10.404.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| **253.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **40.800.000,00** | | | | | | | | **41.616.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***40.800.000,00*** | | | | | | | | ***41.616.000,00*** | |
| | | | 3.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.589 Indeks | 0.655 Indeks | 40.800.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 41.616.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 40.800.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 41.616.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 40.800.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 41.616.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.800.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 41.616.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 40.800.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.616.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 5 Laporan | 40.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 41.616.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| **254.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **84.907.452,00** | | | | | | | | **86.605.601,04** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***84.907.452,00*** | | | | | | | | ***86.605.601,04*** | |
| | | | 4.Indeks kerukunan sosial | 75 Angka | | 71 Angka | 72 Angka | 84.907.452,00 | | | | | | | 73 Angka | 86.605.601,04 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 84.907.452,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 86.605.601,04 | |
| | | TerlaksananyaMeningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif | | | | | | 84.907.452,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 86.605.601,04 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 51.000.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 45 Orang | | 45 Orang | 45 Orang | 33.907.452,00 | | | | | | | 45 Orang | 34.585.601,04 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 33.907.452,00 | | | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 34.585.601,04 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 45 Orang | | 45 Orang | 100 Orang | 33.907.452,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Orang | 34.585.601,04 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 51.000.000,00 | | | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 52.020.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| **255.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **123.440.000,00** | | | | | | | | **126.928.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***68.360.000,00*** | | | | | | | | ***70.747.200,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 5.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 68.360.000,00 | | | | | | | 100 % | 70.747.200,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 123.440.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 126.928.800,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan DEsa | | | | | | 123.440.000,00 | | | | | | Kecamatan Air Hangat | | 126.928.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | | 16 Dokumen | Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | Dokumen | 18.727.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 18.360.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | Kecamatan Air Hangat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 18.360.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 18.360.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | | 16 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 18.727.200,00 | Kecamatan Air Hangat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3 Dokumen | 52.020.000,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 18.360.000,00 | | | 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.727.200,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.727.200,00 | Kecamatan Air Hangat |
| | | **Kecamatan Air Hangat Timur** | | | | | | **4.385.373.459,90** | | | | | | | | **5.456.753.459,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.385.373.459,90** | | | | | | | | **5.445.253.459,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.385.373.459,90** | | | | | | | | **5.445.253.459,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **256.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.713.584.519,90** | | | | | | | | **4.787.723.459,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.567.214.519,90*** | | | | | | | | ***4.628.353.459,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | BB Kategori | 3.567.214.519,90 | | | | | | | BB Kategori | 4.628.353.459,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 132.398.539,00 | | | | | | - | | 139.398.539,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 132.398.539,00 | | | | | | - | | 139.398.539,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.500.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 26.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.706.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 21.706.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 19.360.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.500.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 21.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.932.539,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 27.932.539,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | Laporan | 11.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 11.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 20.706.000,00 | | | - | - | - | | | 21.706.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.706.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 21.706.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 26.932.539,00 | | | - | - | - | | | 27.932.539,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.932.539,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 27.932.539,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 20.500.000,00 | | | - | - | - | | | 21.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 21.500.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | - | | | 26.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 26.500.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 18.360.000,00 | | | - | - | - | | | 19.360.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.360.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 19.360.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 11.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Laporan | 11.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 11.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 11.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.082.375.981,90 | | | | | | - | | 4.202.784.920,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.082.375.981,90 | | | | | | - | | 4.202.784.920,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 9.180.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 10.180.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 151.268.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 152.268.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 16.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.140.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 8.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.422.400,00 | | | | | | | 20 Laporan | 16.422.400,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.884.065.581,90 | | | | | | | 20 Orang/bulan | 3.999.474.520,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.884.065.581,90 | | | - | - | - | | | 3.999.474.520,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.884.065.581,90 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Orang/bulan | 3.999.474.520,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 151.268.000,00 | | | - | - | - | | | 152.268.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 151.268.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 152.268.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | - | | | 8.140.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 8.140.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 9.180.000,00 | | | - | - | - | | | 10.180.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 9.180.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 10.180.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.422.400,00 | | | - | - | - | | | 16.422.400,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.422.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 16.422.400,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 16.300.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 16.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 39.780.000,00 | | | | | | - | | 44.780.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Milik Daerah | | | | | | 39.780.000,00 | | | | | | - | | 44.780.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.650.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 8.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 11.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.140.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 8.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.710.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 11.710.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.080.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 5.080.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 4.080.000,00 | | | - | - | - | | | 5.080.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.080.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 5.080.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 7.650.000,00 | | | - | - | - | | | 8.650.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 8.650.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | - | | | 8.140.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 8.140.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 11.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 2 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 11.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 10.710.000,00 | | | - | - | - | | | 11.710.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.710.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 11.710.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.490.000,00 | | | | | | - | | 50.080.000,00 | |
| | | Tersusunnya kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.490.000,00 | | | | | | - | | 50.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 7.650.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 8.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 23 Paket | | 23 Paket | 23 Paket | 20.910.000,00 | | | | | | | 23 Paket | 18.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 21.930.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 22.930.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.910.000,00 | | | - | - | - | | | 18.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 23 Paket | | 23 Paket | 20 Paket | 20.910.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Paket | 18.500.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 7.650.000,00 | | | - | - | - | | | 8.650.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 7.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 8.650.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 21.930.000,00 | | | - | - | - | | | 22.930.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 21.930.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 22.930.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 143.820.000,00 | | | | | | - | | 151.820.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 143.820.000,00 | | | | | | - | | 151.820.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.610.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 6.610.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 75.480.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 77.480.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 23.460.000,00 | | | | | | | Paket | 24.460.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.260.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 14.260.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 11.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.710.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 11.710.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | - | | | 6.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 6.100.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 11.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 11.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 10.710.000,00 | | | - | - | - | | | 11.710.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.710.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 11.710.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 23.460.000,00 | | | - | - | - | | | 24.460.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 23.460.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Paket | 24.460.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 13.260.000,00 | | | - | - | - | | | 14.260.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.260.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 14.260.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 5.610.000,00 | | | - | - | - | | | 6.610.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.610.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 6.610.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 75.480.000,00 | | | - | - | - | | | 77.480.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 75.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 77.480.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 81.470.000,00 | | | | | | - | | 51.830.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 81.470.000,00 | | | | | | - | | 51.830.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Unit | | 2 Unit | 9 Unit | 10.200.000,00 | | | | | | | 9 Unit | 11.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 39.140.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 6.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 8.670.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 9.670.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 23.460.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 24.460.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 39.140.000,00 | | | - | - | - | | | 6.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 39.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 6.500.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 11.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Unit | 11.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 8.670.000,00 | | | - | - | - | | | 9.670.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 2 Unit | 8.670.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 9.670.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 23.460.000,00 | | | - | - | - | | | 24.460.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 23.460.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 24.460.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 39.370.000,00 | | | | | | - | | 42.470.000,00 | |
| | | Tersedianya JasaPenunjang Urusan Pemerintah | | | | | | 39.370.000,00 | | | | | | - | | 42.470.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.220.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 12.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | Laporan | 18.870.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 19.870.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.670.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 9.670.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 610.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 710.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 610.000,00 | | | - | - | - | | | 710.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 10 Laporan | 610.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 710.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 11.220.000,00 | | | - | - | - | | | 12.220.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.220.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 12.220.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 8.670.000,00 | | | - | - | - | | | 9.670.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.670.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 9.670.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 18.870.000,00 | | | - | - | - | | | 19.870.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 2 Laporan | 18.870.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 19.870.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 143.879.999,00 | | | | | | - | | 104.560.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 15.300.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 16.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 41.200.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 41.480.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 7.140.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 8.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 15.300.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 16.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 11.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | - | | | 8.140.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 8.140.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 41.200.000,00 | | | - | - | - | | | 41.480.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 41.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 41.480.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 16.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 2 Unit | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 16.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | - | | | 11.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 11.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 16.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 16.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 143.879.999,00 | | | | | | - | | 104.560.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 143.879.999,00 | | | | | | - | | 104.560.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 54.739.999,00 | | | | | | | - | 11.140.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 54.739.999,00 | | | - | - | - | | | 11.140.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 3 Unit | 54.739.999,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 11.140.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| **257.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **319.622.940,00** | | | | | | | | **333.364.000,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***299.222.940,00*** | | | | | | | | ***326.964.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 Indeks | | 79 Indeks | 80 Indeks | 299.222.940,00 | | | | | | | 81 Indeks | 326.964.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 40.548.940,00 | | | | | | - | | 55.580.000,00 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Penye,enggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 40.548.940,00 | | | | | | - | | 55.580.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 30.348.940,00 | | | | | | | Dokumen | 30.380.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 25.200.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 25.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 25.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 30.348.940,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 30.380.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 30.348.940,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Dokumen | 30.380.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | 70.584.000,00 | | | | | | - | | 33.584.000,00 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | 70.584.000,00 | | | | | | - | | 33.584.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 6.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 6.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.784.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 20.784.000,00 | |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 6.400.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 6.400.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 6.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 6.400.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 29.784.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 20.784.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.784.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 20.784.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 208.490.000,00 | | | | | | - | | 244.200.000,00 | |
| | | Terlsksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | | | | | | 208.490.000,00 | | | | | | - | | 244.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 198.800.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 228.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.690.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 16.200.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | 9.690.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 16.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.690.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 16.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 198.800.000,00 | | | - | - | PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | | | 228.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 198.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 228.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| **258.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **102.000.000,00** | | | | | | | | **62.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***61.200.000,00*** | | | | | | | | ***62.000.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.790 Indeks | | 0.599 Indeks | 0.602 Indeks | 61.200.000,00 | | | | | | | 0.657 Indeks | 62.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 61.200.000,00 | | | | | | - | | 39.200.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 61.200.000,00 | | | | | | - | | 39.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.500.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 26.500.009,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 6.399.991,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | - | | | 6.399.991,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 6.399.991,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 6.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 6.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | - | | | 26.500.009,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 26.500.009,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | 40.800.000,00 | | | | | | - | | 22.800.000,00 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 40.800.000,00 | | | | | | - | | 22.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 16.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.500.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 6.500.000,00 | |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | - | | | 6.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 6.500.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 16.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 16.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **259.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **113.730.000,00** | | | | | | | | **115.730.000,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***113.730.000,00*** | | | | | | | | ***115.730.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 90 Angka | | 71 Angka | 75 Angka | 113.730.000,00 | | | | | | | 80 Angka | 115.730.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 113.730.000,00 | | | | | | - | | 115.730.000,00 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 113.730.000,00 | | | | | | - | | 115.730.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 61.200.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 62.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 52.530.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 53.530.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 52.530.000,00 | | | - | - | - | | | 53.530.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 52.530.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 53.530.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 61.200.000,00 | | | - | - | - | | | 62.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 61.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 62.200.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| **260.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **136.436.000,00** | | | | | | | | **146.436.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***110.936.000,00*** | | | | | | | | ***117.936.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 110.936.000,00 | | | | | | | 100 % | 117.936.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 136.436.000,00 | | | | | | - | | 146.436.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 136.436.000,00 | | | | | | - | | 146.436.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.530.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 2.530.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.040.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 5.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 25 Dokumen | 16.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 52.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.196.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 21.196.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.770.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 14.770.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 16.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya Sosialisasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 136.436.000,00 | | | | | | - | | 146.436.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.530.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 2.530.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.040.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 5.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 25 Dokumen | 16.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 52.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.196.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 21.196.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.770.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 14.770.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 16.300.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | - | | | 6.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 16.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 16.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | 4.040.000,00 | | | - | - | - | | | 5.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.040.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 5.040.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 1.530.000,00 | | | - | - | - | | | 2.530.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.530.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 2.530.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | - | | | 6.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | - | | | 6.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 6.100.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 13.770.000,00 | | | - | - | - | | | 14.770.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 13.770.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 14.770.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | - | | | 16.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Dokumen | 16.300.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | - | | | 52.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 52.000.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 20.196.000,00 | | | - | - | - | | | 21.196.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.196.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 21.196.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **11.500.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **11.500.000,00** | |
| **261.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **11.500.000,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 0,00 | | | | | | | - | 11.500.000,00 | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 11.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 11.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | | 1 Laporan | 11.500.000,00 | |
| | X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | - | | | 11.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 11.500.000,00 | Kecamatan Air Hangat Timur |
| | | **Kecamatan Air Hangat Barat** | | | | | | **2.925.161.390,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.925.161.390,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.925.161.390,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **262.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.489.961.572,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***2.439.561.572,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 2.439.561.572,00 | | | | | | | BB Kategori | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 45.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 45.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 7 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.145.507.470,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 2.145.507.470,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 11 Dokumen | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 154.680.000,00 | | | | | | | 11 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.220.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | | 13 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 1.979.607.470,00 | | | | | | | 23 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 1.979.607.470,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | | 13 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.979.607.470,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Orang/bulan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 154.680.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 11 Dokumen | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 154.680.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 11 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 11.220.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.220.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 6.370.102,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 6.370.102,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.370.102,00 | | | | | | | 4 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 6.370.102,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.370.102,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 23.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 23.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.200.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Orang | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 13.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Orang | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 139.026.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 139.026.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 25.500.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.160.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.366.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.366.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.366.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 8.160.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.160.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 42.478.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 42.478.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 5 Unit | 2 Unit | 17.478.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0 Unit | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 17.478.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 5 Unit | 2 Unit | 17.478.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 30.300.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 30.300.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 57.880.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 57.880.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 10.200.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 45.200.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | | - | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| **263.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **248.380.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***248.380.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 248.380.000,00 | | | | | | | 80 Indeks | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 39.280.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelaranggaan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 39.280.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.560.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.720.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 10.720.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | 12 Laporan | 5 Laporan | 10.720.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 28.560.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.560.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 209.100.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Layanan Terlaksana | | | | | | 209.100.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 198.900.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 198.900.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 198.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| **264.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **44.019.818,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***44.019.818,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.596 Indeks | 0.655 Indeks | 44.019.818,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 44.019.818,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 44.019.818,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 44.019.818,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 44.019.818,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 44.019.818,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| **265.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **51.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***51.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 51.000.000,00 | | | | | | | 75 Angka | 0,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 40 Orang | | 40 Orang | 40 Orang | 30.600.000,00 | | | | | | | 40 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 45 Orang | | 45 Orang | 45 Orang | 20.400.000,00 | | | | | | | 45 Orang | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 45 Orang | | 45 Orang | 45 Orang | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 45 Orang | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 40 Orang | | 40 Orang | 40 Orang | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 40 Orang | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| **266.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **91.800.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***71.400.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 71.400.000,00 | | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 91.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 91.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 11.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Air Hangat Barat |
| | | **Kecamatan Depati Tujuh** | | | | | | **3.663.333.670,16** | | | | | | | | **3.752.000.344,66** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.663.333.670,16** | | | | | | | | **3.752.000.344,66** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.663.333.670,16** | | | | | | | | **3.752.000.344,66** | |
| **267.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.148.602.906,16** | | | | | | | | **3.209.574.965,42** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.148.602.906,16*** | | | | | | | | ***3.209.574.965,42*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 3.148.602.906,16 | | | | | | | BB Kategori | 3.209.574.965,42 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 62.270.232,00 | | | | | | - | | 63.515.637,24 | |
| | | Jumlah Dokumen , Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 62.270.232,00 | | | | | | - | | 63.515.637,24 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.462.344,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 10.671.591,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 22.883.952,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 23.341.631,04 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.568.410,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.879.778,20 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.355.526,00 | | | | | | | 4 Laporan | 7.502.637,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 6.120.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 22.883.952,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.341.631,04 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 22.883.952,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 23.341.631,04 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 15.568.410,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.879.778,20 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.568.410,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.879.778,20 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 10.462.344,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.671.591,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.462.344,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 10.671.591,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 7.355.526,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.502.637,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.355.526,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 7.502.637,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 6.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | 0 Laporan | 4 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 6.120.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan | | | | | | 2.826.615.124,00 | | | | | | - | | 2.881.147.426,72 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.224.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 157.308.480,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 8.241.836,00 | | | | | | | 20 Laporan | 8.406.672,72 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang/bulan | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 2.660.163.288,00 | | | | | | | 16 Orang/bulan | 2.711.366.554,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.660.163.288,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.711.366.554,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang/bulan | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 2.660.163.288,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Orang/bulan | 2.711.366.554,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 154.224.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 157.308.480,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.224.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 157.308.480,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 8.241.836,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.406.672,72 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 18 Laporan | 8.241.836,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 8.406.672,72 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 6.032.280,00 | | | | | | - | | 6.152.926,00 | |
| | | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 6.032.280,00 | | | | | | - | | 6.152.926,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.032.280,00 | | | | | | | 2 Laporan | 6.152.926,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 6.032.280,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.152.926,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.032.280,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 6.152.926,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 18.120.000,00 | | | | | | - | | 18.482.400,00 | |
| | | Jumlah Administrasi Kepegawaian | | | | | | 18.120.000,00 | | | | | | - | | 18.482.400,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 12.000.000,00 | | | | | | | 20 Paket | 12.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 6.120.000,00 | | | | | | | 1 Orang | 6.242.400,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.240.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 Paket | | 20 Paket | 16 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Paket | 12.240.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 6.120.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.242.400,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 6.120.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Orang | 6.242.400,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 80.307.474,00 | | | | | | - | | 81.913.623,40 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 80.307.474,00 | | | | | | - | | 81.913.623,40 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 66.774.420,00 | | | | | | | 20 Laporan | 68.109.908,40 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 6.784.938,00 | | | | | | | 1 Paket | 6.920.637,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.304.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.410.080,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.444.116,00 | | | | | | | 1 Paket | 1.472.998,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.444.116,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.472.998,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.444.116,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 1.472.998,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 6.784.938,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.920.637,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 6.784.938,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 6.920.637,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 5.304.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.410.080,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.304.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.410.080,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 66.774.420,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 68.109.908,40 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 66.774.420,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 68.109.908,40 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah | | | | | | 49.038.395,00 | | | | | | - | | 50.019.162,90 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 10.400.395,00 | | | | | | | 10 Unit | 10.608.402,90 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 20.808.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 0,00 | | | | | | | 6 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.808.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 20.808.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 10.400.395,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.608.402,90 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 3 Unit | 10.400.395,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 10.608.402,90 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | 6 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Unit | 0,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 40.613.901,00 | | | | | | - | | 41.426.179,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 40.613.901,00 | | | | | | - | | 41.426.179,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 13.081.245,00 | | | | | | | 3 Laporan | 13.342.870,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.532.656,00 | | | | | | | 4 Laporan | 28.083.309,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 13.081.245,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.342.870,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 13.081.245,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 13.342.870,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 27.532.656,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 28.083.309,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.532.656,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 28.083.309,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 65.605.500,16 | | | | | | - | | 66.917.610,16 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 65.605.500,16 | | | | | | - | | 66.917.610,16 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 26.595.500,16 | | | | | | | 1 Unit | 27.127.410,16 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 38.229.600,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 1.530.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 1.560.600,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 38.229.600,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 38.229.600,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 1.530.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.560.600,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 1.530.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 1.560.600,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 26.595.500,16 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 27.127.410,16 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 26.595.500,16 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 27.127.410,16 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.826.615.124,00 | | | | | | - | | 2.881.147.426,72 | |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan | | | | | | 2.826.615.124,00 | | | | | | - | | 2.881.147.426,72 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 3.986.000,00 | | | | | | | - | 4.065.720,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 3.986.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.065.720,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 3.986.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 4.065.720,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 49.038.395,00 | | | | | | - | | 50.019.162,90 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah | | | | | | 49.038.395,00 | | | | | | - | | 50.019.162,90 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 18.238.000,00 | | | | | | | - | 18.602.760,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 18.238.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.602.760,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 3 Unit | 18.238.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 18.602.760,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| **268.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **273.832.460,00** | | | | | | | | **297.709.109,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***263.632.460,00*** | | | | | | | | ***287.305.109,00*** | |
| | | | 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88.50 Indeks | | 83 Indeks | 85 Indeks | 263.632.460,00 | | | | | | | 87 Indeks | 287.305.109,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 33.632.460,00 | | | | | | - | | 34.305.109,00 | |
| | | Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 33.632.460,00 | | | | | | - | | 34.305.109,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 23.432.460,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 23.901.109,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 23.432.460,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.901.109,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 23.432.460,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 23.901.109,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 240.200.000,00 | | | | | | - | | 263.404.000,00 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan kegiatan | | | | | | 240.200.000,00 | | | | | | - | | 263.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 230.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 253.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 10.404.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 230.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 253.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 24 Laporan | 230.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 253.000.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| **269.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **41.800.000,00** | | | | | | | | **42.636.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***41.800.000,00*** | | | | | | | | ***42.636.000,00*** | |
| | | | 3.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.589 Indeks | 0.655 Indeks | 41.800.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 42.636.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 41.800.000,00 | | | | | | - | | 42.636.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 41.800.000,00 | | | | | | - | | 42.636.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 41.800.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 42.636.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 41.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 42.636.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 4 Laporan | 41.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 42.636.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| **270.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **79.003.896,00** | | | | | | | | **80.583.973,92** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***79.003.896,00*** | | | | | | | | ***80.583.973,92*** | |
| | | | 4.Indeks kerukunan sosial | 75 Angka | | 71 Angka | 72 Angka | 79.003.896,00 | | | | | | | 73 Angka | 80.583.973,92 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 79.003.896,00 | | | | | | - | | 80.583.973,92 | |
| | | Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 79.003.896,00 | | | | | | - | | 80.583.973,92 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 46.522.608,00 | | | | | | | 150 Orang | 47.453.059,92 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 32.481.288,00 | | | | | | | 100 Orang | 33.130.914,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 32.481.288,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.130.914,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 32.481.288,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 33.130.914,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 46.522.608,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 47.453.059,92 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 46.522.608,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 47.453.059,92 | Kecamatan Depati Tujuh |
| **271.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **120.094.408,00** | | | | | | | | **121.496.296,32** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***120.094.408,00*** | | | | | | | | ***121.496.296,32*** | |
| | | | 5.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 120.094.408,00 | | | | | | | 100 % | 121.496.296,32 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 120.094.408,00 | | | | | | - | | 121.496.296,32 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 120.094.408,00 | | | | | | - | | 121.496.296,32 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 15.714.528,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 16.028.819,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.767.576,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 17.102.927,16 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.839.808,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 18.196.604,16 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 22 Dokumen | 19.772.496,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 20.167.946,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 19.772.496,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.167.946,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.772.496,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 20.167.946,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 17.839.808,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.196.604,16 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.839.808,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 18.196.604,16 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 15.714.528,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.028.819,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 2 Dokumen | 15.714.528,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 16.028.819,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 16.767.576,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.102.927,16 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.767.576,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 17.102.927,16 | Kecamatan Depati Tujuh |
| | | **Kecamatan Sitinjau Laut** | | | | | | **4.539.958.500,00** | | | | | | | | **5.416.824.186,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.539.958.500,00** | | | | | | | | **5.416.824.186,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.539.958.500,00** | | | | | | | | **5.416.824.186,00** | |
| **272.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.804.511.500,00** | | | | | | | | **4.546.713.906,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.674.261.500,00*** | | | | | | | | ***4.380.338.906,00*** | |
| | | | 1.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 3.674.261.500,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.380.338.906,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 128.885.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 128.885.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 19.965.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 39.930.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 19.965.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 33.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 15.750.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 39.930.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 7 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 39.930.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.965.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 19.965.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.965.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 19.965.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.275.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 33.275.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 15.750.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.301.500.000,00 | | | | | | Pegawai Kantor Camat Sitinjau Laut | | 3.879.773.271,00 | |
| | | Tertibnya administrasi Keuangan | | | | | | 3.301.500.000,00 | | | | | | Pegawai Kantor Camat Sitinjau Laut | | 3.879.773.271,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 181.500.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 199.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 33.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 3.100.000.000,00 | | | | | | | 25 Orang/bulan | 3.641.348.271,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.641.348.271,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 3.100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Orang/bulan | 3.641.348.271,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 181.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 199.650.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 181.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 199.650.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.275.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 18 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 33.275.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 24.200.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 26.620.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah | | | | | | 24.200.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 26.620.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.200.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 26.620.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 24.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.620.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 26.620.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 33.750.000,00 | | | | | | Pegawai Kantor Camat Sitinjau Laut | | 49.568.750,00 | |
| | | Tertibnya administrasi kepegawaian | | | | | | 33.750.000,00 | | | | | | Pegawai Kantor Camat Sitinjau Laut | | 49.568.750,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 18.750.000,00 | | | | | | | 25 Paket | 19.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 15.000.000,00 | | | | | | | 6 Orang | 30.318.750,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 18.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 24 Paket | 18.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 19.250.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.318.750,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 6 Orang | 2 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Orang | 30.318.750,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 113.000.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 167.728.940,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 113.000.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 167.728.940,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 80.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 109.272.700,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 31.836.240,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 19.965.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 6.655.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.655.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 6.655.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.836.240,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 31.836.240,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.965.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 19.965.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 109.272.700,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 109.272.700,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 138.000.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 142.757.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 138.000.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 142.757.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | | 0 Unit | 4 Unit | 30.250.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 33.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 57.750.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 59.482.500,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 30.250.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.275.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | | 0 Unit | 9 Unit | 30.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 33.275.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 57.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 59.482.500,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 57.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 59.482.500,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 55.281.500,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 58.210.445,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 55.281.500,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 58.210.445,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 18.150.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 19.965.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 37.131.500,00 | | | | | | | 4 Laporan | 38.245.445,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 18.150.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.965.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 18.150.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 19.965.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 37.131.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 38.245.445,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 37.131.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 38.245.445,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 73.780.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 93.170.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 73.780.000,00 | | | | | | Kantor Camat Sitinjau Laut | | 93.170.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 30.250.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 33.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 53.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 6.050.000,00 | | | | | | | 8 Unit | 6.655.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.240.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 53.240.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 30.250.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.275.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 30.250.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 33.275.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 6.050.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.655.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 6.050.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Unit | 6.655.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Tertibnya administrasi Keuangan | | | | | | 3.301.500.000,00 | | | | | | Pegawai Kantor Camat Sitinjau Laut | | 3.879.773.271,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 5.000.000,00 | | | | | | | - | 5.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.500.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| **273.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **390.145.000,00** | | | | | | | | **437.911.350,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***390.145.000,00*** | | | | | | | | ***437.911.350,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88.50 Indeks | | 83 Indeks | 85 Indeks | 390.145.000,00 | | | | | | | 87 Indeks | 437.911.350,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 78.045.000,00 | | | | | | Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 74.601.350,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | | | | | | 78.045.000,00 | | | | | | Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 74.601.350,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 53.045.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 54.636.350,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 19.965.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 25.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.965.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 19.965.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 53.045.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.636.350,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 53.045.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 54.636.350,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 312.100.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 363.310.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | | | | | | 312.100.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 363.310.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 300.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 350.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 300.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 350.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 24 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 350.000.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan | | | | | | 312.100.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 363.310.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | - | 12.100.000,00 | | | | | | | - | 13.310.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 12.100.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.310.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | 12 Dokumen | 12.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 13.310.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| **274.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **63.654.000,00** | | | | | | | | **65.563.620,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***63.654.000,00*** | | | | | | | | ***65.563.620,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.598 Indeks | 0.655 Indeks | 63.654.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 65.563.620,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 63.654.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 65.563.620,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 63.654.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 65.563.620,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 63.654.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 65.563.620,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 63.654.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 65.563.620,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 63.654.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 65.563.620,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| **275.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **132.448.000,00** | | | | | | | | **138.968.960,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***132.448.000,00*** | | | | | | | | ***138.968.960,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 132.448.000,00 | | | | | | | 70 Angka | 138.968.960,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 132.448.000,00 | | | | | | Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 138.968.960,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 132.448.000,00 | | | | | | Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 138.968.960,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 84.048.000,00 | | | | | | | 501 Orang | 85.728.960,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 48.400.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 53.240.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 48.400.000,00 | | | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.240.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 48.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 53.240.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 84.048.000,00 | | | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 85.728.960,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 84.048.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 501 Orang | 85.728.960,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| **276.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **149.200.000,00** | | | | | | | | **227.666.350,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***149.200.000,00*** | | | | | | | | ***174.426.350,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 149.200.000,00 | | | | | | | 100 % | 174.426.350,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 149.200.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 227.666.350,00 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | 149.200.000,00 | | | | | | Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut | | 227.666.350,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26 Dokumen | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 26 Dokumen | 53.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 26.620.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.200.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 26.620.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 39.930.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 26.620.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 54.636.350,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.620.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 26.620.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 39.930.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 39.930.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 30.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.240.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26 Dokumen | | 26 Dokumen | 24 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Dokumen | 53.240.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 10.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.620.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 26.620.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 24.200.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.620.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 26.620.000,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | 50.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.636.350,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Laporan | 54.636.350,00 | Kecamatan Sitinjau Laut |
| | | **Kecamatan Danau Kerinci** | | | | | | **4.385.140.881,00** | | | | | | | | **4.846.242.069,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.385.140.881,00** | | | | | | | | **4.846.242.069,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.385.140.881,00** | | | | | | | | **4.846.242.069,00** | |
| **277.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.891.028.328,00** | | | | | | | | **4.294.454.760,00** | |
| | | | Nilai Sakip | - | | - | 70 undefined | 66.597.698,00 | | | | | | | - | 74.107.495,00 | |
| | | | - | - | | - | - | 3.794.430.630,00 | | | | | | | - | 4.187.347.265,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 66.597.698,00 | | | | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Danau Kerinci | | 74.107.495,00 | |
| | | - | | | | | | 66.597.698,00 | | | | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Danau Kerinci | | 74.107.495,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | | - | - | 10.383.258,00 | | | | | | | - | 12.271.651,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | - | - | 12.827.112,00 | | | | | | | - | 14.109.823,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | | - | - | 17.387.328,00 | | | | | | | - | 19.126.021,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | - | 6.000.000,00 | | | | | | | - | 6.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 22.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 12.827.112,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.109.823,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | - | 7 Dokumen | 12.827.112,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 14.109.823,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 17.387.328,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.126.021,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | | - | 2 Dokumen | 17.387.328,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 19.126.021,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 10.383.258,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.271.651,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | | - | 2 Dokumen | 10.383.258,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 12.271.651,00 | Kecamatan Danau Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 6.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | 3 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 6.600.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 22.000.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.484.612.870,00 | | | | | | - | | 3.833.074.157,00 | |
| | | - | | | | | | 3.484.612.870,00 | | | | | | - | | 3.833.074.157,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | | - | - | 154.224.000,00 | | | | | | | - | 169.646.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 5.000.000,00 | | | | | | | - | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | - | 15.465.138,00 | | | | | | | - | 17.011.652,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | - | - | 3.309.923.732,00 | | | | | | | - | 3.640.916.105,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.309.923.732,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.640.916.105,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | - | 23 Orang/bulan | 3.309.923.732,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 3.640.916.105,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 154.224.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 169.646.400,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | | - | 12 Dokumen | 154.224.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 169.646.400,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.465.138,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.011.652,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | | - | 19 Laporan | 15.465.138,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 17.011.652,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 14.183.692,00 | | | | | | - | | 15.602.061,00 | |
| | | - | | | | | | 14.183.692,00 | | | | | | - | | 15.602.061,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | - | 11.683.692,00 | | | | | | | - | 12.852.061,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | - | 2.500.000,00 | | | | | | | - | 2.750.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 2.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 2.750.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 11.683.692,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.852.061,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | | - | 4 Laporan | 11.683.692,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 12.852.061,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 35.500.000,00 | | | | | | - | | 39.050.000,00 | |
| | | - | | | | | | 35.500.000,00 | | | | | | - | | 39.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | | - | - | 17.500.000,00 | | | | | | | - | 19.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | - | 18.000.000,00 | | | | | | | - | 19.800.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 17.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | | - | 1 Paket | 17.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 19.250.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | 3 Orang | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 19.800.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 101.392.610,00 | | | | | | - | | 125.005.443,00 | |
| | | - | | | | | | 101.392.610,00 | | | | | | - | | 125.005.443,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | - | - | 82.476.220,00 | | | | | | | - | 90.723.842,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 10.622.688,00 | | | | | | | - | 11.684.957,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | - | | - | - | 6.657.540,00 | | | | | | | - | 7.323.294,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 1.636.162,00 | | | | | | | - | 1.799.778,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 13.473.572,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.636.162,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.799.778,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | - | | - | 1 Paket | 1.636.162,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 1.799.778,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.473.572,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | 0 Paket | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 13.473.572,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 10.622.688,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.684.957,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | - | 1 Paket | 10.622.688,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 11.684.957,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 6.657.540,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.323.294,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | - | | - | 1 Paket | 6.657.540,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 7.323.294,00 | Kecamatan Danau Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 82.476.220,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 90.723.842,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | - | 20 Laporan | 82.476.220,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 90.723.842,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 80.817.320,00 | | | | | | - | | 88.899.052,00 | |
| | | - | | | | | | 80.817.320,00 | | | | | | - | | 88.899.052,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 16.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 45.817.320,00 | | | | | | | - | 50.399.052,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 22.000.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | 3 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 16.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 45.817.320,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.399.052,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 3 Unit | 45.817.320,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 50.399.052,00 | Kecamatan Danau Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 36.741.538,00 | | | | | | - | | 40.415.692,00 | |
| | | - | | | | | | 36.741.538,00 | | | | | | - | | 40.415.692,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | | - | - | 10.315.296,00 | | | | | | | - | 11.346.826,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 26.426.242,00 | | | | | | | - | 29.068.866,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 10.315.296,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.346.826,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | | - | 3 Laporan | 10.315.296,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 11.346.826,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 26.426.242,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 29.068.866,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | | - | 2 Laporan | 26.426.242,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 29.068.866,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 71.182.600,00 | | | | | | - | | 78.300.860,00 | |
| | | - | | | | | | 71.182.600,00 | | | | | | - | | 78.300.860,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 16.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | - | 37.480.000,00 | | | | | | | - | 41.228.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | - | 3.702.600,00 | | | | | | | - | 4.072.860,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 16.500.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 41.228.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | 3 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 41.228.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 3.702.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.072.860,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | | - | 2 Unit | 3.702.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 4.072.860,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 16.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 3 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 16.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| **278.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **274.111.538,00** | | | | | | | | **301.522.692,00** | |
| | | | Indek Kepuasan Masyarkat (IKM) | - | | - | 83 undefined | 31.911.538,00 | | | | | | | - | 35.102.692,00 | |
| | | | - | - | | - | - | 242.200.000,00 | | | | | | | - | 266.420.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 31.911.538,00 | | | | | | masyarakat | | 35.102.692,00 | |
| | | - | | | | | | 31.911.538,00 | | | | | | masyarakat | | 35.102.692,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | - | - | 21.911.538,00 | | | | | | | - | 24.102.692,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 11.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 10.000.000,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | 5 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 11.000.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 21.911.538,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.102.692,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | - | 1 Dokumen | 21.911.538,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 24.102.692,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 242.200.000,00 | | | | | | - | | 266.420.000,00 | |
| | | - | | | | | | 242.200.000,00 | | | | | | - | | 266.420.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | - | 10.200.000,00 | | | | | | | - | 11.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | | - | - | 232.000.000,00 | | | | | | | - | 255.200.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.220.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 11.220.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 232.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 255.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - | | - | 24 Laporan | 232.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 255.200.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| **279.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **32.859.329,00** | | | | | | | | **36.145.262,00** | |
| | | | Indek Desa | - | | - | 0.589 undefined | 32.859.329,00 | | | | | | | - | 36.145.262,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 32.859.329,00 | | | | | | Lembaga Kemasyarakatan (PKK) | | 36.145.262,00 | |
| | | - | | | | | | 32.859.329,00 | | | | | | Lembaga Kemasyarakatan (PKK) | | 36.145.262,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | - | - | 32.859.329,00 | | | | | | | - | 36.145.262,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 32.859.329,00 | | | 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.145.262,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | - | 2 Laporan | 32.859.329,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 36.145.262,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| **280.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **77.762.500,00** | | | | | | | | **85.378.750,00** | |
| | | | Indek Kerukunan Sosial | - | | - | 71 undefined | 77.762.500,00 | | | | | | | - | 85.378.750,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 77.762.500,00 | | | | | | - | | 85.378.750,00 | |
| | | - | | | | | | 77.762.500,00 | | | | | | - | | 85.378.750,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | - | | - | - | 49.762.500,00 | | | | | | | - | 54.578.750,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | - | | - | - | 28.000.000,00 | | | | | | | - | 30.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 28.000.000,00 | | | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | - | | - | 100 Orang | 28.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 30.800.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 49.762.500,00 | | | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.578.750,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | - | | - | 150 Orang | 49.762.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 54.578.750,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| **281.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **109.379.186,00** | | | | | | | | **128.740.605,00** | |
| | | | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | - | | - | 100 undefined | 94.379.186,00 | | | | | | | - | 128.740.605,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 109.379.186,00 | | | | | | penyelenggara pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa | | 128.740.605,00 | |
| | | - | | | | | | 109.379.186,00 | | | | | | penyelenggara pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa | | 128.740.605,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | | - | - | 4.500.000,00 | | | | | | | - | 4.950.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 24.113.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | | - | - | 11.904.886,00 | | | | | | | - | 13.905.375,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 16.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | | - | - | 12.974.300,00 | | | | | | | - | 14.271.730,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 12.974.300,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.271.730,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | | - | 2 Dokumen | 12.974.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | - | 14.271.730,00 | Kecamatan Danau Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 4.500.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.950.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | | - | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci \|\| Desa Seleman \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci \|\| Desa Dusun Baru Tanjung Tanah \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci \|\| Desa Pasar Sore Seleman \|\| 1 \|\| Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci \|\| Desa Tanjungharapan \|\| 1 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 4.950.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | | - | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 16.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 15.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.113.500,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | - | 26 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 24.113.500,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | - | | - | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | - | 55.000.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 11.904.886,00 | | | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.905.375,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | | - | 2 Dokumen | 11.904.886,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 13.905.375,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **282.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | | - | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | - | | - | 0 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci |
| | | **Kecamatan Keliling Danau** | | | | | | **4.181.480.481,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.181.480.481,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.181.480.481,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| **283.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.582.875.065,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.564.875.065,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 3.564.875.065,00 | | | | | | | BB Kategori | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 61.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 61.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 7.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 21.000.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 7.000.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35 Laporan | | 35 Laporan | 35 Laporan | 14.000.000,00 | | | | | | | 35 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.500.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 21.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 21.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 7.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 7.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 14.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35 Laporan | | 35 Laporan | 3 Laporan | 14.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 35 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 12.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4 Laporan | 12.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.980.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 2.980.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 170.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan | | 19 Laporan | 19 Laporan | 10.500.000,00 | | | | | | | 19 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.800.000.000,00 | | | | | | | 25 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.800.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.800.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Orang/bulan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 170.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 170.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 10.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan | | 19 Laporan | 18 Laporan | 10.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 19 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 11.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 11.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 11.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 46.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 46.500.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 36 Paket | | 24 Paket | 24 Paket | 16.500.000,00 | | | | | | | 30 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 8 Orang | | 8 Orang | 8 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | | 8 Orang | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 16.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 36 Paket | | 24 Paket | 22 Paket | 16.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Paket | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 8 Orang | | 8 Orang | 6 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8 Orang | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 130.151.065,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 130.151.065,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 25 Laporan | 95.000.000,00 | | | | | | | 25 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.151.065,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.151.065,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.151.065,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 95.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 33 Laporan | 95.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 277.744.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | 277.744.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 160.000.000,00 | | | | | | | Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 37.744.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 80.000.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.744.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 37.744.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 160.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 160.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Unit | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 80.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 33.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 33.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 22.000.000,00 | | | | | | | 24 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 11.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 22.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 1 Laporan | 22.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 42.480.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 42.480.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 5.000.000,00 | | | | | | | 4 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Unit | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 42.480.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | - | 37.480.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| **284.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **242.800.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***242.800.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 242.800.000,00 | | | | | | | 80 Indeks | 0,00 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 102.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.800.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 32.800.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.800.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 130.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 130.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 130.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 102.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 102.800.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | - | 70.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | 5 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | - | | - | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **285.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **57.131.100,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***57.131.100,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.596 Indeks | 0.655 Indeks | 57.131.100,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 57.131.100,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 57.131.100,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 57.131.100,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 57.131.100,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 57.131.100,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| **286.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **99.960.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***99.960.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 99.960.000,00 | | | | | | | 75 Angka | 0,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 99.960.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 99.960.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 60 Orang | | 60 Orang | 60 Orang | 64.960.000,00 | | | | | | | 60 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 33 Orang | | 33 Orang | 33 Orang | 35.000.000,00 | | | | | | | 33 Orang | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 35.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 33 Orang | | 33 Orang | 33 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 33 Orang | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 64.960.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 60 Orang | | 60 Orang | 50 Orang | 64.960.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Orang | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| **287.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **198.714.316,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***198.714.316,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 198.714.316,00 | | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 198.714.316,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 198.714.316,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 70.000.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.714.316,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 70.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 31.714.316,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.714.316,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Keliling Danau |
| | | **Kecamatan Gunung Raya** | | | | | | **6.167.447.486,00** | | | | | | | | **6.260.600.707,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **6.167.447.486,00** | | | | | | | | **6.260.600.707,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **6.167.447.486,00** | | | | | | | | **6.260.600.707,00** | |
| **288.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.583.258.186,00** | | | | | | | | **4.675.123.348,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***4.567.118.186,00*** | | | | | | | | ***4.658.640.548,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 4.567.118.186,00 | | | | | | | B Kategori | 4.658.640.548,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 40.440.000,00 | | | | | | - | | 41.288.800,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 40.440.000,00 | | | | | | - | | 41.288.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.140.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 7.282.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 8.160.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 8.323.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.140.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 7.282.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 9.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 9.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 8.160.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.323.200,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | 5 Dokumen | 7 Dokumen | 8.160.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 8.323.200,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.282.800,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 7.282.800,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 7.140.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.282.800,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.140.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 7.282.800,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 9.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 4 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 9.200.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.224.539.900,00 | | | | | | - | | 4.309.190.698,00 | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 4.224.539.900,00 | | | | | | - | | 4.309.190.698,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 207.345.600,00 | | | | | | | 13 Dokumen | 211.492.512,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 7.100.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 7.242.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.004.994.300,00 | | | | | | | 30 Orang/bulan | 4.085.094.186,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.004.994.300,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.085.094.186,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.004.994.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang/bulan | 4.085.094.186,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 207.345.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 211.492.512,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 207.345.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 13 Dokumen | 211.492.512,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 7.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.242.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 18 Laporan | 7.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 7.242.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 10.200.000,00 | | | | | | - | | 10.404.000,00 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 10.200.000,00 | | | | | | - | | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 10.404.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 22.950.000,00 | | | | | | - | | 23.409.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 22.950.000,00 | | | | | | - | | 23.409.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | | 30 Paket | 30 Paket | 22.950.000,00 | | | | | | | 30 Paket | 23.409.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 22.950.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 23.409.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | | 30 Paket | 1 Paket | 22.950.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Paket | 23.409.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 97.864.206,00 | | | | | | - | | 99.821.489,00 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 97.864.206,00 | | | | | | - | | 99.821.489,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 72.315.960,00 | | | | | | | 20 Laporan | 73.762.279,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 14.394.546,00 | | | | | | | 1 Paket | 14.682.436,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.093.700,00 | | | | | | | 1 Paket | 8.255.574,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.060.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 3.121.200,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.060.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.121.200,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.060.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 3.121.200,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 14.394.546,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.682.436,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 14.394.546,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 14.682.436,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 8.093.700,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.255.574,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 2 Paket | 8.093.700,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 8.255.574,00 | Kecamatan Gunung Raya |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 72.315.960,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 73.762.279,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 72.315.960,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 73.762.279,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 60.381.794,00 | | | | | | - | | 61.589.430,00 | |
| | | Porsentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | 60.381.794,00 | | | | | | - | | 61.589.430,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 15.300.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 15.606.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | | 10 Unit | 15 Unit | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 15.606.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 63.902.286,00 | | | | | | - | | 65.180.331,00 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 63.902.286,00 | | | | | | - | | 65.180.331,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.347.500,00 | | | | | | | 4 Laporan | 11.574.450,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 52.554.786,00 | | | | | | | 4 Laporan | 53.605.881,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 11.347.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.574.450,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 24 Laporan | 11.347.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 11.574.450,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 52.554.786,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 53.605.881,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 52.554.786,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 53.605.881,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 62.980.000,00 | | | | | | - | | 64.239.600,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 62.980.000,00 | | | | | | - | | 64.239.600,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 25.500.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 26.010.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 38.229.600,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 38.229.600,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 38.229.600,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 25.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.010.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 25.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 26.010.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 40.440.000,00 | | | | | | - | | 41.288.800,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | - | 9.000.000,00 | | | | | | | - | 9.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 9.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | 4 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 9.200.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 4.224.539.900,00 | | | | | | - | | 4.309.190.698,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 5.100.000,00 | | | | | | | - | 5.362.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.362.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 5.100.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.362.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Porsentase Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | 60.381.794,00 | | | | | | - | | 61.589.430,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 45.081.794,00 | | | | | | | - | 45.983.430,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 45.081.794,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 45.983.430,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 45.081.794,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 45.983.430,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| **289.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **927.632.600,00** | | | | | | | | **915.789.525,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***927.632.600,00*** | | | | | | | | ***915.789.525,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 927.632.600,00 | | | | | | | 80 Indeks | 915.789.525,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 25.732.600,00 | | | | | | - | | 26.247.525,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 25.732.600,00 | | | | | | - | | 26.247.525,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 20.500.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 20.910.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 20.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.910.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 20.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 20.910.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 901.900.000,00 | | | | | | - | | 889.542.000,00 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 901.900.000,00 | | | | | | - | | 889.542.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 891.700.000,00 | | | | | | | 6 Laporan | 879.138.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 891.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 879.138.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 24 Laporan | 891.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Laporan | 879.138.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 25.732.600,00 | | | | | | - | | 26.247.525,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | - | 5.232.600,00 | | | | | | | - | 5.337.525,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 5.232.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.337.525,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | 5 Laporan | 5.232.600,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.337.525,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| **290.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **428.500.000,00** | | | | | | | | **437.070.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***326.500.000,00*** | | | | | | | | ***333.030.000,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.596 Indeks | 0.655 Indeks | 326.500.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 333.030.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 20.500.000,00 | | | | | | - | | 20.910.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 20.500.000,00 | | | | | | - | | 20.910.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.500.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 20.910.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 20.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.910.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 20.910.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 408.000.000,00 | | | | | | - | | 416.160.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 408.000.000,00 | | | | | | - | | 416.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas / Ormas | | 7 Pokmas / Ormas | 7 Pokmas / Ormas | 102.000.000,00 | | | | | | | 7 Pokmas / Ormas | 104.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 204.000.000,00 | | | | | | | 6 Unit | 208.080.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 204.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.080.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 Unit | | 6 Unit | 1 Unit | 204.000.000,00 | Kab. Kerinci | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | | | | | 6 Unit | 208.080.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas / Ormas | | 7 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 7 Pokmas / Ormas | 104.040.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 104.040.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| **291.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **110.756.700,00** | | | | | | | | **112.971.834,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***110.756.700,00*** | | | | | | | | ***112.971.834,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 110.756.700,00 | | | | | | | 75 Angka | 112.971.834,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 110.756.700,00 | | | | | | - | | 112.971.834,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 110.756.700,00 | | | | | | - | | 112.971.834,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 35.700.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 36.414.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 38.525.400,00 | | | | | | | 50 Orang | 39.295.908,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 36.531.300,00 | | | | | | | 100 Orang | 37.261.926,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 36.531.300,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 37.261.926,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 36.531.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 37.261.926,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 38.525.400,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 39.295.908,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 50 Orang | | 50 Orang | 60 Orang | 38.525.400,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Orang | 39.295.908,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | 35.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 36.414.000,00 | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 36.414.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| **292.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **117.300.000,00** | | | | | | | | **119.646.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***76.500.000,00*** | | | | | | | | ***78.030.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 76.500.000,00 | | | | | | | 100 % | 78.030.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 117.300.000,00 | | | | | | - | | 119.646.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 117.300.000,00 | | | | | | - | | 119.646.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 51.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 52.020.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 4 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.200.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 10.404.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Dokumen | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.606.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.606.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.020.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 2 Dokumen | 52.020.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 10.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.404.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 10.404.000,00 | Kecamatan Gunung Raya |
| | | **Kecamatan Bukit Kerman** | | | | | | **4.742.739.368,00** | | | | | | | | **4.562.980.984,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.742.739.368,00** | | | | | | | | **4.562.980.984,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.742.739.368,00** | | | | | | | | **4.562.980.984,00** | |
| **293.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.846.141.480,00** | | | | | | | | **3.675.572.054,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.792.591.480,00*** | | | | | | | | ***3.643.442.054,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | B Kategori | B Kategori | 3.792.591.480,00 | | | | | | | B Kategori | 3.643.442.054,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 68.550.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 71.977.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.650.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 8.032.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 16.065.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 16.065.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 16.065.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.065.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 16.065.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.065.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 16.065.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 7.650.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.032.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 8.032.500,00 | Kecamatan Bukit Kerman |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.065.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 16.065.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 2.900.361.480,00 | | | | | | - | | 3.044.379.554,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 181.600.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 190.680.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.300.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 15.065.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.698.461.480,00 | | | | | | | 22 Orang/bulan | 2.833.384.554,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.698.461.480,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.833.384.554,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.698.461.480,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 22 Orang/bulan | 2.833.384.554,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 181.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 190.680.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 181.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 190.680.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 15.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.065.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 18 Laporan | 15.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 15.065.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 20.400.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 21.420.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 20.400.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 21.420.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 20.400.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 21.420.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 20.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.420.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 2 Laporan | 20.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 21.420.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 91.500.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 96.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 22 Paket | | 22 Paket | 22 Paket | 16.500.000,00 | | | | | | | 22 Paket | 17.325.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 16.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 17.325.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 22 Paket | | 22 Paket | 22 Paket | 16.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 22 Paket | 17.325.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 147.900.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 147.262.500,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 147.900.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 147.262.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 107.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 26 Paket | | 26 Paket | 26 Paket | 35.700.000,00 | | | | | | | 26 Paket | 37.485.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 7.650.000,00 | | | | | | | 3 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 2.550.000,00 | | | | | | | 5 Paket | 2.677.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 2.550.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.677.500,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 1 Paket | 2.550.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Paket | 2.677.500,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 35.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 37.485.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 26 Paket | | 26 Paket | 1 Paket | 35.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Paket | 37.485.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 7.650.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 7.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Paket | 0,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 102.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 107.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 102.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 107.100.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 325.050.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 147.757.500,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 325.050.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 147.757.500,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 117.300.000,00 | | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 117.300.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 117.300.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Unit | 0,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 54.900.000,00 | | | | | | - | | 56.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 54.900.000,00 | | | | | | - | | 56.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 17 Laporan | | 17 Laporan | 17 Laporan | 45.900.000,00 | | | | | | | 17 Laporan | 46.700.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 9.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 3 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 45.900.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.700.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 17 Laporan | | 17 Laporan | 1 Laporan | 45.900.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 17 Laporan | 46.700.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 237.480.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 90.000.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 237.480.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 40.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 40.000.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 68.550.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 71.977.500,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 68.550.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 71.977.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 15.750.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | - | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 15.750.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.900.361.480,00 | | | | | | - | | 3.044.379.554,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 2.900.361.480,00 | | | | | | - | | 3.044.379.554,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 5.000.000,00 | | | | | | | - | 5.250.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.250.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 5.250.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 91.500.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 96.075.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 91.500.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 96.075.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | - | 75.000.000,00 | | | | | | | - | 78.750.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 75.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 78.750.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | 10 Orang | 75.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 78.750.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 325.050.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 147.757.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 33.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 57.750.000,00 | | | | | | | - | 59.482.500,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 55.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | - | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 55.000.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 100.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.275.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | 9 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 33.275.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 57.750.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 59.482.500,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 5 Unit | 57.750.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 59.482.500,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 237.480.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 4 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 50.000.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| **294.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **490.695.000,00** | | | | | | | | **497.136.350,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***490.695.000,00*** | | | | | | | | ***497.136.350,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 490.695.000,00 | | | | | | | 80 Indeks | 497.136.350,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 103.045.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 107.136.350,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 103.045.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 107.136.350,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.045.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 54.636.350,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 53.045.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.636.350,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.045.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 54.636.350,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 387.650.000,00 | | | | | | Desa dalam kecamatan Bukit Kerman | | 390.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jumlah Laporan Kegiatan | | | | | | 387.650.000,00 | | | | | | Desa dalam kecamatan Bukit Kerman | | 390.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.650.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 380.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 390.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 7.650.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.650.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Bukit Kerman |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 380.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 390.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 380.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 390.000.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 103.045.000,00 | | | | | | Kantor Camat Bukit Kerman | | 107.136.350,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 52.500.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | - | | - | 5 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 52.500.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| **295.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **94.254.000,00** | | | | | | | | **65.563.620,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***94.254.000,00*** | | | | | | | | ***65.563.620,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.596 Indeks | 0.655 Indeks | 94.254.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 65.563.620,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 94.254.000,00 | | | | | | Desa dalam kecamatan Bukit Kerman | | 65.563.620,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Lembaga Kemasyarakatan | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 30.600.000,00 | | | | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Lembaga Kemasyarakatan | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 30.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 94.254.000,00 | | | | | | Desa dalam kecamatan Bukit Kerman | | 65.563.620,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 94.254.000,00 | | | | | | Desa dalam kecamatan Bukit Kerman | | 65.563.620,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | - | - | 63.654.000,00 | | | | | | | - | 65.563.620,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 63.654.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 65.563.620,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | - | 2 Laporan | 63.654.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 65.563.620,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| **296.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **132.448.888,00** | | | | | | | | **136.548.960,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***132.448.888,00*** | | | | | | | | ***136.548.960,00*** | |
| | | | 999.Indeks kerukunan sosial | 80 Angka | | 70 Angka | 70 Angka | 132.448.888,00 | | | | | | | 75 Angka | 136.548.960,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 132.448.888,00 | | | | | | - | | 136.548.960,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 132.448.888,00 | | | | | | - | | 136.548.960,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 84.048.888,00 | | | | | | | 150 Orang | 85.728.960,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 48.400.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 50.820.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 48.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 50.820.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 48.400.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 50.820.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 84.048.888,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 85.728.960,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 84.048.888,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 85.728.960,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| **297.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **179.200.000,00** | | | | | | | | **188.160.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***149.200.000,00*** | | | | | | | | ***156.660.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 149.200.000,00 | | | | | | | 100 % | 156.660.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 179.200.000,00 | | | | | | - | | 188.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | | Dokumen | 15 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 15 Dokumen | 31.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 16 Dokumen | 31.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.200.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 25.410.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 15.750.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.750.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 15.750.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 15 Dokumen | 31.500.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16 Dokumen | | 16 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 16 Dokumen | 31.500.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 24.200.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 25.410.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.200.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 25.410.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 179.200.000,00 | | | | | | - | | 188.160.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 179.200.000,00 | | | | | | - | | 188.160.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 52.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 21.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | | - | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 21.000.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | - | | - | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 10.500.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | - | | - | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 52.500.000,00 | Kecamatan Bukit Kerman |
| | | **Kecamatan Batang Merangin** | | | | | | **3.378.728.535,00** | | | | | | | | **3.667.123.388,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.338.728.535,00** | | | | | | | | **3.618.723.388,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.338.728.535,00** | | | | | | | | **3.618.723.388,00** | |
| **298.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.753.728.535,00** | | | | | | | | **2.982.310.485,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***2.713.228.535,00*** | | | | | | | | ***2.946.010.485,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 2.713.228.535,00 | | | | | | | BB Kategori | 2.946.010.485,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 31.000.000,00 | | | | | | - | | 29.700.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 31.000.000,00 | | | | | | - | | 29.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 9.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 9.900.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | | 4 Laporan | 9.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 5.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.900.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 9.900.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 5.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.900.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 9.900.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.900.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 3 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4 Laporan | 9.900.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.371.031.255,00 | | | | | | - | | 2.623.272.300,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.500.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 179.124.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 6.500.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 13.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.210.031.255,00 | | | | | | | 22 Orang/bulan | 2.430.948.300,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.210.031.255,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.430.948.300,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 22 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 2.210.031.255,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 22 Orang/bulan | 2.430.948.300,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 154.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 179.124.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 179.124.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 6.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 19 Laporan | 6.500.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 13.200.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | - | | 4.756.840,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Milik Daerah | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | - | | 4.756.840,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 4.756.840,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 4.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.756.840,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 4 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 4.756.840,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 44.000.000,00 | | | | | | - | | 49.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 44.000.000,00 | | | | | | - | | 49.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 22 Paket | | 22 Paket | 22 Paket | 14.000.000,00 | | | | | | | 22 Paket | 16.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | | 3 Orang | 33.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 14.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 22 Paket | | 22 Paket | 20 Paket | 14.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 22 Paket | 16.500.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 6 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Orang | 33.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 140.911.640,00 | | | | | | - | | 157.181.145,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 140.911.640,00 | | | | | | - | | 157.181.145,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 25 Laporan | 108.375.000,00 | | | | | | | 25 Laporan | 121.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 17.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 19.425.945,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.536.640,00 | | | | | | | 1 Paket | 16.755.200,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 17.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 19.425.945,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 17.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 19.425.945,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.536.640,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.755.200,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.536.640,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 16.755.200,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 108.375.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 121.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | | 25 Laporan | 25 Laporan | 108.375.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Laporan | 121.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 67.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 67.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 40.000.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 67.100.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 67.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 67.100.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 21.305.640,00 | | | | | | - | | 23.300.200,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | | 21.305.640,00 | | | | | | - | | 23.300.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 36 Laporan | 6.305.640,00 | | | | | | | 36 Laporan | 6.800.200,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | | 24 Laporan | 16.500.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 6.305.640,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 6.800.200,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 3 Laporan | 6.305.640,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 36 Laporan | 6.800.200,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 16.500.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 71.480.000,00 | | | | | | - | | 27.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 27.500.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 27.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 27.500.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.371.031.255,00 | | | | | | - | | 2.623.272.300,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.371.031.255,00 | | | | | | - | | 2.623.272.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | - | | 67.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | - | 8 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | - | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 71.480.000,00 | | | | | | - | | 27.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 71.480.000,00 | | | | | | - | | 27.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | - | 37.480.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | - | 9.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | 1 Unit | 37.480.000,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 9.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | - | 1 Unit | 9.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| **299.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **269.000.000,00** | | | | | | | | **263.639.007,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***269.000.000,00*** | | | | | | | | ***263.639.007,00*** | |
| | | | 999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | | 75 Indeks | 75 Indeks | 269.000.000,00 | | | | | | | 75 Indeks | 263.639.007,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 39.000.000,00 | | | | | | - | | 42.795.500,00 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 39.000.000,00 | | | | | | - | | 42.795.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 29.595.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 13.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 12.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | | 2 Laporan | 5 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 13.200.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 27.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 29.595.500,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 29.595.500,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 230.000.000,00 | | | | | | - | | 220.843.507,00 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 230.000.000,00 | | | | | | - | | 220.843.507,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 230.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 220.843.507,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 230.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 220.843.507,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 230.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 220.843.507,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| **300.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **57.000.000,00** | | | | | | | | **61.791.356,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***57.000.000,00*** | | | | | | | | ***61.791.356,00*** | |
| | | | 1.Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.710 Indeks | | 0.598 Indeks | 0.655 Indeks | 57.000.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 61.791.356,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | | - | | 61.791.356,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | | - | | 61.791.356,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 57.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 61.791.356,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 57.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 61.791.356,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 2 Laporan | 57.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 61.791.356,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| **301.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **111.000.000,00** | | | | | | | | **121.265.540,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***111.000.000,00*** | | | | | | | | ***121.265.540,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 Indeks | | 70 Indeks | 70 Indeks | 111.000.000,00 | | | | | | | 70 Indeks | 121.265.540,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 111.000.000,00 | | | | | | - | | 121.265.540,00 | |
| | | Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 111.000.000,00 | | | | | | - | | 121.265.540,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 61.000.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 66.605.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 200 Orang | 54.660.540,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 54.660.540,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 200 Orang | | 200 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Orang | 54.660.540,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 61.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 66.605.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 61.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 66.605.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| **302.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **148.000.000,00** | | | | | | | | **189.717.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***88.000.000,00*** | | | | | | | | ***145.717.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 88.000.000,00 | | | | | | | 100 % | 145.717.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 148.000.000,00 | | | | | | - | | 189.717.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 48.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26 Dokumen | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 18.000.000,00 | | | | | | | 26 Dokumen | 20.317.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 48.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 48.400.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.317.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26 Dokumen | | 26 Dokumen | 2 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Dokumen | 20.317.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 22.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 148.000.000,00 | | | | | | - | | 189.717.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 148.000.000,00 | | | | | | - | | 189.717.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 22.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | | - | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 22.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | **X** | | | | | | | **40.000.000,00** | | | | | | | | **48.400.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **40.000.000,00** | | | | | | | | **48.400.000,00** | |
| **303.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **40.000.000,00** | | | | | | | | **48.400.000,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 35.000.000,00 | | | | | | | - | 48.400.000,00 | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | - | | 9.900.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | - | | 9.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 9.900.000,00 | |
| | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.900.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 9.900.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | - | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | - | | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.500.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.500.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 33.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | - | | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | | | | | | | 3 Unit | 33.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 3 Unit | 8 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Unit | 33.000.000,00 | Kecamatan Batang Merangin |
| | | **Kecamatan Tanah Cogok** | | | | | | **3.762.359.736,00** | | | | | | | | **4.601.344.007,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.749.759.736,00** | | | | | | | | **4.586.642.007,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.749.759.736,00** | | | | | | | | **4.586.642.007,00** | |
| **304.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.176.819.477,00** | | | | | | | | **4.022.708.241,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.176.819.477,00*** | | | | | | | | ***4.022.708.241,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 3.176.819.477,00 | | | | | | | BB Kategori | 4.022.708.241,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 54.878.980,00 | | | | | | - | | 56.216.014,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.315.244,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 8.523.125,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.536.232,00 | | | | | | | 7 Dokumen | 15.924.638,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.721.636,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 12.014.677,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.317.848,00 | | | | | | | 1 Laporan | 12.625.794,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.536.232,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 15.924.638,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.536.232,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Dokumen | 15.924.638,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 11.721.636,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.014.677,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.721.636,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 12.014.677,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 8.315.244,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.523.125,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.315.244,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 8.523.125,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 12.317.848,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 12.625.794,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.317.848,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 12.625.794,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 2.873.706.020,00 | | | | | | - | | 2.945.847.621,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 161.568.000,00 | | | | | | | 10 Dokumen | 165.607.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 12.928.500,00 | | | | | | | 20 Laporan | 13.251.713,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 2.695.223.520,00 | | | | | | | 19 Orang/bulan | 2.762.604.108,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.695.223.520,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 2.762.604.108,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 2.695.223.520,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 19 Orang/bulan | 2.762.604.108,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 161.568.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 165.607.200,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 12 Dokumen | 161.568.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Dokumen | 165.607.200,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 12.928.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 13.251.713,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 12.928.500,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 13.251.713,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 7.331.964,00 | | | | | | - | | 751.526.310,00 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 7.331.964,00 | | | | | | - | | 751.526.310,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 7.331.964,00 | | | | | | | 7 Laporan | 751.526.310,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 7.331.964,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 751.526.310,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 7.331.964,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 751.526.310,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 86.936.232,00 | | | | | | - | | 89.109.638,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 86.936.232,00 | | | | | | - | | 89.109.638,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 76.500.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 78.412.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.436.232,00 | | | | | | | 1 Paket | 10.697.138,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 10.436.232,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.697.138,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.436.232,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 10.697.138,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 76.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 78.412.500,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 76.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 78.412.500,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 76.821.720,00 | | | | | | - | | 100.101.276,00 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun: | | | | | | 76.821.720,00 | | | | | | - | | 100.101.276,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 43.191.026,00 | | | | | | | 10 Unit | 44.770.802,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 25.243.744,00 | | | | | | | 2 Unit | 46.733.850,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 8.386.950,00 | | | | | | | 2 Unit | 8.596.624,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 25.243.744,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.733.850,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 25.243.744,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 46.733.850,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 43.191.026,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 44.770.802,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 43.191.026,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 44.770.802,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 8.386.950,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.596.624,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 8.386.950,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 8.596.624,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 34.751.961,00 | | | | | | - | | 35.620.760,00 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun: | | | | | | 34.751.961,00 | | | | | | - | | 35.620.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 4.151.961,00 | | | | | | | 24 Laporan | 4.255.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 36 Laporan | 30.600.000,00 | | | | | | | 36 Laporan | 31.365.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 4.151.961,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.255.760,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 4.151.961,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 4.255.760,00 | Kecamatan Tanah Cogok |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 30.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.365.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 24 Laporan | 30.600.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 36 Laporan | 31.365.000,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 42.392.600,00 | | | | | | - | | 44.286.622,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 42.392.600,00 | | | | | | - | | 44.286.622,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.912.600,00 | | | | | | | 1 Unit | 5.035.415,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 4.912.600,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.035.415,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 3 Unit | 4.912.600,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 5.035.415,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | | - | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 54.878.980,00 | | | | | | - | | 56.216.014,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 54.878.980,00 | | | | | | - | | 56.216.014,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | - | 6.988.020,00 | | | | | | | - | 7.127.780,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 6.988.020,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 7.127.780,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | 4 Laporan | 6.988.020,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 7.127.780,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.873.706.020,00 | | | | | | - | | 2.945.847.621,00 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 2.873.706.020,00 | | | | | | - | | 2.945.847.621,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 3.986.000,00 | | | | | | | - | 4.384.600,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 3.986.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.384.600,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 1 Laporan | 3.986.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 4.384.600,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | | - | 19 Paket | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | 3 Orang | 0,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 42.392.600,00 | | | | | | - | | 44.286.622,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | - | 37.480.000,00 | | | | | | | - | 39.251.207,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 39.251.207,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | 1 Unit | 37.480.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 39.251.207,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| **305.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **274.214.074,00** | | | | | | | | **255.089.426,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***274.214.074,00*** | | | | | | | | ***255.089.426,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 Indeks | | 80 Indeks | 80 Indeks | 274.214.074,00 | | | | | | | 80 Indeks | 255.089.426,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 35.858.284,00 | | | | | | - | | 36.754.741,00 | |
| | | Tersedianya Koordinasi Penyelaranggaan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | | | | | | 35.858.284,00 | | | | | | - | | 36.754.741,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.422.052,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 26.057.603,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.436.232,00 | | | | | | | 12 Laporan | 10.697.138,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 10.436.232,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 10.697.138,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | 12 Laporan | 5 Laporan | 10.436.232,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 10.697.138,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 25.422.052,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.057.603,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.422.052,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 26.057.603,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 238.355.790,00 | | | | | | - | | 218.334.685,00 | |
| | | Jumlah Layanan yang terlaksana | | | | | | 238.355.790,00 | | | | | | - | | 218.334.685,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.355.790,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 9.439.685,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 230.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 208.895.000,00 | |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | 8.355.790,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.439.685,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.355.790,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 9.439.685,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 230.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 208.895.000,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 230.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 208.895.000,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| **306.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **57.670.137,00** | | | | | | | | **59.111.890,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***57.670.137,00*** | | | | | | | | ***59.111.890,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.596 Indeks | 0.655 Indeks | 57.670.137,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 59.111.890,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 57.670.137,00 | | | | | | - | | 59.111.890,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 57.670.137,00 | | | | | | - | | 59.111.890,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 57.670.137,00 | | | | | | | 2 Laporan | 59.111.890,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 57.670.137,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 59.111.890,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 57.670.137,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 59.111.890,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| **307.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **105.406.981,00** | | | | | | | | **105.042.156,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***105.406.981,00*** | | | | | | | | ***105.042.156,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kesejahteraan Sosial | 88.30 Indeks | | 88.30 Indeks | 88.30 Indeks | 105.406.981,00 | | | | | | | 88.30 Indeks | 105.042.156,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 105.406.981,00 | | | | | | - | | 105.042.156,00 | |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | | 105.406.981,00 | | | | | | - | | 105.042.156,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 57.247.069,00 | | | | | | | 150 Orang | 58.678.246,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 48.159.912,00 | | | | | | | 150 Orang | 46.363.910,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 48.159.912,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 46.363.910,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 48.159.912,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 46.363.910,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 57.247.069,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 58.678.246,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 57.247.069,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 58.678.246,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| **308.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **135.649.067,00** | | | | | | | | **144.690.294,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***135.649.067,00*** | | | | | | | | ***144.690.294,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 135.649.067,00 | | | | | | | 100 % | 144.690.294,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 135.649.067,00 | | | | | | - | | 144.690.294,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 135.649.067,00 | | | | | | - | | 144.690.294,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 12 Dokumen | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.132.824,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 14.486.145,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 52.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.104.112,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 9.331.715,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.029.371,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 29.755.105,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.382.760,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 18.842.329,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 18.382.760,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.842.329,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.382.760,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 18.842.329,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 12 Dokumen | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 29.029.371,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 29.755.105,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.029.371,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 29.755.105,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 14.132.824,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 14.486.145,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.132.824,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 14.486.145,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 52.275.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Dokumen | 52.275.000,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 9.104.112,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.331.715,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.104.112,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 9.331.715,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | **X** | | | | | | | **12.600.000,00** | | | | | | | | **14.702.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **12.600.000,00** | | | | | | | | **14.702.000,00** | |
| **309.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **12.600.000,00** | | | | | | | | **14.702.000,00** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | - | | - | BB Kategori | 12.600.000,00 | | | | | | | - | 14.702.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 12.600.000,00 | | | | | | - | | 14.702.000,00 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 12.600.000,00 | | | | | | - | | 14.702.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.500.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 9.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.100.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.202.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.100.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| -\|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 5.202.000,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 7.500.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 9.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.500.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Tanah Cogok \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 9.500.000,00 | Kecamatan Tanah Cogok |
| | | **Kecamatan Danau Kerinci Barat** | | | | | | **4.519.933.005,00** | | | | | | | | **3.820.593.990,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.519.933.005,00** | | | | | | | | **3.820.593.990,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.519.933.005,00** | | | | | | | | **3.820.593.990,00** | |
| **310.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.889.533.005,00** | | | | | | | | **3.820.593.990,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***3.519.533.005,00*** | | | | | | | | ***3.693.903.990,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | A Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 3.519.533.005,00 | | | | | | | BB Kategori | 3.693.903.990,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | - | | 158.362.500,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | - | | 158.362.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 31.672.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 31.672.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 31.672.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 31.672.500,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.672.500,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 31.672.500,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.672.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 31.672.500,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.672.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 31.672.500,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.672.500,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 31.672.500,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 3.223.320.000,00 | | | | | | - | | 3.624.956.490,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 180.000.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 164.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 26.393.750,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 3.000.000.000,00 | | | | | | | 23 Orang/bulan | 3.434.562.740,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.000.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 3.434.562.740,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 3.000.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23 Orang/bulan | 3.434.562.740,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 180.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 164.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 180.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 164.000.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 26.393.750,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 26.393.750,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | - | | 11.275.000,00 | |
| | | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang berhasil tersusun | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | - | | 11.275.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | | 7 Laporan | 11.275.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.275.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 25.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Laporan | 11.275.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 26.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 26.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | | 25 Paket | 20.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | | 3 Orang | 5.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 24 Paket | 20.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 25 Paket | 20.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 5.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 20.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Orang | 5.500.000,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 303.733.005,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Persentase Tingkat Keterpenuhan Layanan Administrasi | | | | | | 303.733.005,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.733.005,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 13.733.005,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 13.733.005,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 36 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 36 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 24 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 24 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 36 Laporan | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | | 24 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 24 Laporan | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 57.480.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 57.480.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | - | | 158.362.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 31.672.500,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 31.672.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | - | 4 Laporan | 30.000.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 31.672.500,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.223.320.000,00 | | | | | | - | | 3.624.956.490,00 | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | | 3.223.320.000,00 | | | | | | - | | 3.624.956.490,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | - | 13.320.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 13.320.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | | - | 5 Laporan | 13.320.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 57.480.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | - | 37.480.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 37.480.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | - | 1 Unit | 37.480.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| **311.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **280.400.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Tersedianya koordinasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan*** | | | | | | ***240.400.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 Indeks | | 80 Indeks | 80 Indeks | 240.400.000,00 | | | | | | | 80 Indeks | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | 240.400.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | | 240.400.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan | | | | | | 240.400.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.400.000,00 | | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | 40.400.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.400.000,00 | Provinsi Jambi \|\| Kab. Kerinci \|\| Kecamatan Danau Kerinci Barat \|\| - \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 24 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | | - | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | - | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | - | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| **312.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **60.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kapasitas & Kemandirian Masyarakat Desa & Kelurahan dalam Pembangunan & Pengelolaan Potensi Lokal*** | | | | | | ***60.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Indeks Desa | 0.710 Indeks | | 0.598 Indeks | 0.655 Indeks | 60.000.000,00 | | | | | | | 0.658 Indeks | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | | 5 Laporan | 6 Laporan | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| **313.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **110.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang Responsif, Koordinatif & Kondusif*** | | | | | | ***110.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kesejahteraan Sosial | 80 Indeks | | 70 Indeks | 70 Indeks | 110.000.000,00 | | | | | | | 70 Indeks | 0,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 110.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | | | | | | 110.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 60.000.000,00 | | | | | | | 150 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | | 200 Orang | 0,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 200 Orang | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 150 Orang | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| **314.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **180.000.000,00** | | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas*** | | | | | | ***105.000.000,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 999.Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan | 100 % | | 100 % | 100 % | 105.000.000,00 | | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26 Dokumen | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | | 26 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 14 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 14 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 26 Dokumen | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 26 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | 50.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kerinci | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kecamatan Danau Kerinci Barat |
| | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | **9.139.920.000,00** | | | | | | | | **9.423.929.469,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **9.139.920.000,00** | | | | | | | | **9.423.929.469,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **9.139.920.000,00** | | | | | | | | **9.423.929.469,00** | |
| **315.** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.410.193.705,00** | | | | | | | | **5.945.458.325,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabilitas & Efektif*** | | | | | | ***5.338.193.705,00*** | | | | | | | | ***5.866.258.325,00*** | |
| | | | 999.Nilai SAKIP | BB Kategori | | BB Kategori | BB Kategori | 5.338.193.705,00 | | | | | | | BB Kategori | 5.866.258.325,00 | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 92.751.290,00 | | | | | | - | | 102.026.419,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 92.751.290,00 | | | | | | - | | 102.026.419,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 11.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 52.751.290,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 58.026.419,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 2 Dokumen | 11.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 55 Laporan | 22.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 52.751.290,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 58.026.419,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 52.751.290,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 58.026.419,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 11.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Dokumen | 11.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | 5 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 55 Laporan | 22.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.705.727.500,00 | | | | | | - | | 5.174.505.500,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Keuangan | | | | | | 4.705.727.500,00 | | | | | | - | | 5.174.505.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 142.560.000,00 | | | | | | | 12 Dokumen | 152.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.512.800,00 | | | | | | | 1 Laporan | 18.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 29.784.700,00 | | | | | | | 18 Laporan | 32.948.500,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | | 32 Orang/bulan | 32 Orang/bulan | 4.518.870.000,00 | | | | | | | 32 Orang/bulan | 4.970.757.000,00 | |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.518.870.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.970.757.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | | 32 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 4.518.870.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 32 Orang/bulan | 4.970.757.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 142.560.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 152.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 142.560.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Dokumen | 152.200.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 14.512.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.512.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Laporan | 18.600.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 29.784.700,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 32.948.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 13 Laporan | 29.784.700,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 18 Laporan | 32.948.500,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | - | | 22.000.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | - | | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 22.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 22.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 59.700.000,00 | | | | | | - | | 65.670.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Kepegawaian | | | | | | 59.700.000,00 | | | | | | - | | 65.670.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 35 Paket | | 35 Paket | 35 Paket | 32.000.000,00 | | | | | | | 35 Paket | 35.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 27.700.000,00 | | | | | | | 7 Orang | 30.470.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 32.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 35.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 35 Paket | | 35 Paket | 37 Paket | 32.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 35 Paket | 35.200.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 27.700.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.470.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 27.700.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 7 Orang | 30.470.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 232.000.000,00 | | | | | | - | | 255.200.000,00 | |
| | | Tertibnya Administrasi Umum | | | | | | 232.000.000,00 | | | | | | - | | 255.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.000.000,00 | | | | | | | 3 Dokumen | 20.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 35 Laporan | 35 Laporan | 145.000.000,00 | | | | | | | 46 Laporan | 159.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 22.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 24.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 4.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 22.000.000,00 | | | | | | | 1 Paket | 24.200.000,00 | |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 4.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 4.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 4.400.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 22.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 22.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 24.200.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 22.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 24.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 22.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 24.200.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Paket | 22.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 145.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 159.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 35 Laporan | 40 Laporan | 145.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 46 Laporan | 159.500.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 19.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 20.900.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Dokumen | 20.900.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 52.854.915,00 | | | | | | - | | 58.140.406,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 52.854.915,00 | | | | | | - | | 58.140.406,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 4 Unit | 10 Unit | 45.000.000,00 | | | | | | | 10 Unit | 49.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 4 Unit | 10 Unit | 7.854.915,00 | | | | | | | 10 Unit | 8.640.406,00 | |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 45.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 49.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 49.500.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 7.854.915,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.640.406,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 4 Unit | 5 Unit | 7.854.915,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Unit | 8.640.406,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 58.600.000,00 | | | | | | - | | 60.500.000,00 | |
| | | Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 58.600.000,00 | | | | | | - | | 60.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | | 3 Laporan | 27.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | | 2 Laporan | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 350 Laporan | | 350 Laporan | 350 Laporan | 3.600.000,00 | | | | | | | 350 Laporan | 0,00 | |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 3.600.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 350 Laporan | | 350 Laporan | 350 Laporan | 3.600.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 350 Laporan | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 27.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3 Laporan | 27.500.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 33.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Laporan | 33.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 188.560.000,00 | | | | | | - | | 207.416.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 188.560.000,00 | | | | | | - | | 207.416.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 90.000.000,00 | | | | | | | 1 Unit | 99.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 98.560.000,00 | | | | | | | 2 Unit | 108.416.000,00 | |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 98.560.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 108.416.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 98.560.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2 Unit | 108.416.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 99.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Unit | 99.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **316.** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | **1.558.321.900,00** | | | | | | | | **1.540.215.930,00** | |
| | | ***Meingkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan*** | | | | | | ***1.558.321.900,00*** | | | | | | | | ***1.540.215.930,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persentase | | 85 Persentase | 90 Persentase | 1.558.321.900,00 | | | | | | | 95 Persentase | 1.540.215.930,00 | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | 1.558.321.900,00 | | | | | | - | | 1.540.215.930,00 | |
| | | Meingkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | | | | | | 1.558.321.900,00 | | | | | | - | | 1.540.215.930,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 70.848.100,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 1 Keluarga | | 1 Keluarga | 1 Keluarga | 18.000.000,00 | | | | | | | 1 Keluarga | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 30.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 60.000.000,00 | | | | | | | 30 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 240 Orang | | 160 Orang | 160 Orang | 94.196.300,00 | | | | | | | 160 Orang | 103.615.930,00 | |
| | | | Jumlah Paskibraka | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 1.252.277.500,00 | | | | | | | 30 Orang | 1.389.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 16.500.000,00 | |
| | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 20.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 70.848.100,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 0 Dokumen | 70.848.100,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 94.196.300,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 103.615.930,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 240 Orang | | 160 Orang | 160 Orang | 94.196.300,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 160 Orang | 103.615.930,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 60.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 30 Orang | | 30 Orang | 0 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 28.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 30.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 30.800.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 1 Keluarga | | 1 Keluarga | 0 Keluarga | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Keluarga | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | 15.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 16.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 16.500.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | 1.252.277.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.389.300.000,00 | |
| | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka | 30 Orang | | 30 Orang | 30 Orang | 1.252.277.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 30 Orang | 1.389.300.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **317.** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | **1.420.359.850,00** | | | | | | | | **1.259.506.215,00** | |
| | | ***meningkatnya etika dan budaya politik*** | | | | | | ***1.420.359.850,00*** | | | | | | | | ***1.259.506.215,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | 999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | 92 Persentase | | 80 Persentase | 83 Persentase | 1.420.359.850,00 | | | | | | | 86 Persentase | 1.259.506.215,00 | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | 1.420.359.850,00 | | | | | | - | | 1.259.506.215,00 | |
| | | Persentase Pendidikan Politik dan Kader Partai Politik | | | | | | 1.420.359.850,00 | | | | | | - | | 1.259.506.215,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.354.200,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 270.000.000,00 | | | | | | | 6 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 17.000.000,00 | | | | | | | 5 Laporan | 18.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 52.318.150,00 | | | | | | | 50 Orang | 57.549.965,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 500 Orang | | 500 Orang | 500 Orang | 1.075.687.500,00 | | | | | | | 500 Orang | 1.183.256.250,00 | |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 5.354.200,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 5.354.200,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 270.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 0 Dokumen | 270.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 6 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 1.075.687.500,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 1.183.256.250,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 500 Orang | | 500 Orang | 159089 Orang | 1.075.687.500,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 500 Orang | 1.183.256.250,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 52.318.150,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 57.549.965,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 52.318.150,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 50 Orang | 57.549.965,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 17.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 18.700.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5 Laporan | | 5 Laporan | 4 Laporan | 17.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Laporan | 18.700.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Persentase Pendidikan Politik dan Kader Partai Politik | | | | | | 1.420.359.850,00 | | | | | | - | | 1.259.506.215,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | - | | - | - | 0,00 | | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | 0,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya penugasan paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | - | | - | 1 Kegiatan | 0,00 | Kab. Kerinci | - | | | | | - | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **318.** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | **104.000.000,00** | | | | | | | | **75.900.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan*** | | | | | | ***94.000.000,00*** | | | | | | | | ***75.900.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 100 Persentase | | 85 Persentase | 90 Persentase | 94.000.000,00 | | | | | | | 95 Persentase | 75.900.000,00 | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | 104.000.000,00 | | | | | | - | | 75.900.000,00 | |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | | | | | | 104.000.000,00 | | | | | | - | | 75.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 8.000.000,00 | | | | | | | 20 Laporan | 8.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | | 10 Orang | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 60 Orang | | Orang | 60 Orang | 51.000.000,00 | | | | | | | 60 Orang | 56.100.000,00 | |
| | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 51.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 56.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 60 Orang | | Orang | 52 Orang | 51.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 60 Orang | 56.100.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 Orang | | 10 Orang | 52 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 10 Orang | 11.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 8.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 20 Laporan | | 20 Laporan | 4 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 20 Laporan | 8.800.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **319.** | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | **167.460.800,00** | | | | | | | | **166.606.880,00** | |
| | | ***Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat*** | | | | | | ***159.460.800,00*** | | | | | | | | ***166.606.880,00*** | |
| | | | 999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | 100 Persentase | | 80 Persentase | 85 Persentase | 159.460.800,00 | | | | | | | 90 Persentase | 166.606.880,00 | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | 167.460.800,00 | | | | | | - | | 166.606.880,00 | |
| | | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | | | | | | 167.460.800,00 | | | | | | - | | 166.606.880,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.460.800,00 | | | | | | | 12 Laporan | 29.106.880,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 11 Orang | 90.000.000,00 | | | | | | | 11 Orang | 99.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 35.000.000,00 | | | | | | | 100 Orang | 38.500.000,00 | |
| | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 35.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 38.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100 Orang | | 100 Orang | 200 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100 Orang | 38.500.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 90.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 99.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 200 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 11 Orang | 99.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 26.460.800,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 29.106.880,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 8 Laporan | 26.460.800,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 29.106.880,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **320.** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | **479.583.745,00** | | | | | | | | **436.242.119,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | ***Meningkatnya penanganan konflik sosial yang deselesaikan*** | | | | | | ***479.583.745,00*** | | | | | | | | ***436.242.119,00*** | |
| | | | 999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | 100 Persentase | | 34.3 Persentase | 57.1 Persentase | 479.583.745,00 | | | | | | | 77.1 Persentase | 436.242.119,00 | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | 479.583.745,00 | | | | | | - | | 436.242.119,00 | |
| | | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | | | | | | 479.583.745,00 | | | | | | - | | 436.242.119,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 18.000.000,00 | | | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 450 Orang | | 450 Orang | 450 Orang | 101.583.745,00 | | | | | | | 450 Orang | 111.742.119,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 9 Orang | | 9 Orang | 9 Orang | 95.000.000,00 | | | | | | | 9 Orang | 104.500.000,00 | |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 0 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 18.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 0 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5 Dokumen | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 95.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 104.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 9 Orang | | 9 Orang | 52 Orang | 95.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 9 Orang | 104.500.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 101.583.745,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 111.742.119,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 450 Orang | | 450 Orang | 450 Orang | 101.583.745,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 450 Orang | 111.742.119,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 40.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 12 Laporan | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | - | - | PP1. Peningkatan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | | 220.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | PROVINSI | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Kerinci | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **1.601.389.639.279,80** | | | | | | | | **4.174.035.827.796,97** | |

**Lampiran II.** Daftar Usulan Masyarakat Tahun 2027

## DAFTAR USULAN MASYARAKAT TAHUN 2027

**Dinas Pariwisata dan kebudayaan**

| NO | PENGUSUL | PROFIL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | USULAN KE | OPDTUJUAN AKHIR | STATUS | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI KECAMATAN | REKOMENDASI SKPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALIMAN,S.Ap | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Belum tersentuhnya dan belum terkelolanya dengan baik objek wisata air terjun putri bungsu sungai medang | Air terjun putri bungus desa sungai medang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Sungaimedang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Usulantelahdiverifikasi sfesifikasi teknisnya, mohon pertimbangan TAPD untuk masukkan ke Rancangan RENJA | 1 | Paket | 25.000.000 | - | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 2 | TAUFIK | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Adanya potensi alam yang baik untuk di jadikan desa wisata, tetapi kurangnya pemahaman masyarakat untukmembangun desa wisata bersama, untk itu kami membutuhkan pelatihan serta pendampingan untuk menjadikan desa wisata | Jembatan airdesa jembatan merah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Jembatan Merah Pulau Tengah | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | sudahdibahas di pra musrenbang | Usulantelahdiverifikasi, mohon pertimbangan TAPD untuk masukkan ke Rancangan RENJA | 200 | Orang | 250.000.000 | - | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 3 | DEDI SANTOSO, S.Kom | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Potensi wisata desa belum dikembangkansecaraoptimal | Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Keluru | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan | sulan telah diverifikasi, mohon pertimbangan TAPD untuk masukkan ke Rancangan RENJA | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |

**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

| NO | PENGUSUL | PROFIL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | USULAN KE | OPDTUJUAN AKHIR | STATUS | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI KECAMATAN | REKOMENDASI SKPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDI MIZWAR | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | masih ada jalan berlubang yang mengakibatkansering terjadinya kecelakaan di wilayah koto payang | RT 02 s/d RT 05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Payang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 | ABDURASYID | Kelurahan/ Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | rumah tidak layak huni | rt 03 koto tuo Desa Tebing Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Tebing Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan di terimadan diteruskan ke OPD terkait. | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 3 | ABDURASYID | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan sudah rusak | Bukit seru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Tebing Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 4 | SRI USIARTO PUTRA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan menuju sekolah sudah rusak sementara jalan tersebut sangat menjadi hal utama kebutuhan,danpendanaan dari desa saat ini tidak mencukupi | RT 1,2 Desa Tambak Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tambak Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 5 | SRI USIARTO PUTRA | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | akses masyarakat ke masjid terlalu jauh ,membutuhkan jembatanuntuk mempercepat akses | rt 02, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tambak Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Pembangunan Jembatan | - | - | - | Non Belanja Transfer | Pembangunan Jembatan |
| 6 | VONI DEMAYENTI | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Kabupaten Rusak Parah tepatnya di jalan antara Desa Baru Kubang dan Lubuk suli Kecamatan Depati Tujuh | RT 003 Desa Baru Kubang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Baru Kubang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 7 | VONI DEMAYENTI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | saluran drainase tidak ada antara jalan desa baru kubang dan lubuk suli, akibatnya terjadi banjir | RT 003, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Baru Kubang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 8 | WIRASATRIA BUANA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Sudah Rusak dan Belum di Aspal | Desa Semumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Semumu | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MUKHLAS | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Sudah Rusak parah | Desa Pasar Tamiai di Dusun Kapuk Gedang dan Dusun Tumbuk Duo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Pasar Tamiai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan Bisa diajukan Karena berdasarkan Laporan Kepala Desa Jalanini benar-benar Rusak Parah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 10 | MUKHLAS | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Banyaknya Rumah yang tidak layak huni dalam wilayah Desa Pasar Tamiai | Desa Pasar Tamiai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Pasar Tamiai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 11 | SAIDINA UMAR | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan sepanjang lebih kurang 500 meter yang menghubungkan Desa Semerap dengan Koto Tengah dan jalan dari Batas Desa Koto Tengah sampai ke Dermaga Pinggir Danau Desa Semerap | Dusun Sanggodirajo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Semerap | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | DILANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 12 | KHAIRI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Mempermudah Akses Mobilisasi Masyrakat | Dusun Bukit Barisan , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Baru Semerap | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | DILANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 13 | KHAIRI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | mempermudahakses Keladang antar desa | Dusun Terutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Baru Semerap | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | DILANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 14 | ZULPAHMI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Akses jalan penghubung antara Desa Koto Tengah, Desa Semerap, dan Pasar Semerap hingga saat ini belum tersedia secara memadai. Kondisi jalan yang ada masih terbatas, sebagian rusak, dan belum memenuhi standar jalan penghubung antarwilayah. Hal ini menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi terhambat, terutama dalam aktivitas ekonomi, perdagangan, dan akses menuju pusat pelayanan serta pasar. | Dusun Simpang Empat Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 15 | WIRASATRIA BUANA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Belumadanya Jembatan Menuju Pustu | Semumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Semumu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 16 | JAFRIZAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Sulit Aksses Pengangkutan Hasil Panen Masyarkat | RT 03 Dusun Lama Desa, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Tanjungpauh Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 17 | JUNAIDI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Terhambatnyapengangkutan hasil Pertanian | Desa Punai Merindu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Punai Merindu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 18 | Saipul Rahman | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Jalan Yang Terletak di RT. 04 Desa Kubang Agung, Merupakan Jalan Kabupaten, dan Kondisi Saat Pada Saat ini sudah Rusak Berat dan Tergenang Air, dan sudah Lama Tidak diperbaiki. | RT.04 Desa Kubang Agung, Kecamatan Depati Tujuh, Prov. Jambi., Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kubang Agung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Pembangunan Jalan | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 19 | Saipul Rahman | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan di RT.01 Desa Kubang Agung Merupakan Jalan Penghubung Antara Kabupaten dan Kota, sedangkan Jalan Tersebut Kurang Lebar. | RT.01 Desa Kubang Agung, Kecamatan Depati Tujuh, Kab. Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kubang Agung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MASRIZAL | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan Gantung yang menghubungkan pemukiman dengan wilayah pertanian kondisinya yang masih Semi Permanen. Sebagian besar warga melintasi dengan menggunakan sepeda motornya. Padahal lebar jembatan itu hanya sekitar satu meter dipastikan tidak bisa untuk bersimpangan dan jembatan bergoyang saat dilalui sepeda motor. Jika, kondisi ini dibiarkan dan tidak dibangun jembatan beton permanen maka akan terus membahayakan warga yang melintas | Koto Baru Hiang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Koto Baru Hiang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lanjut ke tahap berikutnyauntuk pembaahasan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 21 | HARMANSYAH | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | sulitnya para petani untuk membawa hasil ke rumah masyarakat | Jalan baru , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Tanjungpauh Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 22 | MASRIZAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Kondisi jalan lingkungan desa sekarang sudah banyak dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, untuk itu perlu adanya pengaspalan jalan untuk lebih meningkatkan kenyamanan pengguna jalan lingkungan | Koto Baru Hiang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Koto Baru Hiang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lanjut ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 23 | SAHARMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jalan Raya Lubuk Suli mengalami rusak berat | Lubuk Suli, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Lubuk Suli | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 24 | MASRIZAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi jalan lingkungan desa sekarang sudah banyak dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, untuk itu perlu adanya pengaspalan jalan untuk lebih meningkatkan kenyamanan pengguna jalan lingkungan | Koto Baru Hiang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Koto Baru Hiang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | lanjut tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 25 | PADLI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | banyaknya jalan yang sudah rusak parah dan badan jalan sudah tidak terawat lagi. | Desa Permai Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Permai Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Perbaikan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 26 | SAHARMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | drainase di desa lubuk suli tidak berfungsi dengan optimal | Lubuk Suli, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Lubuk Suli | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 27 | SAHARMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | terdapat jalan lingkungan yang telah rusak | Lubuk Suli, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Lubuk Suli | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 28 | Budi Satria, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | untukmeningkatkan infrastruktur dan perekonomian Desa | Desa Kayu Aho Mangkak, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kayu Aho Mangkak Koto Lanang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 29 | PADLI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | banyaknyajalanlingkungan yang sudah Rusah Parah. | Dusun Padang Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Permai Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 30 | HARMANSYAH | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan sudah banyak berlobang lobang | tanjung pauh mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Tanjungpauh Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | YON SIMAMURA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | banyaknya jalan yang sudah rusak dan badan jalan sudah tidak terawat lagi | desa Bukit Pulai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Bukitpulai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 32 | Budi Satria, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | untuk mengatasi banjir di saat musim hujan | Desa Kayu Aho Mangkak, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kayu Aho Mangkak Koto Lanang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | PeningkatanDrainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 33 | ADE INDRAYADI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | KONDISI SANGAT MEMPERHATINKAN, JEMBATAN HAMPIR PATAH, DIMUSIM HUJANMEMBUAH ARUS SUNGAI TERHAMBAT DAN MEMBUAT AIR SUNGAI MELUAP DAN MEMBANJIRI RUMAH WARGA | DUSUN PASAR MELINTANG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Tanjungharapa n | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 34 | YON SIMAMURA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | banyak nya jalan desa yang sudah rusak parah di desa Bukit Pulai | desa Bukit Pulai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Bukitpulai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 35 | SUHARTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | BANYAKNYA JALAN YANG SUDAH RUSAK | SERUMPUN PAUH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Serumpun Pauh | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 36 | HENDRI JUMIRAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | SERING TERJADINYA BANJIR BANDANG,, | PANCURAN TIGA, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pancuran Tiga | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | PeningkatanDrainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 37 | HENDRI JUMIRAL | Kelurahan / Desa | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BELUM ADANYA IRIGASI DI DESA PANCURAN TIGA,, SEHINGGA MASALAH PERTANIAN BELUM MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN | PANCURAN TIGA, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pancuran Tiga | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | PeningkatanJaringan Irigasi | - | - | - | - | PeningkatanJaringan Irigasi Permukaan |
| 38 | EKA IRFANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Tidak adanyapenghubung jalan desa dengan dusun seberang Sungai | Dusun Sake hamparan pugu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Hamparan Pugu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lengkapi Profosal Agar dapat di Prioritaskan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 39 | EKA IRFANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Kurang Memadainya Jalan poros desa hamparan pugu ke desa koto mudik dan Desa Koto Dua Baru | Dusun Sake hamparan pugu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Hamparan Pugu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lengkapi Profosal Agar dapat di Prioritaskan | Pembangunan Jalan | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 40 | SUARDESI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Lancarnya akses hasil pertanian dan perkebunan | Sungai Batu Gantih, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibatu Gantih | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lanjutkan ke SKPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 41 | SUARDESI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | lancarnya Aktivitas penduduk | Sungai Batu Gantih, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibatu Gantih | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lanjutkan ke SKPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 42 | SUARDESI | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Layaknyatempat tinggal masyarakat | Sungai Batu Gantih, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibatu Gantih | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | SETUJU LANJUTKAN KE SKPD TERKAIT | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 43 | JASDI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | SULITNYAMASYARAKAT UNTUK MENGANGKUT HASIL PANEN DIWAKTU HARI HUJAN | DESA BARU PULAU SANGKAR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Baru Pulau Sangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 44 | JASDI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | ADA BEBERAPA TITIK JALAN YANG SUDAH RUSAK | DESA BARU PULAU SANGKAR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Baru Pulau Sangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | JASDI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | ada beberapa titik jalan rusak | desa baru pulau sangkar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Baru Pulau Sangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 46 | JASDI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | lambatnya air susut diwaktu hari hujan | desa baru pulau sangkar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Baru Pulau Sangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 47 | SULAIMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | PENGASPALANJALAN PRODUKSI KETEBAT | RT.002 DESA KOTO PATAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Patah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 48 | SULAIMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | KONDISI JALAN RUSAK | RT.002 DESA KOTO PATAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Patah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 49 | SULAIMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | KONDISI JALAN RUSAK | RT.003 DESA KOTO PATAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Patah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 50 | Ali Topan | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan yang lama sudah banyak yg rusak akibat Banjir | koto panjang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Panjang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 51 | ANDRE AGASSI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan Rusak | Desa Lempur Hilir, Dusun Puti Ayu Mariam , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Lempur Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | usulan dapat direkomendasikan dengan judul Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 52 | ANDRE AGASSI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Sempit | Desa Lempur Hilir, Dusun Puti Ayu Mariam , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Lempur Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | direkomendasikan Jalan Sempit | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 53 | ANDRE AGASSI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Belum tersedianya drainase di beberapa lokasi di Dusun Puti Ayu Mariam | Desa Lempur Hilir, Dusun Puti Ayu Mariam , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Lempur Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | usulan dapat direkomendasikan dengan judul Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 54 | ANDRE AGASSI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Belum tersedianya drainase di beberapa lokasi di Dusun Sumur Jernih | Desa Lempur Hilir, Dusun Sumur Jernih , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Lempur Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | usulan dapat direkomendasikan dengan judul Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 55 | FARDI AMRAN, S.Ap | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | pembangun jalan lingkungan | desa kubang gedang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kubang Gedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | null | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 56 | FARDI AMRAN, S.Ap | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Kurang Aliran Air Sawah Ke Lahan Jauh Dan Mengatasi banjir | Desa Kubang gedang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kubang Gedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | - | - | - | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 57 | AZRA SALMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | masih banyak jalan Aspal berlobang di desa lempur mudik | Dusun Muaro Nyua dan Dusun bandar Aro, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Lempur Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | usulan dapat direkomendasikan dengan judul Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 58 | SOPYAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Draenase Kiri Kanan Jalan Kabupaten Sudah Lebih 13 Tahun tertutup Dan tidak Dipernah diperbaiki | Desa Perikan Tengah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Perikan Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | RENGKI ANDIKA, S.Pd.I | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi jalan lingkungan yang masih rusak parah dan perlu adanya perbaikan pengaspalan | Dusun Jaya Agung Desa Agung Koto Iman Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Agung Koto Iman | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 60 | RENGKI ANDIKA, S.Pd.I | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Kondisi jalan lingkungan yg rusak berat dan perlu adanya pembangunanjalanlingkungan baru | Dusun Jaya agung desa Agung koto iman Kecamatan tanah cogok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Agung Koto Iman | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanditerima dan diteruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 61 | Emi Ilyas | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | MASYARAKAT SANGAT MEMBUTUHKAN JEMBATAN PENGHUBUNG JALAN USAHA TANI UNTUK MENGANGKUT HASIL PERTANIAN | DESADUSUN BARU LEMPUR RT 04 DUSUN MUARO LANGKAP, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Dusun Baru Lempur | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 62 | JEGKI WANJAYA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | UNTUK MEMPERMUDAH MYYARAKATOBILITAS MAS | DESA TEBAT IJUK DILI, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk Dili | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 63 | EDI JANUAR | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Diperlukansebagai alternatif banjir dikala musim hujan melanda. | Baru Semerah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Baru Semerah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | lanjut tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 64 | Emi Ilyas | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | JALAN USAHA TANI PERLU DITINGKATKAN KARNA SAAT MUSIM PENGHUJAN JALAN MENJADI LICIN MENGAKIBATKAN HASIL TANI TIDAK BISA DIKELUARKAN DARI KEBUN PETANI | RT 4 DUSUN MUARO LANGKAP DESA DUSUN BARU LEMPUR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Dusun Baru Lempur | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 65 | UMAR MUKTAR, S.Pd | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Layaknyatempattinggal masyarakat | Baru sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Baru Sungai Betung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setujudilanjutkan ke perangkat daerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 66 | UMAR MUKTAR, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Lancarnya akses perekonomian | Baru sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Baru Sungai Betung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setujudilanjutkan ke perangkat daerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 67 | NAELEDWIN, S.Pt, M.Si | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Lancarnya akses perekonomian | Danau Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Danautinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setujuuntuk dilanjutkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 68 | NAELEDWIN, S.Pt, M.Si | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Lancarnya akses perekonomian | Danau Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Danautinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 69 | NAELEDWIN, S.Pt, M.Si | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnyakegiatan/aktifitas penduduk | Danau Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Danautinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 70 | SAHARMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya akses penduduk | Siulak Deras Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Siulak Deras Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setujuuntuk dilanjutkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 71 | SAHARMAN | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Layaknyatempattinggal masyarakat | Siulak Deras Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Siulak Deras Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 72 | NINO CASTALINO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Peningkatanakses penduduk dan perekonomian | Sungai Betung Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibetung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | NINO CASTALINO | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Layaknyatempattinggal masyarakat | Sungai Betung Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibetung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 74 | FATTU ROHMI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Sulitnyaaktivitas masyarakat akibat kerusakan jalan lingkungan. | Dusun Talang alai satu ke Dusun Talang Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Pematang Lingkung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 75 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan kabupaten rusak parah tepatnya arah ke Desa sekungkung kecamatan Depati tujuh | Rt 005 desa Koto Tuo Kab. Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 76 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan Desa di Rt 003 rusak Parah sedangkan Dana Tidak Cukup | Rt 003 Kab.Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 77 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | anggaran tidak mencukupi | rt 001-005 kab.kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 78 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | anggaran tidak mencukupi | rt 02 - rt 05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 79 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan lingkungan di desa sudah rusak dan harus melakukan peningkatan terhadap jalan rt 01 | rt 01, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 80 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan lingkungan di desa sudah rusak dan harus melakukan peningkatan terhadap jalan rt 02 | rt 02, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 81 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan lingkungan di desa sudah rusak dan harus melakukan peningkatan terhadap jalan rt 04 | rt 04, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 82 | PIRA DIRSAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan lingkungan di desa sudah rusak dan harus melakukan peningkatan terhadap jalan rt 05 | rt 05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 83 | NAELEDWIN, S.Pt, M.Si | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Lancarnya aliran air | Danau Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Danautinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 84 | DEBY RAHMADIAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Tidak ada bak penampung sampah sehingga banyak sampah berserakan di sungai dan di semak-semak pinggir jalan penghubung antar desa. | Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Sungaihangat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 85 | NASWAN HERMAWAN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | untuk mempermudah pengangkutan hasil panen di butuhkan pembangunan jembatanpenghubung bandar encong ke hilir jauh | RT 02 Dusun Bandar Panjang Desa Koto Majidin Hilir, Kab. Kerinci , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | KotoMajidin Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 86 | DEBY RAHMADIAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Pembangunan Drainase di sepanjang jalan (Jalan Kabupaten) wilayah Desa Sungai Hangat. Sering terjadi banjir apabila curah hujan yg tinggi, sehingga air masuk ke rumah warga. | Desa Sungai Hangat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Sungaihangat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | DEBY RAHMADIAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan, Semak Belukar di sepanjang jalan (Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi) jalan penghubung antar desa, sehingga jalan terlihat sempit dan banyak berlobang, rawan terjadi kecelakaan. | Jalan Penghubung antar Desa di wilayah Timur Kecamatan Gunung Raya., Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Sungaihangat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 88 | Suparman | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | KEADAAN JEMBATAN YANG MERUPAKAN POROS UTAMA KE IBU KOTA KECAMATAN KONDISI SAAT INI SUDAH LAYAK UNTUK SEGERA DI REVITALISASI ATAUDILAKUKAN PEMELIHARAAAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA PENGGUNAAN JEMBATAN | DESA SAKO DUA RT 01 DUSUN 1 KECAMATAN KAYU ARO BARAT PROVINSI JAMBI, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sako Duo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalandan Jembatan | - | - | - | - | Pemeliharaan Rutin Jembatan |
| 89 | SYAFTIAR, A.Md. DPT | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Masih mininmya jalan Aspal Desa Koto Majidin Mudik | Desa Koto Majidin Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 90 | UMARGANI, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | gorong gorong sempit sehinga sering ketutup saat hujan yang membawa materila pasir dan batu | dusun 2 di pemukiman masyarakat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Ujung Ladang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 91 | UMARGANI, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | longsorkarena musim hujan perlu tembok penahan di pemukima masyarkat | sepanjang pemukimanan dusun 2 desa ujung ladang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Ujung Ladang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatanbangunan perkuatan tebing | - | - | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 92 | PRI ISMAIL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Banyaknya jalan yg rusak | Pondok sungai abu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Pondok Sungaiabu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 93 | ADRIZAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | di Karenakan Jalan Lingkungan Banyak Yang Rusak | tebat Ijuk , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 94 | ADRIZAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Permintaan masyarakat perbaikanjalan Lingkungan | Tebat Ijuk , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 95 | PRI ISMAIL | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Terputusnyaakses jalan masyarakat ke ladang | Pondok sungai abu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Pondok Sungaiabu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 96 | DEDI SUTRISNO | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Terdapat Jembatan Yang harus dibangun ulang atau dibenahi (Rehabilitasi Jembatan) dan dibutuhkan peningkatan kualitas jalan di dekat Jembatan | Rt. 04 KELURAHAN LEMPUR TENGAH Menuju Lempur Mudik/ Jalan Air Lubuk Giluk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Lempur Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | HERI PURWANTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan menuju area gedung pelayanan sekaligus sebagai jalan penghubung Desa Koto Baru Semurup dengan Desa Koto Diair serta sebagai jalur utama petani mengangkut hasil pertanian, hingga saat ini masih berupa jalan tanah/kerikil yang kondisinya rusak, saat hujan sulit dilalui kendaraan. Kondisi tersebut mengakibatkan: Terhambatnya akses pelayanan dan kegiatan masyarakat, Sulitnya mobilitas antar desa, Terganggunya distribusi hasil pertanian, Meningkatnya biaya angkut dan menurunnya. | LARIK GENTING RT 001 & MUDIK JALAN RT 004 DESA KOTO BARU SEMURUP, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Baru Semurup | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Linigkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 98 | HALAPNI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan yang ada sekarang sudah rusak | Jalan Masjid Istiqomah Rt 02 Desa Belui, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 99 | HALAPNI | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | rumah yang ditempati sudah mau roboh dan tidak layak di huni lagi, dinding bertempelkan seng bekas | dusuntamiang marindau, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | lanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 100 | SUNANDAR AZ,S.Pd | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan lingkungan butuh pengaspalankarnamerupkan akses jalan utama masyarakat | Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Koto Tuo Ujung Pasir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 101 | RISWANDI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Telah Tidak Tersedia Nya Drenase Sepanjang Jalan Raya Arah Ke Masgo Sehinga Aliran Air Limbah Masyarakat Mengalir Di Jalan | Desa Selampaung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Selam Paung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 102 | BONI KARTOMI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Ketika curah hujan lebat mengalir air hujan berlebih ke saluran pembuangan,terjadi genangan air sehingga jalan cepat rusak | Desa Jujun Kecamatan Keliling Danau, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Jujun | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 103 | MUDARDI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | setiap musim hujan sawah dan jalan raya terendam, banjir | Desa Lempur Danau, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Lempur Danau | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dansudah dibahas di pramusrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 104 | GERI UTAMA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | BELUM ADANYA PEMBANGUNAN JALAN ASPAL DI DESA MASGO | dESA Masgo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Masgo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | DI REKOMENDASIKAN KARENA BELUM ADANYA PEMBANGUNAN JALAN ASPAL DI DESA MASGO | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 105 | JOHAN IDRU,S.Pd | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya akses penduduk | Sungai Betung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibetung Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 106 | JOHAN IDRU,S.Pd | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Layaknyatempattinggal masyarakat | Sungai Betung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibetung Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 107 | GOFRIZAL, S.PdI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya aktifitas masyarakat | Suko Pangkat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Suko Pangkat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | DURMAWEL, S.H | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan lingkungan desa banyak yang rusak | Pondok Beringin, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Pondok Beringin | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | lanjut tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 109 | ZORI ARSIL HADI,AMA,DPT | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Penyumbatan Pada Drainase Di RT. 03 Maka Di Perlukannya Pembangunan Box Culvert Di Simpang 4 RT. 03 Desa Balai Kec. Air Hangat | RT. 03 Desa Balai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Balai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 110 | ZORI ARSIL HADI,AMA,DPT | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Selalu Terjadi Banjir Apabila Curah Hujan Lebat Di RT. 01 Maka Diperlukannya Pembangunan Tembok Penahan Di Sepanjang Sungai Batang Merao Sepanjang 200M | RT. 01 Desa Balai Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Balai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 111 | ZORI ARSIL HADI,AMA,DPT | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Kondisi Jalan yang tidak rata akibat banjir maka di perlukan pembangunan jalan aspal goreng di RT. 01 | RT. 01 Desa Balai Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Balai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 112 | RUSDYANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | rusak | rt 033 Desa Kecil, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Kecil | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Kegitaan Prioritas | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 113 | NASWAN HERMAWAN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | pada musim hujan dan meluapnya air bandar menterong ke jalan mengakibatkan terkikis nya bahu jalan di sepanjang bandar menterong, dibutuhkan tembok penahan jalan | RT 02 Dusun Bandar Panjang, Desa Koto Majidin Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 114 | MUHAMMAD AZAR | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya aktifitas penduduk | Air Betung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Air Betung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 115 | MUHAMMAD AZAR | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Lancarnyaaliran air/Pencegah banjir | Air Betung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Air Betung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 116 | TOMI JAFISA, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Peningkatanhasil produksi pertanian | Sungai Gelampeh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaigelampeh | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 117 | VASIHAN YAMAPUTRA, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Sudah lama tidak di perbaiki | Muara Semerah Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Muara Semerah Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 118 | ZUL ATMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | kerusakan pada jalan rt1,rt2,rt3 desa air bersih | desa air bersih, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Air Bersih | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lengkapi dengan Profosal Agardapat dipenuhi dan di Prioritaskan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 119 | TOMI JAFISA, S.Pd | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya akses penduduk | Sungai Gelampeh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaigelampeh | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 120 | BOY DORES | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | terdapat jalan lingkungan yang tidak layak dan dibutuhkan Betonisasi agar jalan tersebut layak digunakan. | RT 02, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Koto Sekilan Ambai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | lanjut tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 121 | BOY DORES | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Terdapat wilayah RT 02 yang rawan terhadap banjir jika terjadi hujan lebat, untuk itu dibutuhkansaluran drainase yang baik untuk mencegah terjadinya banjir | RT 02, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Koto Sekilan Ambai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | lanjut tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | DALTONERIAL SANDI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya akses dan aktifitas penduduk | Tanjung Genting Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Tanjunggentin g Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 123 | DALTONERIAL SANDI | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Peningkatanmututempat tinggal masyarakat | Tanjung Genting Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Tanjunggentin g Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 124 | ANGGA SANJAYA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Masih terdapat jalan yang sempit dan diaspal | Desa Simpang Empat Sungai Tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Simpang Empat Sungai Tutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 125 | OFTONI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | kondisi jalan yang tidak baik/ berlobang dari desa Mukai Mudik ke Desa Mukai hilir, sehingga membuat aktivitas sehari-hari warga menjadi terganggu seperti ke sekolah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, pasar dll. | Mukai Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Lanjutkan usulan kekabupaten ( Dinas PUPR) karena sangat dibutuhkan masyarakat | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 126 | ANGGA SANJAYA | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan di Desa Simpang Empat Sungai Tutung perlu ditingkatkan kualitas dan pelebaran | Simpang Empat Sungai Tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Simpang Empat Sungai Tutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 127 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Masih ada warga yang masih tidak memiliki rumah yang tidak layak ditempati seperti tidak meliliki lantai semen dan diding yang masih mengunakan triplek atau papan. | RT-3, RT,-2, RT-1, Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 128 | ANGGA SANJAYA | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Masih terdapat rumah yang tidak layak huni | Simpang Empat Sungai Tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Simpang Empat Sungai Tutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 129 | PARIANTONI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya aktifitas penduduk | Simpang Tutup, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Simpang Tutup | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan LIngkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 130 | PARIANTONI | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Peningkatanmututempat tinggal masyarakat | Simpang Tutup, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Simpang Tutup | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 131 | HALIMAN,S.Ap | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Masih banyak jalan yang belum di aspat atau di cor semen | Dusun Tengah, dan Dusun Air Batang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Sungaimedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 132 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Lahan dan Lokasi | Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 133 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Sudah rusak dan sudah lama termakan usia | Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 134 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Pengikisan Tanah di area Sungai Batang Merao | Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 135 | ASMADI | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | banyak rumah yang tidak layak | baru sungai medang , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Baru Sungaimedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | ANNUDIN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Pengaspalan Jalan Desa | tebing tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Tebing Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan usulan kekabupaten( Dinas PUPR ) | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 137 | Satrika | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | jambatan rusak berat | dusun 01, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungairenah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 138 | Satrika | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan lingkungan rusak | dusun 1,2,3, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungairenah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 139 | Saiful | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Rusak | RT 04 Dusun Air Sekulai Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lengkapi dengan Profosal Agardapat dipenuhi dan di Prioritaskan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 140 | Satrika | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | saat hujan air mengalir dijalan | desa sungai renah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungairenah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 141 | Satrika | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan lingkungan rusak berat | desa sungai renah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungairenah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 142 | MISALMI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | untuk menghubungkan 3 desa di kecamatan siulak mukai, desa mukai tengah, senimpik, dan koto lua. jalan ini bisa sebagai jalan alternatif menghubungkan 3 desa ini. dan juga terletak dibantaran sungai batang merao | MUKAI TENGAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Layak untuk diusulkan | Pembangunan Jalan | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 143 | MISALMI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | jalan yang terletak didesa mukai tengah, jika hujan air selalu menguap dan melimpah ke jalan, sehingga mengakibatkan bau yang tidak sedap dan kenyamanan berkendara, dengan demikian kami mengharapkan dapat di tindaklanjuti | MUKAI TENGAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 144 | MALYADI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Jambatan putus Dan sulit nya Masyarakat Melaksanakan Aktipitas Persawahan Apa Bila Datang Musim Hujan Maka Perlu Perbaikan Jembatan gantung Dengan Panjang 50 Meter | Rt 01 Koto Datuk Kec, Air Hangat Barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Koto Datuk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 145 | Habibi | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | adanya satu Titik di Desa Pulau Sangkar yang menjadi Tempat Penimbunan Sampah yang sungguh sangat memprihatinkan dan sangat mecemari lingkungan. sehubungan dengan hal ini sangat dibutuhkan bantuan pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan tindak lanjut pembuangan Sampah sampai ke TPS3R | Jembatan Lubuk Sahab Desa Pulau Sangkar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pulausangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 146 | SUMINO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan penghubung ke desa tetangga, belum di tingkatkan | batang merangin , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Batang Merangin | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SUKANI,SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Ada Tanggul Yang Telah Roboh dan Sebagian Belum ada Tanggul Disepanjang Aliran Sungai. Hal Ini Menyebabkan Air Sungai Meluap Kepemukiman Warga Ketika Debit Air Sungai Meningkat Saat Hujan. | Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Tanjungtanah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatanbangunan perkuatan tebing | - | - | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 148 | EDWAR | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | kondisi jalan raya yang sudah rusak dan berlubang akibat sering terrendam banjir saat ini kondisinya memprihatinkan. | RT003 Desa Kemantan Raya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Raya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Pembangunan Jalan | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 149 | ZAMZARI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Belumselesainyapengaspalan jalan lingkungan | RT02-06 Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 150 | SUHARTO, S.Ap | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | KONDISI JALAN BERLUBANG DAN JEMBATAN GANTUNG PENGHUBUNG DESA KOTO CAYO DENGAN DESA KOTO DUA LAMA | RT.04 DAN RT 03, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Barat | Koto Cayo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 151 | HERMANTO | Kelurahan / Desa | PembangunanJalan Lingkungan Desa | Jalan Lingkungan Rata rata sudah rusak | Desa Baru Air Hangat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Baru Air Hangat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 152 | SUHARTO, S.Ap | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | kurang tingginya drainase akibat air meluap | RT.02 KOTO CAYO, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Barat | Koto Cayo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | PeningkatanDrainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 153 | KASMIR | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lanjutan pengaspalan jalan lingkungan desa untuk memberikan daya dukung bagi kelancaran ekonomi masyarakat. | Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 154 | APLITON | Kelurahan / Desa | PembangunanJalan Lingkungan Desa | Jalan Belum di aspal / Rusak | Dusun 02-03 Mukai Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupatenkerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 155 | APLITON | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Aspal Rusak Parah dan Jalan Sempit | Dusun 01 Mukai Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 156 | SYAFRINAL.SP | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Adanya rumah warga yang tidak layak huni | Desa baru sungai tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Baru Sungai Tutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 157 | KASMIR | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Lanjutan Pengaspalan/beton Jalan Pungut Mudik ke Renah Pemetik, sulit di lewati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 sehingga sulit bagi masyarakat mengangkut hasil pertanian. | Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 158 | KASMIR | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Diperlukanperbaikan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu | Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 159 | DOKESUSANDRA,SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Banjir | Sepanjang jalan nasional, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak | Telago Biru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | SETUJU | PeningkatanDrainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | TAUFIKRAF, S.Sos.MM | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya aktifitas penduduk | Siulak Tenang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Siulak Tenang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 161 | TAUFIKRAF, S.Sos.MM | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Peningkatantempattinggal penduduk | Siulak Tenang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Siulak Tenang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 162 | M. NAZIR | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Banyaknya Air Yang Tergenang Dilingkungan Warga Desa Lubuk Paku Yang Tidak Dapat Mengalir | Lubuk Paku, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Lubuk Paku | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 163 | M. NAZIR | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Masih Ada Masyarakat Desa Lubuk Paku Yang Rumah Tempat Tinggalnya Tidak Layak Untuk Dihuni | Lubuk Paku, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Lubuk Paku | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 164 | ORI SEFTA PUTRA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan lingkar Desa Koto Dua Baru sudah rusak dan bergelombang sehingga mobilitas warga dan aktivitas umum warga lainnya terganggu | Jln desa koto dua baru, kec air hangat barat, kab kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Koto Dua Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 165 | HENDRI | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Ada nya rumah masyarakat yg tidak layak huni, sehingga sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam perbaikan nya. | Desa pancuran bangko, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pancuran Bangko | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | sudahdibahas di pra musrenbang | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 166 | EMAHARMA PUTRI,SP | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Lancarnyaaliran air | Tanjung Genting, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Tanjunggenting | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 167 | EKA IRFANTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Perludilakukanpeningkatan jalan lingkungan yang sudah rusak | Dusun Sehati , Dusun Simpatig, Dusun Wista dan Dusun Sake Permai Desa Hamparan pugu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Hamparan Pugu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilengkapi dengan Profosal untuk dapat di Prioritaskan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 168 | EMAHARMA PUTRI,SP | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Lancarnya aktifitas penduduk | Tanjung Genting, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Tanjunggenting | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 169 | IRILARIZAL, A.Md | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan Lingkungan Desa di Dusun Koto Dumo Desa Muara Semerah panjang 350 meter dalam kondisin rusak, sehingga mengganggu akses warga, dan berpotensi terjadinya kecelakaan. | Dusun Koto Dumo Desa Muara Semerah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Muara Semerah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 170 | Ivan Devi Wijaya | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | SULITNYA AKSES WARGA MELINTASI JALAN ANTAR DESA | Desa Sungai Kering, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaikering | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 171 | IRILARIZAL, A.Md | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Jembatan Penghubung terbuat dari kayu, beresiko runtuh saat melebihi kapasitas muatan lebih 1,5 ton, dan ukuran jembatan panjang 5 meter dan lebar 4 meter. | Dusun Koto Dumo Desa muara Semerah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Muara Semerah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Disetujui dan diteruskanketahap selanjutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 172 | Subarjo | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | KURANG LANCARNYA TRANSPORTASI | MEKAR SARI, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Mekar Sari | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | ok | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 173 | Subarjo | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | APA BILA TERJADI MUSIM HUJAN TERJADI BANJIR | MEKAR SARI , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Mekar Sari | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | ok | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | SYAFTIAR, A.Md. DPT | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Minimnya drainase desa koto majidin mudik | Desa Koto Majidin Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Untuk dapat dilanjutkan di tingkat selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 175 | IR. H. KASMIR. MD | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Kecil, dan rutinitas warga pemakai jalan cukup tinggi karena jalan tersebut menghubungkan 4 Desa, Desa Belui, Sawahan Jaya, Air Tenang dan Pasar Semurup, sehingga membutuhkan pelebaran jalan untuk memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. | Desa Sawahan Jaya RT.01 Dusun Pemancar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Sawahan Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskan ketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 176 | SUDIRMAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | KONDISI JALAN DI DESA CUPAK SANGAT MEMPEHATINKAN, DIMANA JALAN TERSEBUT MENJADI JALAN SATU-SATUNYA AKSES MASYARAKAT MEMABAWA HASIL PERKEBUNAN,JALANTERSEBUT BELUM DI ASPAL,BARU PENGERASAN.SUDAH TERLANTAR SELAMA BERTAHUN-TAHUN.SELAIAN ITU SERING JUGA TERJADI KECELAKAAN. | CUPAK, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Cupak | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 177 | SYAFTIAR, A.Md. DPT | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Minimnyajalanlingkungan desa koto majidin mudik | Desa Koto Majidin mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Untuk dapat dilanjutkan di tingkat selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 178 | DONI ALFIAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Sulitnya akses jalan lingkungan | sungai tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Sungaitutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 179 | SASTRI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Pembagunan Jembatan yang rusak akibat banjir bandang | Sako tengah desa tamiai , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Tamiai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 180 | SASTRI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | jalansudah penegerasan tapi belum pengaspalan | sawah panjang sampai sako jauh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Tamiai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 181 | ADAMRI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Belumadanyatembok penahan tebing | Koto Tengah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 182 | RADIYAL | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | RUSAK BERAT | RT 04 Talang Kemulun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Talang Kemulun | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 183 | DEFRIZAL,SH | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | belum selesainya pembangunan jalan, untuk itu perlu lanjutan pembangunan jalan yang menghubungkan atara desa pugu dengan desa hamparan pugu, dan juga jalan tersebut merupakan akses alternatif untuk menuju tempat wisata air panas. | RT 3 desa pugu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Pugu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Dilengkapi dengan Profosal untuk dapat di Prioritaskan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | DEFRIZAL,SH | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | jalan yang menuju jalan provinsi dengan kondisi sudah berlubang tidak pernah di perbaiki sudahbertahun-tahun, merupakan jalan yang menghubungkan antara desa pugu dengan desa koto datuk dan koto tengah | RT 2 Desa Pugu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Pugu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Dilengkapi dengan Profosal untuk dapat di Prioritaskan | Pembangunan Jalan | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 185 | DEDI SANTOSO, S.Kom | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | dari pada sampah di bakar dan dibuang ke sungai lebih bikin bahan baku dan di olahkan menjadi pupuk organik | Dusun Baru, Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Keluru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | sudahdibahas di pra musrenbang | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 186 | ADE HARYONO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan sudah terlalu rusak dan terdapatbeberapa genangan air di sepanjang jalan. Danjalantersebut merupakan jalan menuju kantor camat kecamatan air hangat timur. | Dusun air panas taman jernih sungai tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Taman Jernih Sungaitutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 187 | HAIDIRWANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | rusak berat | rt 03 sanggran agung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Sanggaran Agung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 188 | Rianto | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Masih banyak jalan yang belumpengerasansehingga sulit dilalui oleh masyarakat dan ada satu jembatan yang tidak bisa di lalui karena jembatan putus serta satu jembatan tidak layak | RT 02 Dusun Toto Tentrem desa batu hampar kecamatan kayu aro barat kabupaten kerinci provinsi jambi , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Batu Hampar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 189 | ADE HARYONO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Gedung Kantor | Kecilnya aula kantor camat,sehinggatidak memadai saat pertemuan - pertemuan sekecamatan air hangat timur. | Dusun air sumpah desa taman jernih sungai tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Taman Jernih Sungaitutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 190 | Rianto | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan tidak layak | RT03 Dusun Tanah Lereng Desa Batu Hampar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Batu Hampar | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 191 | HAIDIRWANTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusak berat | RT 01 Sanggaran Agung , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Sanggaran Agung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningakatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 192 | MARIZAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | RUSAK | DESA AIR TENANG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Air Tenang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Disetujui dan diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 193 | MARIZAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | SERING BANJIR | DESA AIR TENANG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Air Tenang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Disetujui dan diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 194 | REPAL SEPRIANTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | MENIMBANG TERLALU KECILNYA JALAN KABUPATEN DAN SERING MENCAJI TEMPAT KEMACETAN SIHANGGAAKSES JALAN MENJADI LAMBAN ADABAIKNYA DI ADAKAN PELEBARAN | DESA SIMPANG BELUI, DUSUN SIMPANG TIGA BAWAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Simpang Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 195 | HALAPNI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan Tlah Berlubang Dan Beresiko Terjatuh | Batas Belui Dengan Pahlawan Belui, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 196 | Islamudin | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusaknya Akses Jalan Penghubung Dua Desa, Desa Giri Mulyo - Gunung Labu | Desa Giri Mulyo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Giri Mulyo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Islamudin | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Putusnya Jembatan Penghubung Atar Dua Wilayah yaitu RT.01 dengan RT.04 Desa Giri Mulyo | Desa Giri Mulyo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Giri Mulyo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 198 | HALAPNI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Runtuhnya Tebing Yang Mengakibatkan Robohnya Rumah Warga | Dusun Tebing Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatanbangunan perkuatan tebing | - | - | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 199 | EPAZALVIA PUTRA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | banyak nya jalan yang berlobang sehingga dapat membahayakankendaraan yang lewat | dusun 1 desa koto lua, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Koto Lua | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 200 | HALAPNI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jalan Rusak Dan Berlubang | Jalan Penghubung Tebing Tinggi Dengan Kampung Terendam, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Penataan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 201 | EDMI ADI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | MENGATASI RUNTUHNYA TEBING SUNGAI BATANG MERAOYANG DPAT MERUSAK FASILITAS DESA DAN RUMAH PENDUDUK | DESA MUKAI SEBERANG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Seberang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan usulan kekabupaten ( Dinas PUPR) karena sangat dibutuhkan masyarakat desa mukai sebrang terutama penduduk yang berada didekat sungai batang merao | PeningkatanDrainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 202 | EPAZALVIA PUTRA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | MENGINGAT SERINGNYA TERJADI BANJIR BANDANG SEHINGGAMEMBAHAYAKAN RUMAHMASYARAKATYANG ADA DI PINGGIRAN SUNGAI | DUSUN 1 PINGGIRAN SUNGAI, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Koto Lua | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupatenkerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat | PeningkatanDrainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 203 | MAT TAMBUN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan penghubung dari Desa Tebing Tinggi menuju Desa Mukai pintu merupakan akses vital bagi masyarakat serta aparatur pemerintahan Kecamatan Siulak Mukai.Kondisi eksisting jalan saat ini mengalami kerusakan yang cukup signifikan, seperti permukaan jalan yang berlubang, menurunkan kenyamanandan keselamatan pengguna jalan, Selain itu, lebar badan jalan yang relatif sempit tidak memadai untuk lalu lintas dua arah, terutama bagi kendaraan roda empat dan kendaraan operasional pemerintah. | Jalan Desa Tebing Tinggi Ke Desa Mukai Pintu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Pintu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupaten kerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat dan juga akses kekantorcamat siulak mukai | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | MAT TAMBUN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan irigasi yang berada pada jalur akses masyarakat saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan tidak lagi berfungsi secara optimal. Akibat kerusakan tersebut, kendaraan roda empat, kesulitan saat melintasi jembatan. Selain itu, pada musim hujan kondisi jembatan menjadi semakin berbahaya terkurasnyapondasi jembatan Apabila kerusakan jembatan semakin parah dan menyebabkan terputusnya aliran irigasi, maka pasokan air ke lahan pertanian akan terganggu | Desa Mukai Pintu jembatan irigasi ( air putih), Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Pintu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan usulan kedians PUPR karena sangat membahayakan masyarakat yang lewat dan juga dapat berakibat buruk pada lahan persawahan disekitarnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 205 | MAT TAMBUN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan lingkungan di Desa Mukai Pintu saat ini mengalami kerusakan dan belum memiliki perkerasan aspal, melainkan hanya berupa beton yang kondisinya telah retak dan tidak rata. Kerusakan tersebut menyebabkan jalan sulit dilalui,. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga, sehingga diperlukanpenanganan melalui peningkatan kualitas jalan agar lebih aman dan nyaman digunakan. | Dusun 3 Desa Mukai pintu ( Air putih), Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Pintu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 206 | ARSAD GARDIAVORA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan pungut mudik ke sungai kuning sudah sangat rusak parah dan tidak layak lagi untuk di lewati , kami mohon kepada pemerintah daerah agar segera di perbaiki | desa pasir jaya , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Pasir Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupatenkerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 207 | SUKANI,SE | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi jalan lingkungan saat ini mengalami kerusakan cukup parah, berupa permukaan jalan yang rusak, berlubang dan perkerasan lama yang sudah tidak layak. Pada saat musim hujan jalan menjadi becek dan tergenang, sedangkan pada musim kemarau menimbulkan debu yang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, lebar jalan yang ada belum memadai untuk menunjang kelancaran mobilitas warga, sehingga diperlukan peningkatan kualitas jalan melalui betonisasi/pengaspalan serta pelebaran jalan lingkungan. | Jalan MAN3 Rt. 001 Desa Pendung Talang Genting, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Pendung Talang Genting | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Penataan Jalan Linngkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Pengaspalan Jalan dan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa En Satu-Kebun Baru dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Kebun Baru – Desa En Satu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci sangatlah penting artinya, mengingat letak geografis Desa itu sendiri hanya bisa dihubungkan dengan Desa lainnya melalui keberadaan jembatan sebagai salah satu sarana penunjang yang sangat pital untuk perputaran ekonomi dan sebagai alur lalu lintas transportasi darat | RT 02, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 209 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | keadaan jembatan saat sekarang ini sudah memprihatinkan, karenasudah tergerus tumburan aliran sungai yang mengakibatkan jembatan ambruk sebelah. | RT 01, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 210 | SUKANI,SE | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi jalan lingkungan saat ini mengalami kerusakan cukup parah, berupa permukaan jalan yang rusak, berlubang, Pada saat musim hujan jalan menjadi becek dan sedangkan pada musim kemarau menimbulkan debu, Selain itu, lebar jalan yang ada belum memadai untuk menunjang kelancaran mobilitas warga, sehingga diperlukan peningkatan kualitas jalan melalui betonisasi/pengaspalan serta pelebaran jalan lingkungan. | Jalan utama desa, Jln masjid Taqwa desa pendung talang Genting, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Pendung Talang Genting | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 211 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan yang setiap hari di lalui masyarakat, dan anak-anak untuk pulang pergi sekolah yang memprihatinkan, apalagi di saat musim hujan terdapat titik lobang yang mengakibatkan genangan air. | RT 05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 212 | ARMANUDIN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | perlebaran jalan utama dari Desa sungai langkap ke Desa Mukai Hilir, jalan sempit sering terjadi kecelakaan. | Desa sungai langkap ke Desa Mukai Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungailangkap | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupatenkerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 213 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | kondisi salah satu RT yang memiliki akses jalan lingkungan desa yang belum ada pengerasan dan pengaspalan, sehingga menghambat hubungan antar desa. | RT 04, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 214 | SUKANI,SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Belum adanya tanggul pengaman persawahan menyebabkan erosi dan pengikisan lahan akibat aliran air, sehingga diperlukan pembangunan tanggul bronjong untuk melindungi areal persawahan. | Rt. 001 Desa Pendung Talang Genting, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Pendung Talang Genting | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Pembangunantanggul sungai | - | - | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tidak adanya drainase sepanjang jalan, yang mengakibatkanbanjirdan genangan air | RT 05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 216 | ARMANUDIN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | pengaspalan jalan lingkungan, tidak memadai jalan yang ada banyak berlobang dan rusak. | di Desa sungai Langkap, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungailangkap | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 217 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | sepanjang jalan kabupaten tidak ada drainase yang mengaliri air di musim hujan, sehingga air mengalir sepanjang jalan. | RT 06, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 218 | Ardison Efendi | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tidak ada drainase yang mengaliri air saat musim hujan, sehingga air mengalir sepanjang jalan dan genang di area perumahan warga | RT 01, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kebun Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 219 | ARMANUDIN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Pembuatan tembok penahan/bronjong penahan badan jalan, akibat dari musim penghujan sering terjadi banjir yang mengakibat kan longsor sehingga badan jalan hampir terputus. | Dusun 4 Desa Sungai Langkap, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungailangkap | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 220 | ALWI NADIMIN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan lingkungan yang berada di dalam desa sungai kuning perlu ada nya peningkatan | Desa Sungai Kuning, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupaten kerinci supayapembangunan perumahan penduduk tidak lagi memakai lahan persawahan yang kian berkurang | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 221 | ALWI NADIMIN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jalan Utama yang menjadi akses masyarakat desa sungai kuning telah rusak parah dan perlu adanya pembangunan dan peningkatan | Desa Sungai Kuning Menuju desa pasir jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupaten kerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat 3 desa ( sungai kuning-lubuk tabun-pasir jaya ) sebagai jalan penghubung antar desa | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 222 | ALWI NADIMIN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan yang ada di desa sungai kuning sudah rusak parah dan perlu adanya pemeliharaan dan pembangunan ulang | Desa Sungai Kuning, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupaten kerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk jembatanpenghubung antar RT | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 223 | ALWI NADIMIN | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Masih Terdapat Rumah warga yang tidak layak huni | Desa Sungai Kuning, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupaten kerinci karena sangat dibutuhkan sebagian masyarakat yang rumahnya tidak layak huni | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 224 | NAPSIL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan lingkungan yang dibangun 10 tahun yang lalu, sudah rusak berat dan perlu dilakukan rehab | Rt.01, 02,03, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungai Batu Gantih Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 225 | ADAMRI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Pengaspalan jalang lungkungan | Desa Koto Tengah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Suparno | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Pengaspalan Jalan Linkar Desa Antara Desa Gunung Labu dan Desa Giri Mulyo | dusun 008 desa gunung labu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Gununglabu | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 227 | Suparno | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Pengaspalan Jalan Dusun 005 depan paud sampai Dusun 007 | Dusun 005 Desa Gunung Labu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Gununglabu | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 228 | ELPA PUTRA | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan talang tinggi ke renah sako telah rusak parah sehingga sulit dilalui | Renah sako, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Talang Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 229 | ELPA PUTRA | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatanpenghubung desa terputus diakibatkan oleh banjir bandang | Batang tantik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Talang Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 230 | ELPA PUTRA | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan desa talang tinggi ke SMKN 2 rusak parah sehingga sulit dilalui | Dusun 2 desa Talang tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Talang Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 231 | MULYADI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Belum Selesai Jalan Dari Hiang Sakti Ke Desa Ambai. | Desa Hiang Sakti, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Hiang Sakti | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjut untuk pembahasan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 232 | RUSDI.A | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan sudah rusak parah | rt 02 dusun simpang tiga, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Pendung Tengah | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjut untuk pembahasan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 233 | UMAR DANI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Masih banyak jalan Desa yang belum rabat beton | RT 001 dan RT 002 Sungai Gelimbing, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Ambai Bawah | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjut untuk pembahasan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 234 | RUSWADI | Kelurahan/ Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | ada nya rumah tidak layak tidakmendapatkanbantuan bedah rumah | seberang merangin, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Seberang Merangin | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 235 | YURNALIS,A.Md | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalanan yang berlubang dan permukaan yang tidak standar dapat menyebabkan kendaraan tergelincir dan kehilangan keseimbangan. | Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Pendung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Pendung Hilir | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjut untuk pembahasan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 236 | YURNALIS,A.Md | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi jalan yang rusak dan ukuran jalan yang sempit | Desa Pendung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Pendung Hilir | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjut untuk pembahasan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 237 | Poniran | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Jembatan Putus Menuju Jalan Makam | Rt. 05 Dusun 3 Desa Bedeng Delapan, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Bedeng Delapan | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 238 | Poniran | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Kapasitas saluran tidak memadai maka terjadilah banjir yang merusak jalan raya dan berdampak disekitar lingkungan masyarakat | Rt. 03 Dusun 2 Desa Bedeng Delapan, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Bedeng Delapan | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 239 | HENDRI | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kurang baiknya jlan utama desa pancuran bangko | Desa pancuran bangko, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pancuran Bangko | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | sudahdibahas di pra musrenbang | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 240 | HENDRI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Air sawah yg sering meluap ke jalan raya, dan sangat membutuhkan drainase. | Desa pancuran bangko, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pancuran Bangko | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | sudahdibahas di pra musrenbang | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 241 | HENGKI DARMAWAN | Kelurahan/ Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Beberapa rumah masyarakat kurang mampu, bisa di bilang tak layak huni, sehingga sangat membutuhkan bantuan perbaikan. | Desa pulau tengah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pulautengah | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | sudahdibahas di pra musrenbang | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | ADYA PERMANA, ST | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Saat musim penghujan sering terjadi banjir | Desa Pasar Semurup, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Pasar Semurup | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 243 | ADYA PERMANA, ST | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | kondisi jalan lingkungan yang rusak | Pasar Semurup, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Pasar Semurup | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 244 | Dedi Atmanto | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Akses Jalan Masuk Desa Patok Empat Yang Sudah Parah di Beberapa Titik | Desa Patok Empat Kec, Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Patok Empat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jalan | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 245 | JASMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | perlunya pembangunan tanggul sungai dikarnakan Tanah/tebing disepanjang Sungai dengan ukuran 400 M Longsor akibat Banjir Bandang, sehingga mengakibatkan Longsor Rumah Penduduk yang berada di sekitar Sungai. | Desa Muara Hemat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Muara Hemat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Pembangunantanggul sungai | - | - | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |
| 246 | ELPIAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Keluhan Masyarakat yang inginkan Aspal Jalan Lingkungan | Kemantan Darat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Kemantan Darat | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Setujuditeruskan ke tingkat Kabupaten | null | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 247 | AHMADI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Terdapat jalan yang sudah tidak layak lagi untuk dilalui, untuk itu butuh pengaspalan untuk meningkatkan kenyamanan mayarakat | Penawar Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Penawar Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjut tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 248 | AHMADI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Kelanjutanpeningkatan Jalan dari Simpang Bata Menuju Pungut Hilir dimana jalan tersebut masih belum bisa dilalui. | Penawar Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Penawar Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | lanjut ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 249 | Jumadil | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan yang rusak susah di lalui masyarakat | desa sungai asam dusun 4 sampai dusun 2, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaiasam | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 250 | Jumadil | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | pembangunandrainase, untuk menanggualngi bencana longsor jika curah hujan tinggi | dusun 1-4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaiasam | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 251 | Jumadil | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | jalan lorong yang sudah buruk sehingga butuh pengaspalan | dari dusun 1 sampai 4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaiasam | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 252 | GERI UTAMA | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | bantuan rumah untuk masyarakat miskin dan tidak layak huni | masgo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Masgo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 253 | Poniran | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Halaman rumah warga sering terjadi kebanjiran | Rt05 Dusun 3 Desa Bedeng Delapan, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Bedeng Delapan | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 254 | KHAIRUL AMRI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusaknya jalan Hiang-Pungut sehingga butuh pengaspalan agar aktivitas masyarakat lancar dalam membawa alat pertanian dan hasil pertanian | RT 03, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Hiang Karya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | lanjut ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 255 | Prapto Bahagio | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi Jalan Belum Maksimal | Sepanjang Jalan Desa Sako Dua Sampai Kebun Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungailintang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 256 | Prapto Bahagio | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Belum Adanya Drainase di Bahu Kanan-Kiri Jalan Sungai Lintang | Sepanjang Bahu Jalan Desa Sungai Lintang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungailintang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 257 | SYAFRIZAL | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Rusak | Tanjung Mudo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Tanjungmudo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | lanjut ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Prapto Bahagio | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalur Penghubung belum maksimal, belum ada pengaspalan jalan. | RT 002 Dusun Sidodadi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungailintang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 259 | Prapto Bahagio | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Belumadanya pembanguna Drainase | RT 006 /003, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungailintang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 260 | SUWINADAR | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Dengan kurang baiknya drainasemakaberdampak pada kerusakan jalan | Desa Lubuk Tabun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Lubuk Tabun | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan usulan kedinas PUPR kabupaten kerinci karena sangat dibutuhkan masyarakat dan akan merusak jalan jika tidak ditangani | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 261 | MARTON | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan lingkungan desa yang masih belum di aspal atau di cor semen | desa muak, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Muak | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 262 | MARTON | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan lingkyngan yang rusak parah | desa muak, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Muak | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 263 | ADI WIJAYA | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan yang masih rusak | desa Pengasi lama, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Lama | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 264 | ADI WIJAYA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Gedung Kantor | bagunan kantor yang masih tidak memadai | pengasi lama, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Lama | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 265 | ADI WIJAYA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | sistem drenasi yang masih kurang | pengasi lama, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Lama | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 266 | Januar | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan Putus Karna Banjir Bandang tahun 2023 | Lolo Kecil, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Lolo Kecil | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 267 | DORI SAFRIADI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Jalan Rusak | Pulau Pandan, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pulaupandan | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 268 | JON HENDRI | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jembatan yang terlalu renda sehingga kalu debit air naik bisa mengakibat smpat dan kayu bayak tersankut di bawah jebatan tersebut | Dusun Kerman Sakti Desa Pasar Kerman, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pasar Kerman | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 269 | JON HENDRI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Gedung Kantor | Kantor Sudah Lama Belum Pernah di Rehab dan dibangun | pasar kerman bukit kerman, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pasar Kerman | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 270 | RAHMAT KURNIA | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jalan yang dilewati setiap hari oleh masyarakat terutama anak sekolah masih belum memadai | Talang lindung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Talang Lindung | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 271 | RAHMAT KURNIA | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan yang sempit sehingga Mobil yang masuk ke wilayah desa akan sangat sulit dan terbatasi | Talang lindung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Talang Lindung | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 272 | Kurniawan | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Masih banyak nya Jalan yang rusak | Kampung Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kampung Baru | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | RAHMAT KURNIA | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Tidak bagusnya dinding, toilet,atap, dan sempitnya rumah beberapa warga merupakan hal penting untuk diperbaiki. | Talang lindung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Talang Lindung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 274 | Kurniawan | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jalan sudah banyak berlubang | Desa Kampung Baru. RT 04. Kecamatan Kayu Aro Barat. Kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kampung Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 275 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Akses jlan lingkungan dan jalan produksi yg rusak berat | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 276 | Tiaramon | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Ada Beberapa Titik Drainase sering Terjadi Banjir Masuk Ke Rumah Warga | Desa Muaro Lulo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Muaro Lulo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 277 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Bnyaknya jembatandan jalan yg rusak berat | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 278 | Mugiono | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Limpasan air dari perkebunan teh, belum terkondisikan secara maksimal | Kayuarobarat Sungai jambu RT07 dusun 4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaijambu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 279 | Mugiono | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Di jalur Drainase yang tidak berfungsi menjadi pembuangan sampah bagi yang tidak bertanggung jawab, sehingga titik awal air limpasan melalui perkebunan sampai wilayah pemukiman. | Kayuarobarat Sungai jambu RT07 dusun 4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaijambu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 280 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Sering terjadinya banjir | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 281 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Akses jalan lingkungan yg rusak berat | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 282 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Bnyaknya jembatan yg rusak berat dan adanya akses jembatan yg belum memadai | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 283 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Sering masyrakat mengeluh karena drainase yg tidak berpungsi | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 284 | Suyatno | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | seringnya terjadi banjir di desa bedeng dua , jembatan mulai mengalami kerusakan | RT.005 Dusun 3 Desa bedeng dua, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Bedeng Dua | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 285 | Suyatno | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | agar mempermudah akses jalan transportasi pertanian di beberapa Desa, dan sebagai jalan alternatif Evakuasi jika terjadi bencana alam | Desa batu hampar, desa bedeng dua, desa sako dua, desa sungai lintang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Bedeng Dua | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 286 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Masih ada rumah masyrkat yg tidak layak huni | Desa pemgasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Suyatno | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | jika tingginya curah hujan drainasae yang tersedia tidak dapat menampung volume air yang tinggi , pembangunan drainase membutuhkan dana yang besar | Dusun 2, dusun 3, Dan Dusun 4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Bedeng Dua | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 288 | HARIPAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Poros tengah yang belum di aspal | pondok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pondok | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 289 | HARIPAL | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalan sudah berlubang | pondok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pondok | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 290 | HARIPAL | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | jalan yang kurang memadai | pondok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pondok | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 291 | Era Nopike | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | JALAN POROS YANG BELUM DIASPAL | LOLO GEDANG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Lolo Gedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 292 | Era Nopike | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan lingkungan yang masih rusak | LOLO GEDANG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Lolo Gedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 293 | DARIZON | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kondisi Jalan Raya di Dusun Telaga Sakti, Kemuning Jaya Desa Talang Kemuning sudah rusak | Desa Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Talang Kemuning | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 294 | DARIZON | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Akses Jalan Kecil, Perlunya Pelebaran Jalan Antara Desa Talang Kemuning Ke Desa Lolo Kecil | Desa Talang Kemuning - Desa Lolo Kecil, Kecamatan Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Talang Kemuning | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Penngkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 295 | NARSON DEKOLAS, S.Pdi | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | sulit nya akses jalan menuju sumber mata air | Desa Pidung, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci., Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pidung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 296 | JASNADI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | TIDAK ADANYA SISTEM SALURANPEMBUANGAN AIR SEHINGGA SAAT HUJAN TERJADI BANJIR | KOTO DI AIR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 297 | JASNADI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | JALAN BERLOBANG | KOTO DI AIR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 298 | JASNADI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | JAMBATABANPUTUS DI TERJANG BANJIR | KOTO DI AIR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 299 | DANI PRANSISKA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Susahnyaakses Transportasi masyarakat | Dusun 01 Desa Sungai Jernih, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungaijernih | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 300 | DANI PRANSISKA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Kurang lebar dan rusak jalan Pelompek-Pauh Tinggi | Desa Sungai Jernih ke Desa Pesisir Bukit, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungaijernih | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan Musrenbang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 301 | METRA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Buruk,,, Sulitnya Masyarakat Melewati Jalan Karena Masih Pengerasan | Dusun 2 Desa Tangkil, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Tangkil | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | MONTRIADI, SE | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Peningkatan Jalan Kabupaten Rusak Parah | Dusun 1, 2,3 dan 4 Desa Jernih Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Jernih Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 303 | METRA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Rawan banjir | Dusun 3, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Tangkil | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 304 | MONTRIADI, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Dusun 4 dan 5 Rusak Pasca Banjir | Dusun 4 & 5 Desa Jernih Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Jernih Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 305 | DEBI HARYANTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Lingkungan Sudah Banyak yang Rusak atau Berlobang | Jalan Desa Sungai Rumpun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungairumpun | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 306 | DEBI HARYANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Drainase Sudah Banyak Tersumbat dan Sebagian Rusak | Rt. 02 Jalan Desa Sungai Rumpun , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungairumpun | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 307 | METRA | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Tembok Penahan Jalan, Sering terkena Banjir | Dusun 3, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Tangkil | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkanmusrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 308 | DEBI HARYANTO | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Satu Rumah Masyarakat Desa Sungai Rumpun yang Tidak Layak Huni | RT. 05 Desa Sungai Rumpun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungairumpun | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 309 | INDAL PRISKA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Susah nya masyarakat Desa Pauh Tinggi Keluar Masuk Dari Desa Ke Desa lain terutama ke Pasar,Rumah Sakit,dan susah nya masyarakat Membawa Alat Pertanian di saat Panen dan juga butuh Pelebaran Bahu Jalan | Pauh Tinggi Ke Pelompek , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pauh Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 310 | HENDRI WIRANATA,S. Ap | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Sosial-ekonomi:terganggunya mobilitas, akses pasar, pendidikan, layanan kesehatan; meningkatnya biaya transportasi. Keamanan: meningkatnya risiko kecelakaan akibat jalan rusak. | Jalan Jalur 2 Desa Pelompek tembus ke Kantor Kecamatan Gunung 7 , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 311 | MONTRIADI, SE | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Adnya RUmah Yang Tidak Layak Huni/ Miskim Esktrim | Desa Jernih Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Jernih Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 312 | HENDRI WIRANATA,S. Ap | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Akses yang sulit terutama saat musim hujan<br>Jalan berlumpur, licin, rawan genangan<br>Dampak: transportasi terganggu, layanandarurat terhambat<br>Kerusakanperkerasan dan drainase buruk<br>Retak, bergelombang, dan robeknya lapisan jalan<br>Drainase tidak memadai menyebabkan erosi dan penurunan struktur jalan | Jalan Desa Pelompek RT 001, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 313 | IM SUMARLAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Dari Desa Lubuk Pauh ke kantor Camat Gunung Tujuh | Lubuk Pauh - Pelompek Pasar Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Lubuk Pauh | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 314 | IM SUMARLAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Air Sering Menggenang Sepanjang Jalan Raya | Lubuk Pauh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Lubuk Pauh | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | IM SUMARLAN | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Mempermudah Akses Masyarakat ke Kantor Desa | Dusun 2 RT 3, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Lubuk Pauh | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 316 | IM SUMARLAN | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Banyak Yang Rusak Berbahaya bagi masyarakat | Dusun 2 RT 04, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Lubuk Pauh | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 317 | IM SUMARLAN | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Kabupaten Menuju ke SD Rusak Membahayakan Bagi Siswa | Dusun 3 RT 5, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Lubuk Pauh | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 318 | IM SUMARLAN | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan, Pemiliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan | Jembatan Penyeberangan sudah Rusak Membahayakan Masyarakat yang melewati | Dusun 3 RT 7, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Lubuk Pauh | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 319 | INDAL PRISKA | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan lingkungan Desa yang sangat parah dan butuh pengaspalan lagi sekitar 2000 kg Meter | Desa Pauh Tinggi , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pauh Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 320 | INDAL PRISKA | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Susah nya masyarakat melalui jembatan saat mengeluarkan Hasil Panen. Yang di butuhkan Jembatan Usaha Tani dg ukuran Panjang 15 Meter dan Lebar 4 Meter | Pauh Tinggi , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pauh Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 321 | INDAL PRISKA | Kelurahan/ Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Banyak nya masyarakat yang rumah nya tidak layak huni | Pauh Tinggi , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pauh Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 322 | JAMUDIN, S.Kom | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Rusak Membahayakan Masyarakat dan membahayakan Kendaraan yang Lewat | Rt. 01, Rt. 02, Rt. 03 Sampai Ke Rt. 05 Desa Sungai Sikai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungaisikai | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 323 | JAMUDIN, S.Kom | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Sering Banjir | Desa Sungai Sikai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungaisikai | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 324 | SUPRATMAN | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Untuk kelancaran mobilisasi | Pelompek sampai pauh tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pesisir Bukit | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Prioritas Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 325 | SALMIYADI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | jalanberlobang, banyak masyrakat terjatuh | desa bumbun duri, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Bumbun Duri | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 326 | UMARHADI | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Sering terjadi banjir saat musim hujan karena Dreinase sudah dangkal , | koto dua lama, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Dua Lama | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 327 | SALMIYADI | Kelurahan/ Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | tedapat jambatan utama yang hampir rubuh (Rusak) didesa bumbun duri, padahal jambatantersebut merupakan jambatan pital bagi masyarak dalam beraktifitas sehari-hari. | desa bumbun duri, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Bumbun Duri | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Pembangunan Jembatan | - | - | - | - | Pembangunan Jembatan |
| 328 | SALMIYADI | Kelurahan/ Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | terdapat jalan lingkungan yang masih rusak dan tergenang air, sehingga diperlukan pengaspalan jalan untuk lebih mudah mengakses dusun ayau RT tersebut, sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu. | desa bumbun duri, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Bumbun Duri | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 329 | INDRA EKA PUTRA, S.Pd | Kelurahan/ Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | terjadi genangan air disekitar rumah penduduk ketika hujan karena tidak ada saluran pembuangan air | RT 04, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek Pasar Baru | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 330 | INDRA EKA PUTRA, S.Pd | Kelurahan/ Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | MASIH ADA RUMAH WARGA KATEGORI KURANG LAYAK HUNI | RT 01,02,03,04,05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek Pasar Baru | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | INDRA EKA PUTRA, S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | MASIH ADA JALAN LINGKUNGAN YANG PERLU DI REHAB/BANGUN | RT 05, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek Pasar Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 332 | INDRA EKA PUTRA, S.Pd | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | MASIH ADA JALAN LINGKUNGANYANG PERLU DIPERBAIKI | RT 04, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek Pasar Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 333 | SUPRATMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Rusak Akibat Bencana ALam | Pesisir Bukit, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pesisir Bukit | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 334 | SUPRATMAN | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Banyak Rumah yang tidak layak huni | Pesisir Bukit, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pesisir Bukit | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 335 | M. NAZIR | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Belum Pengaspalan Jalan Dari Dusun Baru Sampai Ke Lapangan Sepak Bola Lubuk Paku | Lubuk Paku , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Lubuk Paku | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 336 | MANDALIS | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusak Jalan Utama Desa Sungai Sampun Tepatnya Antara Dusun II dan III | Dusun II dan III Desa Sungai Sampun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaisampun | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 337 | FATTU ROHMI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Peningkatan atau pembangunanjalankabupaten penghubung dari dusun Talang hilir desa pematang lingkung ke desa Tamiai dan dari desa pematang lingkung ke desa batang Merangin | Desa pematang lingkung ke desa Tamiai Desa pematang lingkung ke desa batang Merangin , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Pematang Lingkung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 338 | HARIPAL | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Pengaspalan jalan poros yang menghubungkandesa Pondok dengan desa Lolo Gedang | pondok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pondok | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 339 | Era Nopike | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | pengaspalan jalan poros tengah yang menghubungkan desa Lolo gedang dengan desa Pondok | pondok, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Lolo Gedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 340 | M. NAZIR | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Pelebaran Sepanjang Jalan Nasional Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin | Lubuk Paku, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Lubuk Paku | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 341 | SIGIT PURNOMO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Perbaikan Jalan Setapak RT 02 Dusun 01 Desa Kersik Tuo | RT 02 Dusun 01 Desa Kersik Tuo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Kersik Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak Untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 342 | MAT SUU'T | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalan Rusak dan Berlubang, Ketika Musim Hujan Jalan Jadi Berlumpur dan Sulit Dilalui Kendaraan Mau Pun dilalui Oleh Masyarakat. | Jalan Nyamar Desa Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Dusun Baru Tanjung Tanah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 343 | ANDRI EM WIDANA | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Aspal yang sudah hancur di bangun lebih dari 20 tahun yang silam, sehingga jalan tidak nyaman lagi dilalui dan bergelombang. | RT. 01 Desa Air Panas Kec. AHB, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Air Panas | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilengkapi dengan Profosal untuk dapat di Prioritaskan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 344 | Asmar | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | aspal jalan as 1500 M di desa bintang marak | bintang marak, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Bintang Marak | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 345 | Sunarto | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusaknya badan jalan yang ditandai dengan banyaknya Lobang di badan jalan sehingga membahayakan pengguna jalan. | Jalan Lintas Pasar sungai tanduk, kecamatan Kayu Aro Kabupaten kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Pasar Sungai Tanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Sunarto | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusaknya badan jalan yang dilewati oleh masyarakat dan pelajar SMP | jln SMP rt 02 Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Pasar Sungai Tanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 347 | Sunarto | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | tidak adanya jembatan penghubung masyarakat yang mengarah ke daerah pertanian dan perkebunan masyarakat sehingga sulitnya akses untuk mengeluarkan hasil panen | Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Pasar Sungai Tanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 348 | Sunarto | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tidak adanya Drainase di Daerah Rawan Banjir | Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Pasar Sungai Tanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 349 | Sunarto | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Rusaknyajalanlingkungan Desa | Desa Pasar Sungai Tanduk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Pasar Sungai Tanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 350 | ANDRI EM WIDANA | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Pemukiman yang semakin lama semakin sempit, perlu Pengembangan Pemukiman wilayah Desa dengan Pengaspalan/koral Jalan Lingkungan pengembangan wilayah. 150 Meter | RT.01 Air Panas, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Air Panas | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Telahdiverifikasi untuk dapat diprioritaskan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 351 | TIBARTONO, SE | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Jalanyg ada belum memadai sehingga jika musim hujan jalan jadi rusak | Pendung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Pendung Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 352 | EDI WARDI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | rusaknya jalan akses ke puskesmas hamparan gugu ke puskesmas 200 meter | Desa koto Mudik Rt 02. Puskesmas Semurup, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Koto Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Telahdiverifikasi untuk dapat diprioritaskan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 353 | TIBARTONO, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Jika musim hujan tiba drainase yang ada tidak kuat untuk menampung luapan air | Pemdung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Pendung Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 354 | EDI WARDI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Rusaknya jalan dari SD,kuburan atau makam dan menuju jalan kabupaten koto dua baru | Desa KOto Mudik RT 02 SD Koto Mudik,Kuburan Atau Makam, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Koto Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Telahdiverifikasi untuk dapat diprioritaskan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 355 | BASUKI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Masih Banyak jalanyang belum di Aspal | Batang Sangir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Batang Sangir | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 356 | ASMER | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Sulitnya warga saat mengakses jalan terebut sehingga butuh pengerasan | DESA TARUTUNG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Tarutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulan bisa diajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 357 | ASMER | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | endaraan sulit melintas, terutama mobil, kendaraan angkut, dan darurat dan Becek saat hujan, berdebu saat kemarau<br>Kondisi ini mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan aktivitas warga | DESA TARUTUNG, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Tarutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 358 | SIGIT PURNOMO | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Perbaikan Jalan Setapak RT 05 Dusun 02 Desa Kersik Tuo | RT05 Dusun 02 Desa Kersi Tuo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Kersik Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 359 | SIGIT PURNOMO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Air meluap ketika curah hujan deras RT 07 Dusun 02 Desa Kersik Tuo | RT07 Dusun 02 Desa Kersik Tuo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Kersik Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | SIGIT PURNOMO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Air Meluap Ketika Curah Hujan Deras RT 08 Dusun 03 Desa Kersik Tuo | RT 08 Dusun 03 Desa Kersik Tuo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Kersik Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 361 | SIGIT PURNOMO | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Jalan Rusak dan Banyak Berlubang RT 10 Dusun 03 Desa Kersik Tuo | RT 10 Dusun 03 Desa Kersik Tuo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Kersik Tuo | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 362 | JAMHARI, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | genangan air saat hujan mengakibatkan jalan penuh dengan air sehingga susah untuk dilewati di wilayah rt 4 | Desa Lindung Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Lindung Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 363 | JAMHARI, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | beberapa jalan yang rusak membuat susah untuk di lewati di wilayah perbatasan rt 2 dan rt 4 sehingga perlunya pembangunan ulang | Desa Lindung Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Lindung Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 364 | JAMHARI, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan yang berbatu mengakibatkan kesulitan saat dilalui , perlunya pembangunan jalan penghubung antara jalan desa lindung jaya ke desa mekarsari | Desa Lindung Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Lindung Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusukan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 365 | JAMHARI, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | rusak nya jalan yang dilalui sehingga memerlukan pembangunan ulang di wilayah perbatasan rt 2 dan rt 3 | Desa Lindung Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Lindung Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 366 | JAMHARI, SE | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | meluapnya air ke jalan saat hujan yang mengakibatkan jalan tergenang oleh air, sehingga perlunya drainase di wilayah dusun 3 | Desa Lindung Jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Lindung Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 367 | IRILARIZAL, A.Md | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | sering terjadinya banjir. untuk itu perlu tembok penahan banjir sepanjang sungai muara semerah sampai dusun tinggi. kami mohon kepada pihak yang terkait seperti OPD BPBD atau Dinas PURP untuk mengatasi permasalahankami ini. | dusun koto dumo Desa Muara Semerah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Muara Semerah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Peningkatanbangunan perkuatan tebing | - | - | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 368 | Suprayetno | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Masih kurangnya drainase di daerah lingkungan | rt 05 desa mekar jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Mekar Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulakan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 369 | Eri Mardison | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Tidak Lancarnya Transportasi/Jalan Desa Rusak Parah | Koto Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Koto Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 370 | Eri Mardison | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Sering Terjadi Banjir | Koto Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Koto Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 371 | Eri Mardison | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Masih Terdapat Warga tinggal di rumah yang tidak layak huni | Koto Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Koto Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 372 | WILDONI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | penyambungan aspal, jalan penguhubung desa air mumu dan des masgo menuju jalan arah jembatan kelok sago | air mumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Air Mumu | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Pendi Karyawan | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Perlunya Lanjutan Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Pahlawan Belui Menuju Desa Koto Majidin Diair agar akses Jalan Lancar. | Desa Pahlawan Belui Kecamatan Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Pahlawan Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 374 | Pendi Karyawan | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Pahlawan Belui - Ke desa Belui | Pahlawan Belui, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Pahlawan Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 375 | MIRZAL ISWADI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | akses jalan desa yang sudah tidak memadai untuk dilalui oleh kendaraan dan jambatan yang sudah rusak | desa sungai dalam, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaidalam | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 376 | MIRZAL ISWADI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | banyaknya jalan yang sulit dilalui karena terlalu sempit oleh karena itu diperlukan pelebaran jalan | desa sungai dalam, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaidalam | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk di usulkan | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 377 | Pendi Karyawan | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Drainase/Tembok Penahan Jalan Pinggir Sungai Batang Merao agar air sungai tidak mdelup hingga ke jalan dan Rumah Warga | Pahlawan Belui, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Pahlawan Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 378 | TARMANTO | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Akses Jalan utama dari Mekar Jaya-Sungai Tanduk-Pasar Sungai Tanduk-Bedeng Baru banyak yang berlubang | Jalan Lintas Utama dari Mekar Jaya-Sungai Tanduk-Pasar Sungai Tanduk- Bedeng Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaitanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | sangat layak sekali diusulkan karena ini jalan utama yg menghubungkan sebagiandesa yg ada di wilayah kec kayu aro | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 379 | TARMANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Saluran Drainase Jalan Utama belum tersedia dan tidak memadai | Drainase Jalan Utama Dari Mekar Jaya-sungai Tanduk-Pasar sungai Tanduk , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaitanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 380 | KASDI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Pengaspalan Jalan Desa Dusun 2 dan Dusun 3 | BEDENG BARU, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Bedeng Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 381 | KASDI | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Tanggul Penahan Tanah Jalan | BEDENG BARU, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Bedeng Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 382 | KASDI | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Melanjutkan pengaspalan Jalan | BEDENG BARU, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Bedeng Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkn | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 383 | TARMANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Jalan Lingkunganbelum memadai | Jalan Lingkungan desa Sungai Tanduk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaitanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 384 | TARMANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Sistem Drainaselingkungan belum memadai | Desa Sungai Tanduk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaitanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 385 | MULIYADI | Kelurahan / Desa | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | tidak adanya saluran air hujan di pinggir jalan | dusun 2 dan dusun 3, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak Untuk Diusulkan | Peningkatan Drainase Lingkungan | - | - | - | - | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
| 386 | TARMANTO | Kelurahan / Desa | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah tangga miskin belum tersedia | Sungai Tanduk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaitanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | - | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| 387 | RUDI HARTONO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Tidak adanya Tembok Penahan/ Normalisasi Sungai | rt 2 koto mebai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Barat | Koto Mebai | Kabupaten / Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Telahdiverifikasi untuk dapat diprioritaskan | Pembangunantanggul sungai | - | - | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | RUSLAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | di karenakan jalan lingkungan sudah belasan tahun belum pernah di rehap,sehingga jalan lingkung menjadi banyak yang berlubang. | Pendung mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Pendung Mudik | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Lingkungan | - | - | - | - | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota |
| 389 | RUSLAN | Kelurahan / Desa | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | Mengingat jalan menuju objek wisata air terjun belum memadai sehingga di perlukan pembangunan jalan . | Pendung mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Pendung Mudik | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 390 | EDIA SATRIA | Kelurahan / Desa | Pembangunandan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Pembangunan dan Peningkatan Jembatan | Desa Bunga Tanjung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Bunga Tanjung | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke tahapan selanjutnya | LANJUT MUSREMBANG | Peningkatan Jalan Kabupaten | - | - | - | - | Pembangunan Jalan |
| 391 | JANG IBNUBASRI,M. Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Susahnyatempatpembungan sampah | Dusun 1, Kab. Kerinci , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak | Tutung Bungkuk | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Teruskan ke SKPD terkait | SETUJU | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 392 | ETRIADI,S.Pd | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Sulitnya Tempat Pembuangan Sampah | Desa Plak Naneh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak | Dusun Dalam | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Teruskan ke SKPD terkait | SETUJU | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 393 | NASIRUDDIN,S E | Kelurahan / Desa | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | tidak adanya tempat pengelolaan sampah di desa koto kapeh | Desa Koto Kapeh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak | Koto Kapeh | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Teruskan ke SKPD terkait | SETUJU | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | - | - | - | - | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 394 | DONI PUTRA YANTO | Kelurahan / Desa | Pembangunan Gedung Kantor | KANTOR CAMAT SIULAK YANG SEBELAH BELUM DIREHAP | DUSUN BARU, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak | Dusun Baru | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Verifikasi TAPD | Teruskan ke SKPD terkait | SETUJU | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |

**Dinas Pendidikan**

| NO | PENGUSUL | PROFIL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | USULAN KE | OPDTUJUAN AKHIR | STATUS | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI KECAMATAN | REKOMENDASI SKPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRI USIARTO PUTRA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | dibutuhkan bantuan Bea Siswa bagi pelajar yang kurang mampu | tambak tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tambak Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | setuju, lanjutkan di musrenbang kecamatan | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 2 | WIRASATRIA BUANA | Kelurahan / Desa | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | Belum Memiliki Alat Permainan Edukatif(AFE) untuk PAUD | Semumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Semumu | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 5 | Paket | 840.000.000 | - | Pengadaan Perlengkapan PAUD |
| 3 | KHAIRI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | untukmencegah Terputusnya Pendidikan Bagi Anak Yang Kurang Mampu DiDesa Koto Baru Semerap | Desa Koto Baru Semerap, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Koto Baru Semerap | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | LANJUTKAN | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 4 | JUNAIDI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Terdapat Banyak anak yang kurang mampu | Desa Punai Merindu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Punai Merindu | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | LANJUTKAN | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 5 | JAFRIZAL | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | masih bnyak masyarakat yg kurang mampu | RT 03. Dusun Lama, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Tanjungpauh Hilir | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | LANJUTKAN | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 6 | SAHARMAN | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Masih banyak anak yang kurang mampu yang membutuhkan beasiswa | Lubuk Suli, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Lubuk Suli | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MASRIZAL | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Guna meningkatkan SDM masyarakat Desa Koto Baru Hiang dan menumbuhkan semangat belajar yang lebih kepada pelajar, perlu adanya bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu bagi para pelajar khususnya warga Desa Koto Baru Hiang. | Koto Baru Hiang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Koto Baru Hiang | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | anggarkan di DD | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 8 | Budi Satria, S.Pd | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | untuk meringankan beban bagi yang kurang mampu | Desa Kayu Aho Mangkak, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Kayu Aho Mangkak Koto Lanang | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 9 | JASDI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | DAPATMENGURANGI BEBAN BIAYA BAGI YANG KURANG MAMPU | DESA BARU PULAU SANGKAR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Baru Pulau Sangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 10 | JASDI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | KURANGNYAMINAT ANAK TENTANG HAFIDZ QUR'AN | DESA BARU PULAU SANGKAR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Baru Pulau Sangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 11 | JEGKI WANJAYA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | KURANGNYA DUKUNGAN FINANSIALTERHADAP SISWA YANG BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU | DESA TEBAT IJUK DILI, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tebat Ijuk Dili | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 12 | UMAR MUKTAR, S.Pd | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Peningkatan SDM pendidikan | Baru sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Baru Sungai Betung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | setujudilanjutkan ke perangkat daerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 13 | UMAR MUKTAR, S.Pd | Kelurahan / Desa | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Lancarnya kegiatan pendidikan | Baru sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Baru Sungai Betung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | setujudilanjutkan ke perangkat daerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 14 | NAELEDWIN, S.Pt, M.Si | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Lancarnya aktifitas pendidikan | Danau Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Danautinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 15 | NAELEDWIN, S.Pt, M.Si | Kelurahan / Desa | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Lancarnya aktifitas pendidikan | Danau Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Danautinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke Musrenbang kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 16 | NINO CASTALINO | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Peningkatan/penunjang mutu pendidikan | Sungai Betung Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibetung Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 17 | NASWAN HERMAWAN | Kelurahan / Desa | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | masihkurangnya ketersediaan fasilitas PAUD (APE) | RT 02 Dusun Bandar Panjang Desa Koto Majidin Hilir, Kab. Kerinci , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 5 | Paket | 840.000.000 | - | Pengadaan Perlengkapan PAUD |
| 18 | NASWAN HERMAWAN | Kelurahan / Desa | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Masih Minimnya Perlengkapan Siswa dan alat peraga PAUD | RT 02 Dusun Bandar Panjang Desa Koto Majidin Hilir, Kab. Kerinci , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 1 | Paket | 105.000.000 | - | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD |
| 19 | SYAFTIAR, A.Md. DPT | Kelurahan / Desa | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | Masih Minimnya Perlengkapan PAUD Desa Koto Majidin Mudik | Desa Koto Majidin Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 5 | Paket | 840.000.000 | - | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| 20 | SYAFTIAR, A.Md. DPT | Kelurahan / Desa | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Masih Minimnya Mebel Sekolah TK dan SD Desa Koto Majidin Mudik | Desa Koto Majidin Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | setujui | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 2 | Paket | 367.500.000 | - | Pengadaan Mebel PAUD |
| 21 | SYAFTIAR, A.Md. DPT | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Masih minimnya Beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu Desa Koto Majidin Mudik | Desa Koto Majidin Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 22 | JOHAN IDRU,S.Pd | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Peningkatan mutu pendidikan | Sungai Betung Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibetung Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 23 | GOFRIZAL, S.PdI | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Lancarnya aktifitas pendidikan | Suko Pangkat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Suko Pangkat | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ZULKIFLI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | di desa pondok siguang untuk pekerjaan orang tua siswa lebih lebih banyak petani,nelayan,pedagang/swasta dibandingkan PNS | desa pondok siguang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pondok Saguang | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | LANJUTKAN | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 25 | MUHAMMAD AZAR | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Peningkatan/ penunjang pendidikan | Air Betung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Air Betung | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 26 | TOMI JAFISA, S.Pd | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Peningkatanmutupenunjang pendidikan | Sungai Gelampeh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaigelampeh | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 27 | DALTONERIAL SANDI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Peningkatanmutupenunjang pendidikan | Tanjung Genting Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Tanjunggenting Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 28 | ANGGA SANJAYA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyak yang masih menjalani pendidikan dan berprestasi sertamembutuhkan beasiswa | Simpang Empat Sungai Tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Simpang Empat Sungai Tutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan di Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 29 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Untuk menunjang PenglengkapanSiswadalam Proses Belajar | RT-03 Dusun Di Air, Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | KotoMajidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 1800 | Buku | 94.500.000 | - | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |
| 30 | ANGGA SANJAYA | Kelurahan / Desa | Rehab Ruang Kelas | Perlu peningkatan gedung /ruang kelas SD di Desa Simpang Empat Sungai Tutunh | Simpang Empat Sungai Tutung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Simpang Empat Sungai Tutung | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Kemudian lanjutkan ke musrenbang | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 31 | HALIMAN,S.Ap | Kelurahan / Desa | Mebel Murid dan Guru (PAUD) | Belum terpenuhinya Mebel dan peralatan di Paud Desa | Paud Fikri Desa Sungai Medang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Sungaimedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 2 | Paket | 367.500.000 | - | Pengadaan Mebel PAUD |
| 32 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | belum Tersedianya Alat tersebut | Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | KotoMajidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 1 | Paket | 105.000.000 | - | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD |
| 33 | HALIMAN,S.Ap | Kelurahan / Desa | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | Belum Maksimalnya belum memadai nya alat peraga da mainan Paud desa | Paud Fikri, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Sungaimedang | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju dan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 5 | Paket | 840.000.000 | - | Pengadaan Perlengkapan PAUD |
| 34 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Pagar Sekolah yang rusak dan tidak layak lagi akibat usia | SD Negeri 83/III/ Koto Majidin, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | KotoMajidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Kemudian lanjutkan ke musrenbang | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 35 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | masih banyak yang belum dapat | Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | KotoMajidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Untuk dapat dilanjutkandi tingkat selanjutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 36 | ANNUDIN | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Pembuatan Pagar Sekolah SD 62/III Tebing TInggi | tebing tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Tebing Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Kemudian lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Lanjutkan usulan kekabupaten( Dinas Pendidikan ) karena sangat dibutuhkan dan untuk keamanan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 37 | Saiful | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | untuk mendorong semngat belajar para siswa dan membantu siswa yang kurang mampu | desa kototengah kecamatan air hangat barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Barat | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Kemudian lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 38 | Saiful | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Belum ada pagar sekolah untu SD Koto tengah ( PAGAR SEKOLAH untuk SD) | RT 01 Dusun Diair Desa Koto Tengah Kecamatan air hangat barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Barat | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Kemudian lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 39 | Saiful | Kelurahan / Desa | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | belum ada APE PAUD | Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Barat | Koto Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | - | Lengkapi Dokumen Profosal Untuk dapat di Prioritas | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 5 | Paket | 840.000.000 | - | Pengadaan Perlengkapan PAUD |
| 40 | HARMALIS,S.Ag | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | masih banyak siswa yang berada di Desa Kemantan tinggi yang belum mendapatkan bantuan bea siswaberprestasi memberikan dan kurang mampu | Siswa berprestasi dan kurang mapu desa kemantan tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamtaan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MISALMI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyaknya anak-anak yang berprestasi yang tidak disalurkan yang dikarenakan masalah keuangan yang tidak ada, membuat banyaknya anak-anak yang putus sekolah, yang mengakibatkan pernikahan dini | MUKAI TENGAH, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Mukai Tengah | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 42 | ZAMZARI | Kelurahan / Desa | Mebel Murid dan Guru (PAUD) | Belum tersedianya mebel guru dan murid PAUD | RT. 05 Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Hilir | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 2 | Paket | 367.500.000 | - | Pengadaan Mebel PAUD |
| 43 | HARIZAL | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Adanya siswa tidak mampu | Kemantan Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Mudik | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 44 | ZAMZARI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Masih banyak siswa yang berprestasi dan kurang mampu belum dapat beasiswa | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Hilir | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 45 | ZAMZARI | Kelurahan / Desa | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Perlunyapembangunan paving block dan jamban SDN 80/III Pungut Hilir | RT. 01 Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Hilir | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 46 | SUHERMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Kurangnya ruang kelas SMPN 52, mengakibatkan proses belajarmengajartidak efektif | RT 02 Ambai Atas, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Ambai Atas | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, lanjutkan ke musrenbang kecamatan | lanjut ke pembahasan berikutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 47 | HERMANTO | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Bantuan Siswa Prestasi kurang Mampu | Baru Air Hangat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Baru Air Hangat | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 48 | KASMIR | Kelurahan / Desa | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Pembangunan pagar sekolah untuk mengamankanberbagai fasilitas pendung sekolah serta pembangunan paving block karena sering tergenang air ketika musim hujan. | Dusun Hilir RT. 01 Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Pungut Mudik | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 49 | TAUFIKRAF, S.Sos.MM | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Peningkatankualitas pendidikan | Siulak Tenang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Siulak Tenang | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 50 | ANDRI GUSTOVA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Peninglatan mutu pendidikan | Kelurahan Siulak Deras, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Siulak Deras | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 51 | EMAHARMA PUTRI,SP | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Peningkatan mutu pendidikan | Tanjung Genting, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Tanjunggenting | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke musrenbang kecamatan | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 52 | ZEL WANDRI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyak Siswa yang berprestasi yang butuh beasiswa untuk menunjang prestasi di sekolah | Kemantan Agung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Agung | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 53 | ZEL WANDRI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Bantuan Untuk Anak - anak Hafidz Qur'an di Desa Kemantan Agung | Kemantan Agung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Agung | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, lanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 54 | ALWI NADIMIN | Kelurahan / Desa | Pembangunan Rumah Dinas Sekolah (SMP) | Banyaknya Guru yang berasal dari Luar Daerah dan perlu adanya rumah dinas sekolah SMP | SMPN 51 Satu AtapKerinci, Desa Sungai Kuning, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | sangat layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 55 | ALWI NADIMIN | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Belum adanya Pagar SMP 51 Satu Atap Kerinci | SMPN 51 Satu Atap Kerinci Desa Sungai Kuning, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 56 | ELPA PUTRA | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Belum adanya pagar SMP | Dusun 1 Desa Talang Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Talang Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Layak untuk dusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 57 | JASMAN | Kelurahan / Desa | Pengadaan Mebel Murid dan Guru (SMP) | Perlunya Tambahan Mebel Sekolah SMP di Desa Muara Hemat | Desa Muara Hemat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Muara Hemat | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 19 | Paket | 1.575.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ELPIAN | Kelurahan / Desa | Mebel Murid dan Guru (PAUD) | MasihKurangnya Pasilitas Untuk PAUD | Kemantan Darat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Darat | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 2 | Paket | 367.500.000 | - | Pengadaan Mebel PAUD |
| 59 | ELPIAN | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Beasiswa untuk Penunjang Semangat Belajar untuk siswa siswi di Desa Kemantan Darat | Kemantan Darat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Darat | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 60 | Jumadil | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | biasiswa yang sangat di butuhkan pelajar yang kurang mampu | dusun 1-4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaiasam | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 61 | Jumadil | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | untukmenambah motovasi belajar | dusun 1-4, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Sungaiasam | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 62 | GERI UTAMA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Biayasiswauntuk anak sd,smp,sma | masgpo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Masgo | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 63 | GERI UTAMA | Kelurahan / Desa | Rumah Dinas Sekolah | Belum adanya rumah dinas guru SD di masgo | dusun masgogedang desa masgo, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Masgo | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Rumah Dinas Sekolah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 64 | RAHMAT KURNIA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Pendidikan merupakan hal utama diera digitalisasi. Dan perlu untuk ditingkatkan | Talang lindung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Talang Lindung | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | sudahdibahas di pra musrenbang | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 65 | Kurniawan | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | adanyanmasyakat yang kurang mampu dalam bersekolah | Kampung Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kampung Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 66 | Kurniawan | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | kurang nyabantuan Bagi Hafidz Alquran | Kampung Baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro Barat | Kampung Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke tahap berikutnya | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 67 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Bnyaknya siswa kurang mampu yg berprestasi | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 68 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Minimnyabangunanruang kelas dan ruang guru | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 69 | Mohd.Lazim | Kelurahan / Desa | Rehab Ruang Kelas | Ruang kelas SD yg kurang layak | Desa pengasi baru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pengasi Baru | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 70 | DEBI HARYANTO | Kelurahan / Desa | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Rumah Dinas Guru Sekolah Sudah Tidak Layak Huni | RT. 06 Desa Sungai Rumpun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Sungairumpun | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 71 | HENDRI WIRANATA,S. Ap | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Kendala ekonomi: biaya sekolah, seragam, buku, transportasi. Bukti: banyak keluarga tidak mampu menanggung biaya pendidikan penuh. Keterbatasan fasilitas dan dukungan belajar di rumah. Dampak: rendahnya prestasi akademik dan angka putus sekolah. Kurangnya informasi dan akses terhadap peluang beasiswa. Bukti: minimnya sosialisasi program bantuan dan seleksi yang tidak tepat sasaran. | Desa Pelompek, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | HENDRI WIRANATA,S. Ap | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | banyaknya anak - anak berprestasi namun kurang mampu membuat orang tua tidak mampumenyekolahkan anak tingkat lanjut untuk itu perlu bantuan beasiswa prestasi untuk siswa yang kurang mampu, | desa pelompek, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pelompek | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 73 | INDAL PRISKA | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyak nya masyarakat yang kurang mampu dan butuh beasiswa | Pauh Tinggi , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pauh Tinggi | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 74 | SUPRATMAN | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Untuk membantu siswa desa pesisir bukit bagi yang membutuhkan | Pesisir Bukit, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pesisir Bukit | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 75 | SUPRATMAN | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Rusak Berat | Pesisir Bukit, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pesisir Bukit | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 76 | SUPRATMAN | Kelurahan / Desa | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Mebel SD banyak sudak tidak layak pakai | Pesisir Bukit, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Tujuh | Pesisir Bukit | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Lanjutkan ke musrebang kabupaten | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 10 | Paket | 2.100.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 77 | FATTU ROHMI | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Tkbelum memiliki pagar pembatas area, Tingkat keamanan dan keselamatananakmasih kurang, Aktivitas belajar kurang kondusif karena area terbuka, | Alamat dusun Talang hilir desa pematang lingkung , Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Pematang Lingkung | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 9 | Unit | 1.680.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 78 | EDI WARDI | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Minimnya Biaya Siswa Masuk Ke Desa | Desa Koto Mudik Kec. AHB, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Barat | Koto Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan Ke Musrenbang Kecamatan | Telahdiverifikasi untuk dapat diprioritaskan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 79 | BASUKI | Kelurahan / Desa | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Atap Bocor dan pagar sudah tidak layak | batang sangir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Batang Sangir | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 80 | Suprayetno | Kelurahan / Desa | Rehab Ruang Kelas | Kurangnya kelas | desa mekar jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Mekar Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 81 | Suprayetno | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang tidak bisa merasakan pendidikan | desa mekar jaya, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Mekar Jaya | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 82 | Pendi Karyawan | Kelurahan / Desa | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | Lanjutan Pemasanga Paving Blok Halaman dan Pagar SMP 15 Kerinci | Pahlawan Belui, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Pahlawan Belui | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 83 | TARMANTO | Kelurahan / Desa | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | Beasiswa untuk siswa prestasi, kurang mampu dan hafidz qur'an belum memadai | Sungai Tanduk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaitanduk | Kabupaten / Kota | Dinas Pendidikan | Verifikasi TAPD | Setuju, Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | layak untuk diusulkan | Setujuuntuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |

**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

| NO | PENGUSUL | PROFIL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | USULAN KE | OPDTUJUAN AKHIR | STATUS | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI KECAMATAN | REKOMENDASI SKPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRIYANTO | Kelurahan / Desa | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | masih belum tersedianya peralatan sarana produksi bagi UMKM desa Sekungkung | Desa Sekungkung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Sekungkung | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | bantuan akan disalurkan melalui sentra industri, jika anggaran mencukupi | 1 | sentra | 100.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| 2 | APRIYANTO | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | masih rendah nya SDM | Desa Sekungkung, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Sekungkung | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Fasilitasi Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi IKM | 5 | Pelatihan | 350.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MUKHLAS | Kelurahan / Desa | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | Ada beberapa Los tempat berjualan yang sudah tidak layak lagi | Desa Pasar Tamiai, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Pasar Tamiai | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | 1 | Paket | 100.000.000 | - | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 4 | SAIDINA UMAR | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | Meningkatnya keinginan Masyarkat dalam menjalani UKM untuk menambah penghasilan Keluarga untuk itu perlu adanya bimbingan, pendampingan dan bantuan dalam meningkatkan UKM masyarakat tersebut | Desa Semerap, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Semerap | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | DILANJUTKAN | Fasilitasi Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi IKM | 5 | Pelatihan | 350.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 5 | Ali Topan | Kelurahan / Desa | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | tidak tertipnya lapak/tempat jualan,sehinggahasil pertanian yg di jual di pasar tradisional di berjejer di atas tanah. | koto panjang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Panjang | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | 1 | Paket | 100.000.000 | - | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 6 | MOHD DAULAI | Kelurahan / Desa | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional banyak yang rusak dan kurang memadai (atap, lantai, drainase, kios, los).<br><br>Tata kelola pasar belum tertib, termasukpenataan pedagang, kebersihan, dan pengelolaan sampah.,<br><br>Sistem drainase pasar tidak berfungsi optimal sehingga sering terjadi genangan air dan becek.<br><br>Fasilitas pendukung pasar masih terbatas, seperti toilet, tempat cuci tangan, area parkir, dan penerangan. | Dusun Kemindu Desa Pasar Semerap, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Pasar Semerap | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | LANJUTKAN | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | 1 | Paket | 100.000.000 | - | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 7 | NASWAN HERMAWAN | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat kami dikenal dengan sentral itik dan telor itik masyarakat biasanya menjual telor itik dan itik hanya ke pengepul atau kepasar, untuk memberdayakan masayarakat dan ibu-ibu muda maka sangat diperlukan pelatihan khususnya pelatihan UP2K untuk pengolahan itik dan telor itik menjadi produk baru. | Desa Koto Majidin Hilir, Kab. Kerinci<br>, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | KotoMajidin Hilir | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 5 | Pelatihan | 350.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 8 | MUDARDI | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | banyak pemuda yang menganggursetelahtamat sekolah | Desa Lempur Danau, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Lempur Danau | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | sudahdibahas di pra musrenbang | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 6 | Pelatihan | 420.000.000 | Non Belanja Transfer | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 9 | SYUKRAN, S.Pdl | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | Pelatihan Menjahit | Desa Sebukar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Sebukar | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | lanjut tahap berikutnya | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 3 | Pelatihan | 210.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOMI JAFISA, S.Pd | Kelurahan / Desa | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | Peningkatan SDM | Sungai Gelampeh, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaigelampeh | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setuju untuk dilanjutkan ke perangkatdaerah | Penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi berupa mesin dan peralatan industri untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis sertaproduktivitas SDM industri | 1 | sentra industri | 500.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 11 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | Perlunya pelatihan dalam memantu kemampuan masyarakat untuk lebih menambahilmupengetahuan dalam pengelolaan bisnis dan pengelolaan usaha | RT-1,RT-2,RT-3, Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Di Air | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Penyediaan sarana prasarana produksi berupa bantuan alat/mesin industri guna memfasilitasi peningkatankompetensi SDM serta optimalisasi hasil produksi industri lokal | 1 | sentra industri | 500.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 12 | Habibi | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | adanya Kelompok Ibu-ibu yang membutuhkan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan untuk di kembangkan di Desa Pulau Sangkar | Desa Pulau Sangkar, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Pulausangkar | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 4 | pelatihan | 280.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 13 | HARIZAL | Kelurahan / Desa | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | kurangnya sarana mesin dan peralatan | Kemantan Mudik, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | AirHangat Timur | Kemantan Mudik | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Setujuditeruskan ke tingkat Kabupaten | Penyediaan sarana prasarana produksi berupa bantuan alat/mesin industri guna memfasilitasi peningkatankompetensi SDM serta optimalisasi hasil produksi industri lokal | 1 | sentra industri | 500.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| 14 | MUSTAKIN, A.Ma | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | perlunyapengembangan SDM Di desa limok manaih pulau tengah | limok manaih pulau tengah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Limok Manaih Pulau Tengah | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | sudahdibahas di pra musrenbang | Penyelenggaraan programpengembangan SDM industri guna meningkatkan keterampilan teknis dan produktivitas masyarakat | 3 | pelatihan | 210.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 15 | DEDI SANTOSO, S.Kom | Kelurahan / Desa | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | Kekurangan mesin modern | Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Keliling Danau | Keluru | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Lanjutkan | Penyediaan sarana prasarana produksi berupa bantuan alat/mesin industri guna memfasilitasi peningkatankompetensi SDM serta optimalisasi hasil produksi industri lokal | 1 | sentra industri | 500.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| 16 | Emi Ilyas | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | KURANG NYA PENGETAHUAN PELAKU UMKM TENTANG PENGELOLAAN BISNIS | DUSUN BARU LEMPUR, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Dusun Baru Lempur | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 3 | Pelatihan | 210.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 17 | MUHAMMAD HABIB,A.Md | Kelurahan / Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | Banyaknya Masyarakat ingin belajar dalam pengembangan industri kecil dan menengah | Hiang Lestari, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Sitinjau Laut | Hiang Lestari | Kabupaten / Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | lanjut ke tahap berikutnya | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 3 | Pelatihan | 210.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | JASMAN | Kelurahan/ Desa | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Desa Muara Hemat yang sudah Rusak dan sangat perlu di Rehab/diperbaiki | Desa Muara Hemat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Batang Merangin | Muara Hemat | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Usulanbisadiajukan untuk di Verifikasi Perangkat Dearah | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | 1 | Paket | 100.000.000 | - | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 19 | SUWINADAR | Kelurahan/ Desa | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | Tidak adanya sarana dan prasarana Desa Lubuk Tabun pasar yang layak | Desa Lubuk Tabun, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Lubuk Tabun | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Layak untuk diusulkan | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | 1 | Paket | 100.000.000 | - | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 20 | Sunarto | Kelurahan/ Desa | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | Kondisi Prasarana Pasar yang Kurang layak | Desa Pasar Sungai Tanduk, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Pasar Sungai Tanduk | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional | 1 | Paket | 100.000.000 | - | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 21 | Pendi Karyawan | Kelurahan/ Desa | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | Perluadanya Pengembangan SDM Industri Bagi Pemuda Pemudi Melaui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Kewirausahan | Pahlawan Belui, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Pahlawan Belui | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bisnis, Manajemen Kewirausahaan, dan Teknis Produksi bagi pelaku IKM | 3 | pelatihan | 210.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |

**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**

| NO | PENGUSUL | PROFIL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | USULAN KE | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI KECAMATAN | REKOMENDASI SKPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDI MIZWAR | Kelurahan/ Desa | Alat dan Mesin Pertanian | masihkurangnyamasyarakat memiliki ALSINTAN yang memadai untuk pengolahan pertanian dan perkebunan | koto payang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Payang | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | 100.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 2 | DEDI MIZWAR | Kelurahan/ Desa | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | masihsukarnyaoendistribusian hasil pertanian karena tidak terdapat jalan yang memadai | RT 07 Koto Payang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Koto Payang | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | 150.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanJalan Usaha Tani |
| 3 | ABDURASYID | Kelurahan/ Desa | Alat dan Mesin Pertanian | mahalnya upah hasil tani | Bukit seru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Tebing Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait. | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | - | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 4 | ABDURASYID | Kelurahan/ Desa | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Kekerangan air sawah | Bukit seru, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Danau Kerinci | Tebing Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | Usulan di terimadan di teruskan ke OPD terkait | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | - | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanJalan Usaha Tani |
| 5 | SRI USIARTO PUTRA | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Jalan Usaha Tani | para petani sering mengeluh terhadap akses mengangkut hasil pertanian | rt 03 Tambak Tinggi, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tambak Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | - | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanJalan Usaha Tani |
| 6 | SRI USIARTO PUTRA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pengairansering mengalami kendala,maka dibutuhkan irigasi | rt 03, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Tambak Tinggi | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Pertanian Lainnya |
| 7 | VONI DEMAYENTI | Kelurahan/ Desa | Alat dan Mesin Pertanian | minimnya alat dan mesin untuk pertanian | Desa Baru Kubang, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Baru Kubang | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | - | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 8 | WIRASATRIA BUANA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum adanya Tembok Penahan Jalan Usaha Tani | Semumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Semumu | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | - | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Pertanian Lainnya |
| 9 | WIRASATRIA BUANA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Petani Kopi Belum Memiliki Alat Pemecah Kopi | Semumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Semumu | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Kamus usulanberbeda jauh dengan permasalahan | - | - | - | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Pertanian Lainnya |
| 10 | WIRASATRIA BUANA | Kelurahan/ Desa | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak dan Tidak Berfungsinys Saluran Irigasi | Semumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Semumu | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Usulan diterima selanjutnyamenunggu persetujuan TAPD | - | - | 160.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Pertanian Lainnya |

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

| NO | PENGUSUL | PROFIL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | USULAN KE | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI KECAMATAN | REKOMENDASI SKPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUARDESI | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | Peningkatan SDM Aparatur | Sungai Batu Gantih, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Kerinci | Sungaibatu Gantih | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait | setujudilanjutkan ke perangkat daerah | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOPYAN | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | Susahnya Mengembangkan Desa Digital Di Desa Perikan Tengah Karena tidak adanya Jaringan Seluler | Desa Perikan Tengah, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Perikan Tengah | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | direkomendasikan Susahnya Mengembangkan Desa Digital Di Desa Perikan Tengah Karena tidak adanya Jaringan Seluler | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 3 | NAFRI ILYAS,A.MD | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | Pengengtahuan Masyarakat dalam pemamfaatan Desa Digital | Desa Koto Majidin Di Air, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat | Koto Majidin Di Air | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Disetujui untuk diteruskanketahap selanjutnya | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 4 | HUSRIZAL | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | Menuju desa Air Hangat sebagai desa digital di tahun 2027 perlu mempersiapakan sarana dan prasaran digital di desa | Desa Air Hangat, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Air Hangat Timur | Air Hangat | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | Setujuditeruskan ke tingkat kabupaten | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 5 | REPAL SEPRIANTO | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | PERLUNYA SOSIALISASI ATAU BIMBINGAN TEKNIS KEPADA APARATUR DESA DAN MASYARAKATDESA TENTANG DESA DIGITAL | DESA SIMPANG BELUI, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Depati Tujuh | Simpang Belui | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerahterkait. | dilanjutkanuntuk dibahas dalam musrenbang kecamatan | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 6 | ALWI NADIMIN | Kelurahan/ Desa | Penyediaan infrastruktur TIK | Belum tersedianya Insfrastuktur Komunikasi terutama DSinyal/Jaringan komunikasi dan internet | Desa Sungai Kuning, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Siulak Mukai | Sungaikuning | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Lanjutkan Ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan kemudian lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | sangat layak untuk diusulkan untuk memperlancar komunikasi jarak jauh teruma dibidang pemerintahan,pendidikan,kesehatan dan juga mempermudah untuk mengakses informasi karenajarak desa yang sangat jauh dari pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten | - | - | - | - | - | Penyelenggaraan Jaringan Intra PemerintahDaerah Kab/Kota |
| 7 | HARIANTO | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | untuk mempermudah masyarakat dalampengurusan surat yaitu mesin layanan pintar | Lolo Hilir, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Bukitkerman | Lolo Hilir | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | Dilanjutkan ke musrenbang kecamatan | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 8 | Suprayetno | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | kurangnya digitalisasi di desa | DESA MEKAR JAYA, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Mekar Jaya | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 9 | WILDONI | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | susahnyasinyal/jaringan internet | air mumu, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Gunung Raya | Air Mumu | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | dapat direkomendasikan denganjudul dari hasil musrenbang Pengembangan Desa Digital | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| 10 | MIRZAL ISWADI | Kelurahan/ Desa | Pengembangan Desa Digital | kurangnya kemauan masyarakat untuk bergerak maju mengikuti perkembangan zaman sehingga kerja secara digital di anggap mempersulit | desa sungai dalam, Kab. Kerinci | Kab. Kerinci | Kayu Aro | Sungaidalam | Kabupaten/ Kota | Komunikasi dan Informatika | Verifikasi TAPD | Diteruskan ke Perangkat Daerah Terkait | layak untuk diusulkan | Disetujui | - | - | - | - | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas |

**Lampiran III.** Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

## Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

| NO | ID USULAN | TANGGAL USUL | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | USULAN KE | OPD TUJUAN AWAL | OPD TUJUAN AKHIR | STATUS | CATATAN | REKOMENDASI SEKWAN | REKOMENDASI MITRA | REKOMENDASI SKPD | REKOMENDASI TAPD | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN | JENIS BELANJA | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1717864 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | PEMBANGUNAN MONUMEN | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 10 | Paket | 500.000.000 | - | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 2 | 1717937 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | REHAB WISATA PIDUNG | DESA PIDUNG, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 3 | 1719444 | 29-12-2025 | MUKHSIN ZAKARIA | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Belum Ada | Desa Lolo Kecil kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 4 | 1726187 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Pemanfaatan Monumen menjadi tempat wisata, kurangnya lokasi untuk UMKM Tugu Macan | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | alihkan ke pihak ke 3, atau alihkan ke wisata prioritas, seperti air terjun, museum, air panas | 1 | Paket | 170.000.000 | - | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 5 | 1731744 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata | Butuh event dan prasarananya | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan telah diverifikasi sfesifikasi teknisnya. mohon pertimbangan TAPD untuk memasukkan ke dalam rancangan RENJA | even ingin dilimpahkan, dinas cuma support, lebih baik pihak 3 yang melaksanakan, bukan dinas yang menjadi pelaksana utama ubah jadi 1 kegiatan dg anggaran 100 jt, | 1 | kegiatan | 100.000.000 | - | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 6 | 1717814 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sungai sudah dangkal perlu di normalisasi | se kecamatan batang merangin dan kecamatan danau kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Normalisasi/restorasi sungai | null | 1000 | 1000000000 | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| 7 | 1717858 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | SUNGAI SUDAH DANGKAL PERLU DI NORMALISASI | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 10 | Paket | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| 8 | 1717883 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | SUDAH RUSAK PARAH | IRIGASI PAPUN PANJANG DESA KOTO AGUNG, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | null | 1 | Paket | - | - | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
| 9 | 1717889 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BUTUH NORMALISASI SUNGAI | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Normalisasi dan restorasi sungai | null | 10 | Paket | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| 10 | 1718786 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | Turap yang ada sudah roboh | Desa Pasar Siulak Gedang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 300 | meter | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 11 | 1719027 | 27-12-2025 | ISLAMUDIN | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | BUTUH TEMBOK PENAHAN | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 10 | PAKET | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 12 | 1719096 | 28-12-2025 | JAFRUL | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | pembangunan Saluran irigasi lapangan pemuda desa koto Lanang kayu aho mangkak, kondisi rusak berat | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan jaringan irigasi permukaan | null | 400 | Meter | - | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 13 | 1719475 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | belum ada dinding penahan tebing | desa talang lindung kec. keliling danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | paket | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 14 | 1719478 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | belum ada dinding penahan | desa koto baru kec. kelilling danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | paket | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 15 | 1719480 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Peningkatan Aksesibilitas Air | tidak ada tanggul sungai | desa koto Baru kec. kelilling danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan tanggul sungai | null | 700 | M | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |
| 16 | 1719487 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | belum ada pebahan tebing | desa pasar semerap kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | paket | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1719721 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 1 | Paket | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| 18 | 1719723 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | sungai tuak, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 1 | Paket | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| 19 | 1719724 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | normalisasi sungai karena dasar sungai yang sudah dangkal | desa siulak deras mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Normalisasi restorasi sungai | null | 1 | Paket | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| 20 | 1719824 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tebing harus di perbaiki menimalisir banjir | RT02 kelurahan lempur tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 50 | M | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 21 | 1719868 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tembok penahan yang sudah tidak layak | RT01 kelurahan lempur tengah kec. gunung raya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 200 | M | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 22 | 1719961 | 30-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyaknya Tebing Yang Amblas | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | Paket | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 23 | 1719962 | 30-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyaknya Tebing Yang Amblas | Desa Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan bangunan perkuatan tebing | null | 1 | Paket | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 24 | 1719963 | 30-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Banyak Tebing Yang Amblas | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 1 | Paket | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 25 | 1719972 | 30-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasaran Sumber Air | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | null | 1 | Paket | - | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 26 | 1720031 | 30-12-2025 | Ir. BOY EDWAR, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | sungai batang merao - pesantren nurul Haq, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan Tanggul Sungai | null | 200 | meter | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |
| 27 | 1720033 | 30-12-2025 | Ir. BOY EDWAR, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | tembok penahan tebing kemantan raya air hangat timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 100 | meter | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 28 | 1720035 | 30-12-2025 | Ir. BOY EDWAR, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | sering banjir dan jebol | pembangunan tembok penahan tebing sulak kecil - hamparan pugu, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 200 | meter | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 29 | 1720054 | 30-12-2025 | Ir. BOY EDWAR, MM | Pembangunan Drainase di Wilayah Rawan Banjir | tidak lancarnya aliran air | saluran pembuang desa pendung mudik, kecamatan air hangat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | null | 100 | meter | - | - | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 30 | 1720242 | 31-12-2025 | LISNUR BANI, S.Pdl | Betonisasi, Jalan Ligkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan | perlu adanya tembok penahan tebing sungai | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan Tanggul Sungai | null | 200 | meter | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |
| 31 | 1726042 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Kawat Bronjong penahan tebing antara Desa Kersik Tio dan Desa Mekar Jaya | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 100 | Meter | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 32 | 1726049 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Tembok Penahan Sungai Penghubung | Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Pembangunan Tanggul Sungai | null | 100 | Meter | - | - | Pembangunan Tanggul Sungai |
| 33 | 1726056 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Tembok penahan banjir penghubung Desa Koto Baru | Desa Koto Baru, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | null | 1000 | Meter | - | - | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing |
| 34 | 1731741 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir Terpadu | Butuh normalisasi | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Normalisasi/Restorasi Sungai | null | 1000000000 | 10 paket | - | - | Normalisasi/Restorasi Sungai |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1717234 | 24-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Gedung Sekolah Sudah tidak Layak | SDN 88 Sulak Panjang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 36 | 1717800 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Rehab Perpustakaan (SMP) | belum ada | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 37 | 1717801 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | belum ada | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 38 | 1717834 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | belum ada | se kecamatan batang merangin dan kecamatan danau kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 39 | 1717849 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | BELUM ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 40 | 1717860 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | RUSAK PARAH | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 41 | 1717885 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | RUSAK PARAH | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Diterima Sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 42 | 1717918 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | BELUM ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 43 | 1717932 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Beasiswa Prestasi,Kurang Mampu dan Hafidz qur'an (SMP) | SISWA BERPRESTASI | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 44 | 1717942 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | RUSAK | BATANG MERANGIN DAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 45 | 1717978 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Rehab Ruang Kelas | ruang kelas yang sudah banyak yang rusak di SDN 03/III Sungai Deras | SDN 03/III Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 46 | 1718212 | 25-12-2025 | TOMI EMIRAL | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Ruang Kelas Sudah Rusak SD 96/111 Desa Tambak Tinggi | Desa Tambak Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 47 | 1718246 | 25-12-2025 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | · Rehap pengadaan mebeL TK, SD, dan SMP, Kondisi Rusak berat<br>· Pengadaan alat mainan TK, SD, dan SMP. Kondisi Rusak berat | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 19 | Paket | 1.575.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 48 | 1718263 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | Banyak yang sudah rusak | Seluruh kecamatan air hangat, kec. Air hangat barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1718268 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pembangunan Ruang Kator (SMP) | Rusak berat | Smp 1 semurup, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 50 | 1718273 | 26-12-2025 | JAFRUL | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | rehab pagar Sekolah Dasar Koto lanang, kondisi rusak | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 51 | 1718274 | 26-12-2025 | JAFRUL | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pamasangan paving block di sekolah Dasar desa koto Lanang, belum ada | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 52 | 1718317 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Rusak dan belum ada | Semua sekolah dapil 3, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Silakan lanjutkan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 19 | Unit | 168.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 53 | 1718788 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyaknya siswa yg terdampak tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yg lebih tinggi | Desa Tutung Bungkuk, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | Diterima | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 54 | 1719042 | 28-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Kecamatan Siulak, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 55 | 1719043 | 28-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 19 | Paket | 1.575.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 56 | 1719044 | 28-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Kursi, meja, dan lemari mengalami kerusakan sehingga membahayakan keselamatan siswa. | Kecamatan Gunung Kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 57 | 1719416 | 29-12-2025 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Bangunan sudah rusak | Semua desa di kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 58 | 1719430 | 29-12-2025 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Belum Ada | SD Masgo Atas Kec.Gunung Raya Kab.Kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 59 | 1719457 | 29-12-2025 | FIQRI ELFANDA PUTRA | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | sekolah sudah tidak layak di pakai | Desa betung kuning, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 60 | 1719484 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pagar tembok roboh | desa koto patah smp 16 kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 61 | 1719485 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | pagar sekolah , tebing penahan dan wc | SD 101/III/ Koto patah kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 62 | 1719504 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 145/III Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 63 | 1719505 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 121/III Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 64 | 1719506 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 80/III Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 65 | 1719507 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 39/III Kubang Gedang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 66 | 1719508 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Rehab Rumah Dinas Sekolah | Banyak Gedung Yang Rusak | SD N 160/III Koto Panjang , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1719742 | 30-12-2025 | MASYKUR | Rehab Ruang Perpustakaan | sangat di perlukan | SD 58 Lempur Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 68 | 1719749 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | masih di butuhkan | kelurahan Lempur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 69 | 1719853 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | masih banyak guru dan murid kekurangan kursi dan meja | kelurahan lempur tengah kec. gunung raya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | paket | 2.100.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 70 | 1720032 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Kondisi Bangunan untuk digunakan TK ABA Sebukar rusak parah sehingga perlu untuk dilakukan rehabilitasi | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 71 | 1720034 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Mebel Murid dan Guru (PAUD) | TK ABA Sebukar masih sangat kekurangan mebel Murid dan Guru | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Dapat diajukan melalui Dapodik Sekolah Melalui Kemdikdasmen RI | 2 | Paket | 367.500.000 | - | Pengadaan Mebel PAUD |
| 72 | 1720036 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | TK ABA Sebukar Masih sangat kekuranganalat praktik dan peraga siswa | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Dapat diajukan melalui Dapodik Sekolah Melalui Kemdikdasmen RI | 1 | Paket | 105.000.000 | - | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD |
| 73 | 1720038 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pengadaan Perlengkapan PAUD (TIK dan APE Dalam) | TK ABA Sebukar masih sangat kekurangan Perlengkapan TK | Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Dapat diajukan melalui Dapodik Sekolah Melalui Kemdikdasmen RI | 5 | Paket | 840.000.000 | - | Pengadaan Perlengkapan PAUD |
| 74 | 1720039 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet (SMP) | Masih terdapat sekolah SMP yang perlu pembangunan/rehabiiltasi ruang kelas, ruang guru, pagar dan toilet | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 75 | 1720041 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Masih terdapat sekolah SD yang perlu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, pagar dan toilet | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 76 | 1720060 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | masih banyak jamban dan paving block SD yang perlu dibangun dan di rehab | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 77 | 1720065 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | Banyak siswa kurang mampu yang membutuhkan beasiswa | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Diterima | 538 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 78 | 1720117 | 31-12-2025 | MARIYUS | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | Rusak | Kecamatan kayu aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 79 | 1720243 | 31-12-2025 | LISNUR BANI, S.Pdl | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | perlu adanya paving block | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 80 | 1720245 | 31-12-2025 | LISNUR BANI, S.Pdl | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 81 | 1720247 | 31-12-2025 | IRWANDRI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa (SMP) | perlu adanya paving block | Kec. Gunung Kerinci, Kec. Siulak, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 35 | Unit | 7.350.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1720248 | 31-12-2025 | IRWANDRI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | perlu adanya paving block di SD | Kec. Gunung Kerinci, Kec. Siulak, Kec. Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 83 | 1720253 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS, ST | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | banyaknya anak kurang mampu dalam pembiayaan sekolah | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | Diterima Sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 84 | 1726107 | 14-01-2026 | JUMADI | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | pagar sekolah SD Sungai Asam | Desa Sungai Asam, Kec.Kayuaro Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 85 | 1726122 | 14-01-2026 | JUMADI | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | gedung sekolah kurang memadai 3 lokal | Desa Sungai Asam, Kec. Kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 86 | 1726126 | 14-01-2026 | JUMADI | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK Sekolah SD Kurang Memadai 3 Ruang | Desa Sungai Asam, Kec.Kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 87 | 1726132 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan Gedung 3 Lokal | Desa Gunung labu Kecamatan Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 88 | 1726134 | 14-01-2026 | JUMADI | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK PAUD kurang memadai 1 ruang | Desa Sungai Asam, Kec. kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 89 | 1726137 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan dedung sekolah | Desa sungai Lintang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 90 | 1726139 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pembangunan Unit Sekolah Baru | Gedung kurang memadai | Desa Kebun Baru, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 1 | Unit | 1.575.000.000 | - | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| 91 | 1726144 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Kekurangan WC Sekolah | Desa tangkil, Kecamatan Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 92 | 1726155 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Ruang Guru,Pagar,Toilet (PAUD) | Kekurangan tempat pembelajaran dan bermain PAUD | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 9 | Unit | 1.680.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 93 | 1726747 | 14-01-2026 | BIR ALI | Rehab Ruang Perpustakaan | belum memiliki | SDN 58 Lempur Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 94 | 1726770 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pembangunan Unit Sekolah Baru | dibutuhkan peningkatan sekolah | kelurahan lempur tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 1 | Unit | 1.575.000.000 | - | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1726782 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas,Guru,Pagar,Toilet | MCK tidak layak | kelurahan lempur tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dapat diusulkan oleh sekolah melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan ke Kemdikdasmen RI | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 96 | 1726884 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | kekurangan jumlah mabel | lempur tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 97 | 1727314 | 14-01-2026 | IRWANDRI | Pengadaan Mebel Guru dan Murid | Perlunya pengadaan pakaian sekolah untuk siswa baru SD dan SMP se-Kabupaten Kerinci | Kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Setuju dan Silahkan Lanjutkan ke Musrenbang Kecamatan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | dapat di diterima dan menyesuaikan ketersediaan anggaran | 10 | Paket | 2.100.000.000 | - | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 98 | 1731379 | 17-01-2026 | ANDESPA KENDORA, SH | Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu | banyaknya siswa tidak mampu | kecamatan bukit kerman, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Silakan lanjutkan | Setuju untuk dilanjutkan ke tahapan perangkat daerah | null | 354 | Peserta Didik | 2.100.000.000 | - | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 99 | 1731388 | 17-01-2026 | ANDESPA KENDORA, SH | Rehab pagar, paving block dan Jamban siswa | kurang layak | SDN 27/III lolo kecil, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Silakan lanjutkan | Setuju untuk dilanjutkan ketahapan perangkat daerah | null | 60 | Unit | 11.025.000.000 | - | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 100 | 1717829 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Penyediaan bantuan sarana produksi (Bangunan, mesin dan peralatan industri) | tidak ada | se kecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi berupa mesin dan peralatan industri untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis serta produktivitas SDM industri | null | 10 | Paket | 200.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| 101 | 1718252 | 25-12-2025 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | pembinaan, penyuluhan pemuda tani mardeka Indonesia (TMI) kec. depati tujuh dalam peningkatan pengolahan pangan lokal | kec. depati tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Fasilitasi Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi IKM | null | 1 | kegiatan | 70.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 102 | 1719032 | 27-12-2025 | JAFRUL | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | pemberdayaan kelompok pedagang kecil. | depati tujuh, air hangat, air hangat barat, dan air hangat timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Usulan disetujui | - | Disetujui | null | Fasilitasi Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi IKM | null | 1 | kegiatan | 70.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 103 | 1726916 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengembangan SDM Industri melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah | program KelompokTani Wanita | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi berupa mesin dan peralatan industri untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis serta produktivitas SDM industri | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| 104 | 1717805 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | banyak petani kekurangan pupuk | se kecamatan batang merangin dan danau kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Paket/Kg | 2.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 105 | 1717824 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | jalan sudah rusak | se kecamatan danau kerinci dan batang merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 2000 | M | 400.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 106 | 1717854 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | BANYAK PUPUK YANG TIDAK ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, pupuk yang tersedia adalah pupuk kompos serta menyesuaikan anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Paket | - | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 107 | 1717856 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | BELUM ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Disetujui, dengan catatan memenuhi SOP/Juknis yang berlaku dan disesuaikan dengan plafon anggaran. | null | 10 | Paket/Unit | 490.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 108 | 1717857 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | BELU ADA PENGERASAN | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Disetujui, dengan catatan memenuhi SOP/Juknis yang berlaku, sesuai dengan komoditas tanaman perkebunan dan disesuaikan dengan plafon anggaran. | null | 10 | Paket | 2.000.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 109 | 1717865 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | BANYAK LAHAN YAMG KOSONG | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Kelompok Tani | 450.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 110 | 1717887 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | BUTUH PENINGKATAN | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/Lokasi | 2.000.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1717891 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | BANYAK PUPUK YANG TIDAK ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Paket/Kg | 2.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 112 | 1717900 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pembangunan Pompa Hydran | BELUM ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/Unit | 1.500.000.000 | - | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani |
| 113 | 1717901 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | BELUM ADA | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/Unit | 490.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 114 | 1717905 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | BANYAK PEMINAT | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | Paket/KT | 900.000.000 | - | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
| 115 | 1717948 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | keterbatasan akses menuju perladangan warga, dan juga warga susah untuk membawa hasil perkebunan ke desa. permasalhan utamanya belum ada jalan menuju perldangan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 116 | 1717994 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | rehabilitasi jalan usaha tani menuju perladangan warga | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 2000 | Meter | 400.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 117 | 1718006 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | pembukaan jalan akses warga menuju perladangan warga dan juga menuju ke desa pungut hilir | Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 5000 | Meter | 1.000.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 118 | 1718007 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | pembukaan jalan usaha tani menuju ke perladangan warga | Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 3000 | Meter | 600.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 119 | 1718020 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | peningkatan jalan usaha tani menuju ke perkebunan warga | Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 120 | 1718029 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Bantuan Bibit Kopi | bantuan untuk bibit kopi | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | Batang | 45.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 121 | 1718030 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | pengadaan bantuan bibit kayu kulit manis | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | Batang | 45.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 122 | 1718031 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | pengadaan bantuan kadangan sapi maupun perbaikan | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5 | Unit Kandang | 245.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 123 | 1718171 | 25-12-2025 | TOMI EMIRAL | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Susahnya mendapatkan Bibit Kulit Masin yang bagus | Desa Belui Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | Batang | 450.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 124 | 1718172 | 25-12-2025 | TOMI EMIRAL | Bantuan Bibit Kopi | Susuhnya mendapatkan Bibit Kopi yang Berkualitas | Desa Belui Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | Batang | 450.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 125 | 1718209 | 25-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | jalan rusak berat | Desa Air Panas Semurup kec.Air Hangat Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 3 | KM | 600.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 126 | 1718256 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Bantuan Bibit Kopi | Petani butuh bibit berkualitas | Seluruh kabupaten kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Batang | 4.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 127 | 1718261 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | Bibit ayam berkualitas dibutuhkan oleh peternak | Kec air hangat barat dan kec air hangat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Menyesuaikan dengan SOP/juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Ekor | 90.000.000 | - | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
| 128 | 1718481 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Lahan tidur yg semakin banyak, dan keterbatasan modal para petani | Desa Tutung Bungkuk, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | null | null | 10000 | batang | 45.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1718790 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Banyaknya lahan tidur diwilayah terdampak | Desa Tutung Bungkuk, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5 | Unit | 245.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 130 | 1718797 | 26-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Kecamatan Siulak, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 131 | 1718798 | 26-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 132 | 1718799 | 26-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Banyak nya jalan yang rusak dan berlobang yang memerlukan pemeliharaan. | Kecamatan Gunung Kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 133 | 1719029 | 27-12-2025 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Bantuan Bibit Kopi | pengadaan bibit kopi, kayu manis kelompok tani | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | batang | 45.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 134 | 1719114 | 28-12-2025 | ZAKARIA S.Pdl | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Bibit dan alsintan | Kecamatan gunung tujuh,k.aro,k,aro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 3000 | Kg | 6.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 135 | 1719405 | 29-12-2025 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Jalan susah di akses | Semua desa di kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 136 | 1719409 | 29-12-2025 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Bantuan Pemiliharaan Kopi Robusta | Bahan pupuk yang mahal | Semua desa di dapil 4, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5 | Ha | 18.774.500 | - | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |
| 137 | 1719483 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Bantuan Bibit Kopi | memerlukan bibit | desa koto baru kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | Batang | 45.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 138 | 1719736 | 30-12-2025 | JAFRUL | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Pengadaan pupuk padi kelompok Tani dalam meningkatkan swasembada pangan Masyarakat | Depatitujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, pupuk yang tersedia adalah pupuk kompos serta menyesuaikan anggaran yang tersedia. | null | 1500 | Kg | 3.000.000 | - | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |
| 139 | 1719774 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai betung hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 140 | 1719776 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai langkap, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 141 | 1719780 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa siulak deras mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 142 | 1719781 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa lubuk nagodang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 143 | 1719783 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa koto kapeh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 144 | 1719786 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desasimpang tutup, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 145 | 1719809 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan bibit untuk petani | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 146 | 1719810 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | desa sungai kuning, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1719811 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | desa pasir jaya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 148 | 1719863 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangat di perlukan untuk penunjang hasil pertanian | Desa Telago pulau Tengah Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 300 | M | 60.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 149 | 1719865 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangan di perlukan karena menunjang masayarakat ke perkebunan | Desa Limok manaih kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 150 | 1719876 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | Sangat di perlukan karena jalan tidak ada untuk warga ke perkebunan | Desa Telago Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 151 | 1719950 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | sangat di harapkan Masyarakat | desa Bintang Marak Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | unit | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 152 | 1720053 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | masih terdapat peternak yang kekurangan kandang sapi | Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | unit | 490.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 153 | 1720066 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Bantuan Bibit Kopi | masih banyak masyarakat yang membutuhkan bibit kopi | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | batang | 4.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 154 | 1720250 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS , ST | Bantuan Bibit Kopi | belum tersedianya bibit kopi dan kulit manis yang berkualitas dalam perkebunan kopi dan kulit manis | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | batang | 450.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 155 | 1720251 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS , ST | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | kesulitan dalam mengembangkan pertanian karena keterbatasan dalam mendapatkan pupuk dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam kelompok tani | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5000 | Kg | 10.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 156 | 1720252 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS , ST | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | belum tersedianya bibit kopi dan kulit manis yang berkualitas dalam perkebunan kopi dan kulit manis | Desa Koto Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 100000 | batang | 450.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 157 | 1720259 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS , ST | Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan | memperlancar petani ke kebun | sungai Ngeracah Desa Koto Lebuh Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, komoditas tanaman perkebunan serta anggaran yang tersedia. | null | 2000 | M | 400.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 158 | 1720262 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS , ST | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | support pemerintah dalam menembah penghasilan masyarakat | Desa air Betung, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10000 | batang | 45.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 159 | 1726532 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Pengadaan sapi ternak | Desa Kersik Tuo, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 49.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 160 | 1726539 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Pengadaan Sapi Ternak | Desa Koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1 | Unit | 49.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 161 | 1726664 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Bantuan Bibit Kopi | Pengadaan Bibit kopi Arabika dan Robusta | Desa kersik Tuo, Kayu aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 5000 | Batang | 22.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 162 | 1726669 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Bibit Kulit Manis | Pengadaan bibit kuliot manis | Desa koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | Batang | 4.500.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang |
| 163 | 1731385 | 17-01-2026 | ANDESPA KENDORA, SH | Pengembangan Varietas Ayam Petelur | kekurangan stok telur ayam | Desa kebun 5 kec. gung raya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 1000 | ekor | 90.000.000 | - | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
| 164 | 1731737 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pengadaan Bantuan Kandang Sapi | Kebutuhan peternak | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | DIteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku serta anggaran yang tersedia. | null | 10 | unit | 490.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 165 | 1731753 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani | Banyak kelangkaan pupuk | Sekecamatan kayu aro , kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Menyesuaikan dengan SOP/Juknis yang berlaku, pupuk yang tersedia adalah pupuk kompos serta menyesuaikan anggaran yang tersedia. | null | 500000 | Kg | 1.000.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 166 | 1717331 | 24-12-2025 | IRWANDRI | Alat dan Mesin Pertanian | USULAN KELOMPOK | DESA SIULAK DERAS MUDIK, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | Disetujui dan sesuaikan | 8 | BUAH | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1717733 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | kerusakan bendung, saluran tanah, tidak optimalnya distribusi air secara merata ke lahan persawahan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 3500 | Meter | 300.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 168 | 1717798 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | sekecamatan batang merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10000 | 1000000000 | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 169 | 1717839 | 25-12-2025 | ZULFIKAR | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | banyak keperluasn petani | se kecamatan danau kerinci dan ke batang merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 10 | Paket | 100.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 170 | 1717847 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pengembangan Jalan Usaha Tani | BUKA BARU | SE KECAMATAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 171 | 1717852 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BELUM ADA | SE KECAMATAN DANAU KERINCI, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 172 | 1717868 | 25-12-2025 | M. YUNUS | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BELUM ADA IRIGASI | SE KECAMATAN DANAU KERINCI DAN SETINJAU LAUT, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 173 | 1717894 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | BANYAK YANG RUSAK | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 174 | 1717911 | 25-12-2025 | ANGRA PRADANA PUTRA, SE, MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | SANGAT DI HARAPKAN | SE KECAMATAN KELILING DANAU,GUNUNG RAYA,BUKIT KERMAN DAN DKB, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Alpukat dan Sparodi) | null | 100 | Paket | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 175 | 1717976 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | terdapat irigasi dan juga bendungan yang rusak dan juga belum ada bendungan di area persawahan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 700 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 176 | 1717977 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pengembangan Jalan Usaha Tani | perlunya rehabilitasi jalan usaha tani menuju ke perswahan warga, kondisi jalan yang rusak dan masih dalam kondisi tanah | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 150.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 177 | 1717990 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum adanya bendungan irigasi menuju persawahan warga | Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 100 | Meter | 185.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 178 | 1717993 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi di persawahan warga | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 500 | Meter | 180.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 179 | 1717996 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Rehabilitasi jalan usaha tani menuju persawahan warga yang sudah rusak dan juga belum di bangun | Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1500 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 180 | 1718011 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunan irigasi di persawahan warga | Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 750 | Meter | 210.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 181 | 1718012 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rehabilitasi irigasi di persawahan warga | Baru Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 170.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 182 | 1718013 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rehabilitasi jalan usaha tani yang sudah rusak menuju persawahan warga | Baru Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1500 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 183 | 1718015 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi jalan usaha tani menuju persawahan warga yang sudah rusak | Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 175.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 184 | 1718022 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi menuju ke persawahan warga | Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 700 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 185 | 1718028 | 25-12-2025 | ZULKISMI , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rehabilitasi irigasi di persawahan warga yang sudah rusak | Kemantan Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 230.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 1718167 | 25-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bibit bisa kurang sehat, tidak seragam, atau tidak sesuai spesifikasi sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | Kegiatan | 250.000.000 | - | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| 187 | 1718168 | 25-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Bibit bisa kurang sehat, tidak seragam, atau tidak sesuai spesifikasi sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. | Kecamatan Gunung Kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1 | Kegiatan | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 188 | 1718174 | 25-12-2025 | TOMI EMIRAL | Alat dan Mesin Pertanian | Sulitnya Masyarakat dalam mengolah lahan secara manual (Bantuan Mesing traktor bajak tanah kering/perladangan) | Desa Belui Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | disetujui untuk di akomodir dan dibahas | 5 | Unit | 135.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 189 | 1718210 | 25-12-2025 | TOMI EMIRAL | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Sulitnya masyarakat mendapatkan Air Untuk pertanian sawah | Desa Tambak Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000 | Meter | 250.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 190 | 1718242 | 25-12-2025 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Alat dan Mesin Pertanian | Pengadaan Alsintan kelompok tani : Handtraktor, Mesin bajak sawah, Mesin bajak tanah dan Mesin sedot air | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,dan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | UNIT | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 191 | 1718248 | 25-12-2025 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Pembangunan Saluran irigasi dan Beronjong. Kondisi Rusak berat | Depati Tujuh, Air Hangat,Air Hangat Barat,Air Hangat Timur , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1,5 | Meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 192 | 1718255 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Alat dan Mesin Pertanian | Kualitas alat pertanian petani butuh di tingkatkan | Kecamatan air hangat barat dan air hangat , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | unit | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 193 | 1718266 | 26-12-2025 | MHD. RIDHO SYAHLINDRA, S.AP. MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Petani membutuhkan bibit bersertifikat | Kabupaten kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1000 | Ton | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 194 | 1718269 | 26-12-2025 | JAFRUL | Pengembangan Jalan Usaha Tani | pembangunan buka jalan usaha tani Desa Ladeh | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 400 | Meter | 250.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 195 | 1718271 | 26-12-2025 | JAFRUL | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunanjalan usaha tani (lanjutan) desa Koto lanang | Depati Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | diteruskan ke Perangkat Daerah terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 500 | Meter | 260.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 196 | 1718456 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | sering mengalami kekeringan | tebing tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 200 | meter | 100.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 197 | 1718478 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Pengembangan Jalan Usaha Tani | Belum tersedianya jalan yg layak dan baik | Desa Tutung Bungkuk , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 300 | meter | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 198 | 1718789 | 26-12-2025 | YUZA DWIKI NOPDIAN , SE | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Banyaknya lahan tidur yang dimiliki oleh rakyat terdampak | Desa Koto Lebuh Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Bawang dan Saprodi) | null | 1000 | batang | 150.000.000 | - | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| 199 | 1719022 | 27-12-2025 | ISLAMUDIN | Pengembangan Jalan Usaha Tani | BUTUH PENINGKATAN | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 15 | PAKET | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 200 | 1719026 | 27-12-2025 | ISLAMUDIN | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH | SE KEC KAYU ARO,KAYU ARO BARAT DAN GUNUNG TUJUH, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 10 | PAKET | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 201 | 1719036 | 28-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan mengalami retak, berlubang, bergelombang, atau amblas akibat usia jalan, beban lalu lintas, dan faktor cuaca. | Kecamatan Siulak , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Kegiatan | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 202 | 1719037 | 28-12-2025 | IQBAL ARIF PRATAMA, S.M | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan mengalami retak, berlubang, bergelombang, atau amblas akibat usia jalan, beban lalu lintas, dan faktor cuaca. | Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Kegiatan | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1719109 | 28-12-2025 | ZAKARIA S.Pdl | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Susah nya akses masyarakat untuk ke kebun | Desa pelompek pasar baru, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 3000 | Meter | 250.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 204 | 1719144 | 28-12-2025 | ZAKARIA S.Pdl | Alat dan Mesin Pertanian | Untuk mempermudah petani menggarap lahan | Kecatangunung 7, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5 | unit | 100.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 205 | 1719421 | 29-12-2025 | NOVANDRI PANCA PUTRA, S.Kom | Alat dan Mesin Pertanian | Dibutuhkan sarana dan prasarana pertanian | Semua desa di kecamatan Batang Merangin , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5 | unit | 100.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 206 | 1719427 | 29-12-2025 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum Ada | Desa Manjuto Lempur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 200 | m | 150.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 207 | 1719437 | 29-12-2025 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak parah | Desa Manjuto Lempur Kec.Gunung Raya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | km | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 208 | 1719447 | 29-12-2025 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak | Desa Pasar Kerman Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 209 | 1719453 | 29-12-2025 | FIQRI ELFANDA PUTRA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | sangat di butuhkan sering terjadi banjir | desa Betung Kuning, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 210 | 1719459 | 29-12-2025 | FIQRI ELFANDA PUTRA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | peningkatan jalan | desa betung kuning, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 211 | 1719460 | 29-12-2025 | MUKHSIN ZAKARIA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Belum Ada | Desa Manjuto Lempur Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 300 | m | 170.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 212 | 1719470 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masih mengunakan bibit lokal | desa talang lindung kec. kelling danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Alpukat dan Saprodi) | null | 1 | paket | 100.000.000 | - | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| 213 | 1719481 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa Koto baru kec. kelling danau, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 850 | M | 185.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 214 | 1719490 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa koto patah Kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 215 | 1719493 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa serumpuh pauh kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 216 | 1719494 | 29-12-2025 | MUSRIZAL , M.Si | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | belum ada irigasi | desa pancuran tiga kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 217 | 1719497 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya Bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 218 | 1719498 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Desa Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 219 | 1719499 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak adanya bendung irigasi untuk mengaliri persawahan | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 220 | 1719500 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 221 | 1719501 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat Kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Pungut Tengah , Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 1719502 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Pungut Hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | paket | 150.000.000 | - | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| 223 | 1719503 | 29-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Masyarakat kekurangan alsintan benih dan bibit untuk petani | Desa Baru Kubang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe dan Saprodi) | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 224 | 1719673 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 225 | 1719676 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | desa pasir jaya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 226 | 1719677 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak adanya irigasi di persawahan | desa sungai kuning, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 227 | 1719761 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Ada Jalan | Desa Koto Lebuh Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 228 | 1719777 | 30-12-2025 | ELIYUSNADI, S.Kom, M.Si. | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembangunan saluran irigasi persawahan didusun Pinggir Bukit | Depati Tujuh, Air Hangat, Air hangat Barat, Air Hangat Timur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 400 | Meter | 170.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 229 | 1719788 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa koto lebuh tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 230 | 1719791 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai betung mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 231 | 1719794 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai betung hilir, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 232 | 1719796 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | tidak ada irigasi di persawahan | desa lubuk nagodang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 233 | 1719797 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa siulak deras mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 234 | 1719798 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa sungai langkap, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 235 | 1719800 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa lubuk nagodang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 236 | 1719802 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desa koto kapeh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 237 | 1719803 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | tidak ada jalan, pembukaan jalan baru | desasimpang tutup, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 238 | 1719805 | 30-12-2025 | JONI EFENDI, S.Pd | Pengembangan Jalan Usaha Tani | lanjutan pembukaan jalan baru | desa siulak tenang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 239 | 1719828 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | terdapat banyak jalan yang rusak | jalan RT4 menuju lempur mudik - Kelurahan Lempur Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5000 | M | 235.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 240 | 1719832 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | normalisasi sangat di perlukan | Desa sungai hangat kec. gunung raya, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 241 | 1719949 | 30-12-2025 | MASYKUR | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Sangat di butuhkan | Desa Talang Kemuning Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 242 | 1719967 | 30-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Desa Pungut Mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 1719968 | 30-12-2025 | dr. SURMILA APRI YULISA | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Tidak Adanya Irigasi di Persawahan | Desa Pungut Tengah, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | Paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 244 | 1720011 | 30-12-2025 | Ir. BOY EDWAR, MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | kurangnya bibit/benih bagi petani | DAPIL 3 Kabupaten Kerinci, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 2000 | kilo gram | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 245 | 1720050 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | masyarakat masih kekurangan bibit | Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Cabe Rawit dan Saprodi) | null | 20 | paket | 100.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 246 | 1720055 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Alat dan Mesin Pertanian | petani masih kekurangan alat dan mesin pertanian | Kecamatan Tanah Cogok, Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Batang Merangin, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | paket | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 247 | 1720071 | 30-12-2025 | IRWANDI , S.Sy | Pengembangan Jalan Usaha Tani | masih banyak wilayah yang belum dibangun jalan usaha tani | Kecamatan Tanah Cogok, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 5 | KM | 400.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 248 | 1720116 | 31-12-2025 | MARIYUS | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Jalan rusak | Kecqmatan gunung 7. Kayu aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2 | Km | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 249 | 1720227 | 31-12-2025 | IRWANDRI | Alat dan Mesin Pertanian | usulan kelompok | Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | buah | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 250 | 1720232 | 31-12-2025 | IRWANDRI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | perlu jalan usaha tani | Desa Talang Tinggi, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2500 | meter | 250.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 251 | 1720235 | 31-12-2025 | IRWANDRI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | perlu bibit bawang | Desa Siulak Deras mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Bawang dan Saprodi) | null | 5 | paket | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 252 | 1720240 | 31-12-2025 | IRWANDRI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | rusak | Desa Siulak Deras Mudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2500 | meter | 250.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 253 | 1720241 | 31-12-2025 | LISNUR BANI, S.Pdl | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Rusak | Kec. Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 250 | meter | 100.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 254 | 1720256 | 01-01-2026 | Ir. DEKI ALMITAS , ST | Alat dan Mesin Pertanian | Meningkatkan produksi para petani | Desa Mukai Sebrang, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 8 | unit | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 255 | 1726161 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Alat dan Mesin Pertanian | mempercepat proses penyediaan lahan | Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | Paket | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| 256 | 1726493 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | pengadaan Bibit Kentang | Desa Kersik Tuo, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 200 | Kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 257 | 1726502 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Pengadaan bibit kentang unggul | Desa Sungai Tanduk, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 200 | Kotak | 200.000.000 | - | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| 258 | 1726511 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Pengadaan bibit kentang | Desa Koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 200 | Kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 1726551 | 14-01-2026 | DOSI ARAFIQ | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | pembuatan irigasi lahan pertanian | Desa Koto Baru, Kayu Aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 200 | Meter | 100.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 260 | 1726558 | 14-01-2026 | JUMADI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | melancarkan pembuangan air sawah | desa koto baru, kec. kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2000 | m | 220.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 261 | 1726563 | 14-01-2026 | JUMADI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | melancarkan pembuangan air sawah | desa pasar sungai tanduk, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2000 | m | 220.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 262 | 1726575 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa sungai asam, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 263 | 1726579 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa giri mulyo, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 264 | 1726581 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa guning baru,kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 265 | 1726590 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa sako dua, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 266 | 1726595 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa batu hampar, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 267 | 1726601 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa bento, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 268 | 1726604 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa kampung baru, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 269 | 1726609 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | des kersik tuo, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 270 | 1726619 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa batang sangir, kec kayu aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 271 | 1726626 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa bedeng baru, kec kayu aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 272 | 1726630 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa kebun baru, kec kayuaro barat, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1726634 | 14-01-2026 | JUMADI | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | bibit kentang unggul | desa kampung baru, kec kayu aro, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang G0/G1 dan Saprodi) | null | 100 | kotak | 250.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 274 | 1726790 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | untuk mempermudah masyarakat dalam mengelurkan hasil tani | RT 03 dan RT 05 lemprmudik, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1500 | m | 220.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 275 | 1726842 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | untuk mempermudah masyarakat mengatur perairan air sawah | rt 04 PGE, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 2000 | m | 250.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 276 | 1726862 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | dibutuhkan untuk ketahanan pangaan | desamanjuto, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 277 | 1726864 | 14-01-2026 | BIR ALI | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | dibutuhkan untuk masyarakat | desa lempur, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 278 | 1731400 | 17-01-2026 | ANDESPA KENDORA, SH | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | peningkatan | desapengasi baru, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1 | PAKET | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 279 | 1731739 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pengadaan Bantuan Benih dan Bibit Bersertifikat (Kentang G0, Kentang G2, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Alpokat, Lengkeng, Mangis, Pisang, Jeruk, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung Manis, Jagung Hibrida, Kacang Tanah) | Kebutuhan petani | Sekecamatan kayu aro, kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD (Kentang dan Saprodi) | null | 1000000000 | 10 paket | 200.000.000 | - | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi |
| 280 | 1731749 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan usaha tani dan irigasi | Butuh peningkatan | Sekecamatan kayu aro, kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait. | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 1000000000 | 10 paket | 200.000.000 | - | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
| 281 | 1731750 | 17-01-2026 | ADI PURNOMO, SE, MM | Alat dan Mesin Pertanian | Belum ada | Sekecamatan kayu aro, kayu aro barat dan gunung tujuh, Kab. Kerinci | Kabupaten/ Kota | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Usulan disetujui | - | Disetujui | Diteruskan ke Dinas Instansi terkait | Usulan diterima selanjutnya menunggu persetujuan TAPD | null | 10 | paket | 200.000.000 | - | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |